Peraturan Wali Kota Pekalongan
Nomor : 23
Tanggal : 9 Juli 2024

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
Nomor 23 Tahun 2024

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Pekalongan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran

terukur pada suatu program dan berisi satu atau lebih sub kegiatan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai hasil kegiatan.

17. Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Pekalongan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

(2) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran RPJMD untuk waktu pelaksanaan Tahun 2025.

(3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan :

a. Renja PD Kota Pekalongan Tahun 2025;

b. Rancangan KUA serta PPAS, dan Rancangan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025.

(4) Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja PD Tahun 2025 dengan RKPD Tahun 2025.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas narasi RKPD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Narasi RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

   Memuat latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, kaidah pelaksanaan, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.

b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

   Memuat gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RKPD Tahun 2022 dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

c. BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

   Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah, prioritas pembangunan nasional, provinsi dan Kota Pekalongan tahun 2025, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2025 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat indikator kinerja tahun 2025.

g. BAB VII PENUTUP

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD

Pasal 5

(1) PD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renja PD dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran sub kegiatan, hasil kegiatan dan *outcome* masing-masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda, Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan sebagai bahan penyusunan evaluasi RKPD.

(3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD.

BAB V PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

(1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

d. pergeseran pagu, penghapusan dan/atau penambahan kegiatan/sub kegiatan antar Perangkat Daerah, penambahan dan/atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan/sub

kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan/sub kegiatan.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 9 Juli 2024,

WALI KOTA PEKALONGAN
TTD
STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN
DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 9 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH

NUR PRIYANTOMO

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(R K P D)
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2
1.3 Hubungan Antar Dokumen 4
1.4 Maksud Dan Tujuan 15
1.5 Sistematika RKPD Tahun 2025 15
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 17
2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah 19
2.2 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2023 208
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah 281
2.4 Isu Strategis 286
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 305
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 305
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 316
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 327
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan 327
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025 345
4.3 Inovasi Kebijakan Pembangunan 391
4.4 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 Dengan Menerapkan Konsep Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas 393
4.5 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 Dengan Menerapkan Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial 409
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 417
5.1 Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Pagu Anggaran 417
5.2 Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025 427
5.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2025 792
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 793
6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025 793
6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 794

BAB VII PENUTUP _____ **803**
DAFTAR PUSTAKA _____ **805**

DAFTAR TABEL

Tabel I-1	Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan RPJMD Tahun 2021-2026	5
Tabel I-2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	7
Tabel I-3	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	8
Tabel II-1	Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan	21
Tabel II-2	Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan Kota Pekalongan Tahun n2023	26
Tabel II-3	Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023	27
Tabel II-4	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023	36
Tabel II-5	Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2019-2023	38
Tabel II-6	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)	39
Tabel II-7	Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 (persen)	42
Tabel II-8	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023	47
Tabel II-9	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019	49
Tabel II-10	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2023	49
Tabel II-11	Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2019 - 2023	50
Tabel II-12	Indeks Gini Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023	51
Tabel II-13	Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan, Daerah Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	52
Tabel II-14	Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023	60
Tabel II-15	Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2019-2023	62
Tabel II-16	Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023	65
Tabel II-17	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender di Kota Pekalongan Tahun 2023	66

Tabel II-18 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019 66
Tabel II-19 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2023 66
Tabel II-20 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023 67
Tabel II-21 Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2023 67
Tabel II-22 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023..... 68
Tabel II-23 Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 69
Tabel II-24 Angka Kesakitan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023..... 70
Tabel II-25 Prevalensi Balita Stunting Kota PekalonganTahun 2019-2023 70
Tabel II-26 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 72
Tabel II-27 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 73
Tabel II-28 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 73
Tabel II-29 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 74
Tabel II-30 Jenjang Pendidikan PAUD/TK di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 74
Tabel II-31 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 75
Tabel II-32 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 75
Tabel II-33 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 76
Tabel II-34 Rasio Ketersediaan Sekolah Untuk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023..... 76
Tabel II-35 Rasio Guru dan Murid di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 77
Tabel II-36 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 77
Tabel II-37 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 78
Tabel II-38 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 78

Tabel II-39 Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2019 - 2023 79
Tabel II-40 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan 2019 - 2023....79
Tabel II-41 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI danSMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 79
Tabel II-42 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan tahun 2019 - 2023 80
Tabel II-43 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 80
Tabel II-44 Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 81
Tabel II-45 Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 81
Tabel II-46 Nilai Kemampuan Literasi Dan Numerasi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 82
Tabel II-47 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 82
Tabel II-48 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 83
Tabel II-49 Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi Tahun 2019 - 2024 83
Tabel II-50 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 84
Tabel II-51 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 84
Tabel II-52 Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek Tahun 2019 – 2023 85
Tabel II-53 Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar Tahun 2019 - 2023 86
Tabel II-54 Persentase Balita Usia <6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 86
Tabel II-55 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 87
Tabel II-56 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 87
Tabel II-57 Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran Tahun 2019 - 2023 88
Tabel II-58 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Tahun 2019 - 2023 88
Tabel II-59 Jumlah Penduduk Miskin dan Alokasi Penerima Jamkesmas / Jamkesda di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 89
Tabel II-60 Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 90

Tabel II-61 Cakupan Rumah Tangga Sehat di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 90
Tabel II-62 Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 91
Tabel II-63 Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 91
Tabel II-64 Data Dasar Prasarana Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2023 92
Tabel II-65 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 98
Tabel II-66 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 98
Tabel II-67 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 98
Tabel II-68 Data Saluran Drainase Sekunder di Wilayah Kota PekalonganTahun 2023 99
Tabel II-69 Genangan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 99
Tabel II-70 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 102
Tabel II-71 Perkembangan Jasa Konstruksi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 103
Tabel II-72 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 103
Tabel II-73 Persentase Pelayanan Air Bersih Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 105
Tabel II-74 Rasio Jamban Layak di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2022 106
Tabel II-75 Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 106
Tabel II-76 Rumah Tangga Pengguna Listrik Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 107
Tabel II-77 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan sampai dengan Tahun 2023 107
Tabel II-78 Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP (Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2019 - 2023 109
Tabel II-79 Penyelesaian Pelanggaran Perda di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 109
Tabel II-80 Rasio Jumlah Linmas (Ton Inti) dan Linmas (Kecamatan dan Kelurahan) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 110

Tabel II-81 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 110
Tabel II-82 Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 111
Tabel II-83 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 111
Tabel II-84 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 112
Tabel II-85 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan DTKS di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 112
Tabel II-86 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 113
Tabel II-87 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 114
Tabel II-88 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2019 - 2023 115
Tabel II-89 Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 116
Tabel II-90 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 116
Tabel II-91 Rasio Ketersediaan Pangan Utama Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 119
Tabel II-92 Skor PPH Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 119
Tabel II-93 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 120
Tabel II-94 Konsumsi Energi Per Kapita/tahun di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 120
Tabel II-95 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 122
Tabel II-96 Persentase Tertib Hukum Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 125
Tabel II-97 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 125
Tabel II-98 Pengelolaan Sampah Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 127
Tabel II-99 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 128
Tabel II-100 Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 129
Tabel II-101 Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 130
Tabel II-102 Penerbitan Akta Kematian di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 131
Tabel II-103 Penerbitan Akta Nikah di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 132

Tabel II-104 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 133
Tabel II-105 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 133
Tabel II-106 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 133
Tabel II-107 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 134
Tabel II-108 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021 135
Tabel II-109 Kategori Tingkat Pelayanan Jalan 137
Tabel II-110 Kinerja Ruas Jalan di Kota Pekalongan yang Diukur Dari Tingkat Pelayanan 138
Tabel II-111 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 140
Tabel II-112 Faktor Muat (*Load Factor*) Angkutan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 141
Tabel II-113 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 142
Tabel II-114 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 142
Tabel II-115 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 143
Tabel II-116 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Pekalongan 2019 - 2023 143
Tabel II-117 Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin di Kota Pekalongan 2019 - 2023 144
Tabel II-118 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 144
Tabel II-119 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2019 - 2023 145
Tabel II-120 Jalur Perlintasan Kereta Api di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 146
Tabel II-121 Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 146
Tabel II-122 Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 146
Tabel II-123 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2023 147
Tabel II-124 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2019 - 2023 148
Tabel II-125 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 149
Tabel II-126 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2019-2023 149

Tabel II-127 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 149
Tabel II-128 Persentase Rumah Tangga Pelanggan Telepon Tetap di Kota Pekalongan 2019-2023..... 150
Tabel II-129 Nilai Domain SPBE Kota Pekalongan Tahun 2021-2023..... 150
Tabel II-130 Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator..... 151
Tabel II-131 Persentase Koperasi Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 153
Tabel II-132 Jumlah UMKM di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 153
Tabel II-133 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 154
Tabel II-134 Realisasi PMDN dan PMA di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 154
Tabel II-135 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 155
Tabel II-136 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 155
Tabel II-137 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 157
Tabel II-138 Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kota Pekalongan 158
Tabel II-139 Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ *Event* di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 158
Tabel II-140 Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 159
Tabel II-141 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 159
Tabel II-142 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 160
Tabel II-143 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 160
Tabel II-144 Pemanfaatan Arsip Statis Tahun 2019-2023 161
Tabel II-145 Sertifikasi Kompetensi Kearsipan Tahun 2019 - 2023 162
Tabel II-146 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 (kg) 162
Tabel II-147 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 (kg/kapita/tahun)..... 163
Tabel II-148 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 164
Tabel II-149 Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 164
Tabel II-150 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 165

Tabel II-151 Tingkat Okupansi Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2019-2021 165
Tabel II-152 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 166
Tabel II-153 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2023 166
Tabel II-154 Produksi Padi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023.....167
Tabel II-155 Data Pengurangan Luas Lahan Kota Pekalongan Tahun 2023 167
Tabel II-156 Cakupan Bina Kelompok Petani Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 168
Tabel II-157 Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 169
Tabel II-158 Jumlah Pedagang/Usaha Informal di Kota Pekalongan Tahun 2023 170
Tabel II-159 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 171
Tabel II-160 Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 172
Tabel II-161 Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 172
Tabel II-162 Jumlah IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 173
Tabel II-163 Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 173
Tabel II-164 Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 173
Tabel II-165 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 174
Tabel II-166 Jumlah Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 174
Tabel II-167 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2021.....175
Tabel II-168 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2022 - 2023.....175
Tabel II-169 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2023 176
Tabel II-170 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2019 178
Tabel II-171 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2022 178
Tabel II-172 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2023.....179
Tabel II-173 Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2022 - 2023 181

Tabel II-174 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2022 - 2023 182
Tabel II-175 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 183
Tabel II-176 Jumlah Aparatur yang Melakukan General Check-up dan Mengikuti Diklat Purna Tugas di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 184
Tabel II-177 Riset Unggulan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 184
Tabel II-178 Riset Bersama Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 186
Tabel II-179 Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 188
Tabel II-180 Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 189
Tabel II-181 Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 189
Tabel II-182 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 189
Tabel II-183 Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 190
Tabel II-184 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2019 - 2023 190
Tabel II-185 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 191
Tabel II-186 Penggunaan Air Tanah Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 194
Tabel II-187 Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 195
Tabel II-188 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 195
Tabel II-189 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha 196
Tabel II-190 Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pekalongan dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2019 - 2023 199
Tabel II-191 Inovasi Daerah Bidang Pendidikan 203
Tabel II-192 Inovasi Daerah Bidang Kesehatan 204
Tabel II-193 Inovasi Daerah Bidang Perikanan 205
Tabel II-194 Inovasi Daerah Lainnya 206
Tabel II-195 Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan 207
Tabel II-196 Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan 207
Tabel II-197 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2023 209

Tabel II-198 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2023 219
Tabel II-199 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023 220
Tabel II-200 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2023 222
Tabel II-201 Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2023 224
Tabel II-202 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas Kota Pekalongan Tahun 2023 225
Tabel II-203 Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Pekalongan Tahun 2023 227
Tabel II-204 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2023 228
Tabel II-205 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2023 229
Tabel II-206 Capaian Indikator Urusan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2023 230
Tabel II-207 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Pekalongan Tahun 2023 230
Tabel II-208 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023 231
Tabel II-209 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2023 233
Tabel II-210 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pekalongan Tahun 2023 234
Tabel II-211 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2023 235
Tabel II-212 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2023 235
Tabel II-213 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2023 236
Tabel II-214 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2023 237
Tabel II-215 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2023 238
Tabel II-216 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2023 240
Tabel II-217 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kota Pekalongan Tahun 2023 240
Tabel II-218 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kota Pekalongan Tahun 2023 241
Tabel II-219 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kota Pekalongan Tahun 2023 241

Tabel II-220 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2023 242
Tabel II-221 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Kota Pekalongan Tahun 2023 243
Tabel II-222 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2023 244
Tabel II-223 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kota Pekalongan Tahun 2023 246
Tabel II-224 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kota Pekalongan Tahun 2023 247
Tabel II-225 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kota Pekalongan Tahun 2023 248
Tabel II-226 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kota Pekalongan Tahun 2023 250
Tabel II-227 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 251
Tabel II-228 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2023 252
Tabel II-229 Capaian Indikator Perencanaan Kota Pekalongan Tahun 2023 253
Tabel II-230 Capaian Indikator Keuangan Kota Pekalongan Tahun 2023 254
Tabel II-231 Capaian Indikator Kepegawaian Kota Pekalongan Tahun 2023 255
Tabel II-232 Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekalongan Tahun 2023 255
Tabel II-233 Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan Tahun 2023 256
Tabel II-234 Capaian Indikator Inspektorat Kota Pekalongan Tahun 2023 257
Tabel II-235 Capaian Indikator Kecamatan Kota Pekalongan Tahun 2023.....258
Tabel II-236 Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2023.....260
Tabel II-237 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023.....264
Tabel II-238 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 265
Tabel II-239 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023.....266
Tabel II-240 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023.....267
Tabel II-241 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023.....269

Tabel II-242 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2023.....270
Tabel II-243 Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2023.....271
Tabel II-244 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2023.....276
Tabel II-245 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2023.....278
Tabel II-246 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2023 280
Tabel II-247 Permasalahan Pembangunan Daerah.....282
Tabel II-248 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah 283
Tabel II-249 Isu Strategis 286
Tabel II-250 Daftar PKBM dan SKB Kota Pekalongan Tahun 2023.....299
Tabel III-1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 (persen) 307
Tabel III-2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2019 - 2023 308
Tabel III-3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019 310
Tabel III-4 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2023 311
Tabel III-5 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan 314
Tabel III-6 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan.....315
Tabel III-7 Realisasi, Target dan Proyeksi Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan.....315
Tabel III-8 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan 315
Tabel III-9 Realisasi, Target dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan 316
Tabel III-10 Realisasi, Target dan Proyeksi Inflasi di Kota Pekalongan 316
Tabel III-11 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026 321
Tabel III-12 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026 323
Tabel III-13 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026 325
Tabel IV-1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-

2026 Visi: “Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”.....337
Tabel IV-2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 341
Tabel IV-3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 344
Tabel IV-4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 351
Tabel IV-5 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.....354
Tabel IV-6 Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Nasional 363
Tabel IV-7 Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah 378
Tabel IV-8 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 Dengan Pendekatan Teknokratik.....393
Tabel IV-9 Penyusun RKPD Melalui Pendekatan Partisipatif.....398
Tabel IV-10 Penjabaran Visi dan Misi Wali Kota ke Dalam Program RKPD 399
Tabel IV-11 Konsep Holistik Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan 409
Tabel IV-12 Konsep Integratif Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan 410
Tabel V-1 Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Pagu Anggaran Tahun 2025.....417
Tabel V-2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025.....446
Tabel V-3 Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Pekalongan Tahun 2025 792
Tabel VI-1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 793
Tabel VI-2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025 794

DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 5
Gambar II-1 Peta Orientasi Kota Pekalongan 20
Gambar II-2 Peta Administratif Kota Pekalongan 21
Gambar II-3 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan 22
Gambar II-4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan 23
Gambar II-5 Wilayah Sungai Pemali-Comal 24
Gambar II-6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan 28
Gambar II-7 Peta Rencana Struktur Ruang 29
Gambar II-8 Peta Rencana Pola Ruang 30
Gambar II-9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 37
Gambar II-10 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 38
Gambar II-11 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 39
Gambar II-12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 40
Gambar II-13 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2019 - 2023 41
Gambar II-14 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 - 2023 48
Gambar II-15 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2019 - 2023 48
Gambar II-16 Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 53
Gambar II-17 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 (000 jiwa) 54
Gambar II-18 Perbandiangan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 55
Gambar II-19 Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 Kota Pekalongan Tahun 2018-2022 55
Gambar II-20 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 56
Gambar II-21 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 57

Gambar II-22 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 57
Gambar II-23 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 58
Gambar II-24 Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 59
Gambar II-25 Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 60
Gambar II-26 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2019-2023 61
Gambar II-27 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 62
Gambar II-28 Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023 63
Gambar II-29 Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023 63
Gambar II-30 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2019-2023 64
Gambar II-31 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2019-2023 68
Gambar II-32 Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023 71
Gambar II-33 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 72
Gambar II-34 Persentase Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan Periode Tahun 2019 - 2023 85
Gambar II-35 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 114
Gambar II-36 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019- 2023 115
Gambar II-37 Jumlah Perempuan Dalam Jabatan ASN di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 117
Gambar II-38 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 117
Gambar II-39 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2018-2023 118
Gambar II-40 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 123
Gambar II-41 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2019 - 2023 124
Gambar II-42 Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2023 126

Gambar II-43 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 130
Gambar II-44 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 131
Gambar II-45 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 134
Gambar II-46 Cakupan Unmet Need KB di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 136
Gambar II-47 Peta V/C Ratio Ruas Jalan di Kota Pekalongan 137
Gambar II-48 Jumlah Arsip yang Dipelihara dan Diselamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2023 161
Gambar II-49 Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2023 171
Gambar II-50 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2019-2023 191
Gambar II-51 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 192
Gambar II-52 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 192
Gambar II-53 Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 193
Gambar II-54 Ketersediaan Listrik di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 194
Gambar II-55 Perkembangan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 197
Gambar II-56 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 197
Gambar II-57 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2024 198
Gambar II-58 Daya Saing Daerah Berdasarkan Skor Pilar Dalam Ekosistem Inovasi 199
Gambar III-1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023 306
Gambar III-2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2019 - 2023 307
Gambar III-3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 - 2023.....309
Gambar III-4 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2019 - 2023.....310
Gambar IV-1 Ilustrasi Visi dan Misi 334
Gambar IV-2 Konsep Tematik Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan 409

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran perencanaan pembangunan tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan rencana pembangunan tahun keempat atas RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Penyusunan RKPD Tahun 2025 diawali dengan penyusunan rancangan awal yang dimulai pada minggu pertama bulan Desember, 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana, sebagaimana tertuang dalam Pasal 74 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, RKP Tahun 2025 dan program strategis nasional. Selain itu, juga memperhatikan hasil evaluasi capaian pembangunan tahun 2023, permasalahan di Kota Pekalongan, serta isu strategis dan potensi daerah.

Dokumen RKPD Tahun 2025 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026, Pembangunan Daerah pada Tahun 2025 ditujukan untuk “Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Dengan Dipayungi Nilai-Nilai Religiusitas”, dengan arah kebijakan meliputi :

a. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
b. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan;

c. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan;

d. Peningkatan *link and match* ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing;

e. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus;

f. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

g. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian dan pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;

h. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

i. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

j. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal;

k. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah;

l. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi *reward and punishment.*

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan dengan Kabupaten Dati II Pekalongan, dan Kabupaten Dati II Batang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan;
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 26);
26. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

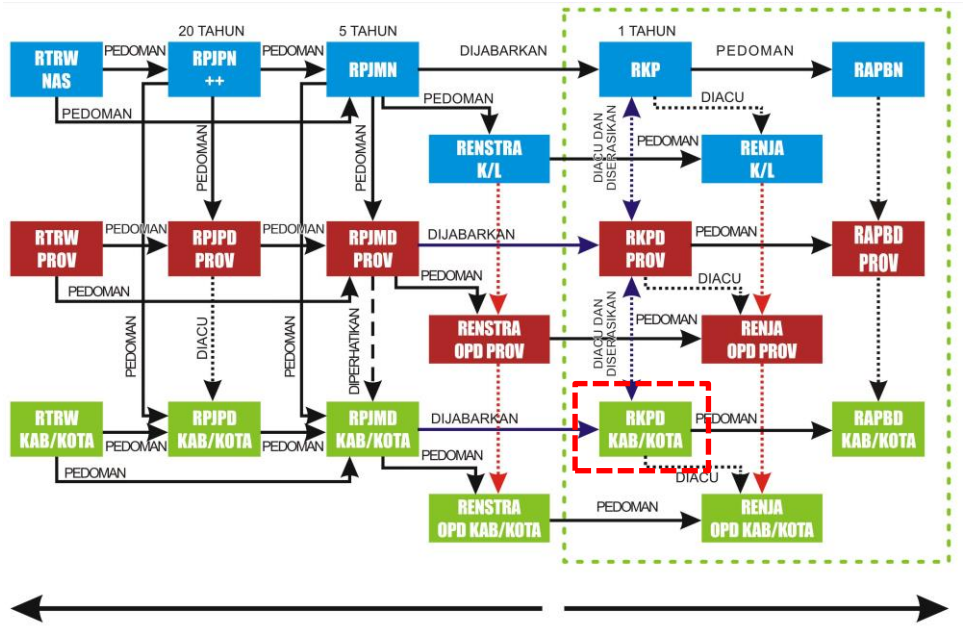
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Kebijakan pembangunan daerah Kota Pekalongan yang dituangkan dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan dokumen perencanaan Kota Pekalongan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Pemerintahan Daerah, maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur penyusunan dokumen perencanaan.

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 berpedoman/menjabarkan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, serta mengacu RKP Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Bagan hubungan antar dokumen disajikan dalam Gambar I-1 berikut.



Gambar I-1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

1.3.1 RKPD dengan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan menjabarkan rencana tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan penjabaran atas rencana pembangunan tahun keempat RPJMD Tahun 2021-2026. Arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 yang dituangkan di dalam RKPD tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan tahun 2025 pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Tabel I-1 Hubungan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan RPJMD Tahun 2021-2026

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025
Tema	*Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Dengan Dipayungi Nilai-Nilai Religiusitas*	*Tema*	*Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan Dan Kemandirian Dengan Dipayungi Nilai-Nilai Religiusitas*
1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya

No.	Arah Kebijakan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025
2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan
4	Peningkatan *link and match* ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	4	Peningkatan *link and match* ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing
5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus
6	Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	6	Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian dan pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian dan pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal
11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam menjaga kondusifitas wilayah
12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi *reward and punishment*	12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi *reward and punishment*

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2024

1.3.2 RKPD Kota Pekalongan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Sinergitas rencana pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat diperlukan. RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 disinergikan dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Namun demikian, dikarenakan periode RPJMD Provinsi Jawa Tengah berakhir pada tahun 2023, maka prioritas dan fokus pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025 didasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.

Tabel I-2 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO.	**PRIORITAS**	**NO.**	**PRIORITAS**
1	Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	6	Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
		9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
		10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
		2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
		3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan
		4	Peningkatan *link and match* ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing
		5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus

PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO.	**PRIORITAS**	**NO.**	**PRIORITAS**
3	Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan	7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
4	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	11	Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
		12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi *reward and punishment*

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

1.3.3 RKPD Kota Pekalongan dengan RKP Tahun 2025

Rencana pembangunan Kota Pekalongan juga diselaraskan dengan rencana pembangunan Pemerintah Pusat, yaitu antara RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2025. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2025 diselaraskan untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional pada tahun 2025 yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Tema RKP Tahun 2025 adalah. "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2024 dengan prioritas nasional disajikan dalam Tabel I-3 berikut.

Tabel I-3 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO.	**PRIORITAS**	**NO.**	**PRIORITAS**
1	PN1 Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	11	Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam mewujudkan kondusivitas wilayah
2	PN2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru		
3	PN3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	6	Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
		7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
		8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
4	PN4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
		3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan

PRIORITAS NASIONAL		PRIORITAS KOTA PEKALONGAN	
NO.	**PRIORITAS**	**NO.**	**PRIORITAS**
		5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus
5	PN5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan
6	PN6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
		4	Peningkatan *link and match* ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing
7	PN7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi *reward and punishment*
8	PN8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

1.3.4 RKPD dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2025. Renja memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.3.5 RKPD dengan KUA PPAS dan APBD

RKPD menjadi pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dibahas dan disepakati bersama DPRD. Selanjutnya, masuk ke tahapan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1.3.6 RKPD dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, terdapat 5 (lima) urusan yang selanjutnya dikaitkan dengan program pada RKPD, yaitu:

1. Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

Ketiga pelayanan dasar tersebut dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Pendidikan.

2. Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiancy Virus*).

Pelayanan dasar tersebut dilaksanakan melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang pekerjaan umum yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik, dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

4. Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan dasar tersebut dilaksanakan melalui Program Pengembangan Perumahan.

5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, dilaksanakan melalui Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana, dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dilaksanakan melalui Program Penanggulangan Bencana.

6. Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Sosial;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Sosial;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Sosial;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, dilaksanakan melalui Program Rehabilitasi Sosial;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota, dilaksanakan melalui Program Penanganan Bencana.

1.3.7 RKPD dengan Sustainable Development Goals (SDG's)

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDGs ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu: Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia dikembangkan sejumlah 319 indikator, dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah 222 indikator. Setelah dilakukan penapisan sesuai dengan konteks Kota Pekalongan didapatkan indikator yang relevan dan sesuai konteks sejumlah 188 indikator.

1. Pilar Pembangunan Sosial

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDG's) Pilar Pembangunan Sosial terdiri dari 5 Tujuan, 30 target dan 106 indikator. Namun hasil penapisan sesuai dengan konteks Kota Pekalongan pilar pembangunan sosial terdiri dari 5 Tujuan, 23 Target dan 40 indikator, yang didukung dengan program sebagai berikut:

1) Program Kepegawaian Daerah.
2) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
4) Program Pemberdayaan Sosial.
5) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
6) Program Pembinaan Perpustakaan.
7) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
8) Program Penanganan Bencana.
9) Program Penanganan Kerawanan Pangan.
10) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
11) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
12) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
13) Program Pengelolaan Pendidikan.
14) Program Pengembangan Kurikulum.
15) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
16) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
17) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
18) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.
19) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
20) Program Perlindungan Perempuan.
21) Program Rehabilitasi Sosial.
22) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

2. Pilar Pembangunan Ekonomi

Pada Pilar Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 5 Tujuan 54 target dan 72 indikator. Namun hasil penapisan sesuai dengan konteks Kota Pekalongan pilar pembangunan ekonomi terdiri dari 5 Tujuan, 11 Target dan 16 indikator, yang didukung dengan program sebagai berikut:

1) Program Hubungan Industrial.
2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
3) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.
4) Program Pelayanan Penanaman Modal.
5) Program Pemasaran Pariwisata.
6) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).

8) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
9) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
10) Program Penempatan Tenaga Kerja.
11) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
12) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
13) Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
14) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
15) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
16) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
17) Program Pengembangan Ekspor.
18) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
19) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
20) Program Pengembangan UMKM.
21) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota.
22) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
23) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
24) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
25) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
26) Program Penyelenggaraan Jalan.
27) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.
28) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
29) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.
30) Program Promosi Penanaman Modal.

3. Pilar Pembangunan Lingkungan

Pada Pilar Pembangunan Lingkungan, terdiri dari 6 Tujuan, 29 target dan 64 indikator. Namun hasil penapisan sesuai dengan konteks Kota Pekalongan pilar pembangunan lingkungan terdiri dari 6 Tujuan, 11 Target dan 13 indikator, yang didukung dengan program sebagai berikut:

1) Program Kawasan Permukiman.
2) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
4) Program Penanggulangan Bencana.
5) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
6) Program Penataan Bangunan Gedung.
7) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
8) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
9) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
10) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
11) Program Pengelolaan Permuseuman.
12) Program Pengelolaan Persampahan.
13) Program Pengembangan Kebudayaan.
14) Program Pengembangan Permukiman.
15) Program Pengembangan Perumahan.

16) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.
17) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
18) Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
19) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
20) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
21) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
22) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
23) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
24) Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
25) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, terdiri dari 1 Tujuan, 8 target dan 32 indikator. Namun hasil penapisan sesuai dengan konteks Kota Pekalongan pilar pembangunan hokum dan tata kelola terdiri dari 1 Tujuan, 8 Target dan 16 indikator, yang didukung dengan program sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
3) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
4) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
5) Program Pencatatan Sipil.
6) Program Pendaftaran Penduduk.
7) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
8) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
9) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
10) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
11) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
12) Program Perlindungan Khusus Anak.

1.3.8 RKPD dengan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus semakin meningkat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Kepegawaian akan sangat terkait dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi pada dasarnya merupakan proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). Dalam bahasa yang lain, reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi dengan meningkatkan kualitas regulasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan mencakup beberapa area perubahan yaitu:

1) Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD.

2) Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO.
3) Penataan sistem manajemen SDM aparatur, dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat aparatur, pengadaan CPNS Pemerintah Kota Pekalongan, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan peningkatan kualitas PNS melalui fasilitasi tugas/izin belajar.
4) Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD.
5) Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dilakukan melalui penerbitan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
7) Penataan peraturan perundang-undangan, dimana produk hukum Pemerintah Kota Pekalongan dapat diakses melalui alamat https://jdih.pekalongankota.go.id.
8) Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan), dilakukan melalui sosialisasi dan diklat TOT pengembangan budaya kerja, penerapan nilai-nilai budaya kerja dan etika PNS, serta pembentukan kelompok budaya kerja pada setiap PD.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, telah dilakukan peningkatan SMM/sertifikasi ISO pada PD, terutama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Beberapa PD yang telah memperoleh sertifikasi ISO yaitu: 1) ISO 9001:2008 oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga; 2) ISO 9001:2008 di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Balai Kesehatan Paru Masyarakat (BKPM); 3) ISO 9001:2008 oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu; 4) ISO 9001:2008 oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; 5) ISO 9001:2015 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 6) ISO 9001:2015 oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta; 7) ISO 9001:2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.4 Maksud Dan Tujuan

1.4.1 Maksud

RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk:

a. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025;
b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2025.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 yaitu:

a. Menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah; dan
b. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dalam menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2025.

1.5 Sistematika RKPD Tahun 2025

Sistematika RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan dokumen RKPD dengan dokumen rencana

pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi RPJMD sampai tahun 2023, hasil evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2023, hasil evaluasi SDG's tahun 2023, permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis.

1. Kondisi Umum Kondisi Daerah menjelaskan tentang kondisi daerah mencakup aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
2. Evaluasi pelaksanaan RPJMD sampai tahun 2023 yang mencakup capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut urusan/bidang urusan pemerintahan daerah, realisasi target kinerja, SPM, SDG's dan Perangkat Daerah penanggung jawab.
3. Permasalahan pembangunan daerah berisi rumusan umum permasalahan pembangunan daerah berdasarkan IKU tahun 2025 dan memperhatikan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program, SPM dan SDG's tahun 2023.
4. Isu strategis yang dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi sampai tahun 2023 dan perkiraan tahun 2025, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah tahun 2025, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan memperhatikan permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Tengah, pokok-pokok pikiran DPRD serta keterkaitan arah kebijakan Kota Pekalongan dengan Pusat dan Provinsi.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program pembangunan daerah tahun 2025 yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan dokumen rencana pembangunan lainnya yang relevan.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisi Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Daerah Kota Pekalongan yang ditargetkan di tahun 2025.

BAB VII PENUTUP

Berisi penegasan arah kebijakan, prioritas dan fokus RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 yang telah sinkron dengan kebijakan Pusat maupun Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah (terdapat 35 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari 6 kota dan 29 kabupaten). Luas wilayah Kota Pekalongan hanya 0,14 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km. Kota Pekalongan dapat dicapai melalui transportasi darat jalan raya serta jalur kereta api.

Dengan telah beroperasinya jalan tol trans Jawa sejak Desember 2018, seluruh wilayah yang dilewati jalur jalan tol trans Jawa memiliki posisi yang relatif sama. Posisi strategis wilayah sangat ditentukan oleh seberapa besar daya tarik dan peran suatu daerah tersebut. Oleh karena itu, masing-masing daerah berkompetisi, meningkatkan daya tarik dan perannya, agar tetap dan semakin menarik kunjungan dari willayah lainnya. Kota Pekalongan, dengan segala potensi dan permasalahan yang dimilikinya, harus terus meningkatkan daya tarik dan perannya, sehingga dapat lebih mendorong laju pertumbuhan ekonominya, dan pada akhirnya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara historis-morfologis, Kota Pekalongan yang berbentuk linier dengan kecenderungan ke arah Barat dan Timur menandakan kuatnya jalur transportasi regional pantai Utara Pulau Jawa. Dalam perkembangannya bentuk linier kota juga berkembang ke arah Selatan, yang menunjukkan keterkaitan erat Kota Pekalongan dengan kawasan sekitarnya, terutama dengan Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini tentunya menjadi keunggulan dan daya tarik yang bersifat geografis alami.

Kota Pekalongan, sebagaimana wilayah di Pantura Jawa lainnya, sekarang ini terus mengalami bencana sebagai akibat dari pasang naik air laut atau rob. Banjir rob yang terjadi di Kota Pekalongan disebabkan kombinasi dari penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) dan dinamika air laut (*pasang surut, kenaikan muka air laut dan gelombang el nino serta la nina*). Para ilmuwan telah mengamati perubahan-perubahan pada indikator-indikator iklim di Indonesia selama beberapa dekade terakhir, dan secara bersamaan membuat proyeksi menggunakan model AR-4 IPCC untuk menilai perubahan-perubahan masa depan dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- Kenaikan suhu permukaan rata-rata akan mencapai 0,8 ° C-1 ° C hingga tahun 2020-2050 dibandingkan dengan periode iklim akhir pada abad ke-20.
- Peningkatan suhu permukaan laut akan mencapai 1-1,2 ° C pada 2050 dibandingkan pada 2000.
- Pada periode 2001-2100, akan terjadi perubahan-perubahan yang berarti (terutama pada periode 2080-an) dengan kecenderungan meningkatnya curah hujan pada musim hujan dan penurunan pada bulan pancaroba.
- Kenaikan permukaan laut (SLR) diproyeksikan mencapai 35 - 40 cm pada 2050 dibandingkan dengan pada 2000. SLR maksimum dapat mencapai 175 cm pada 2100.

Dalam Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) Kota Pekalongan merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai tertinggi sebagai kota percontohan RAN-API dengan nilai 5. Kota Pekalongan masuk dalam wilayah rentan terhadap perubahan iklim dalam RAN-API meliputi banjir, rob, air bersih, sanitasi, dan kekeringan.

Genangan akibat banjir rob terus meluas dan dirasakan hampir di seluruh wilayah bagian Utara Kota Pekalongan, bahkan sudah meluas sampai ke wilayah bagian Barat dan Timur Kota Pekalongan. Namun demikian, kondisi ini diharapkan akan berkurang secara signifikan, sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi serta *stakeholder* lain untuk menangani permasalahan banjir rob di Kota Pekalongan.

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2019, antara lain:

- Pengendalian Banjir Sistem Sungai Loji / Pekalongan / Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Miliar dari APBN),
- Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Miliar dari APBN),
- Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Miliar dari APBN),
- Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Miliar dari APBN),
- Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong sistem Kali Boyo untuk melayani Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan dengan kapasitas rencana sebesar 450 liter / detik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir melaksankan Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Sungai di Kota Pekalongan. Selain itu Desain atas sungai yang melintasi Kota Pekalongan juga telah selesai disusun oleh Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah menyusun Revisi *Masterplan* Drainase Kota Pekalongan Tahun 2020 sebagai pedoman dalam penataan sistem drainase kota yang lebih terarah. Pihak lain non pemerintah seperti akademisi di antaranya Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor banyak terlibat dalam berbagai kajian/studi. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir melibatkan *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) dari Amerika Serikat.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ikut terlibat dalam penanganan banjir rob di Kota Pekalongan di antaranya adalah LSM Bintari melalui Kajian *Loss and Damage* Banjir Rob Pekalongan Raya (2016) serta pembuatan *pilot project* MCK adaptif (2020). *Mercy Corps* Indonesia turut membantu dalam berbagai kajian melalui program *flood resilience city* untuk Kota Pekalongan di antaranya dengan membuat kajian kerentanan (2020) dan saat ini masih berjalan dengan kajian-kajian terkait, dengan melibatkan berbagai *stakeholder* mulai dari akademisi hingga kementerian maupun pihak lain. LSM Kemitraan juga turut membantu Kota Pekalongan melalui Aksi Adaptasi Perubahan Iklim dengan pendekatan 3S yaitu *Safekeeping - Surviving - Sustaining* (Melindungi - Mempertahankan - Melestarikan). Selain itu *Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard* (HHSK) Belanda melalui *Witteven Bos* juga telah membuat kajian tentang *Pekalongan Coastal Zone, Coastal Erotion and Flooding in the city of Pekalongan* yang dibiayai oleh HHSK Belanda tahun 2016.

Selain gambaran di atas, Kota Pekalongan tetap menyimpan berbagai potensi yang relatif besar dengan sejarah perkembangan yang relatif panjang. Potensi tersebut adalah berupa kerajinan batik dan perikanan.

Seperti diketahui bersama, batik sudah sangat melekat dan identik dengan Kota Pekalongan. Bahkan UNESCO telah mengakuinya dengan memasukkan Kota Pekalongan sebagai salah satu Kota Kreatif Dunia untuk kategori *Craft and Folk Art* (Kerajinan dan Kesenian Rakyat). Kerajinan yang diakui tidak lain adalah kerajinan batik. Potensi yang besar ini telah mewarnai hampir sebagian besar dinamika ekonomi penduduk Kota Pekalongan.

Potensi kedua adalah perikanan yang saat ini masih sangat terpuruk sebagai dampak meningkatnya frekuensi kejadian rob. Namun demikian, semangat untuk mengembalikan kejayaan perikanan Kota Pekalongan masih terus dijaga sampai dengan sekarang ini. Pemerintah Kota Pekalongan sendiri masih terus berupaya untuk terus mengajukan permohonan demi terwujudnya Pelabuhan Perikanan *Onshore* di Kota Pekalongan.

Kedua potensi tersebut harus terus dikembangkan agar dapat semakin mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan, yaitu dengan semakin memperkuat sektor sekunder dan sektor tersier Kota Pekalongan. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki Kota Pekalongan selama ini, ke depan harus dapat bertransformasi menjadi keunggulan kompetitif (*competitive advantage*).

Secara umum, gambaran umum kondisi Kota Pekalongan dapat diuraikan sebagai berikut.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai utara Pulau Jawa, dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut dengan posisi geografis antara 6 50’ 42" s.d. 6 55’ 44” Lintang Selatan dan 109 37’ 55” s.d. 109 42’ 19” Bujur Timur serta dengan koordinat fiktif 510.00 - 518.00 Km membujur dan 517.75 - 526.75 Km melintang. Batas wilayah secara administratif adalah:

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kab. Batang
- Sebelah Selatan : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang
- Sebelah Barat : Kab. Pekalongan

Berdasarkan Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, luas wilayah Kota Pekalongan adalah 45,25 km^2. Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 Ha atau 46,42 km^2. Perubahan ini dikarenakan adanya:

a. Pemutakhiran garis pantai sesuai Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
b. Pemutakhiran segmen batas wilayah administrasi;
c. Perbaikan atas hasil kajian teknis dari pusat pemetaan batas wilayah pada Badan Informasi Geospasial terhadap perhitungan luas wilayah.

Dengan demikian maka luas wilayah Kota Pekalongan bertambah 1,16 Ha yang sebagian besar disebabkan oleh pemutakhiran garis pantai.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) menetapkan Kota Pekalongan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sebagai PKW maka diharapkan Kota Pekalongan dapat berperan menjadi pusat pengembangan bagi wilayah di sekitarnya, yang meliputi Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah juga menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan Kawasan Petanglong meliputi: sektor primer adalah perikanan; sektor sekunder adalah tekstil, batik, dan pengolahan ikan; serta sektor tersier adalah jasa dan perdagangan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

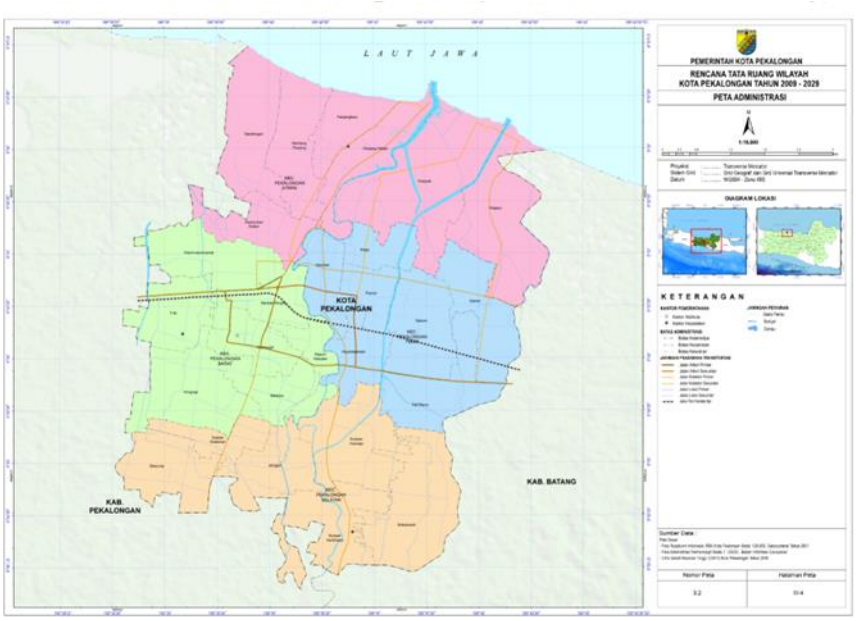
Didukung dengan posisi strategis Kota Pekalongan di jalur Pantai Utara Jawa, maka Kota Pekalongan memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan daerah lainnya. Keunggulan ini diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar II-1 Peta Orientasi Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2024

Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 km. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan (diberlakukan per 1 Januari 2015). Penggabungan kelurahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, melaksanakan fungsi pemerintahan secara efisien serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar II-2 Peta Administratif Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2024

Berdasarkan peta administratif tersebut bahwa arah pengembangan wilayah kota terkonsentrasi di sepanjang koridor jalan, terutama jalan nasional arat Barat dan Timur serta jalan ke arah Selatan. RTRW Kota Pekalongan juga menetapkan sepanjang koridor-koridor jalan tersebut sebagai kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa.

Tabel II-1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Persentase Luas (persen)
1	Kecamatan Pekalongan Barat	10,00	22
2	Kecamatan Pekalongan Timur	9,63	21
3	Kecamatan Pekalongan Selatan	11,47	25
4	Kecamatan Pekalongan Utara	15,32	33
	TOTAL	46,42	100

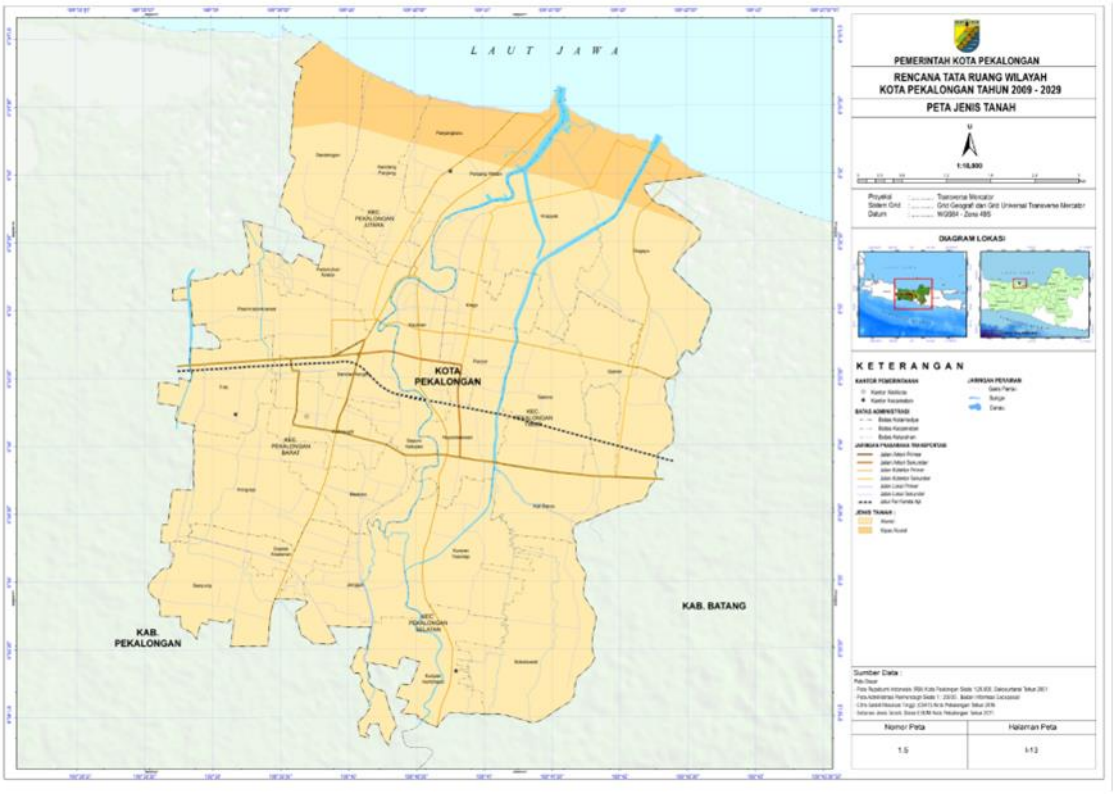
Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2024

Kecamatan Pekalongan Barat terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Medono, Podosugih, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Pasirkratonkramat, Tirto dan Pringrejo. Kecamatan Pekalongan Timur terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Noyontaansari, Kauman, Poncol, Klego, Gamer, Setono dan Kali Baros. Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Banyurip, Buaran Kradenan, Jenggot, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo dan Sokoduwet. Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan yaitu Kelurahan Krapyak, Kandang Panjang, Panjang Wetan, Padukuhan Kraton, Degayu, Bandengan dan Panjang Baru. Pekalongan Utara adalah kecamatan terluas di Kota Pekalongan yaitu 15,32 km^2 atau 33 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan.

2.1.1.2 Topografi dan Jenis Tanah

Secara topografis, wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan pada sebagian wilayah terletak antara 0 - 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8 persen. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalangan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kawasan Pabean Kelurahan Padukuhan

Kraton Kecamatan Pekalongan Utara. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan penelitian dan pendapat beberapa ahli, penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan telah terjadi secara siginifikan dan menjadi salah satu ancaman bagi pengembangan wilayah kota ke depan sehingga harus mendapatkan perhatian yang sangat serius untuk menanggulanginya.



Gambar II-3 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2024

Dengan kondisi wilayah yang sangat datar dan terdapat kawasan yang memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut, berimplikasi terhadap pengelolaan sumberdaya air, terutama drainase. Tantangan pengelolaan sumberdaya air dan drainase ini tentunya akan semakin berat dihadapi Kota Pekalongan, apalagi dengan adanya fenomena pemanasan global dan perubahan iklim yang berimplikasi terjadinya kenaikan permukaan air laut.

Terdapat 4 (empat) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua serta alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. Sebaran tanah alluvial hidromorf yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran alluvial kelabu tua di wilayah Timur dan Barat kota serta sebaran tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah Selatan kota.

Jenis tanah alluvial hidromorf mempunyai ciri-ciri fisik warna kelabu, bertekstur liat, dan memiliki permeabilitas (*water run off*) lambat. Jenis tanah ini biasanya banyak digenangi oleh air sehingga warnanya tua kelabu sampai kehitaman. Daerah penyebarannya terdapat di berbagai ketinggian tetapi umumnya di dataran rendah dengan wilayah relatif datar. Jenis tanah alluvial hidromorf cocok dimanfaatkan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Jenis tanah alluvial kelabu tua mempunyai ciri-ciri yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf, namun warnanya yang kelabu tua. Jenis tanah alluvial kelabu tua cocok juga digunakan untuk pertanian, pertambakan dan permukiman. Demikian juga jenis tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan memiliki ciri-ciri

yang sama dengan jenis tanah alluvial hidromorf dan cocok dimanfaatkan untuk penggunaan pertanian, pertambakan dan permukiman.

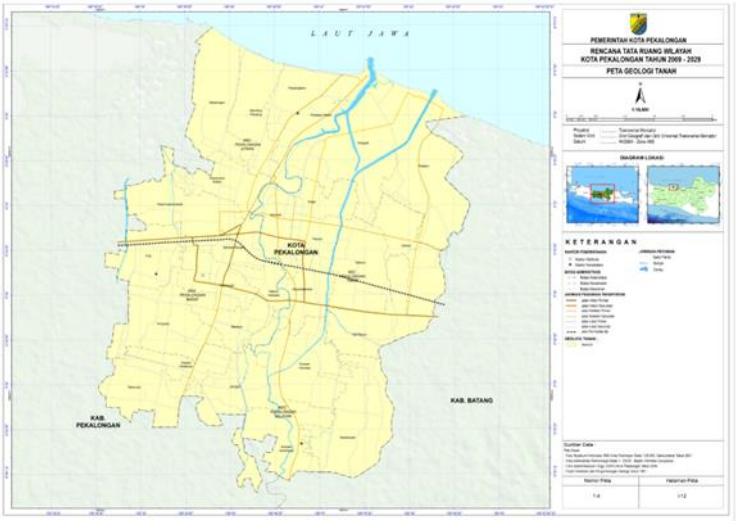
Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir, yaitu merupakan kawasan hilir dan muara beberapa sungai. Dengan kondisi tersebut maka kondisi ini berimplikasi terhadap sebagian wilayah Kota Pekalongan, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat, sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut, curah hujan dan kondisi aliran sungai dari hulu. Bahkan di beberapa tempat sudah mengalami genangan permanen karena elevasinya yang sangat rendah, di bawah permukaan air laut. Kecenderungan yang terjadi adalah semakin meningkatnya kawasan rob dan genangan pada kawasan permukiman, terutama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dan Pekalongan Barat. Sebaran permukiman berada pada seluruh wilayah kota, terutama sepanjang koridor jalan karena seluruh wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang datar.

2.1.1.3 Geologi

Berdasarkan informasi batuan yang berasal dari analisis Peta Geologi Lembar Pekalongan skala 1:1000 yang bersumber dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Bandung, bahwa Litologi batuan di Kota Pekalongan merupakan endapan sedimen alluvium, terbentuk pada jaman holosen periode tersier dengan ketebalan ± 150 meter yang terdiri dari kerikil, pasir, lanau dan lempung, endapan sungai dan rawa. Endapan alluvium ini terbentuk menutupi lapisan batuan anggota breksi formasi Ligung yang bersusunan andesit, lava andesit hornblend dan tufa yang merupakan bagian atas formasi Ligung yang terbentuk pada pliosen akhir- pliosen awal. Lapisan alluvium pada permukaan di sepanjang pantai didominasi oleh pasir sedangkan di daerah muara adalah lempung, endapan sungai dan rawa.

Morfologi pantai di bagian Barat, berpasir halus yang bercampur dengan vegetasi seperti semak belukar atau ladang dan di pantai bagian Timur adalah berpasir cenderung berlumpur. Bentuk lahan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi 2 bentukan yaitu dataran alluvial dan dataran alluvial pantai. Dataran alluvial merupakan hasil proses *fluvial* sedangkan dataran alluvial pantai merupakan hasil dari proses *marine*.

Satuan-satuan bentuk lahan yang berada pada kelompok dataran alluvial semuanya tersusun atas batuan yang berasal dari pengendapan material yang dibawa oleh aliran air karena diendapkan oleh aliran air maka terdapat sortasi yang baik. Material yang berukuran halus akan diendapkan belakangan dibandingkan dengan material yang berukuran kasar.

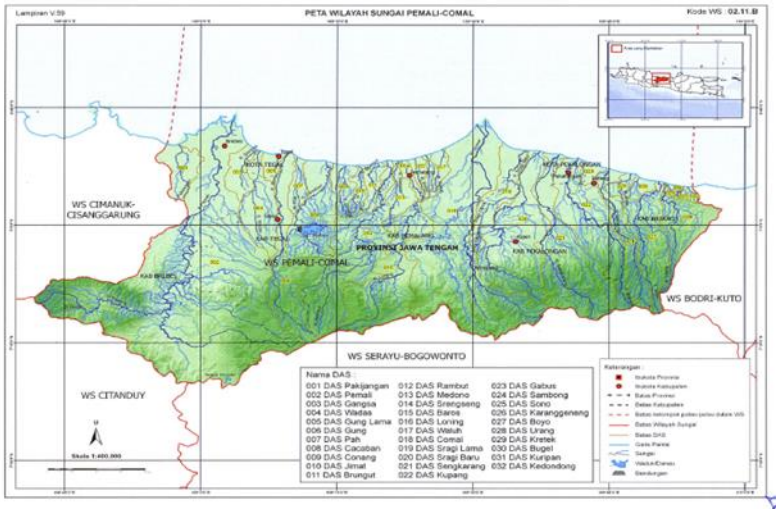


Gambar II-4 Peta Geologi Wilayah Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2024

2.1.1.4 Hidrologi

Kota Pekalongan sebagai kota yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dialiri beberapa sungai. Terdapat 4 (empat) sungai yang melewati wilayah Kota Pekalongan yaitu Sungai Meduri, Bremi, Pekalongan dan Banger. Keempat sungai tersebut termasuk ke dalam 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Sengkarang, DAS Kupang dan DAS Gabus.



Gambar II-5 Wilayah Sungai Pemali-Comal

Sumber: Keppres No. 12 Tahun 2012 tentang Wilayah Sungai, 2024

Daerah Irigasi (DI) yang berada di wilayah Kota Pekalongan meliputi DI kewenangan Pemerintah, DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan. DI kewenangan Pemerintah meliputi DI Kupang-Kroempeng seluas 919 Ha dan DI Pesantren Kletak seluas 271 Ha. DI kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi DI Asem Siketek/Kesetu seluas 262 Ha. Sedangkan DI kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan meliputi DI tambak yang terletak di wilayah Utara Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan merupakan dataran rendah yang hanya memiliki elevasi maksimum sekitar 6 mdpl menyebabkan laju aliran sungai menuju muara tidak terlalu deras karena berada pada wilayah muara sehingga setiap limbah yang dibuang ke sungai banyak yang mengendap. Ditambah lagi dengan beban pencemaran yang sangat besar dari buangan limbah rumah tangga dan industri di wilayah Kota Pekalongan maupun dari wilayah hulu (terutama Kabupaten Pekalongan) maka air permukaan di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa dimanfaatkan sebagai air baku untuk air bersih. Di wilayah Kota Pekalongan muncul suatu keyakinan, jika air sungainya berwarna-warni atau sangat kotor maka menunjukkan perekonomian sedang bagus. Air sungai yang kotor tersebut menunjukkan limbah buangan industri di Kota Pekalongan meningkat karena terjadinya proses produksi industri yang meningkat. Sebaliknya, jika air sungai relatif bersih maka menandakan berkurangnya proses produksi yang dilakukan industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2017 tentang Cekungan Air Tanah (CAT) di Indonesia maka wilayah Kota Pekalongan termasuk dalam bagian CAT Pekalongan-Pemalang. CAT Pekalongan-Pemalang berlokasi pada 1090 18’ 45,31” - 1090 51’ 52,35” Bujur Timur dan 060 46’ 33,52” - 070 13’ 24,20” Lintang Selatan, yang meliputi wilayah Kabupaten Pemalang, Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan. Air baku untuk air bersih Kota Pekalongan berasal dari wilayah Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Sumber air baku dari wilayah Kabupaten Pekalongan dan Batang meliputi: a) sumber air baku dari Program SPAM Regional Petanglong Tahap 1 yang terletak di Desa Jambangan Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan; b) sumber air baku dari Sungai Kupang Sambong di Desa Cepagan Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, pemanfaatan melalui Instalasi Pengolah Air (IPA); c) sumber air baku dari mata air

Desa Kembanglangit Kecamatan Blado Kabupaten Batang, pemanfaatan dengan pengambilan langsung; d) sumber air baku dari mata air di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, pemanfaatan dengan pengambilan langsung, pemanfaatan melalui IPA (Instalasi Pengolahan Air). Sumber air baku bagi air minum dari wilayah Kota Pekalongan berasal dari pemanfaatan air tanah karena tidak adanya sumber mata air dan air permukaan yang sudah tidak memungkinkan dimanfaatkan sebagai sumber air baku.

Dengan memperhatikan faktor topografi, geologi dan kondisi hidrogeologi, sumber daya air tanah di wilayah Kota Pekalongan termasuk ke dalam kategori air tanah dataran pantai sehingga kondisi air tanahnya sebagian besar merupakan air tanah dangkal. Air tanah dataran pantai ditutupi oleh *al gluvium* dan endapan pantai sebagai hasil rombakan batuan yang lebih tua. Kondisi ini dapat kita temui di sebagian besar wilayah, ketika kita melubangi tanah 1 (satu) meter saja maka akan segera keluar rembesan air tanah. Dengan memperhitungkan sebaran batuan, vegetasi dan kemiringan lereng, maka diperkirakan 30 persen dari jumlah curah hujan tersebut merupakan surplus pengisian kembali air tanah.

Karena ketersediaan air tanah yang cukup memadai maka beberapa lokasi telah dilakukan pengeboran sumur tanah dalam yang dikelola oleh PDAM Kota Pekalongan maupun PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). Tetapi dengan kecenderungan tekanan kebutuhan yang semakin meningkat, baik kebutuhan perumahan/permukiman maupun kebutuhan industri pengolahan, dan kondisi wilayah Kota Pekalongan yang merupakan wilayah pesisir maka sebaiknya pengambilan air tanah dalam di wilayah Kota Pekalongan diharapkan dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu ketersediaannya. Dari data Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, pada tahun 1985 PDAM Kota Pekalongan mulai membuat sumur bagi air baku dengan kedalaman lebih dari 100 meter. Namun ketika tahun 2015 PDAM membuat sumur maka kedalamannya telah mencapai ± 24 meter. Data ini tentunya menunjukkan pemanfaatan air tanah yang telah melebihi daya dukungnya. Apabila hal ini berlangsung terus-menerus maka dapat menimbulkan risiko lingkungan yang sangat besar, utamanya intrusi air laut dan penurunan permukaan tanah.

Bertambahnya jumlah penduduk menjadikan kebutuhan akan air bersih juga terus bertambah. Sebagai salah satu sumber terbaik untuk air bersih, air tanah terus diambil secara intensif, terutama untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Seringkali, pengambilan air tanah ini menjadi tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan ketersediaan serta zona pemanfaatannya yang dapat berdampak terhadap kuantitas, kualitas dan daya dukung lingkungan pada CAT setempat. Dampak dari pengambilan air tanah bisa menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah yang melebihi ambang batas dan juga amblesan tanah dan daya rusak air tanah lain seperti pencemaran air tanah dan penyusupan (intrusi) air laut.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak tahun 2020 melakukan penelitian untuk memastikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Pada tahun 2020 telah dipasang patok tetap penurunan tahan di Stadion Hoegeng dan Kecamatan Pekalongan Selatan, dilanjutkan pemasangan patok tetap penurunan tanah di Tirto, Kandang Panjang, Degayu dan Setono pada tahun 2021. Diharapkan hasil penelitian ini dapat segera didapatkan sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan ke depan bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Pekalongan.

2.1.1.5 Klimatologi

Iklim Kota Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 3.303 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 124 hari. Sedangkan Curah hujan terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 1.831 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 80 hari. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-2 berikut.

Tabel II-2 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan
Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Bulan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
1	Januari	20	452
2	Februari	22	535
3	Maret	10	222
4	April	8	220
5	Mei	7	99
6	Juni	6	91
7	Juli	-	-
8	Agustus	2	96
9	September	1	9
10	Oktober	2	12
11	Nopember	8	109
12	Desember	9	226
TOTAL		95	2.071
Tahun 2022		126	2.365
Tahun 2021		124	3.303
Tahun 2020		116	2.896
Tahun 2019		80	1.831

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Dilihat dari kondisi tersebut maka menurut Smith dan Ferguson bahwa tipe iklim di wilayah Kota Pekalongan adalah Tipe B. Iklim Tipe B menggambarkan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah basah, dengan nilai Q (perbandingan bulan kering dan bulan basah dikalikan 100 persen) bernilai antara 14,3-33,3 persen.

Kenaikan curah hujan pada bulan basah dan penurunan pada bulan kering, secara umum merupakan indikasi perubahan iklim. Selain itu, kenaikan suhu akan terus terjadi baik secara global yang dipengaruhi oleh meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfer dan secara mikro yang dipengaruhi oleh laju degradasi tutupan lahan yang terus meningkat. suhu secara global ini juga memicu terjadinya peningkatan cuaca ekstrem akibat terpengaruhnya cuaca global yang dipicu suhu udara dan permukaan laut. Tujuan perubahan iklim ini untuk memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim melalui upaya peningkatan kesadaran dan mitigasi emisi Gas Rumah Kaca. Target dalam tujuan perubahan iklim ini meliputi (a) Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam; dan (b) Meningkatkan upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Capaian penurunan emisi GRK Kumulatif di Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 353,49 TonCO2eq.

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan tanah dibedakan menjadi tanah sawah dan kering. Luas tanah di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari fungsi/penggunaannya maka mengalami pergeseran. Tanah sawah luasnya berkurang setiap tahun, namun sebaliknya, tanah kering mengalami peningkatan perluasan. Pada tahun 2023 tanah sawah seluas 735 Ha, berkurang sekitar 11,66 persen dari luas 832 Ha pada tahun 2022. Begitu juga dengan tanah kering, meningkat menjadi 3.907 Ha, ada penambahan sekitar 2,55 persen dari luas 3.810 Ha pada tahun 2022.

Tabel II-3 Luas Penggunaan Tanah di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

No	Kecamatan	Tanah Sawah (Ha)	Tanah Kering (Ha)	Jumlah (Ha)
1	Pekalongan Barat	54,00	951,00	1.005,00
2	Pekalongan Timur	239,00	713,00	952,00
3	Pekalongan Selatan	407,00	790,00	1.197,00
4	Pekalongan Utara	35,00	1.453,00	1.488,00
TOTAL		735,00	3.907,00	4.642,00
Tahun 2022		832,00	3.810,00	4.642,00
Tahun 2021		886,00	3.756,00	4.642,00
Tahun 2020		886,00	3.756,00	4.642,00
Tahun 2019		925,00	3.600,00	4.525,00

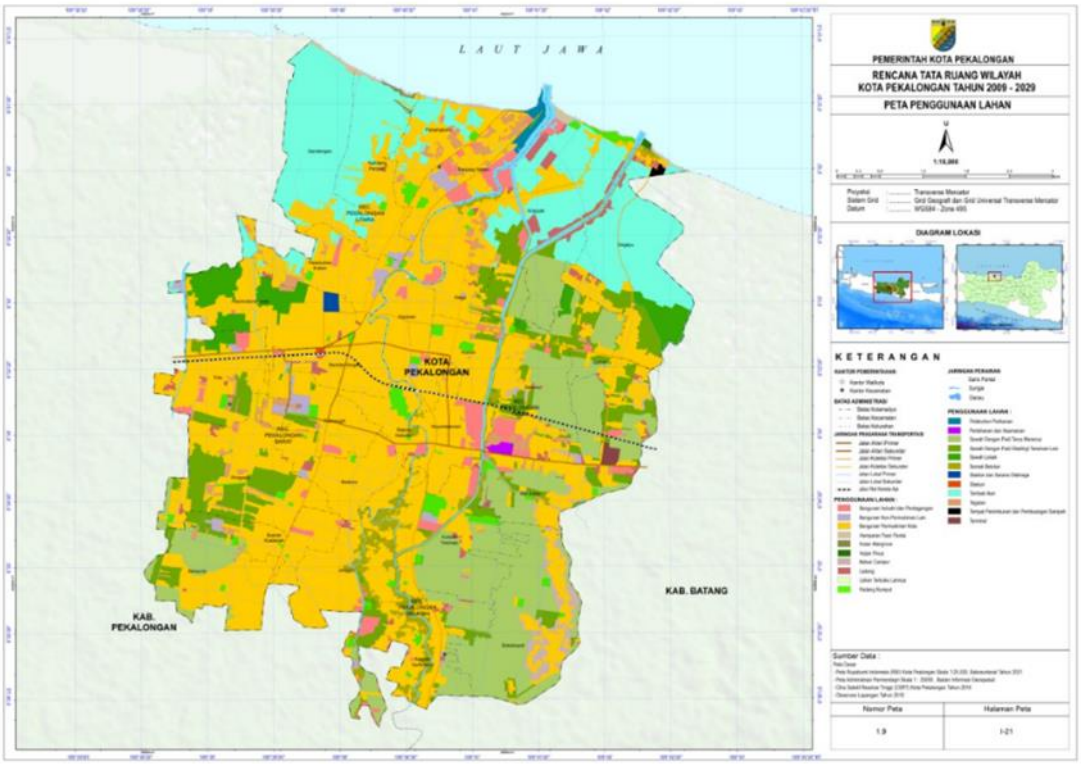
Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2024

Menurut sistem pengairannya, sawah-sawah di Kota Pekalongan menggunakan sistem pengairan teknis. Total sawah irigasi teknis tahun 2023 adalah seluas 735 Ha, yang meliputi Kecamatan Pekalongan Barat seluas 54 Ha, Kecamatan Pekalongan Timur seluas 239 Ha, Kecamatan Pekalongan Selatan seluas 407 Ha dan Kecamatan Pekalongan Utara seluas 35 Ha. Kecenderungan yang ada, dari tahun ke tahun, jumlah sawah irigasi teknis semakin menyusut. Jumlah sawah irigasi teknis di Kota Pekalongan tahun 2019 seluas 925 Ha dan tahun 2020 seluas 886 Ha, tahun 2021 tidak ada perubahan sementara pada tahun 2022 luasan tanah sawah mengalami penurunan menjadi 832 Ha.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perubahan guna lahan yang kecenderungannya semakin meningkat untuk kawasan terbangun (*built up area*). Kawasan terbangun tersebut terutama untuk pembangunan perumahan/kawasan permukiman, industri serta jasa dan perdagangan. Di samping karena kebutuhan untuk kegiatan budidaya non pertanian, semakin berkurangnya sawah/sawah beririgasi teknis karena semakin meluasnya kawasan sawah yang terkena air laut sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi lahan *idle* (lahan menganggur atau lahan yang tidak digunakan), terutama lahan yang berada di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

Upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dapat dilakukan melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Dimana lahan yang dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan yaitu: lahan beririgasi, lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut, maupun lahan tidak beririgasi. Berdasarkan revisi RTRW Kota Pekalongan yang telah disahkan dalam Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 maka telah dialokasikan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 521 Ha atau berkurang dari luasan sebelumnya yaitu seluas 737 Ha. Perubahan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan permukiman, sarana dan prasarana perkotaan.

Dalam proses perubahan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, diusulkan perubahan luasan dan sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut. Usulan tersebut adalah penyesuaian lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam luasan yang lebih kecil karena didasarkan kondisi dan fakta di lapangan semakin menyempitkan lahan pertanian di wilayah Kota Pekalongan serta semakin meningkatnya kebutuhan lahan bagi pengembangan prasarana dan sarana perkotaan.



Gambar II-6 Peta Penggunaan Lahan di Kota Pekalongan

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2024

Penggunaan lahan di wilayah Kota Pekalongan yang paling dominan adalah kawasan permukiman, pertanian, tambak serta perdagangan dan jasa. Akibat kebutuhan bagi pengembangan wilayah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana perkotaan maka tekanan terhadap kebutuhan lahan akan terus meningkat. Kecenderungan tekanan tersebut lebih banyak terhadap penggunaan sawah karena sawah dan tambak tentunya memiliki nilai lahan (*land value*) yang relatif lebih rendah. Sedangkan pilihan penggunaan tambak tidak dilakukan karena sebagian besar tambak berlokasi di wilayah Utara, yang merupakan kawasan rob/pasang surut sehingga kecenderungan alih fungsi lahan adalah pada lahan pertanian.

Permasalahan umum pengembangan wilayah di Kota Pekalongan adalah keterbatasan lahan. Kebutuhan pembangunan perkotaan berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan lahan. Tentunya, kecenderungannya adalah menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. Namun, di sisi lain terdapat kebijakan untuk tetap mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Salah satu dinamika permasalahan perkotaan ini harus dikelola sebaik-baiknya, khususnya dalam kerangka kebijakan penataan ruang. Fokus pelaksanaan urusan penataan ruang harus lebih ditekankan pada tataran pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.1.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan RPJPD bahwa visi Kota Pekalongan adalah “Pekalongan Kota Batik yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Sedangkan berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah “Terwujudnya Kota Kreatif yang didukung Perdagangan dan Jasa, Industri, dan Perikanan, yang Nyaman, Aman, Produktif, serta Berkelanjutan”.

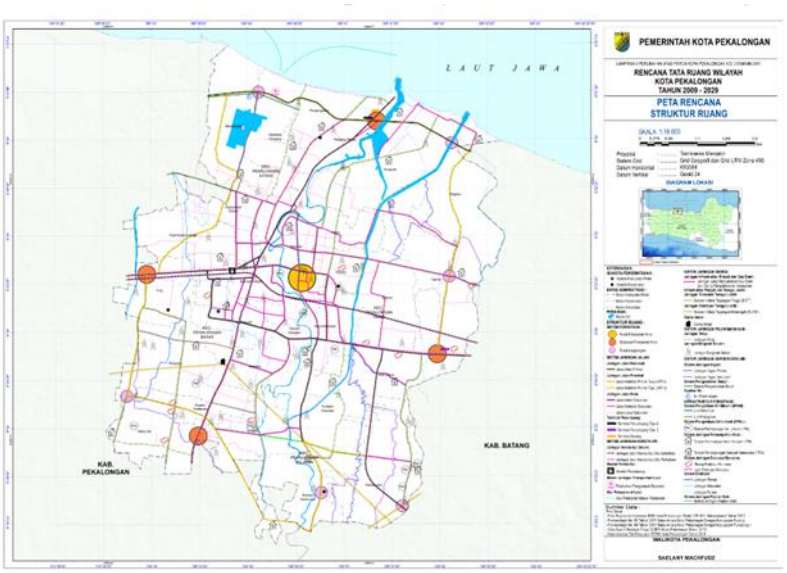
Sebagaimana visi dan tujuan di atas serta kondisi yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa wilayah Kota Pekalongan memiliki kekhasan kondisi yang tentunya berbeda dengan daerah lainnya. Secara geografis alami, Kota Pekalongan merupakan simpul strategis di koridor pantai Utara Pulau Jawa. Berdasarkan sistem pengembangan wilayah pun, Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul pengembangan wilayah di

Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini pun tidak terlepas dari perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh sumbangan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; dan Konstruksi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kota Pekalongan berkembang dengan batik sebagai penggerak perekonomian wilayah, di samping sektor andalan lainnya yang terus dikembangkan yaitu sektor perikanan dan industri. Pengembangan batik, perikanan industri ke depan diharapkan dapat semakin terus ditingkatkan dengan daya inovasi yang dimiliki seluruh warga Kota Pekalongan sehingga dapat memberikan nilai tambah (*value added*) setinggi-tingginya bagi Kota Pekalongan. Namun demikian, tentunya pengembangan potensi tersebut harus tetap dibingkai dalam kerangka tata ruang wilayah dan lingkungan hidup sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan yang berkelanjutan.

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, rencana struktur ruang Kota Pekalongan terdiri atas Pusat Kegiatan dan Sistem Jaringan Prasarana. Pusat Kegiatan dijabarkan dalam hirarki yang terdiri dari Pusat Pelayanan Kota (PPK), Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), dan Pusat Lingkungan (PL). Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi kawasan Alun-Alun, pusat kegiatan perdagangan-jasa skala regional di Kelurahan Kauman dan kawasan Stasiun di Kelurahan Bendan Kergon. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota, SPPK Kecamatan Pekalongan Utara terletak di Kelurahan Panjang Wetan, SPPK Kecamatan Pekalongan Barat terletak di Kelurahan Tirto, SPPK Kecamatan Pekalongan Timur terletak di Kelurahan Gamer dan Kelurahan Kalibaros, SPPK Kecamatan Pekalongan Selatan terletak di Kelurahan Banyurip. Pusat Lingkungan sebagai pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota berada di Kelurahan Pringrejo, Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Degayu, Kelurahan Gamer, Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Kelurahan Sokoduwet.

Untuk sistem jaringan prasarana terdiri atas sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan infrastruktur perkotaan. Untuk rata-rata ketercapaian infrastruktur dasar perkotaan di Kota Pekalongan, pada tahun 2019 mencapai 91,41 persen yang terdiri dari sektor air minum, sanitasi dan persampahan. Gambaran lebih detail dapat dilihat pada peta rencana struktur ruang berikut.



Gambar II-7 Peta Rencana Struktur Ruang

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, 2024

Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, peruntukan lahan dengan memperhatikan rencana pola ruang, terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri atas kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya,

ruang terbuka hijau (RTH) kota dan kawasan ekosistem mangrove. Adapun kawasan budidaya terdiri atas kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan pertahanan keamanan. Rencana pola ruang digambarkan sebagaimana peta berikut.



Gambar II-8 Peta Rencana Pola Ruang

Sumber: Revisi RTRW Kota Pekalongan 2009-2029, 2024

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kota Pekalongan, sebagaimana tertuang pada Rencana Pola Ruang RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 pada Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

1. Kawasan Lindung

1) Kawasan Perlindungan Setempat

Terdiri atas sempadan sungai, sempadan pantai dan kawasan sekitar danau atau waduk. Sempadan sungai memiliki luas ± 24 Ha, sempadan pantai memiliki luas ± 26 Ha dan kawasan sekitar danau atau waduk memiliki luas ± 15 Ha. Kawasan sempadan sungai bertanggul dengan lebar sempadan sungai 3 meter meliputi sempadan Sungai Kupang, Sungai Banger, Sungai Gabus, Sungai Meduri dan Sungai Bremi. Sempadan pantai diperuntukkan perlindungan pantai dari erosi dan abrasi serta perlindungan untuk mangrove dan terumbu karang, selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektar ke arah darat yang berlokasi di Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi, Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Panjang Baru, Krapyak dan Degayu. Kawasan sekitar danau atau waduk yang berfungsi pokok sebagai perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada danau atau waduk yang berada di Kelurahan Bandengan dan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara.

2) Kawasan Cagar Budaya

Seluas ± 9 Ha, terdiri dari Kawasan Heritage Jetayu di Kelurahan Kandang Panjang, Kelurahan Panjang Wetan dan Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara.

3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

Terdiri dari RTH publik seluas 338 Ha (atau sekitar 13,16 persen dari luas wilayah terbangun Kota Pekalongan) RTH Publik terdiri dari taman, lapangan dan Pemakaman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan.

4) Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Ekosistem Mangrove merupakan sebuah lingkungan dengan ciri khusus dimana lantai hutannya digenangi oleh air dimana salinitas juga fluktuasi permukaan air tersebut sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Kawasan ekosistem mangrove berada di Kelurahan Bandengan, Kandang Panjang, Krapyak dan Panjang Baru seluas 88 (delapan puluh delapan) hektar.

2. Kawasan budidaya

1) Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian berupa tanaman pangan seluas 521 (lima ratus dua puluh satu) Ha berada di Kelurahan Banyurip, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo, Sokoduwet, Pringrejo, Degayu, Gamer, Kalibaros dan Setono. Lahan pertanian tanaman pangan tersebut merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

2) Kawasan Perikanan

Terdiri atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap seluas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar berupa pengembangan fasilitas hasil perikanan tangkap meliputi:

a. Pengolahan hasil perikanan berada di Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Degayu Kecamatan Pekalongan Utara.
b. Kawasan pemasaran hasil perikanan berupa fasilitas pelelangan/ pasar ikan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan dan/ atau Kelurahan Krapyak.
c. Teknopark perikanan yang berada di Kelurahan Panjang Wetan.
d. Prasarana penunjang pelabuhan perikanan.

Kawasan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 173 (seratus tujuh puluh tiga) hektar berada di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.

3. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman terdiri atas kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan olahraga, kawasan transportasi, kawasan ruang terbuka non hijau dan kawasan sektor informal yang tersebar di seluruh Kota Pekalongan. Dengan luas sebagai berikut:

a. Kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 2.430 (dua ribu empat ratus tiga puluh) hektar.
b. Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 386 (tiga ratus delapan puluh enam) hektar.
c. Kawasan perkantoran terdiri atas perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta dengan luas kurang lebih 51 (lima puluh satu) hektar.
d. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar.
e. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 94 (Sembilan puluh empat) hektar.
f. Kawasan kesehatan dengan luas kurang lebih 16 (enam belas) hektar.
g. Kawasan olahraga dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar.
h. Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar.
i. Kawasan ruang terbuka non hijau, yang terdiri atas TPA dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar, Kolam Renang dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar dan Lapangan Olahraga dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar.
j. Kawasan sektor informal.

4. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar dan industri menengah. Seluas kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektar berada di:

a. Kecamatan Pekalongan Selatan berada di:
   1. Kelurahan Banyurip;
   2. Kelurahan Buaran Kradenan;
   3. Kelurahan Jenggot;
   4. Kelurahan Kuripan Kertoharjo; dan
   5. Kelurahan Kuripan Yosorejo.
b. Kecamatan Pekalongan Utara berada di:
   1. Kelurahan Bandengan;
   2. Kelurahan Krapyak;
   3. Kelurahan Padukuhan Kraton;
   4. Kelurahan Panjang Wetan;
   5. Kelurahan Kandang Panjang; dan
   6. Kelurahan Panjangbaru.
c. Kecamatan Pekalongan Timur berada di:
   1. Kelurahan Gamer;
   2. Kelurahan Kali Baros;
   3. Kelurahan Klego;
   4. Kelurahan Noyontaansari;
   5. Kelurahan Poncol; dan
   6. Kelurahan Setono.
d. Kecamatan Pekalongan Barat berada di:
   1. Kelurahan Bendan Kergon;
   2. Kelurahan Medono;
   3. Kelurahan Pasirkratonkramat;
   4. Kelurahan Pringrejo;
   5. Kelurahan Sapuro Kebulen; dan
   6. Kelurahan Tirto.

5. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan. Pariwisata budaya berada di Kelurahan Panjang Wetan (Kawasan Jetayu), Kelurahan Krapyak, Kelurahan Padukuhan Kraton, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Pringrejo Kelurahan Noyontaansari dan Kelurahan Kauman. Pariwisata alam seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar berada di Kelurahan Krapyak, Panjang Wetan dan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara. Pengembangan pariwisata buatan, meliputi wisata belanja batik, kerajinan tenun, dan *handycraft* terletak di Kelurahan Podosugih, Medono, Bendan Kergon, Poncol, Kali Baros, Gamer, Noyontaansari, Setono, Klego, Banyurip, Kauman; dan Pasirkratonkramat.

6. Kawasan Pertahanan-Keamanan Negara

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara terdiri atas asrama dan markas Brimob di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur; asrama dan kantor Polwil di Kelurahan Pasirkratonkramat dan Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat; kantor eks Polwil di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara; kantor Polresta di Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan

Pekalongan Utara; kantor Kodim di Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat; Kantor Koramil dan Kantor Polsekta di seluruh wilayah kecamatan.

7. Sinergi Kota Pekalongan Dengan Daerah Tetangga Berkaitan Dengan Aspek Tata Ruang

Terkait aspek perencanaan tata ruang dalam revisi Perda RTRW Kota Pekalongan telah direncanakan beberapa hal yang dapat bersinergi dengan Perda RTRW Kabupaten Pekalongan dan Perda RTRW Kabupaten Batang, sebagai berikut:

1) Struktur Ruang

a. Telah direncanakan Jalan Lingkar Utara Petanglong, yang akan menghubungkan kawasan strategis PLTU Batang dan Kawasan Industri Terpadu (di Kabupaten Batang) - Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Kawasan Wisata Pantai (di Kota Pekalongan) - Rencana Kawasan Industri (di Kabupaten Pekalongan) - jalur Pantura. Adanya Jalan Lingkar Utara Petanglong ini akan mempermudah akses ke kawasan-kawasan strategis tersebut, sekaligus juga akan mengurangi kemacetan di jalur Pantura, sehingga harapannya akan menaikkan potensi pertumbuhan ekonomi di 3 daerah tersebut.

b. Telah direncanakan jalur transportasi masal (BRT) yang menghubungkan dari Kota Batang - Kota Pekalongan - Kota Kajen. Diharapkan dengan disediakannya fasilitas transportasi masal (BRT) yang nyaman ini, akan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi, sehingga akan mengurangi kepadatan lalu-lintas pada jalur-jalur yang menghubungkan 3 daerah tersebut.

2) Pola Ruang

Perencanaan Pola Ruang untuk wilayah-wilayah perbatasan telah melalui proses padu serasi dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, sehingga sudah ada sinkronisasi. Namun demikian, perlu diperhatikan juga perkembangan potensi kebencanaan di masa mendatang yang ada di wilayah-wilayah perbatasan tersebut, yang menjadikan perlu dipikirkan dan disepakati bersama antara dua daerah yang berbatasan, rencana Pola Ruang yang lebih feasible.

Pada wilayah-wilayah yang dekat pantai, “pergerakan kawasan yang terdampak rob dengan probabilitas tinggi bergeser dari tahun 2025 hingga 2030 pada kawasan tambak. Kondisi ini menunjukkan bahwa lahan tambak merupakan lahan yang memiliki probabilitas paling tinggi terdampak dan berubah menjadi kawasan rob. Hingga pada akhir tahun 2035, rob mulai masuk pada kawasan persawahan untuk menjadi kawasan rob. Hal ini tentu menggambarkan dampak yang yang diberikan pada risiko bencana banjir, mengancam aktivitas ekonomi masyarakat di lokasi kajian, khususnya aktivitas perikanan dan pertanian” (Laporan *Loss and Damage Assesment in Pekalongan City* dan *Pekalongan Regency Under Zurich Flood Resilience Alliance Program*, Yayasan Mercy Corps Indonesia, 2021).

3) Batas Wilayah administratif

Telah dilakukan kegiatan survey dan perapatan patok batas wilayah di 3 daerah tersebut, yang melibatkan Bagian Tata Pemerintahan Setda, Lurah / Kepala Desa yang berbatasan dan BPN. Yang outputnya akan menghasilkan batas wilayah yang lebih detail deliniasinya. Untuk melegal formalkan out put kegiatan ini perlu dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan di tingkat kepala daerah, kemudian dimintakan persetujuan ke Kementerian Dalam Negeri.

2.1.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Utara Pulau Jawa. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang sangat dinamis, dengan berbagai macam proses fisik, termasuk kenaikan muka air laut, penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), serta erosi-sedimentasi. Selain itu, wilayah pesisir juga menerima berbagai dampak yang disebabkan oleh aktivitas manusia, sebagai contohnya adalah beban bangunan serta ekstraksi air tanah besar-besaran yang menyebabkan penurunan permukaan tanah. Semua proses tersebut mempengaruhi perubahan garis pantai dan perkembangan bentuk landskap pesisir.

Pekalongan sebagai salah satu kota pesisir di pantai Utara Jawa dengan topografi yang landai merupakan kawasan yang sangat rawan terhadap kenaikan air laut. Kondisi ini tentu saja berbeda jika dibandingkan dengan topografi di pantai Selatan Jawa yang relatif lebih curam. Beberapa ahli mengatakan bahwa kondisi geografis Pekalongan memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap pemanasan global. Tingginya nilai kerentanan itu tidak terlepas dari kondisi geomorfologi Pekalongan yang berupa pantai berpasir dan erosi pantai mencapai lebih dari 1 meter per tahun. Selain itu, kisaran pasang surutnya sekitar 0,7 meter. Berdasarkan kajian yang dilakukan Diposaptono (2009), penghitungan nilai risiko terhadap kenaikan paras muka air laut di Pekalongan rata-rata 2,4. Nilai tersebut dikategorikan sebagai daerah berisiko besar.

Bencana alam yang telah dan resiko terjadi di wilayah Kota Pekalongan meliputi abrasi, rob, banjir dan angin puting beliung. Perubahan iklim global yang ditandai dengan kenaikan suhu bumi dan kenaikan permukaan air laut bisa jadi juga telah melanda wilayah Kota Pekalongan. Dalam beberapa tahun ini, upaya untuk menanggulangi rob/air pasang di wilayah Kota Pekalongan terus-menerus dilakukan namun kawasan tergenang rob senantiasa bertambah luas dan bertambah intensitasnya.

Berdasarkan potensi ancaman bencana maka terdapat 4 (empat) potensi bencana di wilayah Kota Pekalongan yaitu bencana rob, bencana banjir, bencana abrasi dan bencana angin puting beliung. Keempat ancaman tersebut merupakan ancaman bagi wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Ancaman bencana, bukan lagi hanya pada kawasan di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara saja, tetapi juga menjadi ancaman bagi keseluruhan kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Pekalongan Barat, Pekalongan Selatan dan Pekalongan Timur. Ancaman untuk keempat kecamatan tersebut adalah banjir. Banjir menjadi potensi yang besar karena topografi wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar dan merupakan kawasan muara dari beberapa sungai dari kawasan hulu di daerah lainnya.

Bencana yang cukup signifikan memberikan dampak bagi masyarakat yang tinggal di Kota Pekalongan, khususnya Kecamatan Pekalongan Utara antara lain bencana banjir dan banjir rob/pasang. Bencana tersebut memberi dampak pada kehidupan masyarakat yang tinggal di kota ini. Tidak hanya berdampak pada kerusakan infrastruktur dan sarana wilayah saja, melainkan juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Jumlah kawasan kumuh (*slum area*) yang masih terdapat di wilayah Kota Pekalongan, terutama disebabkan oleh bencana rob ini, Faktor pemicu terjadinya kawasan kumuh, bukan hanya karena prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang tidak memadai saja tetapi akibat rob yang lebih dominan.

Abrasi di Kota Pekalongan telah menimbulkan persoalan sosial yang kompleks. Abrasi terparah di Kota Pekalongan terjadi di Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yaitu di Pantai Sari. Di sana abrasi bahkan telah mengganggu ketenangan hidup sekitar 200 kepala keluarga (KK). Pasalnya, abrasi telah menimbulkan rob yang hampir setiap hari menggenangi rumah penduduk. Akibatnya, warga di sana banyak yang terkena penyakit kulit dan terganggu aktivitasnya.

Penurunan permukaan tanah juga menjadi resiko bencana yang terjadi di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan naskah akademik penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Perkotaan (KSP) Petanglong bahwa penurunan permukaan tanah di

wilayah Kota Pekalongan terjadi karena tanah yang membentuk wilayah Kota Pekalongan adalah tanah alluvial, yang merupakan hasil sedimentasi. Tanah-tanah hasil sedimentasi masih memerlukan waktu ratusan tahun ke depan agar kondisi tanah menjadi stabil. Penurunan permukaan tanah juga memungkinkan terjadi karena kondisi cekungan air tanah yang kosong akibat eksploitasi atau pengambilan air tanah dalam yang semakin mengkhawatirkan. Hal ini terutama disebabkan oleh pengambilan air tanah yang terjadi, kapasitasnya melebihi dari kapasitas pengisian alami air tanah.

Berdasarkan gambaran potensi kebencanaan di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kota (Pasal 5) dan strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana (Pasal 13A) melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 - 2029, yaitu:

1) Kebijakan penataan ruang wilayah kota, meliputi:
    a. Pengembangan kegiatan industri kreatif yang mempertimbangkan kualitas lingkungan;
    b. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang mampu meningkatkan peran Kota sebagai pusat kawasan regional Petanglong;
    c. Pengaturan kegiatan industri;
    d. Peningkatan hasil perikanan dan optimalisasi lahan pertanian;
    e. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
    f. Peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
    g. Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
    h. Peningakatan pengelolaan kawasan strategis Kota;
    i. Peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana; dan
    j. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.
2) Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan kawasan rawan bencana, meliputi:
    a. Mengembangkan sarana dan prasarana yang mendukung penanganan kawasan rawan bencana;
    b. Mengembangkan RTH di sekitar DAS dan pada kawasan rawan bencana risiko tinggi;
    c. Meningkatkan mitigasi bencana risiko tinggi;
    d. Mewujudkan arahan peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana; dan
    e. Mewujudkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana.

Pada Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009 - 2029 disebutkan adanya Sistem jaringan evakuasi bencana berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur evakuasi bencana menuju ruang evakuasi bencana. Jalur evakuasi bencana terdiri dari:

a. Jalur evakuasi terhadap bencana abrasi, meliputi Jalan Pantai Slamaran di Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara dan Jalan Pantai Sari dan Jalan Samudra di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
b. Jalur evakuasi terhadap bencana rob, meliputi Jalan Samudera Kelurahan Panjang Baru dan Kelurahan Kandang Panjang, Jalan Samudera Pasai di Kelurahan Panjang Baru, Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, dan Jalan WR. Supratman di Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara;
c. Jalur evakuasi terhadap bencana banjir terdapat di:

- Kecamatan Pekalongan Selatan, meliputi Jalan Gatot Subroto di Kelurahan Banyurip dan Kelurahan Buaran Kradenan;
- Kecamatan Pekalongan Barat, meliputi Jalan Ahmad Dahlan di Kelurahan Tirto, Kelurahan Pringrejo dan Jalan Pemuda di Kelurahan Bendan Kergon; dan Jalan Gajah Mada di Kelurahan Pasir Kraton Kramat;
- Kecamatan Pekalongan Utara, meliputi Jalan WR. Supratman dan Jalan Kusuma Bangsa di Kelurahan Panjang Wetan, Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol di Kelurahan Padukuhan Kraton.

d. Jalur evakuasi terhadap bencana angin topan, terdapat di Jalan Ki Mangun Sarkoro di Kelurahan Degayu dan Jalan Patimura di Kelurahan Gamer.

Sedangkan Ruang evakuasi bencana, antara lain:

- Lapangan;
- Stadion;
- Taman publik;
- Bangunan rumah;
- Bangunan kantor pemerintah;
- Bangunan fasilitas sosial;
- Bangunan fasilitas umum, dan
- Ruang/bangunan Lainnya.

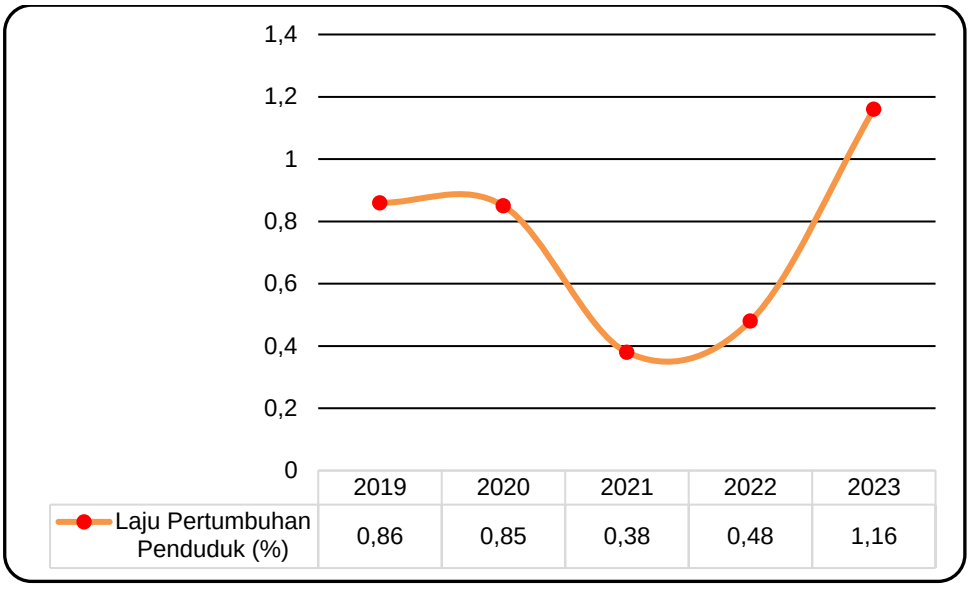
2.1.1.9 Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2023 berdasarkan data BPS Jawa Tengah sebanyak 317.524 jiwa, terdiri dari 160.369 jiwa laki-laki dan 157.155 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka sex rasio sebesar 102,04 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. Pada tahun 2023 bertambah 7.782 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,16 persen. Jumlah penduduk Kota Pekalongan dan berdasarkan jenis kelaminnya, disajikan dalam Tabel II-4 berikut.

Tabel II-4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2019	153.778	153.319	307.097
2020	155.145	152.005	307.150
2021	155.701	152.609	308.310
2022	156.391	153.351	309.742
2023	160.369	157.155	317.524

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 dan www.jateng.bps.go.id, 2024



Gambar II-9 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

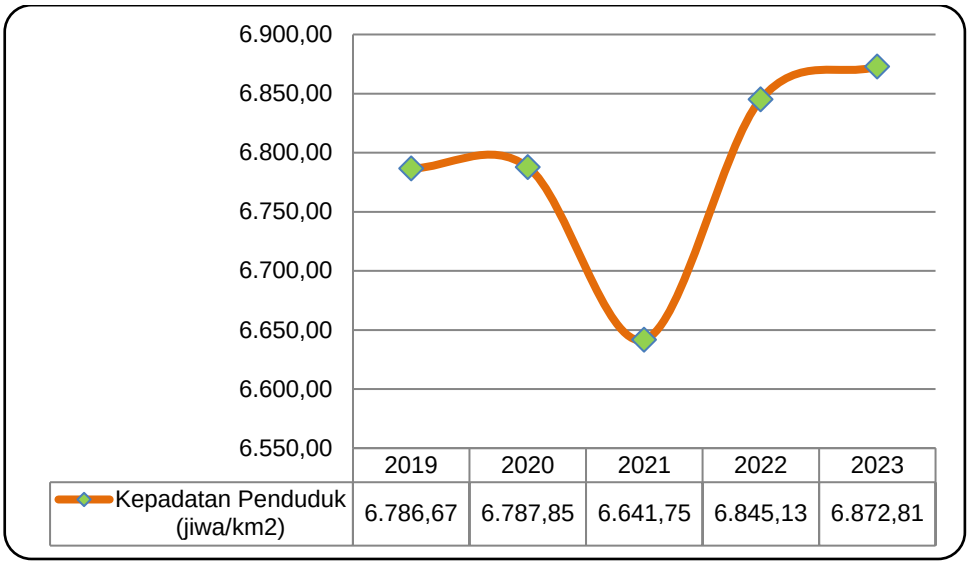
Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023 dan www.jateng.bps.go.id, 2024

Gambar II-9 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan tahun 2019-2023. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,38 persen. Dari tahun 2019 sampai tahun 2023 laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan fluktuatif.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan lebih kecil dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan penduduk Indonesia maupun Provinsi Jawa Tengah. Fenomena laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil dan cenderung menurun tersebut, juga dialami kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun menunjukkan pelaksanaan program keluarga berencana membawa dampak yang cukup signifikan. Namun demikian, dalam kerangka pengembangan wilayah, laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun menunjukkan proses urbanisasi yang telah mengalami perlambatan. Kondisi ini merupakan fenomena wajar karena proses urbanisasi pada tahapan tertentu akan mengalami perlambatan dan bahkan pada saat tertentu akan stagnan.

Proses urbanisasi yang mengalami perlambatan dapat dilihat dari pertambahan penduduk secara alami dan migrasi. Dengan asumsi pertambahan penduduk alami terjadi secara konstan maka perlambatan tersebut diakibatkan daya tarik Kota Pekalongan yang menurun, sehingga semakin menurunnya migrasi masuk ke Kota Pekalongan. Dapat dimaknai juga semakin banyaknya migrasi keluar dari Kota Pekalongan ke wilayah lain karena berbagai pertimbangan. Fenomena pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan yang cenderung menurun, secara sederhana dapat dimaknai sebagai suatu kondisi, dimana daya tarik Kota Pekalongan yang mulai menurun.

Dari segi kepadatan penduduk, Kota Pekalongan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Seiring dengan bertambahnya penduduk yang lahir, penduduk yang meninggal, migrasi masuk ke kota Pekalongan dan keluar Kota Pekalongan, kepadatan penduduk per kilometer persegi mengalami peningkatan. Namun demikian pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 27,68 jiwa dibandingkan dengan tahun 2022. Berikut data kepadatan penduduk Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023 disajikan dalam Gambar II-10 berikut.



Gambar II-10 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023 dan www.jateng.bps.go.id, 2024

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dan berpendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Pekalongan pada Tahun 2023, pendidikan SD ke bawah sebanyak 50.065 jiwa (29,19 persen), diikuti SMP sebanyak 37.745 jiwa (22,00 persen) dan Sekolah Menengah (SM) ke atas sebanyak 83.712 jiwa (48,81 persen) Adapun jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang bekerja pada tahun 2023 berjumlah 171.522 jiwa.

Secara bertahap mulai tahun 2019, struktur pekerja yang lulusan SD ke bawah berfluktuatif akan tetapi tidak signifikan baik secara persentase maupun jumlah. Demikian juga struktur pekerja pada pendidikan SLTP dan Sekolah Menengah (SM) ke atas selama lima tahun baik dalam jumlah kuantitatif maupun persentase mengalami perbaikan namum tidak signifikan. Secara lengkap data Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel II-5 berikut.

Tabel II-5 Penduduk Kota Pekalongan Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja						
	≤SD		SLTP		≥SM		Jumlah
	orang	persen	orang	persen	orang	persen	
2019	56.934	35,89	35.203	22,19	66.498	41,92	158.635
2020	52.326	35,79	29.357	20,08	64.536	44,13	146.219
2021	58.085	34,43	34.121	20,22	56.191	33,30	168.725
2022	50.573	31,32	35.349	21,89	75.548	46,79	161.470
2023	50.065	29,19	37.745	22,00	83.712	48,81	171.522

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 (diolah), 2024

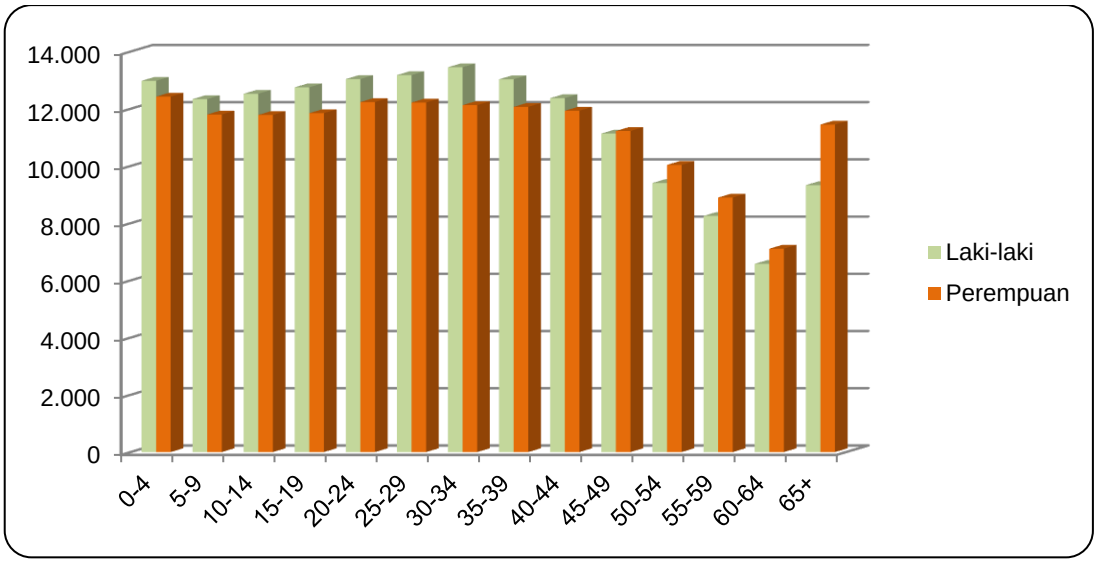
Dalam konteks rentang usia, penduduk Kota Pekalongan tahun 2023 paling banyak berada pada rentang usia 30-34 tahun yaitu sebanyak 25.580 jiwa, diikuti rentang usia 0-4 tahun sebanyak 25.402 jiwa. Sedangkan jumlah lansia di atas usia 65 tahun sebanyak 20.779 jiwa. Dan pada rentang usia lainnya perbedaan jumlah penduduk tidak terlalu signifikan. Secara lengkap data Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023 menurut kelompok umur dan jenis kelamin (jiwa) disajikan dalam Tabel II-6 berikut.

Tabel II-6 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Umur (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	12.977	12.425	25.402
5-9	12.338	11.800	24.138
10-14	12.525	11.785	24.310
15-19	12.751	11.848	24.599
20-24	13.040	12.236	25.276
25-29	13.178	12.219	25.397
30-34	13.452	12.128	25.580
35-39	13.032	12.067	25.099
40-44	12.373	11.932	24.305
45-49	11.134	11.224	22.358
50-54	9.405	10.038	19.443
55-59	8.255	8.897	17.152
60-64	6.578	7.108	13.686
65+	9.331	11.448	20.779
Jumlah	160.369	157.155	317.524

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Penduduk Kota Pekalongan tahun 2023 menurut kelompok umur dan jenis kelamin disajikan dalam bentuk diagram batang seperti berikut.



Gambar II-11 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2023 Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 (diolah), 2024

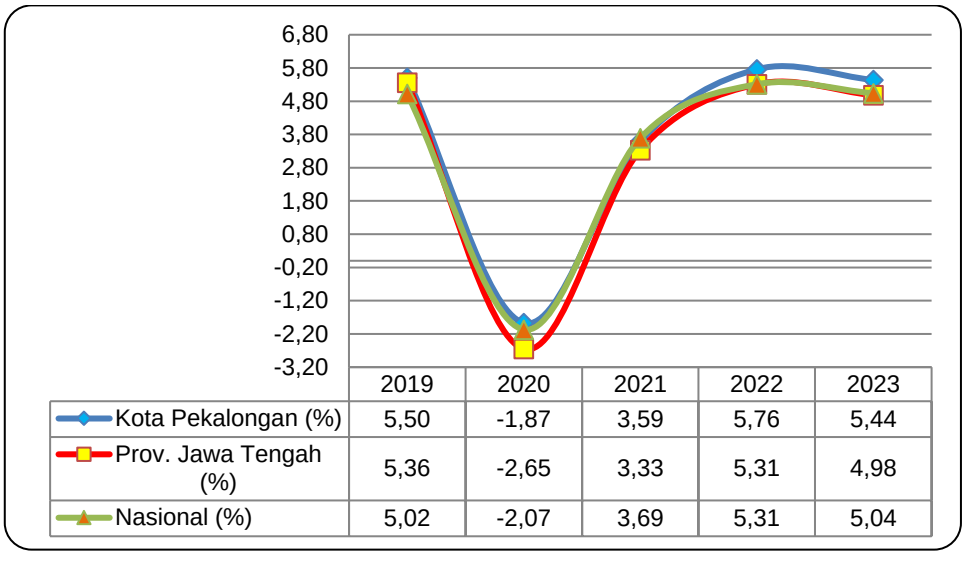
Dari data jumlah penduduk berdasarkan struktur umur tersebut, dapat diketahui bahwa Kota Pekalongan memiliki bonus demografi. Bonus demografi adalah suatu kondisi dimana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif, yaitu rentang usia 15 hingga 64 tahun. Jumlah penduduk usia produktif Kota Pekalongan adalah 222.895 jiwa atau sebesar 70,20% dari jumlah penduduk seluruhnya.

Fenomena yang cukup jarang terjadi ini tentu akan memberikan banyak perubahan dan penyesuaian pada kehidupan bermasyarakat dalam suatu daerah. Tidak selalu menguntungkan, jika fenomena tersebut tidak diimbangi dengan persiapan yang matang maka justeru dapat menjadi ancaman bagi suatu daerah. Pemerintah Kota Pekalongan harus melakukan upaya terintegrasi untuk memanfaatkan bonus demografi ini menjadi keuntungan bagi Kota Pekalongan. Salah satunya, fenomena ini menjadi peluang besar bagi Kota Pekalongan untuk meningkatkan kinerja perekonomian, terutama sektor industri pengolahan, sektor perdagangan dan jasa, serta sektor lainnya yang menjadi sektor unggulan di Kota Pekalongan.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu *COVID-19* yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar 3,59 persen dan tumbuh Kembali sebesar 5,76 persen pada tahun 2022. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2023 mengalami perlambatan sebesar 5,44 persen. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan keberlanjutan pemulihan ekonomi yang tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada efektivitas respon kebijakan yang ditempuh.



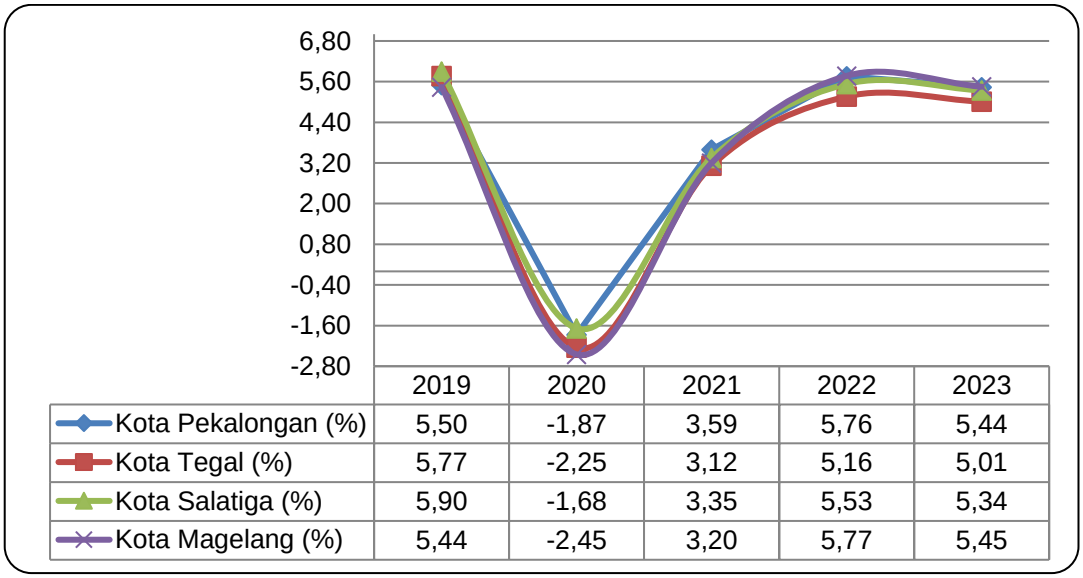
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekalongan (%)	5,50	-1,87	3,59	5,76	5,44
Prov. Jawa Tengah (%)	5,36	-2,65	3,33	5,31	4,98
Nasional (%)	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,04

Gambar II-12 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 (diolah), 2024

Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum cukup tinggi diantara ketiga daerah tersebut. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Magelang, di bawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan

semakin membaik dan berada diatas ketiga Kota tersebut. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Magelang dan diatas Kota Salatiga dan Kota Tegal. Sementara pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan Kota Tegal dan Kota Salatiga, namun lebih rendah dibandingkan dengan Kota Magelang. Selengkapnya disajikan dalam Gambar II-13 berikut.



	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekalongan (%)	5,50	-1,87	3,59	5,76	5,44
Kota Tegal (%)	5,77	-2,25	3,12	5,16	5,01
Kota Salatiga (%)	5,90	-1,68	3,35	5,53	5,34
Kota Magelang (%)	5,44	-2,45	3,20	5,77	5,45

Gambar II-13 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2019 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan masih berfluktuasi, belum menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Dalam rangka pemulihan dan percepatan peningkatan kesejahateraan masyarakat, sebagai dampak pandemi *COVID*-19, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pendorongnya. Dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan agar pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dapat memiliki kecenderungan meningkat dari waktu ke waktu, sehingga kesejahteraan masyarakat terus semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi terdiri yang merupakan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terdistribusi berdasarkan atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran, dimana pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sebagian besar yaitu 67,89% merupakan pengeluaran konsumsi rumah tangga, sebesar 38,69% merupakan pembentukan modal tetap bruto (PMTB), sebesar 7,53% merupakan pengeluaran konsumsi pemerintah, sebesar 1,23% merupakan pengeluaran konsumsi LNPRT, sebear 0,44% merupakan perubahan inventori, serta sebesar -15,78% merupakan net ekspor barang dan jasa. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan persediaan merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Cara mengetahui informasi tentang PMTB dan persediaan, tidak terlepas dari upaya mengetahui besaran investasi yang dilakukan suatu wilayah atau negara dari tahun ke tahun. Bergeraknya perekonomian suatu wilayah atau negara ditentukan oleh faktor kapital dan tenaga kerja. Kedua faktor tersebut merupakan penggerak utama suatu perekonomian yang mengubah input menjadi output berupa barang dan jasa. Investasi diperlukan sebagai suatu bagian penting dalam suatu perkonomian, serta mempunyai keterkaitan langsung terhadap kegiatan ekonomi pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dengan melakukan investasi,

berarti kapasitas produksi juga meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan output, dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tantangan berikutnya adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas. Berdasarkan data satu dekade ini, dengan menggunakan analisis korelasi, dapat diidentifikasi bahwa keempat aspek tersebut, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan (Indeks Gini), pengentasan kemiskinan (angka kemiskinan), dan kesempatan kerja (TPT, tingkat pengangguaran terbuka), memiliki korelasi yang tidak signifikan. Artinya pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan selama ini, tidak berkorelasi atau tidak mempengaruhi terhadap pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas.

2.1.2.2 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2019-2023. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2023, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,05 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,44 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,64 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0-7 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap dalam lima tahun terakhir yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel II-7 berikut.

Tabel II-7 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 (persen)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,66	5,09	4,79	4,71	4,48
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	20,85	21,34	21,15	20,83	20,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,15	0,15	0,14	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,12	0,12	0,11	0,11
F	Konstruksi	14,64	14,54	15,46	15,12	15,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,80	21,38	21,59	21,10	21,05
H	Transportasi dan Pergudangan	6,40	5,02	5,06	7,28	7,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,44	5,31	5,36	5,57	5,84
J	Informasi dan Komunikasi	4,36	5,13	5,07	4,75	4,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,13	6,21	6,22	6,15	5,93
L	Real Estat	2,71	2,73	2,66	2,58	2,54
M,N	Jasa Perusahaan	0,44	0,43	0,42	0,42	0,43

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,47	4,49	4,17	3,94	3,72
P	Jasa Pendidikan	4,65	4,72	4,54	4,16	4,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,44	1,40	1,33	1,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,90	1,90	1,83	1,82	1,80
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

PDRB Kota Pekalongan menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi subkategori. Pemecahan menjadi subkategori ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Perkembangan setiap lapangan usaha diuraikan di bawah ini.

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Pertanian yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, sub kategori usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan subkategori usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2023, peranan pada kategori atau lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar 4,48 persen.

Peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan relatif stagnan dikarenakan Kota Pekalongan berkembang dalam pelayanan ke wilayah sekitarnya dan kecenderungan perkembangan perkotaan bahwa sektor primer tidak dapat berkembang optimal, terutama sub sektor pertanian, diakibatkan keterbatasan lahan pertanian karena untuk penggunaan kegiatan yang dianggap lebih produktif dan sebagian wilayah Kota Pekalongan terdampak rob. Nilai produksi sub sektor perikanan jika dibandingan dengan masa kejayaan perikanan Kota Pekalongan yang lalu, cukup kecil dan belum berkembang sesuai harapan, terutama produksi perikanan tangkap. Hal ini dikarenakan kendala teknis sedimentasi termasuk pengelolaannya sehingga semakin sedikit kapal perikanan yang membongkar hasil tangkapannya di Kota Pekalongan. Dengan kondisi tersebut maka lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki nilai produksi barang dan jasa yang relatif stagnan.

Industri Pengolahan

Kategori ini mencakup subkategori usaha Industri Pengolahan yang terdiri atas Industri Batubara dan Pengilangan Minyak, Industri Makanan dan Minuman, Pengolahan Tembakau, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi, Industri Kulit; Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik, Industri Barang Galian bukan Logam, Industri Logam Dasar, Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL, Industri Alat Angkutan, Industri Furnitur dan Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan. Kategori ini memiliki peranan dalam sektor perekonomian PDRB Kota Pekalongan sebesar 20,44 persen pada tahun 2023.

Peranan lapangan usaha Industri Pengolahan berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 kontribusinya sebesar 20,85 persen, kemudian menguat menjadi 21,34 persen pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021 melemah menjadi 21,15 persen dan

melemah kembali menjadi 20,83 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2023 peranannya kembali melemah menjadi 20,44 persen.

Tahun 2019-2023, lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki kecenderungan yang menurun, saat terjadi dampak pandemi *COVID-19*. Bahkan pada tahun 2020, lapangan usaha Industri Pengolahan memiliki peranan terbesar dibandingkan lapangan usaha lain. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha ini cukup tangguh terhadap adanya dampak pandemi *COVID-19* di Kota Pekalongan. Ketika perekonomian nasional dan daerah tumbuh kembali pada tahun 2021, maka peranan lapangan usaha Industri Pengolahan kembali melemah, hal ini terjadi karena lapangan usaha yang lain telah menguat kembali.

Pengadaan Listrik dan Gas

Kategori Pengadaan Listrik dan Gas, mempunyai peran sebesar 0,15 persen terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2023, meningkat dibanding tahun 2022 yaitu 0,14 persen. Peran kategori ini dalam struktur perekonomian cenderung stagnan dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023.

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian tidak termasuk dalam kategori ini. Peranan kategori ini terhadap struktur perekonomian di Kota Pekalongan cenderung stagnan selama 2019-2023 yaitu sebesar 0,10 persen pada tahun 2019 dan meningkat 0,12 persen pada tahun 2020 dan tahun 2021, kemudian menurun 0,11 persen pada tahun 2022 dan tahun 2023.

Konstruksi

Secara umum, peranan lapangan usaha Konstruksi terhadap perekonomian Kota Pekalongan berfluktuaktif. Peranan lapangan usaha ini pada perekonomian cenderung meningkat yaitu tahun 2019 sebesar 14,64 persen, tahun 2020 menurun menjadi sebesar 14,54 persen dan meningkat sebesar 15,46 persen di tahun 2021 dan kembali menurun pada tahun 2022 yaitu sebesar 15,10 persen, serta kembali meningkat di tahun 2023 sebesar 15,64 persen.

Peranan lapangan usaha Konstruksi sangat tergantung dengan implementasi pekerjaan konstruksi. Pada tahun 2021, peranan lapangan usaha ini meningkat cukup tajam, karena pada tahun 2021 pelaksanaan pekerjaan konstruksi di Kota Pekalongan jumlahnya sangat meningkat. Dengan demikian, semakin banyak pekerjaan konstruksi maka peranan lapangan usaha ini dapat semakin meningkat.

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Selama lima tahun terakhir, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peranan terbesar dibandingkan lapangan usaha lainnya, terhadap PDRB Kota Pekalongan. Peranan lapangan usaha ini selalu lebih dari 20 persen.

Secara umum peranan lapangan usaha ini selalu berfluktuasi. Pada tahun 2019 peranannya sebesar 21,80 persen, menurun menjadi 21,38 persen pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 21,59 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022, peranan lapangan usaha ini melemah menjadi 21,10 persen dan 21,05 persen pada tahun 2023. Tahun 2019, lapangan usaha ini memiliki kecenderungan yang menurun, namun menguat kembali pada tahun 2020, saat terjadi dampak pandemi *COVID-19*. Hal ini menyiratkan tanda bahwa lapangan usaha ini lebih tangguh terhadap adanya dampak pandemi *COVID-19*. Ketika perekonomian nasional dan daerah tumbuh kembali pada tahun 2021, maka peranan lapangan usaha ini kembali melemah, hal ini terjadi karena lapangan usaha yang lain telah menguat kembali.

Transportasi dan Pergudangan

Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terdiri dari 6 (enam) sub kategori, yaitu Angkutan Rel, Angkutan Darat, Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Angkutan Udara, serta Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan. Kota Pekalongan memiliki posisi strategis dalam kerangka lalu lintas Pulau Jawa sehingga lapangan usaha ini merupakan salah satu sektor yang strategis.

Lapangan usaha ini memiliki peranan yang berfluktuatif pada tahun 2019-2023 yaitu berturut-turut sebesar 6,40 persen di tahun 2019. Melemah menjadi 5,02 persen di tahun 2020 dan 5,06 persen di tahun 2021. Pada tahun 2020, peranan lapangan usaha ini turun drastis sebagai dampak pandemi *COVID-19* karena sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang cukup terkena dampak pandemi. Namun pada tahun 2022 dan tahun 2023 peranan lapangan usaha ini meningkat tajam menjadi sebesar 7,28 persen dan 7,79 persen.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Perkembangan lapangan usaha ini selama lima tahun terakhir cenderung stagnan di kisaran 5 persen. Peranan tahun 2019 sebesar 5,44 persen dan tahun 2020 sebesar 5,31 persen. Peranan tahun 2019-2020 memiliki kecenderungan yang sedikit demi sedikit melemah. Namun pada tahun 2021 dan 2022 peranannya meningkat menjadi 5,36 persen dan 5,57 persen dan kembali meningkat di tahun 2023 sebesar 5,84 persen. Dari perkembangan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa lapangan usaha ini menunjukkan peranannya yang menguat, namun sangat terdampak pandemi *COVID-19* pada tahun 2020, akibat sektor ini global sangat terpengaruh. Lapangan usaha ini kembali menguat pada tahun 2021 akibat sudah mulai berkembangnya perekonomian global, nasional dan lokal.

Informasi dan Komunikasi

Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi memiliki peranan sebagai penunjang aktivitas di setiap bidang perekonomian. Dalam era globalisasi, peranan kategori ini menjadi indikator kemajuan suatu daerah, terutama jasa telekomunikasi.

Peranan kategori ini terhadap PDRB Kota Pekalongan secara umum berfluktuatif dari tahun 2019-2023. Tahun 2019 peranan lapangan usaha ini sebesar 4,36 persen, tahun 2020 sebesar 5,13 persen dan tahun 2021 sebesar 5,07 persen. Selama tiga tahun tersebut menunjukkan perkembangan dan terjadi peningkatan yang tajam pada tahun 2020. Peningkatan pada tahun 2020 merupakan dampak pandemi, dimana lapangan usaha ini tetap berkembang, sementara lapangan usaha lainnya mengalami penurunan. Setelah menguatnya lapangan usaha lainnya maka perananan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi pada tahun 2022 dan tahun 2023 menurun menjadi 4,75 persen dan 4,74 persen.

Jasa Keuangan dan Asuransi

Secara umum, selama lima tahun terakhir peranan lapangan usaha ini pada perekonomian Kota Pekalongan cenderung menurun. Peranan lapangan usaha ini, tahun 2019 sebesar 6,13 persen, tahun 2020 meningkat sebesar 6,21 persen, dan tahun 2021-2023 berturut-turut melemah menjadi sebesar 6,22 persen, 6,15 persen dan 5,93 persen.

Real Estate

Lapangan usaha Real Estate memiliki peranan yang cenderung menurun terhadap PDRB Kota Pekalongan selama lima tahun terakhir. Peranan lapangan usaha ini pada tahun 2019 sebesar 2,71 persen, meningkat menjadi 2,73 persen pada tahun 2020. Pada tahun 2021-2023 semakin melemah menjadi 2,66 persen, 2,58 persen dan 2,54 persen.

Jasa Perusahaan

Selama 5 tahun terakhir, peranan dalam struktur perekonomian di Kota Pekalongan, lapangan usaha Jasa Perusahaan cenderung stagnan di kisaran 0,4 persen. Peranan lapangan usaha ini tahun 2019 sebesar 0,44 persen, tahun 2020 menurun sebesar 0,43 persen dan tahun 2021-2022 kembali turun menjadi 0,42 persen. Dan meningkat kembali sebesar 0,43 di tahun 2023. Dibandingkan lapangan usaha lainnya, lapangan usaha ini memiliki peranan yang paling kecil dari tahun ke tahun.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Kategori ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya. Selama tahun 2019-2023 peranan lapangan usaha menunjukkan kecenderungan yang menurun. Perananan pada 2019 menurun menjadi sebesar 4,47 persen, dan meningkat di tahun 2020 menjadi sebesar 4,49 persen. Kemudian menurun tajam di tahun 2021-2023 masing-masing menjadi sebesar sebesar 4,17 persen, 3,94 persen dan 3,72 persen. Menguatnya peranan lapangan usaha ini pada tahun 2020 dimungkinkan karena menurunnya peranan lapangan usaha lain sebagai dampak pendemi *COVID-19*. Setelah perekonomian meningkat kembali pada tahun 2021 maka peranan lapangan usaha ini menunjukkan penurunan yang sangat signifikan.

Jasa Pendidikan

Secara umum peranan lapangan usaha Jasa Pendidikan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, peranan lapangan usaha ini sebesar 4,65 persen dan di tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 4,72 persen. Tahun 2020 peranannya menurun menjadi sebesar 4,54 persen dan menurun kembali menjadi sebesar 4,16 persen pada tahun 2022 dan 4,06 persen di tahun 2023.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Lapangan usaha ini mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Dalam periode tahun 2019-2023 peranan lapangan usaha ini cenderung menurun. Pada tahun 2019 peranannya 1,29 persen. Meningkat di tahun 2020 sebesar 1,44 persen dan kembali menurun pada tahun 2021 - 2023 yaitu sebesar 1,40 persen, 1,33 persen dan 1,30 persen.

Jasa lainnya

Peranan lapangan usaha Jasa Lainnya terhadap perekonomian Kota Pekalongan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Peranan lapangan usaha ini tahun 2019-2020 sebesar 1,90 persen, dan tahun 2021-2023 menurun sebesar 1,83 persen 1,82 persen dan 1,80 persen.

2.1.2.3 Pertumbuhan PDRB

Pada tahun 2019, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan sebesar 5,50 persen. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami perlambatan sebesar -1,87 persen, tumbuh sebesar 3,59 persen di tahun 2021 dan kembali tumbuh di tahun 2022 sebesar 5,76 persen, serta kembali mengalami perlambatan ditahun 2023 sebesar 5,44 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan tiga besar yakni Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 13,08 persen, Pengadaan Listrik dan Gas 11,08 persen dan Informasi dan Komunikasi sebesar 8,75 persen.

Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan disajikan dalam Tabel II-8 berikut.

Tabel II-8 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,63	6,36	-3,21	3,41	-0,47
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	4,84	-0,48	2,38	4,26	2,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,72	-0,26	2,91	4,04	11,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,21	6,91	6,34	2,38	3,96
F	Konstruksi	4,71	-1,25	8,64	1,09	8,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,47	-4,68	5,46	3,29	5,13
H	Transportasi dan Pergudangan	7,53	-24,25	3,00	48,53	8,05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,76	-3,78	4,78	12,43	13,08
J	Informasi dan Komunikasi	10,57	17,20	4,23	2,52	8,75
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,76	0,93	1,35	0,55	2,98
L	Real Estat	5,62	-0,08	1,89	4,89	6,27
M,N	Jasa Perusahaan	8,31	-4,32	2,22	5,32	7,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,82	-1,00	-0,85	1,20	2,10
P	Jasa Pendidikan	2,63	-0,56	0,50	0,48	5,47
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,84	8,35	1,76	2,35	4,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,47	-1,19	0,87	5,75	4,32
Produk Domestik Regional Bruto		5,50	-1,87	3,59	5,76	5,44

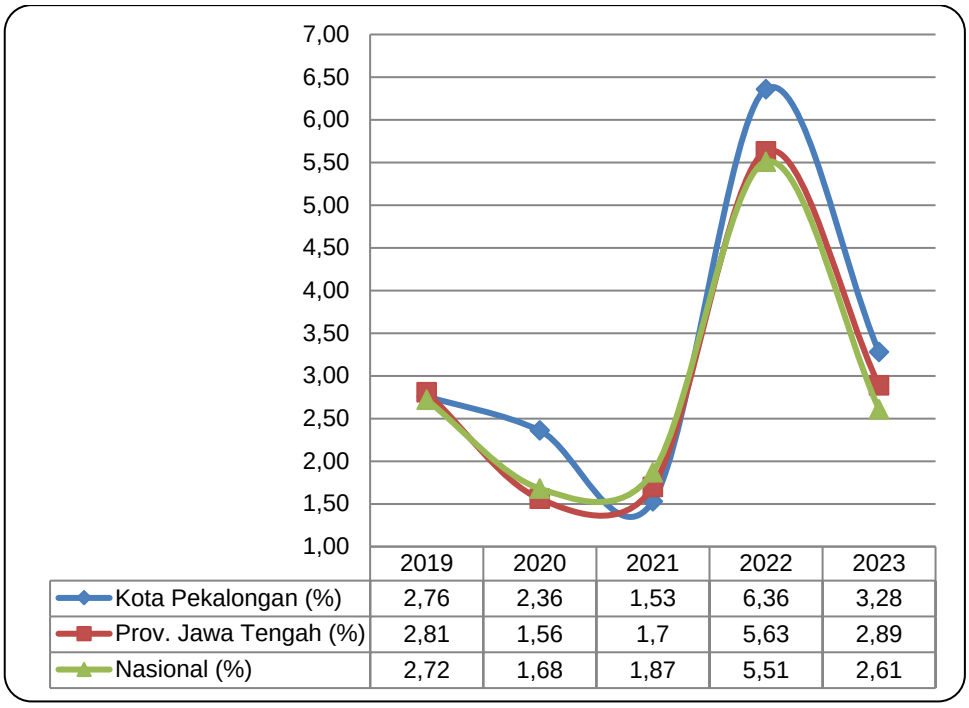
Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Laju pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2019-2023 berfluktuasi namun berkesinambungan, dengan penopang pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan pada tahun 2023 mayoritas adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

2.1.2.4 Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2019 - 2023, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 6,36 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir.

Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar II-14 berikut.

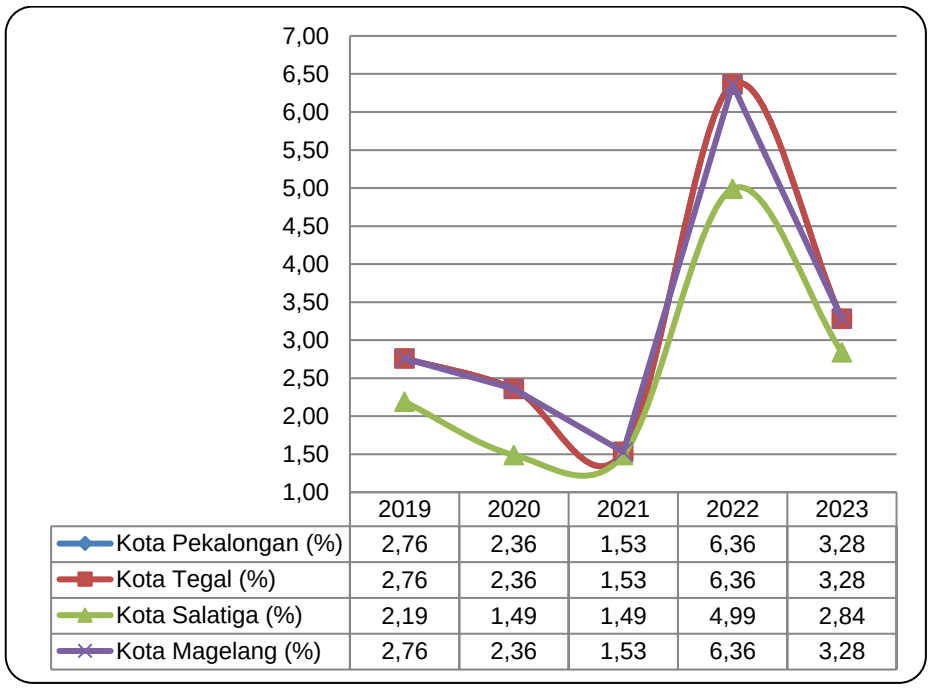


	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekalongan (%)	2,76	2,36	1,53	6,36	3,28
Prov. Jawa Tengah (%)	2,81	1,56	1,7	5,63	2,89
Nasional (%)	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61

Gambar II-14 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 - 2023

Sumber: www.bps.go.id, 2024

Mulai tahun 2019 BPS Jawa Tengah hanya merilis nilai inflasi di 6 Kota, yaitu: Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Kudus, Kota Purwokerto, Kota Cilacap, Kota Tegal. Sehingga untuk Kota Pekalongan dan Kota Magelang merujuk pada inflasi *sister city* nya yaitu Kota Tegal, sedangkan untuk Kota Salatiga merujuk pada nilai inflasi Kota Semarang.



	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekalongan (%)	2,76	2,36	1,53	6,36	3,28
Kota Tegal (%)	2,76	2,36	1,53	6,36	3,28
Kota Salatiga (%)	2,19	1,49	1,49	4,99	2,84
Kota Magelang (%)	2,76	2,36	1,53	6,36	3,28

Gambar II-15 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2019 - 2023

Sumber: www.bps.go.id (diolah), 2024

Jika dibandingkan dengan daerah setara (Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Magelang), laju inflasi Kota Pekalongan tahun tahun 2019 sama dengan Kota Tegal, berada

di urutan tertinggi yaitu 2,76%. dan laju inflasi paling rendah yaitu Kota Salatiga sebesar 2,19%. Laju inflasi pada keempat daerah setara tersebut cenderung menurun sampai dengan tahun 2021, yang artinya semakin membaik. Namun pada tahun 2022 laju inflasi meningkat tajam, dimana Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang meningkat menjadi 6,36%, dan Kota Salatiga menjadi 4,99%. Pada tahun 2023 laju inflasi kembali menurun menjadi 3,28% untuk Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang, serta 2,84% untuk Kota Salatiga.

Penyumbang inflasi terbesar di Kota Pekalongan pada tahun 2023 adalah kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, Pendidikan, serta Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Faktor penyumbang terjadinya inflasi tertinggi pada 2023 lalu adalah adanya kenaikan harga kebutuhan pokok terutama komoditi beras, cabai merah, dan bawang merah.

Mulai tahun 2020 terdapat perbedaan komponen kelompok pengeluaran sebagai dasar perhitungan inflasi, sehingga tabel inflasi menurut kelompok pengeluaran dijadikan dua, yaitu tahun 2018-2019 dan tahun 2020-2023. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-9 dan Tabel II-10 berikut.

Tabel II-9 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

Kelompok Pengeluaran	2018	2019
Umum	2,92	2,76
Bahan Makanan	3,66	8,00
Makanan Jadi	3,05	1,60
Perumahan	3,47	0,40
Sandang	2,51	3,31
Kesehatan	0,54	4,75
Pendidikan	1,33	3,74
Transport	2,43	0,31
Perlengkapan	-	-
Infokom	-	-
Rekreasi	-	-
Restoran	-	-
Perawatan Pribadi	-	-

Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah 2024

Tabel II-10 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020 - 2023

Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022	2023
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,36	2,14	8,96	7,89
Pakaian dan Alas Kaki	3,95	2,01	2,45	0,51
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,32	1,42	1,47	1,30
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,67	1,13	4,89	0,40
Kesehatan	2,87	0,55	2,50	2,78
Transportasi	1,36	1,01	16,42	-0,69
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,19	-0,64	1,74	0,03
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	6,14	2,62	4,50	0,74

Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022	2023
Pendidikan	-2,66	0,06	3,21	5,50
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,74	1,61	4,81	1,01
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,16	2,35	9,64	3,39
Umum	2,32	1,53	6,31	3,04

Sumber: BPS Jawa Tengah dan Kota Tegal Dalam Angka 2024, diolah, 2024

2.1.2.5 PDRB per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2019 hingga 2023 berfluktuasi. Pada Tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 35,41 juta rupiah. Pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sebesar 35,32 juta rupiah, dan meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 37,17 juta rupiah pada tahun 2021, 40,12 juta rupiah pada tahun 2022 dan 43,29 juta rupiah di tahun 2023. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel II-11 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	10.873,98	10.848,87	11.460,58	12.590,98	13.744,05
- ADHK (Miliar Rp)	7.477,43	7.337,83	7.601,49	8.039,46	8.476,55
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	35,41	35,32	37,17	40,12	43,29
- ADHK (Juta Rp)	24,35	23,89	24,66	25,61	26,70
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (persen)	6,86	-0,25	5,24	7,92	6,48
- ADHK (persen)	4,60	-1,88	3,20	3,89	2,85

Sumber: BPS Kota Pekalongan (diolah), 2024

PDRB per kapita yang sempat sedikit melemah pada tahun 2020, disebabkan dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan pada tahun 2020 PDRB berkontraksi, yaitu tumbuh secara negatif. Hal ini menyebabkan PDRB per kapita sedikit melemah. Kondisi ini merupakan fenomena umum yang juga terjadi di daerah lain, termasuk Provinsi Jawa tengah maupun nasional. Dengan kembali pulihnya perekonomian pasca pandemi, maka perekonomian bertumbuh kembali sehingga pada tahun 2021 dan 2022, PDRB per kapita kembali meningkat.

Data PDRB per kapita ini merupakan data yang belum menggambarkan kondisi sesungguhnya pendapatan per kapita masyarakat. Dalam beberapa kasus, PDRB per kapita ini digunakan karena data pendapatan per kapita yang telah beberapa tahun ini tidak tersedia. Oleh karena itu, untuk menggambarkan tingkat kesejahateraan masyarakat, seringkali digunakan data PDRB per kapita ini.

2.1.2.6 Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 (nol) menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Indeks gini pada tahun 2019 sebesar 5,69 persen sehingga menurunkan indeks gini Kota Pekalongan menjadi 0,305. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi 1,87%. Meskipun demikian, indeks gini masih meningkat menjadi 0,314. Pada tahun 2021 , perekonomi kembali berkembang yaitu dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,59 persen dan Indeks Gini pun juga meningkat sangat tajam menjadi 0,357. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi semakin menguat yaitu dengan angka 5,76 persen, tetapi Indeks Gini kembali menurun menjadi 0,373. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-12 berikut.

Tabel II-12 Indeks Gini Kota Pekalongan
Tahun 2019 - 2023

Tahun	Indeks Gini
2019	0,305
2020	0,314
2021	0,357
2022	0,373
2023	0,321

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2024

Dari data tersebut dapat disimpulkan sementara bahwa indeks gini Kota Pekalongan masih menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Tantangan ke depan adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi yang didorong terus kenaikannya dapat terwujud pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berdampak bagi masyarakat luas. Masyarakat luas yang dapat meningkat kesejahteraannya, diharapkan dapat menurunkan indeks gini ke depannya.

Pembangunan inklusif yang dapat dilaksanakan antara lain terus mendorong pengembangan sektor unggulan, yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian serta sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian di sektor tersebut. Upaya lain yang harus terus dilakukan adalah mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru sehingga perekonomian dapat terus tumbuh serta revitalisasi kawasan terdampak rob dan banjir. Upaya-upaya tersebut telah diakomodasi dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029.

2.1.2.7 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

Program penanggulangan kemiskinan menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021, terdiri dari:

1. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, yang meliputi:
   a. Bantuan pangan;
   b. Bantuan kesehatan;
   c. Bantuan pendidikan; dan
   d. Bantuan perumahan.
2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, meliputi:
   a. Pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
   b. Bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
   c. Fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
   d. Fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan,
   e. Fasilitasi pengelolaan usaha kelompok;
   f. Fasilitasi kemitraan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat.
3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, meliputi:
   a. Peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
   b. Perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin;
   c. Peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir;
   d. Peningkatan sarana dan prasarana usaha.
4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
   a. Program peningkatan perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
   b. Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup;
   c. Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.1.2.7.1 Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2023, Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar Rp. 565.998/kapita/bulan. Angka ini diatas Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp. 408.522 dan diatas Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 477.580,00.

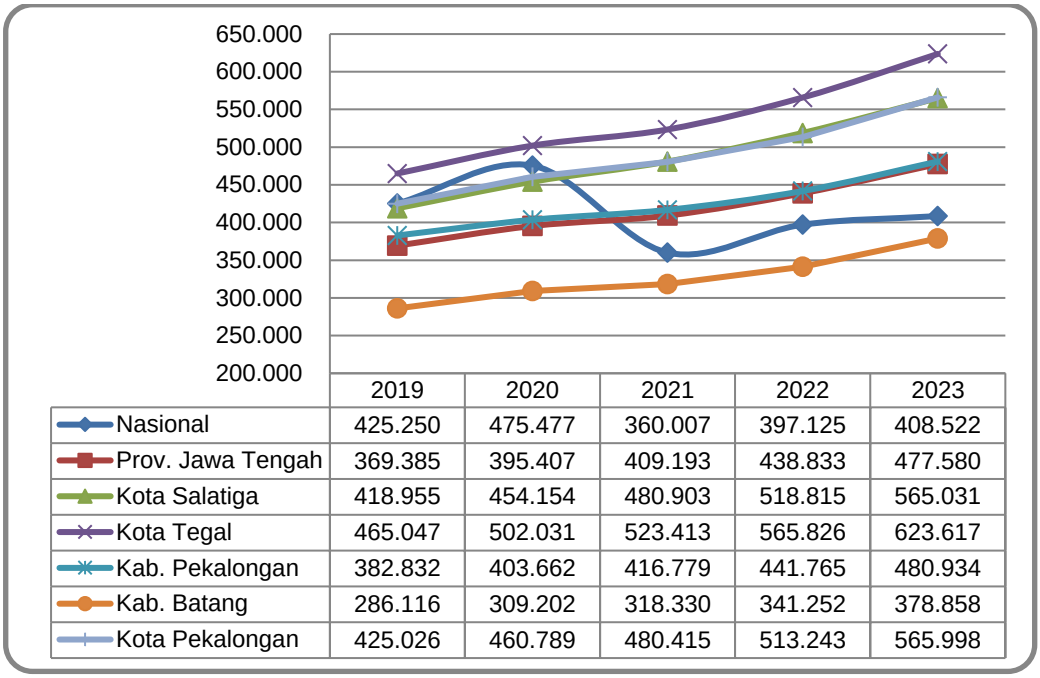
Tabel II-13 Garis Kemiskinan (GK) Kota Pekalongan, Daerah Setara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Tahun	GK Kota Pekalongan (Rp)	GK Kab Batang (Rp)	GK Kab Pekalongan (Rp)	GK Kota Tegal (Rp)	GK Kota Salatiga (Rp)	GK Provinsi Jawa Tengah (Rp)	GK Nasional (Rp)
2019	425.026	286.116	382.832	465.047	418.955	369.385	425.250

Tahun	GK Kota Pekalongan (Rp)	GK Kab Batang (Rp)	GK Kab Pekalongan (Rp)	GK Kota Tegal (Rp)	GK Kota Salatiga (Rp)	GK Provinsi Jawa Tengah (Rp)	GK Nasional (Rp)
2020	460.789	309.202	403.662	502.031	454.154	395.407	454.652
2021	480.415	318.330	416.779	523.413	480.903	409.193	472.525
2022	513.243	341.252	441.765	565.826	518.815	438.833	513.517
2023	565.998	378.858	480.934	623.617	565.031	477.580	408.522

Sumber: https://pekalongankota.bps.go.id/, https://jateng.bps.go.id/, dan https://www.bps.go.id/ (diolah), 2024

Untuk memberikan gambaran perbandingan garis kemiskinan antara Kota Pekalongan, daerah setara, Provinsi Jawa Tengah dan nasional, disajikan dalam grafik berikut.



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	425.250	475.477	360.007	397.125	408.522
Prov. Jawa Tengah	369.385	395.407	409.193	438.833	477.580
Kota Salatiga	418.955	454.154	480.903	518.815	565.031
Kota Tegal	465.047	502.031	523.413	565.826	623.617
Kab. Pekalongan	382.832	403.662	416.779	441.765	480.934
Kab. Batang	286.116	309.202	318.330	341.252	378.858
Kota Pekalongan	425.026	460.789	480.415	513.243	565.998

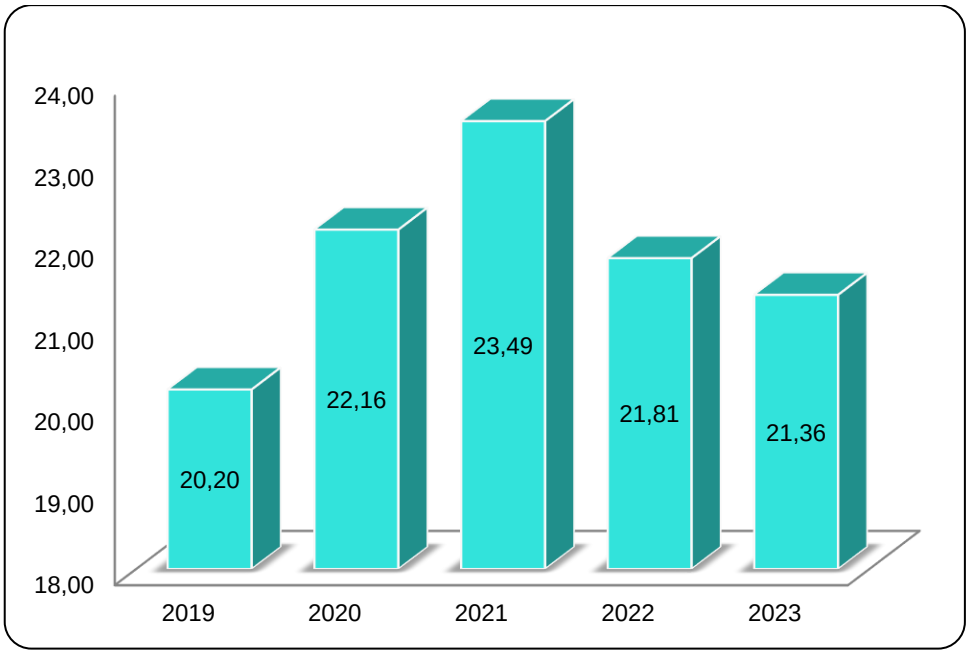
Gambar II-16 Perbandingan Garis Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: https://pekalongankota.bps.go.id/, https://jateng.bps.go.id/, dan https://www.bps.go.id/ (diolah), 2024

2.1.2.7.2 Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kota Pekalongan diantaranya adanya program-program seperti PKH, bantuan pangan non tunai, beasiswa untuk siswa miskin dan bantuan tunai yang bersumber dari DBHCHT. Di sektor kesehatan, juga disediakannya jaminan kesehatan bagi sebagian masyarakat akan sangat membantu menekan pengeluaran masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat juga dilakukan melalui pelatihan keterampilan kerja untuk industri dan mendorong lahirya wirausaha baru.



Gambar II-17 Jumlah Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 (000 jiwa)

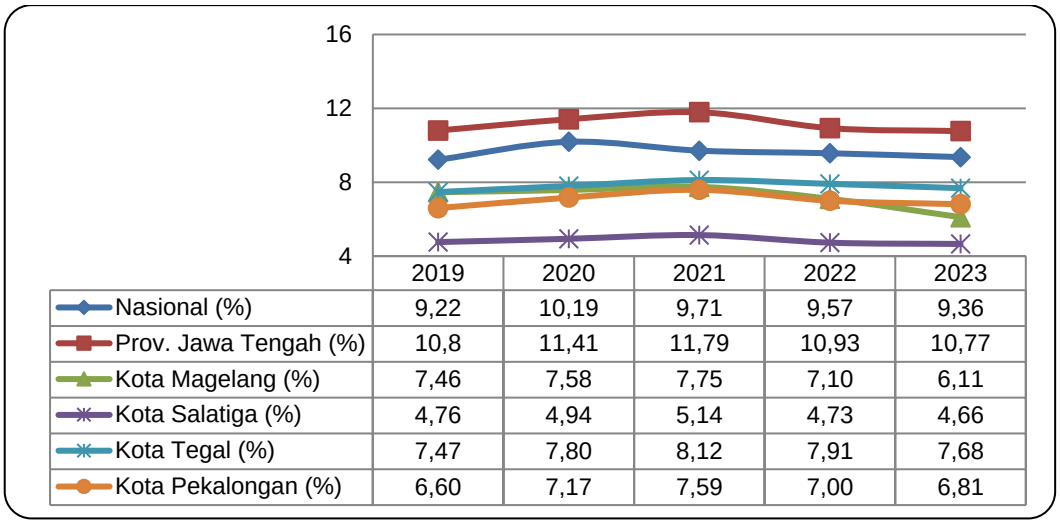
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Konsistensi strategi pengentasan kemiskinan harus terus dijaga dan ditingkatkan sehingga jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan dapat menurun signifikan. Beberapa strategi tersebut adalah dengan mengurangi beban pengeluaran warga miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin, serta menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Strategi mengurangi beban pengeluaran warga miskin yaitu melalui pemberian bantuan sembako dan BLT (bantuan langsung tunai). Dalam hal meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin, Pemerintah Kota melakukan perluasan kesempatan kerja melalui pelatihan-pelatihan, baik yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja (BLK), Dindagkop UKM, maupun kelurahan. Sedangkan dalam hal menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota menyinergikan kebijakan bantuan tunai yang bersumber dari DBHCHT dengan mempersyarakatkan penerima bantuan adalah warga miskin dari DTKS yang belum menerima bantuan apapun.

Selama kurun waktu 2019 hingga tahun 2023, tingkat kemiskinan Kota Pekalongan selalu berada di bawah rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional namun bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019 tingkat kemiskinan Kota Pekalongan berada pada angka 6,60 persen atau sebanyak 20,20 ribu jiwa meningkat di tahun 2020 dan 2021 menjadi 7,17 persen dan 7,59 atau sebanyak 22,16 ribu jiwa dan 23,49 ribu jiwa. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2020-2021 terjadi pandemi *COVID-19* berkepanjangan yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk Kota Pekalongan.

Kemudian tingkat kemiskinan mulai menurun di tahun 2022 menjadi 7,00 persen atau sebanyak 21,81 ribu jiwa sebagai dampak dilaksanakannya upaya percepatan Vaksinasi *COVID-19* dan upaya pemulihan ekonomi penduduk Kota Pekalongan pasca COVID-19 dan kembali menurun di tahun 2023 menjadi 6,81 persen atau sebanyak 21,36 ribu jiwa Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut:

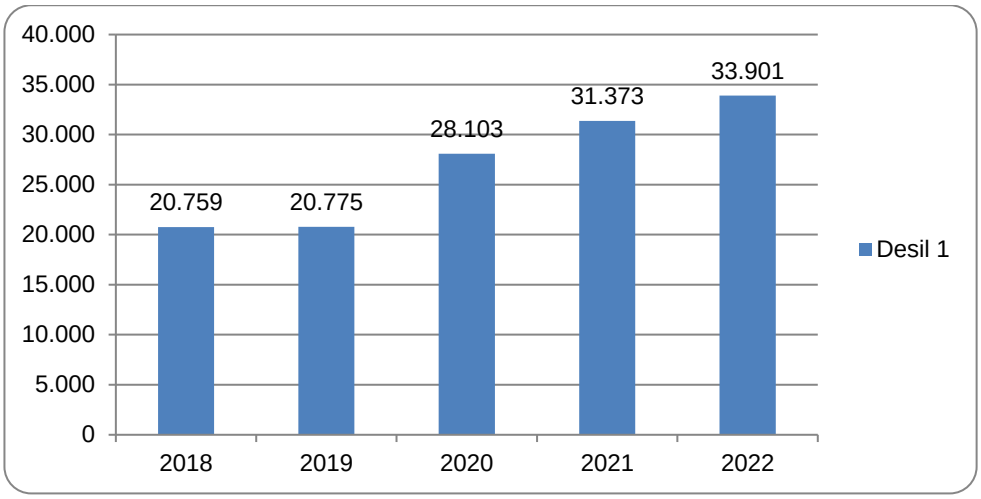


	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional (%)	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36
Prov. Jawa Tengah (%)	10,8	11,41	11,79	10,93	10,77
Kota Magelang (%)	7,46	7,58	7,75	7,10	6,11
Kota Salatiga (%)	4,76	4,94	5,14	4,73	4,66
Kota Tegal (%)	7,47	7,80	8,12	7,91	7,68
Kota Pekalongan (%)	6,60	7,17	7,59	7,00	6,81

Gambar II-18 Perbandiangan Rasio Penduduk Miskin Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: pekalongankota.bps.go.id, jateng.bps.go.id, dan www.bps.go.id (diolah), 2024

Mulai Tahun 2021, upaya penanganan pengentasan kemiskinan ekstrem saat ini sudah tidak lagi menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mengamanatkan bahwa kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya kini memanfaatkan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dalam melakukan intervensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Data P3KE ini bersumber dari hasil Pendataan Keluarga dari BKKBN beserta pemutakhirannya yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraannya. Adapun jumlah individu yang tergolong ke dalam kategori penduduk sangat miskin berdasarkan data yang telah ditetapkan (desil 1) adalah sebagai berikut:



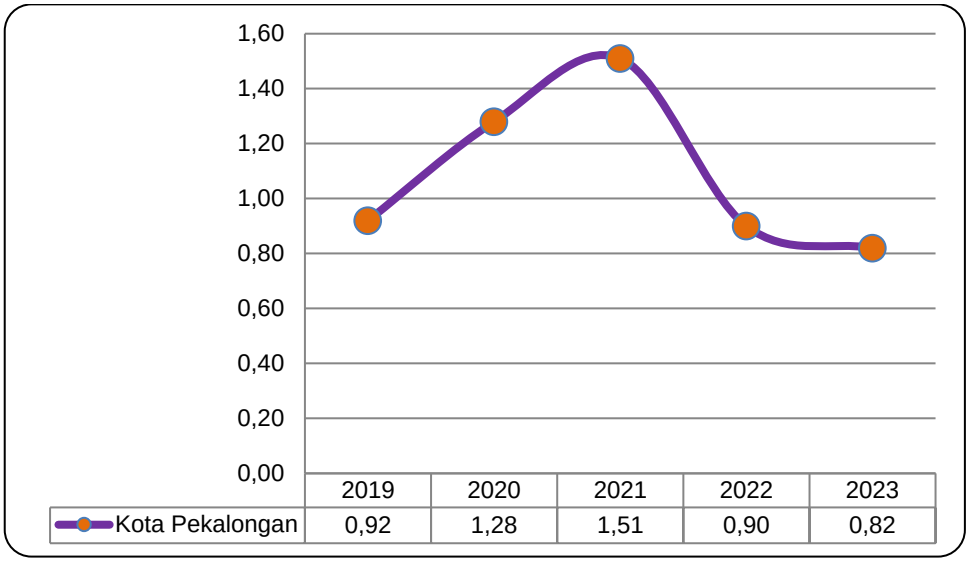
Gambar II-19 Jumlah Penduduk Miskin Desil 1 Kota Pekalongan Tahun 2018-2022

Sumber: DTKS 2018 - 2020 (diolah), Data P3KE 2021-2022, 2024

2.1.2.7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index - P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

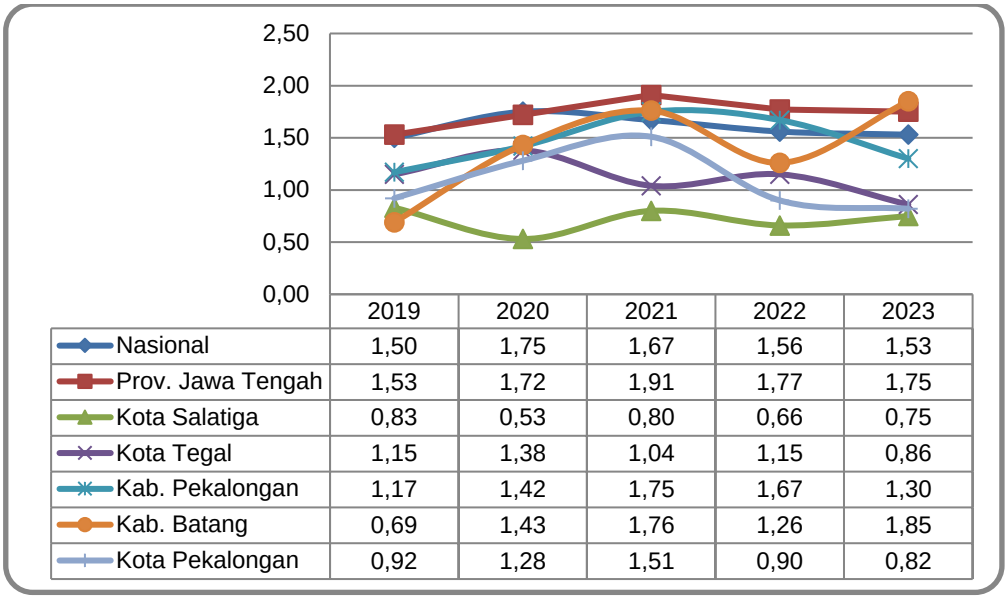
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan selama kurun waktu 2019-2023 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2019 sebesar 0,92, meningkat 0,36 menjadi 1,28 di tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 meningkat di angka 1,51. Pada tahun 2022 dan 2023 kembali menurun menjadi 0,90 dan 0,82. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 disajikan dalam Gambar II-20 berikut.



Gambar II-20 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: https://pekalongankota.bps.go.id/ dan https://jateng.bps.go.id/ (diolah), 2024

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kota Tegal, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan cenderung lebih rendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Salatiga, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih tinggi. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Kedalaman Kemiskinan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Selengkapnya disajikan dalam Gambar II-21 berikut.



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	1,50	1,75	1,67	1,56	1,53
Prov. Jawa Tengah	1,53	1,72	1,91	1,77	1,75
Kota Salatiga	0,83	0,53	0,80	0,66	0,75
Kota Tegal	1,15	1,38	1,04	1,15	0,86
Kab. Pekalongan	1,17	1,42	1,75	1,67	1,30
Kab. Batang	0,69	1,43	1,76	1,26	1,85
Kota Pekalongan	0,92	1,28	1,51	0,90	0,82

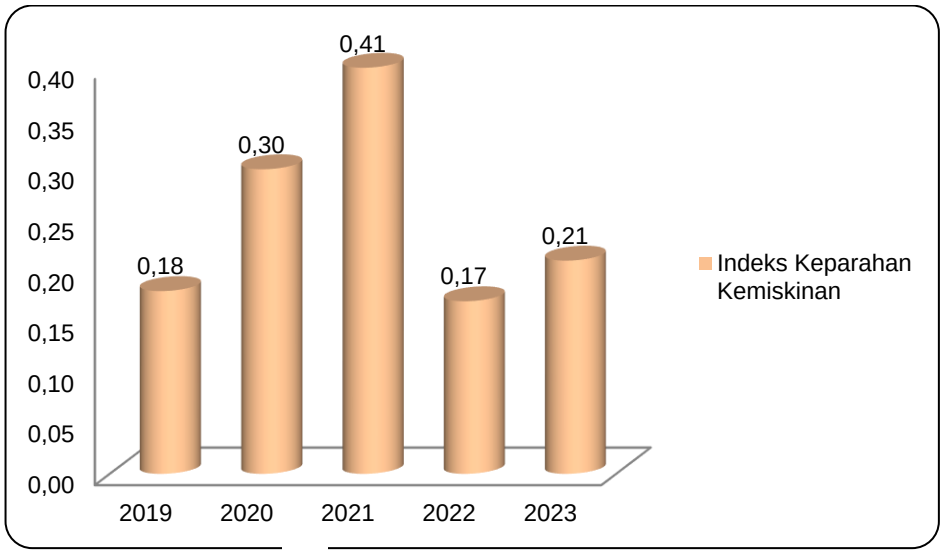
Gambar II-21 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: pekalongankota.bps.go.id, jateng.bps.go.id, dan www.bps.go.id (diolah), 2024

2.1.2.7.4 Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini merupakan produk BPS dengan mengolah sumber data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional).

Indeks keparahan kemiskinan Kota Pekalongan pada tahun 2019 sebesar 0,18 persen. Tahun selanjutnya, yaitu tahun 2020 dan 2021 indeks ini mengalami kenaikan menjadi 0,30 dan 0,41, yang berarti ketimpangan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin pada tahun 2020 semakin bertambah dibanding tahun 2019. Pada tahun 2022 indeks keparahan kemiskinan Kota Pekalongan mengalami penurunan menjadi 0,17 pada tahun 2022 dan meningkat kembali menjadi 0,21 di tahun 2023.

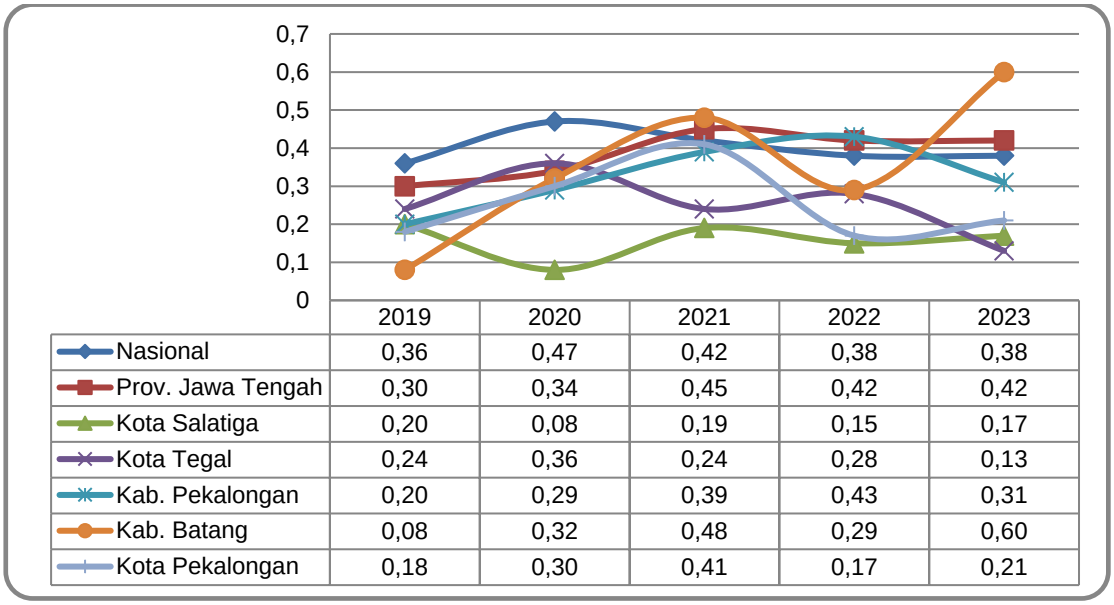


Gambar II-22 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: pekalongankota.bps.go.id dan jateng.bps.go.id (diolah), 2024

Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan cenderung fluktuatif dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dibandingkan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan, pada tahun 2023 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih rendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan Kota Salatiga dan Kota Tegal, pada tahun 2023 Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Pekalongan lebih tinggi.

Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan masih berada di bawah Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi dan Nasional. Namun perlu upaya lebih keras bagi Pemerintah Kota Pekalongan untuk menurunkan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan mengingat angka indeks yang cenderung mengalami kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya.



	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	0,36	0,47	0,42	0,38	0,38
Prov. Jawa Tengah	0,30	0,34	0,45	0,42	0,42
Kota Salatiga	0,20	0,08	0,19	0,15	0,17
Kota Tegal	0,24	0,36	0,24	0,28	0,13
Kab. Pekalongan	0,20	0,29	0,39	0,43	0,31
Kab. Batang	0,08	0,32	0,48	0,29	0,60
Kota Pekalongan	0,18	0,30	0,41	0,17	0,21

Gambar II-23 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: pekalongankota.bps.go.id, jateng.bps.go.id, dan www.bps.go.id (diolah), 2024

Pasca pandemi *COVID-19*, kondisi perekonomian belum pulih sepenuhnya. Hal ini dikarenakan penduduk terdampak pandemi, di antaranya penduduk yang telah menjadi pengangguran akibat PHK pada beberapa perusahaan, para pengusaha yang mengalami penurunan penghasilan akibat daya beli masyarakat yang menurun sebagai dampak dari pandemi *COVID-19*. Kondisi ini mengakibatkan besarnya kemungkinan peningkatan jumlah penduduk miskin (absolut) maupun persentase penduduk miskin di Kota Pekalongan.

Peningkatan penduduk miskin baik secara absolut maupun persentase ini dikarenakan bertambahnya penduduk yang penghasilannya rendah atau di bawah garis kemiskinan serta mereka yang sebelum pandemi bekerja di luar kota kemudian kembali ke Kota Pekalongan karena kehilangan pekerjaan dan pasca pandemi masih berada di Kota Pekalongan. Perkembangan menggembirakan bahwa pada tahun 2022, angka kemiskinan mulai menunjukkan penurunan kembali. Kondisi ini tentunya merupakan dampak dari perbaikan kinerja perekonomian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini tentunya akan terus dilakukan terus-menerus, agar angka kemiskinan dapat semakin menurun.

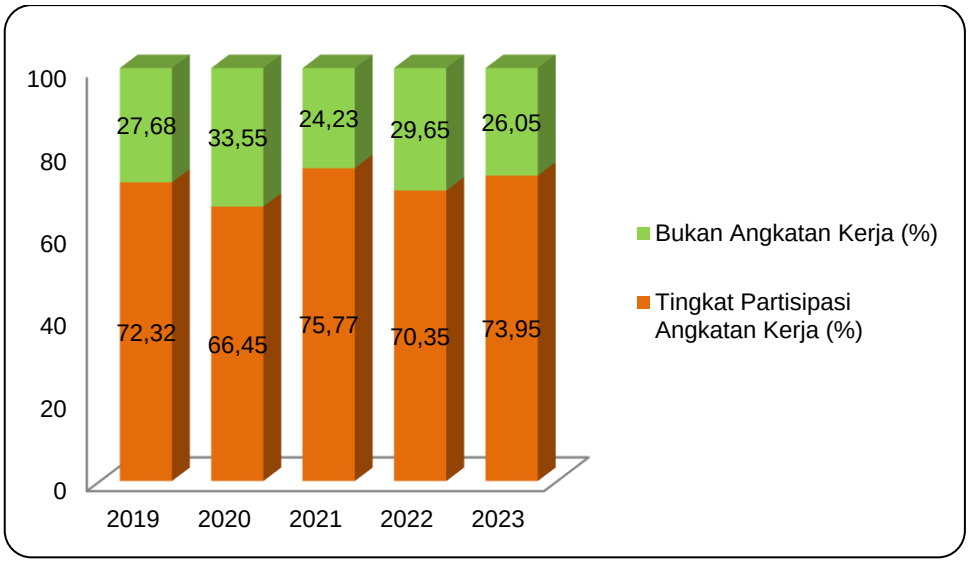
Upaya terintegrasi telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan bersama para pemangku kepentingan, dalam rangka untuk terus menurunkan angka kemiskinan. Namun demikian, karena angka kemiskinan telah mencapai angka satu dijit, maka penurunan angka kemiskinan telah mengalami perlambatan. Hal ini disebabkan karena kemiskinan yang harus dientaskan adalah kemiskinan struktural. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan lebih terintegrasi antar pemangku kepentingan pembangunan Kota Pekalongan dan dilakukan secara kontinyu.

Salah satu cara pandang dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan adalah dengan mencermati data angka kemiskinan selama 1 (satu) dekade ini, dengan dibandingkan indikator yang lain, terutama indikator kinerja makro kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan berbagai perkembangan data berbagai indikator selama 1 (satu) dekade ini (tahun 2013-2022) bahwa angka kemiskinan memiliki korelasi kuat dan signifikan dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan PDRB Per Kapita. Angka kemiskinan memiliki korelasi yang lemah dan tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), Indeks Gini, dan Inflasi.

Korelasi angka kemiskinan dengan IPM dan PDRB per kapita adalah berbanding terbalik. Semakin tinggi IPM dan pendapatan per kapita maka angka kemiskinan akan semakin rendah. Oleh karena itu, upaya terintegrasi dalam rangka penanggulangan kemiskinan harus dipadukan dengan upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk terus meningkatkan IPM maupun PDRB atau PDRB per kapita. Di sisi yang lain, indikator pertumbuhan ekonomi dan TPT belum memiliki korelasi yang signifikan dengan angka kemiskinan. Upaya penurunan TPT harus dapat berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang harus diwujudkan pun adalah pertumbuhan ekonomi inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

2.1.2.8 Angka Rasio Penduduk yang Bekerja

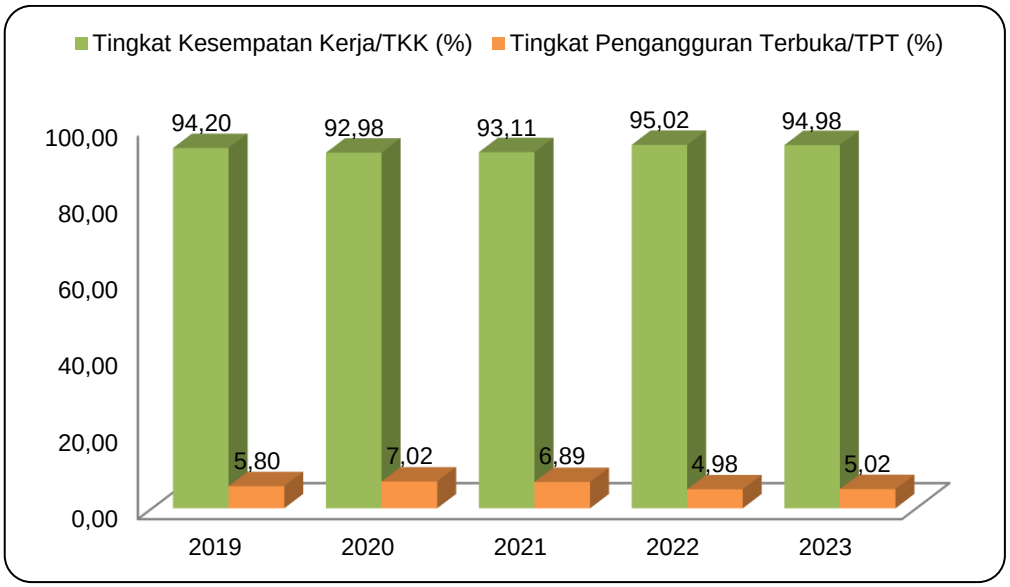
Penduduk usia kerja dikategorikan menjadi dua, yang disebut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Menurut *International Labour Organization* (ILO), penduduk usia kerja adalah penduduk yang telah mencapai umur 15 tahun atau lebih. Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kota Pekalongan Tahun 2023 tercatat sebanyak 171.522 orang. Dari jumlah tersebut, yang termasuk Angkatan Kerja (penduduk usia produktif/usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran) sebesar 73,95 persen pada tahun 2023, naik 3,60 persen dari tahun 2022. Sisanya, yaitu 26,05 persen adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu penduduk usia produktif/usia kerja 15 tahun ke atas yang bersekolah/kuliah, mengurus rumah tangga, pensiunan, atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Kenaikan TPAK pada tahun 2019-2023 seiring dengan kenaikan jumlah penduduk usia kerja.



Gambar II-24 Rasio TPAK dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: https://pekalongankota.bps.go.id/, https://jateng.bps.go.id/, 2024

Sementara itu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Pekalongan cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2023 mencapai 94,98 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,02 persen atau meningkat 0,04 poin, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 5 orang yang benar-benar menganggur.



Gambar II-25 Rasio TKK dan TPT di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2024

Nilai TPT secara persentase mengalami peningkatan dari 4,98 persen menjadi 5,02 persen, dan secara jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami kenaikan dari 8.470 orang di tahun 2022 menjadi 9.065 orang pada tahun 2023. Semua sektor diharapkan terus berpacu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, maka mampu menyerap tenaga kerja dan membuka peluang kerja lebih tinggi.

2.1.2.9 Angka Kriminalitas yang Ditangani

Angka kriminalitas di Kota Pekalongan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 cenderung menurun. Angka kriminalitas dihitung per 10.000 penduduk, dimana pada tahun 2019 berada di angka 4,59. Di tahun-tahun selanjutnya, angka kriminalitas yang tertangani selalu menurun, mulai dari 3,91 di tahun 2020, 2,60 di tahun 2021 dan 1,47 di tahun 2022 dan 4,29 di tahun 2023.

Tabel II-14 Angka Kriminalitas (AK) yang tertangani Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Angka Kriminalitas
2019	4,59
2020	3,91
2021	3,60
2022	1,47
2023	4,91

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2024

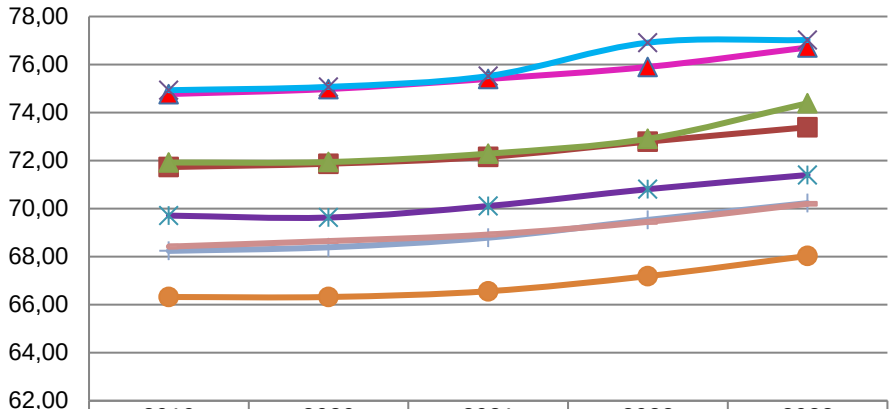
Berdasarkan data tersebut, angka kriminalitas cenderung menurun, namun naik Kembali di tahun 2023. Angka ini belum secara langsung berdampak terhadap kondusivitas wilayah karena belum adanya laporan maupun penelitian terkait korelasi antara angka kriminalitas dan kondusivitas wilayah. Data angka kriminalitas dari Kesbangpol Kota Pekalongan bersumber dari Polres Pekalongan Kota dan Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Data dari dua sumber tersebut belum tentu memiliki metode pengambilan data yang sama.

Berdasarkan kecenderungan angka kriminalitas tersebut, salah satu tantangan untuk mewujudkan kondusivitas wilayah, dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Faktor-faktor eksternal yang harus diperhatikan dalam rangka penciptaan kondusvitas wilayah dan menekan angka kriminalitas adalah perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.

2.1.2.10 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur empat dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu Angka Harapan Hidup saat lahir, capaian tingkat pendidikan yang terdiri dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan guna mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Perkembangan IPM Kota Pekalongan terus meningkat dari tahun 2019 yaitu 74,77 menjadi 76,71 di tahun 2023. Dibandingkan dengan IPM rata-rata Provinsi Jawa Tengah, IPM Kota Pekalongan diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Apabila dilihat dari IPM se-eks Karisidenan Pekalongan dari tahun 2019 sampai 2023, Kota Pekalongan menempati urutan kedua di setelah Kota Tegal.



	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekalongan (%)	74,77	74,98	75,40	75,90	76,71
Prov. Jateng (%)	71,73	71,87	72,16	72,79	73,39
Nasional (%)	71,92	71,94	72,29	72,91	74,39
Kota Tegal (%)	74,93	75,07	75,52	76,91	77,02
Kab. Pekalongan (%)	69,71	69,63	70,11	70,81	71,40
Kab. Pemalang (%)	66,32	66,32	66,56	67,19	68,03
Kab. Tegal (%)	68,24	68,39	68,79	69,53	70,23
Kab. Batang (%)	68,42	68,65	68,92	69,45	70,20

Gambar II-26 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2019-2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

Secara lengkap, Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 disajikan dalam Tabel II-15 berikut.

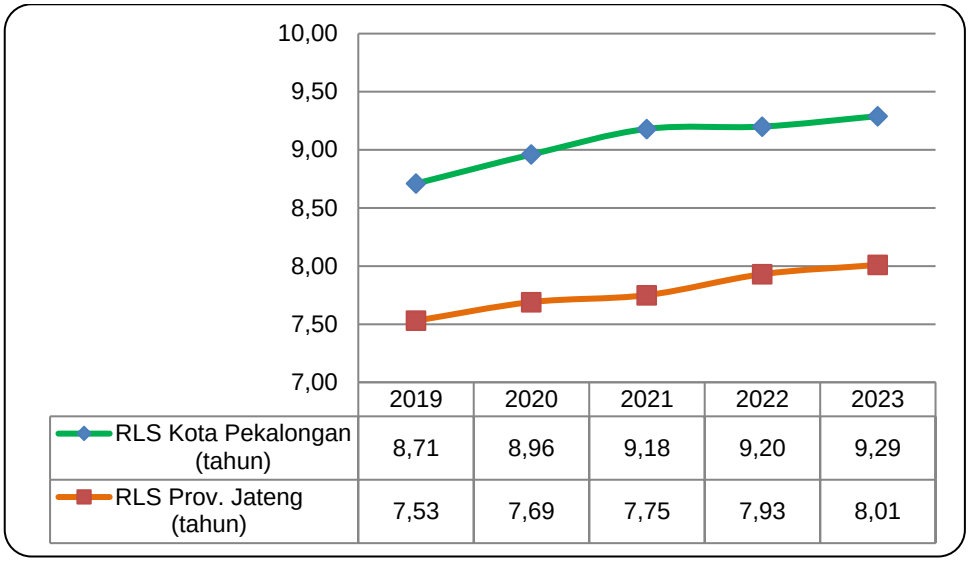
Tabel II-15 Komponen IPM Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Usia Harapan Hidup (tahun)	Pengeluaran per Kapita per tahun (Rp 000)	IPM
2019	8,71	12,83	74,28	12.680,00	74,77
2020	8,96	12,84	74,38	12.467,00	74,98
2021	9,18	12,85	74,44	12.598,00	75,40
2022	9,20	12,86	74.51	13.158.00	75,90
2023	9,29	12,87	74,60	14.056,00	76,71

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

2.1.2.11 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami peningkatan secara moderat. RLS tahun 2019 sebesar 8,71 tahun, terus meningkat di tahun-tahun berikutnya, menjadi 9,29 tahun pada tahun 2023. RLS Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir berada di atas RLS Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya disajikan dalam Gambar II-27 berikut.



Gambar II-27 Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

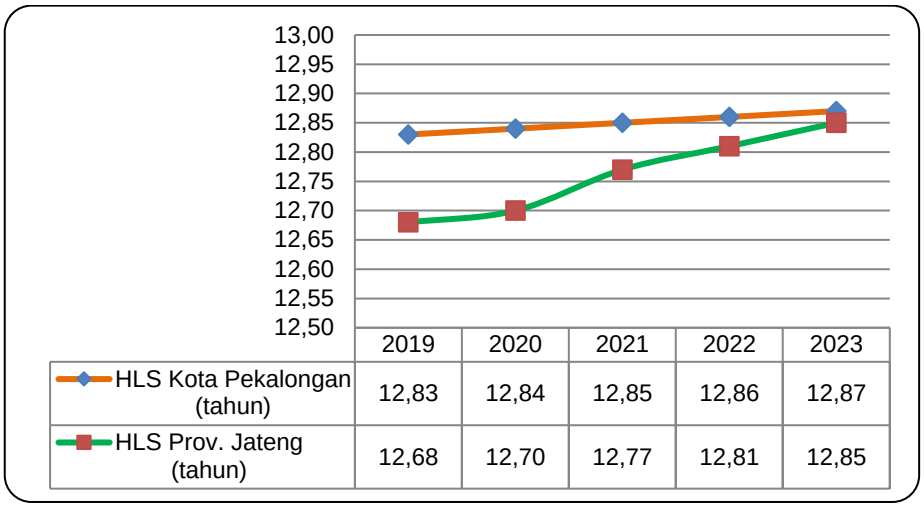
Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

2.1.2.12 Harapan Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Seiring dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, HLS Kota Pekalongan berada di atas HLS Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun

terakhir. Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir berada di atas RLS Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya disajikan dalam Gambar II-28 berikut.



	2019	2020	2021	2022	2023
HLS Kota Pekalongan (tahun)	12,83	12,84	12,85	12,86	12,87
HLS Prov. Jateng (tahun)	12,68	12,70	12,77	12,81	12,85

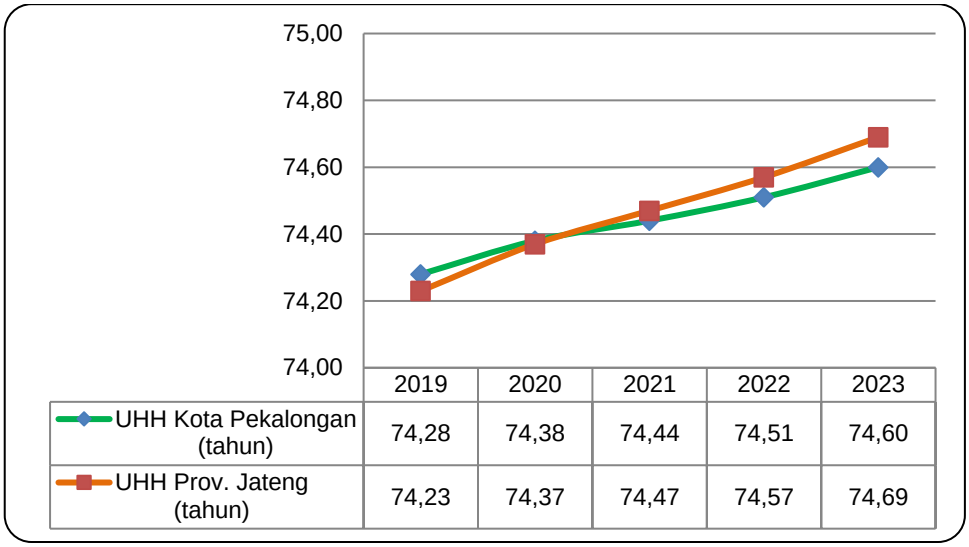
Gambar II-28 Harapan Lama Sekolah di Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

Pada tahun 2023 angka HLS Kota Pekalongan sebesar 12,87 tahun, artinya bahwa penduduk Kota Pekalongan yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan masih bersekolah selama minimal 12 tahun ke depan atau minimal di umur 19 tahun masih sekolah.

2.1.2.13 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam kurun waktu 2019 - 2023, UHH di Kota Pekalongan semakin meningkat dari 74,28 pada tahun 2019 menjadi 74,60 di tahun 2023. Artinya, secara rata-rata anak yang dilahirkan di Kota Pekalongan dapat bertahan hidup hingga mencapai usia 74 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan secara umum sudah semakin membaik. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, UHH Kota Pekalongan tahun 2022 dan 2023 berada di bawah UHH Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya disajikan dalam Gambar II-29 berikut.



	2019	2020	2021	2022	2023
UHH Kota Pekalongan (tahun)	74,28	74,38	74,44	74,51	74,60
UHH Prov. Jateng (tahun)	74,23	74,37	74,47	74,57	74,69

Gambar II-29 Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023

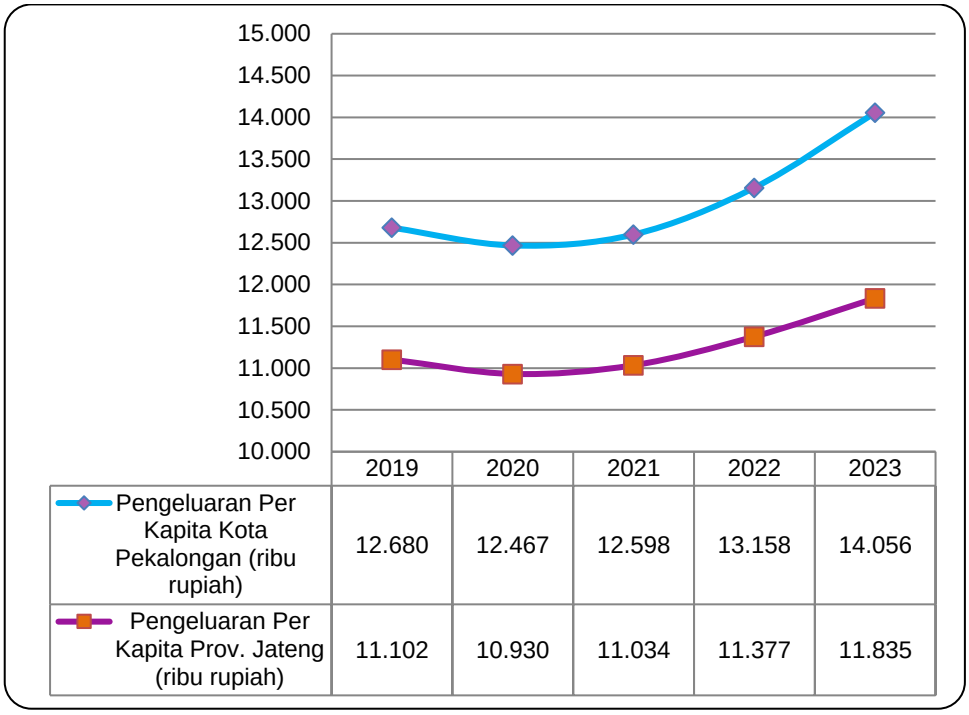
Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi UHH dan bersifat kompleks yaitu aspek ekonomi, aspek kesehatan, aspek sosial dan aspek lingkungan. Faktor dominan yang mempengaruhi UHH adalah aspek kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan diperhatikan serta menjadi investasi di masa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka diperlukan berbagai upaya paradigma sehat melalui kegiatan promotif dan preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan termasuk pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektor. Perwujudan peningkatan UHH sangat dipengaruhi oleh faktor kesehatan ibu, bayi dan balita; perbaikan gizi; perubahan perilaku; pencegahan penyakit menular dan tidak menular; kesehatan lingkungan serta faktor pelayanan kesehatan dengan pendekatan *continuum of care* atau asuhan pelayanan kesehatan berkesinambungan yang komprehensif disepanjang siklus kehidupan mulai dari sejak masa kehamilan, bayi, anak, remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia (lansia) yang melibatkan peran keluarga, komunitas, fasilitas kesehatan primer (Puskesmas) dan fasilitas kesehatan rujukan (Rumah Sakit).

2.1.2.14 Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2019-2023. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita sebesar Rp.12.680.000, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp.12.467.000 pada tahun 2020. Di tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 12.598.000, dan di tahun 2022 meningkat menjadi Rp.13.158.000. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita Kota Pekalongan meningkat menjadi sebesar Rp.14.056.000. Selengkapnya disajikan dalam Gambar II-30 berikut.



	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan (ribu rupiah)	12.680	12.467	12.598	13.158	14.056
Pengeluaran Per Kapita Prov. Jateng (ribu rupiah)	11.102	10.930	11.034	11.377	11.835

Gambar II-30 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dengan Provinsi Jateng Tahun 2019-2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

2.1.2.15 Angka Partisipasi Kasar

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai

dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Persentase penduduk menurut partisipasi sekolah dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK Kota Pekalongan sepanjang 5 (lima) tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi, baik di jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.

Tabel II-16 Angka Partisipasi Kasar Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023

Tahun	SD/MI/Sederajat (persen)		SMP/MTs/Sederajat (persen)		SMA/MA/SMK/Sederajat (persen)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2019	112,45	107,74	75,91	91,70	74,92	86,76
2020	110,98	106,32	79,36	93,21	78,66	86,83
2021	111,96	106,40	80,69	94,00	76,12	86,65
2022	111,33	106,19	80,07	94,05	77,40	86,83
2023	107,79	105,01	88,63	92,80	84,15	87,84

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2024 dan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Pada tahun 2019, APK jenjang SD/MI/sederajat sebesar 112,45 persen, pada tahun 2020 turun menjadi 110,98 persen, kemudian meningkat di tahun 2021 sebesar 111,96 persen dan kembali mengalami penurunan di tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu 111,33 persen dan 107,79 persen. Tidak seperti APK di jenjang SD/MI yang mengalamai fluktuasi, APK di jenjang SMP/MTs cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Dimulai dari tahun 2019 sebesar 75,91 persen, pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 79,36 persen, meningkat kembali di tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu sebesar 80,69 persen dan 80,07 persen, kemudian menjadi 88,63 di tahun 2023. Sementara itu APK jenjang SMA/MA/SMK fluktuatif dari awal periode (tahun 2019) hingga di tahun 2023 bearada di angka 84,15 persen.

Di tingkat Provinsi Jawa Tengah, APK jenjang SD/MI berada di atas 100 persen selama periode tahun 2019-2023, namun cenderung mengalami penurunan, hingga pada tahun 2023, yaitu sebesar 105,01 persen. APK jenjang SMP/MTs berada di atas 91 persen, dan APK jenjang SMA/MA/SMK berada di kisaran 86-87 persen. Secara umum, APK jenjang SD/MI Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan APK Provinsi Jawa tengah, namun APK jenjang SMP/MTs dan APK jenjang SMA/MA/SMK Kota Pekalongan lebih rendah dibanding APK Provinsi Jawa Tengah.

Angka partisipasi kasar kota menurut jenis sekolah berbasis gender di Kota Pekalongan bervariasi. Pada jenjang SD/MI, angka partisipasi kasar berbasis gender lebih di dominasi laki-laki dengan nilai 108,22. Sedangkan angka partisipasi kasar SMP/setara lebih didominasi kaum perempuan dengan nilai 107,36. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-17 berikut.

Tabel II-17 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenis Sekolah Berbasis Gender di Kota Pekalongan Tahun 2023

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Kasar	SD/Setara (persen)	108,22	107,36
	SMP/Setara (persen)	81,54	95,72
	SMA/Setara (persen)	N/A	N/A

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

2.1.2.16 Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun 2017-2019, persentase pada jenjang pendidikan SD/sederajat berada di posisi tinggi dibandingkan tingkat pendidikan lainnya. Pada tahun 2018, persentase pendidikan yang ditamatkan jenjang SMA/sederajat lebih tinggi daripada SMP/sederajat. Namun di tahun 2019 posisi tersebut berubah, dimana pada jenjang SMP/sederajat lebih tinggi daripada jenjang SMA/sederajat. Sementara untuk jenjang Diploma IV/S1/S2 persentasenya lebih tinggi dari jenjang Diploma I/II/III/Sarjana Muda dalam kurun waktu 2018-2019. Untuk kategori Tidak/Belum Tamat SD/sederajat berada di kisaran angka 15-19 persen, dan untuk kategori Tidak/Belum Pernah Sekolah berada di kisaran angka ± 1 persen.

Tabel II-18 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

Tahun	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak/Belum Tamat SD sederajat	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Diploma I/II/III/Sarjana Muda	Diploma IV/S1/ S2
2018	1,53	18,41	27,96	20,61	25,32	1,79	4,37
2019	0,87	15,78	27,51	25,82	22,66	1,81	5,55

Sumber: pekalongankota.bps.go.id, 2024

Selanjutnya, mulai tahun 2020 BPS menghitung pendidikan tertinggi yang ditamatkan berdasarkan usia 15 tahun keatas. Angka tertinggi berada pada jenjang SMA/sederajat, yaitu diatas 30 persen. Selengkapnya disajikan pada Tabel II-19 berikut.

Tabel II-19 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2020-2023

Tahun	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Tidak/Belum Tamat SD sederajat	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	Perguruan Tinggi
2020	0,98	9,04	27,19	24,36	30,28	8,15
2021	0,69	7,60	22,55	25,62	31,68	11,86
2022	n/a	n/a	31,21	21,30	34,68	12,80
2023	1,26	7,68	23,80	26,88	31,19	9,19

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2023 dan www.jateng.bps.go.id, 2024

2.1.2.17 Angka Partisipasi Murni (APM)

APM adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Capaian APM Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023 jenjang SD/MI berada di kisaran 99 persen. Capaian APM pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan tahun 2022. Sedangkan APM pada jenjang SM/MA/SMK pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah

maka APM SD/MI/Sederajat Kota Pekalongan mayoritas lebih tinggi. Tetapi APM SMP/MTs/Sederajat Kota Pekalongan lebih rendah. Sedangkan APM SMA/MA/SMK/Sederajat Kota Pekalongan jika dilihat dari tahun 2019-2023 hanya pada tahun 2023 saja Kota Pekalongan lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah. Secara rinci perkembangan APM di Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023 baik SD/MI, SMP/MTs dan SM/MA disajikan dalam Tabel II-20 berikut.

Tabel II-20 Angka Partisipasi Murni Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023

Tahun	SD/MI/Sederajat (persen)		SMP/MTs/Sederajat (persen)		SMA/MA/SMK/Sederajat (persen)	
	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah	Kota	Jawa Tengah
2019	99,52	97,77	71,85	79,84	54,81	59,35
2020	99,48	98,00	74,55	81,00	55,58	59,74
2021	99,11	98,22	75,97	80,99	55,04	60,46
2022	99,78	98,39	76,53	81,02	55,28	61,17
2023	99,56	98,46	82,33	81,56	64,39	61,46

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka 2024 dan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Perkembangan Angka Partisipasi Murni berdasarkan gender di Kota Pekalongan pada tahun 2023, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan. Pada tingkat SD/setara, APM laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Sedangkan pada jenjang SMP/setara, APM perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-21 berikut.

Tabel II-21 Angka Partisipasi Murni di Kota Pekalongan Berbasis Gender Tahun 2023

Rasio	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
Angka Partisipasi Murni	SD/Setara	100,83	98,29
	SMP/Setara	77,39	87,27

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

2.1.2.18 Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi merupakan kejadian kematian yang terjadi pada periode sejak bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Kematian bayi dipengaruhi oleh jumlah kematian neonatal yang merupakan masalah dan kontribusinya sangat tinggi terhadap kematian bayi. Penyebab kematian neonatal antara lain adanya infeksi (pneumonia, tetanus, diare), prematur/BBLR, dan kelainan congenital. Status kesehatan bayi tersebut sangat terkait dengan status kesehatan ibu selama hamil dan melahirkan yang dipengaruhi beberapa faktor seperti rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, rendahnya pemeriksaan selama masa kehamilan dan juga status gizi ibu hamil yang masih rendah.

Angka Kematian Bayi dari tahun 2021 sampai 2023 per 1.000 kelahiran mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi pada tahun 2021 adalah 8,9 dengan jumlah kasus kematian sejumlah 52 kasus. Sedangkan pada tahun 2022, Angka Kematian Bayi mengalami peningkatan menjadi 9,91 per 1.000 KH dengan jumlah kasus kematian sejumlah 56 kasus. Dan di tahun 2023 Angka Kematian Bayi sebesar 13,71 dengan jumlah kasus kematian sebanyak 67 kasus.

Angka Kematian Bayi berbanding terbalik dengan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB). Jika tren Angka Kematian Bayi di suatu wilayah cenderung meningkat maka tren Angka Kelangsungan Hidup Bayi akan semakin menurun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

dari tahun 2018 sampai 2023 per 1.000 kelahiran mengalami fluktuasi seiring dengan naik turunnya Angka Kematian Bayi. Angka Kelangsungan Hidup Bayi terendah terjadi pada tahun 2023 dengan angka 986,29 bayi per 1.000 kelahiran hidup dan tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan angka 991,19 bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Adapun penyebab Angka Kematian Bayi di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan oleh kasus BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), asfiksia, kelainan kongenital, kelainan saluran pencernaan, pnemonia, diare dan adanya penyakit penyerta lainnya.

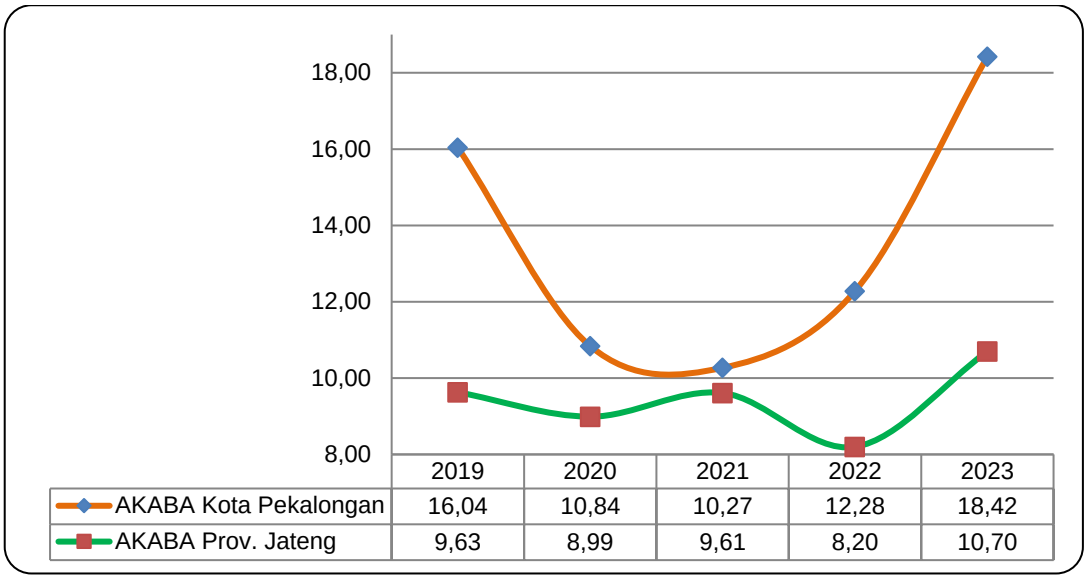
Tabel II-22 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	AKB per 1000 kelahiran	AKHB per 1000 kelahiran
2019	11,99	988,01
2020	8,81	991,19
2021	8,90	991,10
2022	9,96	990,04
2023	13,71	986,29

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

2.1.2.19 Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup (KH). AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan balita, tingkat pelayanan kesehatan pada balita dan kondisi sosial, ekonomi dan sanitasi lingkungan tempat balita tinggal.



Gambar II-31 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Pekalongan dan Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Pekalongan TW. IV Tahun 2023 dan Buku Saku Kinerja Program Kesehatan 2022 Dinkes Jawa Tengah, 2024

Sementara itu AKABA di tingkat Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 - 2023 mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2019 AKABA 9,63 per 1.000 KH, turun menjadi 8,99 per 1.000 KH pada tahun 2020, meningkat menjadi 9,61 per 1.000 KH di tahun 2021, kemudian kembali menurun 8,20 per 1.000 KH di tahun 2022, dan kembali meningkat 10,7 per 1.000 KH pada tahun 2023.

Capaian AKABA dalam kurun waktu tahun 2021-2023 cenderung meningkat. AKABA dari tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat dari 10,27 per 1.000 KH pada tahun 2021 dengan 60 kasus kematian menjadi 12,21 per 1.000 KH pada tahun 2022 dengan 69 kasus kematian. Kemudian kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 18,42 per 1.000 KH dengan jumlah kasus kematian sebanyak 90 kasus. Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya disebabkan oleh adanya penyakit penyerta pada Balita seperti ISPA, Diare, DBD, Campak ataupun kombinasi dari penyakit menular lainnya serta kurangnya pemahaman orang tua tentang deteksi dini balita sakit.

2.1.2.20 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dan lain-lain, di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu mencerminkan risiko yang dihadapi ibu-ibu selama kehamilan dan melahirkan yang dipengaruhi status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya Angka Kematian Ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri yang rendah pula.

Tabel II-23 Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kasus Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	AKI per 100.000 kelahiran hidup
2019	6	5923	101,30
2020	9	5905	152,41
2021	11	5844	188,23
2022	7	5621	124,53
2023	6	4887	122,77

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan Evaluasi RKPD Kota Pekalongan TW. IV Tahun 2023, 2024

Kondisi Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Pekalongan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 AKI sebesar 188,23 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian Ibu sebanyak 11 kasus menurun menjadi 123,87 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 7 kasus di tahun 2022. AKI tahun 2023 turun menjadi 122,77 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian Ibu sebanyak 6 kasus.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Pekalongan berhasil menurunkan jumlah kasus kematian ibu menjadi 122,77 per 100.000 KH dengan jumlah kasus kematian ibu sebanyak 6 kasus. Tingginya angka kematian dipengaruhi status gizi ibu, keadaan sosial ekonomi, keadaaan yang kurang baik selama kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran. Adapun penyebab langsung kematian Ibu di Kota Pekalongan diantaranya disebabkan karena kasus perdarahan, infeksi, eklamsia dan penyebab lain.

2.1.2.21 Angka Kesakitan

Angka kesakitan (Morbiditas) merupakan angka yang menunjukan tingkat kesakitan akibat gangguan struktur maupun fungsi tubuh seseorang yang merupakan derajat sakit, cedera maupun gangguan pada populasi yang merupakan penyimpangan dari status sehat atau kesejahteraan suatu masyarakat. Angka Morbiditas merupakan indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat umum yang dilihat dari

persentase penduduk dengan keluhan kesehatan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Angka kesakitan di Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019, angka kesakitan berada di angka 16,68 persen. Angka tersebut menurun di tahun 2020 dan tahun 2021 menurun menjadi 12,89 persen dan 8,38 persen, kemudian meningkat lagi di tahun 2022 dan tahun 2023 menjadi 11,71 persen dan 12,20 persen. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-24 berikut.

Tabel II-24 Angka Kesakitan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Angka Kesakitan (persen)
2018	13,07
2019	16,68
2020	12,89
2021	8,38
2022	11,71
2023	12,20

Sumber: jateng.bps.go.id dan pekalongankota.bps.go.id, 2024

2.1.2.22 Prevalensi Balita Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak Balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan dibadingkan umur berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementrian Kesehatan. Menurut WHO stunting atau pertumbuhan yang terhambat mencerminkan proses kegagalan untuk mencapai potensi pertumbuhan linier sebagai akibat dari kondisi kesehatan atau gizi yang kurang optimal. Berdasarkan populasi, tingkat stunting yang tinggi dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi yang buruk dan peningkatan risiko sering dan awal terpapar dengan kondisi buruk seperti penyakit atau praktik pemberian makan yang tidak tepat.

Gambaran prevalensi angka stunting Kota Pekalongan dari tahun 2019 - 2023 disajikan dalam Tabel II-25 berikut.

Tabel II-25 Prevalensi Balita Stunting Kota PekalonganTahun 2019-2023

Tahun	Prevalensi Stunting (%)
2019	6,87
2020	9,42
2021	7,82
2022	6,80
2023	7,43

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

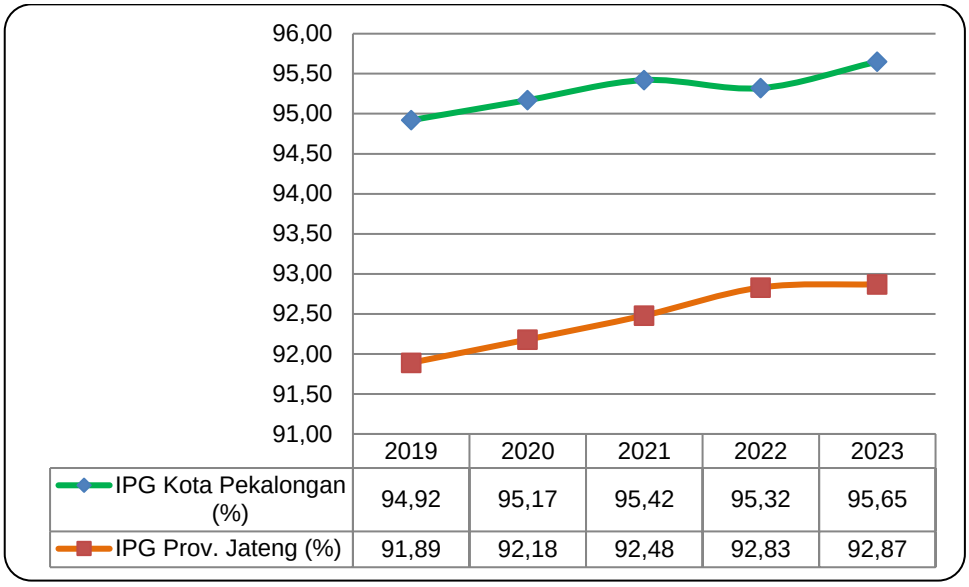
Dari Tabel II-25 dapat dilihat bahwa prevalensi Balita Stunting di Kota Pekalongan pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan dari 6,87 persen di tahun 2019 menjadi 9,42 persen di tahun 2020 namun di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 7,82 persen dan kembali menurun di tahun 2022 sebesar 6,80 persen. Kemudian kembali meningkat di tahun 2023 sebesar 7,43 persen.

2.1.2.23 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan

ketimpangan gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.

Perkembangan IPG Kota Pekalongan sepanjang tahun 2019-2023 cenderung meningkat. Jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2023, IPG Kota Pekalongan sebesar 95,65 mengalami kenaikan dibanding tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia perempuan di Kota Pekalongan semakin membaik khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan pendapatan. Sedangkan jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah, IPG Kota Pekalongan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah.



	2019	2020	2021	2022	2023
IPG Kota Pekalongan (%)	94,92	95,17	95,42	95,32	95,65
IPG Prov. Jateng (%)	91,89	92,18	92,48	92,83	92,87

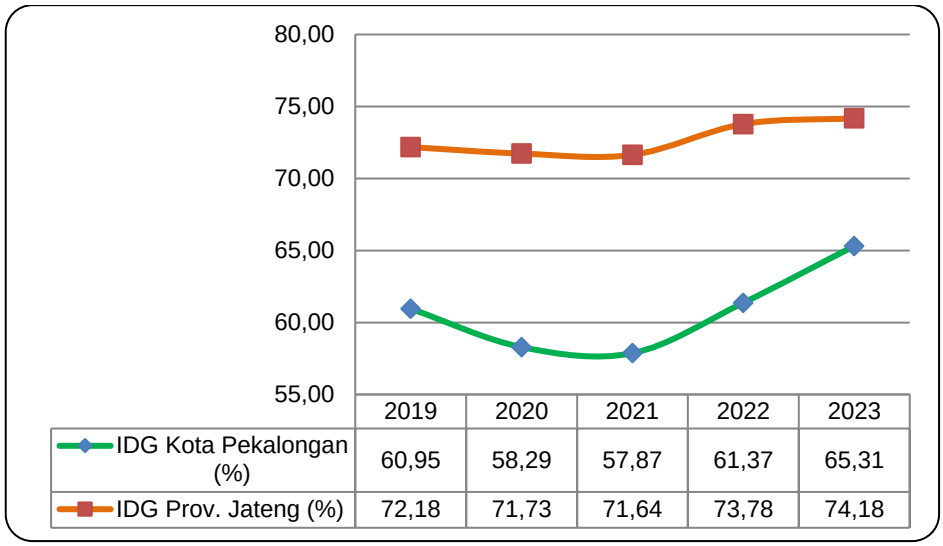
Gambar II-32 Perbandingan IPG di Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

2.1.2.24 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Selama empat tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan 2023, nilai IDG Kota Pekalongan cenderung meningkat. Pada tahun 2019, nilai IDG Kota Pekalongan sebesar 60,95, kemudian terus meningkat sampai tahun 2023 menjadi 65,31.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sepanjang tahun 2019-2023, nilai IDG Kota Pekalongan masih di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan dalam Gambar II-33. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan di Kota Pekalongan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dalam kehidupan ekonomi dan politik menurun partisipasinya.



	2019	2020	2021	2022	2023
IDG Kota Pekalongan (%)	60,95	58,29	57,87	61,37	65,31
IDG Prov. Jateng (%)	72,18	71,73	71,64	73,78	74,18

Gambar II-33 Perkembangan IDG Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

2.1.2.25 Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi. Pengaruh budaya global dapat disesuaikan dengan identitas nasional yang mengandung nilai-nilai luhur sesuai dengan falsafah Pancasila.

Kota Pekalongan sebagai sebuah kota pesisir, dalam proses pembangunannya juga memandang bahwa faktor-faktor budaya dapat dijadikan sebagai modal dalam proses pembangunan. Kesenian merupakan salah satu wujud kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan. Kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan banyak dipengaruhi oleh beberapa unsur budaya, pengaruh budaya Jawa, Arab, Tionghoa dan juga pesisir. Beberapa kesenian yang berkembang di Kota Pekalongan antara lain: Simtuduror, Sheik Rebana, Kendang Pencak dan Nyadranan. Kegiatan tersebut masuk dalam agenda Pekan Batik Tahunan dan dilaksanakan dalam peringatan hari-hari besar di Kota Pekalongan.

Perkembangan jumlah kelompok kesenian di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel II-26 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2019 dan 2020 terdapat 162 kelompok kesenian. Namun di tahun 2021 mengalami peningkatan mencapai hampir dua kali lipatnya menjadi 232 kelompok, tetapi kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan di tahun 2022 menjadi 144 kelompok dan kembali menurun pada tahun 2023 sejumlah 128 kelompok kesenian. Sementara itu gedung kesenian jumlahnya tetap yaitu 4, antara lain Warung Apresiasi, GOR Jetayu, Sanggar Laras Wisata, Sanggar Cahyo Kedaton.

Tabel II-26 Perkembangan Jumlah Kelompok Kesenian dan Gedung Kesenian Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kelompok Kesenian	162	162	232	144	128
Jumlah Gedung Kesenian	4	4	4	4	4
Persentase Sarana Budaya per Jumlah Kelompok (persen)	2,47	2,47	1,72	2,78	3,12

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Jumlah kelompok kesenian yang dapat difasilitasi dan disediakan sarana masih sangat terbatas. Hal ini dikarenakan jumlah kelompok seni budaya yang jumlahnya cenderung bertambah sedangkan ketersediaan sarana yang akan diberikan terbatas.

2.1.2.26 Pemuda dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Pada tahun 2019 jumlah organisasi pemuda yaitu 26 organisasi. Pada tahun 2020 - 2021 jumlahnya menurun menjadi 24 organisasi dan menurun lagi di tahun 2022 menjadi 16 organisasi pemuda serta meningkat kembali menjadi 40 organisasi pada tahun 2023. Sementara itu jumlah kegiatan kepemudaan yang semula 8 kegiatan pada tahun 2019 sampai tahun 2020, mulai menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 menjadi 10 kegiatan dan 16 kegiatan di tahun 2022 dan 20 kegiatan di tahun 2023.

Adapun organisasi yang masih berperan aktif selama tahun 2019-2023 antara lain adalah PPI, Forum Kota Pekalongan, Gerakan Pemuda Nusantara, Forum Pemuda Mataram, GMPI, Pemuda Muhammadiyah, KAMMI, KNPI, dan Karang Taruna. Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-27 berikut.

Tabel II-27 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Organisasi Pemuda	26	24	24	16	40
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	8	8	10	16	20

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Selain organisasi kepemudaan, Dinparbudpora juga melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap klub-klub olahraga yang ada di Kota Pekalongan. Dari tahun 2019 jumlah klub olahraga 20 klub dan jumlah ini tidak berubah sampai tahun 2020. Di tahun 2021 bertambah 15 klub sehingga menjadi 35 klub dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 50 klub olahraga. Sementara itu gedung olahraga milik Pemerintah Kota Pekalongan yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan olahraga sebanyak 2 gedung.

Tabel II-28 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Klub Olahraga	20	20	35	50	50
Jumlah Gedung Olahraga	2	2	2	2	2

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Jumlah organisasi olahraga di Kota Pekalongan tahun 2019 dan 2019 berjumlah 31 organisasi. Terdapat penambahan 3 (tiga) organisasi olahraga di tahun 2021 sehingga menjadi 34 organisasi olahraga, jumlah ini tidak bertambah sampai dengan tahun 2023.. Begitu pula dengan gelanggang/balai remaja selain milik swasta, jumlahnya tetap dari tahun 2019 sampai tahun 2023 yakni sebanyak 3 gelanggang yaitu GOR Jetayu, Stadion Hoegeng dan Warung Apresiasi. Untuk lapangan olahraga bisa dikatakan cukup banyak, yaitu berjumlah 55 lapangan pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan lapangan olahraga milik sekolah turut diperhitungkan. Kegiatan olahraga sebanyak 10 kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal, diantaranya Popda tingkat Kota, Popda tingkat karesidenan, Popda tingkat provinsi, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) tingkat karesidenan, tingkat provinsi, Pekan

Olahraga Wilayah Dulongmas, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), dan Kejuaraan Provinsi (Kejurprov). Penyelenggaraan olahraga selama tahun 2018 dan 2019 terdiri dari penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan, pusat pelatihan olahraga tingkat karesidenan/provinsi, penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota dan pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat.

Tabel II-29 Perkembangan Fasilitas dan Kegiatan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Organisasi Olahraga	31	31	34	34	34
Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3
Lapangan olahraga	55	55	55	55	55
Jumlah kegiatan olahraga	8	8	10	15	15

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pelayanan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermanfaat. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang dalam peningkatan kompetensi masyarakat untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Pemerintah Kota Pekalongan selalu berusaha meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan. Hal tersebut dapat dilihat pada data pelayanan bidang pendidikan sebagai berikut.

a. Angka Partisipasi Sekolah

1) PAUD

PAUD sebagai salah satu tempat untuk membina anak usia dini merupakan salah satu jenjang pendidikan yang ditargetkan dalam pembangunan Kota Pekalongan. Setiap anak usia dini mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan guna membantu meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, sikap, ketrampilan dan daya cipta anak usia dini sebelum memasuki pendidikan dasar.

Pemerintah Kota Pekalongan melalui Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 56B Tahun 2020 telah mewajibkan anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun untuk mendapatkan pelayanan PAUD minimal selama 1 tahun sebelum masuk jenjang Sekolah Dasar (SD). Dalam lima tahun terakhir, jumlah siswa PAUD/TK/RA di Kota Pekalongan cenderung menurun. Pada tahun 2020 jumlah siswa menurun 1.534 siswa jika dibandingkan jumlah siswa di tahun 2019. Hingga di tahun 2023 menurun menjadi 7.934 siswa. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-30 berikut.

Tabel II-30 Jenjang Pendidikan PAUD/TK di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah siswa TK/RA	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Persentase PAUD
2019	9.019	16.625	54,25

Tahun	Jumlah siswa TK/RA	Jumlah anak usia 4-6 tahun	Persentase PAUD
2020	7.485	15.710	47,64
2021	7.077	15.440	45,84
2022	7.721	15.346	50,31
2023	7.934	15.246	52,04

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

2) Pendidikan Dasar

Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) tahun 2019-2023 pada jenjang pendidikan SD/MI cenderung berfluktuasi, dari 98,67 di tahun 2019 menjadi 99,98 di tahun 2023. Sama halnya dengan capaian APS jenjang SMP/MTs dari 97,69 di tahun 2019 menjadi 96,72 di tahun 2023. Dalam perjalanannya, di tahun 2019 dan 2023 capaian APS jenjang SD/MI dan SMP/MTS tidak mencapai target seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang selalu di atas 100 persen. Penurunan APS juga terjadi di tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021. Hal ini karena adanya kebijakan zonasi yang mulai diterapkan di tahun ajaran 2018/2019. Selain itu, sebagian besar orang tua menyekolahkan anaknya di usia yang lebih muda daripada ketentuan yang berlaku juga menjadi faktor penurunan target ini.

Perkembangan APS Kota Pekalongan untuk jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTS) selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 disajikan dalam Tabel II-31 berikut.

Tabel II-31 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
APS SD/MI	98,67	103,79	101,86	101,74	99,98
APS SMP/MTs	97,69	103,67	102,56	103,29	96,72

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

3) Usia 5-15 tahun

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Indikator APS untuk mencapai sasaran meningkatnya akses layanan pendidikan di Kota Pekalongan pada tingkat TK, SD, SMP, Paket A, Paket B, RA, MI, MTs.

Secara series, Angka Partisipasi Sekolah di jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 disajikan dalam Tabel II-32 berikut.

Tabel II-32 Angka Partisipasi Sekolah Jenjang TK-SMP di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun		Jml. Siswa Usia Sekolah TK s.d SMP	Jml. Penduduk Usia 5 - 15 Tahun	APS (persen)	
2019	L	29.622	29.585	100,13	100,77
	P	28.028	27.625	101,46	
2020	L	28.348	29.524	96,02	96,75
	P	27.019	27.703	97,53	
2021	L	29.319	29.610	99,02	101,38

Tahun		Jml. Siswa Usia Sekolah TK s.d SMP	Jml. Penduduk Usia 5 - 15 Tahun	APS (persen)	
	P	28.911	27.830	103,88	
2022	L	29.567	29.598	99,90	101,96
	P	28.889	27.737	104,15	
2023	L	29.304	29.609	98,97	101,24
	P	28.779	27.763	103,66	

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauh mana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah. Selama kurun waktu tahun 2019-2023, ketersedian jumlah SD/MI cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 sebanyak 149 sekolah dan di tahun 2023 sebanyak 147 sekolah. Sedangkan jumlah sekolah SMP/MTs cenderung meningkat yaitu 38 sekolah di tahun 2019 menjadi 41 sekolah di tahun 2023. Untuk jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun, secara umum cenderung fluktuatif. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-33 berikut.

Tabel II-33 Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah SD/MI	149	146	147	147	147
Jumlah SMP/MTs	38	38	38	40	41
Jumlah Penduduk Usia 7-12 th	32.855	31.581	31.724	31.694	31.876
Jumlah Penduduk Usia 13-15 th	15.385	15.067	15.109	15.425	15.277

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan data diatas maka rasio ketersediaan sekolah untuk usia sekolah pendidikan dasar di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-34 berikut.

Tabel II-34 Rasio Ketersediaan Sekolah Untuk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Rasio per 10.000 penduduk usia 7-12 thn dan usia 13-15 thn
2019	38,76
2020	39,44
2021	39,50
2022	39,69
2023	39,87

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

c. Rasio Guru terhadap Murid Per 10.000 Penduduk Usia Sekolah

Rasio guru terhadap murid per 10.000 penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai kualitas pembelajaran di kelas. Selama kurun waktu tahun 2019-2023, rasio ketersedian guru pendidikan dasar yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs terhadap jumlah murid setiap 10.000 usia anak sekolah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019 rasio sebesar 598,57,

kemudian mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2023 menjadi 584,96 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-35 berikut.

Tabel II-35 Rasio Guru dan Murid di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI					
	Jumlah Guru	1.840	1.841	1.787	1.818	1.756
	Jumlah Murid	32.092	31.752	31.007	31.069	30.610
2	SMP/MTs					
	Jumlah Guru	933	932	936	936	915
	Jumlah Murid	15.759	15.539	14.973	14.973	15.051
Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs)		2.880	2.773	2.773	2.754	2.671
Jumlah Murid (SD.MI+SMP/MTS)		48.115	47.851	47.291	46.042	45.661
Rasio Guru (SD/MI+SMP/MTs) Per Murid Per 10.000 penduduk		598,57	579,51	585,37	598,15	584,96

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

d. Rasio Guru terhadap Murid per Kelas Rata-Rata

Rasio guru terhadap murid rata-rata adalah perbandingan guru sekolah pendidikan dasar per kelas dengan jumlah murid pendidikan dasar per 10.000 anak usia sekolah. Sesuai Tabel II-36 , rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata dalam 10.000 anak usia sekolah mengalami fluktuasi dalam kurun waktu tahun 2019-2023, dan berakhir turun di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-36 berikut.

Tabel II-36 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah guru pendidikan dasar*)	Jumlah kelas pendidikan dasar*)	Jumlah guru sekolah per kelas*)	Murid Pendidikan dasar*)	Rasio guru/murid per kelas rata-rata setiap 10.000 anak usia sekolah
2019	2.773	1.778	1,56	47.843	0,326
2020	2.801	1.770	1,58	47.882	0,330
2021	2.723	1.773	1,54	46.320	0,332
2022	2.754	1.775	1,55	46.042	0,337
2023	2.671	1.767	1,51	45.661	0,331

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

*) data pertengahan tahun ajaran

Sementara itu rasio guru dan murid jenjang SD/MI di Kota Pekalongan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 juga mengalami fluktuasi. Mulai dari 0,48 di tahun 2019, mengalami naik turun sampai tahun 2023 dengan kondisi terakhir di angka 0,45 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-37 berikut.

Tabel II-37 Rasio Guru dan Murid Jenjang SD/MI di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Karakteristik	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Guru SD/MI*)	1.840	1.856	1.787	1.818	1.756
Rombongan Kelas*)	1.173	1.265	1.274	1.277	1.274
Jumlah Guru Sekolah SD/MI per Kelas*)	1,57	1,47	1,40	1,42	1,38
Murid SD/MI*)	32.855	31.995	31.007	31.069	30.610
Rasio guru terhadap murid (SD/MI) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	0,48	0,46	0,45	0,46	0,45

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

*) data pertengahan tahun ajaran

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama / Sederajat digambarkan dalam tabel rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk dari tahun 2019-2023. Selama lima tahun terakhir, rasio tersebut cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019 berada di angka 1,26, kemudian turun di tahun 2020 di angka 1,18 dan meningkat di tahun 2021 dan tahun 2022 menjadi 1,22 dan 1,26. Terakhir turun di tahun 2023 menjadi 1,24. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-38 berikut.

Tabel II-38 Rasio Guru dan Murid Jenjang SMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Karakteristik	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Guru SMP/MTs*)	933	945	936	936	915
Rombongan Kelas*)	481	505	499	498	493
Jumlah Guru Sekolah SMP/MTs per Kelas*)	1,94	1,87	1,88	1,88	1,86
Murid SMP/MTs*)	15.385	15.887	15.313	14.973	15.051
Rasio guru terhadap murid (SMP/MTs) per kelas rata-rata dalam 10.000 penduduk	1,26	1,18	1,22	1,26	1,24

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

*) data pertengahan tahun ajaran

e. Fasilitas Pendidikan

Kondisi bangunan penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu faktor utama terselenggaranya kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Bangunan sekolah yang baik memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan proses belajar mengajar bagi pendidik dan peserta didik.

Dalam kurun waktu 2019-2023, kondisi bangunan SD/setara dan SMP/setara mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019-2021 kondisi bangunan SD/setara cenderung menurun, namun meningkat lagi berturut-turut di 2022 dan 2023 di angka 95,91 persen dan 97,11 persen. Hal serupa juga terjadi pada kondisi bangunan SMP/setara, dimana pada tahun 2019 sebesar 94,13 persen dan menurun pada tahun 2020 menjadi 68,95 persen dan meningkat lagi secara berturut-turut di tahun 2021, 2022 dan 2023 di angka 79,36 persen, 94,71 persen dan 98,70 persen. . Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-39 berikut.

Tabel II-39 Kondisi Bangunan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan Dalam Kondisi Baik Tahun 2019 - 2023

Jenjang	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI (persen)	92,72	73,30	72,50	95,91	97,11
SMP/MTs (persen)	94,13	68,95	79,36	94,71	98,70

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

f. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini sering digunakan sebagai salah satu indikator berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan. Penyebab utama putus sekolah antara lain kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sebagai investasi masa depannya, kondisi ekonomi orang tua yang miskin, dan keadaan geografis.

Angka putus sekolah untuk jejang pendidikan SD/MI dalam kurun waktu 2019-2023 cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2019 sebesar 0,10 persen dan pada tahun 2020 naik menjadi 0,29 persen, kemudian menurun lagi di tahun 2021 sebesar 0,10 persen dan terakhir turun secara berturut-turut di tahun 2022 dan 2023 menjadi 0,09 dan 0,05. Sama halnya dengan jenjang SD/MI, jenjang SMP/MTs juga fluktuatif. Tetapi angka putus sekolah jenjang SMP/MTs lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenjang SD/MI. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-40 berikut.

Tabel II-40 Angka Putus Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Pekalongan 2019 - 2023

Jenjang	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI (persen)	0,10	0,29	0,10	0,09	0,05
SMP/MTs (persen)	0,46	0,97	0,26	0,10	0,04

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

g. Angka Kelulusan Sekolah

Angka kelulusan sekolah menunjukan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Pada tingkat SD/setara, sepanjang tahun 2019-2023 mencapai tingkat kelulusan sebesar 100 persen. Untuk angka kelulusan sekolah SMP/sederajat selama kurun waktu 2019-2023 juga dapat mencapai 100 persen. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-41 berikut.

Tabel II-41 Angka Kelulusan Sekolah SD/MI danSMP/MTs di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Jenjang	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI	100	100	100	100	100
SMP/MTs	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

h. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah adalah salah satu bukti nyata dari kegiatan pendidikan yang secara berjenjang terjadi dalam siklus pendidikan. Angka melanjutkan sekolah dari tingkat SD/setara ke jenjang SMP/setara dalam kurun waktu tahun 2019-2020 telah di atas 100 persen, meskipun dalam perjalanannya cenderung fluktuatif dan pada tahun 2021, 2022 dan 2023 turun menjadi 97,82, 98,79 dan 99,66. Hal yang sama terjadi pada angka melanjutkan dari jenjang pendidikan SMP/setara ke SMA/setara sepanjang tahun 2019-2023 sempat berada di bawah 100 persen di tahun 2021. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-42 berikut.

Tabel II-42 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Pekalongan tahun 2019 - 2023

Jenjang	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	104,78	102,79	97,82	98,79	99,66
Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	101,25	102,44	96,45	101,20	102,80

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

i. Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D4

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Peningkatan kualitas pendidik dapat diukur dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi tingkat pendidikan S1 atau D4 terus ditingkatkan, baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs. Meskipun pada kenyataannya selalu mengalami fluktuasi seperti yang disajikan dalam Tabel II-43 berikut.

Tabel II-43 Persentase Pendidik Berkualifikasi S1/D4 di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Jenjang	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pendidik SD/MI Berkualifikasi S1/DIV	92,80	93,53	93,73	94,17	94,36
Pendidik SMP/MTs Berkualifikasi S1/DIV	94,96	95,66	94,87	95,30	95,52

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

j. Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A

Mutu penyelenggaraan pendidikan salah satunya ditunjukkan dengan nilai akreditasi sekolah. Pada jenjang TK/RA persentase sekolah terakreditasi A cenderung meningkat. Tahun 2019 hanya 16,36 menjadi 31,03 pada tahun 2023 walaupun pada tahun 2019-2020 persentasenya tetap, yaitu 16,36. Sedangkan jenjang SD/MI dan SMP/MTs persentase sekolah terkreditasi A cenderung fluktuatif. Secara menyeluruh persentase sekolah terakreditasi A pada jenjang TK-SMP dari tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif. Tabel II-44 menunjukkan sekolah jenjang TK sampai SMP yang memperoleh akreditasi A.

Tabel II-44 Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jenjang TK/RA					
- Sekolah Terakreditasi A	18	18	38	25	36
- Jumlah Sekolah	110	110	111	113	116
- Persen	16,36	16,36	34,23	22,12	31,03
Jenjang SD/MI					
- Sekolah Terakreditasi A	102	99	99	99	99
- Jumlah Sekolah	149	146	147	147	147
- Persen	68,46	67,81	67,35	67,35	67,35
Jenjang SMP/MTs					
- Sekolah Terakreditasi A	26	26	24	24	24
- Jumlah Sekolah	38	38	38	40	41
- Persen	68,42	68,42	63,16	60	58,54
Jenjang TK-SMP					
- Sekolah Terakreditasi A	146	143	161	148	159
- Jumlah Sekolah	297	294	296	300	304
- Persen	49,16	48,64	54,39	49,33	52,30

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

k. Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter

Persentase Implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di Kota Pekalongan diukur berdasarkan rata-rata persentase implementasi pendidikan keagamaan dan implementasi pendidikan karakter. Pendidikan keagamaan di Kota Pekalongan telah diimplementasikan di seluruh jenjang mulai Usia Dini sampai dengan Pendidikan Dasar (PAUD, SD dan SMP). Sedangkan pendidikan karakter diukur berdasarkan jumlah sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 (K-13).

Tabel II-45 Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Sekolah yang mengimplementasi pendidikan keagamaan		Sekolah yang mengimplementasi pendidikan karakter		Rata-rata
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
2019	297	100	200	67,34	83,67
2020	294	100	294	100	100
2021	296	100	296	100	100
2022	300	100	300	100	100
2023	304	100	304	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Kemampuan literasi adalah kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Indikator ini diukur dari persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksikan, dan mengevaluasi beragam jenis teks

(teks internasional dan teks fisik). Capaian kemampuan literasi peserta didik jenjang SD dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus meningkat, yaitu 53,25 pada tahun 2021, 56,47 pada tahun 2022, dan 64,13 pada tahun 2023. Demikian juga untuk untuk jenjang SMP, kemampuan literasi meningkat dari tahun 2021 sampai dengan 2023, yaitu 64,69 pada tahun 2021, 69,41 pada tahun 2022, dan 76,57 pada tahun 2023.

Adapun kemampuan numerasi diukur berdasarkan persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Capaian kemampuan numerasi peserta didik jenjang SD dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 terus meningkat, yaitu 37,45 pada tahun 2021, 41,04 pada tahun 2022, dan 48,18 pada tahun 2023. Pada jenjang SMP, kemampuan numerasi berfkuktuasi dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada tahun 2021 sebesar 64,69, meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 69,41, dan menurun pada tahun 2023 menjadi 65,43.

Tabel II-46 Nilai Kemampuan Literasi Dan Numerasi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Jenjang	Capaian 2021 (Rapor 2022)	Capaian 2022 (Rapor 2023)	Capaian 2023 (Rapor 2024)
1	Kemampuan Literasi	SD	53,25	56,47	64,13
2	Kemampuan Literasi	SMP	64,69	69,41	76,57
3	Kemampuan Numerasi	SD	37,45	41,04	48,18
4	Kemampuan Numerasi	SMP	64,69	69,41	65,43

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

2. Kesehatan

a. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tertuang di dalam dokumen Sistem Kesehatan Nasional adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

Tabel II-47 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per 1.000 Balita di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Posyandu	Jumlah balita	Rasio Posyandu /Balita
2019	411	23.173	17,74
2020	414	23.008	17,99
2021	413	21.584	19,13
2022	414	21.354	19,39
2023	416	21218	19,61
Rata-rata			18,77

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Jumlah Posyandu dari tahun 2019 - 2023 cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, sedangkan Rasio Posyandu per 1000 balita tidak terlalu banyak mengalami perubahan, dengan asumsi pertambahan Posyandu jumlahnya hampir sama dengan jumlah per 1000 Balita. Rata-rata Rasio pos pelayanan terpadu per 1000 Balita selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2019 - 2023 adalah 18,77 yang berarti setiap seribu balita yang ada dilayani oleh 18 posyandu atau setiap posyandu melayani sebanyak 55 balita yang ada di wilayah tersebut.

Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 berdasarkan data pada Tabel II-48 , secara aggregat, jumlah puskesmas, puskesmas pembantu tidak mengalami perubahan jumlah. Sedangkan untuk Rumah Sakit, dengan berkurang 1 (satu) Rumah Sakit Bhakti Waluyo yang dialih fungsikan menjadi klinik, maka ada perubahan rasio. Rasio tersebut, menggambarkan rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik dan Sumah Sakit terhadap 1.000 penduduk setiap tahunnya.

Tabel II-48 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Rumah Sakit per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun		Puskesmas		Pustu		Poliklinik		Rumah Sakit	
	Jumlah Penduduk	Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio	Jml	Rasio
2019	307.097	14	0,046	27	0,088	12	0,039	9	0,029
2020	307.150	14	0,046	26	0.085	11	0.036	9	0.029
2021	316.216	14	0,044	27	0,085	12	0,038	9	0,028
2022	309.742	14	0,044	22	0,071	25	0,081	8	0,026
2023	317.958	14	0,044	23	0,072	32	0,010	8	0,025

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

b. Rumah Sakit Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi

Akreditasi merupakan bentuk pengakuan pemerintah terhadap manajemen RS karena telah memenuhi standar yang ditentukan. Data rumah sakit di Kota Pekalongan yang telah terakreditasi secara rinci disajikan dalam Tabel II-49.**Error! Reference source not found.** berikut.

Tabel II-49 Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi Tahun 2019 - 2024

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi	9	9	9	8	8
Jumlah seluruh rumah sakit	9	9	9	8	8
Persentase Rumah Sakit Rujukan yang Terakreditasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

c. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Ketersediaan dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di masyarakat. Kesehatan masyarakat penting sebagai modal masyarakat dalam menjalani aktifitas kehidupan. Kurun waktu 2019 - 2023, rasio dokter umum di Kota Pekalongan lebih besar dibandingkan dokter spesialis dan dokter gigi. Menurut Standar Target Rasio Kebutuhan SDMK Tahun 2014, tahun 2019 dan tahun 2025 dalam Kepmenko Bidang Kesra No.54 Tahun 2013, rasio dokter spesialis sudah mencapai target sebesar 57 per 100.000

penduduk. Rasio dokter umum berdasarkan data yang diolah sudah memenuhi standar dan target rasio Kebutuhan SDMK yaitu 77 dokter per 100.000 penduduk. Untuk Rasio dokter gigi berdasarkan data yang diolah untuk tahun 2023 sudah mencapai target rasio Kebutuhan SDMK yaitu 13 dokter gigi per 100.000 penduduk. Secara umum rasio dokter per satuan penduduk meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023. Data perkembangan rasio dokter disajikan dalam Tabel II-50 berikut.

Tabel II-50 Rasio Dokter per satuan penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Dokter Spesialis	0,39	0,42	0,41	0,57	0,43
Dokter Umum	0,60	0,66	0,76	0,62	0,77
Dokter Gigi	0,11	0,12	0,13	0,10	0,13
Rasio Dokter per satuan penduduk	1,1	1,2	1,3	1,29	1,33

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

Tenaga paramedis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitas pelayanan kesehatan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan, tenaga paramedis yang terdiri dari perawat, bidan dan bidang kefarmasian perlu terus ditambah agar tercapai rasio per 1.000 penduduk minimal terdapat satu tenaga para medis.

Keberadaan tenaga paramedis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Rasio tenaga paramedis (perawat, bidan, tenaga farmasi) di Kota Pekalongan dari Tahun 2019 - 2023 semakin membaik. Secara rinci disajikan dalam Tabel II-51 berikut.

Tabel II-51 Rasio Tenaga Paramedis di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Perawat	2,63	2,71	2,71	2,56	2,76
Rasio Bidan	1,08	1,09	1,15	0,99	1,23
Rasio Farmasi	0,84	0,90	1,01	0,59	1,11
Perawat	827	832	857	810	876
Bidan	339	335	365	313	391
Tenaga Farmasi	265	276	320	188	354

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

d. Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek

Tenaga kesehatan merupakan sumber daya utama dalam pembangunan kesehatan. Untuk menyelenggarakan upaya kesehatan tenaga kesehatan harus mempunyai ijin, kecuali tenaga kesehatan masyarakat. Tujuan dari perijinan ini selain melindungi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan juga melindungi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. Mulai Tahun 2019 DPMPTSP Kota Pekalongan telah mengeluarkan izin bagi tenaga kesehatan di Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perizinan Tenaga Kesehatan. Secara rinci disajikan dalam Tabel II-52 berikut.

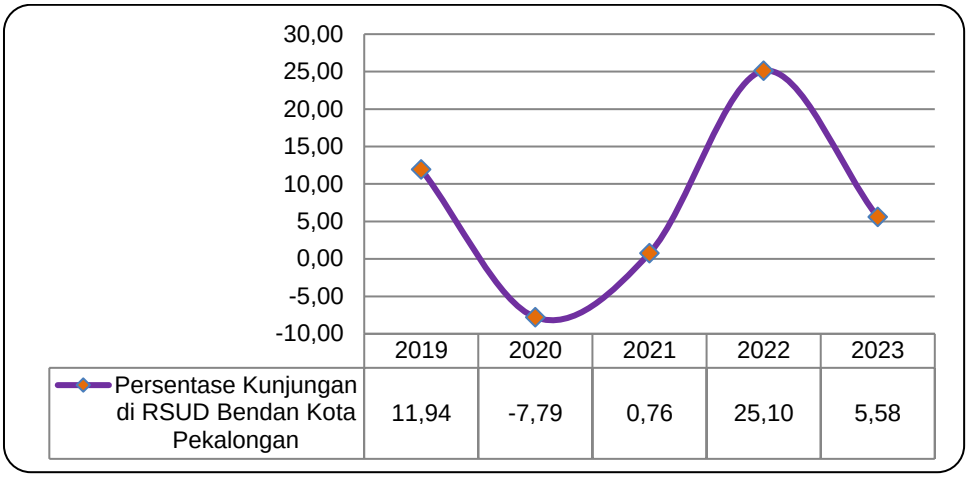
Tabel II-52 Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Surat Ijin Praktek Tahun 2019 – 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek (yang dikeluarkan DPMPTSP)	544	698	863	2504	2639
Jumlah tenaga kesehatan yang berkewajiban memiliki Surat Ijin Praktek	2.348	2.498	2.472	2844	2919
Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	23,17	27,94	34,91	88,05	90.59

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

e. Jumlah Kunjungan di RSUD Bendan

Pandemi *COVID-19* telah memengaruhi operasional rumah sakit. Wabah virus corona menyebabkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan maupun rawat inap non *COVID-19*. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan tingkat okupansi. Rasio Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan menunjukkan tren yang negatif pada tahun 2020 yaitu sebesar -7,79 persen. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 0,76 persen dan 25,10 persen di tahun 2022. Secara rinci disajikan dalam Gambar II-34 berikut.



Gambar II-34 Persentase Kunjungan di RSUD Bendan Kota Pekalongan Periode Tahun 2019 - 2023

Sumber: RSUD Bendan, 2024

Terdapat kenaikan sebesar 5,58% dari tahun 2022 dimana jumlah kunjungan pada tahun 2022 sejumlah 136.361 menjadi 143.968 di tahun 2023. Hal ini salah satunya disebabkan oleh perbaikan kualitas pelayanan yang terus menerus dilakukan dan adanya pengembangan-pengembangan pelayanan diantaranya poliklinik sore.

f. Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Secara rinci sarana farmasi di Kota Pekalongan yang telah memenuhi standar disajikan dalam Tabel II-53 berikut.

Tabel II-53 Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar Tahun 2019 - 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Sarana Farmasi yang memenuhi standar	102	61	64	75	105
Sarana Farmasi yang dilakukan pengawasan	115	68	71	75	105
Persentase Sarana Farmasi yang Memenuhi Standar	88,70	89,71	90,14	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

g. Persentase Balita Usia <6 bulan mendapat ASI Eksklusif

Pemberian makanan bayi yang terbaik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif (usia 0-6 bulan), dengan ASI Eksklusif dan dilanjutkan sampai dengan usia 24 bulan. Sedangkan makanan pendamping ASI dapat diberikan sejak usia bayi 6 bulan. ASI, yang sangat bermanfaat bagi bayi, merupakan makanan yang sempurna dan terbaik karena mengandung unsur-unsur yang bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi secara optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas, pada tahun 2023 presentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif adalah 58,13 persen meningkat 0,14% dibandingkan tahun 2022. Untuk terus meningkatkan persentase ini maka dilakukan sosialisasi dan kampanye pemberian ASI eksklusif di puskesmas dan posyandu di Kota Pekalongan menyadarkan para ibu-ibu. Presentase Balita (usia 0 - 6 bulan) yang mendapatkan ASI Eksklusif selama 5 tahun terakhir sebagaimana disajikan dalam Tabel II-54berikut.

Tabel II-54 Persentase Balita Usia <6 bulan yang mendapat ASI Ekslusif di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Bayi	Jumlah Bayi yang diberi ASI Ekslusif	Cakupan (persen)
2019	5.136	2.938	57,20
2020	4.524	2.416	53,40
2021	4.448	2.440	54,86
2022	4513	2.620	58.05
2023	5120	2976	58,13

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

h. Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, persentase balita gizi buruk di Kota Pekalongan cenderung mengalami peningkatan, mulai 0,05% pada tahun 2019 meningkat menjadi 0,30% di akhir tahun 2023. Secara umum jumlah kasus balita gizi buruk di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun juga mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan jumlah balita gizi buruk yang signifikan dari tahun 2019 sebanyak 12 kasus menjadi 35 kasus, dan terus meningkat sampai dengan tahun 2023 menjadi 63 kasus. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-55 berikut.

Tabel II-55 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Balita Gizi Buruk	Jumlah Balita	Persentase balita gizi buruk
2019	12	23.050	0,05
2020	35	22.506	0,16
2021	38	21.584	0,18
2022	59	21.354	0,28
2023	63	21218	0,30

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

i. Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi

Penyakit menular yang menjadi prioritas program di Kota Pekalongan adalah TB, HIV/AIDS, Demam Berdarah Dengue (DBD). Berikut kondisi penyakit menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (2019 - 2023) disajikan dalam Tabel II-56 berikut.

Tabel II-56 Kondisi Penyakit Menular yang terdeteksi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (persen)	CFR TB per 100.000 penduduk	CNR TB per 100.000 penduduk	HIV/AIDS	
					HIV	AIDS
2019	18,19	1,75	4,78	249,71	57	40
2020	26,89	7,06	1,27	171,14	118	1
2021	12,33	2,56	3,14	170,45	112	27
2022	40	1,58	1,82	259,89	65	55
2023	22	4,35	4,86	310,73	79	62

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

j. Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran

Pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan / atau persyaratan kesehatan. Terkait hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan daya saing Industri Rumah Tangga (IRT) atau yang sering dikenal dengan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan yang dihasilkan IRTP serta menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan tanggung jawab terhadap keselamatan konsumen. Upaya Dinas Kesehatan dalam pengawasan Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga adalah dengan rutin melakukan pemeriksaan sampling terhadap produk olahan pangan industry rumah tangga. Secara rinci disajikan dalam Tabel II-57 berikut.

Tabel II-57 Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran Tahun 2019 - 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah sample produk pangan olahan industry rumah tangga yang bebas dari cemaran (mikro biologi, fisika, kimia)	2.008	648	396	40	40
Jumlah sample produk pangan olahan produk rumah tangga yang dilakukan pemeriksaan	2.104	654	447	40	40
Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran	95,44	99,08	88,59	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

k. Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat

Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) terdiri dari rumah makan / restoran, jasa boga / catering, penjaja makanan, depot air minum dan kantin. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasa Boga, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rangka upaya preventif dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan melakukan pembinaan dan pengawasan Tempat Pengelolaan Makanan untuk menjaga keamanan makanan yang beredar di masyarakat. Data rinci Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat disajikan dalam Tabel II-58 berikut.

Tabel II-58 Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat Tahun 2019 - 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	606	609	639	662	603
Seluruh Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM)	658	664	662	662	640
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	92,10	91,72	96,53	100	94,22

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

l. Jumlah Penduduk Miskin dan Alokasi Jamkesmas / Jamkesda

Berdasarkan BPS, jumlah penduduk miskin cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya sampai dengan tahun 2021. Namun kembali menurun pada tahun 2022 sebanyak 21.810 orang dan 2023 sebanyak 21.360 orang.

Data kepesertaan Jaminan Kesehatan di Kota Pekalongan tahun 2023 adalah PBI APBN sebanyak 120.203 jiwa, menurun 0,73 persen jika dibandingkan dengan

jumlah PBI APBN tahun 2022. Sedangkan jumlah penerima Jamkesda tahun 2023 sebanyak 80.803 jiwa, meningkat 10,05 persen dibandingkan jumlah penerima Jamkesda tahun 2022. Secara lengkap data penduduk miskin yang mendapat jaminan kesehatan di Kota Pekalongan selama 5 tahun terakhir (tahun 2019 - 2023) disajikan dalam Tabel II-59 berikut.

Tabel II-59 Jumlah Penduduk Miskin dan Alokasi Penerima Jamkesmas / Jamkesda di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penerima Jamkesmas	Persentase Penerima Jamkesmas	Jumlah Penerima Jamkesda	Persentase Penerima Jamkesda
2019	307.097	20.268	79.933	26,03	70.931	23,10
2020	307.150	22.160	88.685	28,87	70.307	22,89
2021	308.310	23.490	84.966	27,56	62.375	20,23
2022	309.742	21.810	119.751	38,66	47.813	15,44
2023	316.933	21.360	120.203	37,93	80.803	25,49

Sumber: BPS, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

m. Indeks Keluarga Sehat

Program Indonesia Sehat merupakan salah satu program dari Agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia. Program ini didukung oleh program sektoral lainnya yaitu Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Kerja, dan Program Indonesia Sejahtera. Program Indonesia Sehat selanjutnya menjadi program utama Pembangunan Kesehatan yang kemudian direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015.

Program Indonesia Sehat dilakukan melalui pendekatan keluarga, yang ditujukan untuk pencapaian keluarga sehat dengan indikator Indeks Keluarga Sehat. Ada 12 Indikator Keluarga Sehat Menurut Kemenkes RI, yaitu:

1) Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB);
2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap;
4) Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif;
5) Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan;
6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar;
7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur;
8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan;
9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok;
10) Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih;
12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Pada tahun 2018, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan Program Percepatan Indikator Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Dari hasil pendataan tahun 2019 sampai tahun 2023 menunjukkan bahwa angka IKS Kota Pekalongan masih sangat rendah. Angka IKS 2019 baru mencapai 0,16 persen mengalami sedikit peningkatan hingga tahun 2021 dengan angka IKS sebesar 0,18 persen. Rata-rata peningkatan angka IKS per tahun hanya sebesar 0,01 persen. Sedangkan angka ideal IKS sebesar 0,8 persen dari jumlah data. Secara rinci

capaian Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan tahun 2019 sampai dengan 2023 disajikan dalam Tabel II-60 berikut.

Tabel II-60 Indeks Keluarga Sehat Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	Indeks Keluarga Sehat
2019	0,16
2020	0,17
2021	0,18
2022	0,28
2023	0,31

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

n. Rumah Tangga Sehat

Rumah Tangga Sehat adalah rumah tangga yang melakukan 10 PHBS di rumah tangga, terdiri dari persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI Eksklusif, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik di rumah, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktifitas fisik setiap hari serta tidak merokok di dalam rumah. Penerapan 10 indikator PHBS di tingkat rumah tangga sangat tergantung dengan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Sebab upaya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat akan menunjang pola perilaku kehidupan rakyat yang sehat secara berkelanjutan.

Cakupan rumah tangga sehat di Kota Pekalongan tahun 2023 meningkat cukup signifikan. Dari target 90 persen di tahun 2021, terealisasi 95,75 persen, dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2023 dengan realisasi 98,65 persen. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-61 berikut.

Tabel II-61 Cakupan Rumah Tangga Sehat di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Cakupan Rumah Tangga Sehat (persen)
2019	94,60
2020	96,78
2021	95,75
2022	98,04
2023	98,65

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2024

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pembangunan prasarana kota meliputi jalan dan jembatan, irigasi dan drainase, pengendalian banjir serta penataan ruang.

a. Jalan

Jalan raya di Kota Pekalongan terbagi menjadi dua kategori berdasarkan kewenangan. Jalan raya milik Pemerintah Pusat dan jalan milik Pemerintah Kota. Kurun waktu 2019-2023, kondisi jalan di Kota Pekalongan mengalami perubahan. Pada tahun 2019 dan 2020 sepanjang 9,420 Km dengan kondisi baik 67,40 persen, kondisi sedang 20,16 persen dan kondisi rusak 12,42 persen. Di tahun 2021, penjang jalan Negara menjadi 10,240 Km dengan kondisi baik 96,42 persen, kondisi sedang 0 persen dan kondisi rusak 3,58 persen. Pada tahun 2022 panjang jalan

Negara menjadi 10,240 Km dengan kondisi baik 100,00 persen, kondisi sedang 0 persen dan kondisi rusak 0,00 persen dan pada tahun 2023 panjang jalan negara menjadi 10,210 Km dengan kondisi baik 31,24 persen, kondisi sedang 63,85 persen dan kondisi rusak 4,89 persen.

Tabel II-62 Kondisi Jaringan Jalan Negara di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	Jalan Negara						
	Panjang Jalan Negara (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2019	9,420	3,433	4,359	1,642	36,49	46,32	17,45
2020	9,420	6,350	1,900	1,170	67,40	20,16	12,42
2021	10,240	9,874	0	0,366	96,42	0	3,58
2022	10,240	10,240	0	0	100,00	0	0
2023	10,210	3,190	6,520	0,50	31,24	63,85	4,89

Sumber: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah - DIY dan DPUPR Kota Pekalongan, 2024

Sedangkan untuk jalan kota, dari tahun 2019 sampai 2021 tidak terdapat perubahan maupun penambahan ruas panjang jalan kota yaitu 153,41 km. Berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan Nomor 620/0031 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 620/101 Tahun 2017 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dan Jembatan Di Kota Pekalongan, Panjang jalan kota di Kota Pekalongan yaitu 153,61 km. Jalan dalam kondisi baik perkotaan di bawah kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2023 sepanjang 118,601 km. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-63 berikut.

Tabel II-63 Kondisi Jaringan Jalan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jalan Kota						
	Panjang Jalan Kota (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (km)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (km)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (km)	Panjang Jalan dengan kondisi baik (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi sedang (persen)	Panjang Jalan dengan kondisi rusak (persen)
2019	153,41	110,23	12,15	29,35	71,85	7,92	20,22
2020	153,41	104,71	18,27	30,43	68,25	11,90	19,83
2021	153,41	96,37	27,25	29,79	62,82	17,77	19,42
2022	153,61	105,35	24,11	24,15	68,58	15,70	15,72
2023	150,27	118,60	4,86	26,81	78,92	3,24	17,84

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2024

Dengan rincian kondisi ruas jalan sebagai berikut:

Tabel II-64 Data Dasar Prasarana Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2023

No	No. Ruas	Nama ruas Jalan	Kecamatan yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Kondisi Jalan (km)				
						Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Akses ke jalan N/P/K
						Km	Km	Km	Km	
1	001	Argopuro	Pekl. Barat	0,171	5,00	0,171				N
2	002	Asem Binatur	Pekl. Barat	1,013	4,20-4,50	0,613	0,400			K
3	003	Bahagia	Pekl. Barat	0,792	5,00-10,00	0,792				N
4	004	Binagriya Raya	Pekl. Barat	0,965	10,00	0,965				K
5	005	Budi Bakti	Pekl. Timur	0,407	4,00	0,407				K
6	006	Dharma Bakti	Pekl. Barat	0,816	5,00	0,816				N
7	007	Dwikora	Pekl. Selatan	0,832	4,00	0,700		0,132		K
8	008	Irian	Pekl. Barat	0,649	6,00	0,349		0,300		K
9	009	Jawa	Pekl. Barat	0,700	5,00	0,700				N
10	010	Jaya Bakti	Pekl. Barat	0,270	5,00	0,270				K
11	011	Kalimantan	Pekl. Barat	0,578	5,00	0,578				N
12	012	Karya Bakti	Pekl. Barat	0,843	5,00	0,643		0,200		K
13	013	Kemakmuran	Pekl. Barat	0,308	7,50	0,308				K
14	014	KH. Ahmad Dahlan	Pekl. Barat	2,396	4,50-6,00	2,300		0,096		N
15	015	KH. Samanhudi	Pekl. Barat	1,446	4,50	1,446				N
16	017	Kurinci	Pekl. Barat	0,858	8,00	0,858				N
17	018	Lompo Batang	Pekl. Barat	0,270	4,50	0,270				K
18	019	Madura	Pekl. Barat	0,597	4,00-8,00	0,397		0,200		N
19	020	Majapahit	Pekl. Barat	0,280	12,00	0,280				N
20	021	Mataram	Pekl. Barat	0,191	12,00	0,191				N
21	025	Molek Permai	Pekl. Barat	0,826	4,50	0,826				K
22	027	Parkit/Merpati	Pekl. Barat	1,263	4,50	0,563	0,600	0,100		K
23	028	Pelita II	Pekl. Selatan	0,615	3,00-5,50	0,315		0,300		K
24	029	Pelita IV	Pekl. Selatan	1,341	4,50-12,50	1,341				K
25	030	Pembangunan	Pekl. Barat	0,223	5,00-6,00	0,223				N
26	031	Perintis Kemerdekaan	Pekl. Barat	1,480	5,50-13,00	1,480				N
27	032	Resimen 17	Pekl. Barat	0,144	9,00	0,144				N
28	033	Rinjani	Pekl. Barat	0,233	5,00	0,233				K
29	034	Angkatan 45	Pekl. Barat	0,317	7,00-13,50	0,317				N
30	036	Setia Bakti	Pekl. Barat	0,979	5,00	0,579		0,400		N
31	037	Singasari	Pekl. Barat	0,338	4,00	0,338				K
32	038	Slamet	Pekl. Barat	0,765	7,00	0,765				K
33	040	Sulawesi	Pekl. Barat	0,827	5,00	0,827				K

No	No. Ruas	Nama ruas Jalan	Kecamatan yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Kondisi Jalan (km)				Akses ke jalan N/P/K
						Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
						Km	Km	Km	Km	
34	041	Sumatra	Pekl. Barat	0,802	4,80	0,802				N
35	042	Supriyadi	Pekl. Barat	1,252	5,00	1,252				K
36	043	Sutan Syahrir	Pekl. Barat	1,350	4,20-4,40	1,288		0,062		N
37	044	Tangkuban Perahu	Pekl. Barat	0,075	4,00	-	0,075			K
38	045	Teuku Umar	Pekl. Barat	0,759	4,50	0,559		0,200		N
39	046	Untung Suropati	Pekl. Barat	0,906	5,00	0,906				K
40	047	Urip Sumoharjo	Pekl. Barat	1,940	11,00-14,40	1,940				N
41	049	Yos Sudarso	Pekl. Utara	0,637	7,00	0,237	0,100	0,100	0,200	K
42	050	Yudha Bakti	Pekl. Barat	0,496	5,00	0,296	0,200			N
43	052	Ampera	Pekl. Selatan	1,945	4,50	1,945				K
44	053	H. Mochamad Chaeron	Pekl. Selatan	2,400	4,00-5,30	1,700	0,300	0,400		K
45	054	Gatot Subroto	Pekl. Selatan	0,782	11,00-17,50	0,182			0,600	K
46	055	Kapitan Pattimura	Pekl. Timur	1,520	4,50-6,50	0,900	0,500	0,120		N
47	056	Letjen Suprapto	Pekl. Selatan	0,947	6,00	0,947				K
48	057	Pelita I	Pekl. Selatan	0,863	4,50	0,763	0,100			K
49	058	Pelita III	Pekl. Selatan	0,868	4,00	0,868				K
50	059	Pelita V	Pekl. Selatan	2,400	4,50	2,300		0,100		K
51	060	Tritura	Pekl. Selatan	1,367	4,50	1,367				K
52	061	Aloon-Aloon	Pekl. Timur	0,151	14,00	0,151				K
53	062	P. Antasari	Pekl. Timur	0,620	4,50	-	0,620			K
54	063	A. Yani	Pekl. Timur	0,820	5,90-10,30	0,720		0,100		N
55	064	Bandung	Pekl. Timur	0,141	8,50-9,00	0,141				K
56	065	Blimbing	Pekl. Timur	0,730	6,70-7,70	0,530	0,100	0,100		K
57	066	Cempaka	Pekl. Timur	0,959	4,50-5,70	0,959				K
58	067	Dr. Koesoemah Atmadja	Pekl. Selatan	0,738	4,20-6,00	0,738				K
59	068	Hasanudin	Pekl. Timur	0,380	12,70	0,380				K
60	069	Hos Cokroaminoto	Pekl. Selatan	3,875	8,00	3,875				N
61	070	H. Agus Salim	Pekl. Timur	0,880	10,40	0,200		0,680		K
62	071	Ir. Sutami	Pekl. Timur	1,381	4,00	1,381				N
63	072	Jeruk	Pekl. Timur	0,295	6,00-7,00	0,295				K
64	073	Kenanga	Pekl. Timur	0,452	6,00	0,252	0,200			K
65	074	KH. Hasyim Ashari	Pekl. Timur	1,903	4,00-4,50	1,903				N
66	075	KH. Wahid Hasyim	Pekl. Timur	0,598	13,50	0,598				K

No	No. Ruas	Nama ruas Jalan	Kecamatan yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Kondisi Jalan (km)				Akses ke jalan N/P/K
						Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
						Km	Km	Km	Km	
67	076	Ki Hajar Dewantoro	Pekl. Timur	0,592	4,00	0,592				N
68	077	Kintamani	Pekl. Timur	0,384	4,00	0,184	0,100	0,100		K
69	078	Mangga	Pekl. Timur	0,272	6,40-7,00	0,272				K
70	079	Manggis	Pekl. Timur	0,299	7,00-20,00	0,299				K
71	080	Maninjau	Pekl. Timur	0,417	5,00	0,317	0,100			K
72	081	Melati	Pekl. Timur	0,176	12,4-19,35	0,176				K
73	082	Nanas	Pekl. Timur	0,045	7,00-17,00	0,045				K
74	083	Nusantara	Pekl. Timur	0,336	8,00	0,336				K
75	084	Oto Iskandar di Nata	Pekl. Selatan	3,159	4,50	3,159				N
76	085	Patiunus	Pekl. Timur	0,501	9,00-24,00	0,501				K
77	086	Rambutan	Pekl. Timur	0,103	6,00	0,103				K
78	087	R.A. Kartini	Pekl. Timur	0,800	10,00-11,00	0,700	0,100			N
79	088	Salak	Pekl. Timur	0,301	8,50	0,301				K
80	089	Semarang	Pekl. Timur	0,390	6,00	0,300	0,090			K
81	090	Seruni	Pekl. Timur	0,807	7,00	0,607	0,200			K
82	091	Singkarak	Pekl. Timur	0,158	4,00	0,158				K
83	092	Sorogenen	Pekl. Timur	0,169	5,00	-	0,100		0,069	K
84	093	Sultan Agung	Pekl. Timur	0,610	12,00-13,00	0,610				K
85	094	Surabaya	Pekl. Timur	0,209	6,00	0,209				K
86	095	Truntum	Pekl. Utara	1,334	6,00	1,134		0,200		K
87	096	Tentara Pelajar	Pekl. Utara	0,649	7,00-11,00	0,649				K
88	097	Terate	Pekl. Timur	0,970	5,00-6,00	0,970				K
89	098	Toba	Pekl. Timur	0,575	4,00	0,575				K
90	099	Tondano	Pekl. Timur	0,757	5,30-5,70	0,600	0,157			K
91	100	Trikora	Pekl. Selatan	0,826	4,00-7,00	0,626	0,100	0,100		N
92	101	Barito	Pekl. Utara	0,160	6,30-8,00	0,160				K
93	102	Cendrawasih	Pekl. Utara	0,240	6,30-6,90	0,240				K
94	103	Damar Raya	Pekl. Utara	0,225	4,00	-	0,225			K
95	104	Indragiri	Pekl. Utara	0,303	4,50	0,303				K
96	105	Jetayu	Pekl. Utara	0,494	6,50-13,40	0,494				K
97	106	Jlamprang	Pekl. Utara	2,180	5,00-8,50	2,000			0,180	K
98	108	Kepodang	Pekl. Utara	0,215	4,00	-			0,215	K
99	109	Ki Mangun Sarkoro	Pekl. Timur	2,251	7,00	2,200		0,051		K

No	No. Ruas	Nama ruas Jalan	Kecamatan yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Kondisi Jalan (km)				Akses ke jalan N/P/K
						Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	
						Km	Km	Km	Km	
100	110	Kusumabangsa	Pekl. Utara	2,272	7,30-8,00	2,272				K
101	111	Kutilang	Pekl. Utara	0,316	5,50-9,20	0,216	0,100			K
102	112	Labuan	Pekl. Utara	2,979	4,00-4,50	1,052			1,927	K
103	113	Labuan I	Pekl. Utara	1,057	4,00-4,50	0,600			0,457	K
104	114	Joko Tingkir	Pekl. Utara	0,681	4,00	0,481		0,100	0,100	K
105	116	Manunggal	Pekl. Utara	0,381	5,00	0,381				K
106	117	Merak	Pekl. Utara	0,375	5,50	-		0,375		K
107	118	Merpati Selatan	Pekl. Utara	0,078	11,70	0,078				K
108	119	Merpati Utara	Pekl. Utara	0,088	9,60	0,088				K
109	120	Pantaidewi	Pekl. Utara	0,779	4,50	0,779				K
110	121	Pantaisari	Pekl. Utara	1,099	5,50-6,50	0,799		0,300		K
111	122	Pantaisari I	Pekl. Utara	0,546	5,00	0,546				K
112	123	Pantaisari II	Pekl. Utara	0,565	5,00	0,465		0,100		K
113	124	Patriot	Pekl. Utara	0,643	6,00	0,643				K
114	125	Pelabuhan Ratu	Pekl. Utara	0,832	4,00-6,00	0,465			0,367	K
115	126	Pramuka	Pekl. Utara	1,183	4,50	1,000	0,083	0,100		K
116	127	Progo	Pekl. Utara	0,750	9,50	0,750				K
117	128	Raden Salih	Pekl. Utara	0,156	7,60-16,50	0,156				K
118	129	Rajawali Barat	Pekl. Utara	0,156	4,00	0,156				K
119	130	Rajawali Selatan	Pekl. Utara	0,156	4,00	-			0,156	K
120	131	Rajawali Timur	Pekl. Utara	0,138	4,00-4,50	0,138				K
121	132	Rajawali Utara	Pekl. Utara	0,253	4,00	0,253				K
122	133	Samudra	Pekl. Utara	2,899	5,00	2,799		0,100		K
123	134	Samudra Pasai	Pekl. Utara	0,395	6,00	0,395				K
124	135	Selat Karimata	Pekl. Utara	1,268	4,00-4,50	0,968		0,100	0,200	K
125	136	Selat Lombok	Pekl. Utara	0,408	4,00	0,408				K
126	137	Selat Selayar	Pekl. Utara	0,406	4,00	0,306		0,100		K
127	138	Serayu	Pekl. Utara	0,125	5,60	0,125				K
128	139	Slamaran Raya	Pekl. Utara	0,795	4,50-7,00	0,795				K
129	140	Veteran	Pekl. Utara	0,857	12,00	0,857				K
130	141	Angkatan 66	Pekl. Barat	1,020	5,00	1,020				K
131	142	KH. Hasyim	Pekl. Selatan	0,813	4,00	0,613		0,200		K
132	143	Sekembang	Pekl. Barat	0,767	4,00	0,467		0,300		N
133	144	Sengon	Pekl. Barat	0,330	4,00	0,330				K

No	No. Ruas	Nama ruas Jalan	Kecamatan yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Kondisi Jalan (km)				
						Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Akses ke jalan N/P/K
						Km	Km	Km	Km	
134	145	Amd Kramatsari	Pekl. Barat	0,745	4,50	0,600			0,145	K
135	146	Terminal	Pekl. Timur	0,462	7,00-14,00	0,462				N
136	147	Sidomukti Raya	Pekl. Utara	0,567	4,00-10,00	0,167		0,200	0,200	K
137	148	Yudhistira	Pekl. Utara	0,453	4,00	0,453				K
138	149	Pantaisari III	Pekl. Utara	0,261	5,00	0,261				K
139	150	KH. Bukhori	Pekl. Utara	1,011	4,5-5,00	1,011				K
140	151	Syubah Asa	Pekl. Barat	0,251	4,00	0,251				N
141	153	Permata	Pekl. Barat	0,287	4,50	0,287				N
142	154	KH. Saelan	Pekl. Barat	0,536	4,00	0,536				K
143	155	KH. Syafii	Pekl. Selatan	0,621	4,00	0,621				K
144	156	Ki Surontoko	Pekl. Timur	0,760	4,00	0,760				N
145	158	Kalisari	Pekl. Timur	1,676	4,00	1,056			0,620	N
146	159	Kasmoeri	Pekl. Timur	3,360	4,00	-			3,360	K
147	160	Umar Saleh Al-Jufri	Pekl. Utara	2,051	4,00	0,951			1,100	K
148	161	Banger Hilir	Pekl. Utara	2,114	4,00	0,400			1,714	K
149	163	Pesona Raya	Pekl. Barat	0,390	9,00	0,390				K
150	164	Hayam Wuruk	Pekl. Timur	0,850	14,00	0,850				N
151	165	Dr. Cipto	Pekl. Timur	0,558	14,00	0,558				K
152	166	Dr. Wahidin	Pekl. Timur	1,250	13,50	1,250				N
153	167	P. Antasari I	Pekl. Timur	0,376	4,00-6,00	0,376				K
154	168	Labuan III	Pekl. Utara	0,800	4,00	-			0,800	K
155	169	Limas Raya	Pekl. Utara	0,365	8,00-12,50	0,365				K
156	184	Rasamala Raya	Pekl. Utara	0,653	4,00	0,653				K
157	185	Binagriya I	Pekl. Barat	0,295	6,00	0,295				K
158	188	Anggrek	Pekl. Barat	0,119	5,00	0,119				K
159	189	Tunas	Pekl. Barat	0,417	4,00-5,00	0,217		0,200		N
160	190	Palapa Raya	Pekl. Utara	0,364	10,00	0,364				K
161	191	Darkat	Pekl. Utara	0,205	4,0-4,5	0,205				K
162	192	Teknopolitan Raya	Pekl. Selatan	0,341	11,00	0,341				K
163	193	Teknopolitan I	Pekl. Selatan	0,307	6,00	0,207		0,100		K
164	194	Teknopolitan II	Pekl. Selatan	0,399	6,00	0,399				K
165	195	KH. Siroj	Pekl. Barat	0,264	5,00	0,100		0,164		K
166	196	KH. Muhammad Ilyas	Pekl. Barat	0,070	6,00	0,070				K
167	199	Boyongsari	Pekl. Utara	1,016	4,00	0,100		0,916		K

No	No. Ruas	Nama ruas Jalan	Kecamatan yang dilalui	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Kondisi Jalan (km)				
						Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Akses ke jalan N/P/K
						Km	Km	Km	Km	
168	200	Singasari I	Pekl. Barat	0,283	4,00	0,183		0,100		N
169	201	Kramatsari I	Pekl. Barat	0,287	4,00	0,287				N
170	202	Kramatsari II	Pekl. Barat	0,301	4,00	0,301				N
171	203	Kramatsari III	Pekl. Barat	0,331	4,00	0,331				N
172	204	Bumirejo Damai Raya I	Pekl. Barat	1,100	6,00	0,600			0,500	K
173	205	Bumirejo Damai Raya II	Pekl. Barat	1,076	6,00	0,076			1,000	K
174	206	Jenggala	Pekl. Barat	0,439	8,00	0,439				K
175	207	Kartosuro	Pekl. Barat	0,218	4,00	0,218				K
176	208	Achmad Alf Arslan Djunaid	Pekl. Selatan	3,360	15,00	3,360				N
177	209	R. Soempeno	Pekl. Selatan	1,778	5,00	0,900		0,500	0,378	K
178	213	Darkat I	Pekl. Utara	0,113	4,0-4,5	0,113				K
179	214	KH. Syabrawi	Pekl. Selatan	0,573	4,00-6,00	0,273			0,300	K
180	215	Imam Bonjol	Pekl. Barat	0,299	15,00	-		0,299		N
181	216	P. Diponegoro	Pekl. Utara	0,758	13,00	-		0,758		K
182	217	Wr. Supratman	Pekl. Utara	2,870	13,00	2,070		0,800		K
183	218	Jaksa Agung R. Soeprapto	Pekl. Barat	0,130	12,00	0,130				K
184	219	Industri	Pekl. Timur	0,553	5,00	0,353			0,200	K
185	220	Randu Jajar	Pekl. Barat	0,794	5,00	-			0,794	K
186	221	H. Bahtiar Amin	Pekl. Barat	0,913	4,00	0,270	0,313		0,330	K
187	222	H. Achmad Djunaid	Pekl. Selatan	0,943	3,00-5,50	0,843		0,100		K
188	223	Abdullah Hamid Al Hinduan	Pekl. Timur	0,309	6,00	0,309				K
189	224	KH. Abdul Ghaffar Ismail	Pekl. Timur	0,172	8,50-9,00	0,172				K
190	225	Matana	Pekl. Timur	0,379	4,00	0,379				K
191	226	Sriwedari	Pekl. Timur	1,270	5,00-6,00	0,325			0,945	K
192	227	Sengkuyung	Pekl. Timur	0,363	3,50	0,363				K
193	228	Kyai Ageng Pekalongan	Pekl. Selatan	1,030	4,00	1,030				K
A. Total Panjang Jalan (Km)				**150,2740**		**118,6010**	**4,8630**	**9,9530**	**16,8570**	
B. Presentase Jalan (%)										

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2024

b. Irigasi

Rasio jaringan irigasi di Kota Pekalongan pada tahun 2019-2023 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 26,58 persen. Kondisi ini menggambarkan penggunaan lahan yang hanya sedikit merubah fungsi lahan dikarenakan

pemerintah berupaya mempertahankan penggunaan lahan sepanjang lima tahun. Adapun data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-65 berikut.

Tabel II-65 Rasio Jaringan Irigasi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Jaringan Irigasi (persen)	26,58	26,58	26,58	26,58	26,58

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2024

Senada dengan rasio jaringan irigasi, luas irigasi yang tercatat dalam kondisi baik pada tahun 2019 70,43 persen dan menurun pada tahun 2020 menjadi 66,14 persen. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 79,62 persen, stagnan hingga tahun 2022 dan meningkat menjadi 82,57 persen sebagimana disajikan dalam Tabel II-66 berikut.

Tabel II-66 Luas Irigasi Kota dalam Kondisi Baik di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Luas irigasi kota dalam kondisi baik (persen)	70,43	66,14	79,62	79,62	82,57

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2024

Pantauan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan selama periode 2019-2023, pemanfaatan sempadan sungai sebagai kegiatan atau aktifitas ekonomi maupun tempat tinggal tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 25 persen. Perkembangan kondisi sempadan sungai yang dipakai bangunan liar disajikan dalam Tabel II-67 berikut.

Tabel II-67 Kondisi Sempadan Sungai yang dipakai Bangunan Liar di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (persen)	25	25	25	25	25

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2024

c. Drainase

Sistem drainase primer di Kota Pekalongan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

1) Kawasan Barat (3 buah), meliputi Kali Bremi, Kali Kranding, dan Kali Pekalongan
2) Kawasan Tengah (2 buah), meliputi Kali Sibulanan, Kali Banger Lama
3) Kawasan Timur (6 buah), meliputi Kali Banger, Kali Susukan, Kali Cempayan, Kali Sitotok, Kali Selorejo dan Kali Gabus

Sedangkan Sub sistem drainase terdiri dari 8 buah yaitu Sub sistem Bremi, Sub sistem Bandengan, Sub sistem Pabean, Sub sistem Loji, Sub sistem Banger Lama, Sub sistem Sibulanan, Sub sistem Banger Hilir, Sub sistem Banger Hulu.

Saluran Drainase Sekunder, selain sungai, di Kota Pekalongan terdapat beberapa jaringan saluran irigasi maupun pembuangan, antara lain sebagai berikut: Saluran Sekunder Grabyak, Saluran Sekunder Baros, Saluran Sekunder Larangan, Saluran Sekunder Asem Binatur dan Saluran Sekunder Podo Timur. Secara keseluruhan, terdapat 53 saluran drainase yang terletak di jalan utama Kota dengan konstruksi batu belah dan saluran tanah, jenis saluran terbuka, tertutup dan gorong-gorong, dengan kondisi baik sepanjang 69.162,92 meter, kondisi sedang sepanjang 10.258,84 meter dan kondisi rusak sepanjang 21.055,92 meter.

Tabel II-68 Data Saluran Drainase Sekunder di Wilayah Kota PekalonganTahun 2023

Kondisi	Panjang (meter)	Persentase
Baik	69.162,92	68.83 %
Sedang	10.258,84	10.21 %
Rusak	21.055,92	20.96 %
Total	100.477,68	100.00 %

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2024

d. Pengendalian Banjir

Secara topografis, Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa, dengan ketinggian lahan antara 0 meter di atas permukaan laut (dpl) pada wilayah bagian Utara dan 6 meter dpl pada wilayah bagian Selatan. Ditinjau dari kemiringan lahan, kota Pekalongan termasuk daerah yang relatif datar, yaitu dengan kemiringan lahan rata-rata antara 0-8 persen. Kondisi ini secara topografis akan menyulitkan pengaturan saluran drainase, karena persentase kemiringan lahan relatif kecil. Akibatnya di beberapa kawasan Kota Pekalongan sering mengalami gangguan genangan banjir, sementara di sisi Utara wilayah Kota Pekalongan, yang berbatasan dengan kawasan pesisir pantai mengalami bencana rob dengan frekuensi dan luasan genangan yang meningkat. Data genangan Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-69 berikut.

Tabel II-69 Genangan Banjir dan Rob di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	Luas Wilayah Kota Pekalongan (Ha)	Luas Genangan (Ha)	Persentase
2019	4.525	1.057	23,35
2020	4.525	1.892,88	41,83
2021	4.642	1.730	37.27
2022	4.642	980.13	21.11
2023	4.642	880.83	18.97

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2024

Beberapa hal yang mengakibatkan rawan genangan banjir dan rob adalah sebagai berikut:

- Ketinggian Wilayah hanya 0-6 meter di atas permukaan air laut
- Persentase Kemiringan Lahan relatif kecil 0-5 persen
- Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa
- Berkurangnya kawasan tangkapan air (*catchment area*) karena semakin tingginya kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (*run off*) yang semakin membesar juga
- Pendangkalan Sungai di wilayah Hilir

Sabuk pantai berupa tanggul-tanggul revetment yang telah dibangun juga tidak kuat menahan gelombang air laut. Meskipun demikian, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya, khususnya untuk mengurangi dampak bencana abrasi. Upaya tersebut antara lain berupa penguatan revetment

pantai yang telah selesai pembangunannya pada tahun 2015. Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan peninggian serta perkuatan.

Selain oleh Pemerintah Kota Pekalongan, peninggian dan perkuatan revetment juga dibantu oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, saat ini sedang mengerjakan pembangunan tanggul pantai di sisi timur Kali Loji sampai dengan muara Kali Gabus. Upaya yang masih belum sempurna sebagai akibat adanya industri docking dan galangan tersebut, nantinya diharapkan akan mengatasi banjir dan rob di wilayah Panjang Wetan, Krapyak, dan Degayu. Selain itu, BBWS Pemali Juana juga sedang meninggikan tanggul di utara Bandengan. Tanggul yang selesai pada tahun 2019 tersebut saat ini sudah mulai limpas pada saat terjadi pasang naik tinggi. Dengan adanya peninggian tersebut, diharapkan akan mengurangi dampak rob di area Pabean, Bandengan, dan Kandang Panjang.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas PUSDATARU juga melakukan peninggian dan perkuatan revetment pantai di sisi barat Muara Sungai Loji sampai dengan Krematorium serta perkuatan parapet di Jl. Kunti Utara. Upaya ini, khususnya perkuatan parapet di Jl. Kunti Utara masih menyisakan kekosongan sekitara 100 meter antara pintu gerbang PIM (Pusat Informasi Mangrove) sampai dengan krematorium. Area ini rawan menjadi limpasan air laut pada saat terjadi pasang naik yang tinggi.

Dari keseluruhan upaya yang telah dilakukan tersebut, maka pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan mempunyai pekerjaan bersama yang harus dilakukan di waktu-waktu yang akan datang, yaitu:

1. Menghitung kembali kebutuhan pompa dan kolam-kolam retensi ataupun area *storage* (cadangan penempatan air) yang lebih memadahi.
2. Memelihara tanggul secara bersama-sama, antara lain:
    a. Masyarakat harus menghindari dan mencegah aktivitas-aktivitas yang berpotensi merusak tanggul;
    b. Masyarakat ikut aktiv melaporkan kepada Pemerintah jika terjadi hal-hal yang berpotensi terhadap terjadinya kerusakan badan tanggul;
    c. Pemerintah Kota Pekalongan harus mempunyai alokasi sumber daya yang cukup untuk operasional dan pemeliharaan tanggul;
3. Membangun stasiun pompa secara lebih memadahi karena ketinggian sebagian wilayah sudah berada di bawah level permukaan air laut.
4. Membangun, memperbaiki dan memelihara sistem drainase agar berfungsi optimal dengan menghubungkan ke drainase-drainase primer ataupun *long storage* yang ada.
5. Masyarakat ikut menjaga dan memelihara kebersihan drainase dari sampah yang akan mengganggu aliran air ataupun potensi mengganggu operasionalisasi pompa.
6. Melanjutkan bangunan pengaman pantai di sebelah barat krematorium untuk melindungi kawasan konservasi mangrove.

e. Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Sehingga dalam pentaan ruang terkandung proses perencanaa, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara , termasuk ruang dibawah bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup, melakukan kegiatan, dan pemelihara kelangsungan hidupnya.

Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius yaitu: pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang yaitu: manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (*stakeholder*) secara terpadu dan berdayaguna serta serasi. Tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Terkait dengan penataan ruang, Kota Pekalongan telah melakukan revisi melalui Perda Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah Kota Pekalongan adalah terwujudnya kota jasa, industri dan perdagangan batik, serta minapolitan, yang maju, mandiri dan sejahtera. Berdasarkan tujuan penataan ruang tersebut maka kebijakan penataan ruang wilayah yang dilakukan meliputi:

a) Peningkatan peran kota sebagai PKW;
b) Peningkatan fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota di pusat kota dengan sub pusat pelayanan kota dan atau dengan pusat pelayanan lingkungan;
c) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana kota;
d) Pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
e) Pengelolaan dan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan, serta menjamin keamanan dengan memantapkan fungsi pertahanan-keamanan;
f) Pengembangan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perikanan (Kawasan Minapolitan) dan KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi berbasis perdagangan jasa terutama untuk industri dan perdagangan batik;
g) Pengembangan KSK untuk kepentingan sosial budaya yang dapat memberdayakan potensi tradisi sosial budaya masyarakat pesisir yang relijius dan mendayagunakan peninggalan sejarah di kota; dan
h) Pengembangan KSK untuk kepentingan lingkungan untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan di kota.

Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kota Pekalongan, rencana pola ruang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang yaitu kawasan lindung, yang terdiri dari Kawasan lindung setempat; Kawasan cagar budaya; ruang terbuka hijau RTH kota dan kawasan ekosistem mangrove, serta kawasan budidaya, yang terdiri dari Kawasan pertanian; Kawasan permukiman; Kawasan peruntukan industri; Kawasan pariwisata dan Kawasan pertahanan keamanan. Pengawasan perlu dilakukan sejak ijin pemanfaatan ruang sampai dengan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan pola ruang yang telah direncanakan dalam RTRW serta tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.

Dalam rangka mendukung operasional RTRW Kota dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan penataan ruang, Kota Pekalongan menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pada tahun 2014 Kota Pekalongan telah Menyusun RDTR untuk 4 (empat) kecamatan dan sudah mendapat persetujuan dari DPRD namun saat mengajukan persetujuan substansi ke Provinsi bersamaan dengan mulai direvisinya RTRW Kota Pekalongan tahun 2009-2029. Sehingga proses

penyusunan RDTR dihentikan, menunggu hasil revisi RTRW. Pada tahun 2020 telah tersusun revisi RTRW Kota Pekalongan yang disahkan dalam Peraturan Daerah kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029. Setelah adanya revisi RTRW, maka Dokumen RDTR disusun mulai tahun 2021 sebanyak 1 (satu) dokumen, yaitu RDTR untuk 4 kecamatan di Kota Pekalongan. Pada tahun 2023 dilanjutkan penyusunan dokumen dan diharapkan selesai dah disahkan menjadi Peraturan Walikota pada tahun 2024.

Pemerintah Kota Pekalongan sedang melakukan upaya percepatan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang RDTR, saat ini sudah dalam tahapan Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN. Dengan segera ditetapkannya Perwal RDTR diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam investasi serta sebagai alat pengedali pembangunan sehingga dapat terwujudnya tertib tata ruang kota.

Capaian indikator kinerja Urusan Penataan Ruang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (tahun 2019-2023) disajikan dalam Tabel II-70.

Tabel II-70 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Bangunan ber-IMB per satuan bangunan (persen)	0,17	0,17	1,97	n/a	n/a
2.	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	-	-	-	16,95	17.34
3.	Ketaatan terhadap RTRW (persen)	98	98	99	99	99

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2024

Capaian indikator kinerja urusan Penataan Ruang terdiri dari 3 (tiga) indikator, sebagai berikut: Rasio bangunan ber-IMB menunjukkan nilai fluktuatif sepanjang tahun 2018-2021 dari 0,16 pada tahun 2018 menjadi 1,97 pada tahun 2021. Capaian indikator ini cenderung mengalami peningkatan yang menandakan makin besarnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan bangunan Gedung dan pengurusan perijinan, terutama dalah izin mendirikan bangunan/IMB serta peningkatan dalam pengawasan bangunan Gedung oleh perangkat daerah terkait. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keja (UU Cipta Kerja) (halaman 101) telah mengubah ketentuan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUGB) pada Pasal 7 yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB). Perubahan tersebut menjadikan terminologi IMB sebagai persyaratan yang harus dimiliki sebelum seseorang melaksanakan kontstruksi Bangunan Gedung tidak ada lagi. Sebagai penggantinya, UU Cipta Kerja mempersyaratkan Persetujuan Bangunan (PBG) bagi setiap orang yang hendak melakukan konstruksi Bangunan Gedung. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, maka telah dilakukan update pendataan bangunan yang wajib ber PBG dengan hasil capaian, bangunan yang ber-PBG sampai tahun 2022 sejumlah 15.095 sedangkan untuk jumlah keseluruhan bangunan sejumlah 89.669. Ketaatan terhadap RTRW menunjukkan angka yang cenderung meningkat sepanjang 2019-2023, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dan meningkatnya pengawasan dari Perangkat Daerah terkait dalam pemberian ijin pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam hal pembinaan pengembangan jasa kontruksi, telah dilaksanakan beberapa pelatihan dan sertifikasi ketrampilan teknis bagi tenaga konstruksi. Adapun jumlah penyedia jasa konstruksi di Kota Pekalongan mengalami fluktuasi sebagai berikut:

Tabel II-71 Perkembangan Jasa Konstruksi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jasa Konstruksi	83	147	175	161	152

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan melalui: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR). Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang. Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri atas: Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha; Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan non berusaha; dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

Selain penerbitan KKPR, pelaksanaan pemanfaatan ruang juga dilakukan dengan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR). Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) adalahupaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. SPPR berbentuk dokumen yang berisi sinkronisasi program perencanaan tata ruang dan perencanaan pembangunan, baik jangka menengah (5 tahun) dan jangka tahunan.

Selanjutnya untuk kesesuaian pemanfaatan ruang disajikan dalam Tabel II-72 berikut.

Tabel II-72 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029

No.	Pola Ruang	Luas Pemanfaatan Ruang sesuai Perda 9/2020 (Ha)	Tidak Sesuai Peruntukan	Sesuai Peruntukan
A	**Kawasan Lindung**			
1.	Kawasan Perlindungan Setempat			
	a. Sempadan Sungai	±24 Ha		v
	b. Sempadan Pantai	±26 Ha		v
	c. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	±15 Ha		v
2.	Kawasan Cagar Budaya	9 Ha		v
3.	RTH Kota (Publik)	335 Ha		v
4.	Kawasan Ekosistem Mangrove	88 Ha		v
B	**Kawasan Budidaya**			
1.	Kawasan Pertanian	521 Ha		v
2.	Kawasan Perikanan			

No.	Pola Ruang	Luas Pemanfaatan Ruang sesuai Perda 9/2020 (Ha)	Tidak Sesuai Peruntukan	Sesuai Peruntukan
	a. Kawasan Perikanan Tangkap	38 Ha		v
	b. Kawasan Perikanan Budidaya	173 Ha		v
3.	Kawasan Perumahan	2.430 Ha		v
4.	Kawasan Perdagangan dan Jasa	386 Ha		v
5.	Kawasan Perkantoran	51 Ha		v
6.	Kawasan Peribadatan	10 Ha		v
7.	Kawasan Pendidikan	94 Ha		v
8.	Kawasan Kesehatan	16 Ha		v
9.	Kawasan Olah raga	6 Ha		v
10.	Kawasan Transportasi	9 Ha		v
11.	Kawasan Peruntukan Industri	189 Ha		v
12.	Kawasan Pariwisata Alam	11 Ha		v
13.	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	7 Ha		v
	Luas Total (Ha)	**4.438**		

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2024

Dalam penataan ruang, setelah adanya perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang maka perlu adanya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Pengendalian pemanfaatan dilakukan berdasarkan rencana tata ruang dan dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Berdasarkan hasil penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang, kesesuaian perwujudan struktur ruang Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2023 sebesar 73,20% (belum terwujud) sedangkan untuk kesesuaian perwujudan pola ruang Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2023 sebesar 89% (sudah terwujud).

Pengendalian pemanfaatan ruang lainnya terkait insentif dan disinsentif, pemberian sanksi dan penyelesaian sengketa, beberapa telah dilakukan di Kota Pekalongan. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang telah dilakukan sesuai dengan yang tercantum pada Perda RTRW Kota Pekalongan, yaitu pemberiang sanksi administratif. Sedangkan untuk pemberian insentif dan disinsentif belum diberlakukan di Kota Pekalongan, walaupun secara aturan penentuan insentif dan disinsentif ini telah termuat dalam RTRW Kota Pekalongan. Namun perlu adanya perangkat hukum operasional dalam pelaksanaannya.

f. Air Minum

Cakupan penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman di Kota Pekalongan pada tahun ke tahun mengalami fluktuatif, Hal tersebut disebabkan karena adanya imigrasi atau pemasangan baru / pelanggan baru pada PDAM maupun PAMSIMAS maupun sebaliknya. Serta ada juga yang beralih ke sumur pribadi (sumur dangkal).

Tabel II-73 Persentase Pelayanan Air Bersih
Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk yang Terlayani Air Bersih (jiwa)	272.090	264.330	267.880	207.245	168.030
Jumlah Penduduk (jiwa)	307.097	307.150	308.310	309.742	317.524
Persentase Penduduk yang Terlayani Air Bersih	88,60	86,06	86,89	66,90	52,91

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan (diolah), 2024

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pemanfaat air bersih yang diakses secara aman (akses melalui perpipaan) belum optimal dan lebih condong menurun setiap tahun. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor, faktor pengali jiwa yang awalnya 1 SR melayani 5 jiwa berubah menjadi 1 SR melayani 4,03 Jiwa (hasil audit BPKP atas kinerja Perumda Tirtayasa tahun 2023), faktor ekonomi (masyarakat berpenghasilan rendah), Kota Pekalongan belum memiliki sumber air baku (air permukaan) sendiri, maupun secara infrastruktur jaringan perpipaan yang belum memadai.

Kota Pekalongan pada saat ini konsentrasi untuk mengatasi penurunan permukaan tanah yang turun dari tahun ke tahun, rata-rata penurunan permukaan tanah di Kota Pekalongan sebesar 8cm - 10cm (sumber : data Bappeda), dan salah satu faktor penurunan tersebut yaitu pemakaian air bawah tanah (ABT) yang berlebihan / ekploitasi ABT, oleh sebab itu Kota Pekalongan terus mendorong masyarakat agar beralih dari pemakaian ABT (PAMSIMAS) ke pemakaian air permukaan (PDAM).

Untuk memenuhi kebutuhan Kota Pekalongan, PDAM memiliki beberapa sumber air yang didistribusikan ke Kota Pekalongan yang salah satunya yaitu SPAM Regional Petanglong yang dibagi menjadi 2 Tahap (Jambangan, dan Kaliboyo), Kota Pekalongan dalam hal ini PDAM sudah berkontrak dengan Perusahaan Daerah Tirta Utama dan mendapatkan 150 ltr/dtk pada tahap 1, dan masih memiliki idle 10 lt/dtk, oleh karena itu diharapkan pada tahun 2024 idle tersebut dapat digunakan.

Sejalan dengan upaya pencapaian indikator utama pembangunan yang telah ditetapkan pada Rankhir RPJPD 2025-2045 yang berupa Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, maka dapat dilihat kondisi persentase akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan di Kota Pekalongan. Pada tahun 2023, Jumlah rumah tangga dengan akses air siap minum Jaringan Perpipaan PDAM yang telah aman atau diuji sesuai Permenkes pada SR atau sampel setiap Jaringan Distribusi Bagi (JDB)/ Jaringan Distribusi Langsung (JDL) sebesar 7,2%.

g. Jamban Layak (Sanitasi Dasar)

Sanitasi merupakan usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan sedemikian rupa sehingga munculnya penyakit dapat dihindari. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanitasi adalah suatu usaha pengendalian faktor-faktor lingkungan untuk mencegah timbulnya suatu penyakit dan penularannya yang disebabkan oleh faktor lingkungan tersebut, sehingga derajat kesehatan masyarakat dapat optimal.

Dinas Kesehatan bersama OPD terkait melakukan pendataan sanitasi dasar yaitu fasilitas sanitasi yang digunakan dalam rumah tangga, dalam hal ini adalah penggunaan jenis kloset leher angsa.

Tabel II-74 Rasio Jamban Layak di Kota Pekalongan
Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Jamban Layak	58.832	59.143	59.129	68.276	64.489
Jumlah Rumah yang didata	59.551	59.551	59.551	68.489	64.489
Rasio Rumah Bersanitasi Dasar	98,79	99,31	99,29	99,69	100,00

Sumber: Dinkes Kota Pekalongan, 2024

Jika dilihat pada tabel tersebut, perkembangan sanitasi dasar di Kota Pekalongan sudah sangat baik, yaitu 100 persen.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Rumah Tidak Layak Huni dan Rumah Layak Huni

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Rumah Layak Huni (RLH), salah satu ukurannya adalah mempunyai bangunan yang kokoh. Salah satu indikator pelayanan pada sub urusan perumahan yaitu meningkatnya jumlah rumah layak huni. Tahun 201-2022 rasio rumah tidak layak huni semakin menurun yaitu dari 3,11 persen menjadi 2,10 persen. Hal tersebut berarti bahwa perkembangan RLH di Kota Pekalongan semakin membaik atau bertambah seiring dengan berkurangnya RTLH. Pada tahun. Perkembangan RTLH dan RLH di Kota Pekalongan pada tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel II-75 berikut.

Tabel II-75 Perkembangan Rumah Tidak Layak Huni dan
Rumah Layak Huni di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Tidak Layak Huni		Rumah Layak Huni	
		Jumlah (unit)	Rasio (persen)	Jumlah (unit)	Rasio (persen)
2019	76.269	2.369	3,11	73.900	96,89
2020	76.603	1.966	2,57	74.637	97,43
2021	73.357	1.585	2,17	71.772	97,83
2022*	60.815	1.280	2,10	59.535	97,90
2023*	62.100	24.094	38,80	38.006	61,19

* Hasil sementara pendataan lengkap rumah (Omahe Ndewe)

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, 2024

b. Pengguna Listrik

Pelanggan listrik di Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan. Persentase pengguna listrik mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 sebesar 121,44 persen, dan angka tersebut terus menurun menjadi 113,07 persen pada tahun 2020. Namun persentase pengguna listrik meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 113,29 persen dan menurun kembali menjadi 113,25 persen di tahun 2022, dan meningkat cukup signifikan di tahun 2023 menjadi 130,94 persen. Persentase pengguna listrik yang mencapai di atas 100 persen disebabkan adanya rumah tangga yang memiliki sambungan listrik lebih dari 1 sambungan listrik.

Tabel II-76 Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Pelanggan	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2019	92.622	76.269	121,44
2020	95.313	84.296	113,07
2021	97.567	86.121	113,29
2022	99.388	87.758	113,25
2023	101.186	77.275	130,94

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2024 (diolah), 2024

c. Kawasan Permukiman Kumuh

Persentase kawasan permukiman kumuh yang dimaksud dalam indikator ini adalah perbandingan antara sisa kawasan kumuh berdasarkan luas kawasan kumuh dalam SK Wali Kota Pekalongan Tahun 2014 (yang kemudian diverifikasi oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat pada Tahun 2017) dibandingkan dengan luas kota Pekalongan.

Berdasarkan penetapan SK Wali Kota Tahun 2014 dan verifikasi di Tahun 2017, Luas kawasan kumuh adalah sebesar 195,59 hektar. Sejak tahun 2017, Pemerintah Kota Pekalongan melalui berbagai program dan kegiatan telah menangani kekumuhan pada kawasan tersebut. Luas kawasan yang tertangani sampai dengan Tahun 2023 telah mencapai 271,22 hektar.

Merujuk data tersebut, maka sisa luasan kawasan kumuh pada akhir tahun 2023 adalah sebesar 227,55 hektar. Berikut rincian penanganan kawasan kumuh sejak tahun 2020-2023.

Tabel II-77 Penanganan Kawasan Kumuh Kota Pekalongan
sampai dengan Tahun 2023

No	Nama Kelurahan	Luas Kumuh (%)	Luas Pengurangan Kumuh (persen)				Total Penanganan Sd 2023 (%)	Sisa Kumuh Sd 2023 (%)
			2020	2021	2022	2023		
1	Medono	0,94	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00
2	Podosugih	12,21	0,00	2,70	0,00	1,27	3,97	8,24
3	Tirto	33,98	0,00	16,99	3,44	2,81	23,24	10,74
4	Pringrejo	52,40	0,00	30,78	3,80	3,03	37,61	14,79
5	Bendan Kergon	3,10	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	2,38
6	Pasirkratonkramat	85,98	0,00	2,71	11,19	4,80	25,36	60,62
7	Sapuro Kebulen	10,01	0,00	2,51	2,66	0,00	5,17	4,84
8	Jenggot	11,18	0,00	5,48	1,52	1,56	8,56	2,62
9	Kuripan Yosorejo	9,85	0,00	3,17	0,00	3,43	9,85	0,00
10	Sokoduwet	5,49	0,00	1,37	0,00	0,00	2,76	2,73
11	Kuripan Kertoharjo	4,64	0,00	1,42	1,56	1,66	4,64	0,00
12	Buaran Kradenan	4,54	0,00	1,30	0,00	0,00	2,70	1,84
13	Banyurip	11,56	0,00	3,35	1,86	2,29	9,18	2,38
14	Klego	9,61	0,00	0,00	3,39	2,44	5,83	3,78
15	Poncol	18,64	0,00	1,79	1,62	1,66	5,07	13,57
16	Gamer	3,05	0,00	0,00	1,29	0,95	2,24	0,81
17	Kauman	13,73	0,00	0,00	2,96	1,25	4,21	9,52

No	Nama Kelurahan	Luas Kumuh (%)	Luas Pengurangan Kumuh (persen)				Total Penanganan Sd 2023 (%)	Sisa Kumuh Sd 2023 (%)
			2020	2021	2022	2023		
18	Noyontaansari	7,36	0,00	0,00	0,64	6,72	7,36	0,00
19	Kali Baros	3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,88
20	Setono	3,03	0,00	0,00	1,86	0,00	1,86	1,17
21	Bandengan	29,16	0,00	9,03	3,39	4,61	17,03	12,13
22	Degayu	27,44	0,00	2,25	5,12	4,03	11,40	16,04
23	Kandangpanjang	2,95	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	1,85
24	Panjang Wetan	59,69	1,69	25,73	3,34	1,57	32,33	27,36
25	Panjang Baru	34,65	0,00	10,31	12,19	0,91	23,59	11,06
26	Padukuhan Kraton	24,22	0,00	0,70	3,52	4,80	9,02	15,20
27	Krapyak	15,48	0,45	15,03	0,00	0,00	15,48	0,00
		498,77	***2,14***	***136,62***	***65,35***	***52,55***	***271,22***	**227,55**

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, 2024

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum

Pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan semua tugas tersebut, salah satunya, ditentukan dengan ketersediaan Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2019-2023 rasio Polisi Pamong Praja (PNS) di Kota Pekalongan cenderung menurun. Pada tahun 2019 dengan rasio sebesar 0,91 atau 28 personel untuk setiap 10.000 penduduk dan mengalami penurunan rasio menjadi 0,88 atau 27 personel untuk setiap 10.000 penduduk di tahun 2020. Sampai dengan tahun 2023, rasio Polisi Pamong Praja (PNS) terus menurun menjadi 0,79 atau 25 personil untuk setiap 10.000 penduduk.

Bantuan Polisi PP (Banpol Non PNS) sangat membantu peningkatan rasio Polisi PP. Pada tahun 2019, rasio sebesar 3,45 atau 106 personil untuk setiap 10.000 penduduk. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 3,91 atau 130 personil setiap 10.000 penduduk dikarenakan penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2021 rasio kembali mengalami kenaikan menjadi 3,99 atau 123 personil dan pada tahun 2022 rasio mengalami penurunan menjadi 3,97 atau 123 personil setiap 10.000 penduduk. Sementara itu pada tahun 2023 rasio kembali mengalami penurunan yaitu 3,68 atau 117 personil setiap 10.000 penduduk.

Jika Polisi PP PNS dan Banpol Non PNS dijumlahkan, maka rasio pada tahun 2019 sebesar 4,36 atau 134 personil per 10.000 penduduk. Pada tahun 2020 meningkat jumlahnya dibandingkan tahun 2019 yaitu 147 personil. Pada tahun 2021 dan tahun 2022 rasio naik menjadi 4,83 dan 4,94, dan rasio mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 4,47.

Berikut adalah tabel rasio jumlah Satpol PP dan Banpol dalam kurun waktu 2019-2023.

Tabel II-78 Rasio Jumlah Polisi PP (PNS) dan Jumlah Polisi PP (Banpol Non PNS) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Polisi PP (PNS)	Persentase Jumlah Polisi PP (PNS)	Jumlah Polisi (Banpol Non PNS)	Persentase Jumlah Polisi (Banpol Non PNS)	Jumlah Polisi PP (PNS dan Banpol Non PNS)	Persentase Jumlah Polisi (PNS dan Banpol Non PNS)	Jumlah Penduduk
2019	28	0,91	106	3,45	134	4,36	307.097
2020	27	0,88	130	3,91	147	4,79	307.150
2021	26	0,84	123	3,99	149	4,83	308.310
2022	30	0,97	123	3,97	153	4,94	309.742
2023	25	0,79	117	3,68	142	4,47	317.524

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2024

Pelanggaran Peraturan Daerah dalam kurun waktu 2019-2021 cenderung naik. Pada tahun 2019, pelanggaran Perda sebanyak 1.382 kasus, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.782 kasus. Namun sampai dengan akhir tahun 2023 jumlah pelanggaran Perda semakin meningkat menjadi 2.555 kasus. Meskipun demikian, Satpol P3KP Kota Pekalongan terus berusaha melakukan penyelesaian atas pelanggaran Perda yang terjadi. Hal ini dibuktikan dengan persentase penyelesaian atas pelanggaran Perda yang berada diatas 90 persen mulai tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel II-79 Penyelesaian Pelanggaran Perda di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
2019	1.382	1.363	98,63
2020	1.782	1.759	98,71
2021	3.586	3.586	100,00
2022	2.410	2.410	100,00
2023	2.555	2.555	100,00

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2024

b. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas dan pemantauan terhadap keberadaan Pos Siskamling. Rasio jumlah Linmas per 10.000 Penduduk (Ton Inti) menunjukkan rasio yang fluktuatif, dimana rasio pada tahun 2019 adalah 55,62 atau 1.708 personil dan pada tahun 2023 naik menjadi 67,877 atau 2.152 personil.

Untuk jumlah Linmas Kecamatan dan Kelurahan tidak mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 dengan rasio sebesar 1,15 atau 35 personil. Kemudian pada tahun 2023 terjadi penurunan rasio sebesar 0,88 atau 28 personil per 10.000 penduduk.

Tabel II-80 Rasio Jumlah Linmas (Ton Inti) dan Linmas (Kecamatan dan Kelurahan) Per 10.000 Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Linmas (Ton Inti)	Rasio	Jumlah Penduduk	Jumlah Linmas (Kec. dan Kel.)	Rasio
2019	1.708	55,62	307.097	35	1,14
2020	1.452	47,27	307.150	35	1,14
2021	2.102	68,17	308.310	35	1,14
2022	2.102	67,86	309.742	35	1,13
2023	2.152	67,77	317.524	28	0,88

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan dalam Angka 2024, 2024

Sementara itu jumlah pos siskamling bisa dikatakan cenderung menurun. Pada tahun 2019 berjumlah 441 pos siskamling, menurun menjadi 308 pada tahun 2023.

Tabel II-81 Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jml Pos Siskamling	Jml Kelurahan	Rasio
2019	441	27	16
2020	441	27	16
2021	275	27	10,19
2022	308	27	11,40
2023	308	27	11,40

Sumber: Satpol P3KP Kota Pekalongan, 2024

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaaan terhadap dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan termasuk pelanggaran terhadap Perda dan Perwal, Satpol P3KP Kota Pekalongan dibantu oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sampai dengan tahun 2023 ini Kota Pekalongan telah memiliki 2 orang PNS yang telah bersertifikat sebagai PPNS.

6. Sosial

Pembangunan sosial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat baik melalui kebijakan pada aspek sosial maupun aspek lainnya seperti sumber daya ekonomi dan teknologi.

a. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi

Penanganan Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), salah satunya dikaitkan dengan panti asuhan. Kepemilikan panti ini dapat oleh pemerintah daerah maupun swasta. Jumlah Panti Asuhan pada tahun 2023 sebanyak 194 panti meningkat dibanding jumlah panti asuhan di tahun 2022. Sedangkan jumlah anak yang diasuh meningkat dibandingkan tahun 2022. Secara lengkap jumlah Panti Asuhan dan jumlah anak yang diasuh selama 5 tahun terakhir (2019-2023) disajikan dalam Tabel II-82 berikut.

Tabel II-82 Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang Diasuh di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Panti Asuhan	Jumlah Anak yang Diasuh
2019	8	354
2020	20	1.052
2021	15	1.037
2022	23	251
2023	36	1.667

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan, Kota Pekalongan dalam Angka 2024, 2024

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar, yang meliputi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Pada tahun 2023 jumlah PMKS adalah 24.875 jiwa, dengan jumlah tertinggi adalah fakir miskin sebesar 21.932 jiwa. Data selengkapnya selama 5 tahun terakhir (tahun 2019-2023) disajikan dalam Tabel II-83 berikut.

Tabel II-83 Kategori dan Jumlah PMKS di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Generasi Muda Penyandang Masalah Kesra	-	-	-	-	-
Keluarga Penyandang Sosial Psikologi	-	-	-	-	-
Anak Terlantar/Gelandangan	3	-	158	1	5
Usia Lanjut/Jompo/Terlantar	164	145	140	135	149
Wanita Rawan Sosial	-	8	9	15	12
Keluarga yang Kondisi/ Perumahan, Lingkungan Tidak Layak	-	-	-	-	
Anak Nakal	0	98	158	-	0
Korban Penyalahgunaan Narkoba	2	-	-	1	0
Penyandang Cacat:	535	1.354	481	638	
1. Tubuh	357	234	267	214	9
2. Netra	103	107	112	109	25
3. Mental	0	429	365	216	112
4. Ganda	0	484	457	-	0
5. Wicara	75	100	102	99	4
Bekas Penyandang Penyakit Kronis	-	-	-	-	
Gelandangan	-	3	3	3	16
Tuna Susila	-	-	-	-	0
Waria	-	-	-	-	0

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Bekas Narapidana	3	1	1	-	0
Bencana Alam	-	3107	14.000	834	2.611
Fakir Miskin	24.116	22.683	184.235	22.672	21.932
Jumlah	24.823	27.499	200.488	24.937	24.875

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2024

Penanganan PMKS di Kota Pekalongan juga melibatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Jumlah partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi/yayasan sampai dengan tahun 2023, untuk perintis/pejuang kemerdekaan berjumlah 235 orang, karang taruna berjumlah 32 organisasi, WKKS (Wanita Kader Kepemimpinan Sosial) sebanyak 5 orang dan PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) sebanyak 63 orang. Selanjutnya disajikan dalam Tabel II-84 berikut.

Tabel II-84 Jumlah PSKS di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Perintis / Pejuang Kemerdekaan	6	0	0	235	235
Wanita Kader Kepemimpinan Sosial	5	5	5	5	5
Pekerja Sosial Masyarakat	53	63	63	63	63
Karang Taruna	32	32	32	32	32
Organisasi Sosial	9	20	0	0	0

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2024

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh program-program yang tepat inovatif, tetapi juga harus didukung dengan kriteria kemiskinan yang jelas, serta data yang akurat dan *up to date*. Untuk mendapatkan data yang *up to date* tersebut, perlu dilakukan verifikasi dan validasi secara berkala sesuai dengan jenis programnya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementrian Sosial dengan didukung oleh Pemerintah Daerah mendapatkan mandat untuk merumuskan kebijakan tentang verifikasi, validasi data dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial berbasis teknologi informasi melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan *Social Next Generation* (SIKS-NG). Selanjutnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah diverifikasi dan divalidasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat dipergunakan dalam menjalankan program penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ini memuat informasi status sosial ekonomi rumah tangga 40 persen terendah, keluarga dan individu yang meliputi data demografi, pendidikan, kesehatan, perumahan, kepemilikan aset dan kepesertaan program bantuan sosial/subsidi.

Berikut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Pekalongan selama Tahun 2019-2023.

Tabel II-85 Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan DTKS di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	Rumah Tangga Sasaran	Anggota Rumah Tangga Sasaran
2019	29.618	112.613
2020	29.282	108.436
2021	61.421	184.247

Tahun	Rumah Tangga Sasaran	Anggota Rumah Tangga Sasaran
2022	61.330	188.455
2023	59.588	180.355

Sumber: Dinas Sosial P2KB Kota Pekalongan, 2024

Dari Tabel II-85 dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terjadi penurunan sebanyak 1.742 RTS jika dibandingkan dengan tahun 2022. Jumlah Anggota Rumah Tangga Sasaran Tahun 2023 juga mengalami penurunan sebanyak 8.100 jiwa dibandingkan jumlah Anggota Rumah Tangga Sasaran tahun 2022.

2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Ketenagakerjaan

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

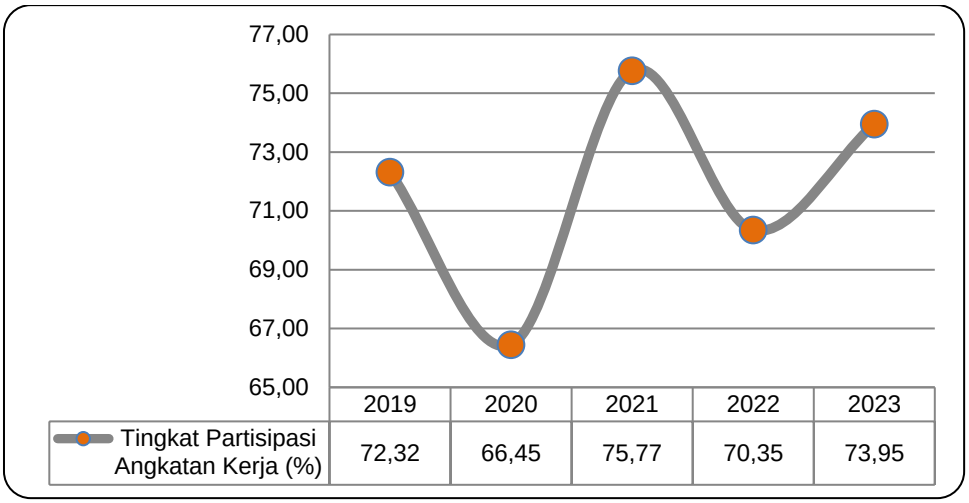
Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase angkatan kerja usia 15 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Jumlah Angkatan Kerja di Kota Pekalongan pada kurun waktu 2019 s.d. 2023 disajikan dalam Tabel II-86 berikut.

Tabel II-86 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Angkatan Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen)
1	2019	168.339	72,46
2	2020	157.260	66,45
3	2021	181.210	75,77
4	2022	169.940	70,35
5	2023	171.522	73,95

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka 2024 dan www.jateng.bps.go.id, 2024

Pada tahun 2019 sampai tahun 2023 tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Pekalongan berfluktuasi dari 72,46 persen di tahun 2019, menurun menjadi 66,45 persen di tahun 2020, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 75,77 persen, menurun kembali pada tahun 2022 menjadi 70,35 persen dan kembali meningkat menjadi 73,95 persen di tahun 2023. Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada tahun 2023 tercatat sekitar 171.522 orang. Persentase angkatan kerja 2023 meningkat 3,6 poin dari tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah angkatan kerja tahun 2023 dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 tahun ke atas) mengalami penurunan.



Gambar II-35 Perkembangan Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2024

b. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perselisihan hubungan industrial diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Sepanjang lima tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja tergolong tidak banyak, masih di bawah 30 (tiga puluh) kasus dari sekitar 300-500 perusahaan. Meskipun jumlah dan persentase sengketa masih berfluktuasi untuk itu persengketaan ini harus tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-87 berikut.

Tabel II-87 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Sengketa	Jumlah Perusahaan	Persentase Sengketa
2019	11	369	2,98
2020	28	484	5,79
2021	11	484	2,27
2022	8	484	1,65
2023	8	492	1,62

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2024

c. Pencari Kerja yang Ditempatkan (Persentase)

Secara umum, kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana pada tahun 2023 sebesar 73,95 persen. Pencari kerja ada yang ditempatkan melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN). Sepanjang lima tahun terakhir jumlah AKL dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Untuk AKAD dan AKAN cenderung menurun daru tahun 2019 sampai 2023. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-88 berikut.

Tabel II-88 Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Pencari Kerja Yang Ditempatkan		
	Antar Kerja Lokal (AKL)	Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)	Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
2019	184	4	111
2020	3	0	24
2021	164	0	13
2022	179	0	146
2023	0	0	103

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2024

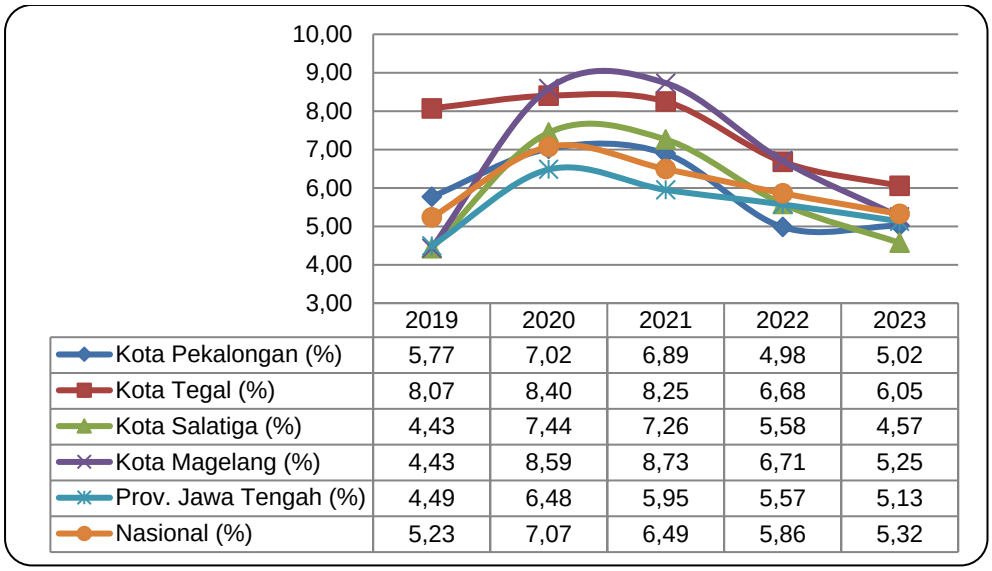
d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan angka persentase jumlah penganggur pada usia kerja dibandingkan dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan tahun 2023 sebesar 5,02 persen atau meningkat 0,04 poin dari tahun 2022, artinya, pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 5 orang yang benar-benar menganggur.

Faktor yang menyebabkan TPT tidak bisa turun signifikan antara lain beberapa musibah seperti kebakaran pasar Banjarsari dan bencana banjir rob yang menggenangi wilayah industri di Kota Pekalongan yang berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Pada tahun 2023 TPT Kota Pekalongan berada di bawah TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Artinya, jumlah pengangguran di Kota Pekalongan lebih rendah dari rata-rata Jawa Tengah dan Nasional. Jika dibandingkan dengan Kota lain di Jawa Tengah, TPT Kota Pekalongan terendah kedua setelah Kota Salatiga.

Tantangan ke depan adalah bagaimana upaya terintegrasi untuk menurunkan TPT secara optimal. Meskipun dibandingkan daerah lain setara, TPT Kota Pekalongan lebih bagus, namun jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan harus berupaya lebih keras lagi untuk mengoptimalkan capaian TPT-nya.



	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekalongan (%)	5,77	7,02	6,89	4,98	5,02
Kota Tegal (%)	8,07	8,40	8,25	6,68	6,05
Kota Salatiga (%)	4,43	7,44	7,26	5,58	4,57
Kota Magelang (%)	4,43	8,59	8,73	6,71	5,25
Prov. Jawa Tengah (%)	4,49	6,48	5,95	5,57	5,13
Nasional (%)	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Gambar II-36 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pekalongan dengan Daerah Setara, Provinsi dan Nasional Tahun 2019- 2023

Sumber: www.bps.go.id (diolah), 2024

Salah satu upaya yang telah dan terus dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan adalah pelatihan tenaga kerja. Berdasarkan analisis korelasi yang dilakukan antara data jumlah pelatihan yang dilaksanakan dengan TPT tahun 2011-2020 maka korelasi antara kedua varibel tersebut sangat lemah atau tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan yang dilaksanakan belum berdampak signifikan bagi penurunan TPT. Strategi pelaksanaan pelatihan harus dilakukan penyesuaian, termasuk pemilihan peserta pelatihan, sehingga diharapkan pelatihan dapat tepat sasaran, meningkatkan kesempatan dan peluang kerja, dan pada akhirnya dapat berdampak bagi penurunan TPT. Upaya bersama yang harus dilakukan adalah integrasi kebijakan berbagai sektor sehingga dapat saling mendukung atau melengkapi sehingga berdampak bagi penurunan TPT secara optimal.

e. Keselamatan dan Perlindungan

Sebagai salah satu alat kepentingan pegawai dan perusahaan, penerapan K3 di lingkungan perusahaan menciptakan budaya kerja dan keselamatan bagi tercapainya kenyamanan bekerja. Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan 2022 jumlah perusahaan yang menerapkan K3 cenderung fluktuatif. Namun dari sisi persentase cenderung menurun, dimana pada tahun 2019 sebesar 86,45 persen, terus menurun sampai tahun 2020 sebesar 74,38 persen. Namun di tahun 2021 hingga 2023 semua perusahaan telah menerapkan K3 di lingkungan kerjanya. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-89 berikut.

Tabel II-89 Persentase Perusahaan Menerapkan Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Perusahaan Menerapkan K3	Jumlah Perusahaan di Wilayah Kab/kota	Persentase
2019	319	369	86,45
2020	360	484	74,38
2021	484	484	100,00
2022	484	484	100,00
2023	492	492	100,00

Sumber: Diperinaker Kota Pekalongan, 2024

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Persentase Partisipasi Perempuan Bekerja di Lembaga Pemerintah

Indikator persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah indikator yang diukur dengan membandingkan jumlah ASN perempuan Pemerintah Kota Pekalongan tahun N dengan seluruh pekerja perempuan (ASN perempuan dan pekerja perempuan di perusahaan formal) Tahun N. Tahun 2023 ASN perempuan di Pemerintah Kota Pekalongan sejumlah 1.581 orang, sedangkan jumlah pekerja perempuan sebanyak 74.015 orang.

Tabel II-90 Banyaknya Partisipasi Pekerja Perempuan Pada Lembaga Pemerintahan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

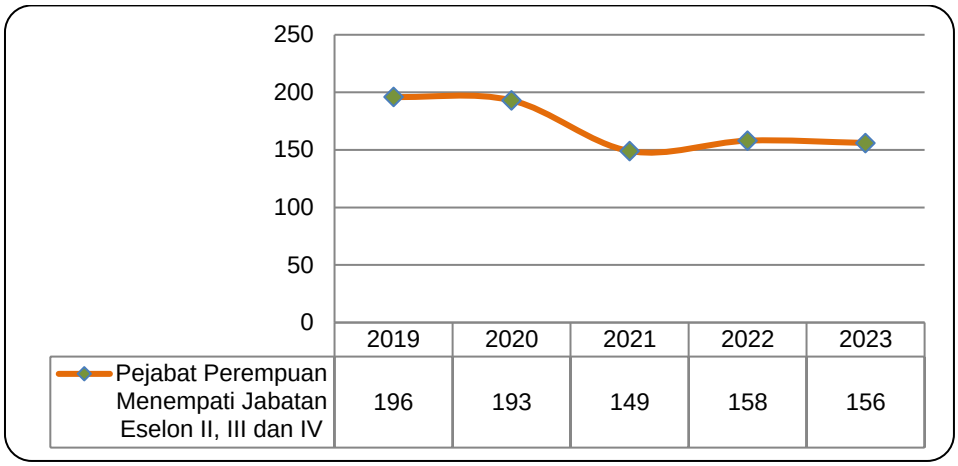
URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah (orang)	2.322	1.616	1.564	1.695	1.581
Jumlah pekerja perempuan (orang)	45.571	66.690	77.848	67.496	74.015
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (persen)	5,10	2,42	2,01	2,51	2,14

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2024 (diolah), 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah berkurang, semula 1.695 orang pada tahun 2022 menjadi 1.581 orang pada tahun 2023.

b. Partisipasi Perempuan dalam Jabatan Struktural ASN

Partisipasi perempuan dalam jabatan eselon II, III, dan IV di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2019-2021 terus menurun. Pada tahun 2019 pejabat perempuan yang menduduki eselon II, III dan IV dibandingkan seluruh jabatan yang terisi sebesar 196 orang. Jumlah tersebut terus menurun sampai pada jumlah 149 orang di tahun 2021 dan baru meningkat lagi pada tahun 2022 yaitu sebesar 158 orang dan 156 orang di tahun 2023. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar II-37 berikut.

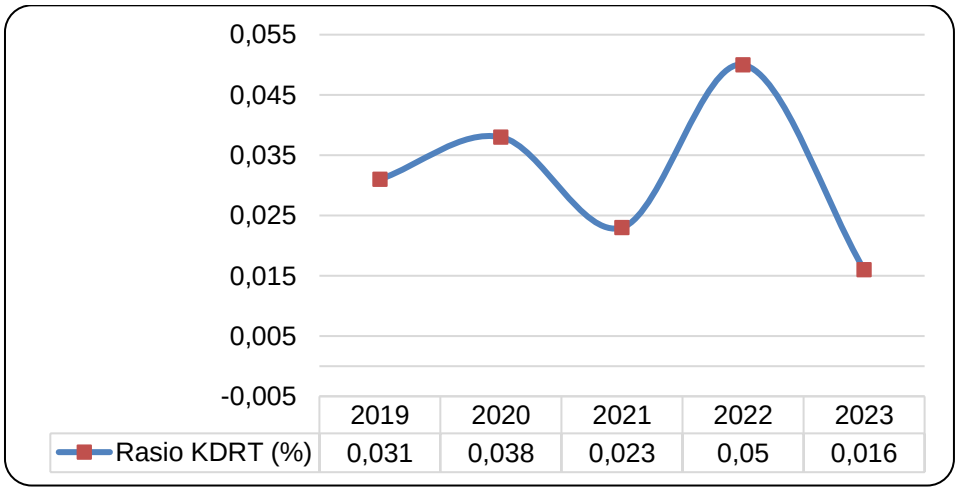


Gambar II-37 Jumlah Perempuan Dalam Jabatan ASN di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 (diolah), 2024

c. Rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Rasio KDRT menunjukkan persentase kasus KDRT dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Selama kurun waktu 2019-2023 rasio KDRT mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Semakin kecil rasio KRDT menunjukan indikasi yang semakin baik. Rasio KDRT terendah terjadi pada tahun 2023 dengan angka rasio 0,016 persen.

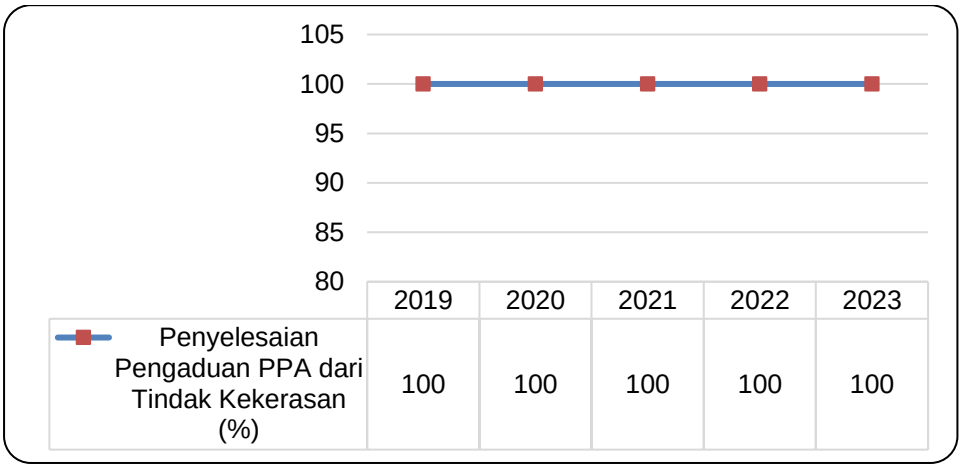


Gambar II-38 Perkembangan Rasio KDRT di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2024

d. Penyelesaian Kasus Perlindungan Perempuan dan Anak

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan prestasi yang baik. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 seluruh kasus pengaduan perlindungan perempuan dan anak dapat diselesaikan. Salah satu faktor keberhasilan atas prestasi tersebut dikarenakan adanya Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR) dibawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPMPPA).



Gambar II-39 Perkembangan Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kota Pekalongan Tahun 2018-2023

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2024

e. Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) didefnisikan sebagai Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Ada 24 indikator yang mampu mewakili terpenuhinya hak-hak anak sehingga dapat dikatakan menuju kabupaten/kota layak anak yang terdiri dari 5 kluster, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif/pengganti; (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan; (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; (5) perlindungan khusus.

Pada tahun 2020, Kota Pekalongan meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Madya. Upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya di Tahun 2022, Kota Pekalongan telah mendeklarasikan bebas pekerja anak, advokasi dan peresmian sejumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Pekalongan, kegiatan Konvensi Hak Anak (KHA) kepada semua guru di Kota Pekalongan baik di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP, serta SMA secara mandiri dan bersinergi kepada Pemkot Pekalongan. Upaya lain juga dilakukan untuk memenuhi indikator dan klaster KLA. Hasilnya, pada tahun 2023 Kota Pekalongan kembali meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya dengan nilai 769,80.

3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam ketahanan pangan yang merupakan suatu sistem, mencakup empat sub sistem yaitu: (a) ketersediaan

pangan melalui upaya peningkatan ketersediaan pangan di daerah dan pengembangan produksi pangan lokal serta cadangan pangan, (b) Keterjangkauan pangan melalui pemantapan distribusi, pemasaran, perdagangan, informasi; (c) Konsumsi pangan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan; serta (d) keamanan pangan melalui sanitasi, pemberian jaminan keamanan dan mutu pangan.

Ketersediaan pangan pada satu wilayah ditunjukkan dengan rasio ketersediaan pangan utama. Di Kota Pekalongan ketersediaan pangan dalam kurun 5 (lima) tahun (2019-2023) disajikan dalam Tabel II-91. Dapat dilihat bahwa ketersediaan pangan pada tahun 2019-2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan dari tahun 2020, menjadi 5.738.290 dari sebelumnya 4.769.190, pada tahun 2022 dan 2023 kembali menurun menjadi 5.179.300 dan 4.235.430. Rasio ketersediaan pangan secara otomatis juga sebanding dengan fluktuasi ketersediaan pangan.

Tabel II-91 Rasio Ketersediaan Pangan Utama
Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Ketersediaan Pangan Utama Per tahun	Jumlah Penduduk	Rasio
2019	5.400.416	307.097	17,59
2020	4.769.190	307.150	15,53
2021	5.738.290	308.310	18,61
2022	5.179.300	309.742	16,72
2023	4.235.430	317.520	10,80

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2024

Pola Pangan Harapan adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa (Depkes RI, 2005). Skor PPH selama lima tahun terakhir (tahun 2019-2023) disajikan dalam Tabel II-92.

Tabel II-92 Skor PPH Kota Pekalongan
Tahun 2019 - 2023

Tahun	Skor PPH Kota Pekalongan
2019	91,31
2020	92,01
2021	87,10
2022	81,20
2023	93,70

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2024

Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan skor Pola Pangan Harapan antara lain dengan: penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya; penyediaan cadangan pangan daerah; penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan; meningkatkan ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar.

Berdasarkan pengelompokan menurut jenis bahan pangan, secara umum dikelompokkan menjadi 9 (Sembilan) jenis kelompok pangan. Pada Tabel II-93. disajikan capaian kelompok konsumsi pangan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023, menunjukkan bahwa konsumsi beras di Kota Pekalongan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kelompok pangan yang juga dapat dikatakan cukup tinggi dalam konsumsi dibanding yang lain adalah sayur dan buah yaitu 67,0 kg per kapita/tahun. Walaupun

tiap tahunnya mengalami fluktuasi naik turun. Konsumsi kelompok pangan selanjutnya adalah kelompok pangan hewani yaitu 35,9 kg per kapita/tahun. Konsumsi pangan lain-lain berada di urutan selanjutnya (35,7 kg/kapita/tahun tahun 2023) diikuti dengan umbi-umbian, kacang-kacangan, gula, minyak dan lemak, serta buah/biji berminyak. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-93 berikut.

Tabel II-93 Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Padi-padian	Kg/Kap/th	102,0	108,7	114,0	110,9	124,1
Umbi-umbian	Kg/Kap/th	18,8	7,9	12,4	8,8	7,4
Pangan Hewani	Kg/Kap/th	45,0	36,8	35,0	37,0	35,9
Minyak dan Lemak	Kg/Kap/th	5,7	6,6	6,7	7,6	6,7
Buah/biji berminyak	Kg/Kap/th	2,3	0,8	0,8	0,9	0,6
Kacang-kacangan	Kg/Kap/th	23,5	8,4	7,7	7,7	7,4
Gula	Kg/Kap/th	5,9	7,7	8,1	8,1	7,0
Sayur & Buah	Kg/Kap/th	82,2	70,0	64,6	63,7	67,0
lain-lain	Kg/Kap/th	2,3	44,1	37,9	33,4	35,7

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2024

Dari segi konsumsi energi yang diukur dari kilo kalori (kkal) per kapita/tahun. Konsumsi beras selalu menempati posisi pertama dan secara umum cenderung meningkat tiap tahunnya, dengan jumlah 1.251,5 kkal/kapita/tahun pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 1.275,9 kkal/kapita/tahun pada tahun 2021, walaupun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 1.270 kkal/kapita/tahun. Urutan berikutnya adalah kelopok pangan hewani, yang pada tahun 2023 meningkat menjadi 275,1 kkal/kapita/tahun dari tahun 2022 sebesar 274,6 kkal/kapita/tahun . Selanjutnya urutan kelompok pangan selalu berubah jenisnya. Pada tahun 2023, setelah padi-padian dan pangan hewani, kelompok pangan selanjutnya adalah minyak dan lemak (165,8 kkal/kapita/tahun), sayur dan buah (143,7 kkal/kapita/tahun) dan kelompok pangan lainnya. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-94 berikut.

Tabel II-94 Konsumsi Energi Per Kapita/tahun di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Capaian Konsumsi Kelompok Pangan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Padi-padian	Kkal/Kg/Kap/th	1.006,1	1251,5	1275,9	1.270,4	1.242,9
Umbi-umbian	Kkal/Kg/Kap/th	56,3	24,7	39,8	26,8	23,4
Pangan Hewani	Kkal/Kg/Kap/th	255,4	272,5	258,9	274,6	275,1
Minyak dan Lemak	Kkal/Kg/Kap/th	136,8	160,7	164,5	186,1	165,8
Buah/biji berminyak	Kkal/Kg/Kap/th	40,6	12,7	12,7	13,4	9,8
Kacang-kacangan	Kkal/Kg/Kap/th	213,2	53,8	49,5	49,4	86,6
Gula	Kkal/Kg/Kap/th	58,7	77,5	81,6	81,4	70,5
Sayur dan Buah	Kkal/Kg/Kap/th	116,8	97,3	87,5	84,6	143,7
Lain-lain	Kkal/Kg/Kap/th	18,5	56,1	50,0	50,4	53,0

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2024

Secara umum, selama lima tahun terakhir, PPH Kota Pekalongan cenderung menurun. Capaian konsumsi kelompok pangan karbohidrat cenderung meningkat, sementara kelompok pangan yang lain cenderung menurun. Hal ini harus menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan, sebagai hal yang harus diwaspadai bersama.

Pola pangan harapan adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi tiap kelompok pangan dari suatu pola ketersediaan dan konsumsi pangan. Pola pangan harapan ini dapat dipahami sebagai komposisi keseimbangan pangan dan kecukupan gizi yang dijadikan sebuah angka penilaian sebuah daya serap komponen-komponen makanan di suatu wilayah sudah mencukupi atau belum. Pola pangan harapan ini harus memenuhi dalam segi kuantitas, kualitas, keragamannya serta memperhatikan aspek sosial budaya, daya terima masyarakat, ekonomi, agama, citarasa, daya cerna, kecukupan gizi dan keseimbangan gizi.

Setiap individu membutuhkan energi yang cukup untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Energi tersebut bisa kita dapatkan dari makanan yang dikonsumsi. Setiap produk pangan memiliki berbagai komponen gizi yang terkandung di dalamnya. Komponen gizi tersebut dibutuhkan oleh tubuh setiap individu dalam jumlah tertentu. Karena kebutuhan tubuh setiap individu akan komponen gizi berbeda, maka sekarang kita mengenal istilah Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Pangan beragam dan bergizi artinya terdapat lebih dari satu macam jenis pangan dalam piring sekali makan sehingga dapat memenuhi komponen gizi secara lengkap. Seimbang artinya pangan mengandung komponen-komponen yang cukup secara kuantitas, cukup secara kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral) yang diperlukan tubuh. Terakhir, komponen yang tidak kalah penting dari produk pangan adalah aspek keamanannya. Suatu produk pangan yang aman harus bebas dari cemaran fisik, kimia, dan mikrobiologi. Keamanan dari setiap makanan yang dikonsumsi perlu diperhatikan agar terhindar dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan suatu produk pangan. Konsep Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman juga memiliki kelebihan yakni implementasinya dapat memanfaatkan potensi produk pangan yang dihasilkan oleh daerah. Misalnya jika suatu daerah merupakan sentra penghasil jagung, maka jagung tersebut dapat menggantikan beras sebagai bahan pangan sumber karbohidrat.

Kota Pekalongan sangat segera membutuhkan pangan B2SA bagi seluruh masyarakatnya. Hal ini didasarkan fakta bahwa stunting, AKI, AKB dan AKABA merupakan wujud dari permasalahan kesehatan, di samping permasalahan kesehatan lainnya. Dari berbagai penelitian menyebutkan bahwa asupan makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan dan konsumsi terhadap pangan B2SA sangat mendesak dibutuhkan Kota Pekalongan, terutama untuk mewujudkan generasi Kota Pekalongan yang lebih unggul di masa mendatang. Upaya untuk membumikan penyediaan dan konsumsi pangan B2SA, adalah dengan mendorong upaya penganekaragaman konsumsi pangan dengan cepat melalui basis kearifan lokal serta kerja sama terintegrasi seluruh pemangku kepentingan. Kampanye pentingnya pangan B2SA harus terus dilakukan agar masyarakat semakin memahami bahwa pangan B2SA sangat dibutuhkan bagi kesehatan masyarakat, termasuk janin di dalam kandungan, agar terwujud generasi masa depan yang lebih sehat dan unggul.

Strategi agar skor pola pangan harapan (PPH) dapat mengalami kenaikan di tengah pandemi seperti ini ialah kemudahan masyarakat mengakses pangan yang tersedia beragam. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan agar kondisi tersebut dapat diwujudkan.

4. Pertanahan

Dalam era otonomi daerah saat ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdapat 9 urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kota. Kesembilan urusan tersebut adalah Izin Lokasi, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pelayanan Umum, Sengketa Tanah Garapan, Ganti Rugi, Penetapan Subyek Obyek Redistribusi tanah, tanah ulayat, pemanfaatan tanah kosong, izin membuka tanah, dan penggunaan tanah. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pertanahan kabupaten/kota hanya meliputi 8 sub urusan yaitu izin lokasi; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; tanah ulayat; tanah kosong; izin membuka tanah; serta penggunaan tanah.

Pelayanan umum kepada masyarakat di urusan pertanahan, bertujuan untuk mempertahankan kelestarian lahan dan lingkungan. Beberapa hal yang dilakukan antara lain dengan memberikan insentif kepada masyarakat dalam rangka mempertahankan lahan pertanian, serta memberikan sertifikat tanah masyarakat yang berada di kawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dalam pelaksanaan reforma agraria yang merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset dan disertai dengan Penataan Akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia,dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu Perencanaan Reforma Agraria dan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, pada tahun 2021 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekalongan menyelesaikan 95 % target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kantor Pertanahan Kota Pekalongan mendapat target dari BPN Pusat untuk mensertipikat 3.145 bidang tanah. Saat ini BPN Kota Pekalongan sudah terealisasi 95 persen dari target dan sertipikatnya akan diserahkan secara bertahap. Jumlah realisasi adalah 2.104 sertifikat yang terdiri dari 650 aset pemkot, wakaf 6 bidang, dan milik warga masyarakat (perorangan) sebanyak 1.448.

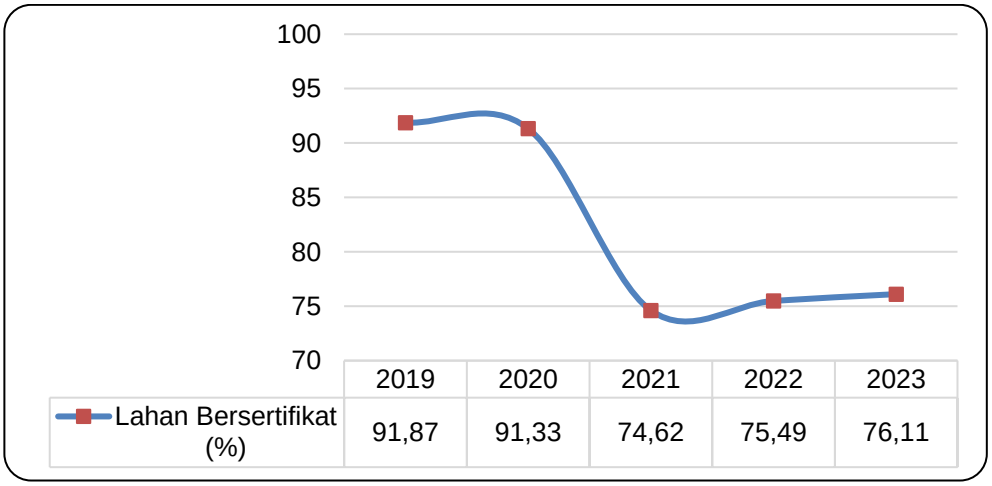
Perkembangan kepemilikan sertifikat tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan, Pada tahun 2020 terjadi perubahan/koreksi luasan wilayah kota Pekalongan, yang semula 4.525 ha terkoreksi menjadi 4.642 ha. Adanya perubahan luasan wilayah mengakibatkan persentase lahan bersertifikat mengalami perubahan. Pada tahun 2020 menjadi 91,33 persen dengan luasan seluas 4.239,02, menjadi menurun persentasenya bila dibandingkan dengan tahun 2019 yang masih menggunakan luas total wilayah lama (4.525 ha). Secara lengkap tanah bersertifikat di Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir 2019-2023, disajikan dalam Tabel II-95 berikut.

Tabel II-95 Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Luas wilayah	4.525	4.642	4.642	4.642,00	4.642,00
Luas tanah bersertifikat	4.157,29	4.239,50	3.463,64	3.504,19	3.532,79
Hak Milik	3.320,74	3.360,02	2.590,47	2.549,51	2.592,29
HGB	13,21	322,95	212,77	198,64	195,15
Hak Guna Usaha	6,76	6,76	12,11	11,28	11,28
Hak Pakai	451,53	481,01	596,26	635,70	659,72
Hak Pengelolaan	4,00	5,00	31,82	31,82	26,31
Hak Wakaf	62,06	63,76	20,22	32,23	48,02
Lahan Bersertifikat (persen)	91,87	91,33	74,62	75,49	76,11

Sumber: BPN Kota Pekalongan (diolah), 2024 dan pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

Kinerja persertifikatan bidang tanah di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 luas lahan bersertifikat adalah 91,87 persen, semakin meningkatnya persentase tersebut menjadi salah satu indikasi kesadaran hukum masyarakat yang semakin meningkat, khususnya terhadap pertanahan. namun pada tahun 2020 jumlah lahan di Kota Pekalongan yang sudah bersertifikat menurun menjadi 91,33 dan tahun 2021 semakin menurun menjadi 74,62 persen. Hal ini dikarenakan adanya koreksi total luas lahan Kota Pekalongan. Secara lengkap lahan bersertifikat di Kota Pekalongan dalam 5 (lima) tahun terakhir 2019-2023, disajikan dalam grafik berikut:



	2019	2020	2021	2022	2023
Lahan Bersertifikat (%)	91,87	91,33	74,62	75,49	76,11

Gambar II-40 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

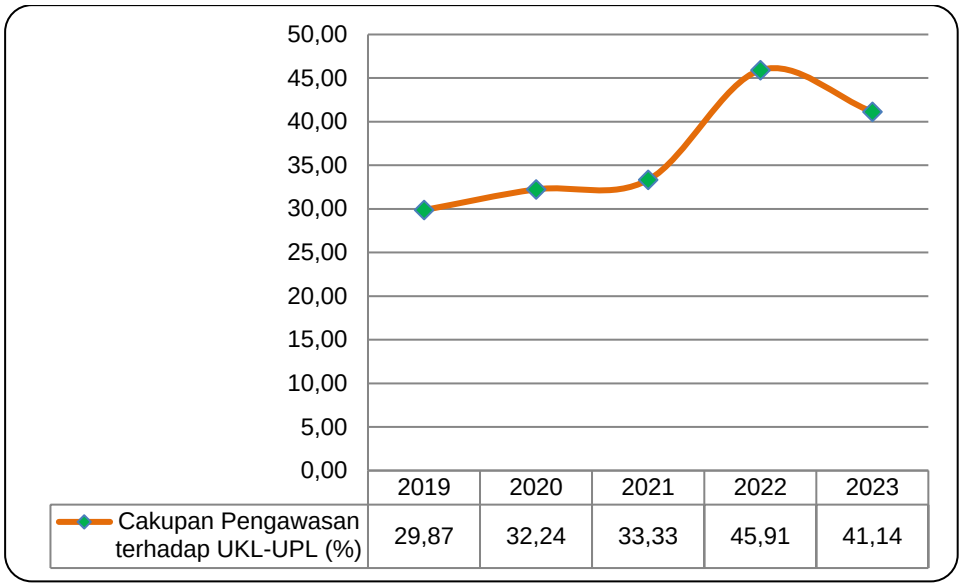
Sumber: BPN Kota Pekalongan (diolah), 2024

Dalam rangka mendukung kegiatan reforma agrarian, dalam hal ini terkait penataan akses, dimana dapat memberikan program dukungan kepada masyarakat baik dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi, dan pendampingan lainnya yang berbasis pada pemanfaatan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan koordinasi dengan Kantah ATR/BPN. Koordinasi yang telah dilakukan meliputi:

1. Koordinasi dalam penyusunan rencana tata ruang, baik RTRW maupun RDTR oleh Bappeda dan DPUPR;
2. Koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, antara lain fasilitasi Forum Penataan Ruang (FPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh DPUPR;
3. Koordinasi penataan kawasan kumuh melalui konsolidasi tanah oleh Dinperkim;
4. Penyusunan blok PBB di semua Kecamatan oleh BPKAD; dan
5. Inventarisasi Tanah Pemerintah (Intip) oleh Kantah ATR/BPN dengan dana dari Pemkot Pekalongan oleh BPKAD.

5. Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) merupakan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.



Gambar II-41 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan UKL-UPL Tahun 2019 - 2023

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2024

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL menunjukkan persentase perusahaan wajib UKL dan UPL yang diawasi dibandingkan dengan jumlah seluruh perusahaan wajib UKL dan UPL. Selama kurun waktu tahun 2019-2023, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UPL dan UKL terus mengalami peningkatan sebagaimana disajikan dalam Gambar II-41.

Pada tahun 2019 cakupan pengawasan terhadap UKL-UPL sebesar 29,87 persen. Pada tahun 2019 sampai dengan 2022, cakupan pengawasan pelaksanaan UKP - UPL mengalami peningkatan bertahap yaitu 32,24 persen pada tahun 2020, 33,33 persen pada tahun 2021 dan 45,91 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 cakupan pengawasan terhadap UKL-UPL menurun menjadi 41,14 persen.

Terdapat peningkatan jumlah pemilik dokumen lingkungan (UKL/UPL dan amdal) seiring dengan peningkatan jumlah usaha di Kota Pekalongan. Peningkatan ini juga didorong oleh perijinan usaha yang mempersyaratkan disusunnya dokumen pengelolaan lingkungan baik berupa UKL/UPL maupun amdal bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan (UKL/UPL dan amdal) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tingkat pelaporan monitoring UKL/UPL dan amdal juga cenderung meningkat, hal ini menunjukkan naiknya tingkat kesadaran pengusaha dalam pengelolaan lingkungan. Perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran pelaporan diantaranya dengan melakukan pengawasan dan pemberian insentif /disinsentif bagi usaha dan/atau kegiatan yang menaati tertib hukum lingkungan.

Peningkatan persentase tertib hukum lingkungan hidup pada 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2019 - 2023 mengalami peningkatan. Terutama pada tahun 2023, terdapat peningkatan yang signifikan mencapai 43,04%, baik pada jumlah yang usaha melaporkan UKL-UPL/AMDAL maupun jumlah UKP-UPL/AMDAL. Pada tahun 2019 jumlah yang usaha melaporkan UKL-UPL/AMDAL sebanyak 8, meningkat pada tahun 2021 sebanyak 12, tahun 2021 sebanyak 23, dan meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi 41. Persentase tertib hukum lingkungan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-96 berikut.

Tabel II-96 Persentase Tertib Hukum Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tertib Hukum Lingkungan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Usaha yang melaporkan UKL-UPL/AMDAL	8	12	23	41	68
Jumlah UKL-UPL/AMDAL	154	158	201	159	158
Persentase Tertib Hukum Lingkungan	5,19	7,59	11,44	25,81	43,04

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2024

Usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki rekomendasi persetujuan teknis dan persetujuan teknis PPLH di Kota Pekalongan tidaklah terlalu banyak, hal ini karena jumlah kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan memiliki persetujuan teknis tersebut ditujukan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL dan AMDAL, sedangkan di Kota Pekalongan mayoritas hanya wajib SPPL.

Sebagai salah satu kota pantai dan penghasil batik, Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk melestarikan lingkungan hidup di Kota Pekalongan. Komitmen itu antara lain dengan membangun instalasi IPAL baik untuk kebutuhan industri batik, industri tempe maupun industri peternakan. Hal ini diperlukan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan industri rumah tangga. Industri yang semakin bertumbuh dari tahun 2019-2023 diikuti dengan volume pengelolaan limbah yang semakin baik.

Perkembangan pemanfaatan IPAL komunal di Kota Pekalongan tiap tahunnya mengalami penambahan, baik dalam jumlah industri maupun jumlah limbah yang dihasilkan. Namun untuk IPAL Jenggot dan IPAL Industri Besar mengalami penurunan. Pada IPAL Jenggot dengan jumlah industri yang sama pada tahun 2019 dan 2020 (80 industri) jumlah limbah yang dihasilkan menurun dari 700m3 menjadi 600m3. Sedangkan di tahun 2021 dan 2022 tetap sama dengan 2020, dan ditahun 2023 mengalami penurunan yang cukup besar sehingga hanya menyisakan 150m3 saja. Pada IPAL industri besar, dengan berkurangnya jumlah industri pada tahun 2020 (3 industri) maka jumlah limbah berkurang menjadi 500m3. Jumlah ini sama dengan jumlah di tahun 2021 dan 2022. Beberapa usaha yang belum memiliki pengolahan limbah B3 pada umumnya adalah industri kecil. Untuk IPAL Biogas ternak, sejak tahun 2020 sudah tidak ada limbah karena sudah tidak ada industri yang menghasilkan limbah tersebut. Perkembangan pemanfaatan IPAL komunal disajikan dalam Tabel II-97 berikut.

Namun demikian masih terdapat daerah yang merupakan sentra industri kecil yang menghasilkan limbah dan belum terdapat layanan IPAL komunal, yaitu: Pringlangu, Bendan Kergon, Pasir Kraton Kramat, Krapyak, Kelgo, Medono, Kuripan Kertoharjo, sebagian wilayah Jenggot dan sebagian wilayah Banyurip.

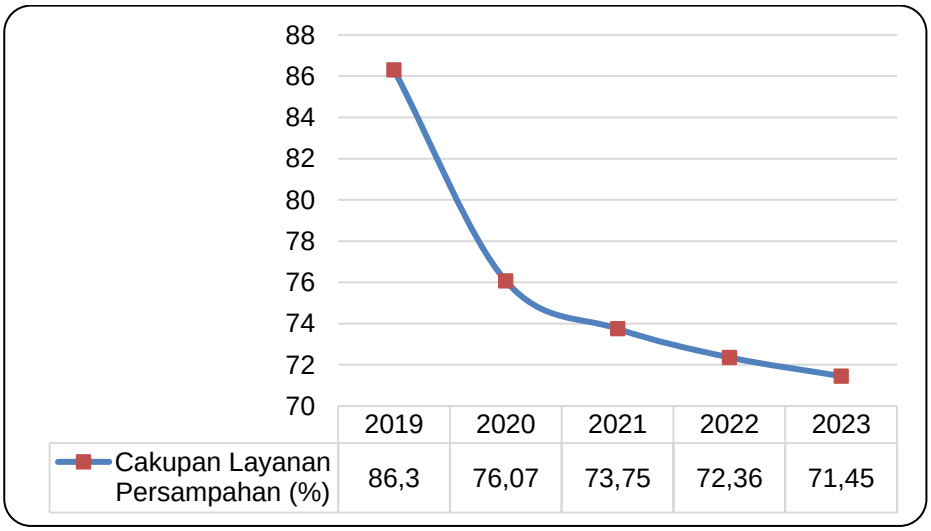
Tabel II-97 Perkembangan Pemanfaatan IPAL Komunal di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

IPAL	2019		2020		2021		2022		2023	
	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)
Kauman	20	150	20	125	20	150	19	150	19	200
Jenggot	80	700	80	600	80	600	80	600	80	150
Industri Kecil	83	426	73	426	75	430	75	430	-	-
IPAL Bersama	3	500	2	700	2	700	2	700	2	500

IPAL	2019		2020		2021		2022		2023	
	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)	Jumlah Industri	Limbah (m^3)
Industri Besar	5	900	3	500	3	500	3	500	6	190
IPAL Biogas Duwet	125	120	30	70	30	70	30	70	4	150
IPAL Biogas Ternak	7	75	-	-	-	-	-	-	-	-
IPAL Pringrejo	20	50	25	60	25	75	-	-	-	-
IPAL Banyurip	69	150	55	125	60	150	60	150	-	-
JUMLAH	412	3.071	288	2.606	295	2.675	269	2.600	171	1440

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2024

Cakupan pelayanan persampahan merupakan persentase wilayah yang terlayani persampahan dibandingkan dengan luas wilayah Kota Pekalongan. Cakupan pelayanan persampahan Kota Pekalongan selama kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung turun seperti disajikan dalam Gambar II-42.



Gambar II-42 Cakupan Layanan Persampahan Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2023

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2023

Jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2019 - 2023 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R selama tahun 2019-2023 pengelolaannya setiap hari semakin menurun, namun pada tahun 2022 mulai membaik. Sedangkan jumlah sampah yang terangkut ke TPA mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 sebanyak 46.482,88 ton, pada tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 56.118,62 ton dan pada tahun 2023 mejadi 54.627,79 ton. Penanganan sampah di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 disajikan dalam Tabel II-98 berikut.

Tabel II-98 Pengelolaan Sampah Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Data Sampah per Hari	2019		2020		2021		2022		2023	
	%	(ton)	%	(ton)	%	(ton)	%	(ton)	%	(ton)
Timbulan sampah		52.822,00		78.679,74		79.143,87		59.292,29		59.187,88
Sampah Terkelola	88,00	46.482,88	82,91	65.237,15	85,88	67.969,68	94,65	56.118,62	92,30	54.627,79
Pengurangan		3.849,12		9.554,67		12.907,14		9.625,82		10.463,23
Penanganan Sampah		42.633,76		55.682,48		55.062,54		46.492,80		44.164,56
Sampah Tidak Terkelola	12,00	6.339,12	17,09	13.442,59	14,12	11.174,19	5,35	3.173,67	7,70	4.560,09

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sampah Kota Pekalongan setiap tahun dari tahun 2019-2023 terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah. Baik yang terolah di TPS3R, bank sampah dan kegiatan sodaqoh sampah maupun yang terangkut ke TPA. Pengelolaan sampah menggunakan TPS3R, bank sampah dan kegiatan sodaqoh sampah semakin menurun disebabkan menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Sedangkan pada tahun 2023 kembali meningkat jumlah sampah tidak terkelola sebanyak 4.560,09 ton.

TPA di Kota Pekalongan beroperasi pada tahun 1994. Lokasi TPA tersebut berada di Kelurahan Degayu. Luas TPA tersebut adalah 5,8 Ha dengan desain umur TPA 15 tahun. Pengoperasian TPA Degayu tersebut merupakan control *landfill*. Jarak TPA terhadap permukiman adalah 0,3 km. Adapun jarak TPA terhadap pusat Kota adalah 5 km dan jarak ke badan air terdekat adalah 0,1 km.

Permasalahan sampah di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun seperti tidak ada habisnya. Pemerintah Kota Pekalongan tidak dapat menggantungkan sepenuhnya pembuangan sampah ke TPA Degayu. Potensi timbunan sampah di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun juga selalu meningkat. TPA Degayu juga diperkirakan tidak bisa lagi menjadi tempat penampung sampah untuk jangka waktu panjang. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan upaya optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R dan penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat.

Optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R antara lain dengan mengembangkan TPS3R di kelurahan yang belum terjangkau pengolahan sampah secara bertahap dan mengaktifkan kembali TPS3R yang tidak beroperasi dengan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, merevitalisasi TPS3R yang rusak berat dan mengoperasikan kembali TPS3R yang selama ini tidak beroperasi dan merencanakan kebutuhan dan pemenuhan secara bertahap atas sarana prasarana pengumpulan sampah dengan memperhatikan keterjangkauan, volume sampah, jumlah penduduk, dan lokasi TPS. Serta melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan upaya, antara lain DLH telah memiliki perencanaan dalam mencanangkan program OOPS MAMI sebagai strategi pengelolaan persampahan berbasis ekonomi berkelanjutan di Kota Pekalongan dalam pengolahan sampah di kawasan permukiman melalui unit TPS3R. Program OOPS MAMI tersebut digambarkan melalui sistem pengolahan sampah berbasis ekonomi kemasyarakatan secara berkelanjutan dimulai dari proses pemilahan sampah menggunakan mesin yang berfungsi sebagai pemilah sampah non-organik/plastik sekaligus penghancur sampah organik menjadi bubur sampah yang akan diolah

menjadi media budidaya untuk larva/maggot BSF (Black Soldier Fly) dan dari proses biokonversi kemudian menghasilkan kasgot yang bernilai jual tinggi sebagai pupuk organik.

Penguatan literasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat dilakukan yang dalam rangka mengatasi persoalan sampah tidak bisa dilakukan hanya oleh pemerintah, tetapi diperlukan sinergitas yang berkelanjutan antar pemerintah, swasta dan masyarakat. Pelibatan masyarakat menjadi kian penting mengingat masyarakat merupakan salah satu pelaku aktif penyumbang sampah. Dengan melibatkan masyarakat akan menumbuhkan kesadaran dan keterlibatan secara langsung. Sehingga demikian penanganan sampah di Kota Pekalongan semakin efektif dan efesien.

Kesadaran akan pentingnya pengentasan masalah sampah di benak masyarakat tidak akan muncul begitu saja. Diperlukan adanya pendekatan terukur berupa pemberian pemahaman atau pengetahuan akan sampah itu sendiri. Oleh karena itu, perlu penekanan akan pentingnya literasi sampah di masyarakat. Sampai saat ini, kita belum melihat penekanan literatur yang spesifik terhadap pengolahan sampah.

Belum ada gerakan literasi khusus yang dilakukan dengan serius. Penguatan literasi sampah di Kota Pekalongan, dimulai dengan literatur yang paling sederhana baik di dunia pendidikan maupun kepada masyarakat umum secara langsung. Dimulai dari penguatan slogan atau tagline seputar sampah. Misalnya, mengubah tagline yang selama ini kita kenal “buanglah sampah pada tempatnya” menjadi “sampahmu tanggung jawabmu”, atau “sampahmu cerminan dirimu”. Dengan meningkatkan literasi sampah, masyarakat dapat memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan melakukan tindakan yang bertanggung jawab dalam penanganan sampah.

Baik dan buruknya lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan salah satu indikator kinerja dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan. Dalam melakukan perhitungan IKLH menggunakan tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil IKLH Kota Pekalongan pada tahun 2019-2023 yang disajikan dalam Tabel II-99 berikut.

Tabel II-99 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2019	46,00	99,05	23,50	52,92
2020	35,33	79,96	23,60	50,84
2021	45,00	80,21	22,40	54,31
2022	45,33	79,29	23,77	54,36
2023	59,02	82,44	37,51	63,80

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, 2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami tren naik setiap tahunnya. Jika dilihat masing-masing komponen maka IKU merupakan komponen yang berkontribusi baik terhadap IKLH, sementara dua komponen lainnya yaitu IKA dan IKTL nilainya masih sangat rendah. Sedangkan IKLH di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 50,84.

Pada tahun 2023 berdasarkan Surat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil Pertemuan Ekspose IKLH 2023 bahwa terdapat perubahan

perhitungan IKLH yaitu : a) Metode perhitungan IKA dihitung dengan menggunakan rumus baru Metode IKA INA mengacu pada NSF-WQI (National Sanitation Foundation Water Quality Index), b) Parameter untuk perhitungan IKU mengalami perubahan dengan adanya penambahan parameter baru yaitu Particulate Matter 2.5 mikron (PM 2.5), dan c) Rumus perhitungan IKL mengalami perubahan yaitu, semua kelas tutupan lahan (23 kelas tutupan lahan) diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai IKL. Sehingga pada tahun 2023 nilai IKLH menjadi 63,80.

Rendahnya IKA di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa parameter yang melebihi baku mutu air kelas II seperti BOD, COD, DO, dan Fecal Coliform. Parameter tersebut merupakan karakteristik dari limbah cair domestik yang bersumber dari pemukiman berupa grey water yang merupakan hasil dari cucian dapur, cucian pakaian dan kamar mandi, dan sekitar 60-85 persen dari total volume kebutuhan air bersih akan menjadi limbah cair domestik. Karakteristik dari limbah domestik (*grey water*) yaitu mengandung unsur nitrogen, fosfat, dan potasium, unsur tersebut merupakan nutrien bagi tumbuhan yang akan menyebabkan eutrofikasi pada badan air. Tingginya kadar organik dalam perairan akan berdampak pada tingginya konsentrasi BOD, COD dan rendahnya konsentrasi DO. Adanya pertumbuhan penduduk di wilayah perkotaan merupakan salah satu potensi terhadap tingginya pencemaran air di Kota Pekalongan.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Metode perhitungan IKTL yang mengkolaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karateristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami Sementara itu Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Pekalongan dari tahun 2018-2022 masih sama, dengan nilai IKTL yang kecil. Kondisi ini dikarenakan di wilayah Kota Pekalongan lebih didominasi oleh pemukiman/kawasan terbangun, sedangkan persentase tutupan lahannya masih sangat kurang. Sehingga perlu adanya upaya dalam memperbaiki kondisi tutupan lahan di Kota Pekalongan terutama di kawasan mangrove.

Kualitas tutupan lahan dapat diukur dengan berbagai parameter seperti keragaman jenis vegetasi, kepadatan vegetasi, keberadaan dan kondisi habitat satwa liar, serta kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh tutupan lahan tersebut. Hal ini berkaitan erat dengan ketersediaan ruang terbuka hijau yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi dan lingkungan kota, seperti menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati dan menyerap polusi udara. Oleh karena itu, RTH menjadi salah satu komponen penting dalam perencanaan perkotaan yang berkelanjutan.

Persentase tersedianya luasan RTH publik di Kota Pekalongan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sekitar 2,89 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar 18,6 persen. Hal ini disebabkan adanya revisi RTRW pada tahun 2020 sehingga dilakukan pendataan ulang untuk luasan RTH serta adanya perubahan perhitungan RTH sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Persentase luasan RTH dari tahun 2021 sampai dengan 2023 terus meningkat, sebagaimana disajikan pada Tabel II-100 berikut.

Tabel II-100 Ruang Terbuka Hijau (RTH)
di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase tersedianya luasan RTH publik (persen)	18,60	18,60	2,89	2,90	2,94

Sumber: DLH Kota Pekalongan, 2024

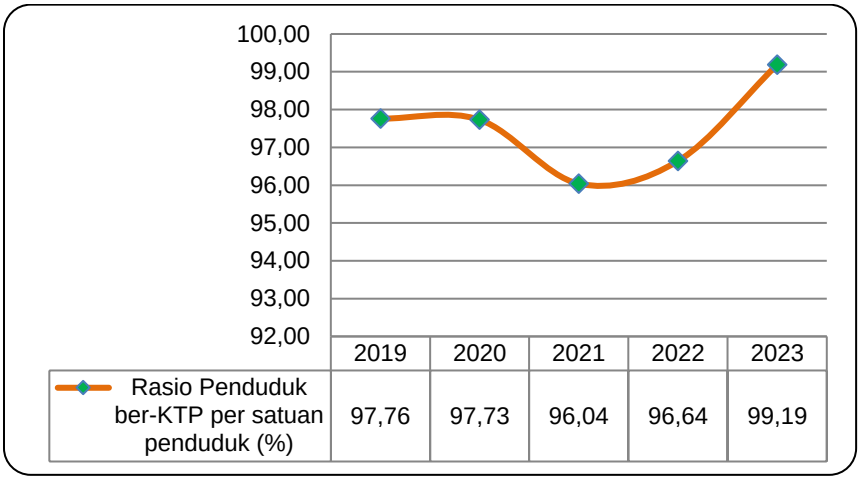
Kegiatan edukasi peduli Lingkungan hidup dilakukan melalui media sosial dan media elektronik yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat dan komunitas secara luas. Pengaduan masyarakat terkait kasus lingkungan ditindaklanjuti dengan cara mediasi antara pihak pengadu dan pihak yang diadukan, akan tetapi ketik kemudian rekomendasi yang didapatkan tidak dilaksanakan oleh pihak yang diadukan maka terkesan tidak ada tindaklanjut dari pemerintah. Tetapi pengaduan yang sifatnya permohonan pemotongan pohon tetap kita hubungi pengadu tetapi kita kaji dahulu apakah perlu dipotong atau tidak.

6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Rasio Penduduk ber KTP

Sebagai salah satu sarana penting identitas nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap penduduk wajib memiliki identitas diri termasuk akta kelahiran dan KTP nasional. Rasio kepemilikan KTP yang dimaksud adalah jumlah penduduk memiliki KTP dibagi jumlah penduduk di atas usia 17 tahun atau telah menikah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga pada tahun 2023 mencatat kepemilikan KTP-el sebanyak 99,19 persen. Angka tersebut lebih besar 2,64 persen dibandingkan tahun 2022 yaitu 96,64 persen.



Gambar II-43 Rasio Kepemilikan KTP di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan, 2024

b. Persentase Penduduk ber-NIK

Sesuai dengan bunyi pasal 1 point 12 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. NIK tersebut berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Dalam lima tahun terakhir (tahun 2019-2023), semua penduduk di Kota Pekalongan telah memiliki NIK sebagaimana disajikan dalam Tabel II-101 berikut.

Tabel II-101 Persentase Penduduk ber-NIK di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Persentase Penduduk ber-NIK
2019	100
2020	100

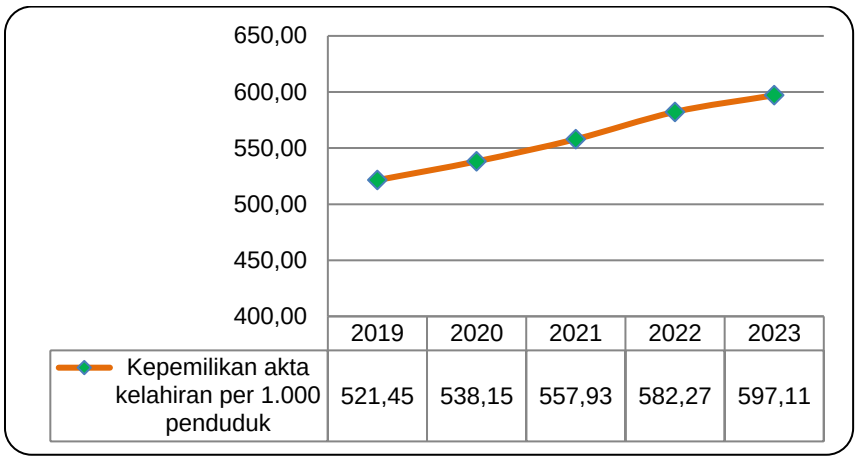
Tahun	Persentase Penduduk ber-NIK
2021	100
2022	100
2023	100

Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan, 2024

c. Persentase Penduduk Ber Akta Kelahiran

Sebagai salah satu syarat identitas diri bagi penduduk yang telah dilahirkan, maka Pemerintah Daerah mengeluarkan akta kelahiran bagi penduduknya. Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk ditunjukkan dengan membandingkan jumlah akta kelahiran dan jumlah penduduk dalam seribu penduduk.

Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, Kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Semula sebanyak 521,45 per 1.000 penduduk di tahun 2019, menjadi 597,11 per 1.000 penduduk di tahun 2022. Secara lengkap, data kepemilikan akta kelahiran di Kota Pekalongan tahun 2019 sampai dengan 2023 disajikan dalam Gambar II-44 berikut.



Gambar II-44 Perkembangan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan (diolah), 2024

d. Penerbitan Akta kematian

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian.

Dalam lima tahun terkahir, penerbitan akta kematian terus meningkat. Pada tahun pada tahun 2019 diterbitkan sebanyak 2.797 akta, pada tahun 2020 diterbitkan sebanyak 3.220, setiap tahun terus bertambah hingga pada tahun 2023 diterbitkan sebanyak 4.053 akta sebagaimana disajikan dalam Tabel II-102 berikut.

Tabel II-102 Penerbitan Akta Kematian di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Akta Kematian
2019	2.797
2020	3.220
2021	3.970
2022	3.020
2023	4.053

Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan, 2024

e. Penerbitan Akta Nikah

Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Di Kota Pekalongan, akta nikah hanya diterbitkan bagi penduduk non Islam. Sepanjang lima tahun terakhir, akta nikah yang diterbitkan tidak banyak, sekitar 45-55 lembar per tahunnya.

Tabel II-103 Penerbitan Akta Nikah di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Akta Nikah
2019	46
2020	45
2021	50
2022	52
2023	55

Sumber: Dindukcapil Kota Pekalongan, 2024

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Di Kota Pekalongan telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 63 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di kelurahan. Jenis LKK paling sedikit meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K). LPM pada tahun pertama dari periode 2013-2017 sebanyak 47 LPM. Jumlah ini berkurang menjadi 27 LPM pada tahun 2014 hingga sekarang, seiring dengan penggabungan kelurahan dari 47 menjadi 27 kelurahan. Adapun jumlah LPM Kelurahan yang aktif di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel II-104 berikut.

Tabel II-104 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah LPM
2019	27
2020	27
2021	27
2022	27
2023	27

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2024

PKK sebagai salah satu penggerak pemberdayaan masyarakat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayahnya. PKK membantu pemerintah dalam memberdayakan peran ibu-ibu di Kota Pekalongan. Jumlah PKK aktif tahun 2019 sampai dengan 2023 sebanyak 32 PKK, terdiri dari 27 PKK kelurahan, 4 PKK kecamatan dan 1 PKK tingkat kota.

Tabel II-105 PKK Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah PKK Aktif
2019	32
2020	32
2021	32
2022	32
2023	32

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2024

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu juga berperan dalam membantu lansia untuk meningkatkan kualitas hidupnya di masa tuanya. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat selama kurun waktu tahun 2019-2023 adalah meningkatkan peran dan fungsi Posyandu sebagai garda terdepan dalam menanggulangi kesehatan masyarakat yang bersifat preventif. Pada tahun 2019-2021 jumlah Posyandu aktif sebesar 413 (termasuk data dari Dinkes tahun 2019), per Januari tahun 2022 data posyandu aktif bertambah 1, dan di tahun 2023 jumlah posyandu kembali bertambah menjadi 416. Data posyandu aktif di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-106 berikut.

Tabel II-106 Posyandu Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Posyandu Aktif
2019	413
2020	413
2021	413
2022	414
2023	416

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan & BPS Kota Pekalongan, 2024

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Kota Pekalongan per 100 pasangan usia subur di Kota Pekalongan dari tahun 2019 - 2020 mengalami peningkatan. Artinya, jumlah akseptor KB semakin bertambah. Namun pada tahun 2021 menurun menjadi 68,47 dan pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 64,27 dan kembali meningkat menjadi 73,19 di tahun 2023. Perkembangan akseptor KB dari tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel II-107 berikut.

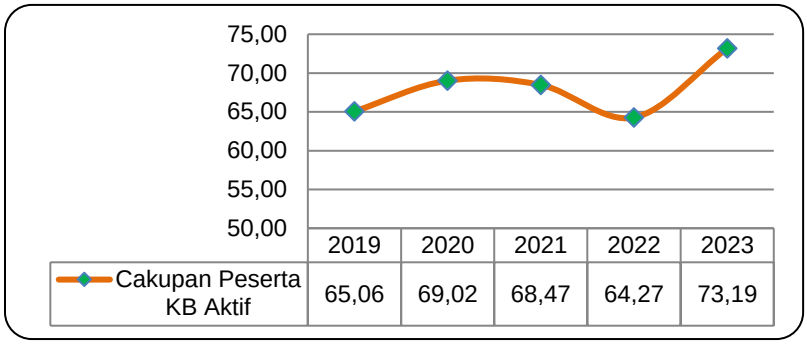
Tabel II-107 Rasio Akseptor KB per 100 Pasangan Usia Subur di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Akseptor KB	Rasio
2019	46.652	30.352	65,06
2020	45.836	31.636	69,02
2021	47.444	32.483	68,47
2022	27.868	43.359	64,27
2023	42.001	30.743	73,19

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

b. Cakupan Peserta Aktif KB

Cakupan peserta aktif KB menunjukkan persentase jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan subur. Cakupan peserta KB Aktif dalam kurun waktu tahun 2019 sampai 2023 cenderung berfluktuasi sebagaimana disajikan dalam Gambar II-45 berikut.



Gambar II-45 Cakupan Peserta KB Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

c. Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Pekalongan Tahun 2017-2021

Cakupan keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I Kota Pekalongan mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2020 persentase Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dibandingkan Jumlah Kepala Keluarga adalah 47,70 persen, menurun dari tahun 2019 sebesar 4,29 persen. Pada tahun 2021, secara persentase menurun, namun secara jumlah bertambah menjadi 41.170 keluarga. Pada tahun 2022 Menteri Sosial Republik Indonesia telah mengeluarkan surat Keputusan terkait acuan dalam penentuan kriteria fakir miskin di Indonesia. Surat bernomor 262/HUK/2022 itu ditandatangani pada 31/12/2022 lalu dan memuat beberapa hal yakni:

1. menetapkan kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan sebagai bagian dari penanganan fakir miskin;

2. kriteria fakir miskin yang digunakan untuk mendeteksi awal kondisi kemiskinan yaitu tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari;
3. dalam hal seseorang tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari maka langsung dikategorikan sebagai fakir miskin;
4. dalam hal seseorang memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi:
   a. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
   b. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
   c. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran;
   d. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir;
   e. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
   f. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;
   g. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
   h. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 VA atau bukan listrik.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa dengan terbitnya surat keputusan ini maka surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga mulai tahun 2022 tidak ada lagi pendataan keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I. Perkembangan Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari tahun 2017-2021 disajikan dalam Tabel II-108 berikut.

Tabel II-108 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I di Kota Pekalongan Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Persentase
1	2017	77.575	46.478	59,91
2	2018	77.817	44.487	57,71
3	2019	80.653	41.938	51,99
4	2020	80.840	38.563	47,70
5	2021	100.947	41.170	40,78

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2022

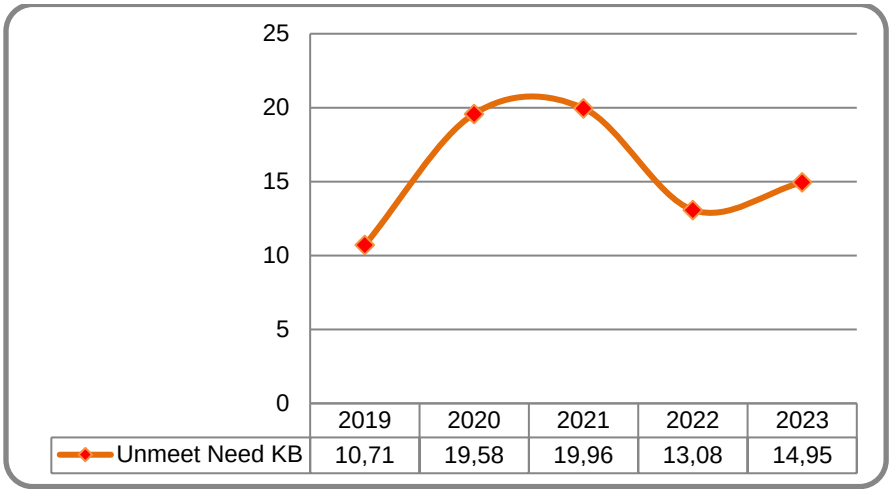
d. Cakupan Unmet Need KB

Unmet need KB didefinisikan sebagai persentase perempuan usia subur yang tidak menginginkan anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan namun tidak menggunakan kontrasepsi seperti IUD, PIL, suntik, implant, obat vaginal, dan kontrasepsi mantap untuk dirinya atau untuk suaminya atau wanita yang sedang hamil dan terjadinya kehamilan tersebut tidak sesuai dengan waktu yang dikehendaki dan sebelum hamil tidak menggunakan alat kontrasepsi.

Cakupan Unmet Need KB Kota Pekalongan dari Tahun 2019 sampai dengan 2021 cenderung mengalami peningkatan, terutama pada saat terjadinya pandemi pada tahun 2020 - 2021 yaitu sebesar 19,5 di tahun 2020 meningkat cukup signifikan menjadi 19,96 di tahun 2021. Hal ini disebabkan pada masa pandemi kegiatan pelayanan KB tidak dilaksanakan. Namun menjelang akhir tahun 2021 kegiatan pelayanan KB mulai dilaksanakan dengan menerapkan protokoler kesehatan secara ketat sehinga cakupan Unmet Need bisa diturunkan menjadi

13,08 persen pada tahun 2022. Namun cakupan Unmeet Need KB kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 14,95 persen.

Cakupan Unmet Need KB dapat dilihat pada Gambar II-46 sebagai berikut.



Gambar II-46 Cakupan Unmet Need KB di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

9. Perhubungan

a. Kepadatan Lalu Lintas

Sebagai kota yang menghubungkan Kota Jakarta dan Kota Surabaya, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur sektor perhubungan. Lokasinya yang strategis juga digunakan sebagai tempat istirahat maupun sekedar transit untuk melanjutkan perjalanan ke daerah atau tempat selanjutnya. Saat ini terdapat dua jalur yang dapat dilalui kendaraan untuk melintasi Kota Pekalongan yaitu perlintasan Pantai Utara (Pantura) dan perlintasan Jalan Tol Transjawa yang semenjak tahun 2018 telah difungsikan. Dua jalur ini membagi kepadatan yang sebelumnya dibebankan pada satu jalur yaitu Jalur Pantura sehingga saat ini kepadatan yang terjadi akibat kendaraan besar yaitu truk dan bus berkurang.

Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 yang terjadi diseluruh dunia berdampak terhadap hampir semua sendi kehidupan, salah satunya yaitu adanya kebijakan pembatasan mobilitas. Dengan adanya kebijakan ini, arus lalu lintas menurun drastis yang mengakibatkan penurunan VC ratio menjadi 0,36. Meskipun demikian, mobilitas darat tetap dapat dilakukan. Pada tahun 2021, sudah masuk era new normal dimana PPKM sudah mulai longgar dan pusat-pusat perbelanjaan sudah mulai dibuka kembali dan bermunculan yang baru. Hal ini menjadi daya tarik masyarakat untuk mengunjunginya sehingga mobilitas di perkotaan cenderung ramai kembali. Pada tahun 2021 VC ratio meningkat menjadi 0,49. Dan pada tahun 2022 VC Ratio menurun menjadi 0,39. Pada tahun 2023 VC ratio meningkat menjadi 0,44. Hal ini disebabkan arus lalu lintas yang semakin meningkat pada seluruh ruas jalan di seluruh jalan kota sehingga menyebabkan nilai VC Ratio juga meningkat, dimana artinya pada tahun 2023 terdapat kepadatan kendaraan pada ruas jalan-jalan kota.

Range nilai VC ratio ditakegorikan ke dalam 6 (enam) tingkat pelayanan jalan sebagaimana disajikan dalam Tabel II-109 berikut.

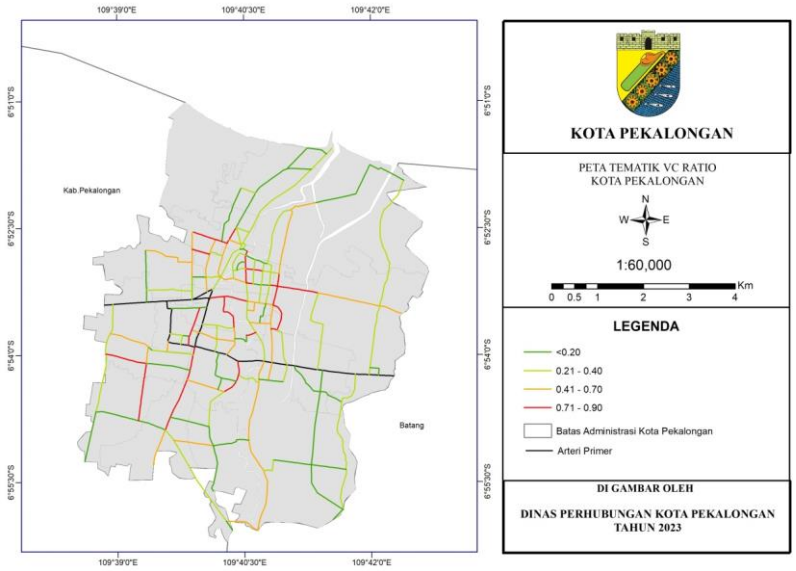
Tabel II-109 Kategori Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat Pelayanan	V/C Rasio
A	0,0 - 0,20
B	0,21 - 0,44
C	0,45 - 0,74
D	0,75 - 0,84
E	0,85 - 1, 00
F	>1, 00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Dari tabel Tingkat Pelayanan diatas, jalan - jalan yang memiliki tingkat pelayanan A, pada ruas tersebut kendaraan dapat memilih kecepatan yang dikehendaki. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan B, kendaraan dapat memilih kecepatannya namun kecepatan tersebut sedikit terbatas oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan C kecepatannya dibatasi oleh arus lalu lintas. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan D arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah, volume lalu lintas mendekati kapasitas ruas jalan yang ada. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan E, kecepatannya rendah volume sudah hampir sama dengan kapasitas yang ada, pada tingkat pelayanan ini ruas jalan bisa dikatan mengalami kemacetan. Ruas jalan yang memiliki tingkat pelayanan F, arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume diatas kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama.

Peta V/C Ratio ruas jalan di Kota Pekalongan disajikan dalam Gambar II-47 berikut.



Gambar II-47 Peta V/C Ratio Ruas Jalan di Kota Pekalongan

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan Gambar II-47 diatas, dapat dilihat peta kinerja ruas jalan di Kota Pekalongan. Persebaran lalu lintas yang tidak merata terjadi di Kota Pekalongan, hal itu terjadi karena pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas (seperti pusat bisnis, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, acara khusus, objek pariwisata, dan

lainnya) di Kota Pekalongan tidak merata pula. Sehingga terjadi kemacetan pada beberapa titik ruas di Kota Pekalongan kerena pada lokasi terdapat pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas, sehingga pola pergerakan lalu lintas warga kota pekalongan hanya pada ruas - ruas jalan di sekitar lokasi tersebut.

Oleh karena itu pengembangan Kawasan Pekalongan Baru sebagai pusat bangkitan dan tarikan lalu lintas yang baru dapat mengurangi kemacetan kendaraan serta pola pergerakan lalu lintas di kota pekalongan akan menjadi merata sehingga kemacetan akan berkurang.

Pengembangan Kawasan Pekalongan Baru dapat menjadikan persebaran lalu lintas yang merata. Serta dalam pengembangannya akan menimbulkan akses jalan baru guna kelancaan lalu lintas di Kawasan Pekalongan Baru.

Kajian Lalu Lintas Kawasan Pekalongan Baru diperlukan untuk dapat membantu dalam mengidentifikasi solusi yang efektif dalam penentuan kebijakan penataan Manajemen Lalu Lintas di Kawasan Pekalongan Baru. Tingkat pelayanan disajikan dalam Tabel II-110 berikut.

Tingkat pelayanan disajikan dalam Tabel II-110 berikut.

Tabel II-110 Kinerja Ruas Jalan di Kota Pekalongan yang Diukur Dari Tingkat Pelayanan

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D	Tingkat Pelayanan E
Jl. Sriwijaya	Jl. Imam Bonjol	Jl. Karya Bhakti	Jl. Dr. Cipto	Jl.Seruni
Jl. Diponegoro	Jl. Supriyadi	Jl. Gajah Mada	Jl. Urip Sumoharjo	Jl. Hayam Wuruk
Jl. Asem Binatur	Jl. Trikora	Jl. Untung Suropati	Jl.	Jl. Sultan Agung
Jl. Mataram	Jl. Veteran	Jl. Saelan	Jl. Bandung	Jl. K.H. Mas Mansyur
Jl. Jawa	Jl. Kurinci	Jl. Pattimura	Jl. Urip Sumoharjo	Jl. Teratai
Jl. Angkatan 45	Jl. R.A. Kartini	Jl. Jendral Sudirman	Jl. Dr. Cipto	-
Jl. Cempaka	Jl. Semarang	Jl. Dr. Sutomo	-	-
Jl. Otto Iskandar Dinata	Jl. Wahid Hasyim	Jl. P. Kemerdekaa	-	-
Jl. Jeruk	Jl. K.H. Ahmad Dahlan	Jl. Merdeka	-	-
Jl. Tritura	Jl. W.R. Supratman	Jl. Tondano	-	-
Jl. Majapahit	Jl. Progo	Jl. Pelita II	-	-
Jl. Kutilang	Jl. Truntum	Jl. Ki Mangun Sarkoro	-	-
Jl. Surabaya	Cendrawasih	Jl. Jlamprang	-	-
Jl. KH. Hasyim Asyari	Jl. Bahagia	Jl. Sumatera	-	-
Jl. Labuan	Jl. Slamet	Jl. Sunan Ampel	-	-
Jl. Melati	Jl. Ahmad Yani	Jl. Dharma Bhakti	-	-
Jl. Kenanga	Jl. Jetayu	Jl. Sulawesi	-	-
Jl. Achmad Alf Arslan Djunaid	Jl. Patriot	Jl. Hos Cokroaminoto	-	-
-	Jl. Pramuka	Jl.H.Agus Salim	-	-
-	Jl. Irian	Jl. Pemuda	-	-
-	Jl. Kalimantan	Jl. Manggis	-	-
-	Jl. Merak	Jl. Angkatan 66	-	-

Tingkat Pelayanan A	Tingkat Pelayanan B	Tingkat Pelayanan C	Tingkat Pelayanan D	Tingkat Pelayanan E
-	-	Jl. Salak	-	-
-	-	Jl. Argopuro	-	-
-	-	Jl. Kemakmuran	-	-
-	-	Jl. Gatoto Subroto	-	-
-	-	Jl. Hasanudin	-	-
-	-	Jl. Maninjau	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Hingga saat ini selain persebaran pola pergerakan kendaraan yang tidak merata, kepadatan lalu lintas dipengaruhi oleh lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional dan lokal masih bercampur pada ruas-ruas jalan di wilayah Kota Pekalongan. Lalu lintas regional yang mendominasi adalah kendaraan barang dan penumpang (AKAP maupun AKDP) yang berdimensi besar maupun kendaraan pribadi yang masih memilih melewati jalur jalan nasional dibandingkan jalan tol trans Jawa.

Kepadatan lalu lintas yang terjadi di Kota Pekalongan saat ini bercampur antara arus lalu lintas menerus dan arus lalu lintas lokal. Hal itu menyebabkan bercampurnya kendaraan-kendaraan angkutan barang yang bermuatan berat dan kendaraan penumpang dengan kendaraan-kendaraan warga lokal Kota Pekalongan sehingga menyebabkan kemacetan. Terutama pada ruas Jl. KH Mas Mansyur yang merupakan Jalur Pantura yang berpotongan dengan perlintasan kereta api double track. Pada saat kereta melintas maka akan terjadi antrian dan tundaan yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Namun, jika selanjutnya terdapat Jalan Lingkar Petanglong, maka arus lalu lintas akan terurai, jadi arus lalu lintas dapat terbagi menjadi 3 yaitu Perlintasan Pantura, Jalan Tol Trans Jawa dan Jalur Lingkar Petanglong.

Masih bercampurnya lalu lintas tersebut sangat berimplikasi bagi keselamatan, keamanan, ketertiban pengguna jalan, serta kebersihan dan kenyamanan kota terutama pada tata ruang kota. Dampak yang paling dirasakan adalah keamanan dan kenyamanan warga Kota Pekalongan dalam berlalu lintas karena bercampur dengan lalu lintas regional. Akibat lalu lintas yang bercampur, terutama kendaraan berdimensi besar, sebagian kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Pekalongan tidak bisa berkembang dengan optimal. Kondisi ini terutama terjadi pada koridor Jl. Jenderal Sudirman yang tidak berkembang. Salah satu sektor andalan Kota Pekalongan adalah perdagangan dan jasa. Dengan terbatasnya luas wilayah serta kawasan perdagangan dan jasa, Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kesulitan dalam mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa di lokasi lain. Jika kawasan perdagangan dan jasa tidak bisa berkembang optimal tentunya akan berdampak juga bagi upaya-upaya pengembangan wilayah, khususnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, salah satu upaya sistemik dalam mengatasi bercampurnya lalu lintas regional dan lokal di Kota Pekalongan adalah pembangunan jalan lingkar di Kota Pekalongan. Lebih tepatnya Jalan Lingkar Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Sesuai dengan Kebijakan Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah, wilayah Petanglong, yang berpusat di Perkotaan Petanglong, merupakan salah satu wilayah Pengembangan di Jawa Tengah. Sesuai dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah, perkotaan Petanglong merupakan salah satu kawasan strategis di Jawa Tengah. Jalan lingkar tersebut diharapkan berdampak bagi mengatasi permasalahan kemacetan dan keamanan lalu lintas, kebersihan dan kenyamanan kota, serta yang utama adalah optimalisasi tata ruang, di wilayah Kota Pekalongan khususnya, dan Kawasan Perkotaan Petanglong pada umumnya.

Diperlukan kajian Lalu Lintas terkait pembangunan jalan lingkar Petanglong dan sekaligus menjadi tanggul rob. Kajian Lalu Lintas pembangunan Jalan Lingkar Petanglong tersebut juga dapat menjadi acuan/ dasar untuk pengambilan kebijakan - Kebijakan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam penataan serta manajemen lalu lintas seperti contohnya pembatasan kendaraan angkutan barang, peningkatan sistem transportasi umum, penerapan teknologi lalu lintas yang cerdas, dan lainnya.

Dalam dimensi yang lain, mencontoh kasus di daerah lain, pembangunan jalan lingkar di Kota Petanglong dan/atau Kawasan Perkotaan Petanglong dapat dilakukan dengan konstruksi yang sekaligus dapat berfungsi sebagai tanggul penahan rob. Jika jalan lingkar tersebut dapat terwujud diharapkan dapat menjadi katalis bagi pengembangan wilayah Kota Pekalongan dan kawasan sekitarnya.

b. Angkutan Umum

Izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2018 sampai 2020 dengan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan adalah 73 izin sehingga Rasio Izin Trayek sebesar 0,00024. Hal ini memiliki makna 2,4 izin angkutan umum per 10.000 penduduk. Pada tahun 2021 mengalami penurunan di angka 0,00012 dikarenakan jumlah penduduk yang meningkat sementara jumlah izin trayek masih 73 izin trayek. Pada tahun 2022 mengalami penurunan izin trayek menjadi 30 izin trayek, sehingga rasio izin trayek di angka 0,00009. Penurunan izin trayek yang dikeluarkan dari 73 izin trayek (2018 - 2021) menjadi 30 izin trayek (2022) yaitu disebabkan penurunan minat Masyarakat terhadap angkutan umum menyebabkan penurunan jumlah armada yang beroperasi sehingga rasio jumlah izin trayek yang dikeluarkan menurun.

Rasio izin trayek yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2017 sebesar 0,00032. Hal ini memiliki makna 3,2 izin angkutan umum per 10.000 penduduk. Pada tahun 2018 dan 2019 berubah menjadi sebesar 0,00024. Pada tahun 2020 sedikit menurun di angka 0,00021, tahun 2021 mengalami penurunan di angka 0,00014 pada tahun 2022 turun menjadi 0,00009 dan pada tahun 2023 sama pada tahun sebelumnya yaitu 0,00009.

Tabel II-111 Perkembangan Rasio Izin Trayek di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah izin trayek yang dikeluarkan	Jumlah penduduk	Rasio
2019	73	307.097	0,00024
2020	73	307.150	0,00024
2021	73	308.310	0,00012
2022	30	309.742	0,00009
2023	30	317.535	0,00009

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada penumpang Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta angkutan regional, Kota Pekalongan memiliki 1 (satu) terminal tipe A yaitu Terminal Bus Kota Pekalongan yang berlokasi di Jl. Dr. Sutomo, dimana tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Terminal ini menjadi terminal transit bagi bus yang hendak melanjutkan ke daerah lain maupun menjadi tujuan akhir para penumpang.

Berdasarkan SK Dirjen Perhubungan Darat No: SK.687/AJ/DRJD/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggraan Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Perkotaan Dalam Trayek Tetap dan Teratur Faktor muat (Load Factor) merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang dinyatakan dalam persen. Sedangkan standar yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41

Tahun 1993, untuk nilai Load Factor antara 70 persen - 110 persen. Jika nilai Load Factor lebih dari 110 persen maka penumpang akan merasakan kurang nyaman dalam menggunakan angkutan umum tersebut, jika nilai Load Factor kurang dari 70 persen menggambarkan bahwa angkutan umum tersebut kurang optimal dalam melayani pergerakan penumpang. Sedangkan standar nilai Load Factor yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. 687 tahun 2002 adalah sebesar 70 persen. Di Kota Pekalongan Load Factor angkutan kota yang berkapasitas kurang lebih 12 penumpang dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berada dikisaran 35 persen sampai dengan 41 persen. Kurang optimalnya angkutan kota dalam melayani pergerakan penumpang dikarenakan masyarakat sudah beralih menggunakan kendaraan pribadi terlebih lagi adanya angkutan online, sehingga load faktor angkutan kota kurang dari 70 persen.

Penurunan Load Factor angkutan tahun 2021-2023 dari 41% (2021), 37% (2022) menjadi 35% (2023) juga disebabkan oleh penurunan minat Masyarakat dalam menggunakan angkutan umum, Adapun langkah strategis yaitu dengan memperbaiki prasarana angkutan umum sehingga memberikan kenyamanan dalam melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum sehingga diharapkan minat Masyarakat dapat meningkat dengan meningkatnya minat Masyarakat dalam menggunakan angkutan umum maka akan berbanding lurus dengan meningkatnya load factor angkutan umum.

Tabel II-112 Faktor Muat (*Load Factor*) Angkutan Kota di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Faktor Muat (*Load Factor*) (persen)	37	41	41	37	35

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029, pembangunan terminal penumpang Tipe C direncanakan akan dibangun secara bertahap mulai tahun 2023 sampai dengan tahun 2029. Adapun lokasi yang akan dibangun terminal penumpang Tipe C berada di Wilayah Kecamatan Pekalongan Timur dan Kecamatan Pekalongan Selatan. Untuk saat ini belum terlealisasinya Implementasi konkrit realisasi pembangunan Terminal Tipe C disebabkan lokasi yang direncakanan sebagai terminal Tipe C masih digunakan sebagai pasar darurat.

Dari tahun 2019 hingga 2021 jumlah penumpang yang melalui terminal mengalami penurunan yaitu, dari 1.876.174 orang di tahun 2019 menjadi 771.497 orang di tahun 2020 dan menurun sebanyak 482.290 orang di tahun 2021. Penurunan ini selain karena banyaknya masyarakat yang memilih bepergian menggunakan kendaraan pribadi, juga adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 jumlah penumpang yang melalui terminal meningkat signifikan sebanyak 916.888 orang dan tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan jumlah sebesar 819.398. Sedangkan otobis AKAP dan AKDP mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2023. Hal tersebut berarti bahwa dapat dikatakan persentase AKAP dan AKDP di Kota Pekalongan mengalami naik turun, sebagaimana disajikan dalam Tabel II-113 berikut ini.

Tabel II-113 Persentase Angkutan Darat AKAP dan AKDP
Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Otobis AKAP AKDP	294.470	125.162	73.150	130.090	68.172
Jumlah Penumpang yang melalui terminal	1.876.174	771.497	482.290	916.888	819.398
Persentase Angkutan Darat	15,7	16,2	15,1	14,1	12,01

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

c. Kendaraan Laik Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor wajib uji yang selanjutnya disebut kendaraan bermotor adalah kendaraan yang wajib melakukan uji berkala berupa mobil penumpang umum, bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.

Kepemilikan KIR untuk kendaraan umum di Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum sebanyak 138 kendaraan, kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 107 kendaraan dan meningkat menjadi 115 kendaraan di tahun 2021. Di tahun 2022, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum meningkat kembali menjadi 126 kendaraan dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 102.

Kepemilikan KIR untuk kendaraan umum di Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum sebanyak 829 kendaraan, kemudian menurun di tahun 2020 menjadi 817 kendaraan, dan menurun lagi menjadi 747 kendaraan di tahun 2021. Di tahun 2022, jumlah kepemilikan KIR angkutan umum meningkat kembali menjadi 809 kendaraan dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dari yaitu menjadi 716.

Tabel II-114 Jumlah Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kepemilikan KIR angkutan umum	138	107	115	126	102
Jumlah Kendaraan Wajib Uji yang melakukan Uji Kir	829	844	617	806	716
Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	16,64	12,67	13,62	15,63	14,24

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Kelayakan dalam pengujian kelayakan kendaraan umum penting bagi keselamatan pengemudi dan para penumpang. Agar kelayakan kendaraan umum dalam berkendaraan ada yang diujikan sehingga kelayakan kendaraan itu baik. Pengujian kendaraan itu antara lain pra uji kendaraan bermotor meliputi pemeriksaan dimensi kendaraan dan kelengkapan kendaraan; uji ketebalan asap

(Smoke Tester) untuk kendaraan berbahan bakar solar; uji emisi gas buang (Co-Hc) untuk kendaraan berbahan bakar bensin; uji speedometer; pemeriksaan bagian bawah kendaraan dengan Pit Lift dan Play Detector; uji lampu utama; uji side slip; uji axle load; dan speedometer tester. Dalam proses pelayanan uji kelayakan kendaraan terdapat beberapa jenis pelayanan seperti uji pertama, uji berkala, numpang uji masuk, numpang uji keluar, mutasi masuk, maupun mutasi keluar. Dan masing-masing proses pelayanan uji kelayakan kendaraan tersebut terdapat persyaratan yang harus dilampirkan ketika pelaksanaan begitu juga dengan lamanya proses uji kelayakan kendaraan umum disajikan dalam Tabel II-115 berikut.

Tabel II-115 Lama Pengujian Kelayakan Kendaraan Umum (KIR) di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lama Pengujian (Menit)	30	30	30	30	30

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Kota Pekalongan telah memiliki tempat pengujian yang representatif. Terletak di lingkungan Dinas Perhubungan. Sampai saat ini Kota Pekalongan hanya memiliki 1 (satu) tempat pengujian KIR kendaraan bermotor. Adapun biaya pengujian kelayakan angkutan umum pada tahun 2019 yaitu Rp 40.000,00 dan mengalami kenaikan berdasarkan peraturan daerah nomor 8 tahun 2020 sebesar Rp 75.000,00.

Tabel II-116 Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Pekalongan 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rp.)	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

d. Perparkiran

Dishub Kota Pekalongan hingga saat ini telah mengelola 381 titik parkir yang tersebar di Kota Pekalongan yang didominasi di Jalan Urip Sumoharjo dimana setiap titik parkir disesuaikan berdasarkan surat tugas oleh juru parkir yang ditunjuk yang difasilitasi dengan perlengkapan seperti rompi petugas, peluit, bendera dan sebagainya. Adapun titik parkir yang berpotensi penarikan retribusi terbesar di Kota Pekalongan yang mampu mendongkrak capaian retribusi parkir diantaranya berada di Jalan Hayam Wuruk, Jalan Hasanudin, Jalan Sultan Agung, Kawasan Sorogenen, serta Alun-Alun yang mampu menyumbang hingga 60 persen. selain mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum (*on street*), Dishub Kota Pekalongan juga melakukan penarikan retribusi parkir *off street* (di luar badan jalan) seperti di Jalan Veteran depan RSUD Kraton dan trayek terminal serta parkir insidentil (biasanya saat digelar sebuah *event* kegiatan). Dalam mencapai target yang ditetapkan, Dishub Kota Pekalongan telah membentuk tim pembinaan dan pengawasan parkir yang terdiri dari unsur Subdenpom, Polres, Kejaksaan, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Data penyelenggaraan parkir di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-117 berikut.

Tabel II-117 Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin di Kota Pekalongan 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah parkir yang berizin	418	419	381	376	425
Jumlah potensi parkir yang belum berizin	16	15	13	12	10
Jumlah seluruh parkir	434	434	394	388	435
Persentase Penyelenggaraan Parkir Berizin	96,31	96,54	96,70	96,91	97,70

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

e. Fasilitas Perlengkapan Jalan

Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas keselamatan lalu lintas ini berguna untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan (pengendara maupun para pejalan kaki). Fasilitas yang diperlukan bagi keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan. Pemenuhan kebutuhan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Pekalongan terakit dengan banyaknya kerusakan fasilitas lalu lintas di lapangan serta banyaknya permintaan dari warga terkait permintaan fasilitas lalu lintas sehingga diperlukan penggantian fasilitas lalu lintas dilaksanakan secara bertahap degan memperhatikan kebutuhan prioritas, kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kasus *COVID-19* yang berdampak pada *refocusing* anggaran.

Tabel II-118 Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pemasangan Rambu lalu lintas Pada Tahun n	2	33	16	10	19
Jumlah Rambu lalu lintas yang Seharusnya Tersedia	150	100	30	22	20
Persentase Pemasangan Rambu lalu lintas	1,33	33,00	53,33	45,45	95
Jumlah Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) Pada Tahun n	0	0	0	0	0
Jumlah Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ) yang Seharusnya Tersedia	10	10	10	0	0
Persentase Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah Pemasangan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) Pada Tahun n	2	0	0	0	0
Jumlah Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL) yang Seharusnya Tersedia	4	2	1	0	0

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pemasangan Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL)	50,00	0,00	0,00	0,00	0
Jumlah Pemasangan guardrail Pada Tahun n	0	0	0	0	0
Jumlah guardrail yang Seharusnya Tersedia	10	10	0	0	0
Persentase Pemasangan guardrail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pemasangan marka jalan Pada Tahun n	13 lokasi	12 lokasi	10 lokasi	8 lokasi	0
Jumlah marka jalan yang Seharusnya Tersedia	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan	150 ruas jalan	0
Persentase Pemasangan marka jalan	8,67	8,00	6,67	5,33	0

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

f. Perkeretaapian

Kota Pekalongan memiliki satu stasiun utama. Stasiun Besar Kota Pekalongan terletak di pusat pemerintahan Kota Pekalongan di Kecamatan Pekalongan Barat. Pengguna jasa angkutan darat seperti kereta api, sebagaimana disajikan dalam Tabel II-119 mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019 merupakan jumlah penumpang terbanyak yang menaiki kereta api melalui Stasiun Pekalongan yaitu sejumlah 863.851 penumpang. Namun terjadi penurunan drastis jumlah penumpang yang memanfaatkan jasa layanan kereta api pada tahun 2020 menjadi 271.920 orang, dan meningkat di tahun 2021 menjadi 335.956 orang. Hal tersebut karena karena pandemi *COVID-19* membuat adanya larangan bepergian ke luar daerah di tahun 2020 dan era new normal yang membolehkannya kembali bepergian ke luar daerah dengan batasan-batasan tertentu.

Tabel II-119 Banyaknya Penumpang Yang Naik Kereta Api Melalui Stasiun KA Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Pekalongan
2019	863.851
2020	271.920
2021	335.956
2022	420.786
2023	556.494

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dan Kota Pekalongan Dalam Angka tahun 2024, 2024

Kota Pekalongan berada dibawah daerah operasi PT. Kereta Api Indonesia DAOP 4 Semarang. Panjang jalur operasional kereta api DAOP 4 Semarang adalah sepanjang 656 km, dimana jalur kereta sepanjang 6,85 km berada di wilayah Kota Pekalongan, dengan jumlah perlintasan sebindang sebanyak 10 perlintasan.

Kota Pekalongan memiliki 10 Perlintasan Sebidang Kereta Api yang semua lokasinya sudah tersedia palang pintu kereta api. Pengelolaan Palang pintu kereta api Kota Pekalongan yaitu oleh Dinas perhubungan kota Pekalongan dan PT. Kereta Api Indonesia, Disnas Perhubungan Kota Pekalongan mengelola 4 pos

perlintasan sebidang dimana 4 titik perlintasan sebidang tersebut sudah memiliki pos petugas jalur lintasan kereta api dan palang pintu. Yang terdiri dari Pos Gamer, Pos Dekoro, Pos Pusri dan Pos Polisi Militer. Untuk 6 pos perlintasan sebidang selanjutnya dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia. Terdiri dari Pos Tirto, Pos Bendan, Pos Sapuro, Pos Keputran, Pos Noyotaan dan Tondano. Dimana 6 titik sudah memiliki palang pintu, dan 5 titik sudah terdapat Pos petugas jalur lintasan kereta api.

Tabel II-120 Jalur Perlintasan Kereta Api di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang Rel Kereta Api	6,85 km	6,85 km	6,85 km	6,85 km	6,85 km
Jumlah Perlintasan Rel dengan jalan	10	10	10	10	10
Perlintasan Sebidang	10	10	10	10	10
Perlintasan Tidak Sebidang	-	-	-	-	-
Perlintasan Resmi	10	10	10	10	10
Perlintasan Tidak Resmi	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

g. Keselamatan Lalu Lintas

Angka kecelakaan secara umum menggambarkan kecelakaan total yang terjadi. Di dalam angka kecelakaan terdapat angka kematian yang menggambarkan kecelakaan yang korbannya sampai meninggal dunia. Meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya perkembangan kota, meningkatnya aktivitas masyarakat baik, ekonomi, sosial dan budaya, meningkatnya pendapatan masyarakat, dan meningkatnya jumlah kendaraan pada sistem lalu lintas jalan tak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Data kecelakaan yang terjadi di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-121 berikut.

Tabel II-121 Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang Jalan	155,44	153,41	153,41	152,60	150,27
Jumlah Kejadian Kecelakaan	122	116	93	119	180
Total Kecelakaan Rerata per km untuk 1 tahun	0,78	0,76	0,61	0,77	0,83

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan tabel diatas frekuensi atau rata-rata kejadian kecelakaan per kilometer di Kota Pekalongan adalah 1 kejadian per tahunnya.

Tabel II-122 Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Korban Kecelakaan	149	142	111	163	180
Luka-luka	114	117	93	130	166
Meninggal Dunia	35	25	18	33	44

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk	307.097	307.150	315.997	309.742	317.535
Angka Kematian akibat kecelakaan per 100.000 penduduk	11,4	8,14	5,7	10,65	13,85

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

10. Komunikasi dan Informatika

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan tuntutan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Aplikasi yang dikembangkan selama ini aplikasi berbasis web. Melalui sistem informasi yang terintegrasi memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi dan memudahkan bagi aparat dalam menyajikan informasi yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan telah membangun sistem informasi manajemen dalam memajukan pelayanan publik.

Keterbukaan informasi publik Perangkat Daerah menjadi indikator keberhasilan Pemerintah Kota Pekalongan dalam melayani masyarakat. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah di Kota Pekalongan tahun 2023 disajikan dalam Tabel II-123 berikut.

Tabel II-123 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Perangkat Daerah Kota Pekalongan di Tahun 2023

Peringkat	Badan Publik	Skor	Keterangan
1	RSUD BENDAN	100,00	Informatif
2	Inspektorat	95,79	Informatif
3	Dinparbudpora	93,15	Informatif
4	DKP	91,70	Informatif
5	Setda	90,62	Informatif
6	Dinperinaker	89,10	Menuju Informatif
7	BKPSDM	88,09	Menuju Informatif
8	BPKAD	87,84	Menuju Informatif
9	DLH	86,38	Menuju Informatif
10	DPMPTSP	86,19	Menuju Informatif
11	DPUPR	84,97	Menuju Informatif
12	Bakesbangpol	84,72	Menuju Informatif
13	DPMPPA	82,48	Menuju Informatif
14	Satpol P3KP	82,36	Menuju Informatif
15	Dinarpus	81,99	Menuju Informatif
16	Kecamatan Pekalongan Barat	81,81	Menuju Informatif
17	BPBD	80,58	Menuju Informatif
18	Dinsos P2KB	76,87	Cukup Informatif
19	Sekretariat DPRD	76,64	Cukup Informatif
20	Kecamatan Pekalongan Utara	74,10	Cukup Informatif
21	Dinkes	73,46	Cukup Informatif
22	Dinperpa	73,05	Cukup Informatif
23	Bappeda	72,33	Cukup Informatif
24	Dindagkop UKM	70,25	Cukup Informatif

Peringkat	Badan Publik	Skor	Keterangan
25	Dinperkim	68,07	Cukup Informatif
26	Dindukcapil	64,47	Cukup Informatif
27	Dindik	60,48	Cukup Informatif
28	Kecamatan Pekalongan Timur	60,38	Cukup Informatif
29	Kecamatan Pekalongan Selatan	60,17	Cukup Informatif
30	Dinhub	60,11	Cukup Informatif

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2024

Untuk menunjang informasi bagi masyarakat, Pemerintah Daerah memiliki web dengan portal http://pekalongankota.go.id. Berbagai Sistem Informasi Manajemen juga dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sebagaimana disajikan dalam Tabel II-124 berikut.

Tabel II-124 Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah SIM	92	107	179	199	160

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2024

Setiap tahun Dinas Kominfo membangun dan mengembangkan SIM/aplikasi, baik yang digunakan untuk internal Pemerintah Kota Pekalongan maupun masyarakat. Salah satu SIM/aplikasi yang dibangun adalah SIM/aplikasi satu data terpadu yang diberi nama PUSAKA (Pusat Data Terpadu Kota Batik) dengan alamat http://pusaka.pekalongankota.go.id. SIM/aplikasi ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan data yang bersifat *single data* sehingga dapat dijadikan pedoman.

Berkaitan dengan pemberdayaan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi, telah dilakukan pemberdayaan komunitas melalui pelatihan intensif pada komunitas BKR, Wirausaha/Pelaku Usaha, KNPI, BKM, LPM, Guru TIK/BTIK/SMP/MTs, Blogger, Pecinta Internet Hebat, Animator, Vlog Kota PKL, Robotik, Puskomas, Pengelola Web Sekolah, Karang Taruna, Anti Hoax, Film, Himpaudi, Telecenter, MGMP Multipedia, Explore Pekalongan, Relawan TIK, KIM, dan Dewan TIK.

Dalam hal infrastruktur, dibutuhkan jaringan komunikasi sebagai media penyebar luasan data dan informasi. Jaringan komunikasi merupakan kumpulan terimal, tautan, dan titik koneksi yang saling terhubung untuk memungkinkan telekomunikasi di antara pengguna. Semakin banyaknya jumlah pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi melahirkan kebutuhan akan sebuah regulasi yang mengatur tata cara penyelenggaraan jaringan telekomunikasi secara benar dan sesuai. Di Indonesia, regulasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ini merupakan seperangkat aturan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010. Adapun jaringan telepon genggam antara lain Indihome (Telkom), Sentral Telkom, pabx, voip, CDMA, LAN, 4G. Jumlah menara yang terdaftar sampai akhir tahun 2022 di Kota Pekalongan sebanyak 100 menara. Rasio jaringan komunikasi Kota pekalongan disajikan dalam Tabel II-125 berikut.

Tabel II-125 Rasio Jumlah Jaringan Komunikasi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jaringan telepon genggam	7	7	7	7	9
Stasioner	80	80	84	100	57
Rasio jaringan komunikasi	0,09	0,09	0,08	0,07	0,16

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan dan DPUPR Kota Pekalongan, 2024

Keterangan: jaringan telepon genggam terdiri dari PT. Protelindo, PT. IBS, PT. iForte, PT. Mitratel, PT. Telkomsel, PT. Era Bangun Powerindo, PT. Bali Towerindo, PT. STP, PT. Tower Bersama

Perkembangan surat kabar cetak di Kota Pekalongan tidak mengalami perubahan. Surat kabar yang terbit setiap pagi hari adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan dimana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Surat kabar nasional yang beredar di Kota Pekalongan yang paling dikenal masyarakat antara lain Kompas, Sindo, Tempo dan Jawa Pos. Surat kabar lokal antara lain Radar, Wawasan, Suara Merdeka dan Kedaulatan Rakyat. Perkembangan jumlah surat kabar di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-126 berikut.

Tabel II-126 Jumlah Surat Kabar Nasional dan Lokal yang Masuk ke Daerah Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Surat Kabar	15	15	15	12	12

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Penyiaran terbagi dua yakni penyiaran radio dan penyiaran televisi. Penyiaran radio di Kota Pekalongan berasal dari Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Adapun penyiaran televisi berasal dari Kota Pekalongan dan Kota Semarang. Perkembangan penyiaran radio dan televisi disajikan dalam Tabel II-127 berikut.

Tabel II-127 Jumlah Penyiaran Radio dan Televisi di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penyiaran Radio	17	8	7	7	14
Jumlah Penyiaran TV	20	20	3	6	25

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2024

Jaringan tetap adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optik. Layanan jaringan tetap di Indonesia dan di Kota Pekalongan khususnya, dilayani oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Adapun jumlah satuan sambungan telepon sepanjang tahun 2018-2022 cenderung naik. Pada tahun 2018, jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 15.096 pelanggan.

Jumlah tersebut cenderung meningkat sampai tahun 2022 dengan jumlah pelanggan sebanyak 18.505 pelanggan. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-128 berikut.

Tabel II-128 Persentase Rumah Tangga Pelanggan Telepon Tetap di Kota Pekalongan 2019-2023

Tahun	Jumlah Pelanggan Telepon Tetap	Jumlah RT	Persentase Pelanggan Telepon Tetap (persen)
2019	10.531	76.269	13,81
2020	11.254	84.296	13,35
2021	11.532	100.947	11.42
2022	18.503	87.758	21,08
2023	12.535	77.275	16,22

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2021 dan Dinas Kominfo Kota Pekalongan , 2024

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Dalam penerapan SPBE, diperlukan tata kelola SPBE yang bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu, yang meliputi: Rencana Induk SPBE Nasional; Arsitektur SPBE; Peta Rencana SPBE; rencana dan anggaran SPBE; Proses Bisnis; data dan informasi; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE; dan Layanan SPBE.

Pada tahun 2019, Kota Pekalongan dapat mencapai indeks SPBE sebesar 3,14 (predikat Baik) dengan 3 domain yang dinilai yaitu Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola dan Domain Layanan. Pada tahun 2020 Kota Pekalongan tidak menjadi lokus survei dari Kemenpan RB sehingga tidak dilakukan penilaian. Pada tahun 2021 kembali dilakukan penilaian dan mencapai indeks SPBE sebesar 2,82 (predikat Baik). Indeks tersebut turun dikarenakan adanya tambahan Domain Manajemen sebagai komponen penilaian. Pada tahun 2022 Kemenpan RB tidak melakukan penilaian SPBE Kota Pekalongan dikarenakan nilai 2,82 sudah masuk kategori “baik”, sehingga Kota Pekalongan melakukan penilaian mandiri (s*elf asessement)* dengan nilai sebesar 3,02 (predikat Baik). Tahun 2023 Kota Pekalongan dapat mencapai indeks 3,29 (predikat Baik), indeks ini naik dibandingkan tahun 2022.

Hasil penilaian SPBE tahun 2021-2023 secara detil pada setiap domain disajikan dalam Tabel II-129 berikut.

Tabel II-129 Nilai Domain SPBE Kota Pekalongan Tahun 2021-2023

No.	Domain SPBE	2021	2022	2023
1	Kebijakan	2,80	2,80	3,50
2	Tata Kelola	2,10	2,40	3,20
3	Layanan	3,75	3,76	3,82
4	Manajemen	1,36	2,09	1,82
Indeks SPBE		2,82	3,02	3,29

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2024

Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinkominfo Kota Pekalongan melakukan penilaian mandiri atau *self assessment* evaluasi SPBE tahun 2022. Pada tahun 2023 Kemenpan RB kembali melaksanakan evaluasi SPBE, dan indeks hasil evaluasi SPBE untuk Kota Pekalongan adalah 3,29 dengan kategori baik.

Pemerintah Kota Pekalongan telah memiliki layanan penyelenggara SPBE yang sangat baik (4), Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sangat baik (3.7) dan layanan publik berbasis elektronik (4). Hanya saja terdapat aspek yang masih kurang yaitu Penerapan Manajemen SPBE (1.75), sedangkan aspek audit TIK masih tergolong kategori cukup (2). Penerapan manajemen SPBE dan audit TIK masih kurang dan perlu mendapat perhatian besar. Dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kota Pekalongan diperoleh predikat yang baik dalam penerapan SPBE (3.29) dengan beberapa keunggulan dan kelemahan yang ada.

Adapun yang menjadi keunggulan dalam penerapan SPBE di Kota Pekalongan ini terletak pada aspek Layanan Penyelenggara SPBE (4), aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (3.7), dan aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik (4). Selain itu aspek lainnya juga mencapai predikat sangat baik yaitu pada Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (3.7). Hal ini merupakan signal baik juga karena Pemerintah Kota Pekalongan menggunakan aplikasi untuk layanan Keuangan, kinerja pegawai, layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta layanan kepegawaian dan layanan kearsipan dinamis berada pada level 4.

Adapun yang menjadi kelemahan dari penerapan SPBE di Kota Pekalongan ini terletak pada aspek Penerapan Manajemen SPBE (1.75) dan aspek audit TIK (2). Perlu adanya peningkatan dari kedua aspek ini untuk mendorong adanya penerapan SPBE yang lebih baik di masa mendatang.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan tahun 2023 secara detil pada setiap indikator disajikan dalam Tabel II-130 berikut.

Tabel II-130 Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator Evaluasi SPBE Tahun 2023

No.	Indikator	Nilai
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	2
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	4
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	2
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit Tik	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana Dan Anggaran SPBE	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3

No.	Indikator	Nilai
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	2
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	2
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	2
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat kematangan layanan publik sektor 1	4
46	Tingkat kematangan layanan publik sektor 2	4
47	Tingkat kematangan layanan publik sektor 3	4

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SPBE Kota Pekalongan 2023, Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2024

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

a. Persentase Koperasi Aktif

Pelaksanaan Pengawasan dan Pemerikasaan koperasi di Kota Pekalongan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi dan Petunjuk Teknis Deputi Perkoperasian No. 15 Tahun 2021 tentang Pedoman Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK) . Sebagai upaya untuk meningkatkan peran Koperasi dan UMKM, pelaksanaan pembinaan terhadap koperasi yang tidak aktif agar menjadi aktif kembali, pelatihan terhadap sumberdaya koperasi agar dapat meningkatkan

kualitas pelayanan koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku terus gencar dilaksanakan. Pelaksanaan pendampingan dan evaluasi yang dilaksanakan terhadap koperasi diharapkan dapat mencegah terjadinya permasalahan yang kerap timbul dalam pengurus internal koperasi, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia yang berazaskan kekeluargaan dan gotong royong.

Tabel II-131 menunjukkan data koperasi di Kota Pekalongan tahun 2019 - 2023. Berdasarkan tabel tersebut, jumlah seluruh koperasi di Kota Pekalongan mengalami kenaikan sejumlah 3 Koperasi dan jumlah koperasi aktif meningkat sebanyak 5 Koperasi. Hal ini merupakan hasil dari penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi yang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tabel II-131 Persentase Koperasi Aktif di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah seluruh Koperasi	Persentase koperasi aktif
2019	237	281	84,34
2020	272	303	89,77
2021	141	277	50,90
2022	148	282	52,48
2023	152	285	53,33

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2024

b. Jumlah UMKM

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Dindagkop dan UMKM Kota Pekalongan terdiri dari sektor industri, perdagangan, dan pedagang pasar-PK5. Tabel II-132 merupakan tabel jumlah UMKM di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2019-2023. Berdasarkan data tersebut jumlah UMKM di Kota Pekalongan terus mengalami kenaikan. Peningkatan pada jumlah data Perdagangan (SIUP) tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari kesadaran masyarakat untuk memilik legalitas dan perizinan atas usaha yang dimiliki.

Tabel II-132 Jumlah UMKM di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Komponen UMKM				Jumlah
	Perdagangan (SIUP)	Industri Kecil Menengah	Pedagang Pasar	Pedagang Kaki Lima	
2019	9.314	6.152	6.600	914	22.980
2020	9.115	6.594	6.610	914	23.233
2021	9.916	6.215	6.610	914	23.655
2022	9.900	6.235	6.700	975	23.810
2023	10.395	6.366	6.338	852	23.951

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2024

12. Penanaman Modal

Kegiatan penanaman modal di Kota Pekalongan sepanjang tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi baik dari jumlah investor, jumlah nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap maupun rasio daya serap tenaga kerja selama lima tahun berturut-turut. Sepanjang tahun 2019-2023, investasi terbesar terjadi pada tahun 2019, dengan nilai investasi sebesar Rp. 3.228,66 Miliar, dengan jumlah investor sebanyak 745 investor, jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 8.377 orang dan rasio daya serap

tenaga kerja sebesar 11,24. Berdasarkan kecenderungan yang terjadi maka nilai investasi sepanjang lima tahun terakhir berkecenderungan fluktuatif. Pandemi COVID-19 berdampak signifikan sehingga nilai investasi tahun 2020 menurun tajam di angka Rp. 193,116 Miliar dan meningkat kembali pada tahun 2021, menjadi sebesar Rp. 390,348 Miliar. Pandemi yang berangsur pulih berdampak positif pada investasi. Pada tahun 2022 sebanyak 2002 investor masuk di Kota Pekalongan dan jumlah nilai investasi naik sebesar Rp. 3.188,411 Miliar dengan menyerap jumlah tenaga kerja sebanyak 17.714 orang. Jumlah investor, jumlah nilai investasi, jumlah tenaga kerja yang terserap maupun rasio daya serap tenaga kerja selama 5 (lima) tahun disajikan dalam Tabel II-133 berikut.

Tabel II-133 Jumlah Investor, Nilai Investasi dan Penyerapan Tenaga Kerja Pada PMDN di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Investor	745	181	181	2002	4662
Jumlah Nilai Investasi (Rp. Miliar)	3.228,660	193,116	390,348	3.188,411	1.616,280
Jumlah Tenaga Kerja pada Perusahaan	8.377	2.349	2.044	17.714	18.156
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	11,24	12,98	11,29	8.84	3.89

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, 2024

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Pekalongan tahun 2019-2023 dapat dikatakan fluktuatif tiap tahunnya. Realisasi PMDN tertinggi tercapai di tahun 2019 sebesar Rp.3.228,66 Miliar dan mengalami penurunan signifikan di tahun 2020 menjadi Rp.193,12 Miliar. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan realisasi PMDN menjadi sebesar Rp.390,35 Miliar. Peningkatan realisasi PMDN tercatat kembali di tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 3078,505 Miliar dan Rp. 1.616,280 Miliar di tahun 2023.

Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat pada tahun 2022 sebesar Rp. 109,905 Miliar setelah lima tahun lampau tidak ada realisasi PMA dan pada tahu 2023 tercatat Rp. 110,696 Miliar pada tahun 2023. Realisasi PMDN dan PMA di Kota Pekalongan tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel II-134 berikut.

Tabel II-134 Realisasi PMDN dan PMA di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Realisasi PMDN Tahun Evaluasi (Rp. Miliar)	3.228,660	193,116	390,348	3.078,505	1.616,280
Realisasi PMA Tahun Evaluasi (Rp. Miliar)	0	0	0	109,905	110,696

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, 2024

Tantangan penanaman modal di Kota Pekalongan ke depan, terutama terkait dengan kondisi geografis wilayah yaitu keterbatasan lahan. Berdasarkan RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 bahwa luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.642 Ha atau 46,42 km2. Dari data genangan banjir dan rob tahun 2021, luas wilayah yang terkena dampak banjir dan rob adalah sebesar 1.730 Ha atau 37,27%. Selain itu, luas lahan yang dialokasikan untuk kawasan pertanian (yaitu tanaman pangan) adalah 521 hektar. Lahan yang dialokasikan untuk kawasan perdagangan dan jasa seluas 386 Ha serta kawasan peruntukan industri adalah seluas 189 Ha. Berdasarkan data tersebut maka luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk penanaman modal semakin terbatas,

karena kecenderungan penanaman modal di wilayah Kota Pekalongan terkonsentrasi pada sektor perdagangan dan jasa, sektor industri pengolahan, sektor perumahan dan kawasan permukiman, sektor perikanan, serta sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Salah satu upaya yang dilakukan dan akan terus diperkuat untuk menarik penanaman modal adalah optimalisasi kemudahan perizinan dan non perizinan di wilayah Kota Pekalongan. Apalagi, seluruh daerah telah berlomba untuk menarik investor untuk menanamkan modal di daerahnya.

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan PLTU Batang harus dimanfaatkan wilayah Kota Pekalongan sebagai peluang untuk melakukan sinergi agar Kota Pekalongan dapat menerima manfaat dari pengembangan kawasan di wilayah Kabupaten Batang. Termasuk juga kerjasama dengan wilayah sekitar yaitu Kabupaten Pekalongan harus diperkuat karena interaksi ekonomi yang kuat selama ini dalam berbagai bidang.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda sebagai motor penggerak pembangunan mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan. Pembangunan dan pembinaan generasi muda dilakukan melalui organisasi kepemudaan yang ada di Kota Pekalongan. Pada tahun 2019 jumlah organisasi pemuda yaitu 26 organisasi. Pada tahun 2020 - 2021 jumlahnya menurun menjadi 24 organisasi dan menurun lagi di tahun 2022 menjadi 16 organisasi pemuda serta meningkat kembali menjadi 40 organisasi pada tahun 2023. Sementara itu jumlah kegiatan kepemudaan yang semula 8 kegiatan pada tahun 2019 sampai tahun 2020, mulai menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 menjadi 10 kegiatan dan 16 kegiatan di tahun 2022 dan 20 kegiatan di tahun 2023.

Adapun organisasi yang masih berperan aktif selama tahun 2019-2023 antara lain adalah PPI, Forum Kota Pekalongan, Gerakan Pemuda Nusantara, Forum Pemuda Mataram, GMPI, Pemuda Muhammadiyah, KAMMI, KNPI, dan Karang Taruna. Lebih lengkapnya perkembangan organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan Kota Pekalongan, seperti disajikan dalam Tabel II-135 berikut.

Tabel II-135 Perkembangan Kepemudaan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Organisasi Kepemudaan	26	24	24	16	40
Jumlah kegiatan Kepemudaan	8	8	10	16	20
Jumlah Gelanggang/Balai remaja (selain milik swasta)	3	3	3	3	3

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Pada bidang keolahragaan, kinerja pembangunan diwadahi melalui organisasi olahraga dan sampai dengan tahun 2020 telah terbentuk 31 organisasi dalam bentuk Pengurus Cabang Olah Raga. Ada penambahan jumlah organisasi olahraga pada tahun 2021 hingga tahun 2023 menjadi 34 organisasi. Dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah kegiatan olahraga pada kisaran 8 sampai 15 kegiatan. Sedangkan jumlah lapangan olahraga masih tetap 55 lapangan selama tahun 2019-2023 dan perlu ditingkatkan.

Tabel II-136 Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung Olahraga di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Organisasi Olahraga	31	31	34	34	34

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kegiatan Olahraga	8	8	10	15	15
Jumlah Lapangan Olahraga	55	55	55	55	55

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

14. Statistik

Kebutuhan akan menentukan keputusan merupakan hal yang sangat penting dengan harapan sajian data terkumpul, terkelola dan termanfaatkan secara akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah terakses dan dibagipakaikan. Akan tetapi kondisi yang ada saat penyajian data sendiri-sendiri sehingga akan menjadi data tidak sempurna dan bias dalam memutuskan karena tidak saling terintegrasi. Mengintegrasikan data-data yang sudah adapun sangat sulit karena penyajiannya yang berbeda menjadi tumpang tindih yang sulit dipadukan dan merasa punya data dan saling menutup sendiri. maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Yang mendasari perubahan-perubahan dalam pengelolaan penyajian

Perubahan melalui pasal 37 ayat 6 disebutkan bahwa akses data di portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh Walidata selaku pengguna data pada instansi pusat dan daerah. Dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data diluar instansi pusat dan daerah.

Di masa transisi saat ini penyelenggaraan urusan statistik Pemerintah Daerah selain rutinitas cetakan masih berkelanjutan menjadi kegiatan tersendiri juga sudah mengelola data terpadu dalam bentuk PDA (Pekalongan Dalam Angka) juga menyajikan data sektoral beralamatkan pusaka.pekalongankota.go.id yang masih proses dengan berpedoman pada pasal 37 ayat 6 tentang Admin data (pejabat pengelola informasi yang bertanggungjawab) dan Walidata selaku pengguna data.

kedepan isian oleh OPD yang menyajikan sebagai admin dan data akan disajikan sesuai kebutuhan.

15. Persandian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Persandian merupakan Urusan Pemerintahan Konkuren yakni Urusan Wajib Pemerintah Daerah ,dalam kelompok Non Pelayanan Dasar. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan Persandian satu rumpun bersama dengan urusan Komunikasi dan Informatika dan urusan Statistik. Perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi telah berdampak pada perubahan-perubahan yang mendasar pada bagaimana informasi diproses dan ditransmisikan, sehingga membawa paradigma baru pada persandian. Peran persandian tidak lagi hanya menyangkut kerahasiaan saja, tetapi juga mempunyai menyangkut keamanan informasi.

Arah Perubahan Paradigma Penyelenggaraan Persandian di Daerah:

- Melaksanakan pengamanan informasi daerah melalui penyelenggaraan persandian;
- Layanan terhadap kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan dan nir sangkal atas informasi;
- Penyediaan layanan keamanan e-government;
- Tidak hanya dilakukan oleh Sandiman;
- Secara aktif meningkatkan kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

- Tidak hanya sekedar kirim terima berita;
- Tidak hanya melayani Kepala Daerah, namun juga perangkat daerah termasuk staf;
- Tidak hanya terbatas pada informasi rahasia.

Berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah, pelaksanaan persandian di Daerah meliputi 2 (dua) ruang lingkup, yakni:

1. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten / kota melalui:
   a. Penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi;
   b. Pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi;
   c. Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik;
   d. Penyediaan layanan Keamanan Informasi.
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten / kota.

16. Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan pada hakekatnya diarahkan pada upaya untuk mewujudkan ketahanan budaya. Ketahanan budaya sangat diperlukan, mengingat semakin pesatnya arus globalisasi akan membawa konsekuensi terjadinya ekspansi seni dan budaya global yang dapat mempengaruhi kelestarian budaya daerah, yang pada akhirnya akan berimplikasi kepada budaya nasional.

Guna mewujudkan ketahanan budaya, dalam kurun waktu 2018-2019 telah dilaksanakan berbagai kegiatan seni dan budaya. Meskipun jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya cenderung tetap, tetapi jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya justru semakin meningkat. Semula berjumlah 42 *event* pada tahun 2018, menjadi 57 *event* di tahun 2019. Hal ini menunjukkan keberhasilan penguatan seni dan budaya serta minat masyarakat terhadap penyelenggaraan *event* tersebut. Namun dikarenakan adanya pandemi *COVID-19,* penyelenggaraan festival seni dan budaya menurun menjadi hanya ada 6 *event* di tahun 2020 dan 4 *event* di tahun 2021. *Event* yang diselenggarakan di tahun 2021 antara lain Pentas Seni Virtual Pekan Batik Nusantara, Launching Saroeng Batik Kauman, Launching Sarung Batik Pesindon dan Pentas Seni Virtual.

Selain seni dan budaya, hal lain yang patut menjadi perhatian adalah pengelolaan cagar budaya. Proses penetapan cagar budaya dilakukan dengan melakukan identifikasi dan pendataan cagar budaya sebayak 282 Obyek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB), yang nantinya dapat ditetapkan menjadi obyek cagar budaya (OCB) melalui proses penetapan dengan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Dengan telah dibentuknya TACB di Kota Pekalongan pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan sampai dengan tahun 2023 telah menetapkan sebanyak 11 OCB yang ditetapkan melalui Surat keputusan Wali Kota Pekalongan. Pemerintah Kota Pekalongan terus memberikan kontribusi positif dengan melakukan identifikasi dan upaya pelestarian cagar budaya, seperti disajikan dalam Tabel II-137 berikut.

Tabel II-137 Perkembangan Seni, Budaya dan Permuseuman Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	57	6	4	4	4
Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	4	4	4	4	4
Jumlah Benda, Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	282	282	282	282	282

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Kota Pekalongan merupakan kota dengan tiga corak kebudayaan, yaitu budaya maritim, budaya agraris, dan budaya perniagaan. Banyaknya kebudayaan yang ada di Kota Pekalongan dapat dilihat dari jumlah data Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang ada di Kota Pekalongan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II-138 Jenis Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kota Pekalongan

Jenis OPK	Jumlah
Manuskrip	4
Tradisi Lisan	2
Adat Istiadat	3
Pengetahuan Tradisional	9
Teknologi Tradisional	10
Seni	65
Bahasa	1
Permainan Rakyat	6
Olahraga Tradisional	1
Cagar Budaya	29

Sumber: Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kota Pekalongan, 2018.

Dalam upaya pelestarian budaya dan menjadikan Kota Pekalongan sebagai destinasi wisata, telah dilakukan berbagai upaya penyelenggaraan festival/seni untuk menciptakan *brand image* Kota Pekalongan sebagai *world city of batik* dan salah satu kota kreatif dunia. Di samping itu, seni budaya Pekalongan juga terus dilakukan pembinaan untuk dapat berkembang di masyarakat. Pada tahun 2020, dikarenakan pandemi *COVID-19* Pemerintah Kota Pekalongan hanya menyelenggarakan beberapa even seni dan budaya dengan total 6 *event.* Bahkan pada tahun 2021 tidak ada penyelenggaraan festival/pentas seni/*event.* Tahun 2022 kembali diadakan event seni dan budaya sebanyak 4 *event*. Pada tahun 2023 diselenggarakan sebanyak 6 *event*, yaitu pekan batik, sadranan, festival belimbing, bubur suro, wayang kulit, Pekalongan art festival. sebagaimana disajikan dalam Tabel II-139 berikut.

Tabel II-139 Penyelenggaraan Festival/ Pentas Seni/ *Event* di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penyelenggaraan	57	6	0	4	6

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Pemerintah Kota Pekalongan bersama masyarakat berupaya melestarikan semua seni budaya yang ada dengan cara melakukan pembinanan, fasilitasi dan penyelenggaraan event seni budaya. Pada tahun 2019 dan 2020 dikelompokkan terdapat 17 jenis seni budaya, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 12 jenis seni budaya. dikarenakan selama masa pandemi banyak event seni budaya yang tidak diselenggarakan dan kembali meningkat pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebanyak 19 jenis seni.

Tabel II-140 Seni Budaya Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

No	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Simtuduror	Simtuduror	Seni Lukis	Simtuduror	Simtuduror
2	Seni Musik	Seni Musik	Seni Musik	Seni Musik	Seni Musik
3	Sanggar Teater	Sanggar Teater	Sanggar Teater	Ketoprak	Ketoprak
4	Seni Tari	Seni Tari	Seni Tari	Seni Tari	Seni Tari
5	Seni Rakyat	Seni Rakyat	Seni Rakyat	Sintren	Sintren
6	Seni Karawitan	Seni Karawitan	Seni Karawitan	Seni Karawitan	Seni Karawitan
7	Perfilman	Perfilman	Perfilman	Rampak	Rampak
8	Komunitas Musik Rakyat	Komunitas Musik Rakyat	Komunitas Musik Rakyat	Band	Band
9	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)	Orkes Melayu (Dangdut)
10	Samroh	Samroh	Dekorasi	Samroh	Samroh
11	Terbang Genjring/Jawan	Terbang Genjring/Jawan	Sastra	Terbang/Genjring/Jawan	Terbang/Genjring/Jawan
12	Musik Keroncong	Musik Keroncong	Musik Keroncong	Musik Keroncong	Musik Keroncong
13	Reklame	Reklame		Gendukan	Gendukan
14	Dekorasi	Dekorasi		Wayang	Wayang
15	Seni Lukis	Seni Lukis		Seni Lukis	Seni Lukis
16	Kerajinan	Kerajinan		Kerajinan	Kerajinan
17	Sastra	Sastra		Reog	Reog
18				Kuntulan	Kuntulan
19				Barongan	Barongan

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

17. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai salah satu sumber informasi masih diminati oleh berbagai kalangan, terutama oleh pelajar. Di Kota Pekalongan, jumlah pengunjung perpustakaan terbilang cukup tinggi meskipun angkanya fluktuatif. Pada tahun 2019 jumlahnya pengunjung perpustakaan sebanyak 90.150, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis. Hal itu terjadi karena kondisi pandemi COVID-19 maka jumlah kunjungan menurun drastis menjadi 39.885. Pada tahun 2021 dengan diadakannya berbagai macam kegiatan, jumlah pengunjung perpustakaan mulai meningkat dengan jumlah 64.527 orang kemudian pada 2022 terdapat kenaikan juga dengan jumlah kunjungan 66.204 orang. Pada tahun 2023 jumlah pengunjung perpustakaan meningkat cukup drastis sebanyak 119.226 pengunjung. Berikut jumlah pengunjung perpustakaan mulai tahun 2019 sampai tahun 2023.

Tabel II-141 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Kunjungan Selama 1 Tahun	Jumlah Populasi yang Harus Dilayani	Rasio
2019	90.150	266.119	0,34
2020	39.885	266.472	0,15
2021	64.527	266.840	0,24
2022	66.204	267.418	0,25

Tahun	Jumlah Kunjungan Selama 1 Tahun	Jumlah Populasi yang Harus Dilayani	Rasio
2023	119.226	271.343	0,44

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2024

Sementara itu jumlah perpustakaan di Kota Pekalongan mengalami kenaikan. Hanya jumlah perpustakaan RW yang berkurang, dari 105 perpustakaan di tahun 2019 - 2023, berkurang dari 94 di tahun 2019, di tahun 2020 dan 2021 kembali berkurang menjadi 90 dan pada tahun 2022 dan 2023 berkurang lagi menjadi 86. Hal ini disebabkan banyak perpustakaan RW yang tidak aktif karena berbagai faktor, diantaranya terkena dampak rob di wilayah utara dan di wilayah lain juga pengelola perpustakaan yang tidak aktif. Namun demikian, pada perpustakaan SD/MI, perpustakaan SLTP, perpustakaan SLTA mengalami kenaikan yang cukup signifkan. Kenaikan tertinggi terjadi pada perpustakaan SD/MI yang di tahun 2019-2022 sejumlah 77 menjadi 175 pada tahun 2023. Perkembangan perpustakaan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-142 berikut.

Tabel II-142 Perkembangan Perpustakaan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Uraian Data	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Perpustakaan Umum Kota Pekalongan	1	1	1	1	1
Perpustakaan Keliling	3	4	4	4	4
Perpustakaan RW	94	90	90	86	86
Perpustakaan SD/MI	77	77	77	77	175
Perpustakaan SLTP	34	34	34	34	55
Perpustakaan SLTA	23	23	23	23	29
Perpustakaan Perguruan Tinggi	6	6	6	6	6

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2024

18. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di lingkungan Perangkat Daerah (PD) Kota Pekalongan pada kurun waktu Tahun 2019 - 2023 sudah dilakukan secara baku sesuai dengan norma dan standar yang ada namun belum optimal. Pada tahun 2018 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupaya melakukan percepatan, salah satunya dengan cara melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada PD sehingga dapat meningkatkan jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, dari 22 PD menjadi 49 PD. Sampai tahun 2021 masih stagnan pada angka 49 PD yang mengelola arsip secara baku serta 24 PD pada tahun 2022 seperti disajikan dalam Tabel II-143. Adanya perubahan jumlah Perangkat Daerah dari 66 PD menjadi 30 PD didasari pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota ekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Pekalongan. Dimana terdapat 3 tipe Perangkat Daerah, yaitu Tipe A, Tipe B dan Tipe C. Pada tahun 2023, Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baku sebanyak 26 PD dari total 30 PD, atau sekitar 86,67%.

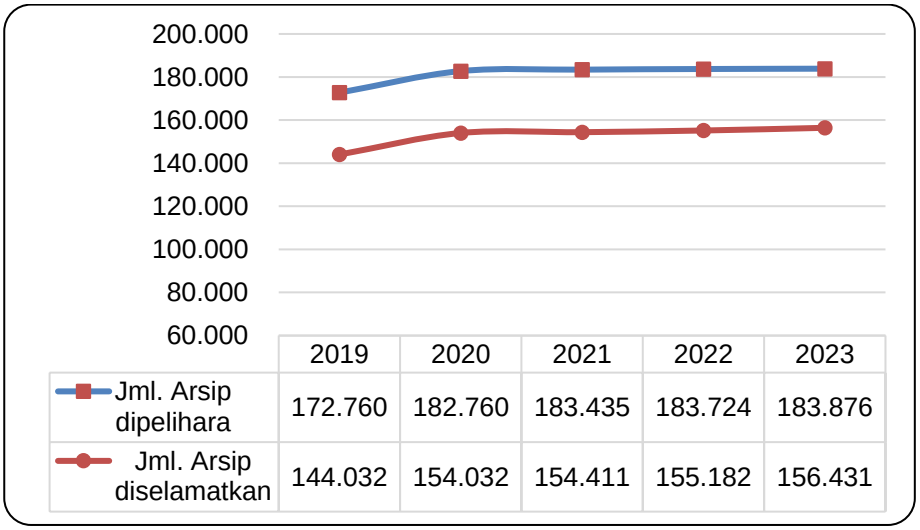
Tabel II-143 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah PD	Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baku	Rasio
2019	66	49	74,24
2020	66	49	74,24
2021	66	49	74,24

Tahun	Jumlah PD	Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baku	Rasio
2022	30	24	80,00
2023	30	26	86,67

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2023

Selain pengelolaan, penyelamatan arsip juga sama pentingnya. Tindakan ini dilakukan untuk menambah khazanah arsip statis di lembaga kearsipan sebagai upaya menyelamatkan arsip dari tindakan penyusutan yang tidak prosedural atau adanya pembiaran arsip dari lembaga pencipta arsip. Jumlah arsip yang dipelihara dan diselamatkan disajikan dalam Gambar II-48 berikut.



	2019	2020	2021	2022	2023
Jml. Arsip dipelihara	172.760	182.760	183.435	183.724	183.876
Jml. Arsip diselamatkan	144.032	154.032	154.411	155.182	156.431

Gambar II-48 Jumlah Arsip yang Dipelihara dan Diselamatkan di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2023

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2024

Adapun pelestarian arsip merupakan tindakan memperpanjang usia simpan arsip di lembaga kearsipan melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pengawetan arsip dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor kimia, fisika, dan biota baik secara manual maupun mekanik. Grafik diatas menunjukkan bahwa arsip yang diselamatkan selama kurun waktu lima tahun terakhir yakni 2018-2022 mengalami peningkatan signifikan. Demikian juga arsip yang dilestarikan selama kurun waktu 2018-2022 terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa dokumen penting layak diarsipkan.

Salah satu jenis arsip yang dikelola yaitu arsip statis. Arsip statis merupakan arsip yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan sehari-hari suatu organisasi tetapi arsip tetap harus disimpan dan dikelola berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada dengan mempertimbangkan nilai guna arsip. Tidak banyak orang yang memanfaatkan arsip statis. Pada tahun 2019, jumlah orang yang memanfaatkan arsip statis sebanyak 48 orang, pada tahun 2020 meningkat sebanyak 50 orang, dan tetap meningkat pada tahun 2021 menjadi 66 orang. Namun pada tahun 2021 menurun menjadi 23 orang dan tahun 2022 sebanyak 23 orang.

Tabel II-144 Pemanfaatan Arsip Statis Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Pengguna Arsip (orang)			Total (Orang)
	Masyarakat	Mahasiswa/Pelajar	Peneliti	
2019	10	36	2	48
2020	7	42	1	50
2021	19	46	1	66

Tahun	Jumlah Pengguna Arsip (orang)			Total (Orang)
	Masyarakat	Mahasiswa/Pelajar	Peneliti	
2022	2	10	11	23
2023	4	12	9	25

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2024

Dalam mengelola arsip, dibutuhkan sumber daya manusia kearsipan yang memiliki nilai kelayakan dan kualitas dalam profesionalisme dan kompetensi sesuai dengan standar yang berlaku. Seiring dengan peningkatan pelayanan publik, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya meningkatkan jumlah arsiparis untuk mengelola kearsipan. Tercatat di tahun 2019 terdapat 3 orang arsiparis, dan bertambah 4 orang sehingga total sampai tahun 2022 adalah 7 orang. Dari ketujuh orang arsiparis tersebut, 1 orang tidak perlu uji kompetensi karena masih menggunakan aturan lama, 1 orang tidak dapat mengikuti uji kompetensi karena berpendidikan SMA (untuk dapat mengikuti uji kompetensi, minimal berpendidikan D3), dan 5 orang belum memiliki sertifikat.

Tabel II-145 Sertifikasi Kompetensi Kearsipan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Arsiparis (orang)	Sertifikasi Kompetensi	Persentase
2019	3	0	0
2020	7	0	0
2021	7	0	0
2022	7	0	0
2023	15	0	0

Sumber: Dinarpus Kota Pekalongan, 2024

2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan masih merupakan potensi yang diandalkan Pemerintah Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Perikanan tangkap Kota Pekalongan memiliki potensi ekonomi strategis karena adanya fasilitas sebagai pusat pendaratan ikan, yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sangat representatif.

Pencapaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 jauh dari target yang diharapkan yaitu sebesar 62,64 persen dari target sebesar 15.300 ton, dengan realisasi 9.584 ton. Pencapain target budidaya ikan payau sebesar 1.200 ton juga tidak terpenuhi, dengan realisasi sebesar 409,77 ton (34,14 persen). Pencapaian produksi ikan air tawar meningkat pada tahun 2023 sebesar 130,52 ton dari target sebesar 83 ton, atau tercapai 157,25 persen. Perkembangan produksi ikan tangkap mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023.

Secara lengkap Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan selama 5 (lima) tahun (tahun 2019-2023) disajikan dalam Tabel II-146 berikut.

Tabel II-146 Perkembangan Produksi Perikanan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023 (kg)

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ikan Tangkap					
a. Jumlah Produksi Ikan	14.992	13.887	9.234	10.033	9.584
b. Target Daerah	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Persentase Produksi	97,99	90,76	60,35	65,58	62,64
Ikan Budidaya Air Payau					

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
a. Jumlah Produksi Ikan	1.746,20	717,31	541,02	409,36	409,77
b. Target Daerah	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Persentase Produksi	145,52	59,78	45,09	34,11	34,14
Ikan Budidaya Air Tawar					
a. Jumlah Produksi Ikan	11,3	91,70	71,64	93,1	130,52
b. Target Daerah	83	83	83	83	83
Persentase Produksi	13,61	110,48	86,31	112,17	157,25
Jumlah Produksi (ton)	16.750	14.696	9.847	10.535	10.124
Target Produksi	16.583	16.583	16.583	16.583	16.583

Sumber: DKP Kota Pekalongan, 2024

Berbagai permasalahan perikanan tangkap di Kota Pekalongan antara lain sedimentasi yang tinggi di muara yang menyebabkan kapal ikan besar > 30 GT tidak bisa masuk, TPI yang terendam banjir saat terjadi air laut pasang, keterbatasan fasilitas *docking* (antrian *docking* sampai dengan 3 bulan), padahal umumnya kapal sekaligus akan melakukan *docking* setelah bongkar/lelang setahun sekali. Pemerintah Kota pekalongan juga belum memiliki TPI hingga saat ini masih menyewa pada Perum Perindo. Selain itu banyak instansi yang memiliki kewenangan di lokasi Pelabuhan Perikanan di Kota Pekalongan yaitu fungsi pokok Pelabuhan dibawah kewenangan PPNP, alur pelabuhan (muara Kali Loji) dibawah kewenangan Provinsi Jawa tengah dan fasilitas komersial (TPI, lahan, perkantoran) dibawah kewenangan Perum Perindo. Ke depan, akan dibangun pelabuhan perikanan *on shore* yang bekerjasama dengan Pemerintah Pusat dan JICA, sebagai upaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap.

Konsumsi ikan di Kota Pekalongan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 secara kuantitas per kapita cenderung meningkat. Sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 konsumsi ikan mencapai target yang ditentukan. Kenaikan persentase konsumsi ikan terus meningkat sejak tahun 2019 sebesar 107,07 % hingga 2020 sebesar 108,80 %. Namun demikian terjadi penurunan persentase konsumsi ikan yang terjadi di tahun 2021 yaitu 105,87 % meskipun telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 31 kg/perkapita/tahun. Kemudian di tahun 2022 persentase konsumsi ikan mengalami kenaikan menjadi 108,71 %. Sedangkan tahun 2023 mengalami peningkatan menajdi 115,58 %. Perkembangan konsumsi ikan di Kota Pekalongan disajikan dalam Tabel II-147 berikut.

Tabel II-147 Konsumsi Ikan di Kota Pekalongan
Tahun 2019-2023 (kg/kapita/tahun)

Tahun	Jumlah Konsumsi Ikan	Target Daerah	Persentase Konsumsi Ikan
2019	32,12	30	107,07
2020	32,64	30	108,80
2021	32,82	31	105,87
2022	33,7	31	108,71
2023	35,83	31	115,58

**) Data Dasar/baku dari BPS Provinsi Jateng belum dirilis*

Sumber: DKP Kota Pekalongan, 2024

Saat ini terdapat 6 (enam) kelompok nelayan yang telah berbadan hukum, yang kemudian pada tahun 2017 ditindaklanjuti dengan pembinaan berupa pemberian bantuan/hibah. Namun demikian pemberian bantuan/hibah harus mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (6), dimana hibah diberikan dengan

persyaratan telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itulah Pemerintah Kota Pekalongan tidak bisa memberikan bantuan kepada kelompok nelayan sejak tahun 2018 sampai tahun 2019. Namun di tahun 2020 terdapat 4 kelompok nelayan yang diberikan bantuan, dan tahun 2021 sebanyak 2 kelompok, dan bertambah menjadi 5 kelompok pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan jumlah kelompk nelayan menajdi 4 kelompok.

Tabel II-148 Cakupan Bina Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Kelompok Nelayan Mendapatkan Bantuan Pemda	Jumlah Kelompok Nelayan	Persentase Cakupan Bina Nelayan (%)
2019	0	35	0,00
2020	4	36	11,11
2021	2	38	5,3
2022	5	40	12,5
2023	4	33	12,12

Sumber: DKP Kota Pekalongan, 2024

Di sisi produksi perikanan, mulai tahun 2019 hingga tahun 2023 berfluktuasi, yaitu dari 14.991 ton menjadi 9.584 ton. Pada tahun 2021 menurun cukup signifikan menjadi 9.924 ton. Pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 10.033 ton. Sementara itu jumlah produksi ikan kontribusi hasil kelompok nelayan cenderung menurun, dari 108,83 ton di tahun 2019 menjadi 104,46 ton di tahun 2023. Kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 155,62 ton dan kembali menurun di tahun 2021 menjadi 128,96 ton dan tahun 2022 menjadi 119,39 ton. Secara lengkap data Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel II-149 berikut.

Tabel II-149 Produksi Ikan Kelompok Nelayan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi hasil Kelompok Nelayan (ton)	Jumlah Produksi Ikan di Daerah (ton)	Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
2019	108,83	14.991	0,73
2020	155,62	13.887	1,12
2021	128,96	9.924	1,30
2022	119,39	10.033	1,19
2023	104,46	9.584	1,09

Sumber: DKP Kota Pekalongan, 2024

Peran Pemerintah Kota Pekalongan meningkatkan persentase perikanan dari kelompok nelayan cukup besar melalui inisiasi Gemar Makan Ikan (Gemari) yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi ini harus tetap dipertahankan sehingga akan terdapat kecenderungan yang semakin meningkat.

2. Pariwisata

Pengembangan kepariwisataan yang handal harus didukung dengan ketersediaan akomodasi yang memadai juga. Hotel sebagai sarana akomodasi utama dan penunjang utama di Kota Pekalongan penting dalam mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota jasa di masa depan, terutama pariwisata. Jumlah hotel di wilayah Kota Pekalongan pada tahun 2019 berjumlah 28 hotel, tahun 2020 bertambah

2 hotel yang selesai direnovasi sehingga jumlahnya menjadi 30 hotel dan pada tahun 2022 bertambah 5 hotel sehingga jumlahnya menjadi 35 hotel. Kelas hotel di Kota Pekalongan pun beragam, mulai dari kelas melati, bintang 1 sampai bintang 4.

Sarana akomodasi lainnya yang menunjang pariwisata adalah restoran. Restoran sebagai sarana akomodasi penunjang berperan menarik minat wisatawan untuk menikmati kuliner. Kuliner Kota Pekalongan selain menyediakan makanan nasional juga menyediakan makanan internasional yang selama ini telah dikenal oleh wisatawan itu sendiri. Perkembangan jumlah restoran juga dapat menggambarkan perkembangan kepariwisataan dan perekonomian di Kota Pekalongan. Jumlah restoran yang semula hanya 152 di tahun 2019, sekarang telah berkembang menjadi 483 restoran di tahun 2023. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisata mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2021 kunjungan wisata sudah mulai meningkat seiring dengan meredanya pandemi Covid 19 di Kota Pekalongan sehingga masyarakat sudah mulai berkunjung ke tempat-tempat wisata. Pada tahun 2023 jumlah kunjungan wisata mengalami mencapai angka tertinggi selama periode 2019 hingga 2023. Hal ini dikarenakan sudah mulai beroperasinya wisata Pantai Pasir Kencana.

Tabel II-150 Jumlah Hotel, Restoran dan Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Hotel	Jumlah Restoran dan Rumah Makan	Jumlah Kunjungan Wisata
2019	28	152	720.816
2020	30	150	283.882
2021	30	178	316.440
2022	35	234	1.038.509
2023	35	483	1.629.463

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Perkembangan pariwisata juga dapat dilihat dari tingkat okupansi hotel, dimana tahun 2019 hingga 2021 tingkat okupansinya tidak siginifikan. Untuk hotel kelas melati mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 26,23 persen menjadi 27,91 persen di tahun 2020 dan menurun menjadi 25,65 persen di tahun 2021. Rata-rata okupansi hotel bintang 1 hingga hotel bintang 3 tidak mengalami perubahan yang signifikan yaitu dikisaran 24 persen hingga 26 persen untuk hotel bintang 1, kisaran 30 persen untuk hotel bintang 2, serta sebesar 54 persen hingga 64 persen untuk hotel bintang 3. Pada tahun 2022 tidak tersedia data dikarenakan BPS Kota Pekalongan tidak melakukan perhitungan tingkat okupansi hotel. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-151 berikut.

Tabel II-151 Tingkat Okupansi Hotel di Kota Pekalongan Tahun 2019-2021

Tahun / Kelas Hotel	2019			2020			2021		
	Jml Hotel	Jml Kmr	Rata-Rata Okupansi (%)	Jml Hotel	Jml Kmr	Rata-Rata Okupansi (%)	Jml Hotel	Jml Kmr	Rata-Rata Okupansi (%)
Non Bintang/Melati	25	518	26,23	15	524	27,91	25	504	25,65
Bintang 1	1	65	24,22	1	56	26,11	1	56	45,57
Bintang 2	1	47	32,14	1	46	31,71	1	46	49,92
Bintang 3	8	738	64,30	8	741	54,36	8	748	61,22
Jml	35	1.368		35	1.367		35	1.354	

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2024

Untuk memajukan pariwisata di Kota Pekalongan, pemerintah beserta masyarakat menyelenggarakan kegiatan budaya dan seni. Tujuannya selain mendongkrak jumlah wisatawan, juga untuk meningkatkan citra wisata Kota Pekalongan sebagai tujuan wisata di pantai Utara Pulau Jawa. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya disajikan dalam Tabel II-152 berikut.

Tabel II-152 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	57	6	0	4	4

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Daya tarik lain yang ditawarkan Kota Pekalongan adalah obyek wisata. Meskipun tidak memiliki banyak obyek wisata, namun cukup banyak pengunjung yang berwisata di Kota Pekalongan. Obyek wisata yang ada di Kota Pekalongan antara lain pantai Slamaran Indah, Museum Batik, Kampung Batik Kauman, Kampung Wisata Batik Pesindon, Kampung Canting Landungsari, wisata belanja Pasar Batik Grosir Setono, Gapura Nusantara serta menata kawasan Alun-alun untuk menambah daya tarik wisata. Obyek wisata terbaru yang telah dibangun pada tahun 2021 dan diresmikan pada tanggal 26 Februari 2022 yaitu Taman Wisata Laut Pasir Kencana.

Jumlah kunjungan di Museum Batik walaupun menurun, namun wisatawan dari mancanegara masih ada yang berkunjung. Hal ini menunjukkan bahwa minat wisatawan terhadap budaya batik Pekalongan masih cukup tinggi. Tetapi tidak demikian dengan kolam renang Tirta Sari, sejak tahun 2016 resmi ditutup karena tidak layak operasional.

Tabel II-153 Jumlah Kunjungan Wisata dan Pendapatan Daerah dari Obyek Wisata di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2023

No	Objek Wisata	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pasir Kencana					
	Pengunjung					
	1). Wisman	2	0	0	0	0
	2). Wisnus	69.057	7.429	0	243.084	94.366
	B. Pendapatan (Rp.)	355.370.750	39.449.750	0	4.529.926.500	1.805.250.500
2	Slamaran Indah					
	Pengunjung					
	1). Wisman	0	0	0	0	0
	2). Wisnus	11.283	10.426	13.628	15.980	5.242
	B. Pendapatan (Rp.)	44.572.750	33.759.750	38.038.500	84.010.500	31.415.250
3	Museum Batik					
	Pengunjung					
	1). Wisman	286	138	0	85	236
	2). Wisnus	28.312	9.982	6.194	24.612	40.697
	B. Pendapatan (Rp.)	100.530.000	31.447.000	25.734.000	116.084.000	183.543.000

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

Selain daya tarik wisata dan penyediaan sarana prasarana penunjang pariwisata, keberadaan SDM berperanan penting dalam pengembangan pariwisata. SDM

pariwisata mencakup wisatawan/pelaku wisata (tourist) atau sebagai pekerja (*employment*). Peran SDM sebagai pekerja dapat berupa SDM di lembaga pemerintah, SDM yang bertindak sebagai pengusaha (wirausaha) yang berperan dalam menentukan kepuasan dan kualitas para pekerja, para pakar dan profesional yang turut berperan dalam mengamati, mengendalikan dan meningkatkan kualitas kepariwisataan serta yang tidak kalah pentingnya masyarakat di sekitar kawasan wisata yang bukan termasuk ke dalam kategori di atas, namun turut menentukan kenyamanan, kepuasan para wisatawan yang berkunjung ke kawasan tersebut.

3. Pertanian

Capaian pembangunan pertanian Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2019-2023 menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat. Puncak produktifitas padi terjadi pada tahun 2023 sebesar 5,89 ton per hektar. Produktivitas padi di Kota Pekalongan disajikan secara lengkap dalam Tabel II-154 berikut.

Tabel II-154 Produksi Padi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi tanaman padi (ton)	5.131,09	4.769,19	7.151,00	7.684,00	8.619,9
Luas areal tanaman padi (Ha)	1.618,74	1.631,53	1.428,00	1.351,00	1.053,6
Produktifitas padi per hektar (ton/Ha)	3,16	2,92	5,01	5,69	5,89

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Untuk meningkatkan produksi pertanian, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah melakukan pembinaan kepada kelompok tani. Jumlah kelompok tani yang mendapat pembinaan dari Pemkot pada tahun 2019 dan 2020 sejumlah 40 kelompok tani, 18 kelompok tani di tahun 2021 dan 8 kelompok tani di tahun 2022. Kelompok tani ini terdiri dari KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari), kelompok tani dan kelompok ternak.

Tabel II-155 Data Pengurangan Luas Lahan Kota Pekalongan Tahun 2023

Kecamatan / Kelurahan	Luas Lahan Akhir 2022	Pengurangan Luas Lahan			Luas Lahan Awal 2024
		Alih Fungsi Lahan (Ha)	Banjir/Rob (Ha)	Lainnya (Ha)	
Pekalongan Barat	**54,00**	**-**	**-**	**-**	**54,00**
Pringrejo	50,00	-	-	-	50,00
Tirto	2,00	-	-	-	2,00
Medono	2,00	-	-	-	2,00
Pekalongan Timur	**38,90**	**3,90**	**-**	**6,30**	**28,70**
Klego	6,30	-	-	6,30	-
Gamer	70,20	3,80	-	-	66,40
Kali Baros	100,00	0,10	-	-	99,90
Setono	62,40	-	-	-	62,40
Pekalongan Utara	**5,00**	**-**	**4,00**	**-**	**31,00**
Krapyak	35,00	-	4,00	-	31,00

Kecamatan / Kelurahan	Luas Lahan Akhir 2022	Pengurangan Luas Lahan			Luas Lahan Awal 2024
		Alih Fungsi Lahan (Ha)	Banjir/Rob (Ha)	Lainnya (Ha)	
Pekalongan Selatan	**409,50**	**2,60**	**-**	**-**	**406,90**
Sokoduwet	138,10	1,00	-	-	137,10
Kuripan Yosorejo	105,70	0,53	-	-	105,17
Kuripan Kertoharjo	89,80	0,20	-	-	89,60
Banyurip	65,80	0,73	-	-	65,07
Buaran Kradenan	10,10	0,14	-	-	9,96
Total	**737,40**	**6,50**	**4,00**	**6,30**	**720,60**

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2024

Pengurangan luas lahan pertanian di Kota Pekalongan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk diantaranya banjir/rob dan alih fungsi lahan. Banjir/rob yang disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut akan merusak tanah pertanian dengan merendamnya dan meningkatkan salinitas, sehingga menurunkan kualitas dan produktivitas lahan. Sementara itu, alih fungsi lahan yang melibatkan konversi lahan pertanian menjadi perumahan, industri, atau infrastruktur, secara langsung mengurangi area yang tersedia untuk pertanian. Saat ini, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam penanggulanan pengurangan lahan pertanian, diantaranya:

1. Menyeleksi dengan ketat pengajuan rekomendasi alih fungsi lahan.
2. Bekerjasama dengan Kodim 0710 Pekalongan mengolah lahan yang sudah lama terendam rob untuk dijadikan uji coba padi biosalin.

Tabel II-156 Cakupan Bina Kelompok Petani
Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kelompok tani mendapat bantuan Pemda	40	40	18	8	0
Jumlah kelompok tani	87	88	88	88	40
Cakupan bina kelompok petani (persen)	45,98	45,45	20,45	9,09	0

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2024

Dengan mencermati data tersebut di atas, ternyata jumlah kelompok tani dan cakupan bina kelompok tani tidak berdampak langsung atau tidak memiliki korelasi yang nyata dengan produktivitas padi per hektar. Jumlah kelompok tani dan cakupan bina kelompok tani yang meningkat tidak diikuti peningkatan produktivitas padi per hektar secara langsung, justru produktivitas padi per hektar cenderung menurun. Produktivitas padi per hektar yang meningkat kembali tahun 2022, diharapkan merupakan dampak dari meningkatnya jumlah kelompok tani dan cakupan bina kelompok tani tahun-tahun sebelumnya.

Aspek lain yang sangat berdampak terhadap produktivitas padi per hektar adalah semakin meluasnya banjir dan rob di wilayah Kota Pekalongan. Berdasarkan luas wilayah terdampak banjir dan rob, serta frekuensi dan lama terjadi banjir dan rob, tentunya berimplikasi terhadap produktivitas padi per hektar pada kawasan terdampak. Banjir dan rob berimplikasi terhadap kondisi tanah atau unsur hara sehingga akan berdampak terhadap produktivitas padi per hektar. Atas hal tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan menyusun kajian mitigasi dampak banjir dan rob terhadap lahan pertanian

sebagai upaya untuk mengantisipasi penurunan produksi sektor pertanian di masa yang akan datang.

Selain itu, permasalahan irigasi juga menjadi penyebab menurunnya produktivitas padi per hektar. Kondisi geografis wilayah Kota Pekalongan yang sangat datar, berimplikasi terhadap sedimentasi yang cukup tinggi. Sedimentasi yang tinggi tersebut, menyebabkan aliran air irigasi seringkali mengalami kendala. Di samping itu, luas lahan yang dialokasikan untuk kawasan pertanian (yaitu tanaman pangan) dalam RTRW Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 adalah 521 hektar. Perkembangan kawasan terbangun (*built-up area*) yang cukup tinggi, seperti untuk perumahan dan kawasan permukiman, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan serta alokasi luas lahan yang menurun menyebabkan beberapa saluran irigasi tidak berfungsi. Kondisi tersebut dapat berimplikasi terhadap menurunnya produktivitas padi per hektar.

Dalam hal upaya menambah nilai produk pertanian, dilakukan pendampingan pengembangan Kampung Tempe di Kertoharjo dan Kampung Tahu di Sokoduwet.

4. Perdagangan

Aktivitas perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan, juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Sektor perdagangan dan koperasi sangat memberikan kontribusi secara agregat yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan produk unggulan Kota Pekalongan diantaranya batik, ikan, tenun, konveksi dan aneka kerajinan lainnya berkembang dengan penuh inovasi dan kreativitas. Upaya Pemerintah dalam memfasilitasi dan menguatkan aktivitas usaha UMKM tersebut memberikan manfaat bagi keberlangsungan dan kepastian usaha UMKM, sehingga aktivitas bisnis UMKM Kota Pekalongan tetap terjaga dan mampu memenuhi pasar lokal, regional, nasional dan internasional.

Di samping didominasi aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Adapun jenis pasar rakyat dan toko modern seperti disajikan dalam Tabel II-157 berikut.

Tabel II-157 Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

JenisPasar / Toko	2019	2020	2021	2022	2023
Sentra Perdagangan Batik	3	3	3	3	3
PasarTradisional	11	11	10	11	11
- Toko	74	74	74	74	74
- Kios	555	555	555	555	555
Toko diluar Pasar Tradisonal	2.726	2.726	2.757	4.729	4.729
Toko Modern:					
- Minimarket	43	53	77	64	82
- Supermarket	3	5	4	4	6
- Department store	3	4	2	2	3
- Hypermarket	1	1	1	1	1
- Perkulakan	0	0	0	0	0

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2024

Aktivitas perdagangan juga mencakup pedagang/usaha informal yang tidak kalah banyak dengan usaha formal. Pada tahun 2023, pedagang/usaha informal sebanyak 852 pedagang yang tersebar di titik-titik strategis di Kota Pekalongan sebagaimana disajikan dalam Tabel II-158 berikut.

Tabel II-158 Jumlah Pedagang/Usaha Informal di Kota Pekalongan Tahun 2023

No.	Lokasi	Jumlah
1	Jl. Sultan Agung	36
2	Jl. Hasanudin	10
3	Jl. Urip Sumoharjo	24
4	Jl. Gatot Subroto	39
5	Jl. Kurinci	11
6	Jl. Kusuma Bangsa	34
7	Jl. Merak *	1
8	Jl. WR. Supratman	10
9	Jl. Progo	9
10	Jl. Merpati	16
11	Jl. Mawar	18
12	Jl. Melati	38
13	Jl. Pembangunan	13
14	Jl. Mataram	50
15	Alun-alun timur	9
16	Alun-alun utara	12
17	Pusat Kuliner dan Fashion Sugihwaras	261
18	Tentara Pelajar	31
19	Jl. Veteran	51
20	Jl. Angkatan 45	4
21	Resimen	4
22	Gajah Mada	8
23	JL. HOS cokroaminoto	43
24	Jl. RA Kartini	13
25	Jl. Wahid Hasyim	27
26	Jl. RA Kartini	13
27	Jl. Wahid Hasyim	27
28	Jl. Dr. Wahidin	17
29	Jl. Cendrawasih	27
	Total	852

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan (diolah), 2024

Dari sisi perdagangan, kontribusi di sektor perdagangan atas harga cenderung meningkat dalam periode 5 tahun kebelakang. Pada tahun 2019 sebesar Rp.2,370 triliun dan naik sampai di angka Rp.2,893 triliun di tahun 2023. Begitu pula dengan kontribusi sektor perdagangan atas harga konstan yang cenderung meningkat, mulai dari Rp.1,655 triliun di tahun 2019 menjadi Rp.1,807 triliun di tahun 2023. Namun, pada tahun 2020 kontribusi sektor perdagangan atas harga berlaku dan atas harga konstan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, masing-masing menjadi sebesar Rp. 2.319 triliun dan Rp. 1.578 triliun. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 maupun tahun 2020, masing-masing menjadi 2,474 triliun dan 1,664 triliun dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.656 triliun dan Rp. 1.719 triliun. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-159 berikut.

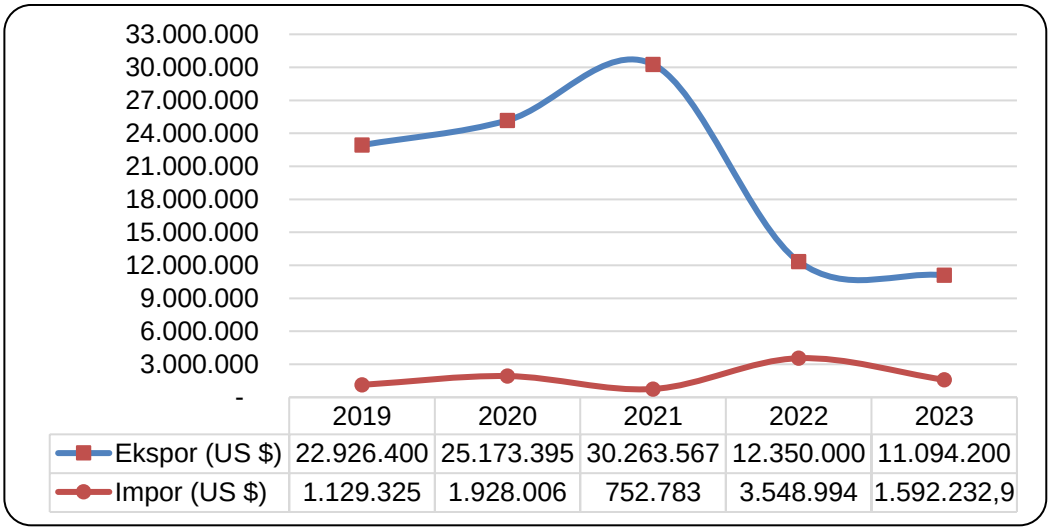
Tabel II-159 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

No	Keterangan		2019	2020	2021	2022	2023
1	ADHB	PDRB Total (Rp. Juta)	10.873.976,04	10.848.872,87	11.460.582,99	12.590.983,42	13.744.224,05
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	2.370.293,83	2.319.488,33	2.474.768,55	2.656.275,92	2.893.067,16
		Kontribusi	21,80	21,38	21,59	21,10	21,05
2	ADHK 2010	PDRB Total	7.477.425,04	7.337.833,89	7.601.486,23	8.039.459,94	8.476.545,73
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	1.655.883,36	1.578.463,62	1.664.625,66	1.719.403,05	1.807.547,25
		Kontribusi	22,15	21,51	21,90	21,39	21,32

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Nilai ekspor tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan keadaan perdagangan luar negeri yang mengalami penurunan, dimana nilai ekspor perdagangan mengalami penurunan. Penurunan nilai ekspor perdagangan ini salah satunya disebabkan oleh terjadinya resesi global di tahun 2023. Adanya resesi global di tahun 2023 ini terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi dan kondisi perekonomian yang mulai lesu.

Kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami kenaikan cukup signifikan pasca pandemi, dinilai cukup kuat untuk bertahan menghadapi ancaman terjadinya resesi global. Namun perlu untuk diwaspadai bahwa resesi ekonomi global yang terjadi terdapat ancaman yang akan berdampak salah satunya yaitu, permintaan ekspor untuk produk jadi Indonesia seperti tekstil dan kerajinan akan menurun terutama dari Amerika Serikat, Eropa dan Tiongkok. Dimana komoditas utama yang dihasilkan oleh Kota Pekalongan untuk di ekspor adalah tekstil dan kerajinan serta negara tujuan yang di tuju adalah Amerika Serikat, Eropa, Tiongkok dan negara lainnya. Dengan demikian, adanya perkiraan resesi global ini ternyata sudah mulai terjadi dan berdampak nyata pada nilai ekspor perdagangan Kota Pekalongan yang mulai mengalami penurunan. Data selengkapnya disajikan dalam Gambar II-49 berikut.



Gambar II-49 Realisasi Nilai Ekspor dan Impor di Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2023

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2024

5. Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB; dan pertumbuhan industri.

a. Kondisi Umum Industri

Jumlah industri di Kota Pekalongan sejak Tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami perkembangan. Pada tahun 2019 terdapat 89 unit industri, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 8 unit industri, di tahun 2021 meningkat kembali menjadi 58 unit industri, dan pada tahun 2022 kembali naik menjadi 353 unit industri. Pada tahun 2023 dikarenakan ketersediaan data sudah cukup baik dibantu dengan menggunakan aplikasi SIINas (Sistem Industri Nasional), OSS (*Online Single Submission*), dan Sistem Informasi Industri Kota Pekalongan, jumlah industri yang terdata sejumlah 10.446 unit industri. Secara keselurahan jumlah industri di Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel II-160 berikut.

Tabel II-160 Klasifikasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Klasifikasi Industri	Jumlah Unit Industri				
	2019	2020	2021	2022	2023
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)	14	4	8	26	1.403
Industri Aneka (IA)	47	3	45	326	8.047
Industri Hasil Pertanian (IHP)	6	1	5	1	996
JUMLAH	**89**	**8**	**58**	**353**	**10.446**

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2024

Jika dilihat dari nilai investasinya, industri di Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang cukup baik seperti disajikan dalam Tabel II-161 berikut.

Tabel II-161 Nilai Investasi Industri di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

KLASIFIKASI INDUSTRI	INVESTASI (Rp Juta)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Industri Logam Mesin & Kimia (ILMK)	9.412,03	955,00	3.108,90	6.275,31	11.277,66
Industri Aneka (IA)	69.483,30	7.184,00	11.271,27	44.579,27	50.091,30
Industri Hasil Pertanian (IHP)	2.721,41	1.450,00	740,00	100,00	1.244
JUMLAH	**81.616,74**	**9.589,00**	**15.120,17**	**50.954,58**	**62.612,96**

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2024

b. Industri Unggulan

Produk unggulan Kota Pekalongan adalah industri batik, pengolahan perikanan, teh, pertenunan ATM dan pertenunan ATBM. Dari kelima produk unggulan tersebut, batik, pakaian jadi dari tekstil dan pengolahan ikan merupakan kompetensi inti daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Pekalongan. Untuk kegiatan Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya sepanjang tahun 2018-2023 jumlah industrinya cenderung stagnan, namun untuk kategori batik dan pakaian jadi dari tekstil terdapat peningkatan sebesar 10,31% dan 16,49%. Berikut ini adalah profil industri unggulan di Kota Pekalongan.

Tabel II-162 Jumlah IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Jenis industri	2019	2020	2021	2022	2023
Batik	781	1.457	1.882	1.832	2.021
Pakaian jadi dari tekstil	953	941	1.067	1.146	1.335
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	23	26	45	77	38
Penggaraman/Pengeringan Ikan	9	38	102	51	33
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	8	88	87	82	204
Pengolahan Teh dan Kopi	11	31	36	38	37
Pertenunan	34	33	46	47	55

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2024

Tabel II-163 Jumlah Tenaga Kerja Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Jenis industri	2019	2020	2021	2022	2023
Batik	5.278	7.964	11.263	11.358	12.458
Pakaian jadi dari tekstil	6.047	6.600	7.958	8.650	9.774
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	59	52	62	154	53
Penggaraman/Pengeringan Ikan	75	190	228	136	119
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	58	227	664	606	1.585
Pengolahan Teh dan Kopi	1.174	1.834	2.531	2.774	2.534
Pertenunan	595	466	407	425	620

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2024

Tabel II-164 Nilai Investasi (Rp. Juta) IKM Produk Unggulan di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Jenis industri	2019	2020	2021	2022	2023
Batik	n/a	10.041	17.610	1.786	10.365,3
Pakaian jadi dari tekstil	12.573	2.098	524	13.514	8.816,6
Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	n/a	14,2	7,5	n/a	25
Penggaraman/Pengeringan Ikan	n/a	135	16,8	n/a	12,7
Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Perairan Lainnya	n/a	72.15	80,4	n/a	44,7
Pengolahan Teh dan Kopi	n/a	3.550	n/a	n/a	n/a
Pertenunan	n/a	n/a	n/a	648	145,7

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2024

c. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB sepanjang 2019-2023 cenderung fluktuatif berdasarkan ADHB. Pada tahun 2019 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB sebesar 20,73 persen dari total PDRB. Kondisi tersebut terus berfluktuasi hingga tahun 2023 menjadi 19,88 persen dari total PDRB. Peningkatan kinerja sektor perindustrian mampu menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan selain sektor perdagangan. Lapangan usaha industri pengolahan

merupakan lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Kota Pekalongan. Perkembangan kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB disajikan dalam Tabel II-165 berikut.

Tabel II-165 Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Keterangan		2019	2020	2021	2022	2023
ADHB	PDRB Total (Rp. Juta)	7.477.425,04	7.337.833,89	7.601.486,23	8.039.459,94	8.476.545,73
	PDRB Perindustrian (Rp. Juta)	1.550.360,71	1.542.947,72	1.579.669,99	1.646.996,75	1.684.876,44
	Kontribusi	20,73	21,03	20,78	20,49	19,88
ADHK (2010)	PDRB Total	10.873.976,04	10.848.872,87	11.460.582,99	12.590.983,42	13.744.224,05
	PDRB Perindustrian	2.267.063,33	2.315.371,70	2.423.908,81	2.623.109,41	2.809.448,38
	Kontribusi	20,85	21,34	21,15	20,83	20,44

Sumber: Kota Pekalongan Dalam AngkaTahun 2024, 2024

2.1.3.4 Unsur Penunjang

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah adalah unit yang mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam penyelenggaraan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Daerah menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dengan unit kerja di bawahnya maupun dengan instansi lain sesuai tugasnya dalam perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian target indikator kinerja tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat, Nilai SAKIP Kota, Nilai SAKIP OPD dan Persentase Capaian Kinerja Pembangunan.

a. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan meliputi kerjasama daerah dengan Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Dalam Negeri dan Perguruan Tinggi.

Tabel II-166 Jumlah Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah	136	93	68	70	21

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda, 2024

b. Reformasi Birokrasi

Penguatan Akuntabilitas Kinerja terus dilaksanakan dengan peningkatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari tahun ke tahun Nilai Akuntabilitas Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2018 mengalami lompatan 2 peringkat dari C menjadi BB.

Pada Tahun 2022 hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh nilai 73,31 atau predikat BB. Penilaian tersebut

menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian SAKIP disajikan dalam Tabel II-167 berikut.

Tabel II-167 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2021

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019	Nilai 2020	Nilai 2021
1	Perencanaan Kinerja	**30**	24,42	24,53	24,70	24,32
2	Pengukuran Kinerja	**25**	17,07	17,54	17,92	18,18
3	Pelaporan Kinerja	**15**	10,46	11,09	11,17	11,45
4	Evaluasi Internal	**10**	7,24	7,29	7,39	7,44
5	Capaian Kinerja	**20**	11,69	12,14	11,89	11,77
	Nilai SAKIP	**100**	**70,88**	**72,59**	**73,07**	**73,16**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**C**	**CC**	**BB**	**BB**

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2024

Hasil Evaluasi tahun 2022 **"tidak diperbandingkan"** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2022 lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan menunjukkan bahwa nilai sebesar 72,83 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik", yaitu implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Tabel II-168 Nilai SAKIP Kota Pekalongan Tahun 2022 - 2023

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2022	Nilai 2023
1	Perencanaan Kinerja	**30**	24,38	23,24
2	Pengukuran Kinerja	**30**	19,50	20,04
3	Pelaporan Kinerja	**15**	11,48	11,52
4	Evaluasi Internal	**25**	17,95	18,03
	Nilai SAKIP	**100**	**73,31**	**72,83**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	**BB**

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan dan Inspektorat Kota Pekalongan, 2024

Upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga ditempuh dengan melaksanakan kajian terhadap kepuasan masyarakat terhadap Unit Pelayanan Publik (UPP). Survei Kepuasan Masyarakat adalah penggukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Pada Semester I Tahun 2023 Survei Kepuasan Masyarakat Kota Pekalongan mendapat nilai 85,647 dengan kategori Baik. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Semester II Tahun 2023 disajikan dalam Tabel II-169 berikut.

Tabel II-169 Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik di Kota Pekalongan Tahun 2023

Nama OPD		Nilai IKM	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	89,80	Sangat Baik
2	Dinas Kesehatan	87,88	Baik
3	Rumah Sakit Umum Daerah Bendan	89,88	Sangat Baik
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	85,72	Baik
5	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	86,02	Baik
6	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran, dan Penyelamatan	90,00	Sangat Baik
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89,23	Sangat Baik
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	85,95	Baik
9	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan KB	93,51	Sangat Baik
10	Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	95,36	Sangat Baik
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Dan Perlindungan Anak	95,35	Sangat Baik
12	Dinas Pertanian Dan Pangan	88,32	Sangat Baik
13	Dinas Lingkungan Hidup	98,16	Sangat Baik
14	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	92,63	Sangat Baik
15	Dinas Perhubungan	84,48	Baik
16	Dinas Komunikasi Dan Informatika	95,95	Sangat Baik
17	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	95,73	Sangat Baik
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Satu Pintu	85,04	Baik
19	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olah Raga	86,40	Baik
20	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	95,59	Sangat Baik
21	Dinas Kelautan Dan Perikanan	92,08	Sangat Baik
22	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah	97,00	Sangat Baik
23	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	86,11	Baik
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	86,15	Baik
25	Sekretariat DPRD	95,50	Sangat Baik
26	Inspektorat	90,24	Sangat Baik
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	82,27	Baik
28	Bagian Protokol dan Kompim Setda	99,51	Sangat Baik
29	Bagian Organisasi Setda	89,26	Sangat Baik
30	Bagian Umum Setda	90,03	Sangat Baik
31	Bagian Hukum Setda	89,32	Sangat Baik
32	Bagian PBJ dan Minbang Setda	89,74	Sangat Baik
33	Bagian Perekonomian dan SDA Setda	91,05	Sangat Baik
34	Bagian Pemerintahan Setda	89,02	Sangat Baik
35	Kecamatan Pekalongan Utara	99,83	Sangat Baik
36	Kelurahan Kandang Panjang	86,17	Baik
37	Kelurahan Panjang Wetan	82,66	Baik

Nama OPD		Nilai IKM	Keterangan
38	Kelurahan Panjang Baru	99,94	Sangat Baik
39	Kelurahan Krapyak	98,07	Sangat Baik
40	Kelurahan Padukuhan Kraton	88,29	Baik
41	Kelurahan Degayu	90,93	Sangat Baik
42	Kelurahan Bandengan	97,87	Sangat Baik
43	Kecamatan Pekalongan Selatan	94,34	Sangat Baik
44	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	99,96	Sangat Baik
45	Kelurahan Kuripan Yosorejo	84,83	Baik
46	Kelurahan Jenggot	98,13	Sangat Baik
47	Kelurahan Buaran Kradenan	93,14	Sangat Baik
48	Kelurahan Banyurip	85,93	Baik
49	Kelurahan Soko Duwet	88,83	Sangat Baik
50	Kecamatan Pekalongan Barat	94,44	Sangat Baik
51	Kelurahan Medono	87,90	Baik
52	Kelurahan Podosugih	85,89	Baik
53	Kelurahan Pasirkratonkramat	81,34	Baik
54	Kelurahan Tirto	92,31	Sangat Baik
55	Kelurahan Sapuro Kebulen	90,78	Sangat Baik
56	Kelurahan Bendan Kergon	84,58	Baik
57	Kelurahan Pringrejo	90,19	Sangat Baik
58	Kecamatan Pekalongan Timur	99,70	Sangat Baik
59	Kelurahan Kauman	98,79	Sangat Baik
60	Kelurahan Poncol	99,53	Sangat Baik
61	Kelurahan Klego	99,96	Sangat Baik
62	Kelurahan Gamer	78,26	Baik
63	Kelurahan Noyontaansari	98,40	Sangat Baik
64	Kelurahan Setono	99,56	Sangat Baik
65	Kelurahan Kalibaros	98,61	Sangat Baik
66	UPT Puskesmas Krapyak Kidul	97,28	Sangat Baik
67	UPT Puskesmas Tondano	86,10	Baik
68	UPT Puskesmas Tirto	82,21	Baik
69	UPT Puskesmas Buaran	94,15	Sangat Baik
70	UPT Puskesmas Kusuma Bangsa	85,16	Baik
71	UPT Puskesmas Medono	84,00	Baik
72	UPT Puskesmas Klego	80,73	Baik
73	UPT Puskesmas Noyontaan	86,21	Baik
74	UPT Puskesmas Sokorejo	90,47	Sangat Baik
75	UPT Puskesmas Kramatsari	83,79	Baik
76	UPT Puskesmas Bendan	86,11	Baik
77	UPT Puskesmas Jenggot	88,48	Sangat Baik
78	UPT Puskesmas Dukuh	84,68	Baik
79	UPT Puskesmas Pekalongan Selatan	87,95	Baik
	Rata-rata IKM Kota Pekalongan	**90,69**	**Sangat Baik**

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2024

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Dari hasil penilaian Kemenpan RB tahun 2019, indeks reformasi birokrasi Kota Pekalongan yang dicapai adalah 68,97 dengan predikat "B". Dengan nilai tersebut, Kota Pekalongan berada pada peringkat kedua se-Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Adapun rincian komponen penilaian tersebut disajikan dalam Tabel II-170 berikut.

Tabel II-170 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2018	2019
I	Komponen Pengungkit			
1	Manajemen Perubahan	5,00	2,33	2,47
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	1,46	1,62
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,51	3,47
4	Penataan Tatalaksana	5,00	2,84	2,90
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,11	10,52
6	Penguatan Akuntabilitas	6,00	5,08	5,07
7	Penguatan Pengawasan	12,00	5,15	5,62
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,63	3,65
	Total Komponen pengungkit (A)	**60,00**	**36,11**	**35,32**
II	Komponen Hasil			
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	7,80	9,92
2	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,72	4,99
3	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,16	6,74
4	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	8,65	9,00
	Total Komponen Hasil (B)	**40,00**	**30,33**	**33,65**
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	**100,00**	**66,44**	**68,97**

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2024

Tabel diatas menggambarkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi telah didukung dengan komitmen yang tinggi dari pimpinan sehingga mampu mendorong terjadinya perubahan dalam tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, ada perubahan dalam komponen penilaian. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada hal-hal yang bersifat implementatif, kolaboratif, dan analisis yang holistik. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, indeks Reformasi Birokrasi di Pemkot Kota Pekalongan tahun 2022 adalah 71,04 dengan kategori "BB" dengan rincian hasil evaluasi disajikan dalam Tabel II-171 berikut.

Tabel II-171 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
A	**Komponen Pengungkit**			
	I. Pemenuhan	20,00	11,39	12,79
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,03	6,81
	III. Reform	30,00	18,86	19,13
Total Komponen Pengungkit		**60,00**	**36,28**	**38,73**
B	**Komponen Hasil**			

No.	Komponen Penilaian	Bobot	2021	2022
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,11	8,13
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,36	7,69
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,20	8,09
4.	Kinerja Organisasi	10,00	7,71	8,40
Total Komponen Hasil		**40,00**	**33,38**	**32,31**
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		**100,00**	**69,66**	**71,04**

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022, 2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, ada perubahan dalam komponen penilaian. Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2023 adalah 77,12 dengan kategori “BB”, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian hasil evaluasi disajikan dalam Tabel II-172 berikut.

Tabel II-172 Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	65,08
B	RB Tematik	20	12,04
C	Indeks RB	120	77,12
			BB

Sumber: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, 2024

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang DPRD. Sekretariat DPRD membantu pencapaian kinerja DPRD, dimana yang menjadi indikator kinerja yaitu penetapan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) menjadi Perda (Peraturan Daerah). Usulan Raperda yang masuk ke Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) diupayakan untuk ditetapkan menjadi Perda. Pada tahun 2022, terdapat 12 Peraturan daerah yang ditetapkan, dengan status 10 Perda sudah aktif dan 2 Perda Masih dalam proses evaluasi dan permohonan nomor registrasi di provinsi, yaitu:

a. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
b. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
c. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
d. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
e. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2021;
f. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
g. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Asing;
h. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;

i. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Batik TV;
j. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2023;
k. Raperda Kota Pekalongan tentang Garis Sempadan;
l. Raperda Kota Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2.1.3.5 Unsur Pendukung

1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 tahun. Periode RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017. Sementara itu, RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD IV atas RPJPD Kota Pekalongan. Selanjutnya, dokumen RKPD sebagai perencanaan pembangunan tahunan disusun berdasarkan RPJMD.

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan, Bappeda Kota Pekalongan selalu berupaya tepat waktu sesuai dengan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahkan selalu berupaya melakukan percepatan-percepatan dari jadwal yang telah ditentukan.

Sebagai bentuk sinergitas dengan kebijakan Pusat dan Provinsi, dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan disusun dengan memperhatikan RPJP, RPJMN, RKP, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RKPD Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

2. Keuangan

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi

berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.

Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, *updating* data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD).

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memperoleh Opini WTP pada tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan hasil, dimana pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 secara berturut-turut Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

3. Kepegawaian

Dalam upaya menggerakkan roda pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), ASN (Aparatur Sipil Negara) menduduki peran yang sangat penting. Peran ASN dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi dengan level mulai dari tingkat pelaksana sampai eselon II (Pemerintah Kab/Kota), serta mempertimbangkan tingkat pendidikan.

Jumlah ASN pada Pemerintah Kota Pekalongan mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi sebanyak 3.177 orang, dari tahun 2022 sebanyak 3.261. Penurunan ini antara lain adalah karena adanya pegawai purna tugas yang cukup banyak pada tahun 2023 serta adapula yang meninggal dunia.

Jumlah ASN menurut jabatan dan jenis kelamin disajikan dalam Tabel II-173 berikut.

Tabel II-173 Jumlah ASN Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2022 - 2023

Jabatan	2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Eselon II	25	3	28	23	2	25
Eselon III	66	42	108	67	44	111
Eselon IV	124	107	231	130	110	240
Fungsional Umum	594	613	1.207	443	313	756
Fungsional Tertentu	607	1.080	1.687	68	1.358	2.045
Jumlah Total	**1.416**	**1.845**	**3.261**	**1.265**	**1.827**	**3.177**

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2024, 2024

Sedangkan jumlah ASN menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin disajikan dalam Tabel II-174 berikut.

Tabel II-174 Jumlah ASN Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Pekalongan Tahun 2022 - 2023

Jabatan	2022			2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sampai dengan SD	45	-	45	33	-	33
SMP/Sederajat	81	7	88	70	7	77
SMA/Sederajat	269	131	400	231	105	336
Diploma I,II/Akta I,II	13	6	19	11	5	16
Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	165	323	488	151	302	453
Diploma IV	26	67	93	29	69	98
Sarjana S1	703	1.233	1.936	691	1.250	1.941
Sarjana S2	111	78	189	131	89	220
Sarjana S3	3	-	3	3	-	3
Jumlah Total	**1.416**	**1.695**	**3.261**	**1.350**	**1.827**	**3.177**

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka 2024, 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas ASN Pemerintah Kota Pekalongan atau sekitar 71,20 persen berpendidikan sarjana (Strata 1 sampai dengan Strata 3/doktor). Hal ini menunjukkan SDM yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Hal ini dapat mendukung bila nantinya dilakukan pengukuran indeks penerapan Sistem Merit.

Dengan pengukuran indeks penerapan Sistem Merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan dari Sistem Merit antara lain:

a. Melakukan rekrutmen, seleksi, dan promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka dan adil dengan menyusun perencanaan SDM Aparatur secara berkelanjutan;
b. Memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara;
c. Mengelola pegawai ASN secara efektif dan efisien;
d. Memberikan remunerasi yang setara untuk pekerjaan-pekerjaan yang setara dengan memperhatikan hasil kinerja;
e. Memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi;
f. Memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin;
g. Menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku, dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat;
h. Menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi sesuai standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan;
i. Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN;
j. Melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi;
k. Melindungi pegawai ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan;
l. Memberikan perlindungan kepada pegawai.

Penilaian Indeks Sistem Merit dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara/KASN tiap tahunnya dengan 9 (Sembilan) indikator seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah

diubah dengan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020. Adapun nilai dan kategori dalam Indeks Sistem Merit adalah: nilai 100-174 kategori Buruk, 175-249 Kategori Kurang, 250-324 kategori Baik dan 325-400 kategori Sangat Baik.

Pada tahun 2022, Indeks Sistem Merit Kota Pekalongan mencapai nilai 264,5 dengan kategori Baik. Sedangkan untuk tahun 2023, Indeks Sistem Merit Kota Pekalongan memperoleh nilai sebesar 327, melebihi target yang telah ditetapkan RPJMD dan capaian tahun-tahun sebelumnya. Untuk Provinsi Jawa Tengah, dari 35 kabupaten/kota nilai Indeks Sistem Merit kategori Sangat Baik untuk 2 Kabupaten/kota (Kota Magelang dan Kota Pekalongan), kategori Baik untuk 30 Kabupaten/kota dan sisanya 3 Kabupaten/kota kategori Kurang.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kapasitas SDM aparatur merupakan upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan mendukung peningkatan pelayanan publik, dilaksanakan melalui pengadaan CPNS; diklat formal (pengiriman tugas belajar dan pemberian izin belajar), diklat kader (bintek dan kursus), tes kompetensi (Quasi, PCAP, dan ujian kedinasan), kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, penilaian prestasi kerja, pembinaan disiplin, pemberian penghargaan dan kesejahteraan, pemberhentian dan pensiun serta pemutakhiran data.

Pemerintah Kota Pekalongan juga telah memfasilitasi pelaksanaan diklat aparatur. Diklat tersebut meliputi diklat teknis, fungsional, kepemimpinan dan prajabatan. Secara umum terjadi kecenderungan perkembangan jumlah aparatur yang mengikuti diklat. Dengan semakin banyaknya aparatur yang telah mengikuti diklat, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Secara detail disajikan dalam Tabel II-175 berikut.

Tabel II-175 Jumlah Diklat Aparatur di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Diklat	2019	2020	2021	2022	2023
Teknis	366	151	172	472	327
Fungsional	166	75	13	21	7
Kepemimpinan	8	1	3	2	45
Prajabatan	251	0	200	319	2
Orientasi PPPK	-	-	-	190	146

Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan, 2024

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa untuk pelaksanaan diklat di Kota Pekalongan sangat fluktuatif disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Diklat Tenik, Fungsional dan Kepemimpinan pada tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan porsi / kuota yang disediakan penyelenggara Diklat. Sehingga jumlah peserta diklat tiap tahunnya tidak dapat dipresiksi jumlahnya, walaupun BKPSDM secara teratur selalu mengajukan calon peserta diklat baik ke Pemprov Jateng maupun Lembaga/instansi/ kemeterian terkait. Selain itu BKPSDM juga selalu mengisi pengajuan peserta diklat melalui Aplikasi SI JARI ON AKD milik BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Sedangan untuk diklat prajabatan pada tahun 2023 dilaksanakan untuk 2 orang CPNS dan orientasi PPPK untuk 146 orang.

Di samping hal-hal tersebut di atas, dalam rangka pembinaan kepegawaian juga telah dilaksanakan pembinaan kepada aparatur meliputi pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan aparatur (general check-up). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Jumlah ASN yang melakukan general check-up jumlahnya fluktuatif, berdasarkan jumlah ASN yang memerlukan cek Kesehatan (mengalami sakit) ataupun

CPNS yang akan dilangkat menjadi PNS. Pada tahun 2023 terdapat 388 orang yang mengikuti General Check Up.

Jumlah Aparatur yang melakukan general check up dan mengikuti Diklat purna tugas pada tahun 2019-2023 disajikan dalam Tabel II-176 berikut.

Tabel II-176 Jumlah Aparatur yang Melakukan General Check-up dan Mengikuti Diklat Purna Tugas di Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Jenis Pembinaan Memasuki Masa Pensiun	2019	2020	2021	2022	2023
General *Check-Up*	343	11	206	16	388
Diklat Purna Tugas	60	60	0	0	0

Sumber: BKPSDM Kota Pekalongan, 2024

5. Penelitian dan Pengembangan

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) sesuai dengan Permendageri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan dimaksud, perlu adanya akselerasi langkah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan yang selaras dengan tema perencanaan pembangunan serta dapat membangun langkah-langkah strategis yang menempatkan science-based policy yakni aktivitas riset sebagai basis pengambilan kebijakan yang mampu menjadi solusi atas pemasalahan yang muncul di Kota Pekalongan.

Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan diharapkan dapat mendukung Pemerintah Daerah dalam proses perumusan kebijakan dalam upaya meningkatkan daya saing daerah. Kegiatan yang rutin dilaksanakan adalah Riset Unggulan Daerah (RUD) dan fasilitasi Riset Bersama (Risber). RUD merupakan kegiatan fasilitasi pembiayaan riset yang mengarah kepada isu aktual dan strategis Kota Pekalongan, sedangkan fasilitasi Riset Bersama merupakan salah satu upaya pengambilan keputusan dan kebijakan publik berbasis fakta dan bukti ilmiah yaitu dengan memperluas mitra kerja sama di bidang penelitian dan pengkajian

Tabel II-177 Riset Unggulan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
1	2019	Model Akselerasi Pencapaian Open Defecation Free (ODF) Kota Pekalongan melalui Penguatan Kelurahan (Sebuah Strategi Percepatan Pembangunan Kesehatan Berbasis Masyarakat)	Universitas Pekalongan
2	2019	Kampung Batik Digital Berbasis Virtual Tour sebagai Wadah Promosi Batik Kota Pekalongan di Era Industri 4.0	STMIK Widya Pratama Pekalongan
3	2019	Dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap Faktor Sosial, Ekonomi dan Lingkungan di Pasar Grosir Setono	STMIK Widya Pratama Pekalongan

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
4	2019	Penggunaan Kembali Limbah Cair Batik Menjadi Air Bersih Menggunakan Metode Teknologi Membran	Universitas NU Purwokerto
5	2019	Adopsi Inovasi Media Komunikasi-Informasi-Edukasi (KIE) untuk Menguatkan Industri Kreatif Kota Pekalongan di Era Industri 4.0	STMIK Widya Pratama Pekalongan
6	2020	Studi Potensi dan Penentuan Sumur Resapan sebagai Upaya Pengendalian Banjir di Kota Pekalongan Berbasis Sistem Informasi Geografis	Universitas Diponegoro
7	2020	Strategi Mitigasi Pencegahan dan Penanggulangan *COVID-19*: Optimalisasi Peran Pentahelix di Kota Pekalongan Berdasar Pendekatan Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah	Universitas Pekalongan
8	2020	Meningkatkan Peranan Aparatur Pemerintah Tingkat RT dan RW dalam Dashboard Eksekutif untuk Memudahkan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Mengkoordinasi dan Memonitoring	STMIK Widya Pratama Pekalongan
9	2020	Desain Pendidikan Agama dalam Keluarga guna Membangun Kemampuan Problem Solving Anak	Universitas Selamat Sri
10	2020	Edukasi dan Mitigasi Bencana Banjir untuk Siaga Bencana di Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan
11	2021	Efektivitas Aplikasi Deteksi Risiko Kehamilan (ADRK) Mandiri Berbasis Android di Kota Pekalongan Tahun 2021	UMPP
12	2021	Video Teaser Batik Edu-Tourism sebagai Primadona Inovasi Daya Saing Kota Pekalongan	Universitas Pekalongan
13	2021	Implementasi Penguatan Destinasi Pariwisata Daerah Kota Pekalongan Melalui Analisis Strata Produk Unggulan dan Analisis Pesaing	Balitbang Kota Magelang
14	2022	Pemetaan Jaringan Drainase Berbasis Spasial di Kota Pekalongan	Institut Teknologi Bandung
15	2022	Studi Penanganan Genangan dan Banjir di Wilayah Kota Pekalongan Barat	Universitas Semarang
16	2022	Studi Penyusunan Zona Risiko Kerentanan Air Tanah terhadap Pencemaran Menggunakan Metode *Groundwater, Occurance, Overlaying Lithology Depth of Groundwater (GOD)* sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Pekalongan	Universitas Diponegoro
17	2022	Pengolahan Limbah Batik Menggunakan Bakteri *Indigenous* sebagai Upaya Pemulihan Indeks Kualitas Air di Kota Pekalongan	Universitas Pekalongan
18	2022	Penerapan Konsep *Water Sensitive Urban Design* untuk Mewujudkan Permukiman Pesisir Kota Pekalongan yang Tangguh	Universitas Diponegoro

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
19	2023	Analisis Lingkungan Hidup dan Pola Asuh sebagai Faktor Risiko Kejadian Stunting pada Balita Usia 6 Sampai 60 bulan di Kota Pekalongan Tahun 2023	Universitas Negeri Semarang
20	2023	Evaluasi Pembangunan Infrastruktur Pengendalian Banjir dan Rob di Kota Pekalongan dalam Perspektif Masyarakat	Universitas Terbuka
21	2023	Kajian Social Responsibility Empowerment Para Pelaku Usaha Batik dalam Pengelolaan Limbah dan Penggunaan Air Bawah Tanah di Kota Pekalongan	Universitas Pekalongan
22	2023	Land Value Capture sebagai Inovasi Pembiayaan Pembangunan Non-Pemerintah di Kota Pekalongan	Tim Peneliti UNDIP
23	2023	Pengetahun dan Persepsi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dan Konservasi Air Tanah Di Kota Pekalongan	Pusat Pusat Riset Koperasi, Korporasi Dan Ekonomi Kerakyatan – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Sumber: jarlitbangnov.pekalongankota.go.id, 2024

Riset Bersama dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau lembaga penelitian melalui penunjukan langsung. Tema yang diusung dalam riset bersama berdasarkan usulan dari OPD atau kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan sesuai dengan kebutuhan.

Tabel II-178 Riset Bersama Kota Pekalongan
Tahun 2019 - 2023

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
1	2019	Megono Kaleng Kuliner Tradisional Kota Pekalongan	Tim Peneliti Poltekkes
2	2019	Studi Konsep Pengembangan Pekalongan Baru	CV. Monalisa Art
3	2019	Road Map Percepatan Pengembangan Pariwisata Kota Pekalongan	CV. Tunas
4	2019	Penelitian Analisis Investasi Penyertaan Modal Perumda Tirtayasa	CV. Pijar Mulya Wasesa
5	2019	Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Exit Jalan Tol	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan
6	2019	Strategi Penurunan Angka Pengangguran	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan
7	2020	Analisis Strategi Recovery Kepariwisataan Kota Pekalongan pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru	DRD Kota Pekalongan
8	2020	Analisis Kebutuhan Masyarakat Terdampak Banjir Rob: Studi Kasus Kota Pekalongan	DRD Kota Pekalongan
9	2021	Efektivitas Penanganan *COVID-19* di Kota Pekalongan	Dewan Riset Daerah (DRD) Kota Pekalongan
10	2021	Pengembangan Dashboard Eksekutif untuk Sistem Monitoring Filariasis Kota Pekalongan	STMIK Widya Pratama Pekalongan

No.	Tahun	Judul	Institusi Pelaksana
11	2022	Mitigasi Dampak Banjir dan Rob terhadap Lahan Pertanian di Kota Pekalongan	Universitas Gadjah Mada
12	2023	Penelitian Penerapan Teknologi Pertanian pada Produk Tempe Di Kampung Tempe Kota Pekalongan	Universitas Gadjah Mada
13	2023	Studi Antropologi: Konstruksi Sosial pada Kemiskinan di Kota Pekalongan	Lingkar Kajian Kota Pekalongan (LKPP)

Sumber: jarlitbangnov.pekalongankota.go.id, 2024

Dalam pelaksanaan riset unggulan tidak terdapat kendala yang berarti, namun demikian perlu dilakukan pemetaan kebutuhan riset yang sistematis serta publikasi yang lebih luas untuk mendapatkan penelitian yang lebih tepat sasaran. Penelitian juga diharapkan dapat meningkatkan kerjasama Bappeda dengan Perguruan Tinggi di sekitar Kota Pekalongan, Perguruan Tinggi Nasional ataupun dengan Badan Riset Inovasi Nasional.

RUD dan Riset Bersama yang dilakukan dalam kerangka menjembatani penelitian terhadap kebijakan (*bridging knowledge to policy*) di wilayah Kota Pekalongan. Tema RUD dan Riset Bersama yang dilakukan didasarkan atas isu strategis pembangunan, yaitu isu strategis RKPD Kota Pekalongan. Seleksi pelaksana RUD dan Riset Bersama didasarkan atas inovasi yang akan dikembangkan oleh pelaksana terhadap isu strategis pembangunan. RUD dan Riset Bersama memiliki sasaran merumuskan kebijakan pembangunan, sebagai inovasi pembangunan, dalam kerangka pembangunan Kota Pekalongan. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi merupakan bagian integral dari pemangku kepentingan pembangunan serta memiliki kemampuan yang dapat dioptimalkan dan diintegrasikan dalam perumusan kebijakan pembangunan.

Di sisi lain, tantangan penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah bagaimana terus meningkatkan peran perguruan tinggi di wilayah Kota Pekalongan untuk semakin besar berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Hal ini didasarkan kondisi bahwa perguruan tinggi di wilayah Kota Pekalongan lebih memahami permasalahan maupun isu strategis pembangunan, sehingga diharapkan memiliki penguasaan permasalahan yang lebih baik, dalam pengembangan kebijakan pembangunan Kota Pekalongan.

2.1.3.6 Unsur Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada beberapa objek pemeriksaan meliputi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Tujuan ditetapkan Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan adalah:

(1) Menyinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota;

(2) Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP;

(3) Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai *Quality Assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Kebijakan

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan melalui Pengawasan umum dan teknis yang dilakukan dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya. Pemeriksaan reguler adalah pemeriksaan kinerja yang dilakukan secara komprehensif dengan ruang lingkup pemeriksaan pada aspek kebijakan daerah, kelembagaan, pegawai daerah, keuangan daerah dan barang daerah.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah/APIP mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap tugas dan fungsi organisasi.

APIP melakukan penilaian kematangan/maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD. Semakin tinggi maturitasnya semakin baik pula kualitas sistem pengendalian intern organisasi itu. Dalam Maturitas SPIP terkandung unsur Manajemen Resiko Indeks/MRI, yaitu Indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Sasaran Program terkait Pembinaan SPIP dan Manajemen Resiko yaitu Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. Pada tahun 2021 Kota Pekalongan telah melakukan penilaian terhadap MRI.

Tingkat kematangan SPIP Kota Pekalongan dari tahun 2019 sampai 2020 terus meningkat, diawali dari level 3 dengan catatan sampai level 3 penuh, namun turun di tahun 2021 menjadi level 2 dengan skor : 2,812 dan meningkat kembali menjadi level 3 di tahun 2022 dan tahun 2023 dengan target kinerja akhir maturitas 5. Penurunan tingkat kematangan SPIP Kota Pekalongan antara lain adanya perubahan dalam Uraian Indikator Karakteristik Pengendalian dan belum optimalnya penerapan SPIP. Penguatan APIP diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan. 3 (tiga) area penguatan pengawasan APIP Inspektorat Kota Pekalongan adalah: Aspek kelembagaan untuk memperkuat independensi para APIP; Aspek Sumber Daya (Sumber daya anggaran untuk menjamin kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan, dan Sumber daya manusia baik jumlah maupun kompetensi teknis) dan Aspek Tata Kelola (Pelaporan pengawasan berindikasi KKN, Standar Pengawasan, dan Penjaminan Mutu).

Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-179 berikut.

Tabel II-179 Tingkat Kematangan SPIP Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tingkat Maturitas SPIP	2019	2020	2021	2022	2023
Level	Level 3 Penuh	Level 3 Penuh	Level 2 2,812	Level 3 3,022	Level 3 3,002

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2024

2.1.3.7 Unsur Pemerintahan Umum

1. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas daerah di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2019 - 2023 secara umum menunjukkan situasi yang aman dan tertib. Pada tahun 2023 masih terjadi gangguan keamanan antara lain penganiayaan, pencurian, penipuan dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Jumlah kasus yang naik yaitu penganiayaan, pencurian dan penipuan, sedangkan jumlah kasus yang menurun yaitu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Selengkapnya disajikan dalam Tabel II-180 berikut.

Tabel II-180 Banyaknya Kasus Tindak Kejahatan yang Terjadi di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tindak Kejahatan	2019	2020	2021	2022	2023
Pembunuhan	0	2	0	0	0
Pemerkosaan	0	0	2	0	0
Penganiayaan	7	3	2	13	6
Pencurian	71	33	59	81	72
Penipuan	19	18	2	31	6
Penadahan	0	0	0	0	0
Narkotika dan Psikotropika	44	64	46	39	49

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2024

Kondusivitas wilayah juga dipengaruhi oleh terjadinya konflik sosial. Berbagai upaya preventif telah dilakukan dalam rangka mencegah potensi kerawanan sosial menjadi konflik sosial. Tabel II-181 menunjukkan data konflik sosial di Kota Pekalongan dalam kurun waktu 2019-2023.

Tabel II-181 Jumlah Kasus Konflik Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus Konflik Sosial	1	1	2	0	0

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2024

Berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka tindakan preventif agar tidak muncul konflik sosial. Pengelolaan potensi konflik sosial dilakukan melalui Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, antara lain dengan kegiatan Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama, Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar Dan Mahasiswa, Pembinaan Karakter Dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi Aparatur, Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda, Pengawasan Orang Asing, Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial, dan Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah.

2. Politik

Kondisi politik Kota Pekalongan dapat digambarkan melalui pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, serta Pemilukada yang berjalan tertib dan demokratis tanpa disertai pengerahan massa yang berujung tindakan anarkis. Pembinaan politik dilakukan setiap akan diselenggarakan pemilihan umum.

Tabel II-182 Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Kegiatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kegiatan pembinaan Politik Daerah	32	38	36	34	48

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2024

Tingkat partisipasi politik ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pamilu, baik Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah (Gubernur dan Wali Kota) dan Pemilu Legislatif. Pada tahun 2020 telah diadakan pemilihan Wali Kota dan

Wakil Wali Kota Pekalongan dengan tingkat partisipasi di Kota Pekalongan sebesar 79,35 persen.

Tabel II-183 Tingkat Partisipasi Politik di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

JENIS PEMILIHAN UMUM	2019	2020	2021	2022	2023
Pemilu Kepala Daerah (Wali Kota) (persen)	-	79,35	-	-	-
Pemilu Kepala Daerah (Gubernur) (persen)	-	-	-	-	-
Pemilu Presiden (persen)	85,88	-	-	-	-
Pemilu Legislatif (persen)	85,51	-	-	-	-

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2024

3. Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Sebagai upaya pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) selama kurun waktu 2017-2021 telah dilakukan kegiatan pendayagunaan potensi LSM, Ormas dan OKP. Kegiatan tersebut diupayakan terus meningkat, dimana pada tahun 2018 dan 2019 sebanyak 1 kali, tahun 2020 sebanyak 3 kali, tahun 2021 sebanyak 7 kali dan tahun 2022 sebanyak 2 kali, tahun 2023 sebanyak 7 kali.

Tabel II-184 Jumlah Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP Tahun 2019 - 2023

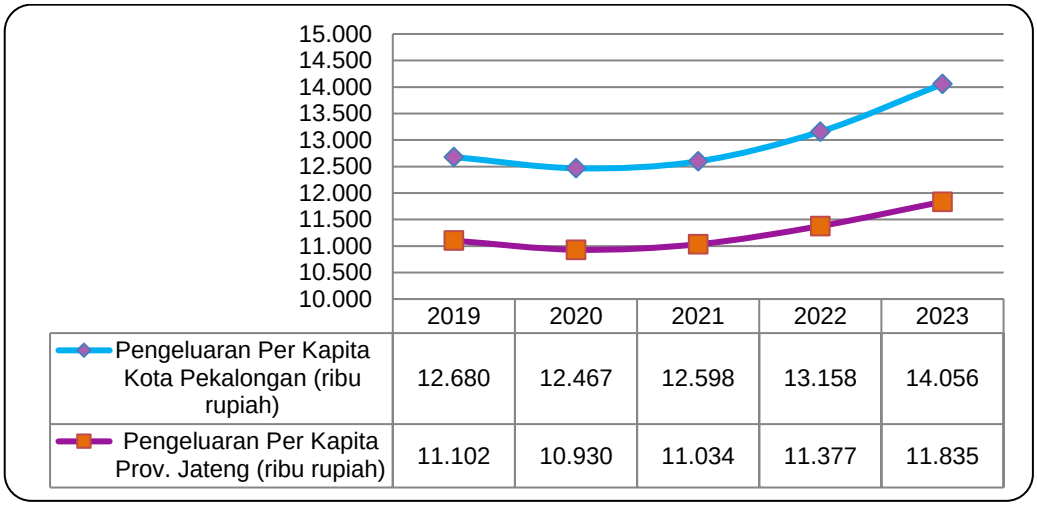
Kegiatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	1	3	7	2	7

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2024

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

Salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi suatu daerah adalah pengeluaran konsumsi per kapita yang disesuaikan. Indikator ini menunjukkan derajat daya beli masyarakat terhadap barang atau jasa. Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin meningkat.



	2019	2020	2021	2022	2023
Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan (ribu rupiah)	12.680	12.467	12.598	13.158	14.056
Pengeluaran Per Kapita Prov. Jateng (ribu rupiah)	11.102	10.930	11.034	11.377	11.835

Gambar II-50 Pengeluaran Per Kapita Kota Pekalongan dan Provinsi Jateng Tahun 2019-2023

Sumber: www.jateng.bps.go.id, 2022

Pengeluaran per kapita menunjukan tingkat kesejahteraan penduduknya pada suatu wilayah. Kesejahteraan penduduk Kota Pekalongan terus meningkat sepanjang 2019-2023. Pada tahun 2019, pengeluaran per kapita sebesar Rp.12.680.000, kemudian mengalami penurunan menjadi Rp.12.467.000 pada tahun 2020. Di tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 12.598.000, dan di tahun 2022 meningkat menjadi Rp.13.158.000. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita Kota Pekalongan meningkat menjadi sebesar Rp.14.056.000.

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah kendaraan. Kondisi transportasi di Kota Pekalongan menunjukkan jumlah kendaraan cukup fluktuatif (baik kendaraan roda dua, roda tiga, dan roda empat/lebih), dimana sepanjang tahun 2018 sampai 2021 jumlahnya naik turun. Adapun penambahan panjang jalan raya baik jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota secara agregat tidak mengalami pertumbuhan signifikan. Namun demikian rasionya tidak berubah signifikan. Pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 0,0002. Kondisi selengkapnya disajikan dalam Tabel II-185.

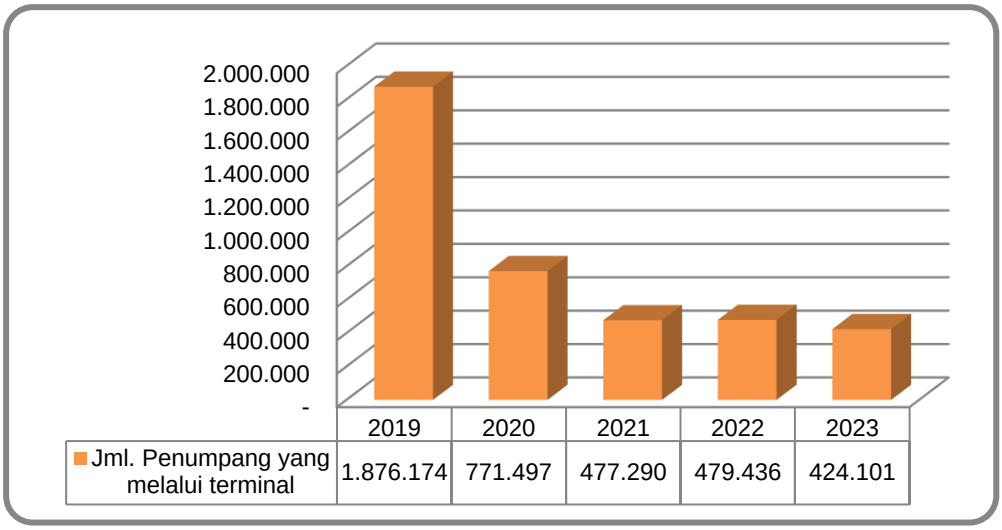
Tabel II-185 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
2019	155,44	163.989	0,0009
2020	153,41	173.114	0,0009
2021	153,41	122.590	0,0013
2022	153,41	572.435	0,0003
2023	150,27	612.019	0,0002

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka 2023 dan Dinas Perhubungan Kota pekalongan, 2024

2. Jumlah Orang yang Melalui Terminal Per Tahun

Terminal tipe A terdapat di Kota Pekalongan yang dapat dimanfaatkan sebagai terminal untuk bis antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi dan dalam kota. Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan atas Terminal Type A ada di Pemerintah Pusat. Jumlah orang yang melalui terminal Kota Pekalongan mengalami penurunan drastis dari tahun 2019 1.876.174 penumpang menjadi 424.101 penumpang di tahun 2023. Adapun perkembangannya disajikan dalam Gambar II-51 berikut.

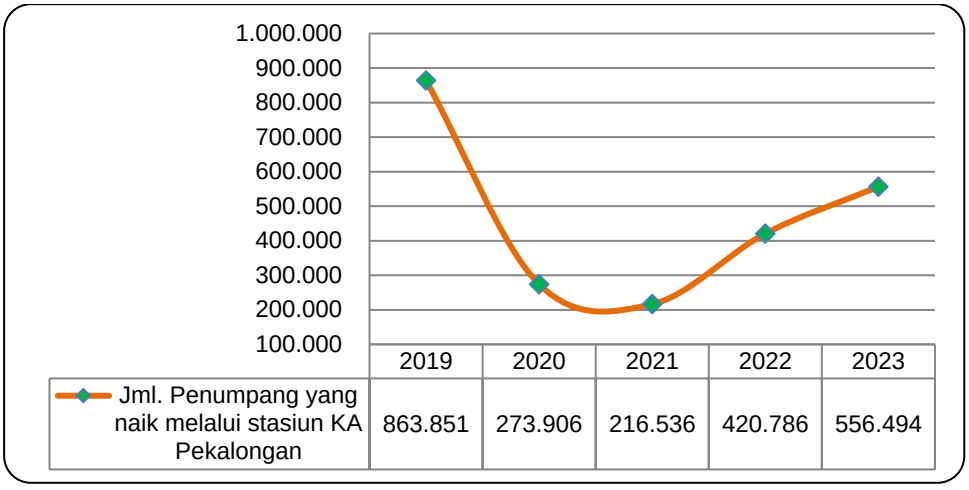


Gambar II-51 Jumlah Penumpang yang Melalui Terminal Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 dan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2024

3. Jumlah Penumpang yang Naik Melalui Stasiun Kereta Api

Sebagai salah satu kota utama di Jawa Tengah, Kota Pekalongan memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomiannya melalui kunjungan yang dilakukan orang luar daerah. Penggunaan moda transportasi darat seperti kereta api menjadi salah satu moda yang paling digemari karena lebih mudah, cepat dan memiliki ketepatan waktu lebih tinggi serta letak Stasiun Besar Pekalongan yang berada di kawasan pusat kota. Di samping itu, fasilitas hotel yang dekat dengan stasiun memudahkan penumpang mencari tempat beristirahat.



Gambar II-52 Jumlah Penumpang yang Melalui Stasiun Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

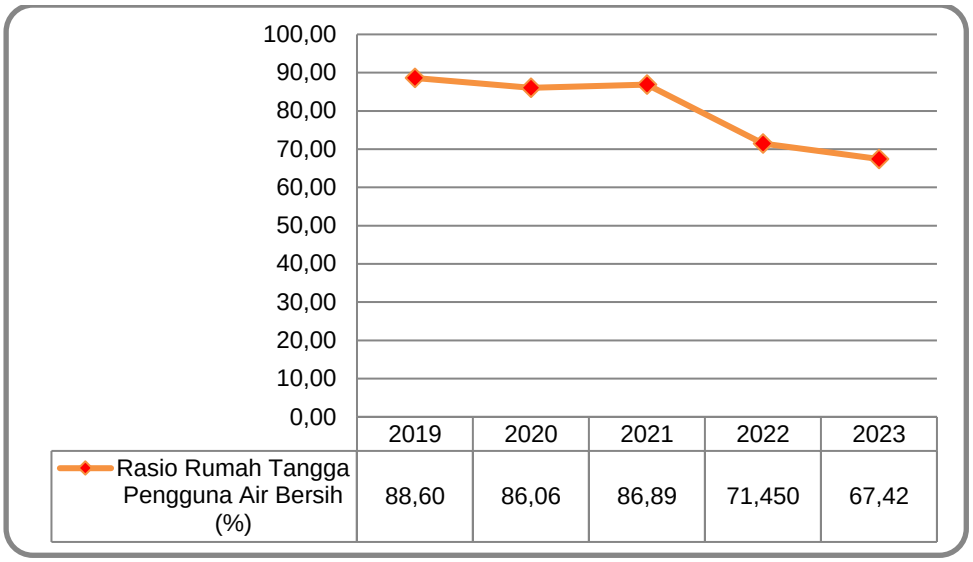
Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Jumlah penumpang yang melalui Stasiun Pekalongan sangat fluktuatif setiap tahunnya seperti yang disajikan dalam Gambar II-52. Tahun 2019 jumlah orang yang naik melalui stasiun sebanyak 863.851 penumpang. Namun jumlah penumpang menurun drastis mulai tahun 2020 sampai tahun 2021 sebanyak 273.906 dan 216.536 penumpang. Hal ini disebabkan adanya larangan bepergian keluar daerah karena adanya pandemi *COVID-19*. Jumlah penumpang yang melalui Stasiun Pekalongan meningkat kembali di tahun 2023 sebanyak 556.494.

Kondisi seperti yang diuraikan di atas menggambarkan peranan moda transportasi kereta api yang saat ini lebih menjadi pilihan masyarakat yang akan menuju maupun dari Kota Pekalongan, dibandingkan angkutan umum lainnya yaitu yang menggunakan moda transportasi bus. Pengembangan moda transportasi bus agar lebih dapat berkompetisi ke depan, membutuhkan penyediaan prasarana jalan regional dengan kapasitas yang memadai sehingga perjalanan menjadi lancar serta membutuhkan dukungan fasilitas terminal bus, apalagi di Kota Pekalongan terdapat terminal tipe A yang mulai tahun 2017 menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

4. Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih

Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan air bersih di Kota Pekalongan. Pemenuhan kebutuhan air minum di Kota Pekalongan dilayani melalui PDAM (oleh Perumda Tirtayasa) dan melalui PAMSIMAS (oleh masyarakat). Secara umum, jumlah layanan air minum (Sambungan Rumah/ SR) oleh PDAM cenderung meningkat. Sebaliknya, jumlah layanan air minum (Sambungan Rumah/ SR) oleh PAMSIMAS cenderung menurun / tetap. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menambah pasokan air minum yang bersumber dari air permukaan di banding dengan air bawah tanah. Meskipun demikian, secara keseluruhan (PDAM dan PAMSIMAS), jika dilihat secara persentase capaian layanan air minum sejak 2019 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun sebagaimana Gambar II-53.



	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	88,60	86,06	86,89	71,450	67,42

Gambar II-53 Persentase Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: DPUPR, Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan (diolah), 2024

Menurunnya rasio rumah tangga pengguna air bersih yang terjadi pada tahun 2022 dikarenakan perbedaan cara menghitung daekspori tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, diasumsikan 1 SR melayani 4,03 jiwa sebagaimana hasil audit BPKP atas kinerja Perumda Tirtayasa tahun 2023 (mengacu pada data BPS yang diperoleh dari pembagian jumlah penduduk dengan jumlah Kartu Keluarga (KK)). Sementara itu, cara menghitung pada tahun-tahun sebelumnya diasumsikan 1 SR melayani 5 jiwa. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel II-186 berikut.

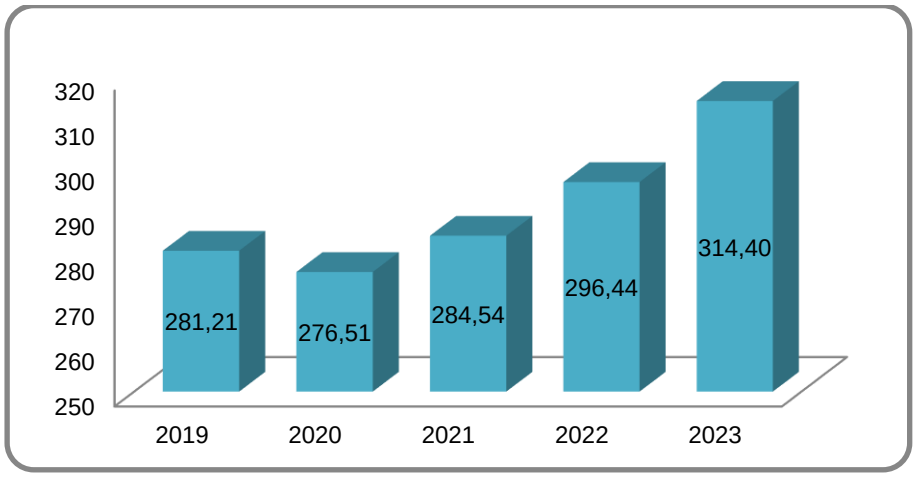
Tabel II-186 Penggunaan Air Tanah Untuk Kebutuhan Sambungan Rumah (SR) di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Tahun	PDAM					PAMSIMAS & DAK (Sumur)		TOTAL		Persentase	
	SR (Sambungan Rumah)		HU (Hidran Umum)								
	Jumlah	Jiwa	Jumlah HU	Jumlah Rumah Tangga	Jiwa	Jumlah	Jiwa	Rumah Tangga	Jiwa	Rumah Tangga	Jiwa
2019	27.017	135.085	240	4.800	24.000	21.712	108.560	53.529	267.645	88,26	88,26
2020	27.565	137.825	246	4.920	24.600	21.933	109.665	54.418	272.090	88,60	88,60
2021	26.923	134.615	214	4.280	21.400	21.663	108.315	52.866	264.330	86,06	86,06
2022	27.193	135.965	214	4.280	21.400	22.103	110.515	53.576	267.880	86,89	86,89
2023	28.035	112,981	251	6.228	25.100	21.150	85.235	62.100	317.524	67,42	67,42

Sumber: DPUPR, Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan (diolah), 2024

5. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Listrik di Kota Pekalongan disediakan oleh PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan distribusi listrik di area pelayanan Pekalongan. Kebutuhan yang terus meningkat, meningkatkan konsumsi listrik masyarakat Kota Pekalongan dari tahun ke tahun. Kebutuhan listrik di Kota Pekalongan dari tahun ke tahun berfluktuasi. Konsumsi listrik selama tiga tahun terus meningkat. Pemakaian listrik tahun 2019 sebesar 281,21 MWh, maka pada akhir tahun 2023 sebesar 314,40 MWh. Berikut gambaran kebutuhan listrik Kota Pekalongan dari tahun 2019-2023.



Gambar II-54 Ketersediaan Listrik di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

6. Persentase Pengguna Listrik

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik bertambah sepanjang tahun 2019-2023 sehingga meningkatkan konsumsi listrik di Kota Pekalongan. Jumlah pengguna listrik berdasarkan data BPS selama lima tahun terakhir menunjukkan bertambahnya jumlah pelanggan PLN, terdiri dari pelanggan rumah tangga dan pelanggan non rumah tangga seperti kantor, badan usaha atau pelanggan lain. Persentase jumlah pelanggan PLN pada tahun 2019 sebesar 121,44 persen. Jumlah tersebut menurun 113,07 persen pada tahun 2019. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 101,50 persen dan meningkat kembali di tahun 2022 mencapai 113,25 dan meningkat cukupo signifikan pada tahun 2023 mencapai 130,94. Secara lengkap disajikan dalam Tabel II-187 berikut.

Tabel II-187 Persentase RT yang menggunakan Listrik Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Pengguna Listrik	Jumlah RT	Persentase Pengguna Listrik
2019	92.622	76.269	121,44
2020	95.313	84.296	113,07
2021	97.567	96.121	101,50
2022	99.388	87.758	113,25
2023	101.186	77.275	130,94

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2024, 2024

7. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/ Hotel

Jumlah hotel di Kota Pekalongan saat ini cukup memadai. Tingkat okupansi tahun 2019 sebesar 75 persen, sangat memadai sebagai daerah tujuan wisata bagi Kota Pekalongan dan sekitarnya. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019-2023 jumlah hotel berbintang, baik bintang 1, 2,dan 3 sebanyak 10 (sepuluh) hotel. Sedangkan hotel melati berjumlah 20 (dua puluh) hotel pada tahun 2019 dan 25 (dua puluh lima) hotel pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dan bertambah menjadi 26 (dua puluh enam) pada tahun 2023. Tersedianya berbagai pilihan hotel maka berpeluang bagi pengembangan kepariwisataan di wilayah Kota Pekalongan dan sekitarnya. Hal yang menjadi tantangan kepariwisataan, di samping membutuhkan obyek dan daya tarik wisata maka kebutuhan utama lainnya adalah tersedianya akomodasi yang memadahi salah satunya yakni hotel.

Tabel II-188 Jumlah dan Tipe Akomodasi Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Akomodasi	2019	2020	2021	2022	2023
Hotel Berbintang	10	10	10	10	10
Hotel Non Berbintang	20	25	25	25	26

Sumber: Kota Pekalongan dalam Angka 2024 dan Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2024

2.1.4.3 Fokus Iklim Investasi

1. Lama Proses Perijinan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Penyelenggara PTSP di Kota Pekalongan adalah Pemerintah Kota Pekalongan yang bertujuan untuk: memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; memperpendek proses pelayanan; mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau; mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) pelayanan penerbitan izin dan lama proses permohonan izin, berbeda-beda sesuai dengan jenis izinnya. Sampai dengan tahun 2023, telah dibuka layanan perizinan untuk Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha, Pelayanan Perizinan Non Berusaha dan/ atau Persetujuan Pemerintah, dan Pelayanan Non Perizinan. Dimana lama proses perizinan bervariasi antara rentang waktu 1-30 hari. Dengan adanya SOP lamanya proses perizinan,

Pemerintah Kota Pekalongan berupaya memberikan jaminan kepastian waktu proses perizinan.

2. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Iklim investasi di suatu daerah sangat ditentukan kebijakan daerah yang mendukung pengembangan investasi/usaha. Kebijakan itu terutama dalam bentuk peraturan daerah yang terkait penciptaan iklim usaha yang kondusif. Paling tidak tercatat 20 Perda yang mendukung penciptaan iklim usaha kondusif di Kota Pekalongan tersebut, sebagaimana disajikan dalam Tabel II-189 berikut.

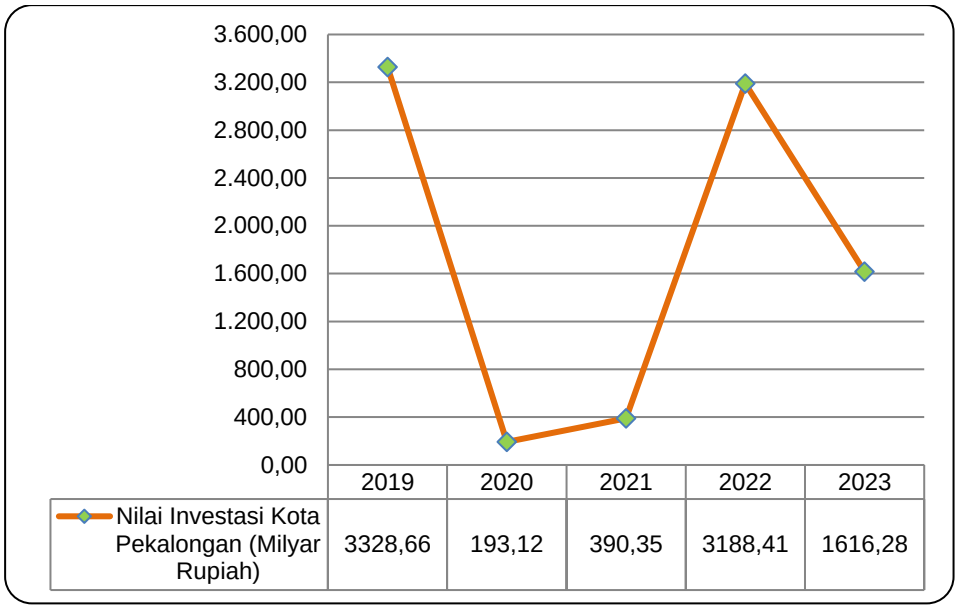
Tabel II-189 Peraturan Daerah yang Mendukung Iklim Usaha

No	Nomor Perda	Tahun	Tentang
1	3	2009	Bangunan Gedung
2	12	2011	Pajak Reklame
3	30	2011	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
4	28	2011	Rumah Pemotongan Hewan Dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan
5	10	2011	Pajak Sarang Burung Walet
6	13	2012	Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
7	20	2012	Perizinan Dan Sertifikat Bidang Kesehatan
8	8	2012	Penanaman Modal
9	15	2015	Penyelenggaraan Rumah Kos
10	13	2015	Penyelenggaraan Perhubungan
11	16	2015	Penyelenggaraan Usaha Warung Internet
12	11	2017	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
13	13	2018	Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14	1	2018	Izin Usaha Industri
15	7	2018	Penyelenggaraan Pendidikan
16	19	2019	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
17	1	2020	Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan Tahun 2020-2040
18	9	2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029
19	9	2022	Penyelenggaraan Penanaman Modal
20	5	2023	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, 2024

3. Nilai Investasi

Pemerintah Kota Pekalongan terus mendukung upaya pencapaian realisasi investasi dari tahun ke tahun melalui berbagai kebijakan dan aturan. Dengan keterbatasan wilayah dan sumber daya alam, Kota Pekalongan juga berusaha menciptakan kondisi daerah yang pro investasi yaitu dengan menguatkan perekonomian di sektor jasa dan perdagangan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Pekalongan. Dan berikut disajikan data perkembangan investasi di Kota Pekalongan.

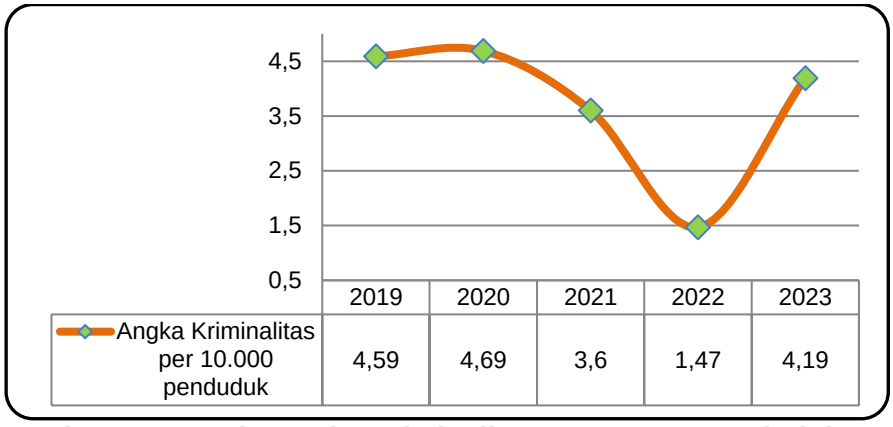


Gambar II-55 Perkembangan Nilai Investasi di Kota Pekalongan Tahun 2019-2023

Sumber: DPMPTSP Kota Pekalongan, 2024

4. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung per 10.000 penduduk, dimana secara garis besar angka kriminalitas di Kota Pekalongan bersifat fluktuatif, mengalami naik turun sepanjang lima tahun terakhir seperti yang disajikan dalam Gambar II-56 berikut.



Gambar II-56 Rasio Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2023

Sumber: Badan Kesbangpol Kota Pekalongan, 2024

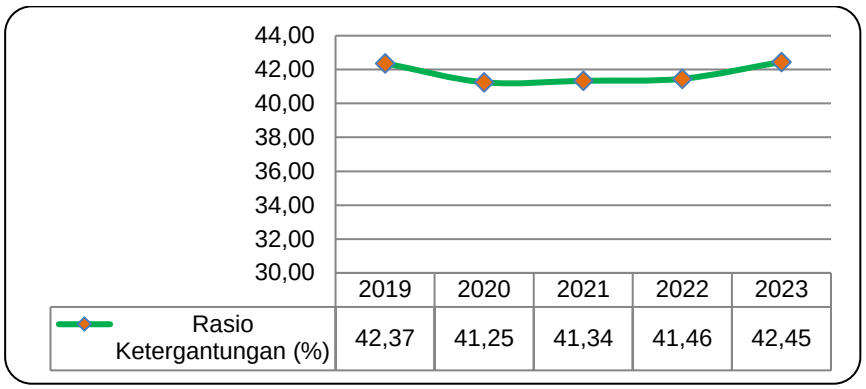
Meskipun demikian, kondusivitas di Kota Pekalongan masih terkendali sehingga masih menguntungkan bagi kehidupan masyarakat sehingga dapat lebih aman dan nyaman serta berimplikasi bagi pengembangan investasi.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan perbandingan (persentase) penduduk usia 0-14 dan di atas 65 dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15-64). Dalam kurun waktu 2017 - 2020, rasio ketergantungan Kota Pekalongan terus menurun. Pada tahun 2017, rasio ketergantungan penduduk di Kota Pekalongan sebesar 42,64 dan pada tahun 2020 menjadi 41,25. Namun meningkat di tahun 2021 dan 2022 menjadi 41,34 dan 41,46.

Dengan kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan ke depan. Data secara rinci disajikan dalam Gambar II-57 berikut.



Gambar II-57 Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Pekalongan Tahun 2019 - 2024

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2024 (diolah), 2024

2.1.4.5 Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Sistem Inovasi Daerah merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik, berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar stakeholders pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusi inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah, Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah. Yang kemudian menjadi dasar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Peraturan tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mendorong Sistem Inovasi Daerah yang ada di daerahnya, sehingga terbentuk keselarasan dalam pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Daya saing daerah Kota Pekalongan ditunjukkan dari indikator indeks daya saing daerah (IDSD). Pemetaan ekosistem inovasi melalui pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional bertujuan menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas nilai tambah dan persaingan, demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Berdasarkan capaian Tahun 2023, Kota Pekalongan dengan nilai indeks sebesar 3,60 menunjukkan bahwa Kota Pekalongan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten sekitar, yakni Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.

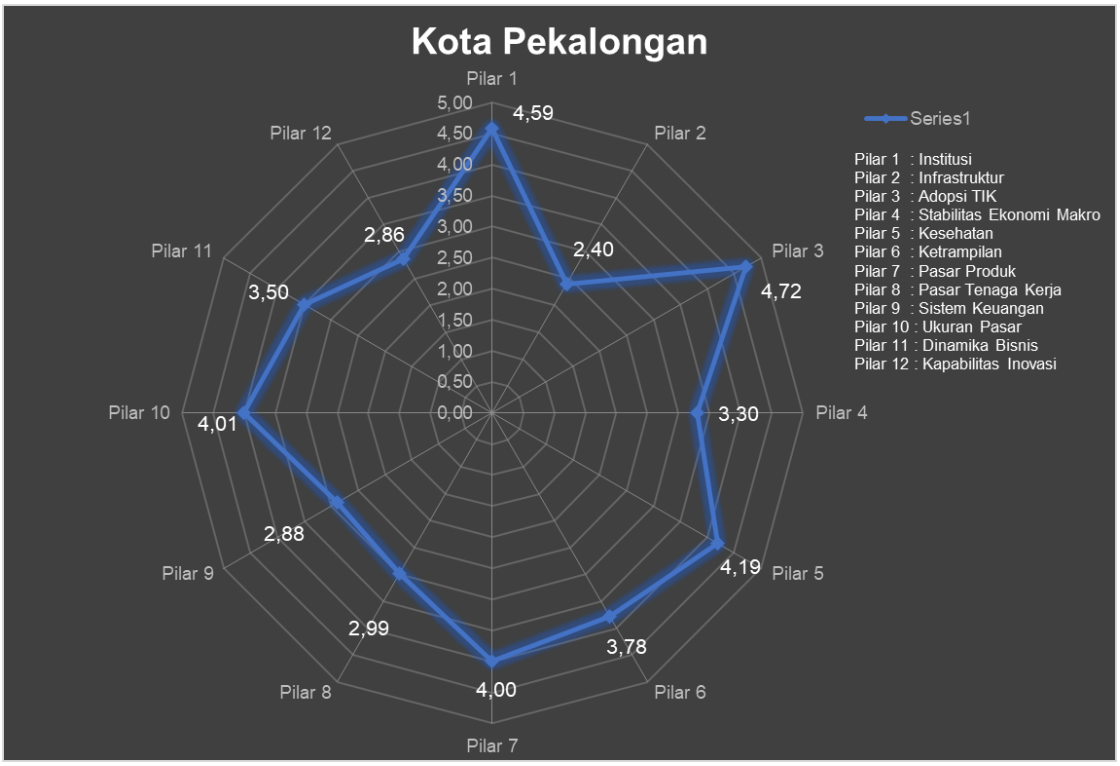
Tabel II-190 Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Pekalongan dan Kabupaten/Kota Sekitarnya Tahun 2019 - 2023

No	Kab/Kota	Nilai Indeks				
		2019*	2020*	2021*	2022	2023
1	Kota Pekalongan	6,345	3,676	3,418	3,14	3,60
Persandingan dengan kabupaten sekitar						
2	Kab. Pekalongan	5,821	3,613	3,395	2.91	3,36
3	Kab. Batang	6,091	3,368	3,403	2.97	3,32
4	Kab. Pemalang	4,642	3,063	2,848	2,93	3,20
Persandingan dengan kota di Jawa Tengah						
5	Kota Tegal	6,789	3,755	3,298	3,30	3,63
6	Kota Salatiga	6,448	3,568	3,430	3,40	3,77
7	Kota Magelang	4,833	3,259	3,130	3,50	3,81

*Terdapat perubahan metode pengukuran IDSD antara tahun 2018-2021 dan Tahun 2022. Tahun 2018-2021 menggunakan kuesioner yang diisi oleh Pemerintah Provinsi/Kab/Kota sedangkan pada Tahun 2022, pengukuran dilakukan mandiri oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Sumber: idsd.jateng.id (diolah), 2024

Secara lebih rinci, Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) diukur melalui 4 aspek, yang meliputi 12 pilar (Institusi, Instruktur, Adopsi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Porduk, Pasar Tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamisme Bisnis, Kapabilitas Inovasi). Capaian Kota Pekalongan berdasarkan skor pilar dalam ekosistem inovasi dapat digambarkan dalam diagram sebagai berikut.



Gambar II-58 Daya Saing Daerah Berdasarkan Skor Pilar Dalam Ekosistem Inovasi

Sumber: diolah dari hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) BRIN

Berdasarkan capaian diatas, masih terdapat beberapa skor pilar yang perlu menjadi perhatian dalam rangka peningkatan capaian Indeks Daya Saing Daerah, antara lain

infrastruktur, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, kapasitas inovasi. Hal ini disebabkan karena capaian pilar masih di bawah angka 3 (tiga).

Disamping itu, berdasarkan tolak ukur kondisi Inovasi Daerah melalui penilaian Indeks Inovasi Daerah dari Kemendagri, Kota Pekalongan termasuk kategori Inovatif untuk kategori Kota (Peringkat 31 dari 93 Kota se Indonesia) dengan nilai 57,84 di Tahun 2023. Indeks inovasi tersebut meningkat cukup signifikan dibanding capaian tahun 2022 (53,96).

Dalam rangka mengembangan inovasi lebih lanjut, Kota Pekalongan menyelenggarakan Penilaian Inovasi Daerah yang menetapkan Inovasi Daerah Tahun 2023, menetapkan pemenang inovasi tahun 2023 dan inisiasi inovasi tahun 2024, serta inisiasi inovasi yang mendapatkan pembiayaan APBD tahun 2024. Berikut ini gambaran inovasi yang telah dilakukan Kota Pekalongan tahun 2021-2023, yang meliputi:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintah Daerah

Dalam hal inovasi tata kelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam membangun dan mengembangkan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, atau lebih dikenal dengan istilah *e-Government*. Infrastruktur jaringan (disebut Batiknet) serta berbagai aplikasi telah dibangun sejak tahun 2008 dan terus dikembangkan hingga sekarang. Hampir semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terkoneksi jaringan Batiknet, baik menggunakan serat optik maupun radio *wireless*. Lebih dari 50 SIM (Sistem Informasi Manajemen)/aplikasi telah dibangun guna mendukung tata kelola yang lebih baik.

Pada tahun 2023, telah disusun inovasi yang terkait tata kelola pemerintah daerah, antara lain sebagai berikut:

a. SEKSAMA (Sistem Evaluasi Kinerja Satu Masukan) merupakan aplikasi yang mengintegrasikan laporan evaluasi kinerja. Yakni RPJMD, RKPD, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dukungan data LKPJ dan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). Sekali input, semua laporan evaluasi akan tersaji dalam “Seksama”. Aplikasi ini meningkatkan efisiensi kinerja evaluasi. Aplikasi ini juga telah memformulasikan tipe indikator dan tipe capaian indikator. Sehingga akuntabilitas evaluasi kinerja akan lebih baik. Dengan inovasi ini akan mempermudah melakukan transparansi kegiatan-kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan evaluasi. Adanya aplikasi ini, masyarakat bisa dengan mudah mengawasi kinerja pemerintah, memberikan masukan dan evaluasi untuk perbaikan.
b. Si Mantap Bisa Reborn merupakan sistem informasi pengelolaan tambahan penghasilan ASN Kota Pekalongan berdasarkan kedisiplinan dan produktivitas kerja ini dilakukan pengembangan sebagai berikut : Penyesuaian proses bisnis penyusunan SKP, Penerapan dialog kinerja, Pemberlakuan verifikasi dan evaluasi kinerja bulanan, dan Penilaian perilaku kerja. Dimana poin-poin tersebut tidak diakomodir pada SIMANTAP BISA versi lama.
c. Sinoreg (Sistem informasi penomeran register) adalah Sistem aplikasi untuk pelayanan penomoran produk hukum. Dengan dibuatnya aplikasi SINOREG data yang diinput dapat langsung dicetak sehingga mempercepat dan mempermudah pelayanan serta pengolahan data dan laporan produk hukum.
d. Si-Pandai (Sistem Informasi Pelayanan Digital Kepegawaian Terintegrasi) Sebelum ada aplikasi Si-Pandai, aplikasi yang ada masih berdiri sendiri-sendiri, misalnya aplikasi : E-Kenaikan Pangkat, E-Pensiun, E-Kakak (Karis, Karsu, Karpeg), maupun E-MPP (Masa Persiapan Pensiun), namun setelah adanya aplikasi Si-Pandai, input dokumen cukup sekali data langsung terintegrasi. Sehingga tidak berulang-ulang. Prosesnya langsung bisa dilakukan ASN sehingga lebih akurat, karena usulan dari ASN itu sendiri, sehingga berusaha menyajikan data yang benar.

e. Pengembangan Sistem Informasi Geografis Aset Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kota Pekalongan. Penggunaan SIG Aset untuk mempermudah prosess pengawasan, pengendalian, dan pengamanan tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan.

f. E-SILA FORWISE merupakan sebuah sistem informasi layanan wisata berbasis website yang digagas oleh TWL Pantai Pasir Kencana Pekalongan. Inovasi esila forwise dibuat untuk meningkatkan promosi kepada stakeholder terkait dengan layanan secara online seperti pelaku usaha kepariwisataan,biro tour,OPD,event organizer. Sistem ini memberikan informasi yang terkini tentang obyek wisata Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan kepada para pengunjung dan para stakeholder pelaku usaha pariwisata, termasuk didalamnya adalah bentuk transparansi informasi regulasi untuk meningkatkan kepercayaan publik dalam menjalin Kerjasama dengan UPTD Pantai Pasir Kencana didalam pelaksanaan suatu event kegiatan

g. Simantu (Sistem Informasi Monitoring Administrasi Keuangan Satu Pintu) DPUPR Kota Pekalongan adalah sebuah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan dan mempercepat pelayanan administrasi keuangan. pelayanan ini membatasi kontak langsung dengan pengguna layanan dengan para pengambil keputusan pada DPUPR Kota Pekalongan sehingga mengurangi kemungkinan fraud, korupsi dan kolusi.

2. Inovasi Pelayanan Publik

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang prima dan dituntut untuk terus melahirkan inovasi-inovasi. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Pekalongan yang berupaya membuat inovasi-inovasi untuk pelayanan publik dalam beberapa tahun terakhir, antara lain sebagai berikut:

a. SI AAP MLAKU (Siap Melayani Administrasi Perizinan Melalui Layanan Keliling Terpadu) Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan. Inovasi ini dibentuk karena semua layanan yang ada di DPMPTSP, baik perizinan berusaha, perizinan non berusaha dan pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara online. Masyarakat dapat mengakses portal yang tersedia seperti OSS untuk perizinan berusaha atau Aplikasi New SAKPORE untuk perizinan non berusaha. Namun tidak semua masyarakat paham terkait teknologi terutama pelayanan publik berbasis digital seperti aplikasi OSS dan aplikasi New SAKPORE. Beberapa masyarakat masih ada yang kurang memahami teknologi dan masih ada yang minim pengetahuan terkait pentingnya legalitas perizinan baik perizinan berusaha maupun perizinan non berusaha. Sehingga dengan permasalahan tersebut DPMPTSP Kota Pekalongan hadir di tengah-tengah masyarakat melalui inovasi SI AAP MLAKU ini untuk mengsosialisasikan dan membantu masyarakat dalam hal pengurusan perizinan dengan bergerak keliling ke satu tempat ke tempat lain yang membutuhkan pelayanan perizinan.

b. SeRuang (Sistem Elektronik Ruangan) adalah sistem elektronik berbasis website untuk peminjaman ruangan yang ada di Sekretariat Daerah Kota Pekalongan. Banyak fitur beragam, seperti input peminjaman ruangan, daftar peminjaman ruangan, Rating penggunaan aplikasi, dan fitur masukan, saran dan pujian.

c. M-PATI adalah sistem untuk mendata penduduk yang sudah meninggal agar dapat dilaporkan langsung ke pemerintah untuk diperbarui sehingga dapat menghasilkan data yang valid. Sistem ini memberikan data kependudukan yang valid yang diperlukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakkan hukum dan pencegahan kriminal sehingga dapat mendukung berjalannya program layanan administrasi kependudukan di kota pekalongan dengan baik.

d. SiMANTAN (Sistem Informasi dan Pelayanan Pemanfaatan Ruang Kota Pekalongan) Sistem Informasi tata ruang menampilkan peta administrasi,peta tematik, peta dasar, peta struktur ruang, peta pola ruang. Selain peta, terdapat menu layanan untuk permohonan pengurusan KRK, Siteplan dan Dokumen Kajian KKPR Berusaha. Serta dilengkapi menu Pengaduan, sehingga masyarakat yang mengetahui ada pelanggaran pemanfaatan ruang bisa dapat memberikan informasi dengan cepat dan mudah.

e. Oops Mami (Omah Olah Pilah Sampah MAndiri dan berekonoMi) (2022), inovasi pengolahan sampah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, dimana proses *Reuse, Reduce*, dan *Recycle* dilakukan dengan mesin pemilah sampah untuk memilah sampah yang berasal dari masyarakat, dimana sampah plastik bisa terpisah sendiri untuk dihancurkan menjadi bubur sampah.

f. Silancar (SI AAP Lacak & Antar) (2022) merupakan inovasi pelayanan oleh kecamatan Pekalongan Utara untuk mempermudah layanan adminduk dan non adminduk bagi warga di kecamatan Pekalongan Utara dan memantau progress layanan secara online.

g. SIBAIK yaitu Optimalisasi Koordinasi dalam Penyaluran Bantuan Kematian. Selama ini dalam mekanisme pengajuan Santunan Kematian membutuhkan beberapa berkas yang sering kali pengiriman oleh Ahli Waris ke Kelurahan yang selanjutnya diverifikasi oleh camat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk itu dibuatkan semacam google spreedsheet sebagai isian data identitas kematian yang dibuat per Kelurahan per Bulan. Sehingga data penerima Bantuan Kematian terdeteksi pada setiap bulan dan setiap kelurahan.

h. Jempol (Jembatan Pembayaran Online) adalah inovasi yang dilakukan RSUD Bendan dalam rangka meningkatkan mutu dan percepatan pelayanan, yaitu dengan menggunakan qris sebagai sarana pembayaran di rsud bendan. Sehingga manfaat yang didapatkan yaitu pengurangan resiko penggunaan uang tunai, peningkatan efisiensi, keamanan transaksi, Historis pembayaran jelas (transparan dan akuntable).

i. RATRI TOBAT (Ora Usah Antri Tunggu Obat) merupakan inovasi dari RSUD Bendan untuk meminimalkan antrian pengambilan obat sehingga sesuai dengan kebutuhan pasien (ditunggu, ditinggal, diantar).

3. Inovasi Daerah Lainnya

Inovasi daerah lainnya merupakan inovasi yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi dalam konteks ini adalah inovasi selain tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam kurun waktu 2020-2023 (sedang berjalan), inovasi daerah lainnya antara lain meliputi:

a. Inovasi pada urusan pendidikan

1) Brayan Sinau Implementasi Kurikulum Merdeka

"Dinas Pendidikan Kota Pekalongan menginisiasi dan mengoordinir kegiatan BrayanSinau Implementasi Kurikulum Merdeka dengan

- memberdayakan Komunitas, lembaga, yang bergerak di bidang Pendidikan
- mengadakan kesepakatan dan penandatanganan komitnen bersama
- Memfasilitasi kegiatan #BrayanSinau Implementasi Kurikulum Merdeka

Harapan dari pelaksanaan #BrayanSinau, guru-guru yang belum memahami IKM akan lebih paham dan dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik.

Peningkatan kualitas guru dan pembelajaran akan lebih cepat dan signifikan karena dilakukan secara masal dan terkoordinir"

2) Penyusunan Kurma Lokal (Kurikulum Muatan Lokal) Kebencanaan Jenjang Sekolah Dasar (2022).

   Inovasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam menyusun buku muatan lokal kebencanaan (banjir rob, banjir hujan, sampah, limbah, penurunan muka tanah dan wabah penyakit) sebagai pegangan guru dalam memberikan materi kebencanaan. Inovasi dilakukan dalam bentuk membuat capaian pembelajaran, petunjuk penggunaan, materi dan strategi pembelajarannya. Materi muatan lokal dapat diberikan secara terintegrasi dengan materi pelajaran yang sudah ada, melalui ekstrakurikuer, maupun menjadi mata pelajaran tersendiri.

3) Inovasi di bidang Pendidikan di berbagi sekolah di tahun 2023

Tabel II-191 Inovasi Daerah Bidang Pendidikan

No.	Nama Inovasi	Sekolah
1	Hatiku Bahagia	SDN Kuripan Lor 2
2	MOLIKA SPENSE MERDEKA (Mobile Learning Matematika SMP Negeri 11 Pekalongan)	SMP Negeri 11
3	Lidi Code Book	SDN Banyurip Ageng
4	Mengembangkan Kemampuan Literasi Numerasi dan Keterampilan IT Murid melalui Program “Pembiasaan Coding sebagai Budaya Literasi Digital Baru”	SDN Poncol 03
5	DONAL BAKOL SIWELING	SDN Krapyak Lor 01
6	Pemanfaatan Chromebook dalam "One Day One Question for Numeration" with Canva	SDN Kramatsari 01
7	Belajar Asik	SDN Degayu 01
8	ChaBe Teri Basa Media untuk Mengefektifkan Pembelajaran Jarak Jauh	SMP Negeri 6
9	Cilanda	SDN Panjang Wetan 4
10	Kreasi Senam Go Green dalam Rangka Mendukung Kegiatan Projek Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar Negeri Buaran	SDN Buaran
11	Media "Miswapi" untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis Pidato Kelas 6	SDN Panjang Wetan 4
12	Penerapan Manajemen INK DARSITAL (Inovasi Kolaborasi Sadar Literasi Digital) untuk Menumbuhkan Kompetensi TIK Guru SDN Kradenan 01	SDN Kradenan 01
13	Peningkatan Kemampuan Literasi Numerasi melalui One Month One Magazine	SDN Medono 01
14	Sharing is Caring (SIC) for LitNum	SMP Negeri 10
15	Sistem Tata Surya	SDN kandang Panjang 10

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

b. Inovasi pada urusan kesehatan

1) Deteksi Gejala Mental Dan Emosional yaitu program yang dilaksanakan di seluruh puskesmas di Kota Pekalongan untuk mendeteksi secara dini gangguan kesehatan mental dan gangguan jiwa yang mungkin akan terjadi pada kelompok umur remaja 11-18 dan dewasa diatas 18 tahun, yang kemudian ditindaklanjuti dengan konseling psikolog.

2) Inovasi kebijakan kesehatan di puskesmas sebagai faskes tingkat pertama di tahun 2023.

Tabel II-192 Inovasi Daerah Bidang Kesehatan

No.	Nama Inovasi	Puskesmas
1	SATU HATI (Bersama Pantau Ibu Hamil Resiko Tinggi)	Puskesmas Bendan
2	Gelas Tubruk	Puskesmas Buaran
3	CETING COMEL (Cegah Stunting dengan Contoh Menu Lokal)	Puskesmas Buaran
4	GERAK SEDUNIA (Gerakan Sweeaping & Edukasi Imunisasi Anak)	Puskesmas Buaran
5	Permata Hati	Puskesmas Buaran
6	SIPONI (Sistem Informasi Pendaftaran Online)	Puskesmas Buaran
7	Kader Pajak Cinta (Peduli, Rutin Ajak Keluarga, Cegah Hipertensi Dan Gula)	Puskesmas Buaran
8	TANCAP KEMUDI (Peningkatan Capaian Dengan Keliling Imunisasi Dan Edukasi)	Puskesmas Jenggot
9	GERBEG CHINTA	Puskesmas Kramatsari
10	Remaja STAR	Puskesmas Kramatsari
11	NYEDHAK RONDHO	Puskesmas Kramatsari
12	SiBawal Hati	Puskesmas Kramatsari
13	BESTIE BUMIL (Bersama Sahabat Ibu Hamil Resiko Tinggi)	Puskesmas Krapyak Kidul
14	Jaga Aurat (Jaringan Keluarga Ayu Rajin Tes Gula dan Tensi)	Puskesmas Kusuma Bangsa
15	Jaga Imun Bro (Jaring Keluarga Imunisasi Notifikasi Berbasis Elektronik)	Puskesmas Kusuma Bangsa
16	Ber-KB Yok	Puskesmas Noyontaan
17	SMART Puskesmas	Puskesmas Pekalongan Selatan
18	LOPIS (Logbook PIS-PK Integrasi)	Puskesmas Pekalongan Selatan
19	AJIB RISTI	Puskesmas Tirto
20	GEMESI (Gerakan penemuan Hipertensi)	Puskesmas Tirto
21	PUSDALU	Puskesmas Tirto
22	DETEKSI PASIEN TB	Puskesmas Tondano

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

c. Inovasi pada urusan perumahan dan permukiman

1) Omahe Ndewe (Sistem Informasi Pengelolaan Identifikasi Data Rumah Kota Pekalongan) (2022), dikembangkan berdasarkan hasil forum Data di tahun

2021. Aplikasi ini dikembangkan untuk penyediaan database infrastruktur pemukiman, namun kemudian berkembang menjadi aplikasi yang mencakup berbagai macam variabel data yaitu data layanan air minum, layanan sanitasi, layanan bencana, rumah tidak layak huni, dan sebagainya Aplikasi ini dibangun dengan mengintegrasikan data PBB yang sudah berbasis spasial dan data SIMPERUM Provinsi Jawa Tengah. “OMAHE NDEWE” akan menyajikan data titik koordinat rumah, memberikan nomor induk rumah, status keterhunian rumah, identitas penghuni rumah, kepemilikan rumah, profil rumah tidak layak huni, data rawan bencana banjir, rob, longsor, puting beliung, layanan air bersih, akses sanitasi, dan pengelolaan sampah rumah tangga.

d. Inovasi pada urusan kelautan dan perikanan

Permasalahan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya di Kota Pekalongan yang diakibatkan oleh banjir rob sangatlah kompleks. Menghadapi hal tersebut Pemerintah Kota Pekalongan dan stakeholder perikanan berupaya mencari solusi. Berbagai pihak terus dirangkul dan dikolaborasikan dalam satu komitmen bersama untuk mengembalikan Kejayaan Kota Pekalongan. Pihak-pihak tersebut tidak hanya pemerintah (Kota Pekalongan, Provinsi dan Pusat), tetapi juga memerlukan keterlibatan legislative, masyarakat (pengusaha kapal, nelayan, pembudidaya, buruh dll), industri kecil dan umkm, akademisi dan pihak terkait lainnya. Dengan latar belakang pemikiran ini, pemerintah Kota Pekalongan meluncurkan program Kolaboratif dengan nama “KAKAP Emas - KembAlikan Kejayaan perAiran Pekalongan bagi Ekonomi dan kesejahteraan MASyarakat”. Inovasi – inovasi dalam program KAKAP Emas berikut diharapkan mampu mengangkat Kembali kejayaan perikanan Kota Pekalongan

Tabel II-193 Inovasi Daerah Bidang Perikanan

No.	Nama Inovasi	Keterangan
1	Sistem Informasi Aplikasi Perikanan (SIAPKAN)	Sistem informasi terkait pengelolaan perikanan dan data perikanan, serta memuat aplikasi layanan berusaha dan berkegiatan di sector perikanan.
2	FISH Apartement	Rumah ikan merupakan tempat pengasuhan benih di laut menggunakan terumbu karang buatan
3	JALABU (Jaring Jala Bubu)	merupakan inovasi yang mengadaptasi kebutuhan resiliensi masyarakat degayu yang terdampak banjir dan rob.
4	APUNGKU (Program Jaring APUNG Untuk Pembudidaya Kreatif dan Unggul)	Adaptasi pemanfaatan Jaring Apung untuk budidaya ikan pada kawasan terdampak banjir dan rob
5	Perahu Nelayan Tangguh	Pemberian bantuan kapal bermotor kepada masyarakat Degayu terdampak rob yang alih profesi dari petani sawah menjadi nelayan
6	Budi Mantap(Budidaya Karamba Jaring Tancap)	Pemberian bantuan jaring tancap pada petambak yang kondisi dampak banjir dan rob belum terlalu tinggi seperti di Bandengan dan Degayu.
7	PINTU BERDAYA (Progam Pintu Bersama Untuk Perikanan Budidaya)	Pembuatan pintu air payau dari Kali Banger ke tambak pembudidaya yang ada di Slamaran, Krapyak (di ujung sungai).

No.	Nama Inovasi	Keterangan
8	TPI LUNAS	Manajemen pembayaran lelang ikan yang selesai pada hari yang sama, sehingga penerimaan pendapatan nelayan tidak tertunda
9	PELITA (Pekalongan Lelang Ikan Transparan Dan Amanah)	Inovasi berupa opsi 3 (tiga) jenis pelelangan ikan, yakni - Lelang terbuka, merupakan lelang konvensional - Lelang terbuka dengan sampel, dimana hanya sampel yang digelar - Lelang terbatas, lelang ikan yang dibeli oleh pemilik sendiri karena tidak ada kesepakatan harga sehingga disimpan di cold storage.
10	Gerai Oleh-Oleh Bersama	
11	OLIK (Aneka Olahan Ikan)	Peningkatan nilai tambah olahan ikan melalui penambahan sarana prasarana pemasaran
12	TAMBAK MILENIAL (Budidaya udang Vaname dengan Kolam Bundar)	Budidaya tambak udang vaname dengan kolam bundar
13	GRANIT (Program Nila Gratis)	Pemanfaatan lahan tergenang rob dengan Nila Salina, yakni ikan Nila yang dapat hidup pada air payau.
14	SLBB (Sekolah Lapangan Budidaya Bandeng)	Sekolah Lapang Budidaya Bandeng merupakan kolaborasi Mercy Corps Indonesia dan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah usaha budidaya Bandeng
15	WANA MINA (Program Budidaya Ikan Berdampingan Mangrove)	Budidaya Ikan Bandeng, Nila dan Kepiting yang berdampingan mangrove
16	Jajan Ikan (Jajan Olahan Perikanan)	Pembinaan dan pelatihan pengolah ikan pemula pada teknopark perikanan
17	KOBILTU (Program Kolam Bundar Ikan Lele Terpadu)	Budidaya lele pada kolam dengan bentuk bundar sebagai upaya perbaikan sirkulasi air dan ketahanan terhadap banjir rob
18	ITU HOKI (Ikan Bermutu dan Harga Oke Sekali)	Perluasan dan perlengkapan cold storage

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga harus bisa mendorong masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan inovasi-inovasi yang bermanfaat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menyelenggarakan lomba Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) yang diadakan setiap tahun. Pada tahun 2023, terdapat 2 (dua) pemenang Krenova sebagaimana disajikan dalam **Error! Reference source not found.** berikut.

Tabel II-194 Inovasi Daerah Lainnya

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
1.	Sabun Pencuci Piring Ekstrak Kulit Nanas Kering	Urmatul Waznah, Martini Yuswinda	Limbah kulit nanas mengandung zat bioaktif klor iodium, fenol dan enzim bromelin mempunyai efek menekan pertumbuhan bakteri, hal ini pula yang menjadikan produk olahan dari kulit nanas selain sebagai

No.	Judul Inovasi	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
			pembersih, tetapi sekaligus dapat membunuh kuman karena berfungsi sebagai antiseptik. limbah kulit nanas didapatkan dengan gratis pada para pedagang buah nanas kupas. Dan ini dapat menekan biaya produksi
2.	Gel Sari Buah Mengkudu Pengusir Tikus	Mambaul Ulum, Nanda Qurrota Aini, dkk	Sari buah mengkudu memiliki kemudahan direplikasi oleh masyarakat sari buah mengkudu bisa dijadikan sebuah gel untuk mengusir tikus yang sederhana. Menggunakan bahan-bahan alami seperti buah mengkudu yang diambil sarinya sebagai bahan utama membuat gel pengusir tikus. Masyarakat dapat dengan mudah mereplikasi produk gel sari buah mengkudu pengusir tikus dengan cara yang aman, efektif, dan alami

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

4. Daya Dukung Inovasi Daerah

Dalam mengembangkan inovasi daerah, tidak hanya Pemerintah yang berperan, tetapi juga dibutuhkan *stakeholder* lain untuk mendorong percepatan inovasi. Salah satu hal yang paling mendasar lahirnya inovasi daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk itulah dibutuhkan peran perguruan tinggi selaku lembaga pendidikan sekaligus pengembang inovasi.

Di Kota Pekalongan, terdapat perguruan tinggi antara lain Universitas Pekalongan (Unikal), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang dengan Program Studi Keperawatan di Pekalongan, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Widya Pratama Pekalongan, Akademi Kebidanan Harapan Ibu Pekalongan dan Program Studi Diluar Kampus Utama Politeknik Negeri Jakarta (PSDKU PNJ) dengan total lebih dari 1.000 (seribu) orang yang lulus setiap tahunnya, baik lulusan Diploma, Sarjana maupun Magister.

Tabel II-195 Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan

No.	Nama Perguruan Tinggi	Periode Wisuda	Jumlah Lulusan (orang)			Jumlah
			D3	S1	S2	
1.	Universitas Pekalongan	Tahun 2023	90	1141	-	1231
2.	STMIK Widya Pratama	Tahun 2023	33	195	-	228
3.	Akbid Harapan Ibu	Tahun 2023	17	-	-	17
4.	PSDKU PNJ	Oktober 2023	-	-	-	-

Sumber: Berbagai sumber (diolah), 2024

Selain berperan menciptakan SDM yang berdaya saing, perguruan tinggi juga didorong untuk menciptakan inovasi. Oleh karena itu beberapa perguruan tinggi di Kota Pekalongan membangun pusat inovasi sebagaimana disajikan dalam Tabel II-196 berikut.

Tabel II-196 Pusat Inovasi yang Dimiliki Perguruan Tinggi di Kota Pekalongan

No	Perguruan Tinggi	Nama Pusat Inovasi
1.	Universitas Pekalongan	Pusat Inovasi dan Teknologi (PIT)
2.	STIMIK Widya Pratama	Tidak Ada

No	Perguruan Tinggi	Nama Pusat Inovasi
3.	IAIN Pekalongan	Tidak Ada
4.	Poltekkes Semarang Prodi Keperawatan	Tidak Ada
5.	AKBID Harapan Ibu	Tidak Ada

Sumber: Berbagai sumber (diolah), 2024

2.2 Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2023

Berdasarkan Pasal 306 Ayat (3) Permendagri No. 86 Tahun 2017 bahwa hasil evaluasi RKPD kabupaten/kota digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD kabupaten/kota untuk tahun berikutnya. Penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025 memperhatikan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2023 yang terdiri atas hasil evaluasi Indikator RPJMD, hasil evaluasi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan hasil evaluasi indikator Sustainable Development Goals (SDG's).

2.2.1 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Sampai Dengan Tahun 2023

Evaluasi capaian indikator kinerja daerah ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Program yang terdiri atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Pada evaluasi tersebut, status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam evaluasi terbagi dalam 2 kategori, yaitu tercapai dan tidak tercapai. Rekapitulasi capaian Indikator Kinerja Utama Daerah RPJMD Kota Pekalongan Tahun 202-2026 di tahun 2023 dari 101 indikator sebagai berikut:

1. Evaluasi terhadap Perubahan RKPD Tahun 2023
   - Tercapai : 72 Indikator (71,29%)
   - Tidak Tercapai : 29 Indikator (28,71%)
2. Evaluasi terhadap Target Akhir RPJMD
   - Tercapai : 60 Indikator (59,41%)
   - Tidak Tercapai : 41 Indikator (40,59%)

Tabel II-197 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kota Pekalongan Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2023

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi s.d TW IV Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Aspek Kesejahteraan Masyarakat												
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74.66	74.44	74.51	74.52	73.00	97.96	Tidak Tercapai	73.00	97.78	Tidak Tercapai
2	Angka Kemiskinan	Persen	5.89	7.59	7.00	6.50	6.81	95.45	Tidak Tercapai	6.81	86.49	Tidak Tercapai
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76.03	75.40	75.90	75.52	76.71	101.58	Tercapai	76.71	100.89	Tercapai
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.99	6.89	4.98	6.48	5.02	129.08	Tercapai	5.02	119.32	Tercapai
5	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	Persen	100.00	55.56	85.19	74.07	70.37	95.00	Tidak Tercapai	70.37	70.37	Tidak Tercapai
6	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	Persen	12.17	37.27	21.11	22.12	18.98	116.54	Tercapai	18.98	64.12	Tidak Tercapai
7	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Persen	91.04	n/a	79.02	89.11	90.48	101.54	Tercapai	90.48	99.38	Tidak Tercapai
8	PDRB Perkapita	Rp. Juta/ Jiwa/ Tahun	40.65	n/a	40.68	36.56 - 36.92	43.29	117.25	Tercapai	43.29	106.49	Tercapai
9	Jumlah konflik sosial	Kasus	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	100.00	Tercapai	0.00	100.00	Tercapai
10	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.50	n/a	0.28	0.30	0.35	116.67	Tercapai	0.35	70.00	Tidak Tercapai
11	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	80.01	188.23	124.53	116.21	122.77	94.66	Tidak tercapai	122.77	65.17	Tidak Tercapai
12	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	7.00	8.90	9.96	7.91	13.71	57.70	Tidak Tercapai	13.71	51.06	Tidak Tercapai
13	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1.000 KH	9.00	10.27	12.28	9.92	18.42	53.85	Tidak Tercapai	18.42	48.86	Tidak Tercapai
14	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Persen	11.89	n/a	1.42	2.00	4.40	220.00	Tercapai	4.40	37.01	Tidak Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi s.d TW IV Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61.00	57.87	n/a	59.14	65.31	110.43	Tercapai	65.31	107.07	Tercapai
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	71.34	75.77	70.35	70.54	73.95	104.83	Tercapai	73.95	103.66	Tercapai
17	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persen	100.00	n/a	93.97	93.72	95.09	101.46	Tercapai	95.09	95.09	Tidak Tercapai
18	Luas Genangan Banjir dan Rob	Hektar	565.00	1730.00	980.14	1027.00	880.83	116.59	Tercapai	880.83	64.14	Tidak Tercapai
19	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
20	Persentase pelayanan sampah	Persen	73.12	73.75	72.36	70.12	71.45	101.90	Tercapai	71.45	97.72	Tidak Tercapai
21	Pertumbuhan ekonomi	Persen	4.55	3.59	5.76	5.50 - 5.80	5.44	98.91	Tidak Tercapai	5.44	119.56	Tercapai
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Aspek Pelayanan Umum												
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Urusan Pendidikan												
1	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Persen	100.00	59.51	90.94	100.00	99.67	99.67	Tidak Tercapai	99.67	99.67	Tidak Tercapai
2	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Urusan Kesehatan												
3	Persentase capaian SPM Kesehatan	Persen	100.00	n/a	85.98	90.00	106.85	118.72	Tercapai	106.85	106.85	Tercapai
Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang												
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan	Persen	99.40	n/a	99.69	98.80	100.00	101.21	Tercapai	100.00	100.60	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi s.d TW IV Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	pengolahan air limbah domestik (IKK Outcome)											
5	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Persen	87.83	n/a	33.93	77.88	77.88	100.00	Tercapai	77.88	88.67	Tidak Tercapai
6	persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Persen	92.115	n/a	86.07	88.389	100.00	113.14	Tercapai	100.00	108.56	Tercapai
7	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	Persen	1.09	n/a	4.72	1.09	2.19	200.92	Tercapai	2.19	200.92	Tercapai
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persen	96.251	n/a	99.95	96.211	99.89	103.82	Tercapai	99.89	103.78	Tercapai
9	Pengembangan Sarana Persampahan	Persen	100.00	n/a	100.00	40.00	20.00	50.00	Tidak tercapai	20.00	20.00	Tidak Tercapai
Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman												
10	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	Persen	95.58	97.93	97.47	93.74	98.76	105.36	Tercapai	98,76	103,33	Tercapai
Urusan Ketentraman. Ketertiban Umum Dan Linmas												
11	Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	Persen	100.00	n/a	111.57	70.00	82.41	117.73	Tercapai	82.41	82.41	Tidak Tercapai
12	Persentase korban bencana yang ditangani	Persen	100.00	11.77	95.79	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
13	Persentase penanganan bencana kebakaran	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Urusan Sosial												
14	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan	Persen	3.82	n/a	18.39	3.43	17.64	514.29	Tercapai	17.64	461.78	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi s.d TW IV Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kesejahteraan Sosial (PPKS)											
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Urusan Tenaga Kerja												
15	Persentase Tenaga Siap Pakai yang ditempatkan	Persen	52.36	68.00	61.50	52.26	49.26	94.26	Tidak Tercapai	49.26	94.08	Tidak Tercapai
Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak												
16	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	28.53	n/a	n/a	28.51	28.56	100.18	Tercapai	28.56	100.11	Tercapai
17	Skor Kota Layak Anak	Skor	636.00	602.00	637.6	630.00	769.80	122.19	Tercapai	769.80	121.04	Tercapai
Urusan Pangan												
18	Persentase penanganan daerah rawan pangan	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Urusan Pertanahan												
19	Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	0.00	0.00	Tidak Tercapai	0.00	0.00	Tidak Tercapai
Urusan Lingkungan Hidup												
20	Persentase tingkat pencemaran air	Persen	60.00	n/a	62.86	62.86	51,43	122.23	Tercapai	51,43	116,67	Tercapai
21	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0.34	0.00	0.39	0.34	1,31	385.29	Tercapai	1,31	385,29	Tercapai
22	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	69.91	n/a	89.40	71.07	95.20	133.95	Tercapai	95.20	136.18	Tercapai
23	Tertib Hukum Lingkungan	Persen	60.10	20.00	25.81	34.42	43.04	125.04	Tercapai	43.04	71.61	Tidak Tercapai
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil												
24	Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	Persen	91.38	82.37	81.84	88.54	83.56	94.38	Tidak Tercapai	83.56	91.44	Tidak Tercapai
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi s.d TW IV Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	10.00	n/a	17.09	8.08	8.45	104.58	Tercapai	8.45	84,50	Tidak Tercapai
Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana												
26	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67.65	n/a	64.27	67.50	61.46	91.05	Tidak Tercapai	61.46	90.85	Tidak Tercapai
Urusan Perhubungan												
27	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Persen	28.00	n/a	21.51	28.00	24.69	88.18	Tidak Tercapai	24.69	88.18	Tidak Tercapai
Urusan Komunikasi Dan Informatika												
28	Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3.25	n/a	2.1	2.95	3.29	111.53	Tercapai	3,29	101,23	Tercapai
29	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu Pelayanan	Sangat Baik (Nilai 88.31 - 100)	n/a	90.02	Baik (Nilai 76.61 - 88.30)	96.62	109.42	Tercapai	96,62	120,78	Tercapai
Urusan Koperasi dan UKM												
30	Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Rp. Triliun	9.02	n/a	5.90	8.12	11.46	141.13	Tercapai	11.46	127,05	Tercapai
Urusan Penanaman Modal												
31	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Miliar Rupiah	216.78	410.60	570.79	204.28	637.82	312.23	Tercapai	637.82	294.22	Tercapai
Urusan Kebudayaan												
32	Persentase Peningkatan Kelompok Budaya	Persen	1.46	47.20	0.00	1.53	1.53	100.00	Tercapai	1.53	104.79	Tercapai
Urusan Perpustakaan												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi s.d TW IV Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK Outcome)	Indeks	20.73	n/a	33.46	20.12	19.25	95.68	Tidak Tercapai	19.25	92.86	Tidak Tercapai
Urusan Kearsipan												
34	Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	Indeks	74.40	87.59	80.67	73.20	91.02	124.34	Tercapai	91.02	122.34	Tercapai
Urusan Kepemudaan Dan Olahraga												
35	Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1.37	n/a	1.43	1.21	1.39	114.88	Tercapai	1.39	101.46	Tercapai
36	Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	15.00	4.00	13.00	14.00	6.00	42.86	Tidak Tercapai	6.00	40.00	Tidak Tercapai
Urusan Statistik												
37	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Persen	80.00	n/a	90.22	70.00	77.73	111.04	Tercapai	77.73	97.16	Tidak Tercapai
Urusan Persandian												
38	Indeks Tata Kelola KAMI	Tingkat	II	n/a	I+	I	II	200.00	Tercapai	II	200.00	Tercapai
URUSAN PILIHAN												
Urusan Kelautan dan Perikanan												
39	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	Ton	15,600.00	n/a	10.535.05	15.141.00	10.091,60	66.65	Tidak Tercapai	10.091,60	64.69	Tidak Tercapai
Urusan Pariwisata												
40	Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	625.000	316.440	1.038.424	580.000	1.258.597	217.00	Tercapai	1.258.597	201,38	Tercapai
Urusan Pertanian												
41	Nilai produksi tanaman pangan. hortikultura dan peternakan	Rp. Juta	259.492.90	n/a	694.861.638	247.580.00	637.811,340	257.62	Tercapai	637,811.340	245,79	Tercapai
Urusan Perindustrian												
42	Pertumbuhan Industri	Persen	0.07	2.38	4.26	0.09	2.30	2,555.56	Tercapai	2.30	3,285.71	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi s.d TW IV Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urusan Perdagangan												
43	Nilai Ekspor Perdagangan	Juta USD	27.51	n/a	18.15	26.71	11.09	41.52	Tidak Tercapai	11,09	40,31	Tidak Tercapai
URUSAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
Sekretariat Daerah												
44	Persentase Capaian Kinerja Pembangunan	Persen	94.00	n/a	89.48	94.00	96.38	102.53	Tercapai	96.38	102.53	Tercapai
Sekretariat DPRD												
45	Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Perencanaan												
46	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Persen	100.00	97.33	99.19	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Keuangan												
47	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
48	Rasio PAD	Persen	2.06	n/a	2.31	1.98	2.26	114.14	Tercapai	2.26	109.71	Tercapai
Kepegawaian												
49	Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	90.00	n/a	68.06	87.00	98.90	113.68	Tercapai	98.90	109.89	Tercapai
Pendidikan dan Pelatihan												
50	Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	Persen	40.00	n/a	113.25	40.00	34.37	85.93	Tidak Tercapai	34.37	85.93	Tidak Tercapai
Penelitian dan Pengembangan												
51	Persentase Laporan Hasil Litbang	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
Inspektorat Daerah												

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi s.d TW IV Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Persen	100.00	n/a	56.67	67.74	66.67	98.42	Tidak Tercapai	66.67	66.67	Tidak Tercapai
53	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	16.00	n/a	3.00	13.00	9.00	69.23	Tidak Tercapai	9.00	56.25	Tidak Tercapai
URUSAN KEWILAYAHAN												
Kecamatan												
54	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec.Pekalongan Utara)	Persen	100.00	n/a	99.91	100.00	99,84	99,84	Tidak Tercapai	99,84	99,84	Tidak Tercapai
55	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Selatan)	Persen	100.00	n/a	99.74	100.00	99,87	99,87	Tidak Tercapai	99,87	99,87	Tidak Tercapai
56	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Barat)	Persen	100.00	n/a	100.06	100.00	99,73	99,73	Tidak Tercapai	99,73	99,73	Tidak Tercapai
57	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan. Pelayanan Publik. Pemberdayaan Masyarakat. Trantibum (Kec. Pekalongan Timur)	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100,00	100,00	Tercapai
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
Kesatuan Bangsa dan Politik												
58	Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi s.d TW IV Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa											
59	Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Persen	100.00	n/a	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
Aspek Daya Saing												
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	50.90	54.31	54.36	50.87	56,24	110.56	Tercapai	56,24	110,49	Tercapai
2	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	75.69	69.66	71.04	72.69	77.12	106.09	Tercapai	77.12	101.89	Tercapai
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.92	9.18	9.20	9.43	9,29	98.52	Tidak Tercapai	9,29	95,65	Tidak Tercapai
5	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
6	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Nindya	Melebihi Target	Tercapai	Nindya	Melebihi Target	Tercapai
7	Indeks Kualitas Air	Indeks	35.39	13.29	45.33	35.36	48.86	138.18	Tercapai	48.86	138.06	Tercapai
8	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	23.61	5.17	23.77	23.60	24.39	103.35	Tercapai	24.39	103.30	Tercapai
9	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Regulasi	7.00	n/a	1.00	7.00	3.00	42.86	Tidak Tercapai	3.00	42.86	Tidak Tercapai
10	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Kategori	B	C	B	B	B	100.00	Tercapai	B	100.00	Tercapai
11	Persentase keterhubungan jalan	Persen	100.00	n/a	100.00	97.20	100.00	102.88	Tercapai	100.00	100.00	Tercapai
12	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persen	100.00	n/a	42.22	91.11	111.11	121.95	Tercapai	111.11	111.11	Tercapai
13	Indeks SPBE	Indeks	3.25	n/a	n/a	2.95	3,29	111.53	Tercapai	3,29	101,23	Tercapai
14	IKM Kota	Persen	84.09	80.83	90.44	83.64	90,69	108.43	Tercapai	90,69	107,85	Tercapai

No.	Aspek	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023				Realisasi Capaian RPJMD sd 2023	Persen capaian target RPJMD	Status Ketercapaian Terhadap Target Akhir RPJMD
						Target Perubahan RKPD 2023	Realisasi s.d TW IV Tahun 2023	Tingkat Capaian s.d TW. IV Tahun 2023	Status Ketercapaian Terhadap Target Perubahan RKPD 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Skor	97.50	n/a	90.01	96.00	96,62	100.65	Tercapai	96,62	99,10	Tidak Tercapai
16	Indeks Merit System	Indeks	260.00	n/a	264.50	240.00	327,00	136.25	Tercapai	327,00	125,77	Tercapai
17	Nilai SAKIP Kota	Skor	76.07	73.16	73.31	74.57	72,83	97.67	Tidak Tercapai	72,83	95,74	Tidak Tercapai
18	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	Kategori	WTP	WTP	n/a	WTP	WTP	100.00	Tercapai	WTP	100.00	Tercapai
19	Maturitas SPIP	Nilai	4.00	3.00	3.022	3.40	3,002	88.29	Tidak Tercapai	3,002	75,05	Tidak Tercapai
20	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	8.00	n/a	2.00	5.00	3,00	60.00	Tidak Tercapai	3,00	37,50	Tidak Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2.2.2 Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Utama Sampai Dengan Tahun 2023

2.2.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Tabel II-198 Capaian Indikator Urusan Pendidikan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
1.01. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100.60	100.00	103.01	103.01	103.01	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.01.02. Program Pengelolaan Pendidikan										
1	Persentase capaian SPM pendidikan	persen	100	76.37	90.94	83.97	99.67	99.67	99.67	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Capaian SPM Pendidikan **tidak memenuhi target** dikarenakan perubahan formula perhitungan pencapaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dari yang sebelumnya berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 disebutkan jumlah penduduk usia sekolah penerima layanan pendidikan yang dihitung adalah berasal dari kabupaten/kota yang bersangkutan. Sedangkan pada peraturan yang baru yaitu Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tidak mensyaratkan hal tersebut. Sehingga terdapat peningkatan capaian pemenuhan SPM Pendidikan yang cukup signifikan diakibatkan jumlah penerima layanan dasar pendidikan yang dihitung menjadi lebih banyak.										
1.01.03. Program Pengembangan Kurikulum										
1	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.01.04. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan										
1	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100	100	56.04	100.00	56.11	56.11	56.11	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan **tidak memenuhi target** dikarenakan Jumlah pendidik berkualifikasi minimal S1 dan bersertifikasi yang meninggal dunia maupun memasuki usia pensiun, tidak sebanding dengan alokasi kuota peserta sertifikasi pendidik yang disediakan oleh pemerintah pusat.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Tabel II-199 Capaian Indikator Urusan Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
1.02. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	91.67	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan BLUD	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
6	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.02.02. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat										
1	Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	Persen	92	88	0.00	90.00	18.00	18.00	19.57	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota **tidak memenuhi target** dikarenakan Jumlah kunjungan penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota masih rendah dikarenakan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan rujukan masih rendah.										
2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	Persen	90	70	70.43	80.00	72.00	72.00	80.00	Tidak Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
Capaian indikator Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar **tidak memenuhi target** dikarenakan Ketersediaaan sarana,prasarana dana alkes di Puskesmas belum memenuhi standart . Pemenuhan sarana , prasarana dan alkes yg sesuai standart akan mulai dilakukan pada tahun 2024.										
4	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	persen	72.5	60	100.00	65.00	100.00	100.00	137.93	Tercapai
Capaian indikator Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar **jauh melebihi target** dikarenakan Pengembangan Pelayanan dan Inovasi di RSUD Bendan dalam pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Tipe C)										
1.02.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan										
1	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	Persen	95.5	93	88.05	94.00	100.00	100.00	104.71	Tercapai
2	Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	persen	60	35	100.00	45.00	100.00	100.00	166.67	Tercapai
Capaian indikator Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan **jauh melebihi target** dikarenakan adanya UU Nomor 17 tahun 2023 dimana diwajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STR dan SIP, sehingga pada saat ini semua tenaga kesehatan RSUD yang masuk dan bekerja di RSUD telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan.										
1.02.04. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman										
1	Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	Persen	100	92	360.00	96.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	Persen	97	95	221.75	96.00	94.22	94.22	97.13	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat **tidak memenuhi target** dikarenakan kegiatan pengawasan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) belum selesai dilaksanakan, sehingga capaian sampai dengan triwulan III belum dapat menggambarkan capaian riil program.										
1.02.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan										
1	Persentase Rumah Tangga Sehat	Persen	95	90	98.04	92.00	98.65	98.65	103.84	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Tabel II-200 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
1.03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	100.56	100.00	100.28	100.28	100.28	Tercapai
3	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	125.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.03.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (sda)										
1	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	Persen	93.10	82.76	94.92	93.10	100.00	100.00	107.41	Tercapai
1.03.03. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum										
1	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	Persen	92.11	85.77	71.45	88.39	67.42	67.42	73.19	Tidak Tercapai
Capaian indikator Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah **tidak memenuhi target** dikarenakan tidak ada penambahan jumlah pelanggan pada tahun 2022 melalui program lain, hanya penambahan pada program hibah air minum sebesar 628 SR										
1.03.04. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional										
1	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	persen	100	0	0.00	40.00	20.00	20.00	20.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional **tidak memenuhi target** dikarenakan Pencapaian target bertahap hingga akhir tahun RPJMD, dimana untuk penambahan pada 1 lokasi sarana persampahan regional (terdapat 3 komponen, yaitu : adanya bangunan, luasan minimal 200 m2, dan keberfungsian alat), dan pada tahun 2024 akan ada penambahan komponen sebanyak 6 komponen (2 Lokasi) yaitu: 1. Panjang Wetan-Bugisan 2. Kuripan Kertoharjo									
1.03.05. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah										
1	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	persen	12.87	9.87	9.96	11.07	17.68	17.68	137.34	Tercapai
Capaian indikator Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome) **jauh melebihi target** dikarenakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terkait dengan pelayanan sedot tinja, dan adanya revitalisasi beberapa mck umum serta pembangunan mck umum.										
1.03.06. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
1	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	71.49	66.45	68.39	68.47	68.58	68.58	95.93	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase drainase dalam kondisi baik **tidak memenuhi target** dikarenakan karena masih ada beberapa drainase yang belum di rehab atau di bangun dan target akan terealisasi pada akhir RPJMD tahun 2026										
1.03.08. Program Penataan Bangunan Gedung										
1	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	18.74	17.24	16.95	17.84	17.34	17.34	92.53	Tidak Tercapai
Capaian indikator Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota **tidak memenuhi target** dikarenakan karena lamanya proses pengajuan PBG dan kurangnya tenaga penyedia jasa yang belum memiliki sertifikat keahlian										
1.03.10. Program Penyelenggaraan Jalan										
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	persen	86.57	81.12	84.28	83.30	83.77	83.77	96.77	Tidak Tercapai
Capaian indikator Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan (1) Adanya Refocusing Anggaran Penyelenggaraan Jalan tahun 2020-2022 (Alasan Utama); (2) SK Jalan berubah sehingga Panjang jalan ikut berubah bertambah panjang ; (3) Banyak jalan yang mengalami kerusakan akibat banjir dan ROB										
1.03.11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi										
1	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	21.20	7.87	7.15	13.20	7.61	7.61	35.91	Tidak Tercapai
Capaian indikator Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi **tidak memenuhi target** dikarenakan masih kurangnya tenaga bangunan yang memenuhi klasifikasi / persyaratan untuk pembuatan SKK.										
1.03.12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang										
1	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	persen	100	0	66.67	100.00	45.24	45.24	45.24	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota **tidak memenuhi target** dikarenakan dikarenakan sedang menunggu penjadwalan persetujuan substansi RDTR di Kementerian ATR-BPN yang ditaregetkan selesai di tahun 2024, dan sampai akhir tahun RPJMD pencapaian target program ini bertahap dengan target (tahun 2024 : Perwal RDTR, Perwal Penataan dan Pengendalian Jaringan Fiber Optik dan Pengendalian Menara Telekomunikasi; tahun 2025 : Perwal Penyelenggaraan Bangunan Gedung).										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Tabel II-201 Capaian Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
1.04. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.04.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	91.67	100.00	99.17	99.17	99.17	Tidak Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	84.78	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.04.02. Program Pengembangan Perumahan										
1	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	92.35	0	99.13	91.35	100.00	100.00	108.28	Tercapai
1.04.03. Program Kawasan Permukiman										
1	Luas kawasan permukiman kumuh	hektar	0	498.47	280.10	291.47	227.55	227.55	0.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Luas kawasan permukiman kumuh tidak memenuhi target dikarenakan Bahwa target akhir tahun RPJMD adalah 0 ha Luas Kawasan permukiman kumuh, Dimana saat awal RPJMD kondisinya masih ada sekitar 498,47 Ha. Dan pada akhir tahun 2023 sisa Luas Kawasan Permukiman Kumuh masih sekitar 227,5 Ha. Adapun kondisi pada akhir tahun 2022 sisa luas Kawasan permukiman kumuh sekitar 280,10 Ha. Sehingga selama 1 tahun pada tahun 2023 kami telah menangani 52,6 Ha. Sehingga selama 3 tahun kami telah menangani Kawasan permukiman kumuh sebesar 270,97 Ha, sedangkan RPJMD seharusnya berlaku 5 tahun, namun ini baru berjalan 3 tahun maka menyebabkan target 0 Ha luas Kawasan permukiman kumuh belum tercapai. Terbatasnya anggaran dalam menyiapkan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur pada Kawasan permukiman kumuh belum lagi selama 2 tahun keadaan negara dilanda covid-19 sehingga menyebabkan banyak anggaran fisik terkena recofusing.									
1.04.04. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh										
1	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	hektar	2147.88	1649.41	1,348.81	1,856.41	1920.55	1920.55	89.42	Tidak Tercapai
Capaian indikator Luas kawasan permukiman tidak kumuh tidak memenuhi target dikarenakan Bahwa target akhir tahun RPJMD adalah 2147,88 ha Luas Kawasan permukiman tidak kumuh, Dimana saat awal RPJMD kondisinya masih ada sekitar 1649,41 Ha. Dan pada akhir tahun 2023 sisa Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh masih sekitar 1920,55 Ha. Sehingga selama 3 tahun kami telah menangani Kawasan permukimantidak kumuh sebesar 271,14 Ha, sedangkan RPJMD seharusnya berlaku 5 tahun, namun ini baru berjalan 3 tahun maka menyebabkan target 2147,88 Ha luas Kawasan permukiman tidak kumuh belum tercapai. Terbatasnya anggaran dalam menyiapkan perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur pada Kawasan permukiman kumuh belum lagi selama 2 tahun keadaan negara dilanda covid-19 sehingga menyebabkan banyak anggaran fisik terkena recofusing.									
1.04.05. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (psu)										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
1	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	persen	14.55	14.44	46.74	14.48	52.17	52.17	358.58	Tercapai
Capaian indikator Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome) **jauh melebihi** target. Hal ini dikarenakan ketidaksesuaian dalam penentuan target, dimana target yang dihitung adalah jumlah rumah, sedangkan indikator dan capaian yang dihitung adalah jumlah perumahan.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas

Tabel II-202 Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
1.05. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	83.84	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	77.78	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
6	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.05.02. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	Persen	70	60	65.00	64.00	80.00	80.00	114.29	Tercapai
Capaian indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome) **jauh melebihi target** dikarenakan Jumlah Perda yang ditegakkan: TW. I : 16 TW. II : 16 TW. III : 16 TW. IV : 16 Jumlah Perda yang sering terjadi/dilaporkan masyarakat adanya pelanggaran ada 16 perda dari 20 perda prioritas Satpol PP. 16 Perda tersebut adalah Perda No. 13 Tahun 2000 Pengawasan dan Larangan Minuman Beralkohol Perda No. 4 Tahun 2009 Bangunan Gedung Perda No. 12 Tahun 2011 Pajak Reklame Perda No. 5 Tahun 2019 Perubahan atas Perda No. 5 tahun 2013 tentang Ketertiban Umum Perda No. 15 tahun 2015 Penyelenggaraan Rumah Kos Perda No. 16 Tahun 2015 Penyelenggaraan Usaha Warung Internet Perda No. 2 Tahun 2018 Penyelenggaraan Reklame Perda No. 04 Tahun 2009 Perubahan atas peraturan daerah Kota Pekalongan No. 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Bangunan Perda No. 15 Tahun 2011 Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan Perda No. 35 Tahun 2011 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Perda No. 7 Tahun 2012 Garis Sempadan Perda No. 7 Tahun 2013 Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya Perda No. 12 Tahun 2014 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Perda No. 1 Tahun 2018 Izin Usaha Industri Perda No. 7 Tahun 2014 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Perda No. 1 Tahun 2019 Pengelolaan Barang Milik Daerah Dari 20 perda prioritas atau target, terdapat laporan pelanggaran kasus pada 16 perda sehingga sebanyak 80% Perda yang ditegakkan. Target capaian tahun 2023 adalah 70%, sedangkan capainnya adalah 80% sehingga capaiannya adalah 80/70, yaitu 114,29%.									
1.05.03. Program Penanggulangan Bencana										
1	persentase korban bencana alam yang ditangani	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.05.04. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran										
1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Tabel II-203 Capaian Indikator Urusan Sosial Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
1.06. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100	100	65.71	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.06.02. Program Pemberdayaan Sosial										
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	Persen	75	42	100.00	58.00	65.41	65.41	87.21	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan **tidak memenuhi target** dikarenakan Adanya kebijakan dari Kementerian Sosial bahwa PSKS harus berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah kecamatan lokasi pelaksanaan PKH (sesuai alamat tinggal/domisili saat ini), sehingga jumlah PSKS yang diberdayakan sampai tahun 2023 menjadi berkurang										
1.06.04. Program Rehabilitasi Sosial										
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	Persen	100	100	25.16	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.06.05. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial										
1	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	Persen	52.49	60.45	10.32	56.69	57.38	57.38	109.32	Tercapai
1.06.06. Program Penanganan Bencana										
1	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
1.06.07. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan										
1	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	Persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2.2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Tabel II-204 Capaian Indikator Urusan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2.07. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.07.03. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja										
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	persen	0.55	0.33	0.37	0.42	1.09	1.09	198.85	Tercapai
Capaian indikator Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome) **jauh melebihi target** dikarenakan ada penambahan anggaran (Cukai/DBHCHT) dan APBN dalam penyelenggaraan ujian kompetensi sehingga menambah pula pesertanya/sasarannya.										
2.07.04. Program Penempatan Tenaga Kerja										
1	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	persen	29.93	19.93	54.46	23.93	15.37	15.37	51.34	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan banyaknya pencari kerja yang tidak melaporkan diri jika sudah mendapatkan pekerjaan										
2.07.05. Program Hubungan Industrial										
1	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	persen	49.02	45.33	100.03	46.80	49.93	49.93	101.85	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Tabel II-205 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2.08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.08.02. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan										
1	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	Persen	11.09	1.85	11.29	5.55	5.98	5.98	53.89	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender **jauh melebihi target** dikarenakan Target kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender sampai dengan akhir tahun rpjmd adalah 372 kegiatan dengan target setiap tahunnya adalah 62 kegiatan Tahun 2021 kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender sejumlah 81 kegiatan Tahun 2022 target 124 kegiatan atau 33.33% Tahun 2023 target 186 kegiatan atau 50% Tahun 2024 target 248 kegiatan atau 66.67% Tahun 2025 target 310 kegiatan atau 83.33% Tahun 2026 target 372 kegiatan atau 100% sehingga pada tahun 2023 secara target yang direncanakan/ditetapkan sudah tercapai										
2.08.03. Program Perlindungan Perempuan										
1	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	Persen	23.99	23.99	29.88	23.99	15.01	15.01	159.81	Tercapai
Capaian indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome) **jauh melebihi target** dikarenakan adanya pendampingan intensif dari pihak LP-PAR yang dilakukan secara humanis, sehingga menimbulkan rasa keberanian, aman dan nyaman kepada para korban kekerasan untuk melaporkan kejadian kekerasan yang menimpanya.										
2.08.06. Program Pemenuhan Hak Anak (pha)										
1	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	Persen	55.56	25.93	29.63	33.33	33.33	33.33	60.00	Tidak Tercapai
Indikator Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) **belum tersedia data** dikarenakan Dekela (desa/kelurahan layak anak) sampai dengan akhir periode rpjmd ditargetkan 15 kelurahan dari 27 kelurahan se Kota Pekalongan Data awal tahun 2021 Dekela sejumlah 7 kelurahan Tahun 2022 ditargetkan 8 kelurahan atau 53.33% (bertambah 1 kelurahan) Tahun 2023 ditargetkan 9 kelurahan atau 60% (bertambah 1 kelurahan) Tahun 2024 ditargetkan 11 kelurahan atau 73.33% (bertambah 2 kelurahan) Tahun 2025 ditargetkan 13 kelurahan atau 86.67% (bertambah 2 kelurahan) Tahun 2026 ditargetkan 15 kelurahan atau 100% (bertambah 2 kelurahan) sehingga pada tahun 2023 secara target yang direncanakan/ditetapkan sudah tercapai										
2.08.07. Program Perlindungan Khusus Anak										
1	Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	persen	100	0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Tabel II-206 Capaian Indikator Urusan Pangan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	RKPD Perub Th. 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi s.d. TW IV			
2.09. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.09.03. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat										
1	Persentase cadangan pangan daerah	persen	4.8	3.8	2.92	4.40	4.45	4.45	92.75	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase cadangan pangan daerah tidak memenuhi target dikarenakan Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinperpa Kota Pekalongan akan mengupayakan pengoptimalan penyediaan cadangan pangan daerah sesuai target tahunan yang telah ditetapkan hingga akhir tahun RPJMD untuk mengantasipasi terjadinya bencana alam/bencana pertanian										
2.09.04. Program Penanganan Kerawanan Pangan										
1	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.09.05. Program Pengawasan Keamanan Pangan										
1	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	persen	88	80	100.00	83.20	91.73	91.73	104.24	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Tabel II-207 Capaian Indikator Urusan Pertanahan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	RKPD Perub Th. 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi			
2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2.10.05. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan										
1	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	persen	100	0	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.10.06. Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Serta Tanah Absentee										
1	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian	persen	50	0	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	RKPD Perub Th. 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi			
	Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee									
Capaian indikator Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee **tidak memenuhi target** dikarenakan tidak ada tanah yang memenuhi kriteria untuk ditetapkan Objek Redistribusi Tanah (tidak ada kegiatan redistribusi tanah pada tahun 2023)										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Tabel II-208 Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.11.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	105.27	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	108.21	100.00	103.06	103.06	103.06	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.11.02. Program Perencanaan Lingkungan Hidup										
1	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	100.00	0.00	80.00	20.00	120.00	120.00	120.00	Tercapai
Capaian indikator Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup **jauh melebihi target** dikarenakan adanya penambahan penyusunan dokumen KLHS RPJPD Kota Pekalongan										
2.11.03. Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup										
1	Persentase limbah yang diolah	persen	49.01	33.37	100.00	40.95	92.65	92.65	189.04	Tercapai
Capaian indikator Persentase limbah yang diolah **jauh melebihi target** dikarenakan IPAL dapat dimanfaatkan secara optimal.										
2.11.04. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (kehati)										
1	Persentase Ruang Terbuka Hijau	persen	2.95	2.89	2.90	2.92	2.94	2.94	99.63	Tidak Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
Capaian indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau **tidak memenuhi target** dikarenakan wilayah kota yang luasannya terbatas mengakibatkan terbatasnya ketersediaan lahan untuk perluasan/penambahan RTH publik										
2.11.05. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (b3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (limbah B3)										
1	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	persen	100.00	31.12	44.44	13.33	13.33	57.78	57.78	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan **tidak memenuhi target** dikarenakan pelaksanaan kegiatan direncanakan bertahap dari 2021 s.d 2026 dengan target 45 perusahaan. Sampai dengan tahun 2023 telah tercapai 57,78 persen (26 perusahaan).										
2.11.06. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (pplh)										
1	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	persen	100.00	16.67	20.17	16.67	40.67	40.67	40.67	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH **tidak memenuhi target** dikarenakan pelaksanaan kegiatan direncanakan bertahap dari 2022 s.d 2026 dengan target 600 usaha/kegiatan. Sampai dengan tahun 2023 telah tercapai 40,67 persen (244 usaha/kegiatan)										
2.11.08. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										
1	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	persen	50.00	0.00	100.00	50.00	50.00	50.00	100.00	Tercapai
2.11.09. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat										
1	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	persen	75.00	75.00	100.00	75.00	100.00	100.00	133.33	Tercapai
Capaian indikator Persentase perolehan penghargaan bidang LH **jauh melebihi target** dikarenakan penilaian yang rutin dilaksanakan setiap tahun yaitu: penilaian dalam program penghargaan yaitu Proper (Program Peringkatan Kinerja Perusahaan), Adiwiyata Kota. Sedangkan untuk Adiwiyata Provinsi dan Nasional tidak selalu mendapatkan perhargaan. Pada tahun 2023 ada sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata Provinsi										
2.11.10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup										
1	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.11.11. Program Pengelolaan Persampahan										
1	Persentase pengelolaan sampah	persen	0.31	2.19	33.28	0.28	0.31	0.31	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

6. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Tabel II-209 Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.12.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	89.33	100.00	100.46	100.46	100.46	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	77.78	77.78	77.78	Tidak Tercapai
2.12.02. Program Pendaftaran Penduduk										
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	persen	88.75	80.00	84.29	83.53	86.69	86.69	97.68	Tidak Tercapai
Capaian indikator Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk **tidak memenuhi target** dikarenakan (1) Kurangnya antusias masyarakat dalam mengurus kartu identitas anak (KIA) karena kurangnya kebermanfaatan dari KIA; (2) Belum adanya anggaran khusus jemput bola KIA; (3) Indikator Program masih berjalan di tahun ke-3										
2.12.03. Program Pencatatan Sipil										
1	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	persen	94.00	93.25	79.38	93.55	80.43	80.43	85.56	Tidak Tercapai
Capaian indikator Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil **tidak memenuhi target** dikarenakan Belum adanya akumulasi data agregat kependudukan dari Dirjen Dukcapil terkait dokumen kependudukan (akta kematian, perkawinan dan perceraian) lama sehingga sejak tahun 2022 dilakukan perhitungan manual yang mana menyebabkan adanya akumulasi pada jumlah keseluruhan (penyebut).										
2.12.04. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan										
1	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD	14.00	5.00	8.00	9.00	9.00	9.00	64.29	Tidak Tercapai
Capaian indikator Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan pencapaian target indikator program bertahap hingga akhir tahun RPJMD, masih ada target 5 OPD hingga akhir tahun RPJMD.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

7. Urusan **Pemerintahan** Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tabel II-210 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.13.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	101.82	100.00	101.77	101.77	101.77	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.13.03. Program Peningkatan Kerja Sama Desa										
1	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	Persen	100.00	16.67	33.33	50.00	50.00	50.00	50.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan **tidak memenuhi target** dikarenakan Kegiatan TMMD dilaksanakan tiap tahun dengan target untuk memfasilitasi 3 Kelurahan tiap tahunnya hingga akhir tahun RPJMD										
2.13.04. Program Administrasi Pemerintahan Desa										
1	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	Persen	70.37	51.85	74.07	59.26	81.48	81.48	115.79	Tercapai
Capaian indikator Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang* **jauh melebihi target** dikarenakan 1. Adanya Monev berkala dari DPMPPA 2. Kelurahan aktif menginput data pada aplikasi Epdeskel yang dijadikan acuan penilaian.										
2.13.05. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat										
1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	Persen	96.92	95.97	96.79	96.35	97.64	97.64	100.75	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

7. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tabel II-211 Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	RKPD Perub Th. 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target	Realisasi s.d. TW IV			
2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2.14.02. Program Pengendalian Penduduk										
1	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	persen	100.00	100.00	99.68	100.00	70.28	70.28	70.28	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga **tidak memenuhi target** dikarenakan Kegiatan Pemutakhiran Pendataan Kelurga tahun 2023 (PPK23) merupakan kegiatan pemutakhiran data/updating data yang dilakukan setiap tahunnya. Kelurahan yang dilakukan PPK23 merupakan kelurahan yang sudah ditetapkan oleh BKKBN. Untuk PPK23 jumlah yag dilakukan pemutakhiran sebanyak 18 Kelurahan.										
2.14.03. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)										
1	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	Persen	7.20	8.20	9.38	7.80	14.44	14.44	49.86	Tidak Tercapai
2.14.04. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)										
1	Unmeet need KB	Persen	12.00	17.00	13.08	15.00	14.95	14.95	80.28	Tidak Tercapai
Capaian indikator Unmeet need KB **tidak memenuhi target** dikarenakan merupakan data tahunan sehingga perhitungan baru bisa diperhitungan pada akhir tahun										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

8. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tabel II-212 Capaian Indikator Urusan Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.15.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.35	100.00	100.12	100.12	100.12	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.15.02. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (llaj)										
1	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	persen	100.00	87.00	5.54	92.00	164.69	164.69	164.69	Tercapai
apaian indikator Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ **jauh melebihi target** dikarenakan Jumlah lampu PJU yang bermeterisasi tercapai lebih banyak dari target serta bertambahnya lokasi pembangunan lampu PJU baru.										
2	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	Ratio	0.44	0.35	0.39	0.44	0.44	0.44	100.73	Tercapai
3	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	persen	0.74	17.94	-4.85	0.75	-9.90	-9.90	-1,337.91	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala tidak memenuhi target dikarenakan semenjak adanya pandemi Covid-19 jumlah kendaraan yang melaksanakan uji terus berkurang, dikarenakan adanya pembatasan aktivitas diluar ruangan, sehingga penyelenggaraan kegiatan operasi laik jalan pun dibatasi. selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang untuk melakukan kewajiban uji berkala. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pemilik kendaraan barang, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan telah melakukan upaya mengingatkan uji berkala dengan via SMS Gateway kepada pemilik kendaraan bermotor dan melaksanakan operasi laik jalan.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

9. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Tabel II-213 Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.16.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	91.56	100.00	100.52	100.52	100.52	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2.16.02. Program Informasi Dan Komunikasi Publik										
1	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.16.03. Program Aplikasi Informatika										
1	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	3.30	2.80	3.02	3.00	3.00	3.00	90.91	Tidak Tercapai
Capaian indikator Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak memenuhi target dikarenakan Pemerintah Kota Pekalongan memiliki 1 indikator yang bisa menjadi titik kelemahan yaitu indikator Penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang berada ditingkat kematangan level 2. Upaya yang dilakukan : (1) Meningkatkan indikator Layanan Jaringan Intra yang sebelumnya level 4 menjadi level 5 dengan melakukan upaya peningkatan/perbaikan terhadap pengoperasian Jaringan Intra yang dimiliki Pemerintah Kota Pekalongan sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi; (2) Meningkatkan indikator Pembangunan Aplikasi SPBE dan indikator Layanan Pusat Data yang sebelumnya level 3 menjadi level 4; (3) Meningkatkan indikator Penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang sebelumnya level 2 menjadi level 3 dengan upaya menerapkan Sistem Penghubung Layanan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.									

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

10. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Tabel II-214 Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.17.03. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi										
1	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	persen	33.23	24.59	31.21	30.94	29.70	29.70	89.38	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan Beberapa koperasi memiliki permasalahan internal yang belum terselesaikan sehingga sulit untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan terperinci. sehingga sulit untuk memperhitungkan peningkatan kualitasnya.										
2.17.05. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian										
1	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	persen	59.68	38.36	15.96	58.31	97.20	97.20	162.87	Tercapai
Capaian indikator Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota **jauh melebihi target** dikarenakan Pelatihan yang dilaksanakan dalam pada Tahun 2023 diprioritaskan untuk peningkatan sumber daya pengurus koperasi.										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2.17.08. Program Pengembangan Umkm										
1	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	persen	12.37	11.85	11.71	12.06	11.38	11.38	91.98	Tidak Tercapai
Capaian indikator Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan perkembangan usaha mikro bersifat dinamis, sehingga kegiatan fasilitasi belum dapat menjangkau seluruh usaha mikro untuk menjadi wirausaha. Pelaksanaan kegiatan secara masif akan dilaksanakan di tahun 2024 dengan fokus objek pada sosialisasi e katalog lokal dan fasilitasi sertifikasi produk (sertifikasi halal, merk dan HAKI).										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

11. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Tabel II-215 Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.18.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	99.27	100.00	103.58	103.58	103.58	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.18.02. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal										
1	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	6.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	50.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota **tidak memenuhi target** dikarenakan Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sebanyak 1 peraturan setiap tahun sejak 2021, sehingga akumulasi capaian sebanyak 3 peraturan sampai dengan triwulan 3 tahun 2023. Pada tahun 2021 : perwal 40/2021 ttg										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
pelimpahan kewenangan, sk sop sakpore/simpadu Pada tahun 2022 : perda 9/2022 ttg penyusunan penanaman modal, perwal 55/2022 ttg pendelegasian kewenangan Pada tahun 2023 : perda 5/2023 ttg perubahan perda penyelenggaraan ptsp										
2.18.03. Program Promosi Penanaman Modal										
1	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	50.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.18.04. Program Pelayanan Penanaman Modal										
1	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	dokumen	2500.00	2500.00	3,847.00	2,500.00	4,878.00	4,878.00	195.12	Tercapai
Capaian indikator Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal jauh melebihi target dikarenakan Realisasi melebihi target karena adanya kebijakan OSS RBA (Online Single Submission Risk Base Approach) dari Pemerintah Pusat. NIB (Nomor Izin Berusaha) menjadi syarat pengajuan bantuan modal berusaha, sehingga animo pengusaha dalam mengurus perijinan meningkat.										
2.18.05. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal										
1	Nilai Invetasi Baru pertahun	Miliar Rupiah	40.514.00	6.42.00	101.52	6.68	229.10	229.10	565.49	Tercapai
Capaian indikator Nilai Invetasi Baru pertahun **jauh melebihi target** dikarenakan Capaian melebihi target karena target yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi (BKPM) sebesar 110 Miliar. Penentuan target oleh BKPM pada awal tahun 2023. Didukung dengan DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman modal.										
2.18.06. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal										
1	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

12. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Tabel II-216 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2.19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2.19.02. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan										
1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	Persen	95.24	91.95	83.97	93.69	95.24	95.24	100.00	Tercapai
2.19.03. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan										
1	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	persen	42.86	11.43	13.33	34.29	55.00	55.00	128.32	Tercapai
Capaian indikator Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor **jauh melebihi target** dikarenakan Karena pemanfaatan sarpras olahraga di 1 (satu) lokasi/tempat dipergunakan beberapa jenis Cabor, contoh : - GOR Jetayu (Karate, Basket, Volly, Tennis, futsal, taekwondo) - Lapangan Tenis PDAM (tennis) - Stadion Hoegeng (sepak bola, atletik, bina raga)										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

13. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Tabel II-217 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2.20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2.20.02. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral										
1	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Persen	100.00	66.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

14. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Tabel II-218 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2.21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2.21.02. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi										
1	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	Persen	3.74	0.93	1.87	2.80	2.80	2.80	74.97	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan **tidak memenuhi target** dikarenakan target akhir RPJMD adalah 3.74, sampai dengan TW 4 tahun 2023 tercapai 2,80, masih berproses lagi sampai akhir periode RPJMD										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

15. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Tabel II-219 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2.22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2.22.02. Program Pengembangan Kebudayaan										
1	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.22.03. Program Pengembangan Kesenian Tradisional										
1	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.22.04. Program Pembinaan Sejarah										
1	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	Persen	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.22.05. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
1	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	Persen	97.52	88.65	87.50	92.20	91.67	91.67	94.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan masih ada 1 target pelestarian cagar budaya yang belum terealisasi, yaitu gedung pertanian.										
2.22.06. Program Pengelolaan Permuseuman										
1	Persentase pengunjung museum batik	Persen	4.80	4.55	19.18	4.66	8.29	8.29	172.64	Tercapai
Capaian indikator Persentase pengunjung museum batik **jauh melebihi target** dikarenakan Jumlah wisatawan dalam 1 tahun : 580,000 liburan sekolah dan kurikulum merdeka menjadi salah satu faktor naiknya jumlah pengunjung museum										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

16. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tabel II-220 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2.23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2.23.02. Program Pembinaan Perpustakaan										
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	Indeks	16.58	15.77	24.97	16.09	27.96	27.96	168.62	Tercapai
Capaian indikator Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) **jauh melebihi target** dikarenakan adanya event pameran literasi selama 5 hari, dan event-event lain sehingga meningkatkan budaya membaca (banyak sekolah yang dikutsertakan dalam event-event tersebut)										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

17. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Tabel II-221 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2.24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										
2.24.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	100.00	100.00	66.08	100.00	100.35	100.35	100.35	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2.24.02. Program Pengelolaan Arsip										
1	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	Persen	66.67	33.33	80.00	46.67	96.67	96.67	144.99	Tercapai
Capaian indikator Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik **jauh melebihi target** dikarenakan Pada saat penetapan target Renstra, nilai audit pengawasan kearsiapan internal OPD rata-rata masih rendah (nilai 59,99 ke bawah) Setelah adanya expose dan arahan Walikota mengenai nilai audit pengawasan kearsipan, tingkat partisipasi OPD menjadi meningkat sehingga persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik keatas dari yang semula 10 OPD menjadi 29 OPD dari 30 OPD										
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	Indeks	52.50	40.00	80.23	45.00	75.00	75.00	142.86	Tercapai
Capaian indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome) **jauh melebihi target** dikarenakan Adanya perbedaan Perhitungan dari yang semula seluruh arsip statis dihitung sebagai tingkat ketersediaan arsip menjadi hanya arsip yang telah dibuatkan daftar sarana temu balik yang dihitung sebagai Tingkat ketersediaan arsip										
2.24.03. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip										
1	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	66.67	66.67	66.67	Belum Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
Capaian indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan Belum tercapai karena tidak ada perangkat daerah yang digabung dan atau dibubarkan										
2.24.04. Program Perizinan Penggunaan Arsip										
1	Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK	persen	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Belum Tercapai
Capaian indikator Persentase kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK **tidak memenuhi target** dikarenakan Belum Tercapai dikarenakan tidak adanya pengajuan permohonan penggunaan arsip yang bersifat tertutup										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2.2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Tabel II-222 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
3.25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3.25.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.60	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	102.83	100.00	100.89	100.89	100.89	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	31.25	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.25.03. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
1	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	persen	6.07	1.00	0.01	1.00	-0.04	-0.04	-0.74	Tidak Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI **tidak memenuhi target** dikarenakan Terjadi penurunan produksi perikanan tangkap dikarenakan: 1. Pada bulan September: Kondisi Cuaca, Iklim Tidak Mendukung, Kondisi Perairan terpengaruh Elnino; 2. Adanya Retribusi tambahan akibat penerapan Kebijakan PNBP PIT ; 3. Pembangunan Infrastruktur Parapet Di Dermaga, ; 4. Minimnya Fasilitasi Docking Kapal.										
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	persen	6.15	1.00	0.00	1.00	-0.15	-0.15	-2.51	Tidak Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI **tidak memenuhi target** dikarenakan Terjadi penurunan pendapatan daerah dikarenakan: 1. Pada bulan September: Kondisi Cuaca, Iklim Tidak Mendukung, Kondisi Perairan terpengaruh Elnino; 2. Adanya Retribusi tambahan akibat penerapan Kebijakan PNBP PIT ; 3. Pembangunan Infrastruktur Parapet Di Dermaga, ; 4. Minimnya Fasilitasi Docking Kapal.										
3.25.04. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya										
1	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	persen	6.15	1.00	-17.99	1.00	1.12	-37.20	-604.88	Belum Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya **tidak memenuhi target** dikarenakan (a) Banjir rob mengakibatkan gagal panen; (b) Adanya pembanngunan tanggul, menyebabkan tambak diluar tanggul semakin tinggi genangan rob nya; (c) Tambak yang berada di dalam tanggul kesulitan mendapatkan air laut yang dibutuhkan budidaya air payau terutama pada musim kemarau atau Ketika air surut; (d) Semakin berkurangnya lahan tambak dari tahun 2021 seluas 173 Ha menjadi 93 Ha di Krapyak Degayu.										
3.25.06. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan										
1	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	persen	12.20	12.20	0.00	12.20	26.73	26.73	219.14	Tercapai
Capaian indikator Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan **jauh melebihi target** dikarenakan Jumlah pengusaha perikanan pengolahan dan pemasaran yang dibina : 156 orang; Jumlah pengusaha perikanan pengolahan dan pemasaran adalah 344 orang. Adanya Pelaksanaan pembinaan oleh penyuluh secara rutin dalam setiap bulannya dan pembinaan ke lapangan langsung oleh petugas.										
2	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	pelaku usaha	12.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	50.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) **tidak memenuhi target** dikarenakan proses pencapaian target bertahap hingga akhir periode RPJMD. dimana target setiap tahun adalah 2 Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant).										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Tabel II-223 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
3.26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3.26.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	116.67	116.67	116.67	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.26.02. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata										
1	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	Persen	12.50	10.00	13.42	11.00	12.82	12.82	102.55	Tercapai
3.26.03. Program Pemasaran Pariwisata										
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	Persen	46.98	21.98	266.26	31.98	243.53	243.53	518.37	Tercapai
Capaian indikator Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome) **jauh melebihi target** dikarenakan jumlah wisatawan mancanegara meningkat salah satunya karena banyaknya jumlah wisatawan yang menghadiri kegiatan acara di kanzus sholawat habib lutfi dan khaul habib ahmad di Sapuro.										
3.26.04. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual										
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	persen	59.52	0.00	39.90	30.30	71.33	71.33	119.85	Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi **jauh melebihi target** dikarenakan capaian indikator ditahun 2022 melebihi target akhir RPJMD karena meningkatnya pelaku EKRAF yang mengikuti kegiatan diakhir masa pandemi covid - 19 sebagai upaya meningkatkan perekonomian para pelaku ekraf yang terdampak pandemi, sehingga walaupun pada tahun 2023 Kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak terlaksana dikarenakan anggaran di Drop (Refocussing) capaian programnya tetap melebihi target.										
3.26.05. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif										
1	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	persen	100.00	0.00	40.70	40.00	296.73	296.73	296.73	Tercapai
Capaian indikator Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar jauh melebihi target dikarenakan animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan EKRAF besar sehingga kuota peserta ditambahkan pada kegiatan festival balon udara dan Karnival Batik. dimana kegiatan ini sebagai bentuk pelatihan pelaku ekraf dalam pemasaran produk maupun pelatihan dalam kreasi balon udara untuk menarik minat wisatawan.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Tabel II-224 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
3.27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
3.27.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100	100	98.50	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100	100	64.47	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100	100	96.08	100.00	50.00	50.00	50.00	Tidak Tercapai
3.27.02. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian										
1	Nilai produksi pertanian pertahun	Miliar Rupiah	55.84	55.56	50.82	55.67	59.29	59.29	106.18	Tercapai
2	Nilai produksi peternakan pertahun	Miliar Rupiah	203.65	184.46	644.18	191.91	259.61	259.61	127.48	Tercapai
Capaian indikator Nilai produksi peternakan pertahun **jauh melebihi target** dikarenakan banyaknya permintaan pasar di Kota Pekalongan atas produk peternakan, sehingga meningkatkan nilai produksi peternakan.										
3.27.03. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian										
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.27.04. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner										
1	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen	5	5	-68.81	5.00	98.40	98.40	1967.91	Tercapai
Capaian indikator Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular **jauh melebihi target** dikarenakan beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinperpa Kota Pekalongan, yaitu : pengobatan untuk hewan yg terkena penyakit dan vaksinasi untuk pencegahan penularan ke hewan yang belum terjangkit.										
3.27.05. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian										
1	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	persen	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.27.06. Program Perizinan Usaha Pertanian										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
1	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	persen	100	0	36.36	50.00	54.32	54.32	54.32	Tidak Tercapai
Capaian indikator persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin **tidak memenuhi target** dikarenakan rendahnya kesadaran para pelaku usaha pertanian/peternakan untuk mengurus ijin usaha. selain telah dilakukan upaya persuasif dengan pendekatan secara langsung kepada para pelaku usaha pertanian/peternakan oleh Dinperpa Kota Pekalongan, pada tahun 2023 telah di sahkan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. adanya kekuatan hukum mengikat dengan di sahkan nya Perda tersebut, diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk mengurus ijin.									
3.27.07. Program Penyuluhan Pertanian										
1	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	persen	5	5	8.70	5.00	8.70	8.70	173.91	Tercapai
Capaian indikator Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun **jauh melebihi target** dikarenakan adanya kegiatan bimbingan penyuluhan yang intensif kepada kelompok tani mengenai administrasi, kelembagaan maupun keaktifan kelompok tani, struktur organisasi,dan intensitas pertemuan antar anggota kelompok tani.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Tabel II-225 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
3.30. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
3.30.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	106.14	100.00	101.66	101.66	101.66	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	135.19	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.30.02. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan										
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat	persen	77.70	73.93	0.00	75.42	81.07	81.07	104.33	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
	Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)									
3.30.03. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan										
1	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	100.00	75.00	73.33	81.25	68.75	68.75	68.75	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya **tidak memenuhi target** dikarenakan Di Tahun 2023 telah dilaksanakan proses perencanaan pasar kecamatan untuk proses pembangunan fisik pasar kecamatan direncanakan akan dimulai di Tahun 2024. Di Tahun 2023, pembangunan pasar diprioritaskan untuk pembangunan Pasar Banjarsari.										
3.30.04. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting										
1	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	persen	100.00	80.00	101.06	88.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.30.05. Program Pengembangan Ekspor										
1	Persentase peningkatan volume ekspor	persen	8.19	7.24	-75.90	7.60	-0.04	-0.04	-0.43	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase peningkatan volume ekspor **tidak memenuhi target** dikarenakan Adanya penurunan harga komoditas unggulan potensial ekspor ditambah perlambatan ekonomi global yang memicu penurunan permintaan dari negara tujuan ekspor.										
3.30.06. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen										
1	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	persen	83.99	73.99	111.16	77.99	59.02	59.02	70.27	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan Tingkat kesadaran wajib tera dan tera ulang yang masih rendah serta belum terdapat sanksi yang diberlakukan dengan tegas bagi wajib tera atau tera ulang yang tidak melaksanakan tera / terang alat UTTP. Dindagkop UKM telah melaksanakan kegiatan jemput bola ke kelurahan dan pasar serta sosialisasi mengenai kewajiban tera untuk meningkatkan jumlah UTTP yang diter / tera ulangkan Di Tahun 2024, tarif retribusi untuk tera dan tera ulang tidak dipungut biaya. Akan dilaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan secara masal di seluruh pasar dan kelurahan Se -Kota Pekalongan										
3.30.07. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri										
1	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	persen	7.50	2.09	1.18	4.26	0.96	0.96	12.75	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output) **tidak memenuhi target** dikarenakan Masih kurangnya fasilitasi yang diberikan kepada UMKM terutama dalam pelaksanaan pameran luar daerah dan waktu pelaksanaan pameran/event sepenuhnya menjadi wewenang penyelenggara. Selain itu, fasilitasi pemasaran yang diberikan kepada UMKM dalam Showroom Dekranasda tergantung pada minat UMKM untuk melakukan pemasaran di Showroom Dekranasda. Di tahun 2024, perlu dilakukan penambahan kuota UMKM yang diikutsertakan dalam event/pameran luar daerah.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

5. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Tabel II-226 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
3.31. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3.31.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	102.97	100.00	100.30	100.30	100.30	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	216.67	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3.31.02. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri										
1	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	persen	21.04	20.59	66.60	20.43	75.34	75.34	358.08	Tercapai
Capaian indikator Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome) **jauh melebihi target** dikarenakan adanya perubahan perhitungan capaian.										
3.31.03. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/kota										
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	persen	26.00	23.00	100.00	24.00	9.04	9.04	34.77	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan terbatasnya jumlah anggaran, SDM dan waktu untuk melakukan pengawasan menyeluruh jika dibandingkan dengan jumlah usaha baru yang mengajukan ijin secara online melalui OSS RBA.										
3.31.04. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional										
1	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	95.00	95.00	95.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome) **tidak memenuhi target** dikarenakan untuk informasi energi/bahan bakar sebagian besar belum bisa didapatkan karena sebagian besar merupakan industri kecil/home industri yang pemakaian energinya bercampur dengan rumah tangga.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2.2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Tabel II-227 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
4.01. SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	99.71	99.71	99.71	Tidak Tercapai
3	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum,dan jasa penunjang urusan pemerintahan	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	103.65	103.65	103.65	Tercapai
4	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	75.00	75.00	75.00	Tidak Tercapai
6	Persentase pelayanan keprotokoleran	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4.01.02. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat										
1	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	persen	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	persen	100.00	100	0.00	100.00	90.00	90.00	90.00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif **tidak memenuhi target** dikarenakan cukup panjangnya proses pembahasan Raperda Pansus I,II dan III di triwulan I tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar, Raperda Pajak Daerah & Retribusi Daerah serta Raperda Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial & Lingkungan Badan Usaha sehingga berakibat pembentukan pansus berikutnya mengalami hambatan.										
3	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	persen	100.00	100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4.01.03. Program Perekonomian Dan Pembangunan										
1	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	Persen	100.00	100	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	persen	6.00	7	0.00	6.00	3.62	3.62	100.00	Tercapai
3	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	persen	100.00	100	0.00	100.00	97.50	97.50	97.50	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa **tidak memenuhi target** dikarenakan target pengadaan barang/jasa (tender/seleksi) yang difasilitasi oleh bagian PBJ dan Minbang yang ditentukan pada awal Tahun Anggaran 2023 sejumlah 40 paket pekerjaan, sedangkan pada realisasi tender/seleksi yang telah terlaksana ada sejumlah 39 paket pekerjaan sehingga belum sesuai target. Dalam pelaksanaan beberapa pekerjaan tidak jadi dilaksanakan atau dialihkan untuk paket pekerjaan lainnya. Dan beberapa paket pekerjaan konstruksi berubah metode pemilihan yang digunakan, semula tender menjadi e-purchasing										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2. Sekretariat DPRD

Tabel II-228 Capaian Indikator Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
4.02. SEKRETARIAT DPRD										
4.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.01	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian,administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	77.46	100.00	102.02	102.02	102.02	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	102.10	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	persen	100.00	100.00	87.50	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4.02.02. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD										
1	Persentase Perda yang ditetapkan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	75,00	75,00	75,00	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Perda yang ditetapkan **tidak memenuhi target** dikarenakan cukup panjangnya proses pembahasan Raperda Pansus I,II dan III di triwulan I tahun 2023 tentang Pengelolaan Pasar, Raperda Pajak Daerah & Retribusi Daerah serta Raperda Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial & Lingkungan Badan Usaha sehingga berakibat pembentukan pansus berikutnya mengalami hambatan.										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
2	Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2.2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Tabel II-229 Capaian Indikator Perencanaan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
5.01. PERENCANAAN										
5.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	102.73	100.00	100.08	100.08	100.08	Tercapai
3	persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.01.02. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah										
1	Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.01.03. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah										
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
3	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2. Keuangan

Tabel II-230 Capaian Indikator Keuangan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
5.02. KEUANGAN										
5.02.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	Persen	100.00	100.00	100.01	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	102.76	100.00	100.46	100.46	100.46	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	93.76	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.02.02. Program Pengelolaan Keuangan Daerah										
1	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	Persen	7.26	11.91	5.79	8.08	5.79	5.79	125.39	Tercapai
Capaian indikator Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome) **jauh melebihi target** dikarenakan Capaian lebih dari 110% karena adanya efisiensi belanja dan pelampauan pendapatan.										
5.02.03. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah										
1	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	Persen	100.00	100.00	75.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.02.04. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah										
1	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	Persen	5.00	5.00	102.99	5.00	4.80	4.80	104.17	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

3. Kepegawaian

Tabel II-231 Capaian Indikator Kepegawaian Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
5.03. KEPEGAWAIAN										
5.03.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	111.33	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen		100.00	95.84	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5.03.02. Program Kepegawaian Daerah										
1	Persentase PNS berkembang karier	persen	50.00	50.00	49.00	50.00	66.67	66.67	133.33	Tercapai
Capaian indikator Persentase PNS berkembang karier **jauh melebihi target** dikarenakan Bantuan pendidikan untuk pejabat administrator dan pengawas yang dilantik sebagai pejabat fungsional wajib memiliki pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan paling lama 4 (empat) tahun sejak diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional.										
2	Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	persen	100.00	100.00	68.06	100.00	98.90	98.90	98.90	Tidak Tercapai
Capaian indikator Tingkat Pelaporan Kinerja ASN **tidak memenuhi target** dikarenakan Terdapat ASN yang tidak menyusun penilaian SKP secara tepat waktu dikarenakan sakit										
3	Persentase Keterisian Jabatan	persen	90.00	90.00	98.96	90.00	97.41	97.41	108.23	Tercapai
4	Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	80.00	80.00	97.33	80.00	64.35	64.35	80.44	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase Keterpenuhan Formasi ASN **tidak memenuhi target** dikarenakan Jumlah formasi ASN terisi : TW. I : 3.217 TW. II : 3.178 TW. III : 3.233 TW. IV : 3.177 jumlah seluruh formasi yang tersedia : TW. I : 4.937 TW. II : 4.937 TW. III : 4.937 TW. IV : 4.937. Hal tersebut dikarenakan adanya dinamika kebijakan kepegawaian di tingkat pusat kemudian berdampak pada daerah, terkait perubahan kebijakan penerimaan CASN										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

4. Pendidikan dan Pelatihan

Tabel II-232 Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
5.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
5.04.02. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia										
1	Persentase PNS berkembang kompetensinya	persen	100.00	100.00	113.25	100.00	149.29	149.29	149.29	Tercapai
Capaian indikator Persentase PNS berkembang kompetensinya **jauh melebihi target** dikarenakan Pendidikan dan pelatihan selain dilakukan secara klasikal juga dilakukan secara daring atau juga dengan metode blended learning, sehingga jumlah PNS yang mengikuti diklat pun meningkat.										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

5. Penelitian Dan Pengembangan

Tabel II-233 Capaian Indikator Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5.05.02. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah										
1	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	skor	76.00	70.93	76.60	73.00	n/a	n/a	n/a	Belum tersedia data
Capaian indikator Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) **tidak memenuhi target** dikarenakan Indikator kinerja skor capaian nilai RIDA (SIDA) sampai dengan triwulan IV data belum tersedia, dikarenakan tidak dilakukan pengukuran RIDA Kota Pekalongan oleh BRIN. Hal ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, pengukuran Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) saat ini telah bertransformasi menjadi Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). Fasilitasi Pengukuran Kapasitas Inovatif Daerah Tahun 2023-2025 (R-SIDA) akan dilakukan dengan penyelarasan pengukuran IDSD.										
3	Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100,00	100,00	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2.2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat

Tabel II-234 Capaian Indikator Inspektorat Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
6.01. INSPEKTORAT DAERAH										
6.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	93.34	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	99.33	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
6.01.02. Program Penyelenggaraan Pengawasan										
1	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	persen	85.00	85.00	57.14	85.00	52.94	52.94	62.28	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan **tidak memenuhi target** dikarenakan opd ada yang belum menyelesaikan dokumen TL 700.1.2.1/071/RHS/LHA.KINERJA.DINPERPA/2023 01-10-2023 Dinas Pertanian dan Pangan Keterangan : jumlah rekomendasi 4, sudah TL 700.1.2.1/084.1/RHS/LHA.LABKESDA/2023 23-10-2023 Dinas Kesehatan (Probity Audit Pembangunan Labkesda) Keterangan : jumlah rekomendasi 1 , sudah TL 700.1.2.1/095/RHS/LHA.OPERASIONAL/2023 22-11-2023 SatpolP3KP Keterangan : jumlah rekomendasi 6, belum TL semua (setor kembali) 700.1.2.1/085/RHS/LHA.DPMPPA/2023 27-10-2023 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERUMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Keterangan : jumlah rekomendasi 4, sudah TL 700.1.2.1/084/RHS/LHP-PDDT.DINPERKIM/2023 23-10-2023 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Keterangan : jumlah rekomendasi 2, belum TL semua dalam proses (setor kembali)									
6.01.03. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi										
1	Level Kapabilitas APIP	Persen	3.00	3.00	3.00	3.00	3.09	3.09	103.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2.2.3.7 Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Tabel II-235 Capaian Indikator Kecamatan Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
7.01. KECAMATAN										
7.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	100.20	100.00	100.24	100.24	100.24	Tercapai
3	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Kec. Pekalongan Utara)	Persen	100.00	100.00	97.20	100.00	96.67	96.67	96.67	Tidak Tercapai
4	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
5	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
6	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Selatan)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	66.96	100.00	97.84	97.84	97.84	Belum Tercapai
9	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Barat)	persen	100.00	100.00	102.08	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
10	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
11	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	91.58	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
12	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah (Kec. Pekalongan Timur)	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7.01.02. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik										
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7.01.03. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan										
1	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	Persen	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	persen	100.00	100	100.30	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7.01.04. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum										
1	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
7.01.05. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
1	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
3	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
4	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2.2.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Tabel II-236 Capaian Indikator Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan Tahun 2023

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
8.01. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
8.01.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota										
1	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
2	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100.00	100.00	101.68	100.00	100.33	100.33	100.33	Tercapai
3	Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8.01.02. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan										
1	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.74	100.74	100.74	Tercapai
8.01.03. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik										

No	Aspek/ Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi s.d. 2022	Tahun 2023		Realisasi RPJMD s.d. TW IV - 2023	Tingkat Capaian RPJMD	Status Ketercapaian Thd Target Akhir RPJMD
						Target Perub RKPD	Realisasi s.d. TW IV			
1	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	lembaga	16.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	100.00	Tercapai
8.01.04. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan										
1	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	persen	100.00	100.00	95.65	100.00	90.48	90.48	90.48	Tidak Tercapai
Capaian indikator Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan **tidak memenuhi target** dikarenakan jumlah ormas yang direncanakan mendapatkan fasilitasi dan pembinaan pada triwulan IV sebanyak 6 ormas, namun hanya 4 Ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan, 2 ormas tidak memproses pencairan hibah sehingga tidak mendapatkan fasilitasi dan pembinaan.										
8.01.05. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya										
1	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Tercapai
8.01.06. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial										
1	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	persen	100.00	100.00	100.00	100.00	44.00	44.00	44.00	Belum Tercapai
Capaian indikator persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial **tidak memenuhi target** dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023										

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), pusaka.pekalongankota.go.id, 2024

2.2.3 Hasil Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penerapan Standar Pelayanan Minimal dilakukan dengan 4 (empat) tahapan, yaitu:

a. Pengumpulan data

Pada tahapan pengumpulan data, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan; dan
2. Mengidentifikasi jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.

b. Penghitungan kebutuhan pmenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa, sarana, dan prasarana, dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. Ketersediaan tersebut dapat diperoleh dari pihak BUMN, BUMD, lembaga non pemerintah, masyaakat dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Hasil perhitungan tersebut digunakan untuk menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar berpedoman pada standar biaya.
4. Perangkat Daerah menghitung jumlah warga negera yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu, dikarenakan:
   - miskin atau tidak mampu;
   - sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
   - kondisi bencana; dan/atau
   - kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyusun rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan penghitungan warga negara yang berhak menerima Pelayanan dasar yang tidak mampu yang dimuat dalam dokumen RPJMD, RKPD,
2. Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar berdasarkan penghitungan ke dalam Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
3. Bappeda memastikan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan dasar diimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
4. Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
5. Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD.

d. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar

Pada tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, Perangkat Daerah pengampu urusan Standar Pelayanan Minimal melakukan tahapan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah melaksanakan Program dan Kegiatan , Sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
2. Perangkat Daerah menetapkan target pencapaian Program dan Kegiatan sub kegiatan berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya.
3. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar berupa penyediaan barang dan/atau jasa, sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang dibutuhkan dan/atau melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
    - membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi warga negera secara minimal, dengan memperioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu.
    - memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya

Pada tahun 2023 Kota Pekalongan telah menerapkan seluruh tahapan penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Pemerintah Kota Pekalongan juga telah mengalokasikan anggaran atas penerapan Standar Pelayanan Minimal sejak proses perencanaan, yang dimulai dari RPJMD sampai dengan APBD Tahun Anggaran 2023.

2.2.4.1 Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, maka jenis pelayanan dasar bidang pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar; dan
3. Pendidikan Kesetaraan.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan kedua aturan tersebut, capaian atas Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan berdasarkan rapot Pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tahun 2023 Capaian SPM Pendidikan secara keseluruhan adalah 99,67% atau termasuk kategori **TUNTAS UTAMA**, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendidikan dasar usia dini dengan capaian sebesar 94,22%;
2. Pendidikan dasar dengan capaian sebesar 97,00%;
3. Pendidikan kesetaraan dengan capaian sebesar 100%;

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 disajikan dalam Tabel II-237 berikut.

Tabel II-237 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**Pengumpulan Data**	
	Pengumpulan data dari Sekolah yang lambat disebabkan adanya permasalahan administrasi perpindahan data maupun kendala sistem sebagai akibat banyaknya operator sekolah yang mengakses aplikasi dapodik maupun emis dalam waktu yang bersamaan, sehingga waktu proses menjadi lebih lambat	1. Mengintensifkan penguatan kelembagaan di satuan Pendidikan terutama disiplin dalam menjalankan administrasi sekolah. 2. Meningkatkan koordinasi dengan Operator Sistem Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota Lain dan Kantor Kemenag sehingga mempermudah penyelesaian jika ditemukan kendala data maupun kendala sistem.
2.	**Penghitungan Kebutuhan**	
	Tim yang bertugas melakukan perhitungan kebutuhan perlu waktu untuk verifikasi dan validasi siswa miskin calon penerima bantuan perlengkapan belajar maupun biaya personil	Menggunakan basis data penduduk miskin dari kemensos sebagai dasar penentuan siswa penerima bantuan agar lebih akuntabel
	Tidak tersedianya data BNBA pada data penduduk, sehingga kesulitan dalam menentukan kebutuhan jumlah penerima layanan SPM berdasarkan asal siswa.	Melakukan koordinasi dengan Dindukcapil agar mendapatkan solusatas permasalahan tersebut.
3.	**Perencanaan dan Penganggaran**	
	Keterbatasan anggaran yang tersedia menghambat pemenuhan kebutuhan dalam rangka pencapaian SPM	1. Membuat skala prioritas pemenuhan kebutuhan agar hasilnya lebih optimal dan tepat sasaran. 2. Melakukan advokasi penganggaran pemenuhan SPM di Badan Anggaran agar penetapannya sesuai dengan yang telah direncanakan.
4.	**Pelaksanaan**	
	Tidak ada	-
5,	**Lain-lain**	
	Rapor pendidikan yang dirilis terlambat sehingga menyulitkan dalam Menyusun pelaporan tahun N karena data yang disandingkan tidak padan	Mengonsultasikan permasalahan tersebut kepada Tim Pusat dan mengikuti arahan yang diberikan.
	Rapor pendidikan hanya menyajikan hasil akhir tanpa menyertakan nilai variable perhitungannya, sehingga menyulitkan pada saat pengisian form tahapan penerapan SPM	Mengonsultasikan permasalahan tersebut kepada Tim Pusat dan mengikuti arahan yang diberikan.

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.2.4.2 Urusan Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka jenis pelayanan dasar bidnag pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis; dan
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiancy Virus*).

Pada tahun 2023 Capaian SPM Kesehatan secara keseluruhan adalah 95,56% atau kategori **TUNTAS UTAMA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil dengan capaian 97,62%;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin dengan capaian 100,00%;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir dengan capaian 99,22%;
4. Pelayanan kesehatan balita dengan capaian 99,87%;
5. Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar dengan capaian 100%;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan capaian 81,10%;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan capaian 91,37%;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dengan capaian 70,49%;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetis melitus dengan capaian 100,00%;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguam jiwa (ODGJ) berat dengan capaian 100%;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dengan capaian 100%;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus) dengan capaian 100%

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 disajikan dalam Tabel II-238 berikut.

Tabel II-238 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**Pengumpulan Data**	
	Laporan SPM dari Puskesmas masuk ke Dinas Kesehatan melebihi dari batas akhir waktu penginputan triwulan pada aplikasi SPM Bangda Kemendagri	1. Mengupayakan dan memberi pengarahan kepada petugas puskesmas agar pelaporan dikirim ke Dinas Kesehatan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan 2. Menkoordinasikan pelaporan agar tepat waktu 3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Laporan SPM dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan.
2.	**Perhitungan Kebutuhan**	
	Perhitungan sasaran menggunakan estimasi/proyeksi dari jumlah penduduk	Pada laporan akhir (TW IV) agar dapat menggunakan data rill.

No.	Permasalahan	Solusi
	sedangkan untuk capaian seharusnya menggunakan data rill yang ada di lapangan	
3.	**Perencanaan dan Penganggaran**	
	Kurangnya anggaran yang diberikan terutama pada hipertensi dan diabetes militus	Akan berkoordinasi dengan BAPPEDA dalam hal perencanaan penganggaran
4.	**Pelaksanaan**	
	Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya lansia untuk datang ke posyandu lansia yang ada di wilayah sekitar tempat tinggal	1. Mengoptimalisasikan petugas promkes dan kader kesehatan yang ada disekitar untuk dapat mengedukasi kepada masyarakat khususnya Lansia 2. Memperluas layanan jemput bola di Dinas Kesehatan yang semula berupa layanan menjemput para pengguna layanan karena kondisi rob diperluas ke masyarakat khususnya lansia.
5.	**Lain-lain**	
	Adanya perbedaan persepsi antara kemenkes dan kemendagri dalam pelaporan sasaran dan capaian akhir	Perlu adanya koordinasi lebih lanjut antara Kemendagri dan Kemenkes dalam menyusun kebijakan/regulasi terkait SPM bidang kesehatan

Sumber: Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.2.4.3 Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka ajenis pelayanan dasar bidnag pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik.

Pada tahun 2023 Capaian SPM Pekerjaan Umum secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan capaian 100%;
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik dengan capaian 100%.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 disajikan dalam Tabel II-239 berikut.

Tabel II-239 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**Pengumpulan Data**	
	Data yang dibutuhkan lebih rigid sampai ke identitas pribadi yang menurut wali data dari kominfo ada konsekuensi dari penyebaran data pribadi	Dipertimbangkan kembali terhadap pencatuman data pribadi
2.	**Penghitungan Kebutuhan**	
	Penghitungan kebutuhan masih memerlukan koordinasi dengan OPD terkait	Rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh data yang lengka dan andal

No.	Permasalahan	Solusi
3.	**Perencanaan dan Penganggaran**	
	Perlu kerjasama yang aktif untuk CSR agar dapat meningkatkan mutu SPM.	Koordinasi dan sosialisasi dengan pihak-pihak yang potensial untuk menjadi CSR
4.	**Pelaksanaan**	
	Kurang tersedianya lahan yang strategis untuk pembangunan SPALD-T, SPALD-S dan IPLT	Koordinasi dengan provinsi terkait rencana pembangunan insfrastruktur secara regional
	lokasi untuk pembuatan instalasi pembuangan tinja yang sudah tidak layak, sedangkan untuk mencari lokasi baru ada keterbatasan lahan pemerintah kota	Komunikasi dan sosialisasi dengan warga
5.	**Lain-lain**	
	Tidak ada	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.2.4.4 Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka jenis pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2023 Capaian SPM urusan Perumahan dan Permukiman secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan capaian 100%;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian 100%.

Kendala yang dihadapi daerah dalam penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 disajikan dalam Tabel II-240 berikut.

Tabel II-240 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**PENGUMPULAN DATA**	
	Kesulitan dalam melengkapi BNBA secara detail sesuai dengan isian form, baik itu RT/RW, NIK, jumlah anggota keluarga, luas bangunan, luas tanah dll.	Melakukan verifikasi ulang dengan tenaga fasilitator lapangan dan tenaga kegiatan.
2.	**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN**	
	Belum bisa memprediksi kegiatan kebencanaan dan lokasi yang terjadi bencana, karena sifatnya insidentil.	Melakukan mitigasi daearah rawanbencana se-kota Pekalongan.

No.	Permasalahan	Solusi
3.	**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**	
	Anggaran kebencanaan selalu ada meskipun peningkatan dan penurunan kebencanaan tidak bisa diprediksi.	Melakukan pengusulan anggaran di n1 dan berkoordinasi dengan TAPD.
4.	**PELAKSANAAN**	
	Proses pemindahan / relokasi daerah sepadan sungai sudah selesai dan diberikan kerohiman.	Melakukan koordinasi dengan pemangku wilayah Kelurahan dan Kecamatan.
	Proses realisasi kegiatan relokasi membutuhkan waktu dan proses dalam pemindahan dan pembangunan secara bertahap.	Pembangunan rumah relokasi membutuhkan koordinasi antar bidang, dinas dan stakeholder terkait karena penerima bantuan tidak mampu secara ekonomi.
5.	**LAIN - LAIN**	
	Tidak ada	-

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekalongan, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.2.4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Bidang Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Pada tahun 2023 Capaian SPM urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dengan capaian 100,00%;
2. Pelayanan Informasi rawan bencana dengan capaian 100,00%;
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dengan capaian 100,00%;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan capaian 100,00%;
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian 100,00%;

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 disajikan dalam Tabel II-241 berikut.

Tabel II-241 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**PENGUMPULAN DATA**	
	Tidak ada permasalahan	-
2.	**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN**	
	Tidak ada permasalahan	-
3.	**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**	
	Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan Sub Kegiatan yang seharusnya. Pada tahun anggaran 2023 penganggaran sudah disesuaikan dengan Sub Kegiatan yang sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021.	Melakukan pengusulan penganggaran Berbasis SPM dan melakukan advokasi sosial terhadap OPD yang menyelenggarakan Bidang perencanaan dan pembangunan
4.	**PELAKSANAAN**	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses kelayanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indicator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan pendidikan, dan Layanan rujukan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indicator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM denganmenyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indicator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indicator kinerja
5.	**LAIN - LAIN**	
	Tidak ada permasalahan	-

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023, 2024

2.2.4.6 Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di

Daerah Kabupaten/Kota, maka jenis pelayanan dasar bidang sosial yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Pada tahun 2023 Capaian SPM urusan Sosial secara keseluruhan adalah 100% atau termasuk kategori **TUNTAS PARIPURNA**.

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti dengan capaian 100,00%;
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti dengan capaian 100,00%;
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti dengan capaian 100,00%;
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dengan capaian 100,00%;
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota dengan capaian 100,00%.

Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2023 disajikan dalam Tabel II-242 berikut.

Tabel II-242 Kendala Yang dihadapi Daerah Dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Tahun 2023

No.	Permasalahan	Solusi
1.	**PENGUMPULAN DATA**	
	Tidak ada permasalahan	-
2.	**PENGHITUNGAN KEBUTUHAN**	
	Tidak ada permasalahan	-
3.	**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**	
	Anggaran yang tersedia belum sesuai dengan Sub Kegiatan yang seharusnya. Pada tahun anggaran 2023 penganggaran sudah disesuaikan dengan Sub Kegiatan yang sesuai dnegan Permendagri 59 Tahun 2021.	Melakukan pengusulan penganggaran Berbasis SPM dan melakukan advokasi sosial terhadap OPD yang menyelenggarakan Bidang perencanaan dan pembangunan
4.	**PELAKSANAAN**	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, Akses ke layanan pendidikan, dan Layanan rujukan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja

No.	Permasalahan	Solusi
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti ada yang tidak terlaksana seperti Penyediaan alat bantu, Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak, dan Akses ke layanan pendidikan	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dengan menyediakan instrument SPM sesuai dengan sasaran/indikator kinerja
5.	**LAIN - LAIN**	
	Tidak ada permasalahan	-

Sumber: Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023

2.2.4 Hasil Evaluasi *Sustainable Development Goals* (SDG's) Tahun 2023

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development* atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Di Indonesia, SDGs ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia dibagi dalam 4 (empat) dokumen besar yang tidak terpisahkan, yaitu: Pilar Pembangunan Sosial; Pilar Pembangunan Ekonomi; Pilar Pembangunan Lingkungan; dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Sejak tahun 2023, dokumen capaian TPB/SDGs mengacu pada metadata edisi II.

2.2.4.1 Pilar Pembangunan Sosial

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDG's) Pilar Pembangunan Sosial terdiri dari 5 Tujuan, 23 target dan 40 indikator. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-243 berikut.

Tabel II-243 Capaian SDGs Pilar Pembangunan Sosial di Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 1.Mengurangi Kemiskinan							
Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.							
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim (PPP$1,9 per hari)	BPS	%	1.13	PM	PM	PM
Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	%	6,81	6,29	6,09	5,89

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	BPS	%	6,81	6,29	6,09	5,89
	(a) Imunisasi Dasar: Persentase imunisasi dasar pada penduduk usia 12 - 23 bulan	BPS	%	59,93	PM	PM	PM
	(b) Indikator Morbiditas: Angka kesakitan	Dinkes	%	NA	PM	PM	PM
	(c) Lama sekolah: Persentase ART usia 25 - 60 tahun yang tidak tamat SMP	BPS	%	9,29	9,59	9,75	9,92
	(d) Partisipasi sekolah: Persentase anak usia sekolah 7-18 tahun yang tidak/belum bersekolah	BPS	%	0,01	PM	PM	PM
	(e) Listrik: Persentase rumah tangga yang sumber penerangan utamanya bukan listrik	BPS	%	0,0072	PM	PM	PM
	(f) Air minum: Persentase rumah tangga tanpa akses pada air minum bersih	DPU PR	%	0	PM	PM	PM
	(g) 8. Sanitasi: Persentase rumahtangga tidak mempunyai jamban (tidak ada fasilitas)	DPU PR	%	90,69	PM	PM	PM
	(h) Lantai: Persentase rumah tangga dengan jenis lantai terluas adalah tanah	BPS	%	0,33	PM	PM	PM
	(i) Bahan bakar memasak: Persentase rumah tangga dengan Bahan bakar memasak menggunakan elpiji	BPS	%	98,18	PM	PM	PM
	(j) 11. Aset: Persentase rumah tangga yang tidak punya asset produktif	BPS	%	2,9	PM	PM	PM
	(k) Akta kelahiran: Persentase penduduk yang berusia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran	Dindukcapil	%	0,01	PM	PM	PM
	(l) 13. Akses internet: Persentase rumah tangga yang tidak punya akses internet	BPS		NA	PM	PM	PM
Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan							
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima **program perlindungan sosial:** a. PKH b. PBI c. Sembako	Dinsos P2KB, BPJS Kesehatan; Dinkes	Jiwa	a. 10.932 KK b. 120.203 c. 23.839 KK (BPNT)	55,12	53,73	
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS Kesehatan; Dinkes	%	34,52	PM	PM	PM
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan; BPS	%	0,62			

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan							
1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	BPS	%				
	(a) Persentase penduduk dengan akses pada layanan air minum layak			98,88	PM	PM	PM
	(b) Persentase penduduk dengan akses pada layanan sanitasi layak			86,82	PM	PM	PM
	(c) Persentase penduduk dengan akses pada layanan fasilitas Penyehatan Dasar (fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air)			-			
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan:	BPS	%				
	(a) Proporsi rumah tangga dengan rumah milik sendiri			67,23			
	(b) Proporsi rumah tangga dengan rumah sewa/kontrak			3,39			
Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Jiwa	2,25	PM	PM	PM
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat kab/kota	BPBD	Dokumen	21	1	1	1
Tujuan 2. Tanpa Kelaparan							
Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil							
2.2.1*	Prevalensi stunting	DINKES	%	7,43	<12%	<12%	<12%
2.2.2*	Prevalensi wasting	DINKES	%	7,46	PM	PM	PM
Target 2.4. Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca							
2.4.1(a)	a) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan b) Luas Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	DINPERPA	Hektar	521	PM	PM	PM
Target 2.a. Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produk							
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	DINPERPA	Indeks	NA	NA	NA	NA
Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera							
Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup							
3.1.1*	Jumlah kasus kematian ibu	DINKES	Kasus	6	5	4	3
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan	BPS	%	100	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi heaptitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya							
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	DINKES	Kasus baru per 100.000 penduduk	0,0031	PM	PM	PM
3.3.3*	Jumlah kasus malaria positif pada periode tertentu	DINKES	Orang	2	PM	PM	PM
3.3.4*	Jumlah kasus infeksi baru Hepatitis B pada periode waktu tertentu	DINKES	Orang	58	45	45	45
3.3.5*	Jumlah kasus baru penyakit tropis yang diobati: a) filariasis dan b) kusta	DINKES	Orang	a. 0 kasus b. 69 orang	a. 0 b. 54	a. 0 b. 55	a. 0 b. 56
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan							
3.4.1 (a)	Persentase Penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau selama sebulan terakhir	BPS	%	19,75			
3.4.1.(b)	Jumlah kasus hipertensi	DINKES	Kasus	50187	PM	PM	PM
3.4.1.(c)	Jumlah kasus obesitas	DINKES	Kasus	2633	PM	PM	PM
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang							
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	BPS	%	4,31	PM	PM	PM
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	BPJS/BPS	%	98,10			
Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat							
3.a.1*	Persentase Penduduk umur ≥ 15 tahun yang merokok tembakau selama sebulan terakhir	BPS	%	19,75 persen	PM	PM	PM
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil							
3.c.1*	Jumlah tenaga kesehatan (9 jenis tenaga strategis di Puskesmas):a. Dokterb. Dokter gigic. Tenaga kefarmasiand. Perawate. Bidanf. Nutrisionisg. Sanitarianh. Promosi Kesehatani. Ahli Teknik Laboratorium MedikKepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.a. Apotekerb. Bidanc. Dokter Gigid. Dokter Spesialise. Dokter Umumf. Perawatg. Tenaga Gizih. Tenaga Kesehatan Lingkungani. Tenaga Kesehatan Masyarakatj. Tenaga Keteknisian Medisk. Tenaga Keterapian Fisikl. Tenaga Psikolog Klinikm. Tenaga Teknik Biomedika	DINKES	Orang	Jumlah tenaga kesehatan (9 jenis tenaga strategis di Puskesmas):a. 379b. 44c. 354d. 876e. 391f. 36g. 26h. 24i. 133Kepadatan dan distribusi tenaga kesh:a. 0,44b. 1,23c. 0,14d. 0,42e. 0,77f. 2,76g. 0,11h. 0,08i. 0,14j. 0,36k. 0,14l. 0,01m. 0,58	PM	PM	PM
Tujuan 4. Pendidikan yang Berkualitas							

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif							
4.1.1 (a)	Persentase siswa SD/Sederajat dan SMP/Sederajat mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi dan numerasi	DINDIK	%	79,06	PM	PM	PM
4.1.2*	Angka melanjutkan SD/sederajat Angka melanjutkan SMP/sederajat	DINDIK; KEMENAG	Angka	100			
4.1.2 (a)	Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) pada jenjang pendidikan usia 7-13 th, 13-15 th dan 16-18 th	DINDIK; BAPPEDA	Orang	909			
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar							
4.2.2*	Persentase anak usia 5-6 tahun yang pernah/sedang mengikuti pendidikan pra sekolah	DINDIK	%	93,56	99	99	99
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas							
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal.	DINDIK; DINPERINAKER; KEMENAG; BPS	%	100	1621	1625	1625
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).	BPS	%	NA	PM	PM	PM
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan							
4.4.1 (a)	Persentase penduduk berumur 5 tahun keatas yang menggunakan komputer (PC atau dekstop, laptop atau notebook, tablet) dalam 3 bulan terakhir.	BPS	%	14,01	PM	PM	PM
Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan,	BPS	%				
Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi							
4.6.1.(a)	Persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang melek huruf	BPS	%	97,74	PM	PM	PM
Tujuan 5. Kesetaraan Gender							
Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen pemerintahan daerah	SETWAN	%	14,29	30	30	30
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial: (a) Proporsi perempuan di posisi kepemimpinan pemerintah (Kepala Daerah/wakil)	BKPSDM	%	7,41	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	b) Proporsi perempuan yang menempati jabatan eselon II						
Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta							
5.6.2*	Jumlah regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi	DPMPPA	Dokumen	2	PM	PM	PM
Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan							
5.b.1*	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Seluler (HP)/Nirkabel untuk Keperluan Komunikasi dalam 3 Bulan Terakhir	BPS	%	67,22			

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.2.4.2 Pilar Pembangunan Ekonomi

Pada Pilar Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 5 tujuan 11 target dan 16 indikator. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-244 berikut.

Tabel II-244 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Ekonomi di Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau							
Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	BPS	%	100	PM	PM	PM
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	BPS	%	98,18			
Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi							
Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	%	4,22	PM	PM	PM
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	BPS	Rupiah	43,29 juta rupiah	PM	PM	PM
Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	%	NA	PM	PM	PM
Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur							
Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata							
9.1.1 (a)	Kondisi Mantap Jalan KabKota	DPU-PR	km	83,77	84,39	85,48	86,57
9.1.2*	Jumlah penumpang berdasarkan moda	DISHUB	Orang	1.941.952	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	transportasi: kendaraan penumpang						
Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat produksi							
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur.	BPS	%	2,3	PM	PM	PM
Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan							
Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional							
10.1.1 (a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	BPS	%	6,81	PM	PM	PM
Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut							
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	DPMPPA; BAG. HUKUM SETDA	Kebijakan	NA	NA	NA	NA
Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar							
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS KETENAGA KERJAAN; BPS/DINPER INAKER	%	0,62			
Tujuan 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan							
Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya							
17.1.1*	Pendapatan Pemerintah Daerah sebagai proporsi terhadap PDRB ADHB	BPKAD	%	0,0075	0,0072	0,0071	0,0072
17.1.1.(a)	Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah terhadap PDRB ADHB	BPKAD	%	0,00084	0,00077	0,00101	PM
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik daerah yang didanai oleh Pendapatan Asli Daerah	BPKAD	%	23,51	24,23	26,30	26,65
Target 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi							
17.8.1*	Persentase penduduk umur 5 tahun keatas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir	BPS	%	99,09 persen	PM	PM	PM
Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama							
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.	BAG. PBJ & MINBANG	Dokumen	0	0	0	0

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.2.4.3 Pilar Pembangunan Lingkungan

Pada Pilar Pembangunan Lingkungan, terdiri dari 5 tujuan 11 target dan 13 indikator. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-245 berikut.

Tabel II-245 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Lingkungan di Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak							
Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua							
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum layak.	BPS	%	98,88	PM	PM	PM
Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, membetikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat							
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	BPS	%	95,41	PM	PM	PM
	(a) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		%	95,41	PM	PM	PM
	(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak		%	86,82			
	(c) Persentase rumah tangga yang tidak ada fasilitas tempat buang air besar		%	2 persen			
	(d) Proporsi rumah tangga terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja (SPLT)/instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT)		%	-			
Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkat							
6.3.1	Proporsi limbah cair industri cair yang diolah secara aman	DLH	m3/Tahun	27,06	28,63 %	30,06 %	35,76%
Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan							
Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Jiwa	2,25	PM	PM	PM
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat	BPBD; BPS	%	1,164334078			

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	bencana relatif terhadap PDRB						
Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota							
11.6.1.(b)	Persentase sampah yang terkelola	DLH	%	1,207740879	0,29	0,3	0,31
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	DLH	Indeks	82,44	82,84	82,94	83,04
Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas							
11.7.1.(a)	Proporsi Ruang Terbuka Hijau	DLH	%	2,94	2,92	2,93	2,94
Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab							
Target 12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen							
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, PSLB3, KLHK http://sipsn.menlhk.go.id/	%	58%	PM	PM	PM
Target 12.4 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah							
12.4.2*	Jumlah Limbah B3 yang dilaporkan	DLH		57,78%	71,11 %	84,44 %	100,00%
	(a) Jumlah limbah B3 yang dilaporkan (ton)	DLH	ton	57,78%	71,11 %	84,44 %	100,00%
Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali							
12.5.1.(a)	Jumlah sampah yang dikelola	Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional, PSLB3, KLHK http://sipsn.menlhk.go.id/	Ton	95,20176248			
Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.							
12.8.1.(a)	Jumlah satuan unit pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup	DLH	Unit	29	33	36	40
Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim							
Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara							
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak	BPBD	Jiwa	2,25	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	langsung bencana per 100.000 orang						

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.2.4.4 Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pada Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, terdiri dari 1 tujuan 8 target dan 16 indikator. Secara rinci capaian indikator SDGs tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-246 berikut.

Tabel II-246 Capaian SDG's Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola di Kota Pekalongan Tahun 2023

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh							
Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	POLRES; BAKESBANGPOL	Kasus	0	0	0	0
16.1.2(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	POLRES; BAKESBANGPOL; SATPOL PP	Kematian/ 100.000 Penduduk	0	PM	PM	PM
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	POLRES; BAKESBANGPOL	%	NA	PM	PM	PM
Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua							
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi	BAG. HUKUM SETDA	%	12	12	12	PM
Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya							
16.5.1.(a)	Nilai SPI (Survei Penilaian Integritas)	INSPEKTORAT	Nilai	80,79	PM	PM	PM
Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat							
16.6.1.(a)	Nilai Opini BPK	BPKAD	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ≥ B	BAG.ORGANISASI SETDA	%	72,83	75,07	75,57	76,07
16.6.1.(c)	Nilai RB Kabupaten/Kota	BAG.ORGANISASI SETDA	Nilai	77,12	73,69	74,69	75,69
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik berdasarkan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); BAG. ORGANISASI SETDA	Instansi	90,69	83,79	83,94	84,09
Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representif di setiap tingkatan							
16.7.1(a)	Persentase keterwakilan	SETWAN	%	14,29	30	30	30

Kode Indikator	Nama Indikator Kabupaten/Kota	Sumber Data	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target Pencapaian		
					2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)						
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II).	BKPSDM	%	8%	PM	PM	PM
Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DINDUKCAPIL	%	99,82	93,3	93,4	93,5
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.	BPS	%	99,44	93,3	93,4	93,5
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	BPS	%	99,04	93,3	93,4	93,5
Target 16.10 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran							
16.10.2.(a)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	KIP; DISKOMINFO	Nilai	96,62	97,00	97,20	97,50
Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan							
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	DPMPPA; BAG. HUKUM SETDA	Kebijakan	NA	PM	PM	PM

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan daerah didasarkan pada sasaran yang diukur melalui indikator kinerja utama (IKU), yang selanjutnya dikaitkan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah sebagai arah kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan daerah. Identifikasi permasalahan pembangunan tahun 2023 disajikan dalam Tabel II-247 berikut.

Tabel II-247 Permasalahan Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERMASALAHAN
Indeks Keluarga Sehat	Masih rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)
Angka Kematian Ibu (AKI)	
Angka Kematian Bayi (AKB)	
Angka Kematian Balita (AKABA)	
Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	Masih tingginya penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Rata-Rata Lama Sekolah	Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan
Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Masih rendahnya Pengarusutamaan Gender (PUG)
Kategori Kota Layak Anak	Belum optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja serta belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja
Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Masih adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan tingginya potensi terjadinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh
Luas Genangan Banjir dan Rob	Masih luasnya genangan banjir dan rob serta tingginya pencemaran lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup
Indeks Kualitas Air	
Indeks Kualitas Lahan	
Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Belum opimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan
Persentase pelayanan sampah	
Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	
Persentase keterhubungan jalan	
Pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya kontribusi potensi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi
Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya
Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Masih adanya konflik sosial
Indeks SPBE	Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan
IKM Kota	
Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	
Indeks Merit System	
Nilai SAKIP Kota	
Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	
Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PERMASALAHAN
Maturitas SPIP	Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Selanjutnya, permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabaran dari akar masalah di tingkat Kota. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disajikan dalam Tabel II-248 berikut.

Tabel II-248 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Masih rendahnya capaian SPM pendidikan
	Masih rendahnya ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Masih rendahnya jumlah penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota
	Masih kurangnya ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar
	Masih rendahnya Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masih rendahnya cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah
	Masih rendahnya ketersediaan sarana persampahan regional
	Masih rendahnya persentase drainase dalam kondisi baik
	Masih rendahnya rasio kepatuhan PBG Kab/Kota
	Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan
	Masih rendahnya rasio tenaga bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi
	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Masih banyaknya kawasan permukiman kumuh
	Masih rendahnya kawasan permukiman tidak kumuh
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Belum optimalnya pelayanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Belum optimalnya potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Belum optimalnya tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Belum optimalnya kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender
	Masih rendahnya persentase kelurahan layak anak
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Masih rendahnya persentase cadangan pangan daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Belum optimalnya tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Masih rendahnya luasan ruang terbuka hijau
	Masih rendahnya jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai ketentuan perundangan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Belum optimalnya ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk
	Masih rendahnya ketercapaian pelayanan pencatatan sipil
	Masih rendahnya jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Masih rendahnya ketercapaian fasilitasi kerjasama TNI dan kelurahan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum optimalnya rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga
	Masih tingginya angka perkawinan di bawah 21 tahun
	Masih tingginya unmeet need KB
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Masih rendahnya jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Belum tercapainya Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Masih rendahnya koperasi yang berkualitas
	Masih rendahnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Belum optimalnya peraturan fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Belum optimalnya pelayanan bidang kepemudaan dan olahraga
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Belum optimalnya penyediaan data statistik
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Belum optimalnya layanan sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Belum optimalnya pelestarian cagar budaya

URUSAN	PERMASALAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Belum optimalnya layanan perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Masih rendahnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat
	Masih rendahnya kinerja pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup sesuai NSPK
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan tangkap bersumber dari TPI
	Belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah bersumber dari TPI
	Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan budidaya
	Belum optimalnya peningkatan jumlah pengusaha perikanan
	Masih rendahnya jumlah pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Belum optimalnya layanan dibidang pariwisata
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Masih rendahnya usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Masih rendahnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya
	Belum optimalnya peningkatan volume ekspor
	Masih rendahnya persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
	Masih rendahnya jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Belum optimalnya pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait
	Belum optimalnya ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
SEKRETARIAT DAERAH	Masih rendahnya persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif
	Masih rendahnya persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa
SEKRETARIAT DPRD	Belum optimalnya jumlah Perda yang ditetapkan
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	
PERENCANAAN	Belum optimalnya kinerja perencanaan pembangunan daerah
KEUANGAN	Belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan daerah
KEPEGAWAIAN	Belum optimalnya tingkat pelaporan kinerja ASN
	Belum optimalnya keterpenuhan formasi ASN

URUSAN	PERMASALAHAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Belum optimalnya profesionalitas ASN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Belum optimalnya layanan kelitbangan
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
INSPEKTORAT DAERAH	Belum optimalnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	Belum optimalnya tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik
	Belum optimalnya tingkat kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan / kelurahan
	Belum optimalnya tingkat pemberdayaan masyarakat di kelurahan
	Belum optimalnya tingkat kinerja trantibum
	Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan ormas
	Belum optimalnya pengelolaan potensi konflik sosial
Non Urusan	Belum optimalnya ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi
	Belum optimalnya pelayanan keprotokoleran
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD
	Belum optimalnya kualitas laporan capaian kinerja
	Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
	Belum optimalnya pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah
	Belum optimalnya ketersediaan layanan BLUD

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

2.4 Isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pembangunan daerah di Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan pada sub bab 2.3, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam Tabel II-249 berikut.

Tabel II-249 Isu Strategis

Permasalahan	Isu Strategis
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan
Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah	

Permasalahan	Isu Strategis
Masih luasnya genangan banjir dan rob serta tingginya pencemaran yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup
Masih adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan tingginya potensi terjadinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman
Belum opimalnya pengendalian pemanfaatan ruang	
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan	
Masih rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)	Peningkatan Derajat Kesehatan
Masih tingginya penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran
Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja serta belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja	
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan	
Masih rendahnya Pengarusutamaan Gender (PUG)	
Belum optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	
Belum optimalnya kontribusi potensi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Selanjutnya isu strategis dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1 Tata Kelola Pemerintahan

Tata pemerintahan yang baik dan bersih *(Good Governance and Clean Government)* adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and Clean Government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pentingnya isu strategis tata kelola pemerintahan adalah upaya peningkatan secara kontinyu sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu tata kelola pemerintahan yang melayani untuk kepentingan masyarakat, serta memenuhi beberapa kriteria pokok yaitu: transparan, partisipasif, akuntabel dan koordinatif.

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah telah menetapkan indikator berupa Indeks Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan sebesar 77,12. Upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan terus dilakukan. Beberapa aspek terkait yang masih menjadi permasalahan dan harus segera dioptimalkan, yaitu: a) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal, karena indeks SPBE masih sebesar 3,29. Pemerintah Kota Pekalongan selama ini telah membangun sistem tersebut dan akan terus diperkuat, serta peningkatan koordinasi dalam pembangunan aplikasi SPBE dan perkuatan pelayanan pusat data Pemerintah Daerah; b) Layanan publik telah dikelola dengan baik dan perlu dioptimalkan, berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023, Kota Pekalongan mendapat nilai 90,69 dengan kategori Sangat Baik, persentase OPD dengan IKM Sangat Baik sebesar 62,03 persen; c) Keterbatasan ASN, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, dikarenakan Indeks Profesionalitas ASN masih sebesar 86,97; d) Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 72,83 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB. Meskipun nilai SAKIP telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun, namun masih perlu ditingkatkan untuk mendaptkan hasil yang optimal; e) Akuntabilitas keuangan tetap perlu ditingkatkan, meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah memperoleh WTP; f) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena maturitas SPIP bernilai 3,022; g) Belum optimalnya penataan dan kompetensi ASN karena belum terwujudnya *merit system* secara penuh, walaupun dari tahun ketahun terdapat peningkatan nilai dan pada tahun 2023 nilai merit system Kota Pekalongan sebesar 327; h) Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP karena kapabilitas APIP masih pada level 3,09; i) Belum optimalnya nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yaitu sebesar 96,62, masih perlu ditingkatkan; dan j) Masih minimnya jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM, sehingga perlu didorong lagi agar terus bertambah.

Upaya untuk selalu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan, secara kontinyu telah dan akan terus dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan dan didukung pemangku kepentingan pembangunan lainnya. Dengan integrasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan tata kelola pemerintahan selalu meningkat dan dimanfaatkan bagi terwujudnya pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal. Reformasi birokrasi akan menjadi prasyarat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang harus ditingkatkan tiap tahunnya sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sesuai dengan tuntutan dinamika global. Beberapa upaya perubahan yang dilakukan yaitu: Penataan dan penguatan organisasi, dilaksanakan melalui evaluasi kelembagaan PD; Penataan tatalaksana, dilaksanakan melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan Standar Manajemen Mutu (SMM)/Sertifikasi ISO; Penataan sistem manajemen SDM aparatur; Penguatan pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan internal pada PD; Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dilaksanakan melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; Penataan peraturan perundang-undangan dan Perubahan Pola pikir dan budaya kerja (manajemen perubahan).

Dalam aspek pengawasan, yang dilaksanakan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih maka pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala. Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan bertujuan untuk menyinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota; Meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP; dan Mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata kelola pemerintahan yang baik, akan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Selama ini, peran masyarakat dirasakan masih sangat terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat sehingga pengelolaan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berhasil. Selain itu, peran perguruan tinggi juga diperlukan. Perguruan tinggi di Kota Pekalongan lebih menguasai permasalahan dan isu strategis tetapi belum optimal dalam memberikan masukan dalam pengembangan kebijakan pembangunan. Secara hakiki, tata kelola pemerintahan yang baik ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan harus terus dioptimalkan dalam rangka melayani kepentingan masyarakat.

2.4.2 Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup

Permasalahan Kota Pekalongan yang sering terjadi dan dapat dengan mudah diidentifikasi adalah banjir dan rob serta kualitas lingkungan hidup yang belum optimal. Banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup sangat berdampak bagi kegiatan sosial ekonomi dan kenyamanan kehidupan masyarakat maupun kunjungan wisatawan atau pendatang. Isu strategisnya adalah banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan. Dalam arti luas, banjir, rob dan kualitas lingkungan hidup yang tidak optimal sangat berdampak bagi seluruh sendi kehidupan masyarakat di Kota Pekalongan. Oleh karena itu, banjir dan rob harus dikendalikan serta kualitas lingkungan hidup dioptimalkan agar berdampak bagi peningkatan kondisi sosial ekonomi dan kenyamanan lingkungan.

Secara topografi, wilayah Kota Pekalongan merupakan wilayah pesisir Laut Jawa dan memiliki ketinggian 0-6 m dpl. Beberapa kawasan di Kota Pekalongan telah memiliki ketinggian di bawah permukaan laut. Fenomena ketinggian di bawah permukaan laut tersebut, tidak terlepas dari kondisi permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan yang mengalami penurunan (*land subsidence*). Secara morfologi, wilayah Kota Pekalongan pun juga sangat datar karena memiliki kelerengan yang sangat rendah. Oleh karena itu, secara alamiah, wilayah Kota Pekalongan sangat rentan dan memiliki risiko tinggi bencana banjir dan/atau rob. Tantangan penanganan banjir dan rob semakin besar karena adanya fenomena pemanasan global yang berdampak peningkatan permukaan air laut. Banjir dan rob sangat berdampak bagi masyarakat, oleh karena itu, banjir dan rob harus mendapatkan penanganan yang optimal sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dan berkembang.

Upaya penanganan banjir dan rob telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan serta didukung oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terakhir telah dilakukan adalah dengan pembangunan tanggul raksasa di kawasan pesisir dan peninggian tanggul yang dilakukan setiap tahun. Sampai dengan tahun 2023, luas genangan di Kota Pekalongan seluas 880,83 hektar atau 18,97 persen dari luas wilayah kota, kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun 2022. Beberapa hal yang menyebabkan masih tingginya luasan kawasan banjir dan rob, meliputi: a) Drainase perkotaan belum optimal, dimana persentase drainase dalam kondisi baik masih rendah yaitu 68,58 persen; b) Tingginya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), sekitar 8-13 cm per tahun; c) Ketimpangan kualitas lingkungan permukiman, yaitu persentase luasan kawasan kumuh masih sekitar 4,90 persen; d)Termasuk dataran rendah dengan pola aliran air sejajar menuju ke pantai utara laut jawa; e) Berkurangnya kawasan tangkapan air (*catchment area*) karena semakin tingginya

kepadatan bangunan sehingga air aliran permukaan akibat hujan (*run off*) yang semakin membesar juga; dan f) Pendangkalan sungai di wilayah hilir.

Kendala utama pengembangan drainase adalah Kota Pekalongan merupakan wilayah yang relatif sangat datar, dengan ketinggian 0 - 6 meter dpl dan di beberapa kawasan justeru telah memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut. Oleh karena itu, penataan drainase secara bertahap perlu diarahkan pada sistem polder dengan penambahan secara terus menerus atas penyediaan kolam-kolam retensi (ruang air) ataupun *water storage* guna memaksimalkan upaya pengurangan genangan di lingkungan permukiman.

Kendala penataan sistem drainase semakin bertambah dengan adanya permasalahan yang sedang terjadi yaitu penurunan permukaan tanah di wilayah Kota Pekalongan. Penelitian sedang memastikan apakah penurunan tanah disebabkan oleh eksploitasi air tanah dalam yang melebihi daya dukungnya atau karena fenomena alamiah karena wilayah Kota Pekalongan terbentuk karena proses sedimentasi sehingga terjadi proses pemampatan lapisan tanah. Namun kebijakan yang paling tepat dilakukan adalah membatasi ekploitasi air tanah tanpa melebihi daya dukungnya.

Isu yang lain adalah isu kualitas lingkungan hidup, khususnya terkait kualitas tutupan lahan. Dengan menggunakan alat penginderaan jauh dan sistem informasi geografis, seseorang dapat mengidentifikasi bahwa Kota Pekalongan memiliki kualitas tutupan lahan yang cukup mengkhawatirkan. Secara fisik, dengan mengamati kondisi di wilayah Kota Pekalongan pun seseorang dapat mengidentifikasi bahwa wilayah Kota Pekalongan terkesan panas karena masih minimnya tutupan lahan atau vegetasi. Melalui pengukuran di lapangan pun, sudah diidentifikasi bahwa beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kota Pekalongan telah tercemar, yaitu telah terlampauinya beberapa indikator pencemar terhadap baku mutu yang ditentukan.

Baik dan buruknya lingkungan hidup diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan salah satu indikator kinerja dalam pengelolaan lingkungan di Kota Pekalongan. Dalam melakukan perhitungan IKLH menggunakan tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL). Kualitas lingkungan hidup Kota Pekalongan belum optimal, hal ini ditunjukkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Pekalongan pada tahun 2023 sebesar 56,24, kondisi ini sudah lebih baik dibandingkan tahun 2022. IKLH yang belum optimal tersebut ditandai dengan masih rendahnya kenyamanan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat maupun pengunjung atau wisatawan yang datang ke Kota Pekalongan. Padahal, kualitas lingkungan merupakan unsur penting pendukung bagi pengembangan sektor lainnya, misalkan pariwisata. Kualitas lingkungan hidup yang baik akan mendorong seseorang untuk mempromosikan hal-hal baik sehingga dapat menarik orang yang semakin banyak untuk datang ke Kota Pekalongan.

Salah satu komponen dalam IKLH adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan, yang sangat dipengaruhi luasan Ruang Terbuka Hijau dan tutupan lahan/vegetasi tutupan lahan. Kondisi RTH di Kota Pekalongan masih sangat terbatas dan belum dapat memenuhi persyaratan pemenuhan RTH sesuai dengan Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pemerintah Kota Pekalongan terus berupaya dalam pengembangan RTH untuk dapat memenuhi kebutuhan RTH yang disyaratkan, yaitu 30% dari luas wilayah, yang terdiri dari 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Namun upaya ini masih belum dapat dilaksanakan secara kontinyu dan kesadaran bahwa pengembangan RTH dapat membantu proses-proses alamiah lingkungan hidup, seperti terjaminnya ketersediaan kawasan resapan air dan siklus alamiah air, belum terbangun. Belum optimalnya kualitas tutupan lahan, kongruen dengan masih terbatasnya RTH. Upaya peningkatan kualitas tutupan lahan harus dilakukan secara kontinyu, melalui peningkatan kesadaran bahwa vegetasi sangat dibutuhkan dan pemanfaatan kawasan sempadan dan kawasan lindung untuk pengembangan vegetasi, penegakan hukum serta melanjutkan pembangunan RTH. Oleh

karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Pekalongan.

Kota Pekalongan pun sangat identik dengan sungai kotor dan tercemar. Tingginya pencemaran air disebabkan buangan limbah industri dan limbah domestik. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran bersama dan penegakan hukum terhadap ketentuan lingkungan hidup, agar pencemaran air dapat dikendalikan. Selain itu, penanganan terhadap pengelolaan limbah B3 juga perlu mendapat perhatian, terutama dalam persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan. Perlu upaya pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan limbah B3.

Isu penanganan banjir dan rob serta pengendalian kualitas lingkungan hidup juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan; mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya; serta melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Isu ini juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi khususnya terkait lingkungan hidup dan bencana serta keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam, yang dibuktikan dengan penempatan proyek prioritas strategis RPJMN di Kota Pekalongan yaitu penanganan banjir/rob.

Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatan ekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2019, antara lain: Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Miliar dari APBN), Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Miliar dari APBN), Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Miliar dari APBN), serta penyempurnaan sistem banjir dan rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Miliar dari APBN).

2.4.3 Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman

Kota Pekalongan memiliki peran penting bagi wilayah sekitarnya. Peran penting tersebut, terutama disebabkan potensi ekonomi dan posisi strategis yang dimilikinya. Oleh karena itu, sesuai dengan RTRWN, Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Sesuai dengan RTRWP Jawa Tengah, Kota Pekalongan juga berperan sebagai pusat dari kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan).

Oleh karena itu, Kota Pekalongan selalu berkembang, secara ekonomi ditandai dengan pergeseran peran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier serta secara fisik, ditandai dengan semakin berkembangnya perkotaan, yaitu semakin meluasnya kawasan terbangun (*built up area*), terutama untuk perumahan dan kawasan permukiman, kegiatan industri serta perdagangan jasa. Perkembangan kegiatan perkotaan yang dinamis tersebut dan pertumbuhan jumlah penduduk berimplikasi terhadap semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan, termasuk perumahan dan kawasan permukiman.

Namun demikian, peningkatan kebutuhan tersebut, belum diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar perkotaan secara optimal. Infrastruktur dasar perkotaan yang harus terus ditingkatkan layanannya, terutama adalah air bersih dan persampahan perkotaan karena cakupan pelayanannya yang belum optimal, serta sanitasi yang cakupannya harus

mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat. Infrastruktur dasar perkotaan yang cakupannya optimal akan mendukung perkembangan perkotaan yang optimal, dalam rangka menuju kota yang berketahanan (*resilience city*), yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Persentase penduduk yang terlayani jaringan perpipaan tahun 2023 sebesar 67,42 persen. Kondisi ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022. Cakupan layanan ini harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah Kota Pekalongan. Tantangan pengembangan cakupan layanan air bersih sangat besar karena terbatasnya sumber air baku bagi air bersih di wilayah Kota Pekalongan dan kebutuhan jaringan SPAM yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Air permukaan di wilayah Kota Pekalongan, belum dapat dimanfaatkan sebagai sumber air baku karena kualitasnya yang sangat rendah. Pemanfaatan sumber daya air permukaan (dari air hujan) belum optimal karena masih terbatasnya sarana penampungan sumber daya air (embung, polder, dan bendung) untuk keperluan air baku. Kemungkinan terjadi ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat pencemaran dari kegiatan permukiman maupun industri di perkotaan. Selain itu kemungkinan ancaman penurunan kualitas sumber daya air permukaan dan air tanah dangkal akibat dari intrusi air laut/payau. Hal ini mengakibatkan terjadinya keterbatasan sumber daya air di kawasan perkotaan, sehingga dibutuhkan kerjasama dengan wilayah sekitar (daerah hulu) dalam pemenuhan air bersih terutama untuk air minum.Selama ini, sumber air baku tersebut, di samping bersumber dari air tanah di wilayah Kota Pekalongan, karena keterbatasan potensi air tanah di Kota Pekalongan dan berisiko tinggi terhadap lingkungan jika dieksploitasi melebihi daya dukungnya, juga sangat bergantung dari sumber air baku dari daerah tetangga, yaitu wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

Persentase pelayanan sampah pun juga belum optimal, dimana pada tahun 2022 sebesar 72,36 persen dan tahun 2023 menurun menjadi 71,45 persen. Cakupan pelayanan persampahan harus terus ditingkatkan sehingga dapat mencakup seluruh masyarakat dan seluruh wilayah. Tantangan pengelolaan persampahan terutama disebabkan keterbatasan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, terutama kapasitas TPA Degayu yang semakin terbatas dan membutuhkan segera penggantian. Di samping itu, tantangan pengelolaan persampahan, terutama terkait dengan perilaku masyarakat yang belum mendukung pengelolaan persampahan, misalnya masih adanya sebagian masyarakat yang menjadikan badan air sebagai tempat sampah dan proses pemilahan sampah yang belum berjalan secara optimal.

Kondisi jalan kota pun juga harus terus ditingkatkan, agar dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan perekonomian kota. Hingga tahun 2023, jalan kota kondisi mantap sebesar 82,16 persen. Di samping itu, pengembangan perekonomian harus didukung kondisi lalu lintas yang lancar dan aman. Kota Pekalongan merupakan salah satu simpul wilayah di Jawa Tengah dan Kawasan Petanglong, sehingga masih bercampurnya lalu lintas regional dan lalu lintas lokal. Pada tahun 2023 VC Ratio adalah 0,40 meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 0,39. Hal ini disebabkan arus lalu lintas yang semakin meningkat pada seluruh ruas jalan di seluruh jalan kota sehingga menyebabkan nilai VC Ratio meningkat. Meskipun V/C Ratio secara rata-rata atas jalan kota masih rendah (0,40), namun untuk Jalan Pantura ruas Kota Pekalongan, khususnya pada persimpangan sebidang kereta api masih sering terjadi kemacetan. Penyediaan titik dan kantong-kantong parkir juga menjadi salah satu upaya dalam mendukung kelancaran lalu lintas. Pemerintah Kota Pekalongan hingga saat ini telah mengelola 381 titik parkir yang tersebar di seluruh wilayah Kota Pekalongan. Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas di jalan raya maka dilakukan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan di sepanjang jalan Kota Pekalongan. Fasilitas keselamatan lalu lintas ini berguna untuk memastikan keamanan dan keselamatan para pengguna jalan (pengendara maupun para pejalan kaki). Fasilitas yang diperlukan bagi

keselamatan berlalu lintas itu terdiri dari rambu lalu lintas, Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan (RPPJ), Alat Penunjuk Isyarat Lalu Lintas (APILL), guardrail dan marka jalan.

Penyediaan infrastruktur dasar tersebut, karena peran Kota Pekalongan terhadap daerah sekitarnya, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan semata, tetapi harus mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah. Salah satu sumber air baku untuk air minum, merupakan hasil dari pengelolaan SPAM Petanglong. Diharapkan debit yang diberikan untuk Kota Pekalongan dapat segera meningkat sehingga dapat meningkatkan cakupan air bersih yang lebih optimal. Di bidang persampahan pun, TPA Regional Petanglong diharapkan dapat segera diwujudkan karena keterbatasan lahan di wilayah Kota Pekalongan dan ketentuan teknis yang tidak memungkinkan pengembangan TPA di wilayah Kota Pekalongan.

Kualitas infrastruktur lingkungan permukiman sangat dipengaruhi oleh kondisi wilayah maupun kondisi sosial ekonomi masarakat. Wilayah Kota Pekalongan sangat rentan terjadinya bencana banjir dan rob, sehingga sangat berdampak terhadap kualitas infrastruktur lingkungan permukiman. Beberapa perumahan dan kawasan permukiman yang telah terendam rob dalam beberapa tahun terakhir, menjadi kawasan yang ditinggalkan penghuninya. Sementara kawasan lainnya pun juga selalu terendam banjir dan rob, tetapi masih tetap ditinggali pemiliknya karena tidak adanya pilihan tempat tinggal. Kawasan rentan tersebut merupakan kawasan yang akan menurun infrastruktur lingkungan permukimannya.

Hingga tahun 2023, berdasarkan SK Wali Kota Pekalongan terbaru, luas kawasan kumuh mencapai 4,90 persen dari luas wilayah Kota Pekalongan. Luasan ini mengalami pengurangan dari tahun sebelumnya. Persentase tersebut merupakan luasan yang masih cukup signifikan, terutama kawasan tersebut berada pada kawasan yang memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi.

Kondisi infrastruktur lingkungan permukiman yang rendah sangat mempengaruhi terhadap kondisi sosial ekonomi, kesehatan maupun kenyamanan warganya. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan Pemerintah Kota Pekalongan adalah peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman. Keberhasilan peningkatan kualitas infrastruktur lingkungan permukiman harus didukung dengan keberhasilan pengendalian banjir dan rob.

2.4.4 Peningkatan Derajat Kesehatan

Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Oleh karena itu derajat kesehatan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan. Di sisi lain muncul kekhawatiran masyarakat terhadap berkurangnya upaya promotif dan preventif serta kurangnya optimalisasi penanganan pada penderita penyakit kronis baik penderita penyakit menular/penyakit tidak menular yang dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan di berbagai tempat, derajat kesehatan memiliki korelasi yang signifikan dengan Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan salah satu komponen yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator makro atau indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, derajat kesehatan masyarakat memiliki korelasi dengan pencapaian kinerja pembangunan lainnya, sehingga derajat kesehatan merupakan salah satu aspek strategis dalam pembangunan Kota Pekalongan. Derajat kesehatan masyarakat yang meningkat berdampak sistemik terhadap aspek-aspek pembangunan lainnya.

Pembangunan bidang kesehatan, tidak hanya berfokus terhadap pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan untuk tujuan kuratif semata, tetapi juga yang sifatnya preventif dan promotif. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan upaya tersebut namun peningkatan derajat kesehatan masyarakat masih belum optimal.

Upaya preventif dan promotif yang telah dilakukan diantaranya pemberian makanan tambahan terutama kepada bayi dan balita gizi kurang dan gizi buruk, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang maupun penerapan pola hidup bersih dan sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan ini, ditunjukkan dengan: a) Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2023 AKI masih bernilai 122,77 per 100.000 kelahiran hidup; b) Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2023 AKB masih bernilai 13,71 per 1.000 kelahiran hidup; c). Tingginya Angka Kematian Balita (AKABA) dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, tahun 2023 AKABA masih bernilai 18,42 per 1.000 KH; d). Tingginya angka kesakitan dan nilainya masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan nilai 12,20 persen di tahun 2023; e) masih ditemukan Balita Gizi Buruk sebesar 0,30 persen dan Balita Stunting sebanyak 7,43 persen pada tahun 2023; f) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang meningkat dan pada tahun 2023 memiliki skor sebesar 93,70 persen; serta g) Tingginya Angka Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi dan masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, pada tahun 2023 mencapai sebesar 14,95 persen.

Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2023 sebesar 74,60, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar 74,51. Namun demikian, jika dibandingkan dengan kota-kota setara di Jawa Tengah maupun UHH Provinsi Jawa Tengah, capaian UHH Kota Pekalongan masih berada pada posisi terbawah. Oleh karena itu, salah satu tantangan ke depan adalah bagaimana terus meningkatkan UHH secara optimal sehingga tidak tertinggal dibandingkan Provinsi Jawa Tengah maupun kota-kota setara lainnya di Jawa Tengah. Upaya tersebut adalah melalui pembangunan bidang kesehatan secara terintegrasi, baik dari sisi preventif promotif maupun kuratif serta didukung peran aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Masih tingginya AKI Kota Pekalongan disebabkan masih belum optimalnya kesadaran masyarakat, terutama keluarga ibu hamil akan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin, terutama ibu hamil yang memiliki risiko tinggi. Prasarana sarana kesehatan, khususnya persalinan, harus terus ditingkatkan dan diupayakan merata, sehingga pelayanan kesehatan, terutama bagi ibu hamil dan ibu melahirkan, dapat diandalkan serta memiliki akses yang mudah dijangkau. Kongruen dengan AKI, tingginya AKB dan AKABA menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat serta penyediaan prasarana sarana kesehatan, terutama bagi bayi dan balita, harus terus ditingkatkan ketersediaannya sehingga mudah diakses. Selain hal tersebut, perlu dilakukan penguatan audit kematian maternal perinatal untuk mengetahui akar masalah penyebab kematian sebagai dasar perurnusan rencana intervensi, sinkronisasi program penurunan AKI, AKB dan AKABA antara RSUD dan Puskesmas, pemberdayaan kader dan optimalisasi kepesertaan KB untuk mencegah kehamilan yang tidak ideal. Angka kesakitan juga masih cukup tinggi yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular.

Selain permasalahan AKI, AKB dan AKABA, salah satu yang menjadi perhatian pemerintah adalah masalah stunting, dimana masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yaitu tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Stunting bisa terjadi dan terus meningkat, bahkan pada saat teknologi dan ketersediaan fasilitas kesehatan sudah “dekat” dan “mudah” diakses masyarakat. Penanganan permasalahan stunting harus dilakukan secara paripurna, komprehensif, terpadu dan bersifat multisektoral dengan mengintensifkan pendampingan terhadap keluarga yang berisiko melahirkan bayi beresiko stunting. Pendampingan ini fokus dilakukan mulai pada periode remaja serta calon pengantin, pada masa kehamilan dan pada masa pascapersalinan, serta terus didampingi hingga anak berusia 5 tahun. Penyebabnya multidimensi, tidak hanya faktor kesehatan, melainkan juga faktor keluarga, ekonomi, sosial,

dan budaya. Termasuk di dalamnya adalah kurangnya asupan gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil dan anak balita, faktor keluarga, mulai dari ketidaktauan praktik pemberian makan, praktik pemberian ASI, infeksi penyakit serta pola pengasuhan anak. Faktor eksternal yang turut berpengaruh yaitu akses air bersih dan sanitasi lingkungan.

Pemerintah terus mendorong penurunan stunting melalui strategi nasional percepatan penurunan stunting sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 dengan tujuan menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi, sehingga memerlukan upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik dan integratif dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor KEP. 101/M.PPN/HK/06/2022 tentang Penetapan Kabupaten/ Kota Lokasi Fokus Intervesi Percepatan Penurunan Stunting Terintegerasi Tahun 2023, Kota Pekalongan menjadi salah satu kota yang perlu mendapat penanganan dengan skema percepatan khusus. Hal ini ditunjukkan dengan angka prevalensi stunting tahun 2023 berdasarkan SSGI (Survey Status Gizi Indonesia) sebesar 20,6 persen dan berdasarkan E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) sebesar 7,43 persen. Target prevalensi stunting Kota Pekalongan ditargetkan turun setiap tahun, sehingga diperlukan upaya percepatan diantaranya: penguatan cakupan intervensi spesifik kunci, pendampingan bagi keluarga 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK) dan keluarga berisiko stunting, pendampingan bagi pemerintah daerah, pemenuhan intervensi sensitif kunci, termasuk air minum dan sanitasi, penguatan intervensi dukungan, terutama cakupan surveilans, koordinasi tim percepatan penurunan stunting daerah, dan pelaksanaan aksi konvergensi oleh pemerintah daerah.

Masih berfluktuasinya skor PPH menunjukkan bahwa konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) belum optimal sehingga diperlukan upaya peningkatan skor PPH melalui pelatihan olahan pangan dan pemberian bantuan bibit kepada masyarakat. Pembangunan pertanian serta kelautan dan perikanan di Kota Pekalongan juga harus diarahkan untuk diversifikasi produk-produk bahan makanan maupun kerjasama dengan daerah lain, sehingga tersedia beragam pilihan bahan makanan di wilayah Kota Pekalongan.

Peningkatan derajat kesehatan menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia serta menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Kesehatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, sehingga beberapa prioritas pembangunan nasional dan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu Pembangunan RSUD dengan pelayanan unggulan Ibu dan Anak dengan Rencana investasi sebesar Rp. 430 Miliar dari KPBU (Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

2.4.5 Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satunya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan telah menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun. Beberapa indikator perkembangan kesejahteraan tersebut adalah dengan semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita maupun semakin menurunnya angka kemiskinan Kota Pekalongan dari tahun ke tahun.

Dari data tahun jamak, angka kemiskinan Kota Pekalongan hingga tahun 2019, menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Namun demikian, sebagai dampak pandemi Covid-19, angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 7,17 persen pada tahun

2020 dan semakin meningkat menjadi 7,59 persen pada tahun 2021. Upaya pemulihan kondisi sosia dan ekonomi, sebagai dampak pandemi Covid-19 menunjukkan hasil, yaitu dengan capaian angka kemiskinan tahun 2022 adalah 7,00 persen dan tahun 2023 adalah sebesar 6,81 persen, sehingga sudah menunjukkan pola kembali menurun.

Dengan perkembangan indikator tersebut, maka masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan belum optimal. Penanggulangan kemiskinan di Kota Pekalongan masih menjadi isu strategis karena sasaran pengentasan kemiskinan sudah menyentuh kemiskinan struktural, sehingga upaya pengentasan kemiskinan semakin berat. Hal ini merupakan fenomena yang sering dihadapi di berbagai daerah maupun secara nasional bahwa ketika angka kemiskinan semakin rendah maka akan dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan yang terintegrasi untuk lebih mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bila dicermati lebih detail berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), jumlah warga miskin di Kota Pekalongan pun masih sangat tinggi. Apalagi, sejak awal tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi pandemi *COVID-19* yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan tetapi juga hampir seluruh sektor kehidupan, yang pada akhirnya berimplikasi semakin meningkatnya jumlah warga miskin, akibat terjadinya kontraksi ekonomi. Jumlah anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan DTKS tahun 2021 sebanyak 184.247 jiwa dari semula 108.436 jiwa pada tahun 2020, atau kenaikan sebanyak 75.811 jiwa. Pada tahun 2022, jumlah anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) kembali meningkat yaitu menjadi 188.445 jiwa dan tahun 2023 jumlah anggota Rumah Tangga Sasaran (RTS) adalah 188.355 jiwa, sehingga tidak ada perubahan yang berarti. Oleh karena itu, menjadi tantangan bersama ke depan, agar kebijakan pembangunan dapat lebih terintegrasi dan konvergen dalam penanganan upaya pengentasan kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan yang optimal harus mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. Sumber daya yang dimiliki baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat harus didayagunakan secara terpadu dan sinergis, guna menurunkan angka kemiskinan ini. Masing-masing elemen dapat memiliki peran sesuai sumber daya yang dimilikinya.

Isu kemiskinan juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana menjadi tujuan dalam *Sustainable Development Goals* (SGD's) yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia; serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Oleh karena itu penghapusan kemiskinan ekstrem telah menjadi fokus Pemerintah sebagai amanat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) dan arahan Presiden pada Rapat Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 4 Maret 2020 yang menginstruksikan kemiskinan ekstrem agar diturunkan menjadi 0% pada tahun 2024.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mengamanatkan bahwa upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem memerlukan upaya multidimensi dan kolaboratif lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Terdapat tiga strategi kebijakan untuk melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran yaitu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan jumlah kantong - kantong kemiskinan. Secara khusus kepada Bupati/Wali Kota diinstruksikan untuk: melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Kab/Kota; menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah

desa/kelurahan yang dibuktikan dengan Berita Acara; menyusun rencana program/kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kab/Kota termasuk pemutakhiran data penerima by name by address; fasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat; dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Gubernur setiap tiga 3) bulan sekali.

Tantangan pembangunan Kota Pekalongan lainnya adalah bagaimana menurunkan angka pengangguran secara optimal. Angka pengangguran di Kota Pekalongan belum menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun, tetapi masih berfluktuasi. Hal ini menjadi isu strategis karena pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan nasional maupun daerah. Tujuan pemerintahan daerah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga penurunan angka pengangguran menjadi salah satu sasaran pembangunan yang harus diwujudkan.

Berdasarkan analisis korelasi, dengan menggunakan data tahun jamak, antara pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan angka pengangguran, ketiga indikator tersebut tidak memiliki korelasi yang signifikan antar indikator. Temuan ini dapat dimaknai bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan belum berimplikasi langsung terhadap penurunan angka kemiskinan maupun penurunan angka pengangguran. Angka kemiskinan dan angka pengangguran pun juga tidak memiliki korelasi yang signifikan. Jika angka kemiskinan menurun, juga tidak ditandai dengan penurunan angka pengangguran.

Angka pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pekalongan masih cukup tinggi. TPT masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2021 sebesar 6,89 persen dan pada tahun 2022 menurun menjadi 4,98 persen dan meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 5,02 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa TPT masih menunjukkan angka yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Upaya sistemik dan sinergis harus terus dilakukan untuk peningkatan kualitas dan kompetensi pencari kerja, perluasan kesempatan kerja, *link and match* dunia pendidikan/pelatihan dengan dunia usaha/dunia industri, penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan usaha serta peningkatan investasi, sehinga pada gilirannya dapat menurunkan angka pengangguran di Kota Pekalongan.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran harus diintegrasikan dengan pembangunan perekonomian, yaitu pertumbuhan ekonomi yang didorong harus pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mampu dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan target-target pembangunan tersebut.

2.4.6 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pembangunan karena menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan. Bonus demografi yang terjadi seharusnya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sebagai peluang pembangunan. Mayoritas usia produktif merupakan potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan menambah kemiskinan dan pengangguran karena kualitas sumberdaya manusia yang tidak optimal. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia di Kota Pekalongan belum optimal, sehingga harus ditingkatkan secara kontinyu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan tahun 2021 adalah 75,40, tahun 2022 meningkat menjadi 75,90 dan tahun 2023 meningkat menjadi 76,71 persen. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

a. Harapan lama sekolah yang belum optimal. Pada tahun 2023, harapan lama sekolah sebesar 12,87 tahun. Artinya harapan lama sekolah penduduk adalah 12,87 tahun atau penduduk diharapkan menamatkan pendidikan sampai SMA/SMK (12 tahun) dan kuliah

sampai semester 1 atau 10 bulan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah harapan lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal.

b. Rata-rata lama sekolah belum optimal. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2023 adalah 9,29 tahun. Artinya penduduk Kota Pekalongan memiliki rata-rata lama sekolah 9,29 tahun atau rata-rata penduduk telah menamatkan pendidikan jenjang SMP, dan masuk kelas 10 SMA namun tidak sampai lulus. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah penduduk Kota Pekalongan tersebut diakibatkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa berpendidikan tingkat sekolah menengah sudah cukup dan tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi karena dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki tersebut sudah dapat masuk ke pasar kerja. Implikasinya adalah rata-rata lama sekolah di Kota Pekalongan belum optimal. Oleh karena itu peningkatan kesadaran masyarakat terhadap arti penting pendidikan harus terus dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan kebijakan membuka dan mempermudah kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat usia sekolah untuk bersekolah tetapi hal tersebut harus secara kontinyu dilanjutkan.

c. Belum optimalnya pengarusutamaan gender. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2023 sebesar 65,31. Pada dasarnya peran perempuan dalam kegiatan ekonomi kehidupan sehari-hari sangat tinggi, tetapi seringkali hal ini belum diperhitungkan secara baik dan terbuka sehingga berimplikasi terhadap belum optimalnya IDG. Peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus terus ditingkatkan untuk mendukung tercapainya pengarusutamaan gender secara optimal. Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap pemberdayaan gender pun juga telah berlangsung lama, namun peran aktif perempuan belum dapat optimal, baik dalam ekonomi maupun politik. Oleh karena itu, upaya peningkatan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik harus secara kontinyu ditingkatkan, sehingga dapat lebih optimal.

Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus dilakukan, salah satunya pada tahun 2022 disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Peningkatan IPM. RAD ini akan menjadi dasar rencana aksi pada tahun berikutnya. Urgensi RAD Peningkatan IPM tersebut adalah sebagai upaya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi agar IPM Kota Pekalongan dapat meningkat secara optimal. Selama in, IPM Kota Pekalongan masih tertinggal dibandingkan kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah, bahan dengan beberapa kabupaten pun, IPM Kota Pekalongan capaiannya masih tertinggal.

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu isu strategis karena berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua; serta mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.

Upaya peningkatan sumber daya manusia juga harus didukung dengan peningkatan *soft skill* masyarakat. *Soft skill* adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu secara alami yang mencakup kecerdasan, baik emosional maupun sosial, komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, dan semacamnya. Dalam hal ini, *soft skill* adalah karakter *bawaan* individu. *Soft skill* bisa saja dipelajari, akan tetapi tidak dengan cara belajar formal layaknya di bangku sekolahan atau perkuliahan. Hal itu dapat dipelajari dengan lebih banyak melakukan komunikasi atau berinteraksi dengan individu lain, serta dengan melatih kepekaan sosial. Dengan begitu, individu itu dapat menerapkannya pada perilaku yang nantinya akan berpengaruh pada kemampuan *soft skill.* Seiring berkembangnya zaman, di samping individu memiliki kemampuan *hard skill*, ia juga dituntut untuk harus memiliki *soft*

skill. Hal itu karena dalam suatu organisasi dan lingkungan sosial lainnya, banyak dijumpai kasus kekerasan yang disebabkan ketidakmampuan individu dalam mengendalikan emosi, pikiran, tindakan, juga tuntutan organisasi atau lingkungan sosial yang semakin pelik. Maka dari itu, kemampuan *soft skill* dinilai sangat penting karena bisa dikatakan seorang individu itu akan terlihat lebih menonjol dan kompeten dibandingkan dengan individu lain.

Penanganan anak tidak sekolah (ATS) Kota Pekalongan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peran lintas sektor dalam melaksanakan pendataan dan pendampingan ATS sangat diperlukan karena penyebab dan penanganan ATS memerlukan sinergitas semua pihak baik pemerintah kota, masyarakat maupun lembaga non pemerintah. Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam penanganan ATS antara lain pembangunan Sanggar Kelompok Belajar (SKB). SKB merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal. Sampai tahun 2021 ada tiga belas PKBM di Kota Pekalongan yang memberikan layanan pendidikan non formal. Keberadaan SKB diharapkan dapat memperkuat layanan pendidikan non formal.

Tabel II-250 Daftar PKBM dan SKB
Kota Pekalongan Tahun 2023

NO	Nama Sekolah	NPSN	Bentuk Pendidikan	PAKET	Alamat	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	PKBM AL-TERNATIF	P9984696	PKBM	PAKET A, B, C	Jl. Prambanan No.561 Binagriya Indah	Pringrejo	Kec. Pekalongan Barat
2	PKBM BENDAN JAYA	P2964650	PKBM	PAKET B, C	JL. RINJANI NO. 3 PEKALONGAN	Bendan Kergon	Kec. Pekalongan Barat
3	PKBM BUNGA BANGSA	P9996724	PKBM	PAKET A, B Inklusi	Perum Gama Permai 3, Jl. Tarumanegara No.21	Tirto	Kec. Pekalongan Barat
4	PKBM CERDAS	P9985079	PKBM	PAKET B, C	Jl. Irian No.85 Rt.01 Rw.04	Sapuro Kebulen	Kec. Pekalongan Barat
5	PKBM ANGGREK	P2964649	PKBM	PAKET B, C	JL.TRIKORA NO. 38 YOSOREJO PEKSEL	Kuripan Yosorejo	Kec. Pekalongan Selatan
6	PKBM DARUSSALAM	P9984959	PKBM	PAKET B, C	Jl. HOS Cokroaminoto No. 399A	Kuripan Kertoharjo	Kec. Pekalongan Selatan
7	PKBM NIDAUS SALAM	P9984264	PKBM	PAKET A. B	Jl. Patimura, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur	Gamer	Kec. Pekalongan Timur
8	PKBM TONDANO	P2964647	PKBM	PAKET B, C	JL. TAPAK SIRING NO. 19 A PONCOL PEKALONGAN	Poncol	Kec. Pekalongan Timur
9	PKBM UMMI AMINAH	P9984641	PKBM	PAKET A, B, C	Jalan Teratai Klego Gang 4	Klego	Kec. Pekalongan Timur
10	PKBM UNGGULAN	P9984766	PKBM	PAKET A, B, C	Jl. Ki Mangun Sarkoro Rt. 01 Rw. 01	Setono	Kec. Pekalongan Timur
11	PKBM JETAYU	P2964648	PKBM	PAKET B, C	Jl. Kunti Utara	Panjang Baru	Kec. Pekalongan Utara
12	PKBM KINGDOM	P9984624	PKBM	PAKET A, B	Jl. Diponegoro 18 Pekalongan	Padukuhan Kraton	Kec. Pekalongan Utara
13	PKBM SOGAN	P9998944	PKBM	PAKET A, B, C	Jl. Karya Bakti Gg. Sunan Muria	Medono	Kec. Pekalongan Barat
14	SKB KOTA PEKALONGAN	P9998037	SKB	PAKET A, B, C	Jl. Hos Cokroaminoto No.354	Kuripan Yosorejo	Kec. Pekalongan Selatan

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

Pendidikan kesetaraan merupakan ujung tombak dalam mengatasi Anak Tidak Sekolah di Jawa Tengah pada umumnya dan Kota Pekalongan pada khususnya, Layanan pendidikan kesetaraan di Kota Pekalongan dilaksanakan oleh sebuah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berlokasi di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan dan 14 (empat belas) unit PKBM yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kota Pekalongan. Layanan pendidikan kesetaraan ini telah menjangkau seluruh jenjang pendidikan, baik pendidikan dasar yaitu Paket A dan Paket B, maupun pendidikan menengah yaitu Paket C, termasuk adanya Paket B Inklusi untuk Anak-anak Berkebutuhan Khusus.

Namun demikian, dari 14 PKBM yang ada, 13 PKBM kondisinya masih aktif dan 1 PKBM terpantau tidak aktif. Adapun status akreditasi dari SKB dan PKBM saat ini adalah sebagai berikut: SKB berakreditasi TT (Tidak Terdaftar), 1 PKBM berakreditasi B, dan 13 PKBM berakreditasi TT.

Tabel II-251 Akreditasi dan Status PKBM dan SKB Kota Pekalongan Tahun 2023

Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan	Akreditasi				Status	
	A	B	C	TT	Aktif	Tidak Aktif
SKB	-	-	-	1	1	-
PKBM	-	1	-	14	13	1
Jumlah	0	1	0	15	14	1

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2024

2.4.7 Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan memiliki posisi strategis terhadap wilayah sekitarnya dan dalam konteks lalu lintas pantai Utara Pulau Jawa, oleh karena itu Kota Pekalongan merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan pusat dari Kawasan Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan). Kota Pekalongan pun telah berkembang dengan industri TPT (tekstil produk tekstil), khususnya batik dan industri kreatif lainnya. Kota Pekalongan pun juga berkembang budayanya yang khas, dengan akulturasi budaya Jawa pesisir, Arab dan China. Budaya khas tersebut menjadi potensi yang dapat dikembangkan. Hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang dimiliki Kota Pekalongan dan menjadi keuntungan perbandingan (*comparative advantage*). Dengan keunggulan yang dimiliki tersebut, seharusnya Kota Pekalongan berkembang pesat, namun yang terjadi adalah daya saingnya belum optimal berkembang.

Beberapa hal yang membuktikan bahwa daya saing Kota Pekalongan belum optimal berkembang, yaitu: a) Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal, dimana pada tahun 2020 mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen, pada tahun 2021 tumbuh menjadi 3,59 persen, pada tahun 2022 menjadi 5,76 persen dan pada tahun 2023 menjadi 5,44 persen; b) Pendapatan perkapita belum optimal, dimana PDRB perkapita tahun 2021 sebesar Rp.37,07 juta per tahun, pada tahun 2022 meningkat menjadi Rp.40,68 juta per tahun dan pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 43,29 juta per tahun, namun belum menunjukkan peningkatan dan pemeraataan kesejahteraan masyarakat yang optimal; c) Pemerataan pendapatan yang belum optimal, yang ditunjukkan dengan Gini Ratio yang belum mengalami penurunan atau perbaikan; dan d) Belum terkelolanya budaya dengan baik, yaitu persentase seni budaya yang dilestarikan masih terbatas.

Dengan potensi (keunggulan komparatif) yang dimiliki Kota Pekalongan, seharusnya perekonomian dapat berkembang optimal, dengan memanfaatkan pergeseran sektor primer ke sektor sekunder dan tersier, terutama dengan mengembangkan pariwisata, industri pengolahan, industri kreatif, dan perdagangan jasa. Beberapa hal yang menyebabkan belum berkembangnya daya saing, dilihat dari berbagai aspek penyebab, meliputi: a) Tingkat kunjungan wisata pada tahun 2022 sebanyak 1.038.424 orang, dan meningkat menjadi 1.258.597 orang. Walaupun meningkat, namun masih perlu dioptimalkan; b) Pertumbuhan investasi belum optimal, nilai investasi tahun 2022 sebesar Rp. 3.188,411 Miliar dan meningkat menjadi Rp 1.616,280 Miliar pada tahun 2023; c) Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal, pertumbuhan ekonomi kreatif tahun 2022 dan 2023 masih terbatas; d) Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor industri tahun 2022 sebesar 4,26 persen dan tahun 2023 sebesar 2,30 persen; e) Pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa belum optimal, pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan jasa tahun 2022 sebesar 3,29 dan meningkat menjadi 5,13 persen pada tahun 2023; dan f) Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, penyelenggaraan *event* budaya tahun 2022 dan tahun 2023 masih sangat terbatas dan belum berskala besar.

Upaya pembangunan sektor pariwisata telah berjalan, terutama dengan pengembangan destinasi wisata dan prasarana sarana pendukung pariwisata, namun upaya tersebut harus terus dilakukan. Memperbesar aksesibilitas masuk dan keluar Kota Pekalongan melalui berbagai moda transportasi telah dilakukan. Upaya pengembangan sektor pariwisata harus terus dilakukan, terutama dengan mengembangkan kolaborasi antar pemangku kepentingan maupun antar daerah. Upaya lain yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan adalah pengembangan daya tarik Kota Pekalongan melalui revitalisasi obyek dan atraksi wisata serta pembangunan Kawasan Pekalongan Baru sebagai bagian dari TOD (*Transit Oriented Development*). Tingkat kunjungan wisata juga dipengaruhi oleh belum optimalnya penanganan kemacetan karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional, dan disisi Ljumlah Kain kapasitas jalan tidak bertambah. Tentunya hal ini berimplikasi terhadap VCR yang cenderung tinggi. Upaya penanganan yang selama ini dilakukan, terutama terbatas terkait dengan pengendalian dan rekayasa lalu lintas, padahal upaya mendasar yang seharusnya dilakukan adalah dengan memisahkan lalu lintas lokal dan regional. Dengan pemisahan lalu lintas lokal dan regional, pada gilirannya dapat merevitalisasi beberapa kawasan perdagangan jasa. Selama ini, kegiatan perdagangan jasa tidak dapat berkembang optimal karena bercampurnya lalu lintas lokal dan regional. Dengan terpisahanya lalu lintas tersebut maka diharapkan kawasan perdagangan jasa dapat berkembang optimal.

Pertumbuhan investasi di Kota Pekalongan belum optimal, lebih disebabkan faktor alamiah suatu kota, yaitu keterbatasan lahan yang dapat dikembangkan. Padahal dari sisi perizinan investasi, Kota Pekalongan telah memiliki SOP perizinan yang handal. Dengan telah selesainya revisi Peraturan Daerah Kota Pekalongan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan investasi sehingga dapat lebih optimal.

Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal di Kota Pekalongan. Hal ini membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, sehingga potensi yang telah tumbuh dan berkembang di Kota Pekalongan dapat disinergikan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Pertumbuhan ekonomi sektor industri belum optimal disebabkan ketersediaan lahan yang terbatas di wilayah Kota Pekalongan sehingga industri tidak dapat berkembang serta nilai produksi dari sektor industri yang belum meningkat signifikan akibat masih terbatasnya permintaan. Demikian juga pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan jasa belum optimal karena kegiatan perdagangan jasa mengalami kendala karena terbatasnya prasarana sarana perdagangan, seperti terbakarnya Pasar Banjarsari yang merupakan pasar terbesar di Kota Pekalongan. Upaya untuk lebih mengoptimalkan

pertumbuhan sektor industri maupun sektor perdagangan jasa adalah dengan penyediaan dan pengembangan prasarana sarana yang memadai, termasuk dukungan tersedianya lahan yang memadai.

Sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Pekalongan, dari ke-14 sub sektor dalam ekonomi kreatif, hanya 8 (delapan) sub sektor yang masuk dalam *roadmap* Kota Pekalongan, yaitu: 1) Kerajinan; 2) Desain; 3) Fashion; 4) Film, video dan fotografi; 5) Musik; 6) Seni pertunjukan; 7) Radio dan televisi; dan 8) Kuliner. Dari kedelapan sub sektor yang ada maka dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 (tiga) kluster yaitu: Kuliner, Seni Kriya dan Seni Pertunjukan. Kondisi Ekraf saat ini secara umum masih sangat minim, dapat dilihat dengan tidak dimilikinya daftar kebutuhan, pasar yang tidak terpetakan, permodalan yang tidak tersalurkan dengan baik. Dengan kata lain dapat dikatakan kondisi ekraf di Kota Pekalongan masih belum didukung data yang baik. Dalam ekosistem lama ekraf dilaksanakan dengan model '*single fighter*' atau perorangan, masih terlalu terikat dengan tradisi/tradisional, masih berupa pelayanan dasar dan merupakan sambilan. Sehingga perlu adanya perubahan cara pandang atau 'Re-Branding' dengan mulai menjalankan Ekraf melalui/berbasis komunitas, memberikan nilai tambah pada karyanya, ada pelayanan tambahan dan bersifat profesional.

Selain perubahan dengan me-re-branding ekosistem Ekraf juga perlu adanya pembuatan Database Dinamis yang dapat menjawab kebutuhan pengembangan, pemetaaan dan akses pasar serta penyaluran modal. Dalam kebutuhan pengembangan perlu didasari oleh regulasi/peraturan, adanya kelembagaan dan didukung infrastruktur. Sedangkan pemetaan dan akses pasar dibedakan menjadi even dan segmentasi. Untuk permodalan dapat dibagi menjadi profit, non profit dan stimulan.

Daya saing ekonomi juga menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu: Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua; meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua; mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara; melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan; serta menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Daya saing ekonomi juga menjadi isu strategis nasional dan provinsi, khususnya terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, investasi dan perdagangan. Program Nasional dengan lokus di Kota Pekalongan sesuai dengan Perpres Nomor 79 Tahun 2019 adalah Pembangunan TOD (*Transit Oriented Development*) Stasiun Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 200 Miliar dari BUMN. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan di Kota Pekalongan juga menjadi isu strategis provinsi, sehingga program prioritas pembangunan provinsi akan dilakukan di Kota Pekalongan yaitu pengembangan Minabatik (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023).

Dalam Pariwisata terdapat 5 (lima) hal penting yang saling terkait, yang biasa dikenal dengan 3A dan 2P, yaitu: Atraksi, Amenitas, Aksesibilitas, Promosi dan Pelaku Usaha. Kelima hal tersebut harus ada dan mendukung satu dengan lainnya untuk menciptakan pariwisata yang unggul. Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPARPROV) Tahun 2017-2027, Kota Pekalongan termasuk dalam salah satu Destinasi Pariwisata Provinsi / DPP yaitu DPP Tegal - Pekalongan dan sekitarnya. DPP ini merupakan destinasi pariwisata berskala Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 6 DPP. DPP dibagi lagi menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi / KSPP dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi/ KPPP. Untuk DPP Tegal-Pekalongan dan sekitarnya, terdiri dari 2 KSPP dan 4 KPPP yaitu: a) KSPP Tegal dan sekitarnya; b) KSPP Pekalongan Kota dan sekitarnya; c) KPPP Linggoasri-Petungkriyono dan sekitarnya; d) KPPP Batang dan sekitarnya; e) KPPP Pemalang dan sekitarnya; dan f) KPPP Kaligua-Malahayu dan sekitarnya. Sedangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata (RIPP) Kota Pekalongan Tahun 2013-2028, telah ditentukan 4 DPD dan 9 KSPP serta 14 KPPP, dengan

kriteria: a) Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah daerah yang didalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata seperti KSPD dan KPPD; b) Memiliki daya tarik wisata yang berkualitas serta membentuk jejaring produk dan pola kunjungan wisata; c) Memiliki tema yang mendukung penguatan daya saing; d) Memiliki dukungan aksesibilitas dan infrastruktur mendukung pariwisata; dan e) Keterpaduan rencana sektor terkait.

Peningkatan daya tarik pariwisata menjadi fokus program kewilayahan Jateng dengan lokus di Kota Pekalongan yaitu pengembangan potensi masyarakat destinasi pariwisata di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023). Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung pariwisata, pengembangan atraksi wisata, peningkatan kualitas amenitas, perkuatan promosi wisata, dan penyusunan standar prosedur manajemen pariwisata, termasuk dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, merupakan beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam peningkatan sektor pariwisata di Kota Pekalongan.

2.4.8 Pelestarian Budaya Lokal

Pemerintah Kota Pekolongan akan terus memperkuat dan mengembangkan budaya lokal menjadi salah satu kekayaan yang harus diwariskan ke generasi berikutnya. Masih terbatasnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, dikarenakan belum optimalnya peran pemerintah dalam pembinaan di satu sisi, dan di sisi lainnya, dukungan para budayawan dan seniman yang belum optimal, menjadi isu strategis dalam pelestarian budaya lokal.

Urgensi pelestarian budaya lokal adalah Kota Pekalongan harus memperkuat jati dirinya karena budaya yang berkembang selama ini telah memberikan dampak bagi perkembangan perekonomian di Kota Pekalongan. Batik sebagai salah satu warisan dunia, telah memperkuat budaya Kota Pekalongan dan telah menghantarkan Kota Pekalongan menjadi kota kreatif dunia. Sebagian besar masyarakat Kota Pekalongan terkait dengan rantai ekonomi industri batik, sehingga pelestarian budaya menjadi salah satu kunci penting bagi pengembangan Kota Pekalongan ke depan. Di sektor lainnya, budaya yang telah berkembang di Kota Pekalongan menjadi salah satu atraksi wisata, yang mampu menarik wisatawan. Oleh karena itu, pelestarian budaya menjadi hal yang sangat penting, harus diintegrasikan dengan pembangunan kepariwisataan, sehingga dapat berkembang pariwisata budaya. Pengembangan pariwisata budaya dapat menjadi potensi tersendiri bagi pariwisata tersebut karena masing-masing daerah pasti memiliki kearifan budaya lokal yang khas dan unik bagi wisatawan. Strategi pengembangan pariwisata budaya dapat dilakukan antara lain dengan cara pengembangan atraksi budaya yang tetap mempertahankan jati diri kawasan, pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah menjadi bangunan cagar budaya, peningkatan infrastruktur, peningkatan fasilitas-fasilitas penunjang pariwisata, serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat.

Para pemangku budaya dan seni harus bersinergi agar kekayaan budaya khas Pekalongan dapat dilestarikan dan dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan daya tarik Kota Pekalongan, khususnya dengan sektor pariwisata. Dengan penguatan seni budaya serta dikolaborasikan dengan sektor lainnya maka dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.4.9 Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah yang baik, menjadi isu strategis, merupakan salah satu prasyarat penting bagi perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat. Dengan kondusivitas yang terjaga maka rantai ekonomi dan kondisi perikehidupan masyarakat dapat berjalan dengan normal. Dengan kondisivitas yang baik tersebut maka perekonomian dapat berkembang optimal dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daya saing daerah akan sangat tergantung kondisi kondusivitas wilayah ini.

Konflik sosial di wilayah Kota Pekalongan tahun 2020 berjumlah satu kasus, tahun 2021 bertambah menjadi tiga kasus, pada tahun 2022 tidak terjadi kasus konflik sosial dan pada tahun 2023 berjumlah lima kasus. Kondusivitas wilayah Kota Pekalongan masih menjadi permasalahan karena masih tingginya angka kriminalitas serta masih tingginya penyalahgunaan NAPZA. Angka kriminalitas yang tertangani per 10.000 penduduk menunjukkan kecenderungan yang menurun dimana pada tahun 2021 sebesar 3,60 (per 10.000 penduduk) dan menurun menjadi 1,47 (per 10.000 penduduk) di tahun 2022 akan tetapi naik menjadi 4,19 (per 10.000 penduduk) di tahun 2023. Kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika tahun 2021 sebesar 46 kasus, pada tahun 2022 sebanyak 39 kasus dan tahun 2023 meningkat menjadi 49 kasus. Angka tersebut masih cukup tinggi dan Kota Pekalongan merupakan salah satu kabupatan/kota yang memiliki risiko tinggi penyalahgunaan NAPZA di Provinsi Jawa Tengah. Angka kriminalitas maupun kasus penyalahgunaan NAPZA harus diturunkan, untuk dapat mendukung terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat.

Perwujudan keamanan, ketertiban dan kenyamanan kehidupan bermasyarakat, menjadi tanggung jawab bersama, seluruh pemangku kepentingan, bukan menjadi kewenangan pemerintah semata. Dengan kondusivitas wilayah yang baik maka akan menjamin perwujudan penanaman modal yang semakin meningkat sehingga perekonomian akan semakin berkembang, dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terlebih lagi, pada tahun 2024 akan diselengarakan Pemilu dan Pilkada serentak, sehingga diperlukan kondusivitas wilayah yang sangat baik. Guna mewujudkan Pilkada serentak yang aman dan damai, Pemerintah Kota Pekalongan bersinergi dengan TNI, POLRI dan Linmas dengan menyiapkan personil pengamanan pada semua tahapan Pilkada, yaitu tahapan masa kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil Pilkada dan pengucapan sumpah/janji, pengamanan pada kantor penyelenggara Pilkada yaitu pengamanan Kantor dan Gudang Logistik KPU Kota Pekalongan serta pengamanan Kantor Bawaslu. Dukungan pembiayaan juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan alokasi pendanaan sebesar 40% pada tahun anggaran 2023 dan 60% pada tahun anggaran 2024 dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Kota Pekalongan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Perekonomian global mengalami perlambatan pada tahun 2023. Meskipun demikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat, yakni tercatat sebesar 5,04% (yoy) pada triwulan IV-2023 dan 5,05% untuk keseluruhan tahun 2023. Meskipun tahun 2023 pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan melambat signifikan, ekonomi Indonesia mencatatkan konsistensi tren pertumbuhan yang sangat baik, ditopang oleh aktivitas permintaan domestik yang masih kuat, khususnya aktivitas konsumsi dan investasi, Bukan hanya kuat, ekonomi Indonesia juga tumbuh berkualitas dengan turut mendorong penurunan angka pengangguran dan kemiskinan nasional. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional turun menjadi 5,32% pada Agustus 2023. Tingkat kemiskinan nasional juga menurun dari 9,54% (Maret 2022) menjadi 9,36% di tahun 2023.

Situasi ekonomi global juga memengaruhi ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,98 persen, melambat dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang tumbuh 5,31 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 11,24 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yaitu sebesar 7,34 persen. Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2023 dengan kontribusi sebesar 34,03 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,90 persen. Dari sisi inflasi Jateng dalam beberapa bulan lalu, mencapai 3,16 persen. Pada dua bulan terakhir lalu mencapai 2,89 persen, dan Januari 2024 inflasi mencapai 2,69 persen. hal itu merupakan satu hal yang positif bagi perkembangan perekonomian di Jawa Tengah.

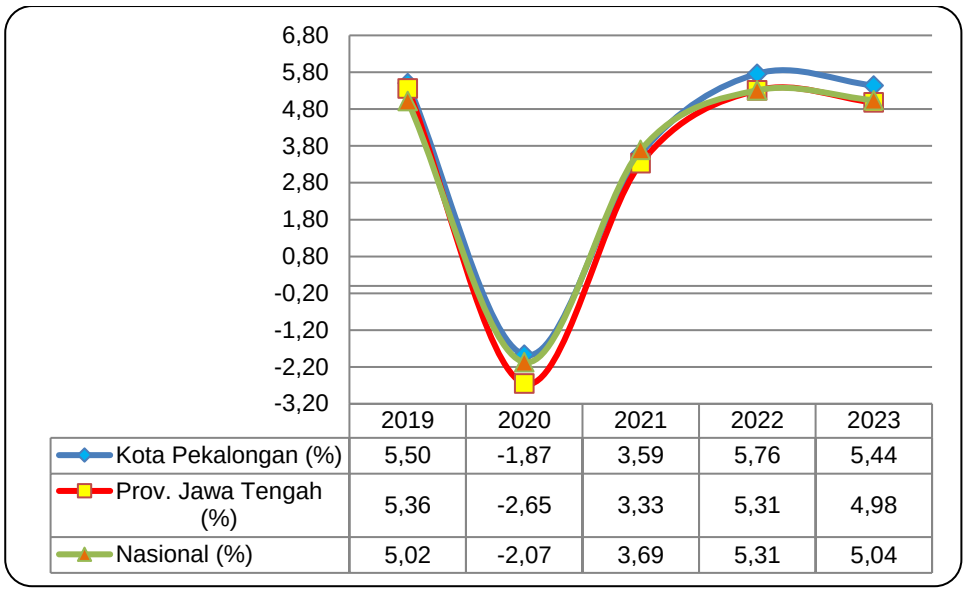
Kondisi perekonomian global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah tersebut memengaruhi kondisi ekonomi Kota Pekalongan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh oleh suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2019 sampai dengan 2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun tajam, mengalami kontraksi, yaitu minus 1,87 persen. Hal ini disebabkan wabah global yaitu *COVID-19* yang menyerang ke seluruh dunia hingga menjadi pandemi dan berdampak sangat signifikan terhadap tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Seluruh sendi kehidupan tak terhindar dari dampak wabah ini hingga mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi global. Namun demikian, pada tahun 2021, perekonomian global, nasional dan Kota Pekalongan tumbuh kembali. Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2021 sebesar

3,59 persen dan tumbuh Kembali sebesar 5,76 persen pada tahun 2022. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2023 mengalami perlambatan sehingga menjadi 5,44 persen. Pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan keberlanjutan pemulihan ekonomi yang tidak hanya dilandasi pada keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada efektivitas respon kebijakan yang ditempuh.

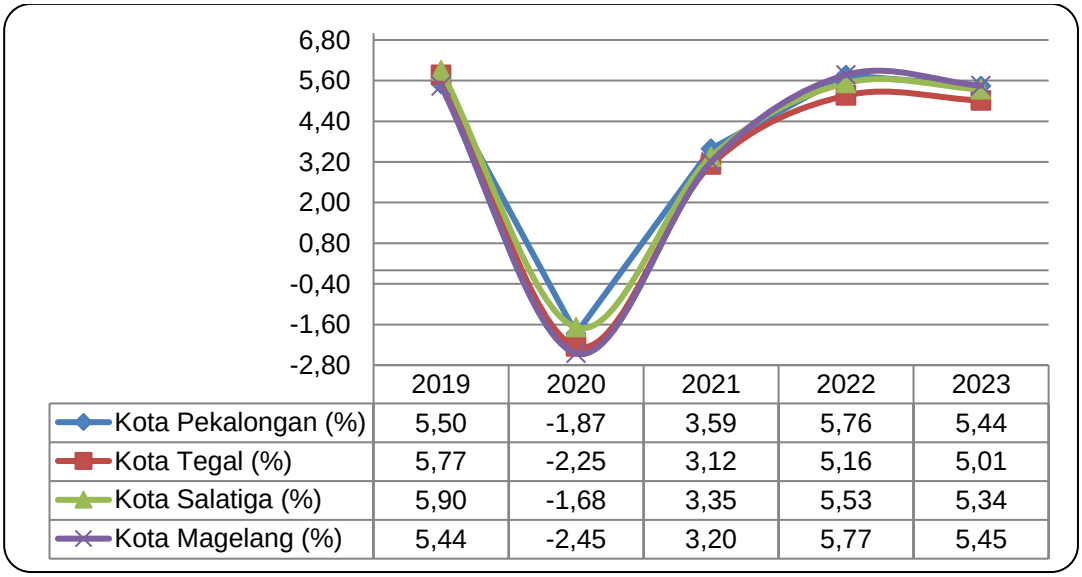


	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekalongan (%)	5,50	-1,87	3,59	5,76	5,44
Prov. Jawa Tengah (%)	5,36	-2,65	3,33	5,31	4,98
Nasional (%)	5,02	-2,07	3,69	5,31	5,04

Gambar III-1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024 (diolah), 2024

Jika dibandingkan dengan daerah setara seperti Kota Tegal, Kota Salatiga dan Kota Magelang, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan secara umum cukup tinggi diantara ketiga daerah tersebut. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di atas Kota Magelang, di bawah Kota Tegal dan Kota Salatiga. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada di bawah Kota Salatiga serta di atas Kota Tegal dan Kota Magelang. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan semakin membaik dan berada diatas ketiga Kota tersebut. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada dibawah Kota Magelang dan diatas Kota Salatiga dan Kota Tegal. Sementara pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan lebih tinggi dibandingkan Kota Tegal dan Kota Salatiga, namun lebih rendah dibandingkan dengan Kota Magelang. Selengkapnya disajikan dalam Gambar III-2 berikut.



	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekalongan (%)	5,50	-1,87	3,59	5,76	5,44
Kota Tegal (%)	5,77	-2,25	3,12	5,16	5,01
Kota Salatiga (%)	5,90	-1,68	3,35	5,53	5,34
Kota Magelang (%)	5,44	-2,45	3,20	5,77	5,45

Gambar III-2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Daerah Setara Tahun 2019 - 2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur perekonomian Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Industri Pengolahan dan lapangan usaha Konstruksi, yang terlihat dari peranan lapangan usaha tersebut setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan selama tahun 2019-2023. Hal tersebut merupakan perwujudan perkembangan sebuah kota, dimana sektor primer sudah tidak mendominasi lagi dalam perekonomian.

Pada tahun 2023, kontribusi terbesar struktur perekonomian Kota Pekalongan adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,05 persen; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 20,44 persen; dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,64 persen. Ketiga lapangan usaha tersebut yang selalu mendominasi kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0-7 persen. Struktur perekonomian Kota Pekalongan secara lengkap dalam lima tahun terakhir yang didasarkan atas nilai PDRB atas dasar harga berlaku disajikan dalam Tabel III-1 berikut.

Tabel III-1 Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap PDRB Kota Pekalongan Tahun 2019-2023 (persen)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,66	5,09	4,79	4,71	4,48
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	20,85	21,34	21,15	20,83	20,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,16	0,15	0,15	0,14	0,15
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,12	0,12	0,11	0,11
F	Konstruksi	14,64	14,54	15,46	15,12	15,64

Lapangan Usaha		2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,80	21,38	21,59	21,10	21,05
H	Transportasi dan Pergudangan	6,40	5,02	5,06	7,28	7,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,44	5,31	5,36	5,57	5,84
J	Informasi dan Komunikasi	4,36	5,13	5,07	4,75	4,74
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,13	6,21	6,22	6,15	5,93
L	Real Estat	2,71	2,73	2,66	2,58	2,54
M,N	Jasa Perusahaan	0,44	0,43	0,42	0,42	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,47	4,49	4,17	3,94	3,72
P	Jasa Pendidikan	4,65	4,72	4,54	4,16	4,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,44	1,40	1,33	1,30
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,90	1,90	1,83	1,82	1,80
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2024, 2024

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak 2019 hingga 2023 berfluktuasi. Pada Tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 35,41 juta rupiah. Pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan sebesar 35,32 juta rupiah, dan meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 37,17 juta rupiah pada tahun 2021, 40,65 juta rupiah pada tahun 2022 dan 43,29 juta rupiah di tahun 2023. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel III-2 Nilai PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan PDRB Per Kapita Kota Pekalongan tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai PDRB					
- ADHB (Miliar Rp)	10.873,98	10.848,87	11.460,58	12.590,98	13.744,05
- ADHK (Miliar Rp)	7.477,43	7.337,83	7.601,49	8.039,46	8.476,55
PDRB Per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	35,41	35,32	37,17	40,65	43,29
- ADHK (Juta Rp)	24,35	23,89	24,66	25,96	26,70
Pertumbuhan PDRB per Kapita					

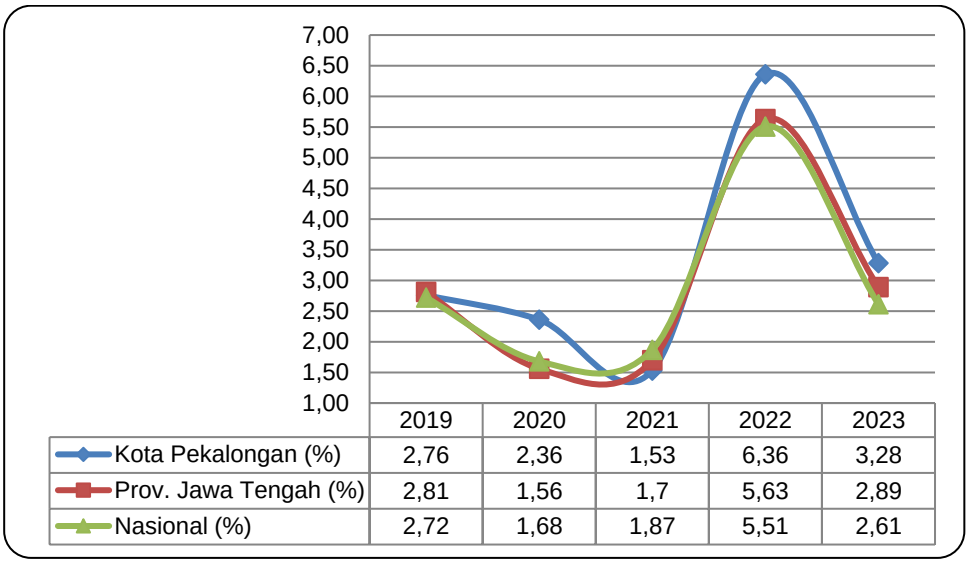
Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
- ADHB (persen)	6,86	-0,25	5,24	9,43	6,48
- ADHK (persen)	4,60	-1,88	3,20	5,27	2,85

Sumber: BPS Kota Pekalongan, 2024

c. Inflasi

Unsur yang layak dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Indikator ini pada prinsipnya menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen di Kota Pekalongan, laju inflasi di Kota Pekalongan merujuk angka inflasi Kota Tegal (daerah setara). Pada periode tahun 2019 - 2023, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 6,36 persen sampai 1,53 persen. Nilai inflasi Kota Pekalongan pada tahun 2021 paling rendah dibanding Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu 1,53%. Angka ini merupakan inflasi terendah selama lima tahun terakhir.

Adapun perkembangan inflasi Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disajikan dalam Gambar III-3 berikut.

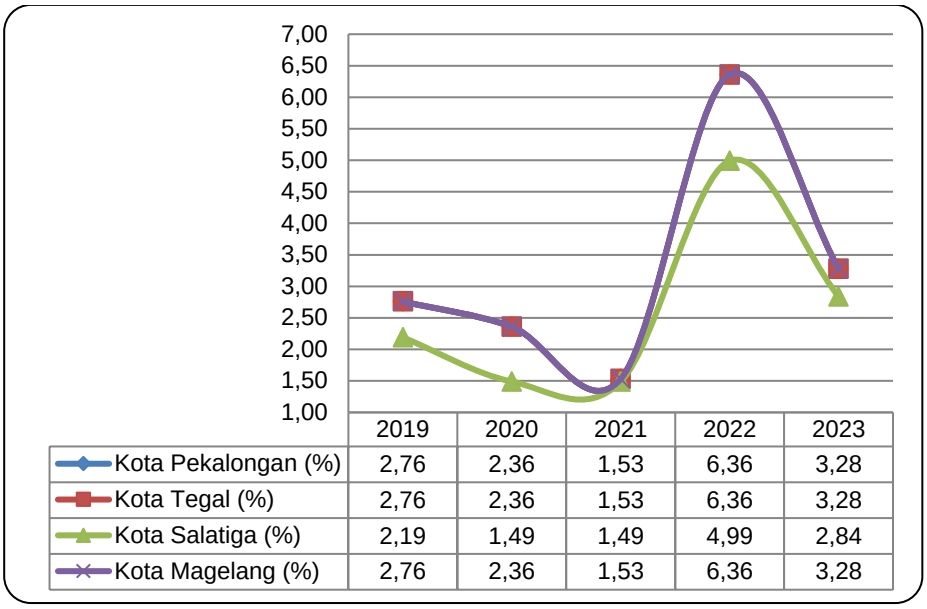


	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekalongan (%)	2,76	2,36	1,53	6,36	3,28
Prov. Jawa Tengah (%)	2,81	1,56	1,7	5,63	2,89
Nasional (%)	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61

Gambar III-3 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2019 - 2023

Sumber: www.bps.go.id, 2024

Mulai tahun 2019 BPS Jawa Tengah hanya merilis nilai inflasi di 6 Kota, yaitu: Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Kudus, Kota Purwokerto, Kota Cilacap, Kota Tegal. Sehingga untuk Kota Pekalongan dan Kota Magelang merujuk pada inflasi *sister city* nya yaitu Kota Tegal, sedangkan untuk Kota Salatiga merujuk pada nilai inflasi Kota Semarang.



	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Pekalongan (%)	2,76	2,36	1,53	6,36	3,28
Kota Tegal (%)	2,76	2,36	1,53	6,36	3,28
Kota Salatiga (%)	2,19	1,49	1,49	4,99	2,84
Kota Magelang (%)	2,76	2,36	1,53	6,36	3,28

Gambar III-4 Perbandingan Laju Inflasi Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2019 - 2023

Sumber: www.bps.go.id (diolah), 2024

Jika dibandingkan dengan daerah setara (Kota Tegal, Kota Salatiga, dan Kota Magelang), laju inflasi Kota Pekalongan tahun tahun 2019 sama dengan Kota Tegal, berada di urutan tertinggi yaitu 2,76%. dan laju inflasi paling rendah yaitu Kota Salatiga sebesar 2,19%. Laju inflasi pada keempat daerah setara tersebut cenderung menurun sampai dengan tahun 2021, yang artinya semakin membaik. Namun pada tahun 2022 laju inflasi meningkat tajam, dimana Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang meningkat menjadi 6,36%, dan Kota Salatiga menjadi 4,99%. Pada tahun 2023 laju inflasi kembali menurun menjadi 3,28% untuk Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Magelang, serta 2,84% untuk Kota Salatiga.

Mulai tahun 2020 terdapat perbedaan komponen kelompok pengeluaran sebagai dasar perhitungan inflasi, sehingga tabel inflasi menurut kelompok pengeluaran dijadikan dua, yaitu tahun 2018-2019 dan tahun 2020-2023. Data selengkapnya disajikan dalam Tabel III-3 berikut.

Tabel III-3 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2018-2019

Kelompok Pengeluaran	2018	2019
Umum	2,92	2,76
Bahan Makanan	3,66	8,00
Makanan Jadi	3,05	1,60
Perumahan	3,47	0,40
Sandang	2,51	3,31
Kesehatan	0,54	4,75
Pendidikan	1,33	3,74
Transport	2,43	0,31
Perlengkapan	-	-
Infokom	-	-
Rekreasi	-	-
Restoran	-	-

Kelompok Pengeluaran	2018	2019
Perawatan Pribadi	-	-

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

Tabel III-4 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2020-2023

Kelompok Pengeluaran	2020	2021	2022	2023
Makanan, Minuman dan Tembakau	4,36	2,14	8,96	7,89
Pakaian dan Alas Kaki	3,95	2,01	2,45	0,51
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,32	1,42	1,47	1,30
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	2,67	1,13	4,89	0,40
Kesehatan	2,87	0,55	2,50	2,78
Transportasi	1,36	1,01	16,42	-0,69
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,19	-0,64	1,74	0,03
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	6,14	2,62	4,50	0,74
Pendidikan	-2,66	0,06	3,21	5,50
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	1,74	1,61	4,81	1,01
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	4,16	2,35	9,64	3,39
Umum	2,32	1,53	6,31	3,04

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2024

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Prospek perekonomian Kota Pekalongan tahun 2025 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional, meskipun prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 akan tumbuh tinggi.

Pemulihan ekonomi global cenderung melambat, tercermin dari laju pertumbuhan ekonomi global yang tidak merata pada triwulan III tahun 2023, dipengaruhi antara lain oleh ketatnya kondisi keuangan, lemahnya pertumbuhan perdagangan, rendahnya optimisme dunia usaha dan konsumen, meningkatnya ketegangan geopolitik pasca perang Rusia-Ukraina, berkembangnya konflik Palestina-Israel, dampak pengetatan kebijakan moneter, serta cuaca ekstrem. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh sebesar 2,9 persen (YoY), Tiongkok tumbuh 4,9 persen (YoY), ekonomi Jepang melambat 1,2 persen (YoY), Korea Selatan tumbuh 1,4 persen (YoY), serta Singapura tumbuh 1,1 persen (YoY). Bank sentral sebagian besar negara cenderung mempertahankan suku bunganya, sejalan dengan redanya inflasi. Harga komoditas energi berada pada tren positif meskipun lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Sementara itu, harga komoditas pertanian masih melandai serta harga logam dasar yang variatif dan harga logam mulia menguat.

Sementara kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Pekalongan antara lain:

1) Ekonomi Indonesia tetap tumbuh solid sebesar 5,04 persen (YoY) pada triwulan IV tahun 2023 diantaranya ditopang oleh inflasi dan tingkat suku bunga yang tetap terkendali di tengah peningkatan mobilitas masyarakat dan adanya persiapan pemilihan umum (pemilu). Dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen tumbuh positif, kecuali impor

yang mengalami kontraksi. Sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,5 persen (YoY) ditopang oleh terjaganya daya beli masyarakat dengan inflasi yang tetap terkendali seiring dengan adanya momen libur sekolah, HBKN Natal dan Tahun Baru. Dari sisi produksi, seluruh sektor lapangan usaha tumbuh positif dengan industri pengolahan menjadi sumber pertumbuhan tertinggi didorong oleh kuatnya permintaan domestik.

2) Kinerja APBN menunjukkan stabilitas makro, diperlihatkan oleh defisit anggaran yang terus menurun dengan tren konsolidatif. Realisasi Pendapatan Negara tumbuh positif 5,3 persen (YoY) mencapai Rp2.774,3 triliun hingga akhir Desember 2023 atau sebesar 105,2 persen dari target Perpres Nomor 75/2023. Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai Rp3.121,9 triliun (100,2 persen dari Pagu Perpres Nomor 75/2023 dan tumbuh sebesar 0,8 persen (YoY). Berdasarkan capaian Pendapatan dan Belanja Negara, hingga akhir Desember 2023, realisasi APBN berada dalam kondisi defisit yaitu sebesar Rp347,6 triliun atau sebesar -1,66 persen PDB.
3) Suku bunga acuan ditingkatkan sebesar 25 bps, dari 5,75 persen menjadi 6,00 persen pada Oktober 2023 dan dipertahankan hingga akhir tahun sebagai respons terhadap berlanjutnya stance pengetatan kebijakan moneter global, utamanya The Fed yang berpotensi mendorong lonjakan arus modal keluar dari dari pasar Indonesia. Rata-rata nilai tukar Rupiah mencapai Rp15.616 per USD pada triwulan IV tahun 2023, melemah tipis sebesar 0,38 persen dibandingkan dengan rata-rata triwulan IV tahun 2022. Pada Oktober 2023, tingginya inflasi global termasuk di Amerika Serikat, mengakibatkan bank sentral di negara maju melanjutkan kebijakan moneter melalui suku bunga acuan tinggi. Likuiditas perekonomian tetap longgar akan tetapi intermediasi perbankan tetap terjaga. Inflasi domestik pada triwulan IV tahun 2023 mengalami fluktuasi, inflasi tahunan (YoY) pada bulan November mencapai 2,86 persen, meningkat dari bulan Oktober sebesar 2,56 persen.
4) Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 diprakirakan sebesar 4,9 - 5,2 persen (YoY), dengan prakiraan terkini sebesar 5,0 persen (YoY). Adapun prakiraan Bappenas, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen (YoY), didorong oleh pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tidak mengalami perubahan signifikan dari kondisi business as usual sekitar 5 persen pada tahun 2024 dan 2025. Konsumsi rumah tangga diprakirakan akan kembali menjadi sumber pertumbuhan terbesar seiring dengan stabilitas domestik baik dari sisi politik dan ekonomi. Dari sisi produksi, perbaikan pada kondisi investasi pasca pemilu diharapkan dapat mendorong investasi khususnya pada sektor terkait industri, seiring dengan meningkatnya volume produksi produk hasil hilirisasi.
5) Sepanjang triwulan I tahun 2024, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebesar 6,25 persen, sebagai langkah untuk mengendalikan ekspektasi inflasi serta menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas nilai tukar.
6) Likuiditas perekonomian dan perbankan mengalami penurunan namun tetap memadai. Longgarnya likuiditas perekonomian dan perbankan mendukung intermediasi perbankan dan stabilitas sistem keuangan.
7) Inflasi domestik menunjukkan tren penurunan dan masih berada pada rentang target inflasi nasional 2023.
8) Perjalanan internasional global terus menunjukkan kinerja yang positif, didorong oleh pemulihan perjalanan yang kuat di sebagian besar wilayah di dunia. Indonesia menerima kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) sebesar 11,67 juta orang sepanjang tahun 2023. Ini merupakan peningkatan 98,2% dari tahun 2022, tetapi masih lebih rendah dari total kunjungan sebelum pandemi pada tahun 2019, yang mencapai 16,11 juta kunjungan.
9) Tren perdagangan produk ekonomi kreatif dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan surplus ekspor yang terus meningkat hingga mencapai 65 persen pada tahun 2023. Namun, dari segi penggunaan kekayaan intelektual yang merupakan kunci nilai tambah

ekonomi kreatif masih terdapat defisit yang sangat tinggi. Pada triwulan IV tahun 2023 biaya penggunaan kekayaan intelektual mengalami defisit sebesar USD 621 juta dengan peningkatan defisit sebesar USD59 juta atau 10,50 persen (YoY). Hal ini disebabkan peningkatan biaya yang dikeluarkan untuk impor kekayaan intelektual sebesar 7,97 persen (YoY) menjadi USD664 juta. Selain itu, pendapatan penggunaan kekayaan intelektual dari ekspor mengalami penurunan sebesar 18,87 persen (YoY) dan 8,5 persen (mtm). Peningkatan ekosistem komersialisasi kekayaan intelektual di dalam negeri dan penyesuaiannya dengan standar global perlu dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi defisit tersebut.

Beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi Kota Pekalongan yaitu:

a. Berakhirnya status pandemi *COVID*-19 sebagai kejadian darurat kesehatan publik bukanlah akhir dari tantangan global yang harus dihadapi oleh suatu negara. Perkembangan dinamika global yang sedemikian cepat pasca pandemi telah menciptakan kompleksitas yang berat dalam tahun tahun sekarang dan ke depan.
b. Ketegangan geopolitik menjadi tantangan paling berat. Meningkatnya tensi geopolitik menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar menjadi inward looking. Akibatnya, dunia semakin terfragmentasi dan tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi.
c. Tantangan selanjutnya yakni kecepatan perkembangan teknologi digital. Perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi masyarakat maupun efisiensi produksi. Namun di sisi lain, hal ini menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia secara masif, persoalan privasi, dan keamanan siber.
d. Perubahan iklim serta respon kebijakannya turut menjadi tantangan global. Respon kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara maju terhadap perubahan iklim menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Seperti kebijakan *Inflation Reduction Act* (IRA) di Amerika Serikat dan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) di Uni Eropa.
e. Tantangan terakhir yaitu pandemi *COVID*-19 yang membutuhkan kewaspadaan dan kesiap-siagaan. Kasus *COVID*-19 di Indonesia kembali mengalami kenaikan beberapa minggu terakhir, dimana per tanggal 21 Desember 2023 terdapat 453 kasus baru, dengan kasus aktif sebanyak 2.761 kasus. Jumlah kasus aktif *COVID*-19 di Indonesia ini masih di bawah level satu pandemi virus corona yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO). Level satu pandemi menurut WHO yakni 56.000 kasus aktif per minggu. Kenaikan kasus *COVID*-19 di Indonesia disebabkan karena masuknya subvarian baru virus corona bernama JN.1, subvarian XBB 1.16, dan subvarian XBB 1.9.1. Kendati peningkatan kasus tak terlalu tinggi, masyarakat dihimbau tetap waspada. Jika berada di keramaian atau transportasi umum, masyarakat yang sakit diimbau memakai masker.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

a. Pemulihan ekonomi pasca pandemi *COVID-19* diarahkan untuk mengoptimalkan sektor perdagangan dan jasa, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, akselerasi investasi, pengembangan ekonomi kreatif serta pembangunan pariwisata.
b. Pembangunan infrastruktur perkotaan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup.
c. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dapat terselenggara dengan baik.
d. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan.

e. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, melalui peningkatan keterampilan (pelatihan) dan kewirausahaan dalam masyarakat dalam menghadapi kecepatan perkembangan teknologi digital.

f. Mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) atau CSR (*Corporate Social Responsibility*). Dalam rangka penanganan rumah tidak layak huni kawasan permukiman kumuh Krapyak, Pemkot Pekalongan menggandeng TJSLBU/CSR PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang membantu secara komprehensif berupa dana hibah kepada 16 (enam belas) warga terdampak program relokasi untuk penyediaan hunian cluster yang layak.

g. Penguatan SDM aparatur pemerintah guna meningkatan kualitas pelayanan publik.

h. Peningkatan kerjasama antar daerah, khususnya dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang dalam rangka peningkatan investasi daerah.

i. Mendorong riset dan inovasi dalam rangka menuju pengembangan ekonomi sirkuler bagi industri dan UMKM

Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan pembangunan di Kota Pekalongan dapat tumbuh sebagaimana digambarkan melalui indikator makro berikut:

a. Pertumbuhuan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024. Upaya peningkatan ekonomi terus didorong dengan menggerakkan berbagai sektor usaha dan melibatkan berbagai pihak termasuk investor.

Di tahun 2023, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup baik, yaitu tumbuh sebesar 5,04 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,31 persen. Hal ini senada dengan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan, dimana mengalami pertumbuhan sebesar 5,44 persen pada tahun 2023 dan pertumbuhan sebesar 5,76 persen pada tahun 2022.

Dengan asumsi optimis bahwa pemulihan ekonomi dapat dilakukan dengan cepat, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan dalam Tabel III-5 berikut.

Tabel III-5 Realisasi, Target dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024	Target RKPD 2025	Proyeksi RPJMD 2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,76	5,44	5,4 - 5,8	5,44 - 6,0	4,55

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian IPM Kota Pekalongan tahun 2023 bergerak naik dari 75,90 di tahun 2022, menjadi 76,71 di tahun 2023. Capaian di tahun 2023 telah melebihi angka yang ditargetkan yaitu 76,70. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IPM sebagaimana disajikan dalam Tabel III-6 berikut.

Tabel III-6 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2022	Relisasi 2023	Target RKPD 2024	Target RKPD 2025	Proyeksi RPJMD 2026
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,90	76,71	76,70	77,39	76,03

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator yang menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, yakni sebesar 61,37 di tahun 2022 dan meningkat menjadi 65,31 di tahun 2023. Angka tersebut sudah melampaui target yang diharapkan yaitu 59,14. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan IDG sebagaimana disajikan dalam Tabel III-7 berikut.

Tabel III-7 Realisasi, Target dan Proyeksi
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2022	Realisasi 2023	Target RPKD 2024	Target RKPD 2025	Proyeksi RPJMD 2026
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	61,37	65,31	59,59	60,28	61,00

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

d. Tingkat Kemiskinan

Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 terus didorong dengan berbagai upaya. Tren menurunnya angka kemiskinan sejak pandemi sampai dengan data terakhir tahun 2023 tidak lain karena sokongan bantuan pemerintah terhadap masyarakat miskin. Sebut saja di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Dana Desa, Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Subsidi Gaji, dan subsidi listrik.

Tingkat kemiskinan tahun 2023 mencapai 6,81 persen, jauh dari target yang diharapkan yaitu 6,5 persen. Begitu juga di tahun 2022, tingkat kemiskinan mencapai 7,00 persen, masih di atas angka yang diharapkan yaitu 6,71 persen. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan tingkat kemiskinan sebagaimana disajikan dalam Tabel III-8 berikut.

Tabel III-8 Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Kemiskinan di Kota Pekalongan

Indikator	Relisasi 2022	Realisasi 2023	Target RPKD 2024	Target RKPD 2025	Proyeksi RPJMD 2026
Tingkat kemiskinan (persen)	7,00	6,81	6,30 - 5,93	6,70 - 6,23	5,89

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sejalan dengan membaiknya kondisi ekonomi di Kota Pekalongan, penyerapan tenaga kerja juga turut membaik, namun hal ini belum berlangsung secara konsisten. Hal ini terlihat dari meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 4,98 persen di tahun 2022 menjadi 5,02 persen di tahun 2023 atau meningkat sebesar 0,04 persen. Meskipun demikian, capaian ini telah melebihi dari yang ditargetkan yaitu 6,48 persen di tahun 2023. Pemerintah

Kota Pekalongan menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), sebagaimana disajikan dalam Tabel III-9 berikut.

Tabel III-9 Realisasi, Target dan Proyeksi
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target RPKD 2024	Target RKPD 2025	Proyeksi RPJMD 2026
Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4,98	5,02	4,5 - 4,7	5,05 - 4,47	5,99

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

f. Inflasi

Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa di Kota Pekalongan masih relatif terkendali. Setiap tahunnya, Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebesar 3±1 persen atau berada pada angka 2-4 persen. Inflasi pada tahun 2022 berada di atas range tersebut yaitu 6,36 persen dan pada tahun 2023 inflasi dapat terkendali dengan capaian 3,28 persen sehingga berada pada range target yang ditentukan. Pemerintah Kota Pekalongan menargetkan inflasi sebagaimana disajikan dalam Tabel III-10 berikut.

Tabel III-10 Realisasi, Target dan Proyeksi
Inflasi di Kota Pekalongan

Indikator	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target RPKD 2024	Target RKPD 2025	Proyeksi RPJMD 2026
Inflasi (persen)	6,36	3,28	3±1	3±1	3±1

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2024

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD Tahun 2021-2026, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Resposibility* (CSR).

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terdapat perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk belanja daerah terdiri atas: 1) belanja operasi; 2) belanja modal; 3) belanja tidak terduga; dan 4) belanja transfer. Belanja operasi sebagaimana dimaksud, dirinci atas jenis: a) belanja pegawai; b) belanja barang dan jasa; c) belanja bunga; d) belanja subsidi; e) belanja hibah; dan f) belanja bantuan sosial. Sedangkan untuk belanja modal meliputi: a)

belanja modal tanah; b) belanja modal peralatan dan mesin; c) belanja modal bangunan dan Gedung; d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan; e) belanja modal aset tetap lainnya; dan f) belanja modal aset lainnya. Untuk belanja tidak terduga dirinci atas jenis belanja tidak terduga. Dan untuk belanja transfer dirinci atas jenis: a) belanja bagi hasil; dan b) belanja bantuan keuangan.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo, Pemberian Pinjaman Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi penerimaan daerah. Tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023, Pemerintah Kota Pekalongan telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Wali Kota dan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024. Konsekuensi atas terbitnya regulasi tersebut, struktur APBD mengalami perubahan untuk nomenklatur Pajak Daerah dan nomeklatur Retribusi Daerah. Pada struktur APBD, Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Untuk Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain Pendapatan sesuai Peraturan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdapat nomenklatur Pajak Daerah baru yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). PBJT merupakan integrasi dari 5 jenis Pajak Daerah yang berbasis pada konsumsi yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan. Selain perubahan nomenklatur Pajak Daerah, terdapat jenis Pajak Daerah baru yaitu Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu dari pokok pajak terutang yang dipungut bersamaan dengan pajak yang dikenakan opsen (Pajak PKB, dan BBNKB). Sedangkan untuk Retribusi Daerah, terdapat beberapa Retribusi Daerah yang sudah tidak dipungut antara lain: Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Dengan tidak dipungutnya kembali Retribusi Daerah tersebut dan penurunan beberapa tarif Pajak Daerah dapat berpotensi menurunkan PAD sehingga diperlukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah dilakukan melalui peningkatan pelayanan, penanganan piutang, optimalisasi Retribusi Daerah, peningkatan kinerja BUMD, optimalisasi pemanfaatan Aset, dan peningkatan dana insentif fiskal.

Dalam struktur APBD Kota Pekalongan komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan Kota Pekalongan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber

dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Pekalongan dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Dalam penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2025, perencanaan pendapatan daerah mengacu pada pagu indikatif tahun 2025 pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekalongan tahun 2025 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang Sah, melalui upaya:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi;
4. Revisi dan evaluasi Perda-perda yang berhubungan dengan pendapatan daerah;
5. Peningkatan prestasi dan kinerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan dana insentif fiskal.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan umum Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2025 diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan TKD. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Pekalongan menindaklanjutinya dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Kedua peraturan tersebut diterapkan mulai tahun 2024 sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2025 difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan daerah melalui:

1. Sosialisasi secara bertahap dan berkelanjutan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah;
2. Evaluasi pungutan pajak dan retribusi daerah atas implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Sinergisitas antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Pekalongan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka implementasi Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan Wali Kota Pekalongan tentang teknis pungutan pajak dan retribusi daerah;
5. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi sesuai dengan Roadmap (ETP) 2021-2025;
6. Penyusunan buku Potensi PAD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (*tapping box* dan sejenisnya);

8. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD;
9. Pelaksanaan Gebyar Pajak PBB dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Restoran);
10. Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2;
11. Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;
12. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verfikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
13. Pelayanan PBB *Online* dan tanda tangan elektronik untuk dokumen pajak daerah;
14. Pengembangan dan Penyempurnaan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data Simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya;
16. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
17. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
18. Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
19. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah;
20. Menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan yang orientasinya untuk memenuhi target kinerja peringkat DID;
21. Menyusun Rencana Aksi untuk peningkatan prestasi dan kinerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan Dana Insentif;
22. Peningkatan kordinasi/kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.;

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang akan diterapkan pada tahun 2025. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Perhitungan proyeksi opsen PKB dan BBNKB Kota Pekalongan selaras dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan tetap memperhatikan realisasi bagi hasil PKB dan BBNKB tahun 2023. Dalam upaya tersebut, sinergitas antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan dilakukan dalam bentuk kegiatan:

1. Pendataan potensi;
2. Penelusuran dan penagihan.

Perlu dilakukan koordinasi secara intensif dengan Bapenda Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun formulasi kegiatan sekaligus berkolaborasi dalam pelaksanaan optimalisasi opsen PKB dan BBNKB tahun 2025.

Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), proyeksi kenaikan PAD diasumsikan sebagai berikut:

a. Perkiraan kenaikan potensi pajak dan retribusi dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang mengacu pada atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. Kemungkinan realisasi penagihan piutang;

c. Perkiraan investasi di Kota Pekalongan tahun 2025 berupa pembangunan beberapa hotel dan restoran baru.
d. Mempertimbangkan realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah selama 2 tahun terakhir;
e. Perkiraan suku bunga BI (Bank Indonesia);
f. Potensi aset yang disewakan;
g. Estimasi perhitungan aset yang akan dilelang;
h. Estimasi denda pajak dan retribusi yang akan diterima.

Sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dengan dasar estimasi perolehan laba dari BUMD di tahun 2024.

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah Kota Pekalongan tahun 2021-2026 disajikan dalam Tabel III-11 berikut.

Tabel III-11 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026

URAIAN	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023 (Unaudited)	APBD 2024	RKPD 2025	Proyeksi 2026
PENDAPATAN	**966.372.557.051**	**989.013.074.926**	**1.028.417.644.274**	**973.848.811.000**	**1.005.379.456.000**	**1.008.304.887.000**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**252.037.004.472**	**263.475.949.166**	**263.342.597.630**	**248.422.169.000**	**297.670.934.000**	**291.029.212.000**
Pajak Daerah	87.382.426.252	101.303.223.640	115.423.918.578	106.000.000.000	141.900.000.000	143.172.681.000
Retribusi Daerah	14.748.214.704	19.088.524.378	16.704.861.471	127.931.569.000	145.000.000.000	136.846.643.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.805.514.149	6.434.311.659	7.117.204.338	6.365.300.000	7.226.934.000	7.500.888.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	144.100.849.367	136.649.889.489	124.096.613.243	8.125.300.000	3.544.000.000	3.509.000.000
PENDAPATAN TRANSFER	**686.765.223.608**	**725.537.125.760**	**763.287.046.644**	**725.426.642.000**	**707.708.522.000**	**717.275.675.000**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**607.835.271.117**	**618.566.266.760**	**667.941.862.118**	643.362.091.000	656.741.652.000	666.308.805.000
Bagi Hasil Pajak	34.377.457.237	33.880.707.425	31.492.855.139	25.901.831.000	25.901.831.000	25.901.831.000
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0	0	1.950.238.830	1.364.502.000	1.364.502.000	1.364.502.000
Dana Alokasi Umum	426.399.738.000	424.427.248.179	451.200.064.000	468.978.068.000	478.357.629.000	487.924.782.000
Dana Alokasi Khusus	125.528.550.880	155.562.051.156	162.020.125.149	147.117.690.000	147.117.690.000	147.117.690.000
Dana Insentif Fiskal	21.529.525.000	4.696.260.000	21.278.579.000	0	4.000.000.000	4.000.000.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**78.929.952.491**	**106.970.859.000**	**95.345.184.526**	82.064.551.000	50.966.870.000	50.966.870.000
Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi	76.876.982.891	72.380.352.000	72.883.759.926	82.064.551.000	50.966.870.000	50.966.870.000
Bantuan Keuangan Provinsi	2.052.969.600	34.590.507.000	22.461.424.600	0	0	0
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**27.570.328.971**	**0**	**1.788.000.000**	**0**	**0**	**0**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.852.062.887	0	1.788.000.000	0	0	0
Pendapatan Hibah	2.718.266.084	0	0	0	0	0

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Pekalongan (diolah), 2024

b. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perencanaan belanja daerah tahun 2025 pada RKPD mengacu pada pagu indikatif tahun 2025 pada RPJMD Tahun 2021-2026. Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi serta percepatan pencapaian target pembangunan, maka kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Mendorong upaya percepatan penurunan stunting, optimalisasi layanan dan fasilitas kesehatan serta peran masyarakat, peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.
2. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
3. Peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan.
4. Integrasi dan perluasan pelatihan kerja (pelatihan kerja secara inklusif dan berperspektif gender), sertifikasi, penempatan tenaga kerja terpadu dalam rangka penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing.
5. Mendorong peranan aktif perempuan di kehidupan ekonomi dan politik, serta menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6. Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman kumuh.
7. Penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan luasan ruang terbuka hijau dan pemanfaatan ruang kota.
8. Perluasan penyediaan akses layanan air minum, pengelolaan persampahan dan peningkatan akses jalan.
9. Peningkatan pengembangan pariwisata dan mensukseskan pembangunan pariwisata, penguatan ekonomi lokal dan ekonomi kreatif, serta penguatan sub sektor perdagangan dan jasa dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, baik secara langsung ataupun tidak langsung.
10. Peningkatan kualitas dan pengayaan penyelenggaraan event budaya.
11. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

Adapun realiasi dan proyeksi belanja daerah Kota Pekalongan tahun 2021-2026 disajikan dalam Tabel III-12 berikut.

Tabel III-12 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2021 - 2026

URAIAN	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023 (Unaudited)	APBD 2024	RKPD 2025	Proyeksi 2026
BELANJA	**962.091.792.004**	**1.031.090.188.444**	**1.031.847.572.704**	**1.024.773.811.000**	**1.013.929.456.000**	**1.020.804.887.000**
BELANJA OPERASI	**792.174.652.718**	**830.611.301.706**	**858.205.172.245**	**913.974.138.000**	**917.759.098.383**	**926.993.638.000**
Belanja Pegawai	391.695.115.554	375.774.559.810	380.545.140.291	430.669.816.000	437.583.646.500	500.904.876.000
Belanja Barang dan Jasa	367.573.741.625	413.865.972.418	431.075.384.481	440.037.571.000	451.848.793.633	392.389.948.000
Belanja Hibah	32.149.226.539	37.814.800.008	44.257.036.973	41.316.875.000	27.100.804.250	31.748.938.000
Belanja Bantuan Sosial	756.569.000	3.155.969.470	2.327.610.500	1.949.876.000	1.225.854.000	1.949.876.000
BELANJA MODAL	**160.513.725.170**	**196.569.439.074**	**170.653.380.598**	**107.299.673.000**	**93.686.357.617**	**90.311.249.000**
Belanja Modal Tanah	11.302.754.180	4.442.465.169	3.036.176.608	772.160.000	240.000.000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.536.785.604	55.027.762.176	38.881.456.772	19.855.856.000	13.363.653.050	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.754.919.045	35.349.620.557	54.122.619.156	25.740.369.000	32.893.233.567	
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59.561.969.736	99.405.993.613	72.047.095.943	60.221.703.000	47.011.631.000	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.357.296.605	2.343.597.559	2.566.032.119	641.855.000	80.340.000	
Belanja Aset Lainnya	0	0	0	67.730.000	97.500.000	
BELANJA TAK TERDUGA	**9.403.414.116**	**3.909.447.664**	**2.989.019.861**	**3.500.000.000**	**2.484.000.000**	**3.500.000.000**
Belanja Tak Terduga	9.403.414.116	3.909.447.664	2.989.019.861	3.500.000.000	2.484.000.000	3.500.000.000
BELANJA TRANSFER	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0	0

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Pekalongan, 2024

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan anggaran untuk pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan berasal dari pencairan dana cadangan dan SiLPA. Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada tahun 2025 di Kota Pekalongan antara lain diarahkan untuk penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian.

Rincian pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel III-13 berikut.

Tabel III-13 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2021 - 2026

URAIAN	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023 (Unaudited)	APBD 2024	RKPD 2025	Proyeksi 2026
PEMBIAYAAN	**111.045.906.136**	**105.197.663.093**	**57.355.904.236**	**50.925.000.000**	**8.550.000.000**	**12.500.000.000**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**112.545.906.136**	**115.339.443.911**	**68.808.505.766**	**53.925.000.000**	**15.000.000.000**	**20.000.000.000**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	112.542.301.590	115.326.671.183	63.120.549.575	45.200.000.000	15.000.000.000	20.000.000.000
Pencairan Dana Cadangan	0	0	5.680.000.000	8.725.000.000	0	0
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	3.604.546	12.772.728	7.956.191	0	0	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.500.000.000**	**10.141.780.818**	**11.452.601.530**	**3.000.000.000**	**6.450.000.000**	**7.500.000.000**
Pembentukan Dana Cadangan	1.000.000.000	7.141.780.818	6.664.601.530	3.000.000.000	4.000.000.000	4.500.000.000
Penyertaan Modal Daerah	500.000.000	3.000.000.000	4.788.000.000	0	2.450.000.000	3.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0

Sumber: Bappeda dan BPKAD Kota Pekalongan, 2024

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode tahun 2021-2026, maka visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah:

"Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

Visi tersebut dibangun dengan ruh perwujudan ***Tahta Untuk Rakyat*** sebagaimana falsafah pemerintahan yang dibangun oleh Sultan Hamengku Buwono IX. Dalam kerangka RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, falsafah Tahta Untuk Rakyat ini mengandung makna bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemanfaatan seluruh rakyat Kota Pekalongan.

Untuk mengetahui gambaran Visi tersebut, maka perlu diberikan gambaran pemaknaan atas uraian visi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan arah yang lebih jelas atas kondisi atau gambaran yang ingin diwujudkan pada akhir periode RPJMD.

4.1.1 Gambaran Kota Pekalongan Dalam Visi Tahun 2021-2026

Gambaran Kota Pekalongan yang telah diuraikan pada periode RPJMD Tahun 2021-2026 adalah Kota Pekalongan yang meletakkan dinamika pembangunan sosial ekonomi, dan masyarakatnya pada dua potensi unggulan, yaitu batik dan perikanan. Kondisi ini terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan geografi, demografi, ataupun lingkungan strategis lainnya.

Dalam memetakan kontribusi batik sebagai produk unggulan yang diandalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak dapat lagi hanya memandang dari satu sisi saja yaitu *brand image* yang tidak diragukan lagi oleh Daerah-daerah lain di Indonesia. Namun lebih dari itu, Kota Pekalongan juga dihadapkan pada permasalahan daya saing dengan Daerah lainnya. Disamping itu, perkembangan industri di era 4.0 ini juga harus disikapi dengan berbagai inovasi yang sifatnya dinamis dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan konsumen. Pola-pola produksi dan pemasaran harus dikolaborasikan antara pendekatan tradisional dengan pendekatan modern yang identik dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada waktu - waktu yang akan datang, industri batik juga dihadapkan pada isu-isu lingkungan hidup yang akan sangat mempengaruhi keberlanjutan industri batik itu sendiri. Sumber daya air menjadi salah satu isu penting yang saling terkait. Industri batik, merupakan salah satu industri yang cukup tinggi membutuhkan ketersediaan air bersih. Aktivitasnya sangat rentan terdorong untuk mengekploitasi sumber air yang ada di Kota Pekalongan

dalam jumlah yang cukup besar. Di sisi lain, sumber-sumber air bersih yang ada di permukaan seperti sumur dangkal dan juga sungai, seringkali menjadi tempat pembuangan limbah. Akibatnya sumber-sumber air tersebut tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, perlu langkah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mulai memberikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air ini, sehingga akan memberikan dampak positif kembali pada keberlanjutan industri batik itu sendiri.

Industri batik juga akan dihadapkan pada kondisi perubahan iklim dan penurunan lahan (*land subsidence*). Kedua fenomena alam ini telah terbukti mengganggu aktivitas produksi, khususnya pada wilayah-wilayah yang sangat terdampak seperti di sebagian wilayah Kecamatan Pekalongan Barat dan Kecamatan Pekalongan Timur, serta sebagian besar di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara. Oleh karena itu, perlu keterpaduan program, kegiatan, dan aktivitas-aktivitas pekerjaan antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyikapinya. Arah kebijakan dan strategi pembangunan harus dapat dijabarkan sampai dengan pembagian tugas atas ranah mana yang akan dikerjakan oleh Pemerintah dan mana yang akan dikerjakan oleh masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi lingkungan alam dengan segala dinamika kegiatan masyarakat yang ada di Kota Pekalongan akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Pekalongan itu sendiri.

Potensi unggulan lainnya yang dimiliki oleh Kota Pekalongan adalah perikanan. Meskipun pernah mengalami kejayaan, namun dalam kurun waktu 5 - 10 tahun terakhir memiliki kecenderungan penurunan produksi. Faktor-faktor yang menjadi kendala perlu dilakukan kajian dan analisis secara menyeluruh, baik berkaitan dengan tata kelola, kemampuan SDM, kondisi sarana dan prasarana, ataupun koordinasi dan komunikasi antar berbagai pelaku dan pengusaha perikanan.

Saat ini Kota Pekalongan akan membangun optimisme dengan mendorong terwujudnya Pelabuhan *Onshore*. Komunikasi dan koordinasi akan dilakukan secara lebih intens dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Selain itu, kesiapan fasilitas pendukung seperti jalan akses, ketersediaan pasokan air bersih, dan juga listrik akan menjadi perhatian yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Optimisme ini diharapkan akan terwujud menjelang akhir periode tahun 2025, yang artinya akan sejalan dengan perwujudan masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sejahtera.

Selain hal-hal di atas, Kota Pekalongan yang selama ini terus dihadapkan pada permasalahan banjir dan rob, diharapkan juga akan terkurangi secara bertahap dan signifikan mulai medio periode RPJMD atau sekitar tahun 2023. Hal ini sesuai dengan target penyelesaian infrastruktur pengendali banjir dan rob skala besar yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat melalui BBWS Pemali Juana, serta pentahapan peningkatan kualitas sistem drainase perkotaan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Selain itu, terdapat juga peran masyarakat untuk menjaga lingkungan dari sampah. Hal ini sangat penting, karena buruknya lingkungan atas sampah akan sangat berpengaruh bagi operasionalisasi sistem polder yang mengandalkan pompa bagi optimalnya fungsi drainase di lingkungan permukiman dan perkotaan.

Andalan lain yang nantinya diharapkan akan terwujud pada periode RPJMD Tahun 2021 - 2026 adalah pengembangan wisata yang didukung oleh operasionalisasi *Transit Oriented Development* (TOD). Dengan selesainya konstruksi Taman Wisata Laut (TWL) Pasir Kencana di akhir tahun 2021, Kota Pekalongan mempunyai wahana wisata baru yang menjadi magnet bagi wisatawan. Hal ini menjadi pendorong bagi berkembangnya industri ikutan, seperti jasa perhotelan, transportasi, dan juga kuliner.

Pemerintah Kota Pekalongan juga terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait upaya mewujudkan Pengembangan TOD yang telah masuk menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional di dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. TOD ini akan menjadi penghubung mobilitas pengunjung di titik-titik strategis daya tarik wisata Kota

Pekalongan. Dengan demikian, akan sangat mendorong penyebaran keramaian kota secara lebih merata.

Upaya - upaya dan juga gambaran masa depan sampai dengan tahun 2026 sebagaimana tersebut di atas, akan dilakukan sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar khususnya bagi masyarakat tidak mampu, mulai dari Pendidikan, Kesehatan, Pangan dan Perumahan, air bersih, ataupun juga fasilitas-fasilitas (sarana prasarana, ekonomi, dan juga budaya) yang bertujuan membangun kemandirian bagi warga masyarakat.

Kemudian dari sisi tata kelola pemerintahan, gambaran di akhir periode tahun 2026, Kota Pekalongan akan memiliki sistem pemerintahan yang efektif dan efisien yang berpegang pada prinsip *good governance and clean government*. Kualitas SDM Aparatur akan ditingkatkan, baik dari aspek teknis ataupun manajerial, guna mewujudkan ASN yang profesional. Selain itu, ASN juga akan menjadi bagian dari upaya mengajak kolaborasi stakeholder-stakeholder atau pihak-pihak yang selama ini memberikan perhatian atau berpotensi memberikan perhatian terhadap pembangunan di Kota Pekalongan. Berbagai kesepakatan atas peran serta dari para stakeholder ini ditargetkan akan terwujud guna ikut serta menyelesaikan permasalahan fisik dan juga permasalahan sosial.

Hal ini mendasari bahwa sesungguhnya penyelesaian permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Masyarakat dan Kota Pekalongan tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Pekalongan sendiri. Tetapi, harus melibatkan peran serta banyak pihak. Oleh karena itu, misi ke delapan sebagaimana terdokumentasikan dalam tahapan-tahapan kontestasi Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan berubah penempatannya, yaitu semula merupakan misi, berubah menjadi bagian dari pengertian atas visi.

Hal ini didasari atas pemikiran bahwa misi kedelapan, yaitu Mewujudkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, lembaga swasta, organisasi masyarakat, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat, pada hakikatnya merupakan ruh metode yang menjadi pengikat dan sekaligus menjiwai dalam menjalankan tujuh misi lainnya. Selanjutnya, dalam praktik perencanaan nantinya akan terwadahi dalam struktur program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

1. Lebih Sejahtera

RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 ini merupakan akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Oleh karena itu, makna sejahtera yang telah diuraikan dalam RPJPD tahun 2005-2025 menjadi penting untuk diperhatikan.

Kota Sejahtera dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata. Kota sejahtera menekankan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan, peningkatan pendapatan perkapita yang tinggi dan terus bertumbuh, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja dan berusaha, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial, peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan partisipsi pemuda dan prestasi olah raga, serta peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan. Dengan kondisi yang lebih sejahtera ini, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan sosial dasar bagi seluruh warganya, sehingga akan dapat hidup secara bermartabat.

Dengan mengacu pada definisi di atas, maka kondisi akhir periode RPJMD tahun 2026 akan diukur dari indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan

digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

2. Lebih Mandiri

Sejalan dengan pemahaman kondisi kesejahteraan dari akhir periode pentahapan pembangunan lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD diatas, maka kondisi kemandirian Kota Pekalongan juga akan diambil dari definisi yang ada dalam RPJPD Kota Pekalongan tahun 2021-2026.

Di dalam RPJPD Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 disebutkan bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya. Gambaran ini merangkum sebuah kondisi kemandirian pada segala aspek kehidupan.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka kondisi Lebih Mandiri pada akhir periode RPJMD Tahun 2026 akan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai investasi, dan Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD. Indikator-indikator ini beserta pentargetannya akan digambarkan lebih jauh dalam pembahasan tujuan yang merupakan penjabaran atas visi dan misi, sehingga akan dapat dilihat kondisi yang lebih sejahtera di akhir periode RPJMD.

3. Lebih Religius

Kondisi religius tidak menjadi gambaran akhir visi periode RPJPD Kota Pekalongan tahun 2005-2025. Namun, upaya untuk mewujudkan kehidupan yang religius ini tercermin dari Misi kesatu RPJPD yaitu Mewujudkan kondisi perikehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan yang **agamis**, berbudaya, bersih, aman, tertib dan demokratis berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dalam uraian penjabarannya disebutkan bahwa Agama menjadi landasan utama dalam semua perikehidupan, sehingga mampu menghasilkan persepsi, sikap, dan perilaku masyarakat yang bersih, termanifestasi dalam tingkat keimanan dan ketaqwaan yang tinggi. penghargaan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepatuhan terhadap nilai budaya, moral, etika, hukum, dan HAM, menjunjung tinggi eksistensi perbedaan dan kemajemukan, pengembangan keterbukaan dan demokratisasi politik lokal.

Sejalan dengan gambaran di atas, maka kondisi lebih religius dimaknai bahwa nilai-nilai keagamaan akan menjadi dasar dan corak dari seluruh tujuan kota. Selanjutnya, secara terukur kemandirian ini akan digambarkan sebagai suatu kondisi tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang berakhlaqul karimah, hidup rukun, dan berkarakter.

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai Program Perangkat Daerah terkait. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran dari suatu kegiatan, program, dan sasaran. Perumusan tujuan dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih juga menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal- hal yang perlu dilakukan

untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan 2021-2026 yaitu "***Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius***", uraian tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut:

4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, RPJMD ini merumuskan 7 (tujuh) misi yang akan menjadi pemandu tugas bersama antara Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Ketujuh misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Untuk mencapai Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, maka salah satu hal yang harus diupayakan adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kondisi masyarakat dengan derajat kesehatan yang tinggi antara lain dapat dilihat dari rendahnya angka kesakitan, menurunnya kasus penyakit menular, rendahnya kematian ibu, bayi dan balita, meningkatnya angka usia harapan hidup, dan juga meningkatnya kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan akan meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kesehatan, baik dari aspek jangkauan pelayanan, kualitas sarana dan prasarana, alat-alat kesehatan dan obat-obatan, kualitas dan ketercukupan tenaga kesehatan, ataupun kapasitas dan kualitas lembaga pelayanan kesehatan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut, tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi juga oleh swasta dan masyarakat. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Perangkat Daerah terkait, mengajak dan memberikan ruang partisipasi yang luas dengan tetap memegang prinsip dan ketentuan yang berlaku untuk dapat berperan active dalam pelayanan di bidang kesehatan.

Selain peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan, upaya mewujudkan visi Kota Pekalongan yang lebih sejahtera juga dilakukan melalui pelayanan di bidang kesejahteraan masyarakat. Upaya ini dilakukan mulai dari meningkatkan kualitas data sasaran yang terintegrasi dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sinkronisasi program dan kegiatan, baik dengan Pemerintah Pusat ataupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Pemerintah Kota Pekalongan juga akan mendorong peran swasta dan masyarakat, baik yang tergabung secara kelembagaan ataupun secara individu, untuk dapat bersama-sama menanggulangi permasalahan kesejahteraan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun sasarannya adalah Meningkatnya Indeks Keluarga sehat dan Meningkatnya Penanganan Kemiskinan.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

Saat ini hampir di semua tatanan masyarakat sedang dihadapkan pada isu perubahan yang dinamikanya semakin tinggi sebagai akibat dari pengaruh kemajuan teknologi informasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan masyarakat perlu membangun sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kompetensi dan produktivitas yang tinggi, menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keimanan

dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai cerminan SDM yang berkarakter dan religius.

Misi ini ditopang oleh institusi-institusi pendidikan baik formal maupun non formal, lembaga keagamaan baik lembaga Pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dan agama, serta pelatihan ketrampilan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta. Keberhasilan melaksanakan misi kedua ini akan memberikan dampak positif bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan, peningkatan kemandirian, serta peningkatan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan masyarakat.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten, dan produktif. Adapun sasaran misi ini adalah meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan, meningkatnya akses pendidikan, optimalnya pengarusutamaan gender, optimalnya pengarusutamaan hak anak, dan meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif.

3. Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman

Lingkungan permukiman yang diimpikan oleh hampir semua masyarakat adalah lingkungan yang sehat dan nyaman untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, beribadah, ataupun mencari nafkah dan mata pencaharian.

Kondisi ini berbeda sekali dibandingkan dengan kondisi riil yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kota Pekalongan, khususnya yang tinggal di wilayah-wilayah terdampak rob seperti sebagian Kecamatan Pekalongan Barat, hampir seluruh Kecamatan Pekalongan Utara, dan sebagian wilayan Kecamatan Pekalongan Timur. Hampir sebagian besar mengalami permasalahan rumah yang tidak layak huni serta terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pengelolaan limbah ataupun jalan dan drainase lingkungan yang memadahi.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan dan masyarakat mengemban misi ini sesuai dengan porsi kewenangan, dan kemampuan anggarannya masing-masing. Upaya ini tidak hanya dilakukan di kawasan-kawasan yang masuk area kumuh, tetapi juga pada area lain di luar area kumuh.

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman, dengan sasaran Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh.

4. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan, saat ini dihadapkan pada kondisi tanah yang terus mengalami penurunan atau *land subsidence*. Intensitas kejadian banjir dan rob akan semakin sering terjadi jika tidak dilakukan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, misi ini bertujuan untuk menurunkan luas genangan banjir dan rob melalui sinergi sumber daya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, dan juga masyarakat. Pembangunan - pembangunan pengendali banjir dan rob berskala besar yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, harus dibarengi dengan penataan sistem drainase kota dan kebijakan untuk menahan laju penurunan tanah oleh Pemerintah Kota Pekalongan, serta perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Adapun sasarannya yaitu optimalnya penanganan banjir dan rob.

Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran meliputi: menurunnya tingkat pencemaran air, optimalnya kualitas lahan, dan terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang. Kemudian terkait dengan infrastruktur dasar perkotaan yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah, maka misi ini membawa juga tujuan untuk menjamin

ketersediaan infrastruktur dasar, dengan sasaran meliputi: optimalnya layanan air minum, optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan, dan meningkatnya layanan transportasi perkotaan.

5. Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

Kota Pekalongan adalah kota pertama di Indonesia yang masuk jejaring kota kreatif dunia UNESCO. Selain itu, sekarang ini juga menjadi anggota jejaring kota kreatif di tingkat nasional. Sejalan dengan hal tersebut, aktivitas perekonomian yang masuk sektor-sektor ekonomi kreatif juga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan. Oleh karena itu, misi ini meletakkan konsep pondasinya pada potensi lokal dalam menumbuhkan ekonomi kreatif Kota Pekalongan. Dalam kondisi ideal, diharapkan akan mampu menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat yang dapat dilihat dari PDRB perkapitanya. Adapun sasaran misi ini adalah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari berbagai upaya seperti peningkatan investasi, pengembangan industri, peningkatan nilai ekspor perdagangan, peningkatan nilai modal usaha UMKM yang bersumber dari koperasi, peningkatan nilai produksi perikanan, dan juga pembangunan bidang pariwisata.

6. Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah

Kota Pekalongan terkenal dengan nuansa religiusnya dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Di Kota Pekalongan terdapat adat dan tradisi lainnya seperti Sya'banan (khol/ruwah), Syawalan, sedekah bumi, dan sedekah laut. Sya'banan (khol) adalah upacara keagamaan / kebudayaan yang diselenggarakan setiap tanggal 14 sya'ban (ruwah) setahun sekali di selenggarakan di Makam Sapuro. Syawalan adalah upacara adat bagi umat Islam yang diselenggarakan di Kelurahan Krapyak dengan pemotongan lopis raksasa. Tradisi sedekah laut (nyadran), yaitu upacara melarung sesaji berupa kepala kerbau dan jajan pasar lengkap serta tabur bunga yang dilaksanakan setiap bulan Syuro (Muharam). Tradisi Pek-Chun yang hampir sama dengan tradisi sedekah laut, tradisi ini diselenggarakan oleh warga Tionghoa menurut kalender China pada perayaan tahun baru China atau Imlek.

Kota Pekalongan juga memiliki jenis kesenian yang beragam, antara lain Simtudh Duror dan Samproh, yaitu seni musik bernafaskan islam biasanya menyanyikan puji-pujian, shalawat dan lagu-lagu Islami. Jenis kesenian lainnya adalah Marawis, yaitu jenis "band tepuk" dengan perkusi sebagai alat musik utamanya. Orkes Gambus dengan alat musik petik seperti mandolin yang berasal dari Timur Tengah.

Dengan melihat keragaman budaya dan kearifan lokal di atas, maka Pemerintah bersama Masyarakat Kota Pekalongan mengemban misi untuk melestarikan budaya dan kearifan lokal tersebut. Dalam praktiknya misi ini akan mewujud melalui upaya mendorong peningkatan intensitas *event* budaya yang diselenggarakan, baik oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat.

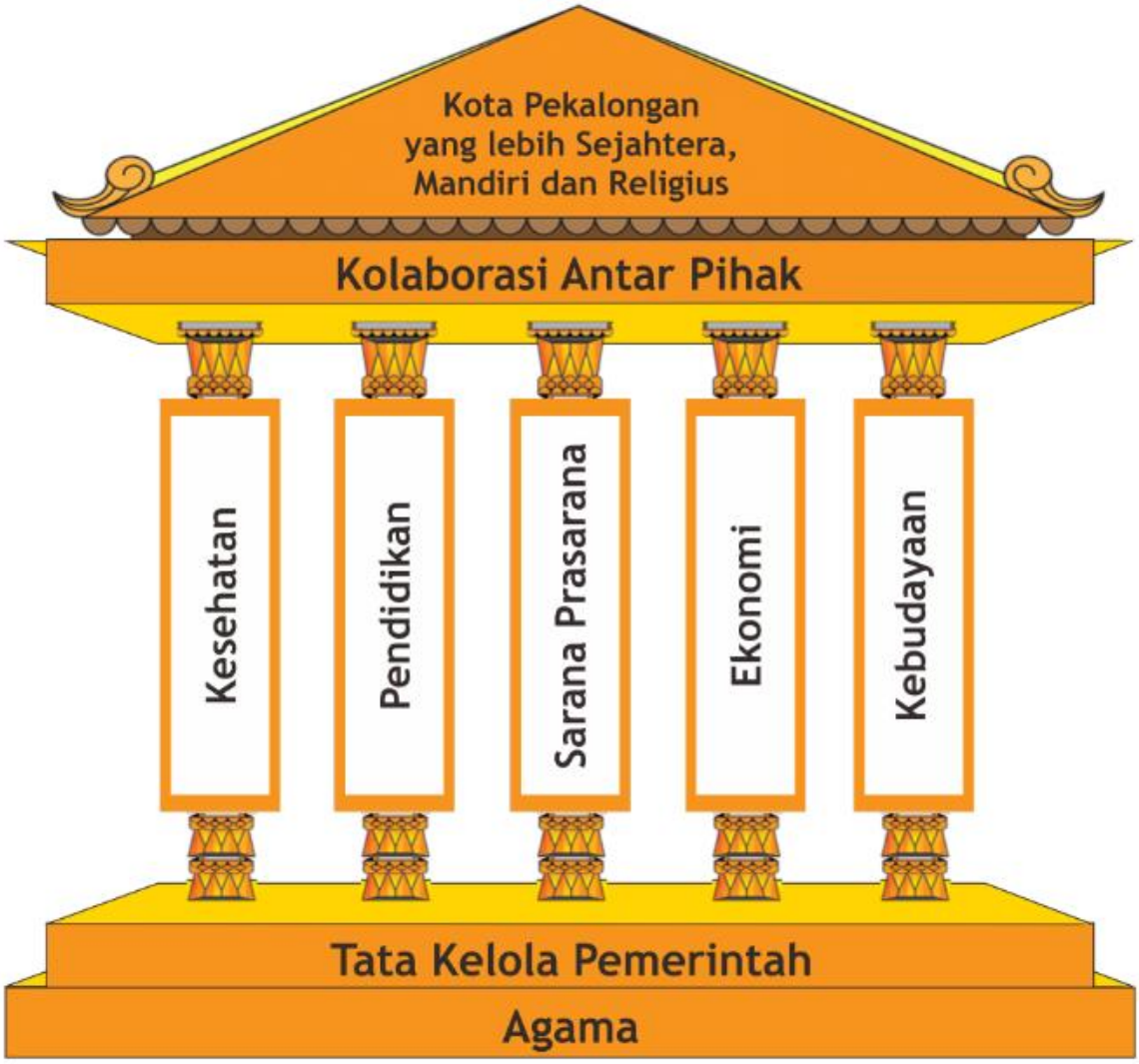
Kemudian untuk misi mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah nantinya akan diimplementasikan guna untuk mencapai tujuan berupa mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan. Adapun sasarannya adalah manajemen atau pengelolaan potensi-potensi konflik sosial yang ada di masyarakat.

7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

Misi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga akan berdampak pada peningkatan indeks reformasi birokrasi yang kemudian dapat diandalkan secara prima dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini dapat akan dapat dilihat dari optimalnya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, meningkatnya kualitas layanan publik, meningkatnya kualitas manajemen ASN,

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan, meningkatnya akuntabilitas keuangan, dan meningkatnya kualitas pengawasan.

Sebagai gambaran atas uraian visi dan misi selanjutnya dapat dilihat dalam ilustrasi berikut.



Gambar IV-1 Ilustrasi Visi dan Misi

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.1.3 Tujuan Dan Sasaran

4.1.3.1 Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

TUJUAN

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

SASARAN

a. Meningkatnya indeks keluarga sehat
b. Meningkatnya penanganan kemiskinan

4.1.3.2 Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan

TUJUAN

a. Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompetitif dan produktif

SASARAN

a. Meningkatnya akses pendidikan
b. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan
c. Optimalnya pengarusutamaan gender
d. Optimalnya pengarusutamaan hak anak
e. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif

4.1.3.3 Misi 3: Mewujudkan Lingkungan Permukiman yang Nyaman

TUJUAN

a. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman

SASARAN

a. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh

4.1.3.4 Misi 4: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

TUJUAN

a. Menurunkan luas genangan banjir dan rob
b. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
c. Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar

SASARAN

a. Optimalnya penanganan banjir dan rob
b. Menurunnya tingkat pencemaran air
c. Optimalnya kualitas lahan
d. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang
e. Optimalnya layanan air minum
f. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan
g. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan

4.1.3.5 Misi 5: Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal

TUJUAN

a. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat

SASARAN

a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi

4.1.3.6 Misi 6: Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah

TUJUAN

a. Melestarikan Seni Budaya

b. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan

SASARAN

a. Meningkatnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan
b. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial

4.1.3.7 Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*

TUJUAN

a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

SASARAN

a. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)
b. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)
c. Meningkatnya kualitas manajemen ASN
d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
e. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan
f. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Penjabaran visi misi Wali Kota Pekalongan, tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan di atas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMN tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Tabel IV-1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target dalam Pencapaian Misi
RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021- 2026
Visi: "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat												
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup			Tahun	74,38	74,43	74,47	74,52	74,57	74,62	74,66	74,66
		1. Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,17	0,22	0,25	0,30	0,35	0,40	0,50	0,50
			Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	152,41	140,34	128,28	116,21	104,14	92,08	80,01	80,01
			Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	8,81	8,51	8,21	7,91	7,60	7,30	7,00	7,00
			Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	10,84	10,53	10,23	9,92	9,61	9,31	9,00	9,00
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan			persen	7,17	6,94	6,71	6,50	6,29	6,09	5,89	5,89
		2. Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	n/a	1,00	1,00	2,00	2,50	3,00	3,00	11,89
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan												
1. Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia			indeks	74,98	75,10	75,32	75,52	75,71	75,88	76,03	76,03
		1. Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	8,96	9,11	9,27	9,43	9,59	9,75	9,92	9,92
		2. Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3. Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	58,29	58,43	58,78	59,14	59,59	60,28	61,00	61,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		4. Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya
	Tingkat Pengangguran Terbuka			persen	7,02	6,84	6,66	6,48	6,31	6,15	5,99	5,99
		1. Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	66,45	70,01	70,28	70,54	70,81	71,08	71,34	71,34
Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman												
1. Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen			persen	55,56	55,56	62,96	74,07	77,78	88,89	100,00	100,00
		1. Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	89,26 (SK Baru)	89,26	90,96	93,72	96,24	98,44	100,00	100,00
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan												
1. Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas genangan Banjir dan Rob			persen	37,27	33,11	26,50	22,12	19,58	17,02	12,17	12,17
		1. Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	1730,00	1537,00	1230,00	1027,00	909,00	790,00	565,00	565,00
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			indeks	50,84	50,85	50,86	50,87	50,88	50,89	50,90	50,90
		1. Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	indeks	35,33	35,34	35,35	35,36	35,37	35,38	35,39	35,39
		2. Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas Lahan	indeks	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60	23,61	23,61	23,61
		3. Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	4,00	4,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar			persen	88,11	88,44	88,77	89,11	90,37	90,71	91,04	91,04

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
3. Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar		1. Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2. Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	persen	67,12	68,12	69,12	70,12	71,12	72,12	73,12	73,12
		3. Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	kategori	B	B	B	B	B	B	B	B
			Persentase keterhubungan jalan	persen	97,20	97,20	97,20	97,20	100,00	100,00	100,00	100,00
Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal												
1. Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita			Rp. Juta/jiwa/ tahun	35,22	35,47 - 35,51	35,97 - 36,21	36,56 - 36,92	37,16 - 37,82	39,21	40,65	40,65
		1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	persen	-1,87	1,86 - 1,97	2,28 - 2,84	2,48 - 2,83	2,53 - 3,32	4,55	4,55	4,55
Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah												
1. Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan			persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		1. Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	68,89	86,67	88,89	91,11	93,33	97,78	100,00	100,00
2. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial			kasus	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1. Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government												
	Indeks Reformasi Birokrasi			indeks	n/a	70,69	71,69	72,69	73,69	74,69	75,69	75,69

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	Target						Kinerja Akhir Periode RPJMD
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien		1. Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)	Indeks SPBE	indeks	3,19	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,25
		2. Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)	IKM Kota	persen	83,19	83,34	83,49	83,64	83,79	83,94	84,09	84,09
			Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	91,00	93,00	95,00	96,00	97,00	97,20	97,50	97,50
		3. Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	indeks	200,00	215,00	225,00	240,00	250,00	255,00	260,00	260,00
		4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	skor	73,07	73,57	74,07	74,57	75,07	75,57	76,07	76,07
		5. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Maturitas SPIP	nilai	3,02	3,10	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,00
			Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	8,00

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2024

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterhubungan kebijakan daerah dan perangkat daerah sasaran dipisahkan menjadi sasaran yang terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan sasaran yang tidak secara langsung terkait dengan pencapaian visi dan misi Wali Kota tetapi secara langsung mencapai prioritas perangkat daerahnya tersebut. Selanjutnya sasaran secara spesifik pembangunan daerah terangkai menjadi sebagai arsitektur kinerja '*impac*t' yang saling terhubung. Dengan demikian, indikator tujuan pembangunan merupakan representasi langsung keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada akhir periode Wali Kota Pekalongan pada tahun 2026. Berikut ini disajikan Tabel IV-2 keterkaitan kinerja daerah dan perangkat daerah Kota Pekalongan.

Tabel IV-2 Keterkaitan Indikator Daerah dan Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat					
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	1. Indeks Keluarga Sehat 2. AKI 3. AKB 4. AKABA	Persentase capaian SPM Kesehatan	Kesehatan
				Skor PPH konsumsi	Pangan
				Total Fertility Rate	Keluarga Berencana
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Persentase Penurunan Warga Miskin	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sosial
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan					
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya akses pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan
		Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
		Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	Pendidikan
				Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Perpustakaan
		Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Kategori Kota Layak Anak	Skor Kota Layak Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Tenaga Kerja
Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman					
Meningkatkan perumahan dan	Persentase kelurahan dengan	Meningkatnya kawasan perumahan dan	Persentase kawasan perumahan dan	Persentase jumlah rumah layak huni	Perumahan dan Kawasan Permukiman

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
permukiman yang nyaman	kawasan kumuh kurang dari 10 persen	permukiman yang tidak kumuh	permukiman yang tidak kumuh	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan					
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Luas Genangan Banjir dan Rob	Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	Indeks Kualitas Air	Persentase tingkat pencemaran air	Lingkungan Hidup
		Optimalnya kualitas lahan	Indeks Kualitas lahan	Persentase Kenaikan Luasan RTH	Lingkungan Hidup
		Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	Persentase kesesuaian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Pertanahan
Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	Optimalnya layanan air minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	Persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Persentase pelayanan sampah	Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Lingkungan Hidup
				Pengembangan Sarana Persampahan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Perhubungan
			Persentase keterhubungan jalan	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal					
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Penanaman Modal
				Pertumbuhan Industri	Perindustrian
				Nilai ekspor perdagangan	Perdagangan
				Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Koperasi-UKM
				Nilai produksi tanaman pangan, holtikultura dan peternakan	Pertanian

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
				Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota (IKK *Outcome*)	Kelautan dan Perikanan
				Tingkat Kunjungan Wisata	Pariwisata
Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah					
Melestarikan Seni Budaya	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	Persentase peningkatan kelompok budaya	Kebudayaan
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Jumlah konflik sosial	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	Kesbangpol
				Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	Kesbangpol
				Tingkat ketenteraman dan ketertiban umum	Trantibum
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government					
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Indeks SPBE	Indeks domain tata kelola SPBE	Komunikasi dan Informatika
				Persentase ketersediaan data statistik sektoral	Statistik
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Persandian
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	IKM Kota	Nilai indeks kepuasan masyarakat OPD	Semua Urusan
		Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Indeks Merit System	Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Kepegawaian
				Indeks Profesionalitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Penelitian dan Pengembangan
				Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Perencanaan
				Persentase capaian kinerja pembangunan	Sekretariat Daerah

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TUJUAN/ IKU RENSTRA	Urusan
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	Keuangan
				Rasio PAD	Keuangan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Maturitas SPIP	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	Pengawasan
		Meningkatnya kualitas pengawasan	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	Pengawasan

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2023

Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan diatas, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD sebagaimana disajikan dalam Tabel IV-3 berikut.

Tabel IV-3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

Visi: "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat		
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Peningkatan kualitas keluarga sehat
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan melalui program penanggulangan kemiskinan bagi warga miskin dan mencegah munculnya miskin kembali bagi warga rentan dan hampir miskin
Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Kompeten dan Produktif Guna Menjawab Tantangan Era Perubahan		
Meningkatkan Kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif	Meningkatnya akses pendidikan	Peningkatan akses pendidikan serta penyelenggaran pendidikan karakter keagamaan
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	
	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Peningkatan kompetensi pencari kerja dan perluasan kesempatan kerja
	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak melalui optimalisasi pelaksanaan rencana aksi daerah yang didukung dengan peran serta stakeholder terkait
	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	
Misi 3: Mewujudkan Lingkungan Pemukiman yang Nyaman		
Meningkatkan perumahan dan permukiman yang nyaman	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Penurunan luas kawasan kumuh melalui peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualtas jalan lingkungan
Misi 4: Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan		
Menurunkan Luas Genangan Banjir dan Rob	Optimalnya penanganan banjir dan rob	Penurunan luas genangan banjir/rob melalui penataan sistem drainase, pemanfaatan ruang dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya tingkat pencemaran air	
	Optimalnya kualitas lahan	

MISI / TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	Terwujudnya rumusan dan pelasanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	
Menjamin Ketersediaan infrastruktur dasar	optimalnya layanan air minum	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan
	optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	
	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	
Misi 5: Membangun Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal		
Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Peningkatan daya tarik pariwisata dan daya saing ekonomi serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Misi 6: Melestarikan Budaya, Kearifan Lokal serta Mengembangkan Tata Kehidupan yang Berakhlaqul Karimah		
Melestarikan Seni Budaya	Meningkatnya intensitas *event* budaya yang diselenggarakan	Pelestarian budaya lokal melalui peningkatan *event* budaya dengan pemberdayaan berbasis komunitas
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai kerukunan	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Pengendalian potensi konflik sosial melalui upaya preventif dengan pendekatan kepada tokoh agama dan toko masyarakat serta penyelesaian jalur non litigasi
Misi 7: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government		
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Smart Governance)	Implementasi reformasi birokrasi dan pelayanan publik melalui optimalisasi pencapaian target pada 8 (delapan) area perubahan
	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (Smart Governance)	
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2025 disusun dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2025, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan tahun 2025 juga disusun dengan mengacu pada strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025, sebagai bentuk sinergi dan keterpaduan antara kebijakan Provinsi dan Daerah.

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 bertemakan **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 berpedoman pada RPD Tahun 2024-2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Berdasarkan RPD Jawa Tengah Tahun 2024-2026, tema pembangunan daerah adalah "**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Merata, didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas"**. Adapun tema pembangunan tahun 2025 sesuai Rancangan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 adalah "**Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Didukung dengan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Lebih Berkarakter**" dengan prioritas dan fokus sebagai berikut:

1. PD 1: a. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:
   a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
   b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;
   c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan tim pengendali inflasi daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;

d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, mutu pendidikan vokasi melalui peningkatan sarana praktek pembelajaran sesuai standar dunia usaha dan dunia industri (DUDI), kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai DUDI; pemberdayaan angkatan kerja; penempatan tenaga kerja; dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.

2. PD 2: Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata, dengan fokus pada upaya:
   a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata peningkatan kualitas pembelajaran berbasis softskill dan IT secara adaptif dan inklusif, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, penguatan pendidikan karakter menekankan pada nilai kearifan lokal, budaya literasi, budaya hidup sehat dan bugar, etos kerja, anti perundungan, diskriminasi, kesadaran mengenai kesehatan mental, serta peduli lingkungan dan tanggap bencana; Pemenuhan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang didukung pemanfaatan teknologi informasi; serta Perluasan implementasi strategi penanganan ATS di wilayah kemiskinan ekstrem berbasis pendataan dan kerjasama multipihak;
   b. Meningkatkan pelayanan Kesehatan sesuai standart melalui peningkatan kompetensi SDM, pengembangan inovasi dan digitalisasi serta kecerdasan buatan; Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan melalui kampanye perubahan perilaku, KIE (Komunikasi Informasi Edukasi); Peningkatan kapasitas SDMK melalui pelatihan/seminar/ workshop/ magang / yang lainnya yang mendukung program prioritas; Peningkatan cakupan layanan deteksi dini dan pengembangan Surveilans berbasis laboratorium; Penguatan kluster kesehatan dalam penanggulangan dampak krisis kesehatan dan penanganan gizi saat bencana; Peningkatan dukungan kab/kota dalam penyediaan layanan program prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; Revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; Pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas.
   c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk hidup bugar, meningkatkan penyediaan sarpras olahraga memadai dan terjangkau, pembinaan dan pelatihan atlet.
   d. Peningkatan kualitas prasarana sarana literasi dan kapasitas SDM;
   e. Peningkatan kepemimpinan, kepeloporan, dan pemberdayaan pemuda;
   f. Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui peningkatan perlindungan dan pengembangan warisan budaya termasuk implementasi nilai agama, serta peningkatan literasi dan ekspresi budaya dalam berbagai platform termasuk platform digital;
   g. Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
   h. Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) perlindungan perempuan dan anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan kabupaten/kota layak anak (KLA), serta

peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

3. PD 3: Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan, dengan fokus pada upaya:
   a. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, IPLT Regional, TPS 3R, IPAL Komunal), peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
   b. Meningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai kewenangan provinsi, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
   c. Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah serta pembangunan prasarana sarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
   d. Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di provinsi dan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/early warning system (EWS), pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi.
4. PD 4: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif, dengan fokus pada upaya:
   a. Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
   b. Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui peningkatan peran masyarakat melalui co-creator.

Arah kebijakan dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2025 merupakan strategi dalam upaya pencapaian target kinerja sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. PDRB per Kapita sebesar 48,53-48,66 juta rupiah;
2. Angka kemiskinan sebesar 9,66 - 9,00 persen;
3. Rasio Gini sebesar 0,362;
4. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,90-5,60 persen;
5. Inflasi sebesar 2,5 ± 1 persen;
6. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,81-4,42 persen;
7. Nilai Tukar Petani sebesar 107,52 persen;
8. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,99;
9. Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 59,92;
10. Indeks Pembangunan Gender sebesar 93,13;
11. Indeks Pembangunan Keluarga sebesar 58,50;
12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,68;
13. Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana sebesar 4,00 persen; dan
14. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 82,00.

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan

Berpedoman pada RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, maka tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 ditujukan untuk "***Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Dengan Dipayungi Nilai-Nilai Religiusitas***", dengan prioritas dan fokus pembangunan meliputi:

1. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dengan fokus pada:
    a. Mendorong upaya percepatan penurunan stunting melalui 8 (delapan) aksi konvergensi;
    b. Optimalisasi layanan dan fasilitas kesehatan serta peran masyarakat dalam rangka menurunkan AKABA, AKB, AKI, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular;
    c. Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, termasuk mendorong sinergitas RS swasta.
2. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan fokus pada:
    a. Pengendalian inflasi daerah melalui optimalisasi peran TPID;
    b. Penguatan dan optimalisasi peran TKPK dalam rangka mendorong kerja sama multi-sektoral;
    c. Peningkatan upaya kolaborasi konstruktif dengan masyarakat;
    d. Penguatan pemanfaatan data kemiskinan sebagai dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan, dengan fokus pada:
    a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang disertai peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan secara berkelanjutan;

b. Perluasan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan/atau pendidikan inklusi;
c. Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan;
d. Pemenuhan Wajar 13 tahun terutama pada 1 tahun usia pra sekolah dan pendidikan kesetaraan.

4. Peningkatan *link and match* ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing, dengan fokus pada:
   a. Integrasi dan perluasan pelatihan, sertifikasi, penempatan tenaga kerja terpadu dalam rangka mengurangi kesenjangan pasar kerja serta menangkap peluang perkembangan di Kawasan Petanglong dan sekitarnya;
   b. Pelatihan kerja secara inklusif dan berperspektif gender.
5. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus, dengan fokus pada:
   a. Mendorong keterlibatan dan kontribusi perempuan, baik secara individu maupun melalui kelompok/organisasi dalam memainkan peranan aktif di kehidupan ekonomi dan politik;
   b. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
6. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka menuju kesejahteraan dan kemandirian.
7. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan fokus pada:
   a. Optimalisasi sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, LSM dan masyarakat dalam penanganan banjir/rob;
   b. Mendorong pelaku usaha yang menghasilkan limbah untuk melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan;
   c. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau dan pemanfaatan ruang kota secara berkelanjutan.
8. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada:
   a. Perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta mendorong optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum;
   b. Mendorong peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan dari sumbernya dan optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R;
   c. Peningkatan akses jalan dalam rangka mengurangi kemacetan.
9. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan fokus pada:
   a. Mendorong kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan pengembangan pariwisata dan mensukseskan pembangunan pariwisata;
   b. Peningkatan sarana prasarana pendukung pariwisata dalam rangka penguatan ekonomi lokal;

c. Penguatan sub sektor perdagangan dan jasa sebagai kelanjutan dari dampak positif pembangunan Pasar Banjar Sari;
d. Penguatan ekonomi kreatif berbasis pada industri batik dengan seluruh rantai nilainya.

10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal, dengan fokus pada mendorong SDM budaya untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengayaan penyelenggaraan event budaya.
11. Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam mewujudkan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada peningkatan pelibatan stakeholder dan kesadaran masyarakat berwawasan kebangsaan dengan pondasi agama.
12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi *reward and punishment*, dengan fokus pada:
    a. Peningkatan pelayanan publik melalui optimalisasi penerapan SPBE, penguatan keterbukaan informasi publik, sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan perluasan digitalisasi daerah dan profesionalisme ASN;
    b. Mendorong optimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas menuju WBK/WBBM.

Memperhatikan kondisi global, nasional, tantangan dan upaya pemulihan ekonomi, target indikator makro pada tahun 2025 sesuai RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,44 - 6,00 persen;
b) Laju inflasi sebesar 3 ± 1 persen;
c) Tingkat kemiskinan sebesar 6,70 - 6,23 persen;
d) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,39;
e) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,05 - 4,47 persen.

Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan tahun 2025. Keterkaitan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam Tabel IV-4 berikut.

Tabel IV-4 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis Dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2025	
Kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan	Tata kelola pemerintahan	12	Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi *reward and punishment*
Belum optimalnya sistem pengendalian intern pemerintah			
Masih luasnya genangan banjir dan rob serta tingginya pencemaran lingkungan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup	Penanganan Banjir dan Rob serta Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	7	Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
Masih adanya kawasan perumahan dan permukiman kumuh dan tingginya potensi terjadinya kawasan perumahan dan permukiman kumuh	Peningkatan Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Infrastruktur Lingkungan Permukiman	6	Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2025	
Belum opimalnya pengendalian pemanfaatan ruang		8	Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Belum optimalnya layanan infrastruktur perkotaan			
Masih rendahnya capaian Indeks Keluarga Sehat dan masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA)	Peningkatan Derajat Kesehatan	1	Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
Masih tingginya penduduk miskin berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran	2	Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan
Masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja serta belum optimalnya pemerataan kesempatan kerja		4	Peningkatan *link and match* ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing
Belum optimalnya mutu dan akses pendidikan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	3	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan
Belum optimalnya penerapan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan pada satuan pendidikan			
Masih rendahnya Pengarusutamaan Gender (PUG)		5	Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus
Belum optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)			
Belum optimalnya kontribusi potensi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dan Peningkatan Daya Saing Ekonomi serta Pertumbuhan Sektor-Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Lokal	9	Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Tahun 2025	
Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan seni dan budaya	Pelestarian Budaya Lokal	10	Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal
Masih adanya konflik sosial	Kondusivitas Wilayah	11	Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2023

Berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2025, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2025 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah sebagaimana disajikan dalam Tabel IV-5 berikut.

Tabel IV-5 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
1. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dengan fokus pada:				
a. Mendorong upaya percepatan penurunan stunting melalui 8 (delapan) aksi konvergensi; b. Optimalisasi layanan dan fasilitas kesehatan serta peran masyarakat dalam rangka menurunkan AKABA, AKB, AKI, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular; c. Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, termasuk mendorong sinergitas RS swasta.	1. AKABA (Angka Kematian Balita)	1. 9,31 per 1.000 KH	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
	2. AKB (Angka Kematian Bayi)	2. 7,30 per 1.000 KH	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	3. AKI (Angka Kematian Ibu)	3. 92,08 per 100.000 KH	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
	4. Indeks Keluarga Sehat	4. 0,40	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Pengendalian Penduduk	Dinsos P2KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
2. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan fokus pada:				
a. Pengendalian inflasi daerah melalui optimalisasi peran TPID; b. Penguatan dan optimalisasi peran TKPK dalam rangka mendorong kerja sama multi-sektoral; c. Peningkatan upaya kolaborasi konstruktif dengan masyarakat; d. Penguatan pemanfaatan data kemiskinan sebagai dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	3,00 persen	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
			Program Pemberdayaan Sosial	
			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan, dengan fokus pada:				

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang disertai peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan secara berkelanjutan; b. Perluasan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan /atau pendidikan inklusi; c. Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan.	1. Rata-Rata Lama Sekolah	9,75 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinarpus
	2. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100,00 persen	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik
4. Peningkatan *link and match* ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing, dengan fokus pada:				
a. Integrasi dan perluasan pelatihan, sertifikasi, penempatan tenaga kerja terpadu dalam rangka mengurangi kesenjangan pasar kerja serta menangkap peluang perkembangan di Kawasan Petanglong dan sekitarnya; b. Pelatihan kerja secara inklusif dan berperspektif gender.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,49 persen	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	
5. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi, terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus, dengan fokus pada:				
a. Mendorong keterlibatan dan kontribusi perempuan, baik secara individu maupun melalui kelompok/organisasi dalam memainkan peranan aktif di kehidupan ekonomi dan politik;	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,31	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
			Program Perlindungan Perempuan	
b. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.	2. Kategori Kota Layak Anak	Nindya	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPMPPA
			Program Perlindungan Khusus Anak	
6. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada:				
		98,44 persen	Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
			Program Kawasan Permukiman	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka menuju kesejahteraan dan kemandirian.	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
7. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan fokus pada:				
a. Optimalisasi sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, LSM dan masyarakat dalam penanganan banjir/rob; b. Mendorong pelaku usaha yang menghasilkan limbah untuk melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan; c. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau dan pemanfaatan ruang kota secara berkelanjutan.	1. Luas Genangan Banjir dan Rob	790,00 Ha	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	2. Indeks Kualitas Air	59,42	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
	3. Indeks Kualitas Lahan	37,65	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH
	4. Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	7 regulasi	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
			Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
			Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
8. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada:				
a. Perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta mendorong optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum;	1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	100,00 persen	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
	2. Persentase pelayanan sampah	72,12 persen	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
b. Mendorong peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan dari sumbernya dan optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R; c. Peningkatan akses jalan dalam rangka mengurangi kemacetan.	3. Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
	4. Persentase keterhubungan jalan	100 persen	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
9. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan fokus pada:				
a. Mendorong kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan pengembangan pariwisata dan mensukseskan pembangunan pariwisata; b. Peningkatan sarana prasarana pendukung pariwisata dalam rangka penguatan ekonomi lokal; c. Penguatan sub sektor perdagangan dan jasa sebagai kelanjutan dari dampak positif pembangunan Pasar Banjar Sari; d. Penguatan ekonomi kreatif berbasis pada industri batik dengan seluruh rantai nilainya.	Pertumbuhan ekonomi	5,44 - 6,0 persen	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
			Program Pengembangan UMKM	

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinperpa
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal, dengan fokus pada:				
Mendorong SDM budaya untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengayaan penyelenggaraan event budaya.	Persentase Penyelenggaraan *Event* Budaya	122,00 persen	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Program Pembinaan Sejarah	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Program Pengelolaan Permuseuman	
11. Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam mewujudkan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada:				
	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100,00 persen	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
Peningkatan pelibatan stakeholder dan kesadaran masyarakat berwawasan kebangsaan dengan pondasi agama.			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi *reward and punishment*, dengan fokus pada:				
a. Peningkatan pelayanan publik melalui optimalisasi penerapan SPBE, penguatan keterbukaan informasi publik, sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan perluasan digitalisasi daerah dan profesionalisme ASN; b. Mendorong optimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas menuju WBK/WBBM.	1. Indeks SPBE	3,34	Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
	2. IKM Kota	90,70 Persen	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
			Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
			Program Pencatatan Sipil	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Program Peningkatan Kerja Sama Desa	DPMPPA

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DLH
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelematan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	3. Nilai KIP Tingkat Kota	97,20 Skor	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
	4. Nilai SAKIP Kota	75,57 Skor	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
			Program Perekonomian dan Pembangunan	
	5. Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	6. Indeks Merit System	340,00	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	7. Maturitas SPIP	3,80	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
	8. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	7,00	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.2.4 Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Nasional

Dukungan prioritas pembangunan Kota Pekalongan terhadap prioritas pembangunan nasional dilakukan melalui penyelarasan sebagaimana disajikan pada sub bab 1.3.3. Selanjutnya, dukungan tersebut dijabarkan lebih detil melalui program-program yang mendukung prioritas nasional sebagaimana disajikan pada Tabel IV-6 berikut.

Tabel IV-6 Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
01. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100 persen	1,946,743,000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16 lembaga	1,052,090,000	Kesbangpol
				Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 01	**2,998,833,000**	
02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100 persen	220,900,000	Kesbangpol
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 persen	97,837,000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100 persen	288,930,000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	85 persen	4,968,603,000	Satpol P3KP
				Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 02	**5,576,270,000**	
03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	100 persen	1,352,512,000	Dinperkim
		Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	121,39 hektar	24,022,630,000	Dinperkim
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	2075,41 hektar	10,730,514,000	Dinperkim
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)	63,04 persen	12,049,520,000	Dinperkim
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	50 persen	6,540,000	Dinperkim

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee			
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	12,27 persen	2,549,260,000	DPU-PR
	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	100 persen	8,455,948,000	DPU-PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	70,48 persen	4,755,600,000	DPU-PR
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	45,97 persen	1,167,896,000	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	1,640,000	DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,939 persen	3,635,404,500	DLH
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen	438,000,000	Dinperkim
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,44 persen	1,305,880,000	DPU-PR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	18,53 persen	108,640,000	DPU-PR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100 persen	301,404,000	DPU-PR
	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	0,3 persen	11,688,874,000	DLH
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	80 persen	5,092,114,000	DPU-PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	90,90 persen	2,692,452,000	DPU-PR
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 persen	5,747,810,000	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	100 persen		

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
	yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah		Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	0,74 persen		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	85,48 persen	16,084,720,000	DPU-PR
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 03					**112,187,358,500**	
04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	90 persen	53,973,800,000	Dinas Kesehatan
			Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92 persen		Dinas Kesehatan
			Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	100 persen		Dinas Kesehatan
			Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	100 persen		Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	95 persen	758,562,000	Dinas Kesehatan
			Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100 persen		
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	97 persen	120,784,000	Dinas Kesehatan
			Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	100 persen		Dinas Kesehatan
			Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100 persen		Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	94 persen	1,611,130,000	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	4,70 persen	296,439,000	Dinperpa

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100 persen	35,881,000	Dinperpa
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	86,4 persen	27,450,000	Dinperpa
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen	247,600,000	Dinsos P2KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	12 persen	1,859,294,000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Unmeet need KB	13 persen	1,955,520,000	Dinsos P2KB
	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	100 persen	56,788,452,000	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100 persen	15,485,800,000	Dinas Pendidikan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	25,00 persen	741,097,000	Dinarpus
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100 persen	83,800,000	Dinas Pendidikan
	05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	9,24 persen	150,940,000	DPMPPA
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	15,01 persen	78,062,000	DPMPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	48,15 persen	215,615,000	DPMPPA
		Program Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100 persen	69,644,000	DPMPPA
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 04					**134,499,870,000**	

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	51,180,000	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	28,930,000	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3025 dokumen	739,790,000	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	7,09 milyar	638,003,000	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	98,368,000	DPMPTSP
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen	389,560,000	Dinperinaker
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25 persen	7,470,000	Dinperinaker
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100 persen	33,940,000	Dinperinaker
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 persen	8,682,729,000	Dindagkop UKM
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	100 persen	102,960,000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,99 persen	98,970,000	Dindagkop UKM
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP)	81,99 persen	279,022,000	Dindagkop UKM

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
			bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)			
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	6,42 persen	969,080,000	Dindagkop UKM
		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,93 persen	6,330,000	Dindagkop UKM
		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	32,36 persen	47,180,000	Dindagkop UKM
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	10,48 persen	14,600,000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,27 persen	323,520,000	Dindagkop UKM
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1 persen	2,227,388,000	DKP
			Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1 persen		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3 persen	181,988,000	DKP
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2 pelaku usaha	421,938,000	DKP
			Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12, 20 persen		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	12 persen	3,292,957,000	Dinparbudpora
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	41,98 persen	678,342,000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	51,28 persen	165,000,000	Dinparbudpora

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	80 persen	712,500,000	Dinparbudpora
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	55,78 miliar rupiah	1,421,483,000	Dinperpa
			Nilai produksi peternakan pertahun	199,66 miliar rupiah		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100 persen	16,466,000	Dinperpa
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5 persen	305,194,000	Dinperpa
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100 persen	13,300,000	Dinperpa
		Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	100 persen	24,927,000	Dinperpa
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5 persen	35,707,000	Dinperpa
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 05					**22,008,822,000**	
06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	704,500,000	Dinsos P2KB
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen	191,020,000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	386,432,000	Dinsos P2KB
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	1,720,232,000	Dinsos P2KB

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	53,73 persen	1,328,740,000	Dinsos P2KB
	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,15 persen	3,355,717,000	Dinperinaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	27,93 persen	350,444,000	Dinperinaker
		Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	52,00 persen	376,100,000	Dinperinaker
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 06					**8,413,185,000**	
07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,20 persen	2,318,428,000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100 persen	86,960,000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	3,74 persen	105,050,000	Dinkominfo
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100 persen	1,481,640,000	BPBD
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	100 persen	328,042,600	Dinarpus
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	80 persen		
		Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100 persen	149,153,800	Dinarpus

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	88,10 persen	313,670,000	Dindukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,85 persen	341,730,000	Dindukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	12 OPD	71,790,000	Dindukcapil
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100 persen	27,207,112,000	Sekretariat DPRD
			Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100 persen		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,81 persen	1,081,970,000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	40 persen	5,477,660,000	Dinparbudpora
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	83,33 persen	557,400,000	DPMPPA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	88,89 persen	32,528,000	DPMPPA
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	97,75 persen	696,116,000	DPMPPA
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	29,590,000	DLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50 persen	244,480,000	DLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	100 persen	44,350,000	DLH
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	10,630,000	DLH

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100 persen	873,290,000	Satpol P3KP
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 persen	53,350,000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen	13,208,391,000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 persen	913,464,000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
			Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100 persen	19,980,000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 persen	4,542,566,000	Dinkominfo
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100 persen	518,436,000	Bappeda
			Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100 persen		
			Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	75 persen		
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100 persen	437,964,000	Bappeda
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen		
			Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100 persen		
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100 persen	501,142,000	Bappeda
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100 persen		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100 persen		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	633,448,168,100	Semua OPD

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		
			persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		
			Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		Dinkes
			Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 persen		Setda
			Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah	100 persen		
			Persentase pelayanan keprotokoleran	100 persen		
			Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 persen		Sekretariat DPRD
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 persen	18,908,386,000	Setda
			Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100 persen		
			Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	100 persen		
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100 persen	818,390,000	Setda
			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	6,00 persen		
			Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	100 persen		

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,5 persen	4,000,978,000	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100 persen	934,850,000	BPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5 persen	1,857,001,000	BPKAD
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterisian Jabatan	90 persen	1,187,200,000	BKPSDM
			Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80 persen		
			Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	100 persen		
			Persentase PNS berkembang karier	80 persen		
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100 persen	1,534,866,000	BKPSDM
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3 nilai	380,937,000	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85 persen	437,038,000	Inspektorat
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 07					**725,154,697,500**	
08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen	1,259,890,000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100 persen	155,480,000	Dinparbudpora
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100 persen	31,250,000	Dinparbudpora
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	95,74 persen	20,000,000	Dinparbudpora
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	4,75 persen	1,623,800,000	Dinparbudpora

Prioritas Nasional	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Nasional 08	3,090,420,000	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.2.5 Keterkaitan dan Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Dukungan prioritas pembangunan Kota Pekalongan terhadap prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui penyelarasan sebagaimana disajikan pada sub bab 1.3.2. Selanjutnya, dukungan tersebut dijabarkan lebih detil melalui program-program yang mendukung prioritas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana disajikan pada Tabel IV-7 berikut.

Tabel IV-7 Dukungan Program Kota Pekalongan Terhadap Prioritas Provinsi Jawa Tengah

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	12,27 persen	2,549,260,000	DPU-PR
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	100 persen	1,352,512,000	Dinperkim
		Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	121,39 hektar	24,022,630,000	Dinperkim
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	2075,41 hektar	10,730,514,000	Dinperkim
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)	63,04 persen	12,049,520,000	Dinperkim
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 persen	6,540,000	Dinperkim
	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	0,3 persen	11,688,874,000	DLH
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	80 persen	5,092,114,000	DPU-PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	90,90 persen	2,692,452,000	DPU-PR
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 persen	5,747,810,000	Dinas Perhubungan
			Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	97 persen		
			Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	0,74 persen		
		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	85,48 persen	16,084,720,000	DPU-PR
	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	51,180,000	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	28,930,000	DPMPTSP

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
	kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3025 dokumen	739,790,000	DPMPTSP
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	7,09 milyar	638,003,000	DPMPTSP
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	98,368,000	DPMPTSP
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen	389,560,000	Dinperinaker
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25 persen	7,470,000	Dinperinaker
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100 persen	33,940,000	Dinperinaker
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 persen	8,682,729,000	Dindagkop UKM
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	100 persen	102,960,000	Dindagkop UKM
		Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,99 persen	98,970,000	Dindagkop UKM
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	81,99 persen	279,022,000	Dindagkop UKM
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	6,42 persen	969,080,000	Dindagkop UKM
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,93 persen	6,330,000	Dindagkop UKM
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	32,36 persen	47,180,000	Dindagkop UKM
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	10,48 persen	14,600,000	Dindagkop UKM

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,27 persen	323,520,000	Dindagkop UKM
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1 persen	2,227,388,000	DKP
			Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1 persen		
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3 persen	181,988,000	DKP
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2 pelaku usaha	421,938,000	DKP
			Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12,20 persen		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	12 persen	3,292,957,000	Dinparbudpora
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	41,98 persen	678,342,000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	51,28 persen	165,000,000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	80 persen	712,500,000	Dinparbudpora
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	55,78 miliar rupiah	1,421,483,000	Dinperpa
			Nilai produksi peternakan pertahun	199,66 miliar rupiah		
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100 persen	16,466,000	Dinperpa
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5 persen	305,194,000	Dinperpa
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100 persen	13,300,000	Dinperpa
		Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	100 persen	24,927,000	Dinperpa

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	100 persen	35,707,000	Dinperpa
	10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen	1,259,890,000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100 persen	155,480,000	Dinparbudpora
		Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100 persen	31,250,000	Dinparbudpora
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	95,74 persen	20,000,000	Dinparbudpora
		Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	4,75 persen	1,623,800,000	Dinparbudpora
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Provinsi Jawa Tengah 01					**117,116,188,000**	
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	90 persen	53,973,800,000	Dinas Kesehatan
			Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92 persen		
			Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/ kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	100 persen		
			Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	100 persen		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	95 persen	758,562,000	Dinas Kesehatan
			Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100 persen		
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	97 persen	120,784,000	Dinas Kesehatan
			Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	100 persen		
			Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100 persen		
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	94 persen	1,611,130,000	Dinas Kesehatan

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	4,70 persen	296,439,000	Dinperpa
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100 persen	35,881,000	Dinperpa
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	86,4 persen	27,450,000	Dinperpa
		Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen	247,600,000	Dinsos P2KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	12 persen	1,859,294,000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Unmeet need KB	13 persen	1,955,520,000	Dinsos P2KB
	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	704,500,000	Dinsos P2KB
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen	191,020,000	Dinsos P2KB
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	386,432,000	Dinsos P2KB
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	1,720,232,000	Dinsos P2KB
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	53,73 persen	1,328,740,000	Dinsos P2KB
	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	100 persen	56,788,452,000	Dinas Pendidikan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100 persen	15,485,800,000	Dinas Pendidikan
		Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	25,00 persen	741,097,000	Dinarpus
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100 persen	83,800,000	Dinas Pendidikan

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
	formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan					
	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,15 persen	3,355,717,000	Dinperinaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	27,93 persen	350,444,000	Dinperinaker
		Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	52,00 persen	376,100,000	Dinperinaker
	05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	9,24 persen	150,940,000	DPMPPA
		Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	15,01 persen	78,062,000	DPMPPA
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	48,15 persen	215,615,000	DPMPPA
		Program Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100 persen	69,644,000	DPMPPA
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Provinsi Jawa Tengah 02					**142,913,055,000**	
03. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	100 persen	8,455,948,000	DPU-PR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	70,48 persen	4,755,600,000	DPU-PR
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	45,97 persen	1,167,896,000	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	1,640,000	DLH

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,939 persen	3,635,404,500	DLH
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen	438,000,000	Dinperkim
		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,44 persen	1,305,880,000	DPU-PR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	18,53 persen	108,640,000	DPU-PR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100 persen	301,404,000	DPU-PR
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Provinsi Jawa Tengah 03					**20,170,412,500**	
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100 persen	1,946,743,000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16 lembaga	1,052,090,000	Kesbangpol
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100 persen	220,900,000	Kesbangpol
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 persen	97,837,000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100 persen	288,930,000	Kesbangpol
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	85 persen	4,968,603,000	Satpol P3KP
	12. Peningkatan kesejahteraan ASN	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,20 persen	2,318,428,000	Dinkominfo

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
	yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100 persen	86,960,000	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	3,74 persen	105,050,000	Dinkominfo
		Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100 persen	1,481,640,000	BPBD
		Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	100 persen	328,042,600	Dinarpus
			Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	80 persen		
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100 persen	149,153,800	Dinarpus
		Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	88,10 persen	313,670,000	Dindukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,85 persen	341,730,000	Dindukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	12 OPD	71,790,000	Dindukcapil
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100 persen	27,207,112,000	Sekretariat DPRD
			Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100 persen		
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,81 persen	1,081,970,000	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	40 persen	5,477,660,000	Dinparbudpora
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	83,33 persen	557,400,000	DPMPPA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	88,89 persen	32,528,000	DPMPPA

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	97,75 persen	696,116,000	DPMPPA
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	29,590,000	DLH
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50 persen	244,480,000	DLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	100 persen	44,350,000	DLH
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	10,630,000	DLH
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100 persen	873,290,000	Satpol P3KP
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 persen	53,350,000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen	13,208,391,000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
			Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 persen	913,464,000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100 persen	19,980,000	Kecamatan Pekalongan Utara
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat
			Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 persen	4,542,566,000	Dinkominfo
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100 persen	518,436,000	Bappeda
			Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100 persen		
			Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	75 persen		
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen	437,964,000	Bappeda
			Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100 persen		
			Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100 persen		
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100 persen	501,142,000	Bappeda
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100 persen		
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100 persen		

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	633,448,168,100	Semua OPD
			Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		
			persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		
			Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		Dinas Kesehatan
			Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 persen		Setda
			Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah	100 persen		
			Persentase pelayanan keprotokoleran	100 persen		
			Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 persen		Sekretariat DPRD
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 persen	18,908,386,000	Setda
			Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100 persen		
			Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	100 persen		
		Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	100 persen	818,390,000	Setda
			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	6,00 persen		
			Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	100 persen		
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,5 persen	4,000,978,000	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100 persen	934,850,000	BPKAD

Prioritas Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Kota 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5 persen	1,857,001,000	BPKAD
		Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterisian Jabatan	90 persen	1,187,200,000	BKPSDM
			Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80 persen		
			Persentase PNS berkembang karier	80 persen		
			Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	100 persen		
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100 persen	1,534,866,000	BKPSDM
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3 nilai	380,937,000	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85 persen	437,038,000	Inspektorat
Jumlah Dukungan Anggaran Prioritas Provinsi Jawa Tengah 04					**733,729,800,500**	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.2.6 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD serta ketersediaan kapasitas riil anggaran. Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan pada Musrenbang Kota Pekalongan Tahun 2024 menggarisbawahi tiga permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekalongan, yaitu : (1) Banjir Rob dan Sungai, (2) Persampahan dan Lingkungan Hidup, (3) Pemulihan Ekonomi.

Salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat dan Pemerintah Kota Pekalongan adalah permasalahan sampah. Pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan penambahan volume, jenis dan ragam sampah. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Permasalahan sampah dapat menjadi akar masalah dan memperburuk kondisi lingkungan antara lain mengakibatkan banjir dan genangan saat rob. Timbulan sampah yang terjadi baik di tepi jalan maupun saluran juga mengakibatkan jangka waktu surut banjir dan genangan di beberapa wilayah menjadi lebih lama. Kinerja pompa sebagai salah satu upaya untuk mengatasi banjir dan rob menjadi tidak optimal dengan adanya sampah ini. Tuntutan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih tertumpu pada Pemerintah, sedangkan perlu adanya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah. Dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan Pemerintah maka pengelolaan persampahan di Kota Pekalongan dapat terselesaikan dan anggaran yang dialokasikan dapat optimal.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekalongan sekitar 300 ribu orang dan hitungan jumlah sampah yang dihasilkan perorang adalah 500 gram/orang/hari maka sampah yang dihasilkan sebanyak 150ton perhari. Dari jumlah tersebut sebanyak 120ton diangkut dan masuk ke TPA dan sisanya sebanyak 30ton diolah kembali. Keberadaan TPS3R dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir, yang berfungsi sebagai pengolah sampah, masih perlu ditingkatkan fungsinya. Perlu adanya solusi dalam penanganan sampah apabila keberadaan TPS3R tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Alokasi anggaran sebesar 200 Miliar yang diprioritaskan untuk penanganan sampah, banjir dan rob serta perbaikan pasar Patiunus atau taman Sorogenen harus terfokus untuk penanganan jangka waktu pendek. Selain itu, peningkatan pemahaman yang harus diberikan kepada masyarakat perlu dituangkan dalam program sehingga dapat teralokasikan dalam anggaran sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu kondisi TPA saat ini sudah tidak direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan sampah sehingga harus dipikirkan adanya solusi lain. Sehingga perlu difokuskan bagaimana arah kebijakan terkait penanganan sampah yang diangkut, di luar perbaikan TPA. Selain itu perlu adanya inovasi agar masyarakat dapat diberikan pemahaman terkait permasalahan sampah di tingkat RT/RW sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dicapai melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, serta kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang ada pada suatu daerah dan akan membantu dalam

pembangunan daerah sebagai salah satu tolak ukur dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka pemulihan ekonomi pasca *Covid-19*, maka salah satu yang harus difokuskan oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah menaikkan nilai IPM. Apabila ingin menaikkan nilai IPM Kota Pekalongan, dimana wilayah kota secara demografi merupakan sentral ekonomi, jumlah penduduk yang padat dan infrastrukturnya lebih maju dibandingkan kabupaten, maka harus membandingkan standar IPM dengan kota lain yang terdapat di Jawa Tengah dan jumlah penduduknya kurang lebih sama.

Dari berbagai permasalah utama Kota Pekalongan diatas, maka beberapa langkah berikut dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan :

a. Kesehatan

   Untuk meningkatkan IPM maka masyarakat diajarkan untuk menerapkan pola makan sehat di dalam kehidupan sehari-hari antara lain dengan cara bagaimana kita dapat mengontrol penggunaan minyak dan lain sebagianya. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilakukan program atau kampanye oleh Dinas Kesehatan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan merawat kesehatan tubuh.

b. Pendidikan

   Peningkatan IPM di bidang pendidikan yakni dengan mendorong generasi muda agara dapat memberikan rmanfaat untuk Kota Pekalongan serta mendorong agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kesadaran masyarakat terutama orang tua juga mempunyai peran penting agar anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, generasi muda Kota Pekalongan dituntut untuk mempunyai rasa cinta terhadap daerahnya sendiri sehingga hal tersebut dapat meningkatkan IPM.

c. Standar Hidup Layak

   Salah satu proyek strategis nasional yaitu pembangunan kembali Pasar Banjarsari yang diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi masyarakat Kota Pekalongan. Dengan dibangunnya kembali pasar banjarsari, diharapkan dapat membuat wajah Kota Pekalongan menjadi lebih tertata, sehingga tidak ada lagi pedagang yang berjualan di sepanjang tepi sungai loji.

d. Sarana Prasarana Persampahan

   Perlunya upaya dalam pengelolaan sampah di Kota Pekalongan, yaitu dengan mengoptimalkan pengelolaan sampah di tingkat dasar (dari sumbernya) serta peningkatan sarana prasarana persampahan yang ada (sarana angkutan, TPS, dan lainnya) termasuk SDM pengelolanya.

4.3 Inovasi Kebijakan Pembangunan

Inovasi daerah, sebagai ide dan gagasan baru yang didukung oleh ilmu pengetahuan serta kebijakan daerah, menjadi hal penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Hal-hal baru yang dapat diangkat menjadi inovasi dalam pelayanan publik tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Selain itu, Pemerintah Daerah juga dituntut untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi daerah secara kontinyu. Hal ini dibuktikan dengan adanya inovasi daerah sebagai salah satu komponen dalam penilaian Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD) yang diselenggarakan oleh Bappenas, dan salah satu kategori kinerja dalam pemberian Dana Insentif Daerah (DID).

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan berupaya melaksanakan pembangunan daerah secara terencana, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi dalam satu kesatuan sistem inovasi daerah guna meningkatkan produktivitas daerah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan yang mengatur tentang Perencanaan,

Kelembagaan, Penyelenggaraan, Evaluasi dan Sanksi Sistem Inovasi Daerah Kota Pekalongan.

Peraturan Wali Kota tersebut akan mendorong inovasi kebijakan Pembangunan dengan merumuskan ruang lingkup Sistem Inovasi Daerah yang lebih terarah. Dalam hal perencanaan, Pemerintah Kota Pekalongan telah merumuskan *Road Map* SIDa yang melingkupi Kondisi SIDa saat ini, tantangan dan peluang SIDa, Kondisi SIDa yang akan dicapai, Strategi dan Arah Kebijakan SIDa dan Rencana aksi penguatan SIDa.

Selanjutnya, telah dirumuskan juga kelembagaan SIDa yang mengatur pembentukan Tim Penguatan SIDa, dengan ruang lingkup tugas antara lain, mengintegrasikan program inovatif SIDa dengan RPJMD, melakukan sinkroniasi, harmonisasi dan sinergi SIDa, mempersiapkan rumusaan kebijakan penyelenggaraan SIDa, mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan SIDa,melakukan monitoring dan evaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan SIDa.

Dalam hal penyelenggaraan SIDa, Peraturan Wali Kota memperkuat munculnya inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi. Adanya kebijakan tersebut akan mendorong munculnya inovasi kebijakan pada Organisasi Perangkat Daerah dan keterlibatan perguruan tinggi dan masyarakat.

Inovasi daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan) dan pengelolaan fungsi manajemen (sarana dan prasarana, personel, bahan-bahan, dan metode kerja).

Inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh masyarakat dan/atau perguruan tinggi. Inovasi ini dimaksud untuk mendorong tumbuh kembang iklim inovasi masyarakat dan ekosistem inovasi daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya saing daerah.

Lebih lanjut, seluruh rangkaian inovasi ini akan dilakukan proses evaluasi penyelenggaraan SIDa secara rutin. Evaluasi Penyelenggaran SIDa dilakukan melalui penilaian kapasitas inovatif daerah. Penilaian kapasitas inovatif dilaksanakan guna mengetahui capaian implementasi program inovatif SIDa dan sebagai tolak ukur kemajuan SIDa. Pelaksanaan penilaian kapasitas inovatif daerah tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dengan mengikutsertakan perguruan tinggi, industri/UMKM, dan masyarakat.

Disisi lain, Pemerintah Kota Pekalongan juga fokus menyelenggarakan fungsi kelitbangan pada tema-tema strategis untuk mempercepat pencapaian pembangunan kota. Penyelenggaraan fungsi litbang ini dilakukan melalui tema yang dikompetisikan dalam Riset Unggulan Daerah dengan mengambil isu strategis pada tahun perencanaan N+1.

Inovasi Kebijakan Pembangunan juga sedang dirintis melalui kegiatan riset bersama, yang melibatkan kerjasama dengan perguruan tinggi. Tidak hanya melalui riset unggulan dan riset bersama, dorongan inovasi kebijakan pembangunan juga dilakukan dalam perwujudan program unggulan atau program strategis Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2021-2026.

4.4 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 Dengan Menerapkan Konsep Teknokratik, Partisipatif, Politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas

Sebagai bagian dari rangkaian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 menerapkan konsep teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Konsep tersebut merupakan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses yang diuraikan sebagai berikut.

4.4.1 Teknokratik

Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Proses awal dalam penyusunan RKPD dilakukan melalui pendekatan teknokratik oleh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Hasil dari proses ini yaitu Rancangan Awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 secara teknokratik mempedomani arah kebijakan dan sasaran tahun 2025 pada RPJMD Tahun 2021-2026 yang selaras dengan program perangkat daerah sebagai berikut.

Tabel IV-8 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 Dengan Pendekatan Teknokratik

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
1. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	1. AKABA (Angka Kematian Balita)	1. 9,31 per 1.000 KH	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
	2. AKB (Angka Kematian Bayi)	2. 7,30 per 1.000 KH	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
	3. AKI (Angka Kematian Ibu)	3. 92,08 per 100.000 KH	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
	4. Indeks Keluarga Sehat	4. 0,40	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	
			Program Pengendalian Penduduk	Dinsos P2KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
2. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	3,00 persen	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
			Program Pemberdayaan Sosial	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan			Program Rehabilitasi Sosial	
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	1. Rata-Rata Lama Sekolah	9,75 tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Dinarpus
	2. Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	100,00 persen	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik
4. Peningkatan *link and match* ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,49 persen	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
			Program Penempatan Tenaga Kerja	
			Program Hubungan Industrial	
5. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65,31	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
			Program Perlindungan Perempuan	
	2. Kategori Kota Layak Anak	Nindya	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	DPMPPA
			Program Perlindungan Khusus Anak	
6. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	98,44 persen	Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
			Program Kawasan Permukiman	
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
7. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Luas Genangan Banjir dan Rob	790,00 Ha	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	2. Indeks Kualitas Air	59,42	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
	3. Indeks Kualitas Lahan	37,65	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
	4. Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	7 regulasi	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
			Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
			Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
8. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	100,00 persen	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
	2. Persentase pelayanan sampah	72,12 persen	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR
	3. Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
	4. Persentase keterhubungan jalan	100 persen	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
9. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pertumbuhan ekonomi	5,44 - 6,0 persen	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
			Program Promosi Penanaman Modal	
			Program Pelayanan Penanaman Modal	
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
			Program Pengembangan Ekspor	
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
			Program Pengembangan UMKM	
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
			Program Pemasaran Pariwisata	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinperpa
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
			Program Perizinan Usaha Pertanian	
			Program Penyuluhan Pertanian	
10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	Persentase Penyelenggaraan *Event* Budaya	122,00 persen	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
			Program Pembinaan Sejarah	
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Program Pengelolaan Permuseuman	
11.Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	100,00 persen	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
12.Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi *reward and punishment*	1. Indeks SPBE	3,34	Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
	2. IKM Kota	90,70 persen	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
			Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
			Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
			Program Pencatatan Sipil	
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
			Program Peningkatan Kerja Sama Desa	DPMPPA
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DLH
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelematan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		PROGRAM PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2025		
1	2	3	4	5
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
	3. Nilai KIP Tingkat Kota	97,20 skor	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
	4. Nilai SAKIP Kota	75,57 skor	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
			Program Perekonomian dan Pembangunan	
	5. Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK Outcome)	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	6. Indeks Merit System	340,00	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	7. Maturitas SPIP	3,80	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
	8. Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	7,00	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024.

4.4.2 Partisipatif

Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, melalui tahapan dari tingkat basis sampai dengan tingkat kota sebagaimana Tabel IV-9 berikut.

Tabel IV-9 Penyusun RKPD Melalui Pendekatan Partisipatif

No.	Tahapan Penyusunan RKPD	Keterlibatan Stakeholder
1	Konsultasi publik rancangan awal RKPD	OPD, Forkopimda, perwakilan organisasi profesi, forum anak, perempuan, media, seni, komunitas, kelompok difabel, organisasi masyarakat, keagamaan, dan

No.	Tahapan Penyusunan RKPD	Keterlibatan Stakeholder
		perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan Kota Pekalongan.
2	Pra musrenbang (penjaringan usulan masyarakat di tingkat RT dan RW)	Warga masyarakat
3	Musrenbang kelurahan	Melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti: unsur perempuan (TP-PKK); unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM); Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Unsur Pemuda (Karang Taruna); unsur anak; unsur difabel; unsur partai politik; unsur pendidikan, dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan kelurahan
4	Musrenbang tingkat kecamatan	Melibatkan berbagai komponen masyarakat, seperti: unsur perempuan (TP-PKK); unsur pemuda (Karang Taruna); unsur anak; unsur difabel; unsur partai politik; unsur pendidikan, unsur kesehatan dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan kecamatan
5	Forum Perangkat Daerah	OPD dan stakeholder yang terkait dengan tema forum perangkat daerah
6	Musrenbang tingkat kota	OPD, Forkopimda, perwakilan organisasi profesi, forum anak, perempuan, media, seni, komunitas, kelompok difabel, organisasi masyarakat, keagamaan, dan perwakilan masyarakat lainnya yang peduli terhadap pembangunan Kota Pekalongan.

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.4.3 Politis

Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Visi dan misi Wali Kota Pekalongan pada RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD melalui penyelarasan program sebagaimana Tabel IV-10 berikut.

Tabel IV-10 Penjabaran Visi dan Misi Wali Kota ke Dalam Program RKPD

Visi: "Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Misi 1: Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat		
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	OPD Pengampu Urusan Kesehatan

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	OPD Pengampu Urusan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	OPD Pengampu Urusan Pangan
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	OPD Pengampu Urusan Pangan
Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Unmeet need KB	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	OPD Pengampu Urusan Sosial
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	OPD Pengampu Urusan Sosial
Misi 2: Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan		
Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	regulasi pelestarian koleksi dan naskah kuno yang ditetapkan	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
Misi 3: Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman		
Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Misi 4: Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan		
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam Kondisi Baik	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase limbah yang diolah	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan PU-PR
Misi 5: Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal		

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	OPD Pengampu Urusan Perdagangan

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pengembangan Umkm	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	OPD Pengampu Urusan Pariwisata
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	OPD Pengampu Urusan Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	OPD Pengampu Urusan Pertanian

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Misi 6: Melestarikan budaya, kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlaqul karimah		
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	Badan Kesbangpol
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	Badan Kesbangpol
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	Badan Kesbangpol
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	Satpol PP
Misi 7: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean government		
Program Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	OPD Pengampu Urusan Kominfo
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	OPD Pengampu Urusan Statistik
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	OPD Pengampu Urusan Persandian
Program Penanggulangan Bencana	persentase korban bencana alam yang ditangani	BPBD
Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	OPD Pengampu Urusan Kearsipan

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Perda yang ditetapkan	Set DPRD
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	Satpol PP
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Kec. Pekalongan Utara
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	Kec. Pekalongan Selatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan	Kec. Pekalongan Selatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan	Kec. Pekalongan Selatan
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	Kec. Pekalongan Selatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	Kec. Pekalongan Barat
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	Kec. Pekalongan Barat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat	Kec. Pekalongan Barat
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	Kec. Pekalongan Barat
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	Kec. Pekalongan Timur
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	Kec. Pekalongan Timur
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur	Kec. Pekalongan Timur
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	Kec. Pekalongan Timur

Misi / Program	Indikator Program	OPD Penanggung Jawab
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	OPD Pengampu Urusan Kominfo
Program Kepegawaian Daerah	Persentase PNS berkembang karier	OPD Pengampu Kepegawaian
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	OPD Pendidikan dan Pelatihan
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	OPD Pengampu Litbang
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	Bag. Organisasi
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	OPD Pengampu Perencanaan
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	OPD Pengampu Perencanaan
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	Bag. Pemerintahan
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan	Bag. Perekonomian dan SDA
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	OPD Pengampu Keuangan
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	OPD Pengampu Keuangan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	OPD Pengampu Keuangan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	Inspektorat Daerah
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	Inspektorat Daerah

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Pendekatan secara politis juga dilakukan melalui penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025.

4.4.4 Atas-bawah dan bawah-atas

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, daerah kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Bentuk penyelarasan dalam proses perencanaan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi usulan rencana pembangunan pada tahapan forum perangkat daerah, yaitu menyelaraskan antara usulan musrenbang kelurahan/kecamatan, rencana kerja perangkat daerah dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan berpedoman pada prioritas dan fokus pembangunan Kota Pekalongan.
2. Penyelarasan prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan prioritas nasional.
3. Penyelarasan kebijakan Pusat dengan kondisi Kota Pekalongan dalam rapat TAPD.

4.5 Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2025 Dengan Menerapkan Konsep Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial

Pendekatan lain sebagai satu kesatuan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 yaitu berorientasi pada substansi dengan menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial.

4.5.1. Holistik-Tematik

Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Konsep tematik yang diterapkan dalam kebijakan pembangunan Kota Pekalongan dapat dilihat melalui tema pembangunan setiap tahunnya sebagaimana Gambar IV-2 berikut.



Gambar IV-2 Konsep Tematik
Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

Selanjutnya, tema kebijakan pembangunan dijabarkan ke dalam prioritas dan fokus pembangunan sebagaimana diuraikan pada sub bab 4.2.3, yang secara holistik telah mencakup aspek pembangunan sebagai berikut.

Tabel IV-11 Konsep Holistik
Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan

Prioritas Kota 2025	Aspek Pembangunan
1. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Kesehatan
2. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Kesejahteraan sosial
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Sumber daya manusia
4. Peningkatan *link and match* ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perlindungan perempuan dan anak
5. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	Pengarusutamaan gender
6. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Infrastruktur perumahan dan permukiman
7. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Lingkungan hidup
8. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Infrastruktur perkotaan
9. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Ekonomi
10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	Kebudayaan
11. Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Kondusivitas wilayah
12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi *reward and punishment*	Tata kelola pemerintahan

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.5.2. Integratif

Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Hal ini diterapkan melalui pencapaian sasaran kinerja pembangunan tingkat kota yang didukung oleh kinerja lintas OPD sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebagaimana disajikan pada Tabel IV-12 berikut.

Tabel IV-12 Konsep Integratif
Dalam Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
1. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsif dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dengan fokus pada:			

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
a. Mendorong upaya percepatan penurunan stunting melalui 8 (delapan) aksi konvergensi; b. Optimalisasi layanan dan fasilitas kesehatan serta peran masyarakat dalam rangka menurunkan AKABA, AKB, AKI, dan pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun tidak menular; c. Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, termasuk mendorong sinergitas RS swasta.	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinperpa
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		Program Pengendalian Penduduk	Dinsos P2KB
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	
		Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	
2. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, dengan fokus pada:			
a. Pengendalian inflasi daerah melalui optimalisasi peran TPID; b. Penguatan dan optimalisasi peran TKPK dalam rangka mendorong kerja sama multi-sektoral; c. Peningkatan upaya kolaborasi konstruktif dengan masyarakat; d. Penguatan pemanfaatan data kemiskinan sebagai dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.	Meningkatnya Penanganan kemiskinan	Program Penanganan Bencana	Dinsos P2KB
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	
		Program Pemberdayaan Sosial	
		Program Rehabilitasi Sosial	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan, dengan fokus pada:			
a. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang disertai peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan secara berkelanjutan; b. Perluasan dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus dan /atau pendidikan inklusi; c. Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	Program Pengelolaan Pendidikan	Dindik
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Program Pembinaan Perpustakaan	Dinarpus
	Meningkatnya pendidikan karakter dan keagamaan	Program Pengembangan Kurikulum	Dindik

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
karakter dan pendidikan keagamaan.			
4. Peningkatan *link and match* ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing, dengan fokus pada:			
a. Integrasi dan perluasan pelatihan, sertifikasi, penempatan tenaga kerja terpadu dalam rangka mengurangi kesenjangan pasar kerja serta menangkap peluang perkembangan di Kawasan Petanglong dan sekitarnya; b. Pelatihan kerja secara inklusif dan berperspektif gender.	Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinperinaker
		Program Penempatan Tenaga Kerja	
		Program Hubungan Industrial	
5. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi, terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus, dengan fokus pada:			
a. Mendorong keterlibatan dan kontribusi perempuan, baik secara individu maupun melalui kelompok/organisasi dalam memainkan peranan aktif di kehidupan ekonomi dan politik; b. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.	Optimalnya Pengarusutamaan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPPA
		Program Perlindungan Perempuan	
	Optimalnya Pengarusutamaan Hak Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
		Program Perlindungan Khusus Anak	
6. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan fokus pada:			
Rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur perumahan dan permukiman kumuh dalam rangka menuju kesejahteraan dan kemandirian.	Meningkatnya kawasan perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	Program Pengembangan Perumahan	Dinperkim
		Program Kawasan Permukiman	
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
7. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan fokus pada:			
a. Optimalisasi sinergitas dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, LSM dan masyarakat dalam penanganan banjir/rob; b. Mendorong pelaku usaha yang menghasilkan limbah untuk melakukan pengelolaan limbah sesuai ketentuan; c. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau dan	Optimalnya Penanganan Banjir dan Rob	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	Menurunnya tingkat pencemaran air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	
	Optimalnya kualitas lahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
pemanfaatan ruang kota secara berkelanjutan.	Terwujudnya rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfataan ruang	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinperkim
		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	
		Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
8. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada:			
a. Perluasan penyediaan akses layanan air minum melalui sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi, serta mendorong optimalisasi kinerja Perusda penyedia air minum; b. Mendorong peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan dari sumbernya dan optimalisasi pengelolaan persampahan di TPS3R; c. Peningkatan akses jalan dalam rangka mengurangi kemacetan.	Optimalnya layanan air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUPR
	Optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
		Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	DPUPR
	Meningkatnya layanan transportasi perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinhub
		Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
9. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan fokus pada:			
a. Mendorong kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dan pelaku industri pariwisata untuk meningkatkan pengembangan pariwisata dan mensukseskan pembangunan pariwisata; b. Peningkatan sarana prasarana pendukung pariwisata dalam rangka penguatan ekonomi lokal; c. Penguatan sub sektor perdagangan dan jasa sebagai kelanjutan dari dampak positif pembangunan Pasar Banjar Sari; d. Penguatan ekonomi kreatif berbasis pada industri batik dengan seluruh rantai nilainya.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	
		Program Pelayanan Penanaman Modal	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinperinaker
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dindagkop UKM
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	
		Program Pengembangan Ekspor	
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	
		Program Pengembangan UMKM	
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinparbudpora
		Program Pemasaran Pariwisata	
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinperpa
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	
		Program Penyuluhan Pertanian	
10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal, dengan fokus pada:			
Mendorong SDM budaya untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka meningkatkan kualitas dan pengayaan penyelenggaraan event budaya.	Meningkatnya intensitas event budaya yang diselenggarakan	Program Pengembangan Kebudayaan	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
		Program Pembinaan Sejarah	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
		Program Pengelolaan Permuseuman	
11. Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam mewujudkan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada:			
Peningkatan pelibatan stakeholder dan kesadaran masyarakat berwawasan kebangsaan dengan pondasi agama.	Meningkatnya pengelolaan potensi konflik sosial	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesbangpol
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi *reward and punishment*, dengan fokus pada:			
a. Peningkatan pelayanan publik melalui optimalisasi penerapan SPBE, penguatan keterbukaan informasi publik, sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan perluasan digitalisasi daerah dan profesionalisme ASN; b. Mendorong optimalisasi penerapan sistem pengendalian internal pemerintah dan zona integritas menuju WBK/WBBM.	Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*Smart Governance*)	Program Aplikasi Informatika	Dinkominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
	Meningkatnya kualitas Layanan Publik (*Smart Governance*)	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Program Pengelolaan Arsip	Dinarpus
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	
		Program Pendaftaran Penduduk	Dindukcapil
		Program Pencatatan Sipil	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Sekretariat DPRD
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinparbudpora
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa	DPMPPA
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DLH
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Satpol PP, Damkar dan Penyelematan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Dinkominfo
	Meningkatnya Akuntabilitas	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran	Intervensi Program	OPD Pelaksana
	Kinerja pemerintahan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua OPD
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda
		Program Perekonomian dan Pembangunan	
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
	Meningkatnya kualitas manajemen ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Inspektorat
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

4.5.3. Spasial

Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Konsep ini diterapkan dengan mempedomani rencana tata ruang wilayah Kota Pekalongan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Pagu Anggaran

Indikasi rencana program tahun 2025 didasarkan pada prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025, RPJMD Tahun 2021-2026, serta mempertimbangkan prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah guna mendukung pembangunan secara menyeluruh, dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 2 (dua) Unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (lima) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan, 1 (satu) unsur pemerintahan umum, dan Non Urusan. Konsistensi antara prioritas pembangunan Kota Pekalongan dengan pagu anggaran disajikan pada Tabel V-1 berikut.

Tabel V-1 Konsistensi Antara Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan dengan Pagu Anggaran Tahun 2025

Prioritas Kota Tahun 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar	90 persen	53,973,800,000	Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota	92 persen		
		Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK Outcome)	100 persen		
		Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar	100 persen		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek	95 persen	758,562,000	Dinas Kesehatan
		Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan	100 persen		
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat	97 persen	120,784,000	Dinas Kesehatan
		Persentase produk pangan olahan industri rumah tangga yang bebas dari cemaran	100 persen		
		Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar	100 persen		

Prioritas Kota Tahun 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat	94 persen	1,611,130,000	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase cadangan pangan daerah	4,70 persen	296,439,000	Dinperpa
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan	100 persen	35,881,000	Dinperpa
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan	86,4 persen	27,450,000	Dinperpa
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	100 persen	247,600,000	Dinsos P2KB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun	12 persen	1,859,294,000	Dinsos P2KB
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Unmeet need KB	13 persen	1,955,520,000	Dinsos P2KB
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 01				**60,886,460,000**	
02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	100 persen	704,500,000	Dinsos P2KB
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	100 persen	191,020,000	Dinsos P2KB
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	75 persen	386,432,000	Dinsos P2KB
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)	100 persen	1,720,232,000	Dinsos P2KB
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial	53,73 persen	1,328,740,000	Dinsos P2KB
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 02				**4,330,924,000**	
03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase capaian SPM pendidikan	100 persen	56,788,452,000	Dinas Pendidikan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	100 persen	15,485,800,000	Dinas Pendidikan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	25,00 persen	741,097,000	Dinarpus
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas	100 persen	83,800,000	Dinas Pendidikan
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 03				**73,099,149,000**	

Prioritas Kota Tahun 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)	1,15 persen	3,355,717,000	Dinperinaker
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)	27,93 persen	350,444,000	Dinperinaker
	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)	52,00 persen	376,100,000	Dinperinaker
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 04				**4,082,261,000**	
05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	9,24 persen	150,940,000	DPMPPA
	Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)	15,01 persen	78,062,000	DPMPPA
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)	48,15 persen	215,615,000	DPMPPA
	Program Perlindungan Khusus Anak	persentase pengaduan kasus anak yang terlayani	100 persen	69,644,000	DPMPPA
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 05				**514,261,000**	
06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)	12,27 persen	2,549,260,000	DPU-PR
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni	100 persen	1,352,512,000	Dinperkim
	Program Kawasan Permukiman	Luas kawasan permukiman kumuh	121,39 hektar	24,022,630,000	Dinperkim
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas kawasan permukiman tidak kumuh	2075,41 hektar	10,730,514,000	Dinperkim
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (IKK Outcome)	63,04 persen	12,049,520,000	Dinperkim
	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	50 persen	6,540,000	Dinperkim
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 06				**50,710,976,000**	
07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik	100 persen	8,455,948,000	DPU-PR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	70,48 persen	4,755,600,000	DPU-PR
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	Persentase limbah yang diolah	45,97 persen	1,167,896,000	DLH

Prioritas Kota Tahun 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	Kerusakan Lingkungan Hidup				
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan	13,33 persen	1,640,000	DLH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	2,939 persen	3,635,404,500	DLH
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani	100 persen	438,000,000	Dinperkim
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	18,44 persen	1,305,880,000	DPU-PR
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi	18,53 persen	108,640,000	DPU-PR
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota	100 persen	301,404,000	DPU-PR
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 07				**20,170,412,500**	
08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah	0,3 persen	11,688,874,000	DLH
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional	80 persen	5,092,114,000	DPU-PR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah	90,90 persen	2,692,452,000	DPU-PR
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 persen	5,747,810,000	Dinas Perhubungan
		Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ	100 persen		
		Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala	0,74 persen		
	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	85,48 persen	16,084,720,000	DPU-PR
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 08				**41,305,970,000**	
09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	51,180,000	DPMPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	28,930,000	DPMPTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	3025 dokumen	739,790,000	DPMPTSP

Prioritas Kota Tahun 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
daya tampung lingkungan	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai Investasi Baru pertahun	7,09 milyar	638,003,000	DPMPTSP
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	98,368,000	DPMPTSP
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)	75,34 persen	389,560,000	Dinperinaker
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)	25 persen	7,470,000	Dinperinaker
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100 persen	33,940,000	Dinperinaker
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	100 persen	8,682,729,000	Dindagkop UKM
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	100 persen	102,960,000	Dindagkop UKM
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan volume ekspor	7,99 persen	98,970,000	Dindagkop UKM
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)	81,99 persen	279,022,000	Dindagkop UKM
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)	6,42 persen	969,080,000	Dindagkop UKM
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)	76,93 persen	6,330,000	Dindagkop UKM
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)	32,36 persen	47,180,000	Dindagkop UKM
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	10,48 persen	14,600,000	Dindagkop UKM
	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)	12,27 persen	323,520,000	Dindagkop UKM

Prioritas Kota Tahun 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	1 persen	2,227,388,000	DKP
		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI	1 persen		
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	3 persen	181,988,000	DKP
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)	2 pelaku usaha	421,938,000	DKP
		Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan	12, 20 persen		
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)	12 persen	3,292,957,000	Dinparbudpora
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK Outcome)	41,98 persen	678,342,000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi	51,28 persen	165,000,000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	80 persen	712,500,000	Dinparbudpora
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai produksi pertanian pertahun	55,78 miliar rupiah	1,421,483,000	Dinperpa
		Nilai produksi peternakan pertahun	199,66 miliar rupiah		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian	100 persen	16,466,000	Dinperpa
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	5 persen	305,194,000	Dinperpa
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota	100 persen	13,300,000	Dinperpa
	Program Perizinan Usaha Pertanian	persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin	100 persen	24,927,000	Dinperpa
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun	5 persen	35,707,000	Dinperpa
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 09				**22,008,822,000**	
10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	100 persen	1,259,890,000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	100 persen	155,480,000	Dinparbudpora
	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	100 persen	31,250,000	Dinparbudpora

Prioritas Kota Tahun 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)	95,74 persen	20,000,000	Dinparbudpora
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase pengunjung museum batik	4,75 persen	1,623,800,000	Dinparbudpora
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 10				**3,090,420,000**	
11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100 persen	1,946,743,000	Kesbangpol
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik	16 lembaga	1,052,090,000	Kesbangpol
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan	100 persen	220,900,000	Kesbangpol
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	100 persen	97,837,000	Kesbangpol
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100 persen	288,930,000	Kesbangpol
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)	85 persen	4,968,603,000	Satpol P3KP
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 11				**8,575,103,000**	
12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,20 persen	2,318,428,000	Dinkominfo
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	100 persen	86,960,000	Dinkominfo
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan	3,74 persen	105,050,000	Dinkominfo
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana alam yang ditangani	100 persen	1,481,640,000	BPBD
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik	100 persen	328,042,600	Dinarpus
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK outcome)	80 persen		

Prioritas Kota Tahun 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)	100 persen	149,153,800	Dinarpus
	Program Pendaftaran Penduduk	Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk	88,10 persen	313,670,000	Dindukcapil
	Program Pencatatan Sipil	Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil	93,85 persen	341,730,000	Dindukcapil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)	12 OPD	71,790,000	Dindukcapil
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Perda yang ditetapkan	100 persen	27,207,112,000	Sekretariat DPRD
		Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu	100 persen		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	94,81 persen	1,081,970,000	Dinparbudpora
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor	40 persen	5,477,660,000	Dinparbudpora
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan	83,33 persen	557,400,000	DPMPPA
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase kelurahan dengan kriteria *cepat berkembang*	88,89 persen	32,528,000	DPMPPA
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat	97,75 persen	696,116,000	DPMPPA
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH	16,67 persen	29,590,000	DLH
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup	50 persen	244,480,000	DLH
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase perolehan penghargaan bidang LH	100 persen	44,350,000	DLH
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti	100 persen	10,630,000	DLH

Prioritas Kota Tahun 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)	100 persen	873,290,000	Satpol P3KP
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100 persen	53,350,000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	100 persen	13,208,391,000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat
		Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100 persen	913,464,000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
		Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat
		Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100 persen	19,980,000	Kecamatan Pekalongan Utara
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan	100 persen		Kecamatan Pekalongan Selatan
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat	100 persen		Kecamatan Pekalongan Barat
		Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur	100 persen		Kecamatan Pekalongan Timur
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase penyelesaian permohonan informasi publik	100 persen	4,542,566,000	Dinkominfo

Prioritas Kota Tahun 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD	100 persen	518,436,000	Bappeda
		Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan	100 persen		
		Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA)	75 persen		
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu	100 persen	437,964,000	Bappeda
		Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu	100 persen		
		Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu	100 persen		
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah	100 persen	501,142,000	Bappeda
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud	100 persen		
		Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian	100 persen		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 persen	633,448,168,100	Semua OPD
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 persen		
		persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	100 persen		
		Persentase ketersediaan layanan BLUD	100 persen		Dinas Kesehatan
		Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi	100 persen		Setda
		Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah	100 persen		
		Persentase pelayanan keprotokoleran	100 persen		
		Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 persen		Sekretariat DPRD
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat	100 persen	18,908,386,000	Setda
		Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu	100 persen		
		Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	100 persen		
		Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian,	100 persen	818,390,000	Setda

Prioritas Kota Tahun 2025	Program	Indikator	Target	Pagu Indikatif (Rp.)	OPD Pelaksana
	Program Perekonomian dan Pembangunan	perdagangan, koperasi- UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan			
		Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)	6,00 persen		
		Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	100 persen		
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)	7,5 persen	4,000,978,000	BPKAD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)	100 persen	934,850,000	BPKAD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)	5 persen	1,857,001,000	BPKAD
	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Keterisian Jabatan	90 persen	1,187,200,000	BKPSDM
		Persentase Keterpenuhan Formasi ASN	80 persen		
		Persentase PNS berkembang karier	80 persen		
		Tingkat Pelaporan Kinerja ASN	100 persen		
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase PNS berkembang kompetensinya	100 persen	1,534,866,000	BKPSDM
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3 nilai	380,937,000	Inspektorat
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	85 persen	437,038,000	Inspektorat
Jumlah Dukungan Anggaran ke Prioritas Kota 12				**725,154,697,500**	
TOTAL				**1,013,929,456,000**	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

5.2 Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

5.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.2.1.1 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Fokus program adalah peningkatan sarpras pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah, serta peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi layanan pendidikan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase capaian SPM pendidikan sebesar 100 persen.

2. Program Pengembangan Kurikulum

Fokus program adalah peningkatan budaya literasi dan penyediaan kurikulum muatan lokal. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas sebesar 100 persen.

3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Fokus program adalah pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan penataan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan sebesar 100 persen.

5.2.1.2 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan jaminan kesehatan masyarakat, dan peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD dan penyediaan layanan kesehatan masyarakat di puskesmas. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota sebesar 92 Persen, Presentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen, dan Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar sebesar 90 Persen, Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar sebesar 100 Persen, Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat Kabupaten/Kota sebesar 92 persen.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek sebesar 95 Persen dan Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan sebesar 100 persen.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Fokus program adalah Pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut pengawasan terhadap sarana farmasi dan tempat pengelolaan makanan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Sarana Farmasi yang memenuhi standar sebesar 100 Persen, Persentase Produk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang bebas dari cemaran sebesar 100 Persen, dan Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang memenuhi syarat sebesar 97 Persen.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Fokus program adalah Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat dan lintas sektor. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Rumah Tangga Sehat sebesar 94 Persen.

5.2.1.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Fokus program adalah pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur dalam rangka pengendalian banjir dan rob, serta pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik sebesar 100 persen.

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Fokus program adalah penguatan koordinasi pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah dan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah sebesar 90,90 Persen.

3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

Fokus program adalah Penyediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota, dan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional sebesar 80 persen.

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Fokus program adalah Pengelolaan, pengembangan, pemeliharaan dan rehabilitasi Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK *Outcome*) sebesar 12,27 persen.

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase

Fokus program adalah pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan dan drainase lingkungan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 70,48 persen.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

Fokus program adalah Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota sebesar 18,44 persen.

7. Program Penyelenggaraan Jalan

Fokus program adalah rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK *Outcome*) sebesar 85,48 persen.

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Fokus program adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi dan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Kabupaten/Kota, serta penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi sebesar 18,53 persen.

9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Fokus program adalah penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) kab/kota dan pembangunan aplikasi sistem informasi penataan ruang. Indikator yang akan dicapai yaitu yaitu Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota sebesar 100 persen.

5.2.1.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perumahan

Fokus program adalah penyediaan rumah layak huni bagai warga, pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana, dan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni sebesar 100 persen.

2. Program Kawasan Permukiman

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh, peningkatan kualitas rtlh dan pembangunan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh. Indikator yang akan dicapai yaitu Luas kawasan permukiman kumuh sebesar 121,39 hektar.

3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Fokus program adalah perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Indikator yang akan dicapai yaitu Luas kawasan permukiman tidak kumuh sebesar 2075,41 hektar.

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)

Fokus program adalah Penyediaan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum). Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK *Outcome*) sebesar 63,04 persen.

5.2.1.5 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah optimalisasi penanganan gangguan trantibum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK *Outcome*) sebesar 85 persen.

2. Program Penanggulangan Bencana

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase korban bencana alam yang ditangani sebesar 100 persen.

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Fokus program adalah optimalisasi pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

5.2.1.6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial

Fokus program adalah Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Indikator yang akan dicapai Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan sebesar 75 Persen.

2. Program Rehabilitasi Sosial

Fokus program adalah peningkatan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

3. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Fokus program adalah Peningkatan perlindungan dan layanan jaminan sosial bagi keluarga miskin. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan Jaminan Sosial sebesar 53,73 Persen.

4. Program Penanganan Bencana

Fokus program adalah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam dan fasilitasi bantuan sosial bagi kelompok rentan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM) sebesar 100 Persen.

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Fokus program adalah rehabilitasi sarana dan prasarana taman makam pahlawan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebesar 100 Persen.

5.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

5.1.2.1 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Fokus program adalah peningkatan pelatihan kerja bagi buruh rokok dan penganggur dan perawatan alat-alat pelatihan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (IKK *Outcome*) sebesar 1,15 persen.

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Fokus program adalah perluasan kesempatan kerja dan pengelolaan informasi pasar kerja. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK *Outcome*) sebesar 27,93 persen.

3. Program Hubungan Industrial

Fokus program adalah penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan dan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK *Outcome*) sebesar 52 persen.

5.1.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota, serta penguatan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender sebesar 9,24 Persen.

2. Program Perlindungan Perempuan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK *Outcome*) sebesar 15,01 Persen.

3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Fokus program adalah advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak) sebesar 48,15 Persen.

4. Program Perlindungan Khusus Anak

Fokus program adalah pencegahan kekerasan terhadap anak. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengaduan kasus anak yang terlayani sebesar 100 Persen.

5.1.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Fokus program adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya dan penyediaan cadangan pangan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase cadangan pangan daerah sebesar 4,70 Persen.

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Fokus program adalah penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan sebesar 100 persen.

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Fokus program adalah ketersediaan pangan segar dan pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan pangan segar. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan sebesar 86,40 persen.

5.1.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Fokus program adalah koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani sebesar 100 Persen.

2. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Fokus program adalah koordinasi dan tindaklanjut ganti kerugian program tanah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee sebesar 50 persen.

5.1.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah limbah yang diolah sebesar 45,97 persen.

2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ruang Terbuka Hijau sebesar 2,939 persen.

3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Fokus program adalah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan sebesar 13,33 persen.

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Fokus program adalah Fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan penerapan sanksi terkait izin lingkungan dan/atau izin PPLH. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH sebesar 16,67 persen.

5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Fokus program adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup sebesar 50 persen.

6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Fokus program adalah penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase perolehan penghargaan bidang LH sebesar 100 persen.

7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Fokus program adalah pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti sebesar 100 persen.

8. Program Pengelolaan Persampahan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan dan penanganan sampah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengelolaan sampah sebesar 0,30 persen.

5.1.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pendaftaran Penduduk

Fokus program adalah peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk (KTP elektronik dan Kartu Keluarga). Indikator yang akan dicapai yaitu Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 87,07 persen.

2. Program Pencatatan Sipil

Fokus program adalah peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil (akta kelahiran anak, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian). Indikator yang akan dicapai yaitu Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil sebesar 93,85 persen.

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK *Outcome*) sebanyak 12 OPD.

5.1.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Fokus program adalah peningkatan kerja sama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan sebesar 83,33 Persen.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kelurahan dengan kriteria (cepat berkembang) sebesar 88,89 Persen.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Fokus program adalah pemanfaatan teknologi tepat guna di kelurahan, peningkatan kapasitas fasilitator, fasilitasi bulan bhakti gotong royong masyarakat dan tim penggerak PKK. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat sebesar 97,75 Persen.

5.1.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengendalian Penduduk

Fokus program adalah penyediaan data dan informasi keluarga, serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga sebesar 100 Persen.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Fokus program adalah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta promosi pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal dan juga penyediaan sarana penunjang pelayanan KB. Indikator yang akan dicapai yaitu Penurunan Angka Perkawinan di bawah 21 Tahun sebesar 12 Persen.

3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Fokus program adalah pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga dan penguatan kebijakan daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya. Indikator yang akan dicapai yaitu *Unmeet Need* KB sebesar 13 Persen.

5.1.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Fokus program adalah penyediaan fasilitas LLAJ, pelaksanaan kegiatan managemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin), pelaksanaan pelayanan uji berkala, pengelolaan terminal penumpang tipe c, dan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ sebesar 97 persen, Kinerja Lalu lintas Kab/Kota (IKK *Outcome*) dengan ratio sebesar 0,44, Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji berkala sebesar 0,74 persen.

5.1.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

Fokus program adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik, layanan pengaduan, serta penyelenggaraan hubungan media dan masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penyelesaian permohonan informasi publik sebesar 100 Persen.

2. Program Aplikasi Informatika

Fokus program adalah implementasi SPBE, penguatan sistem jaringan intra pemerinatah, pengelolaan aplikasi dan pusat data. Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan indeks sebesar 3,20.

5.1.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Fokus program adalah pengawasan dan pemeriksaan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi juga keanggotaannya yang berada di wilayah Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase koperasi yang berkualitas (IKK *Outcome*) sebesar 32,36 persen.

2. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Fokus program adalah peningkatan pemahaman, pengetahuan serta keterampilan guna peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi anggota koperasi yang wilayah keanggotaannya di Kota Pekalongan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase

koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota sebesar 10,48 persen.

3. Program Pengembangan UMKM

Fokus program adalah pengembangan umkm yang naik kelas dengan cara kemudahan izin, fasilitasi penguatan modal, pengembangan rantai pasokan usaha mikro serta skema jaringan pemasaran. Indikator yang akan dicapai yaitu Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK *Outcome*) sebesar 12,27 persen.

5.1.2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Fokus program adalah penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal serta penyusunan rencana umum penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 1 Dokumen.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Fokus program adalah penyelenggaraan promosi penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100 persen.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Fokus program adalah pelayanan serta pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal sebesar 3025 dokumen.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Fokus program adalah pengendalian, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan penanaman modal. Indikator yang akan dicapai yaitu Nilai Invetasi Baru pertahun sebesar 7,09 Milyar Rupiah.

5. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Fokus program adalah pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal secara terpadu satu pintu. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebesar 100 persen.

5.1.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Fokus program adalah peningkatan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina sebesar 94,81 Persen.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Fokus program adalah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan kejuaraan, partisipasi dan keikutsertaan dalam

pekan olahraga. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor sebesar 40,00 persen.

5.1.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan SDTD (Satu Data Terpadu Daerah). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral sebesar 100 Persen.

5.1.2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Fokus program adalah fasilitasi penilaian mandiri Indeks keamanan informasi dan lisensi sertifikat TLS. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan (*penetration testing*) sebesar 3,74 Persen.

5.1.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kebudayaan

Fokus program adalah pelindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan tradisi budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase *event* kesenian dan kebudayaan yang disiapkan sebesar 100 persen.

2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Fokus program adalah peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dan peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi sebesar 100 persen.

3. Program Pembinaan Sejarah

Fokus program adalah peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya sebesar 100 Persen.

4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Fokus program adalah inventarisasi benda cagar budaya. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK *Outcome*) sebesar 95,74 Persen.

5. Program Pengelolaan Permuseuman

Fokus program adalah pelindungan, pengembangan, dan pemanfataan koleksi secara terpadu, peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum dan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengunjung museum batik sebesar 8,29 Persen.

5.1.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pembinaan Perpustakaan

Fokus program adalah pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka, pembinaan perpustakaan dan

sosialisasi budaya baca serta literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat. Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun) dengan indeks sebesar 25.

5.1.2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Arsip

Fokus program adalah pemeliharaan, penyusutan dan pengawasan arsip dinamis, akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis serta pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik sebesar 100 Persen dan Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional (IKK *Outcome*) dengan indeks sebesar 80.

2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip

Fokus program adalah penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun, penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan kelurahan serta penilaian dan penetapan hasil alih media sesuai persyaratan penjaminan keabsahan arsip. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

5.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

5.1.3.1 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Fokus program adalah Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta Pemberdayaan Nelayan Kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI sebesar 1 persen dan Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI sebesar 1 persen.

2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Fokus program adalah pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil, serta penyediaan sarana prasarana pembudidayaan ikan. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya sebesar 3 persen.

3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Fokus program adalah pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, serta pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Peningkatan Jumlah Pengusaha Perikanan sebesar 12,2 persen dan Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant) sebanyak 2 pelaku usaha.

5.1.3.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Fokus program adalah pengelolaan destinasi, serta pengembangan daya tarik wisata. Indikator yang akan dicapai yaitu Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK *Outcome*) sebesar 12 Persen.

2. Program Pemasaran Pariwisata

Fokus program adalah penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya, serta peningkatan kerjasama kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Domestik per kebangsaan (IKK *Outcome*) sebesar 41,98 Persen.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Fokus program adalah pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi sebesar 51,28 persen.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Fokus program adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar sebesar 80 persen.

5.1.3.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

Fokus program adalah pengawasan dan pendampingan penggunaan sarana dan sarana pendukung pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Nilai produksi pertanian pertahun sebesar Rp. 55.783.120.000 dan Nilai produksi peternakan pertahun sebesar Rp. 199.662.000.000.

2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Fokus program adalah pembangunan, rehabilitasi serta pemeliharaan prasarana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian sebesar 100 persen.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Fokus program adalah operasional RPH, pemantauan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sebesar 5 persen.

4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota sebesar 100 persen.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Fokus program adalah fasilitasi atau rekomendasi izin usaha pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin sebesar 100 persen.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Fokus program adalah pelaksanaan penyuluhan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun sebesar 5 persen.

5.1.3.4 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

Fokus program adalah fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK *Outcome*) sebesar 76,93 persen.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Fokus program adalah pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya sebesar 100 persen.

3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Fokus program adalah pengendalian dan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya sebesar 100 persen.

4. Program Pengembangan Ekspor

Fokus program adalah pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase peningkatan volume ekspor sebesar 7,99 persen.

5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Fokus program adalah pelaksanaan Metrologi Legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK *Outcome*) sebesar 81,99 persen.

6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Fokus program adalah pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output) sebesar 6,42 persen.

5.1.3.5 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan pelaksanaan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK *Outcome*) sebesar 75,34 persen.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Fokus program adalah fasilitasi pengawasan perijinan bidang industri. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK *Outcome*) sebesar 25 persen.

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional. Indikator yang akan dicapai yaitu Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini (IKK *Outcome*) sebesar 100 persen.

5.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.1.4.1 Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Fokus program adalah penataan administrasi pemerintahan, fasilitasi pengeloaan bina mental spiritual, fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum, dan pengelolaan informasi hukum. Indikator yang akan dicapai yaitu Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu sebesar 100 persen, Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif sebesar 100 persen, dan Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat sebesar 100 persen.

2. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Fokus program adalah fasilitasi pengelolaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian serta perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil. Indikator yang akan dicapai yaitu Presentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan sebesar 100 Persen, Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 6 persen, dan Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa sebesar 100 persen.

5.1.4.2 Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

Fokus program adalah fasilitasi penyusunan perda dan pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu, peningkatan kapasitasi anggota legislative dan fasilitasi penjaringan aspirasi (reses). Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Perda yang ditetapkan sebesar 100 persen dan Persentase pembahasan dokumen penganggaran tepat waktu sebesar 100 persen.

5.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

5.1.5.1 Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tepat waktu serta penyediaan data perencanaan pembangunan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan triwulanan tepat waktu sebesar 100 Persen, Persentase penyediaan data-informasi perencanaan tepat waktu

sebesar 100 Persen, dan Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu sebesar 100 Persen.

2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Fokus program adalah penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan, sosial dan budaya, penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian dan infrastruktur wilayah, serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud sebesar 100 Persen, Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian sebesar 100 persen, dan Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur Wilayah sebesar 100 persen.

5.1.5.2 Keuangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus program adalah koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah, KUA dan PPAS, perubahan KUA dan perubahan PPAS, koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD, koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran, koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah, kas daerah, koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, pengelolaan kas daerah, koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd bulanan, triwulanan dan semesteran, konsolidasi laporan keuangan skpd, blud dan laporan keuangan pemerintah daerah, koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd provinsi, Indikator yang akan dicapai yaitu Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK *Outcome*) sebesar 7,50 Persen.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengeloaan barang milik daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Indeks pengelolaan aset baik (Persentase ketersediaan daftar aset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK *Outcome*) sebesar 100 Persen.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Fokus program adalah optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK *Outcome*) sebesar 5 Persen.

5.1.5.3 Kepegawaian

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah

Fokus program adalah pengembangan kompetensi ASN, pengelolaan *Assesment Center*, pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN, dan monitoring evaluasi kinerja ASN. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PNS berkembang karier sebesar 80 persen, Tingkat Pelaporan Kinerja ASN sebesar 100 persen, Persentase Keterisian Jabatan sebesar 90 persen, dan Persentase Keterpenuhan Formasi ASN sebesar 80 Persen.

5.1.5.4 Pendidikan Dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Fokus program adalah fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase PNS berkembang kompetensinya sebesar 100 persen.

5.1.5.5 Penelitian Dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Fokus program adalah pelaksanaan riset unggulan daerah serta pengelolaan jurnal dan website kelitbangan, fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah, dan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD sebesar 100 persen, Persentase Pemberdayaan Stakeholder Kelitbangan sebesar 100 persen, dan Skor Capaian Nilai RiDA (SiDA) sebesar 75 persen.

5.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

5.1.6.1 Inspektorat Daerah

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Fokus program adalah penyelenggaraan pengawasan internal pemerintah kinerja pemerintah daerah, keuangan pemerintah daerah dan monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sebesar 85 persen.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Fokus program adalah perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan, fasilitasi asistensi dan penilaian reformasi birokrasi, dan monitoring evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indikator yang akan dicapai yaitu Level Kapabilitas APIP dengan nilai sebesar 3.

5.1.7 Unsur Kewilayahan

5.1.7.1 Kecamatan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Fokus program adalah koordinasi pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Utara sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Selatan sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Barat sebesar 100 Persen, dan Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Wilayah Timur sebesar 100 Persen.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Fokus program adalah fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di kecamatan. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Selatan sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Barat sebesar 100 Persen, dan Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur sebesar 100 Persen, serta Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan sebesar 100 persen.

3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Selatan sebesar 100 Persen, Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Barat sebesar 100 Persen, dan Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Timur sebesar 100 Persen.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Fokus program adalah fasilitasi upaya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan Forkopimca (Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan). Indikator yang akan dicapai yaitu Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Utara sebesar 100 persen, Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Selatan sebesar 100 persen, Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Barat sebesar 100 persen, dan Tingkat kinerja Pemerintahan Umum Wilayah Timur sebesar 100 persen.

5.1.8 Unsur Pemerintahan Umum

5.1.8.1 Kesatuan Bangsa Dan Politik

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Fokus program adalah pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, penguatan ideologi dan bela negara. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap idiologi pancasila dan wawasan kebangsaan sebesar 100 persen.

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Fokus program adalah pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik. Indikator yang akan dicapai yaitu Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik sebesar 16 lembaga.

3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Fokus program adalah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat, serta penanganan konflik ormas. Indikator yang akan dicapai yaitu Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan sebesar 100 persen.

4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Fokus program adalah koordinasi, pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah. Indikator yang akan dicapai

yaitu Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami terntang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya sebesar 100 persen.

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Fokus program adalah optimalisasi penanganan kejadian terkait konflik sosial dan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah. Indikator yang akan dicapai yaitu persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial sebesar 100 persen.

5.1.9 Non Urusan

5.1.9.1 Non Urusan

Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fokus program adalah Penyediaan laporan capaian kinerja, layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah serta penyediaan layanan BLUD. indikator yang akan dicapai yaitu persentase ketersediaan laporan capaian kinerja sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100 persen, persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan BLUD sebesar 100 persen, persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD sebesar 100 persen, persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan sekretariat daerah sebesar 100 persen dan persentase pelayanan keprotokoleran sebesar 100 persen.

Tabel V-2 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Kota Pekalongan Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dinas Pendidikan				**233.787.353.000**								**275.942.196.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**233.787.353.000**								**275.942.196.000**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				**233.787.353.000**								**275.942.196.000**	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**161.429.301.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**172.591.061.000**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**99.750.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pendidikan**	**100 persen**	**149.810.000**	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	8.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		5.250.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	4.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		2.560.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		16 Laporan	87.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		142.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**159.905.426.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pendidikan**	**100 persen**	**171.036.465.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1431 Orang/bulan	159.382.234.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DTU-DAU, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		170.503.715.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	519.292.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		529.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	3.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		3.750.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**87.880.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pendidikan**	**100 persen**	**86.386.000**	
1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		186 Laporan	87.880.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		86.386.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**5.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pendidikan**	**100 persen**	**8.638.000**	
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		8.638.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**486.489.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pendidikan**	**100 persen**	**559.598.000**	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	123.322.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		118.598.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	11.217.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		11.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	82.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		72.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 Paket	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		13.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		3.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	117.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		150.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		4 Dokumen	127.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		182.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian penyediaan jasa penujang urusan pemerintahan daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**674.873.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pendidikan**	**100 persen**	**558.553.000**	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		7.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	290.997.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		276.553.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	376.876.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		275.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**169.883.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pendidikan**	**100 persen**	**191.611.000**	
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		27 Unit	61.030.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		50.611.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	58.853.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		91.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		101 Unit	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pendidikan		50.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase capaian SPM pendidikan**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**56.788.452.000**							**100,00 persen**	**87.586.197.000**	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (IKK Outcome / SPM)**	**100.00 persen**	**100.00 persen**	**24.384.092.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100.00 persen**	**32.196.617.000**	
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun		2 Ruang	483.821.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		2 Unit	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		1.564.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2 Ruang	248.740.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		1.660.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia		71 Paket	88.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		177.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		35 Paket	143.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		355.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		71 Unit	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		106.500.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		8249 Peserta Didik	358.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		580.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		1091 Orang	2.768.076.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		2.684.800.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		103 Orang	7.680.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		7.100.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah		103 Satuan Pendidikan	126.840.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		303.500.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		103 Satuan Pendidikan	18.064.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DAK NON FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		12.922.744.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		242 Orang	25.720.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		58.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		206 Orang	13.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		142.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		4 Kegiatan	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		45.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		990 Paket	73.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		5 Unit	506.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		555.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		103 Satuan Pendidikan	73.395.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		306.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		71 Ruang	735.920.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		6.273.168.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		4 Paket	385.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		2.156.305.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (IKK Outcome / SPM)**	**100.00 persen**	**100.00 persen**	**20.133.716.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100.00 persen**	**31.207.263.000**	
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun		1 Ruang	490.204.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		300.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun		1 Unit	53.660.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		1.565.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		27 Ruang	2.389.415.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		5.200.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 Ruang	105.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		105.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2 Ruang	461.928.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		1.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		3 Ruang	919.863.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		900.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		3 Unit	350.539.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		580.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		180 Paket	80.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		700.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia		12 Paket	34.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		170.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		12 Paket	191.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		425.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		17 Unit	127.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		170.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik		850 Peserta Didik	277.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		580.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		105 Orang	293.470.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		332.200.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		17 Orang	9.630.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		7.100.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan		30 Satuan Pendidikan	166.770.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		496.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		30 Satuan Pendidikan	13.215.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DAK NON FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		10.127.372.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		96 Orang	15.280.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		23.175.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		60 Orang	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		51.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		4 Kegiatan	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		5.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar		30 Satuan Pendidikan	40.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		172.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		1 Ruang	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		4.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		1500 Paket	109.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		633.500.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		1 Ruang	127.657.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		1.740.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia		15 Paket	218.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		1.424.416.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (IKK Outcome / SPM)**	**100.00 persen**	**100.00 persen**	**8.609.274.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100.00 persen**	**17.550.430.000**	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun		1 Unit	186.736.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		555.123.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia		4 Paket	13.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		10.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia		4 Paket	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		80.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD		2 Orang	55.440.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		48.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		4 Orang	3.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		2.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		270 Satuan Pendidikan	230.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		905.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP		270 Satuan Pendidikan	6.021.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DAK NON FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		7.600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD		565 Orang	54.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		129.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		540 Orang	18.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		29.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		270 Dokume	56.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		26.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan		2 Dokumen	21.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		41.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun		2 Ruang	146.010.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		500.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		2 Kegiatan	14.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		20.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia		600 Paket	73.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		142.500.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		4 Unit	92.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		2 Unit	146.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		340.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia		4 Paket	65.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		80.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar		270 Satuan Pendidikan	73.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		6.121.307.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat		9 Ruang	1.318.588.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		900.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (IKK Outcome / SPM)**	**100.00 persen**	**100.00 persen**	**3.661.370.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100.00 persen**	**6.631.887.000**	
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		13 Orang	321.680.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		248.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi		1 Orang	2.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		1.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen		15 Satuan Pendidikan	76.840.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		420.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP		15 Satuan Pendidikan	2.467.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DAK NON FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		2.600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		30 Orang	8.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		20.400.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan		30 Orang	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		6.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		15 Dokumen	9.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		3.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah		1 Ruang	474.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		600.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia		400 Paket	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		300.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia		1 Paket	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		20.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar		1826 Peserta Didik	103.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		1.968.487.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia		85 Paket	60.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		105.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan		1 Unit	19.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		300.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia		1 Paket	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		40.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal jenjang PAUD/PNF dan Dikdas**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**83.800.000**							**100,00 persen**	**299.571.000**	
1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal PAUD/PNF**	**100 persen**	**100 persen**	**47.125.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualita layanan pendidikan baik formal, non formal, maupun lembaga pendidika keagamaan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**144.984.000**	
1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		1 Dokumen	6.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia		200 Buku	20.625.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		60.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya		10 Orang	13.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		44.984.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun		1 Dokumen	7.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		25.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**	**Persentase ketersediaan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar**	**100 persen**	**100 persen**	**36.675.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualita layanan pendidikan baik formal, non formal, maupun lembaga pendidika keagamaan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**154.587.000**	
1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun		1 Dokumen	6.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		15.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia		250 Buku	25.675.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		124.587.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun		1 Dokumen	4.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		15.000.000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**15.485.800.000**							**100,00 persen**	**15.465.367.000**	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Persentase ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan bersertifikasi pendidik pada satuan pendidikan dasar dan PAUD/PNF**	**100 persen**	**100 persen**	**15.485.800.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**15.465.367.000**	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		25 Dokumen	614.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		941.000.000	DINAS PENDIDIKAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		5 Laporan	14.871.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		14.524.367.000	DINAS PENDIDIKAN
	Dinas Kesehatan				**111.122.295.000**								**113.655.580.750**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**111.122.295.000**								**113.655.580.750**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**111.122.295.000**								**113.655.580.750**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**67.359.728.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**62.286.286.000**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**26.985.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Kesehatan**	**100 persen**	**24.850.000**	
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	8.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		2.750.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	3.485.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		1.650.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	15.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		20.450.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**65.452.026.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Kesehatan**	**100 persen**	**59.249.970.000**	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		484 Orang/bulan	65.365.341.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		59.164.320.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	83.455.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		84.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	3.230.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		1.650.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**5.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Kesehatan**	**100 persen**	**9.500.000**	
1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		9.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**330.700.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Kesehatan**	**100 persen**	**438.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	3.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		5.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	91.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		145.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	5.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		7.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	64.420.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		84.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	14.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		26.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	1.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		2.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		260 Laporan	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		168.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**1.167.587.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Kesehatan**	**100 persen**	**1.354.350.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	440.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		600.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	625.383.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		753.750.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	541.764.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		600.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**377.430.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Kesehatan**	**100 persen**	**1.209.616.000**	
1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		30 Unit	183.980.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		334.616.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	146.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		790.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	47.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kesehatan		85.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di puskesmas yang sesuai standar**	**90,00 persen**	**90,00 perse**	**41.322.472.000**							**90,00 persen**	**47.862.792.750**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Fasyankes (Puskesmas dan RSUD)**	**100 persen 100 persen**	**100 persen**	**13.379.107.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen 100 persen**	**14.714.921.000**	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		3 Unit	2.350.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		2.350.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar		1 Unit	3.367.515.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		79.730.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas		2 Unit	329.560.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		3.356.439.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya		1 Unit	89.930.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		428.188.725	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		5 Unit	790.710.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN DASAR, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		2.712.040.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar		77 Unit	191.724.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		582.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan		3 Paket	6.174.508.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		5.141.523.275	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan		12 Paket	85.160.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		65.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**100 persen**	**27.876.065.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**32.929.836.750**	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		6006 Orang	91.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		127.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		5462 Orang	141.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		196.000.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		18314 Orang	114.190.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		208.745.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		45000 Orang	72.380.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		144.446.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		210465 Orang	32.820.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		144.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		36783 Orang	19.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		39.415.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		76872 Orang	4.810.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		22.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		14148 Orang	4.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		22.500.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar		1013 Orang	8.410.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		20.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		6836 Orang	30.160.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		41.305.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar		16169 Orang	24.170.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		33.105.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		4 Dokumen	149.370.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		617.300.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		2 Dokumen	35.870.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		83.350.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		1 Dokumen	124.940.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		230.116.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		1 Dokumen	1.087.768.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		1.347.034.750	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		3 Dokumen	261.190.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		650.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		1 Dokumen	24.000.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT), PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		27.000.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat		1 Dokumen	34.490.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		87.400.000	DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya		2 Dokumen	1.605.987.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		1.780.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota		15 Unit	8.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		55.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah		2 Dokumen	23.360.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		80.620.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Terlaksananya pemeliharaan sarana komunikasi data dan informasi**	**100 persen**	**100 persen**	**16.430.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**76.280.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1 Dokumen	16.430.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		76.280.000	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Fasyankes yang diberikan rekomendasi tepat waktu**	**100 persen 100 persen**	**100 persen**	**50.870.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen 100 persen**	**141.755.000**	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		52 Unit	50.870.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		141.755.000	DINAS KESEHATAN
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek**	**95,00 persen**	**95,00 persen**	**708.181.000**							**95,00 persen**	**600.000.000**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase penerbitan rekomendasi Surat Ijin Praktek tenaga kesehatan tepat waktu**	**100 persen 100 persen**	**100 persen**	**708.181.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen 100 persen**	**600.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		2 Dokumen	708.181.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		600.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase sarana farmasi yang memenuhi standar**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**120.784.000**							**100,00 persen**	**678.502.000**	
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Persentase apotek, toko obat dan toko alat kesehatan yang dilakukan pengawasan**	**100 persen**	**100 persen**	**43.671.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**119.277.000**	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		2 Dokumen	43.671.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		119.277.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Persentase Pangan Industri Rumah Tangga yang dilakukan pengawasan**	**100 persen**	**100 persen**	**41.523.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**481.023.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		5 Dokumen	41.523.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		481.023.000	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	**Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) dan Depot Air Minum (DAM) yang dilakukan pengawasan**	**95persen**	**95 persen**	**35.590.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**95persen**	**78.202.000**	
1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		2 Dokumen	35.590.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		78.202.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Rumah Tangga Sehat**	**94,00 persen**	**94,00 persen**	**1.611.130.000**							**94,00 persen**	**2.228.000.000**	
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Posyandu dengan Strata Mandiri**	**35 persen**	**34 persen**	**1.566.090.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**35 persen**	**2.100.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		3 Dokumen	1.566.090.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		2.100.000.000	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Puskesmas yang melaksanakan Promosi Kesehatan**	**100 persen**	**100 persen**	**45.040.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**128.000.000**	
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		2 Dokumen	45.040.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		128.000.000	DINAS KESEHATAN
	RSUD Bendan				**105.563.530.000**								**110.790.827.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**105.563.530.000**								**110.790.827.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**105.563.530.000**								**110.790.827.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja**	**100 persen**	**100 persen**	**103.181.810.000**							**100 persen**	**100.872.682.000**	
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**12.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**RSUD BENDAN**	**100 persen**	**11.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	RSUD BENDAN		1.500.000	RSUD BENDAN
1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	RSUD BENDAN		1.500.000	RSUD BENDAN
1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10 Laporan	8.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	RSUD BENDAN		8.000.000	RSUD BENDAN
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**49.300.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**RSUD BENDAN**	**100 persen**	**50.108.000**	
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	47.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	RSUD BENDAN		48.608.000	RSUD BENDAN
1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	RSUD BENDAN		1.500.000	RSUD BENDAN
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**20.510.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**RSUD BENDAN**	**100 persen**	**811.574.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15 Laporan	20.510.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	RSUD BENDAN		811.574.000	RSUD BENDAN
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 persen**	**100 persen**	**103.100.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**RSUD BENDAN, Masyarakat**	**100 persen**	**100.000.000.000**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	103.100.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	PENDAPATAN DARI BLUD	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	RSUD BENDAN, Masyarakat		100.000.000.000	RSUD BENDAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD yang sesuai standar**	**100 persen**	**100 persen**	**2.331.339.000**							**100 persen**	**9.890.546.000**	
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan**	**100 persen 100 persen**	**100 persen**	**2.250.000.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen 100 persen**	9.735.546.000	
1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit		1 Unit	750.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		0	RSUD BENDAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan		15 Unit	1.500.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		9.735.546.000	RSUD BENDAN
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan kesehatan RS tipe C**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**100 persen**	**21.109.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**45.000.000**	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		500 Orang	21.109.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		45.000.000	RSUD BENDAN
1.02.02.2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan pengukuran kepuasan pelanggan**	**100 persen 100 persen**	**100 persen**	**60.230.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**RSUD Bendan, Masyarakat**	**100 persen 100 persen**	**110.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		27 Unit	60.230.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	RSUD Bendan, Masyarakat		110.000.000	RSUD BENDAN
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga kesehatan di RSUD yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan**	**100 persen**	**100 persen**	**50.381.000**							**100 persen**	**27.599.000**	
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase perawat yang terkredensial**	**100 persen 100 persen**	**100 persen**	**38.571.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**RSUD Bendan**	**100 persen 100 persen**	**13.799.500**	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		12 Dokumen	38.571.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	RSUD Bendan		13.799.500	RSUD BENDAN
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perawat/bidan yang bersertifikat pelatihan pengembangan kompetensi**	**20persen**	**20 persen**	**11.810.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**RSUD Bendan**	**20persen**	**13.799.500**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya		90 Orang	11.810.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	RSUD Bendan		13.799.500	RSUD BENDAN
	Puskesmas Bendan				**3.375.725.000**								**3.375.725.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.375.725.000**								**3.375.725.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3.375.725.000**								**3.375.725.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**2.580.000.000**							**100,00 persen**	**2.580.000.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 persen**	**100 persen**	**2.580.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**masyarakat**	**100 persen**	**2.580.000.000**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	2.580.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	masyarakat		2.580.000.000	PUSKESMAS BENDAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**92,00 persen**	**795.725.000**							**92,00 persen**	**795.725.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**100 persen**	**795.725.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**795.725.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	795.725.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat		795.725.000	PUSKESMAS BENDAN
	Puskesmas Kramatsari				**1.729.560.000**								**1.568.791.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.729.560.000**								**1.568.791.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.729.560.000**								**1.568.791.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.050.000.000**							**100,00 persen**	**889.287.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 persen**	**100 persen**	**1.050.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat**	**100 persen**	**889.287.000**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1.050.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Pasirkratonkrama	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		889.287.000	PUSKESMAS KRAMATSARI
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**92,00 persen**	**679.560.000**							**92,00 persen**	**679.504.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**100 persen**	**679.560.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**679.504.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	679.560.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Pasirkratonkramat	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat		679.504.000	PUSKESMAS KRAMATSARI
	Puskesmas Tirto				**2.135.353.000**								**1.970.921.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.135.353.000**								**1.970.921.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.135.353.000**								**1.970.921.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.280.000.000**							**100,00 persen**	**1.115.568.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 persen**	**100 persen**	**1.280.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat**	**100 persen**	**1.115.568.000**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1.280.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Pringrejo Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Tirto	PENDAPATAN DARI BLUD	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		1.115.568.000	PUSKESMAS TIRTO
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**92,00 persen**	**855.353.000**							**92,00 persen**	**855.353.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**100 persen**	**855.353.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**855.353.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	855.353.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Pringrejo Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Tirto	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat		855.353.000	PUSKESMAS TIRTO
	Puskesmas Medono				**2.125.238.000**								**1.815.228.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.125.238.000**								**1.815.228.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.125.238.000**								**1.815.228.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.300.000.000**							**100,00 persen**	**990.000.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 persen**	**100 persen**	**1.300.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Puskesmas Medono**	**100 persen**	**990.000.000**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1.300.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Sapuro Kebulen Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Medono	PENDAPATAN DARI BLUD	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Puskesmas Medono		990.000.000	PUSKESMAS MEDONO
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**92,00 persen**	**825.238.000**							**92,00 persen**	**825.228.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**100 persen**	**825.238.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**825.228.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	825.238.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Sapuro Kebulen Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Medono	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat		825.228.000	PUSKESMAS MEDONO
	Puskesmas Noyontaan				**1.621.032.000**								**1.621.032.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.621.032.000**								**1.621.032.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.621.032.000**								**1.621.032.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.113.430.000**							**100,00 persen**	**1.113.430.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 persen**	**100 persen**	**1.113.430.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**-**	**100 persen**	**1.113.430.000**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1.113.430.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Noyontaansari	PENDAPATAN DARI BLUD	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	-		1.113.430.000	PUSKESMAS NOYONTAAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**92,00 persen**	**507.602.000**							**92,00 persen**	**507.602.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**100 persen**	**507.602.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**507.602.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	507.602.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Noyontaansari	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		507.602.000	PUSKESMAS NOYONTAAN
	Puskesmas Tondano				**1.971.089.000**								**1.653.909.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.971.089.000**								**1.653.909.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.971.089.000**								**1.653.909.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100 persen**	**100 persen**	**1.312.180.000**							**100 persen**	**995.000.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 persen**	**100 persen**	**1.312.180.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**995.000.000**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1.312.180.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Poncol Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Gamer	PENDAPATAN DARI BLUD	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		995.000.000	PUSKESMAS TONDANO
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Layanan UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota**	**92 persen**	**92 persen**	**658.909.000**							**92 persen**	**658.909.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**100 persen**	**658.909.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**658.909.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	658.909.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Poncol Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Gamer	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		658.909.000	PUSKESMAS TONDANO
	Puskesmas Klego				**1.985.596.000**								**1.841.646.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.985.596.000**								**1.841.646.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.985.596.000**								**1.841.646.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.214.450.000**							**100,00 persen**	**1.070.500.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 persen**	**100 persen**	**1.214.450.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Puskesmas Klego Kota Pekalongan**	**100 persen**	**1.070.500.000**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1.214.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Kauman Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Klego	PENDAPATAN DARI BLUD	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Puskesmas Klego Kota Pekalongan		1.070.500.000	PUSKESMAS KLEGO
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**92,00 persen**	**771.146.000**							**92,00 persen**	**771.146.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**100 persen**	**771.146.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**771.146.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	771.146.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Kauman Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Klego	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat		771.146.000	PUSKESMAS KLEGO
	Puskesmas Sokorejo				**2.123.266.000**								**2.123.266.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.123.266.000**								**2.123.266.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.123.266.000**								**2.123.266.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.460.880.000**							**100,00 persen**	**1.460.880.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 persen**	**100 persen**	**1.460.880.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat**	**100 persen**	**1.460.880.000**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1.460.880.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Setono Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Kali Baros	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		1.460.880.000	PUSKESMAS SOKOREJO
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**92,00 persen**	**662.386.000**							**92,00 persen**	**662.386.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**100 persen**	**662.386.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**662.386.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	662.386.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Setono	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK PROVINSI	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat		662.386.000	PUSKESMAS SOKOREJO
	Puskesmas Dukuh				**1.741.815.000**								**1.705.813.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.741.815.000**								**1.705.813.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.741.815.000**								**1.705.813.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.095.000.000**							**100,00 persen**	**1.058.998.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 persen**	**100 persen**	**1.095.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Puskesmas Dukuh Kota Pekalongan**	**100 persen**	**1.058.998.000**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1.095.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Bandengan Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Padukuhan Krator	PENDAPATAN DARI BLUD	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Puskesmas Dukuh Kota Pekalongan		1.058.998.000	PUSKESMAS DUKUH
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**92,00 persen**	**646.815.000**							**92,00 persen**	**646.815.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**100 persen**	**646.815.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**646.815.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	646.815.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Bandengan Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Padukuhan Krator	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		646.815.000	PUSKESMAS DUKUH
	Puskesmas Krapyak Kidul				**2.055.917.000**								**2.191.719.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**2.055.917.000**								**2.191.719.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**2.055.917.000**								**2.191.719.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.480.000.000**							**100,00 persen**	**1.650.000.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 persen**	**100 persen**	**1.480.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Puskesmas Krapyak Kidul Kota Pekalongan**	**100 persen**	**1.650.000.000**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1.480.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Krapyak Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Degayu	PENDAPATAN DARI BLUD	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Puskesmas Krapyak Kidul Kota Pekalongan		1.650.000.000	PUSKESMAS KRAPYAK KIDUL
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**92,00 persen**	**575.917.000**							**92,00 persen**	**541.719.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**100 persen**	**575.917.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**541.719.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	575.917.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Krapyak Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Degayu	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		541.719.000	PUSKESMAS KRAPYAK KIDUL
	Puskesmas Kusuma Bangsa				**3.013.385.000**								**3.013.385.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.013.385.000**								**3.013.385.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3.013.385.000**								**3.013.385.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**2.176.800.000**							**100,00 persen**	**2.176.800.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 persen**	**100 persen**	**2.176.800.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat wilayah kerja UPT Puskesmas Kusuma Bangsa**	**100 persen**	**2.176.800.000**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	2.176.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	PENDAPATAN DARI BLUD	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat wilayah kerja UPT Puskesmas Kusuma Bangsa		2.176.800.000	PUSKESMAS KUSUMA BANGSA
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**92,00 persen**	**836.585.000**							**92,00 persen**	**836.585.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**100 persen**	**836.585.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat wilayah kerja UPT Puskesmas Kusuma Bangsa**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**836.585.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	836.585.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang, Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru, Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat wilayah kerja UPT Puskesmas Kusuma Bangsa		836.585.000	PUSKESMAS KUSUMA BANGSA
	Puskesmas Jenggot				**1.987.333.000**								**1.987.333.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.987.333.000**								**1.987.333.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.987.333.000**								**1.987.333.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.335.700.000**							**100,00 persen**	**1.335.700.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 persen**	**100 persen**	**1.335.700.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat**	**100 persen**	**1.335.700.000**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1.335.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	PENDAPATAN DARI BLUD	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		1.335.700.000	PUSKESMAS JENGGOT
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**92,00 persen**	**651.633.000**							**92,00 persen**	**651.633.000**	
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase layanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**100 persen**	**651.633.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**651.633.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	651.633.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat		651.633.000	PUSKESMAS JENGGOT
	Puskesmas Pekalongan Selatan				**3.260.381.000**								**4.878.151.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.260.381.000**								**4.878.151.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**3.260.381.000**								**4.878.151.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**2.374.335.000**							**100,00 persen**	**2.020.695.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 persen**	**100 persen**	**2.374.335.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**MASYARAKAT DI WILAYAH UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN**	**100 persen**	**2.020.695.000**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	2.374.335.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	PENDAPATAN DARI BLUD	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	MASYARAKAT DI WILAYAH UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN		2.020.695.000	PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**92,00 perse**	**886.046.000**							**92,00 persen**	**2.857.456.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**100 persen**	**886.046.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**MASYARAKAT DI WILAYAH UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**2.857.456.000**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	886.046.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DANA TRANSFER KHUSUS-DAK NON FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	MASYARAKAT DI WILAYAH UPT PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN		2.857.456.000	PUSKESMAS PEKALONGAN SELATAN
	Puskesmas Buaran				**1.749.000.000**								**1.749.000.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**1.749.000.000**								**1.749.000.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**1.749.000.000**								**1.749.000.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.015.000.000**							**100,00 persen**	**1.015.000.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 persen**	**100 persen**	**1.015.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**-**	**100 persen**	**1.015.000.000**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1.015.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	PENDAPATAN DARI BLUD	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	-		1.015.000.000	PUSKESMAS BUARAN
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92 persen**	**92 persen**	**734.000.000**							**92 persen**	**734.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Layanan UKM dan UKP**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**100 persen**	**734.000.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**734.000.000**	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas		4 Dokumen	734.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		734.000.000	PUSKESMAS BUARAN
	Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu				**453.074.000**								**1.321.886.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**453.074.000**								**1.321.886.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**453.074.000**								**1.321.886.000**	
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan layanan BLUD**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**220.000.000**							**100,00 persen**	**421.661.000**	
1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan Pelayanan BLUD**	**100 persen**	**100 persen**	**220.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**421.661.000**	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	220.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		421.661.000	BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase penduduk yang memanfaatkan layanan UKM dan UKP rujukan tingkat kabupaten/kota**	**92,00 persen**	**92,00 persen**	**233.074.000**							**92,00 persen**	**900.225.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Layanan BPSJ**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**100 persen**	**233.074.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen 100 persen 100 persen**	**900.225.000**	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya		1 Dokumen	233.074.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAAN NYA BIDANG KESEHATAN	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		900.225.000	BALAI PELAYANAN DAN SAINTIFIKASI JAMU
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				**54.761.045.000**								**87.286.484.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**54.761.045.000**								**87.286.484.000**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				**54.761.045.000**								**87.286.484.000**	
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**13.415.027.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**12.137.180.000**	
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**19.680.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPUPR**	**100 persen**	**16.239.000**	
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	5.220.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		1.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	2.460.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		1.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		13.239.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**6.725.548.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPUPR**	**100 persen**	**7.878.647.000**	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		65 Orang/bulan	6.628.268.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		7.782.147.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	95.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		95.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	2.280.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		1.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**25.110.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**34.881.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	25.110.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		34.881.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**13.410.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPUPR**	**100 persen**	**22.313.000**	
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		9.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		60 Orang	8.410.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		12.813.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**447.130.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPUPR**	**100 persen**	**412.282.000**	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	3.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		3.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	182.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	83.590.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		110.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	21.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		30.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2.190.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50 Laporan	146.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		105.782.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		9 Dokumen	7.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		10.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**678.900.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPUPR**	**100 persen**	**4.000.000**	
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan		1 Unit	678.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		4.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**4.829.307.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPUPR**	**100 persen**	**3.000.701.000**	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	2.190.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		3.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	4.423.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		2.597.701.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	403.867.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**675.942.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPUPR**	**100 persen**	**768.117.000**	
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		48 Unit	548.452.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		496.723.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		10 Unit	43.670.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		71.394.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	47.320.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		70 Unit	36.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPUPR		50.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase sarpras pengendali banjir dan rob dalam kondisi baik**	**100 persen**	**100 persen**	**8.455.948.000**							**100 persen**	**19.122.666.000**	
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sarpras Pengendali Banjir dan Rob dalam kondisi baik**	**27unit**	**39 unit**	**7.551.208.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan**	**07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**27unit**	**16.849.351.000**	
1.03.02.2.01.0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi		10 Unit	1.155.258.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara		39 Unit	3.611.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		5.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		0,4 KM	400.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun		0,159 KM	365.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		4.749.351.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi		0,348 KM	800.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		2.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun		0,436 KM	1.000.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		1.800.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.02.2.01.0123	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi		2 Unit	219.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (IKK Output)**	**85.03persen**	**84.21 persen**	**904.740.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan**	**07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**85persen**	**2.273.315.000**	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi		0,151 KM	904.740.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		2.273.315.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Cakupan layanan air minum yang dikelola oleh pemerintah**	**90,90 persen**	**90,90 persen**	**2.692.452.000**							**90,90 persen**	**2.600.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) didaerah kab/kota dilaksanakan**	**100 persen**	**100 Persen**	**2.692.452.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**2.600.000.000**	
1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi		1 Unit	1.372.052.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		1.400.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		60 SR	1.320.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		1.200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan Regional**	**80,00 persen**	**80,00 persen**	**5.092.114.000**							**80,00 persen**	**700.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Ketersediaan Sarana Persampahan di Wilayah Kota**	**100 persen**	**80 Persen**	**5.092.114.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**700.000.000**	
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun		0,102 Ton/hari	5.092.114.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK outcome)**	**12,27 persen**	**12,27 persen**	**2.549.260.000**							**12,27 persen**	**4.495.596.000**	
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T (IKK Output)**	**60051unit**	**59951 unit**	**2.549.260.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**60051unit**	**4.495.596.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.05.2.01.0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan		0,08 M³/Hari	-	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		545.596.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.2.01.0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja		150 Rumah Tangga	119.802.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun		0 M³/Hari	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		1.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar		116 Rumah Tangga	2.329.458.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		1.100.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase drainase dalam kondisi baik**	**70,48 persen**	**70,48 persen**	**4.755.600.000**							**70,48 persen**	**6.818.974.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Panjang Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik**	**177142.18 meter**	**174642.18 meter**	**4.755.600.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan**	**07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**177142.18meter**	**6.818.974.000**	
1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi		8 Sistem Drainase Perkotaan	3.912.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		4.158.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun		2 Sistem Drainase Perkotaan	375.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		1.960.974.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		8 Sistem Drainase Perkotaan	468.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		700.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota**	**18,44 persen**	**18,44 persen**	**1.305.880.000**							**18,44 persen**	**2.663.368.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**Jumlah PBG yang diberikan oleh pemerintah Kab/Kota dalam Tahun Eksisting (IKK Output)**	**1950dokumen**	**340 dokumen**	**1.305.880.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan**	**07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**350dokumen**	**2.663.368.000**	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala		5 Bangunan Gedung	1.011.980.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		2.213.368.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung		2 Dokumen	184.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		130 Dokume	109.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)**	**85,48 persen**	**85,48 persen**	**16.084.720.000**							**85,48 persen**	**38.368.700.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik dan Sedang**	**132.809KM**	**131.137 KM**	**16.084.720.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**132.809KM**	**38.368.700.000**	
1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun		2 Dokumen	73.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		103.600.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi		1,4 KM	5.900.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Masyarakat Kota Pekalongan		22.091.300.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		5 Jembatan	250.780.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Masyarakat Kota Pekalongan		879.500.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya		150,607 KM	123.740.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Masyarakat Kota Pekalongan		103.600.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi		0,8 KM	5.630.020.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Masyarakat Kota Pekalongan		4.648.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		2,5 KM	4.107.180.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Masyarakat Kota Pekalongan		10.542.700.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Rasio Tenaga Bangunan yang memiliki sertifikat kompetensi**	**18,53 persen**	**18,53 persen**	**108.640.000**							**18,53 persen**	**155.000.000**	
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Jumlah pelatihan tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah Kabupaten/Kota**	**6kali**	**1 kali**	**71.640.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan**	**07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup**	**DPUPR**	**1kali**	**95.000.000**	
1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya		4 Lembaga	19.240.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	DPUPR		35.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih		40 Orang	52.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	DPUPR		60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase informasi jasa konstruksi yang tersedia**	**100 persen**	**100 Persen**	**37.000.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan**	**07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup**	**DPUPR**	**100 persen**	**60.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan		2 Dokumen	37.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	DPUPR		60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Kab/Kota**			**301.404.000**							**0**	**225.000.000**	
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang dilaksanakan**	**12Kali**	**12 Kali**	**98.550.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan**	**07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Kota Pekalongan**	**0Kali**	**0**	
1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota		1 Dokumen	98.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Kota Pekalongan		0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan**	**72kali**	**12 kali**	**184.604.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan**	**07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**12kali**	**200.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang		2 Dokumen	184.604.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang yang dilaksanakan**	**72kali**	**12 kali**	**18.250.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan**	**07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Kota Pekalongan**	**12kali**	**25.000.000**	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang		2 Dokumen	18.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Kota Pekalongan		25.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				**53.098.398.000**								**29.705.957.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**52.653.858.000**								**28.605.672.000**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				**52.653.858.000**								**28.605.672.000**	
1.04.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**4.498.682.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**5.004.493.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**16.864.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**100 persen**	**17.350.000**	
1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3.306.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		2.750.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.558.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		1.650.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		12.950.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**2.924.692.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**100 persen**	**3.504.754.000**	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		22 Orang/bulan	2.893.172.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		3.473.104.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	30.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		30.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.520.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		1.650.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**5.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**100 persen**	**9.500.000**	
1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		9.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**140.470.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**100 persen**	**209.568.000**	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	3.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	32.120.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		48.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	1.460.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		2.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	29.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		49.068.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	3.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		5.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	1.770.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		2.500.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		75 Laporan	68.620.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		98.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**1.171.586.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**100 persen**	**976.720.000**	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	1.320.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		1.800.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	962.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		758.200.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	207.866.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		216.720.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**240.070.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	**100 persen**	**286.601.000**	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		18 Unit	86.440.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		90.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	36.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		76.601.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	117.130.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		120.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni**	**100 persen**	**100 persen**	**1.352.512.000**							**100 persen**	**1.591.292.000**	
1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Data Rumah pada Kawasan Rawan Bencana yang disusun**	**6dokumen**	**1 dokumen**	**21.900.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktu yang merata dan berkualitas**	**06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh**	**Dinperkim Kota Pekalongan**	**1dokumen**	**60.000.000**	
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		1 Dokumen	21.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Dinperkim Kota Pekalongan		60.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.02.2.02	**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sosialisasi Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah**	**15kegiatan**	**3 kegiatan**	**32.850.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**3kegiatan**	**50.000.000**	
1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		60 Orang	7.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		10.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih		6 Orang	18.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		30.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.02.0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		2 Orang	7.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		10.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Persentase Rumah Layak Huni bagi Warga Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah (SPM/IKK Outcome)**	**100 persen**	**100 persen**	**169.410.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**281.292.000**	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi		4 Unit Rumah	96.410.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		181.292.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun		2 Unit Rumah	73.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.05	**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**Persentase Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	**100 persen**	**100 persen**	**1.128.352.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**1.200.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun		3 Laporan	1.128.352.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		1.200.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Luas kawasan permukiman kumuh**	**121,39 hektar**	**121,39 hekta**	**24.022.630.000**							**121,39 hektar**	**16.802.744.000**	
1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Persentase dokumen penataan kawasan permukiman kumuh yang disusun**	**100 persen**	**100 persen**	**170.460.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**250.000.000**	
1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi		2 Dokumen	109.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Kota Pekalongan		150.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		1 Dokumen	60.960.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Kota Pekalongan		100.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	**Luasan kawasan kumuh yang tertangani**	**508,47hektar**	**102 hektar**	**23.852.170.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**72,47hektar**	**16.552.744.000**	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki		100 Unit Rumah	2.436.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		1.000.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan		2 Ha	16.899.290.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		15.552.744.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		58 Unit	4.516.880.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Masyarakat Kota Pekalongan		0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Luas kawasan permukiman tidak kumuh**	**2075,41 hektar**	**2075,41 hektar**	**10.730.514.000**							**2075,41 hektar**	**4.592.098.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan Rumah Tidak Layak Huni**	**1.31persen**	**1.04 persen**	**10.730.514.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh**	**Warga Penghuni RTLH**	**1.31persen**	**4.592.098.000**	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki		743 Unit Rumah	10.730.514.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	Warga Penghuni RTLH		4.592.098.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (IKK Outcome)**	**63,04 persen**	**63,04 persen**	**12.049.520.000**							**63,04 persen**	**615.045.000**	
1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Persentase Perumahan yang Sudah Menyerahkan PSU**	**79.35persen**	**68.48 persen**	**12.049.520.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh**	**PSU Perumahan**	**79.35persen**	**615.045.000**	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		1 Dokumen	452.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	PSU Perumahan		230.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian		12 Lokasi	11.524.520.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DAK FISIK-BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN AFIRMASI-PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	PSU Perumahan		280.000.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		1 Laporan	73.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	06. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	PSU Perumahan		105.045.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**444.540.000**								**1.100.285.000**	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				**444.540.000**								**1.100.285.000**	
2.10.05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase permasalahan pertanahan yang tertangani**	**100 persen**	**100 persen**	**438.000.000**							**100 persen**	**1.091.192.000**	
2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase luasan bidang tanah yang terselesaikan ganti ruginya**	**73.35 persen**	**73.35 persen**	**438.000.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan**	**07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**73.35 persen**	**1.091.192.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	438.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		1.091.192.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase tindak lanjut penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**50 persen**	**50 persen**	**6.540.000**							**50 persen**	**9.093.000**	
2.10.06.2.01	**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee**	**50 persen**	**50 persen**	**6.540.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan**	**07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**50 persen**	**9.093.000**	
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah		2 Dokumen	6.540.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		9.093.000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				**11.813.808.000**								**12.701.854.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11.813.808.000**								**12.701.854.000**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**11.813.808.000**								**12.701.854.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**5.971.915.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**5.445.107.000**	
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**18.110.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Satpol P3KP**	**100 persen**	**62.450.000**	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	7.320.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Satpol P3KP		10.750.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Satpol P3KP		1.650.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	9.140.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Satpol P3KP		50.050.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**5.340.904.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Satpol P3KP**	**100 persen**	**4.578.591.000**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang/bulan	5.289.254.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Satpol P3KP		4.524.941.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	50.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Satpol P3KP		52.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Satpol P3KP		1.650.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**5.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Satpol P3KP**	**100 persen**	**9.500.000**	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Satpol P3KP		9.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**162.750.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Satpol P3KP**	**100 persen**	**225.441.000**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	5.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Satpol P3KP		7.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	22.210.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Satpol P3KP		35.941.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	5.840.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Satpol P3KP		10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	70.810.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Satpol P3KP		97.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	5.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Satpol P3KP		7.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	1.830.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Satpol P3KP		2.500.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		35 Laporan	51.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Satpol P3KP		65.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**126.929.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Satpol P3KP**	**100 persen**	**129.125.000**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	1.278.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Satpol P3KP		2.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	125.651.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Satpol P3KP		127.125.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**318.222.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan**	**100 persen**	**440.000.000**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		29 Unit	310.222.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan		400.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		15 Unit	8.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kota Pekalongan		40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK outcome)**	**85 persen**	**85 persen**	**4.968.603.000**							**85 persen**	**6.081.457.000**	
1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanganan Gangguan Trantibum (IKK Outcome)**	**100 persen**	**97 persen**	**1.052.490.000**			**02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**1.772.410.000**	
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		39 Dokumen	758.590.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonom Digital, Ekonomi Hijau, da Ekonomi Biru	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Masyarakat Kota Pekalongan		1.020.410.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		155 Orang	15.410.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonom Digital, Ekonomi Hijau, da Ekonomi Biru	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Masyarakat Kota Pekalongan		48.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan		2 Dokumen	91.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonom Digital, Ekonomi Hijau, da Ekonomi Biru	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Masyarakat Kota Pekalongan		148.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		300 laporan	31.390.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonom Digital, Ekonomi Hijau, da Ekonomi Biru	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Masyarakat Kota Pekalongan		106.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		1800 Lapora	155.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonom Digital, Ekonomi Hijau, da Ekonomi Biru	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Masyarakat Kota Pekalongan		450.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan (IKK Output)**	**120perda**	**20 perda**	**3.905.163.000**			**02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**20perda**	**4.289.496.000**	
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		5 Laporan	37.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonom Digital, Ekonomi Hijau, da Ekonomi Biru	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Masyarakat Kota Pekalongan		223.515.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP		12 Laporan	3.856.463.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonom Digital, Ekonomi Hijau, da Ekonomi Biru	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Masyarakat Kota Pekalongan		4.045.981.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		48 Laporan	10.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonom Digital, Ekonomi Hijau, da Ekonomi Biru	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Masyarakat Kota Pekalongan		20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS**	**21persen**	**18 persen**	**10.950.000**			**02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah**	**PPNS Kota Pekalongan**	**21persen**	**19.551.000**	
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda		4 Laporan	10.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonom Digital, Ekonomi Hijau, da Ekonomi Biru	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	PPNS Kota Pekalongan		19.551.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM / IKK Outcome)**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**873.290.000**							**100,00 persen**	**1.175.290.000**	
1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase penanganan aduan kebakaran dan kedaruratan sipil non kebakaran**	**100 persen**	**100 persen**	**751.270.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**975.239.000**	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulang an Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya		3 Dokumen	18.070.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		53.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		180 Laporan	680.270.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		837.239.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		42 Orang	10.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		20.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya		2 Desa/Kelurahan	5.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		10.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		2 Unit	10.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		15.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		3 Dokumen	25.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		40.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	**Persentase sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dianalisis kesiapannya**	**100 persen**	**100 persen**	**29.200.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**45.466.000**	
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran		9 Dokumen	29.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		45.466.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Persentase partisipasi masyarakat dalam penanganan dan pencegahan kebakaran**	**100 persen**	**100 persen**	**53.020.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**81.839.000**	
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya		80 Orang	30.660.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		50.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		21 Desa/Kelural an	22.360.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		31.839.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Persentase penanganan kondisi membahayakan**	**100 persen**	**100 persen**	**39.800.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**72.746.000**	
1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia		12 Laporan	39.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		72.746.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				**3.564.489.000**								**3.370.513.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**3.564.489.000**								**3.370.513.000**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				**3.564.489.000**								**3.370.513.000**	
1.05.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**2.082.849.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**2.067.004.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**17.984.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**100 Persen**	**17.722.000**	
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	4.836.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		2.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.148.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Laporan	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		13.722.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.722.562.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**100 Persen**	**1.509.642.000**	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		15 Orang/bulan	1.687.598.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.476.592.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	33.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		31.550.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.064.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**16.070.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintahar yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**100 Persen**	**22.000.000**	
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	7.070.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		9.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		50 Orang	9.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		12.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**92.900.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintahar yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**100 Persen**	**182.400.000**	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1.320.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		2.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7 Paket	7.990.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		58.400.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	730.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		5.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	19.710.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		30.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	6.570.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		9.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		24 Dokumen	1.830.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		2.500.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	54.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		75.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**113.683.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**100 Persen**	**125.840.000**	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	1.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.800.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	58.313.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		68.400.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	54.270.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		55.640.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**119.650.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**	**100 Persen**	**209.400.000**	
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		11 Unit	73.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		115.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	14.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	32.050.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		44.400.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**persentase korban bencana alam yang ditangani**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.481.640.000**							**100,00 persen**	**1.303.509.000**	
1.05.03.2.01	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM/IKK Outcome)**	**100 persen**	**100 Persen**	**51.180.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana**	**100 persen**	**65.926.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun		100 Orang	51.180.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		65.926.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM/IKK Outcome)**	**100 persen**	**100 Persen**	**873.940.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana**	**100 persen**	**946.610.000**	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya		3 Unit	10.830.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		100.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana		100 Kawasa	863.110.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		846.610.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM/IKK Outcome)**	**100 persen**	**100 Persen**	**510.890.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana**	**100 persen**	**150.040.000**	
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		1 Dokumen	125.040.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		125.040.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		2500 Orang	385.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		25.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana**	**100 persen**	**100 Persen**	**45.630.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana**	**100 persen**	**140.933.000**	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan		4 Kegiatan	27.380.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		50.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		1 Dokumen	18.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan yang terdampak bencana		90.933.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				**12.042.547.000**								**10.710.402.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**7.980.133.000**								**7.876.244.000**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				**7.980.133.000**								**7.876.244.000**	
1.06.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**3.649.209.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**4.153.760.000**	
1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**26.640.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**100 persen**	**16.363.000**	
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	8.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		2.750.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	5.720.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		1.650.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	12.420.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		11.963.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**2.610.150.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN**	**100 persen**	**3.352.604.000**	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20 Orang/bulan	2.567.467.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN		3.302.654.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	39.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN		48.300.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	3.383.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PEKALONGAN		1.650.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**5.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**100 persen**	**8.639.000**	
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		8.639.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**241.348.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**100 persen**	**312.853.000**	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	7.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	41.140.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		100.766.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	4.110.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		7.500.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	82.318.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		75.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	5.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		10.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	1.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2.500.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150 Laporan	100.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		107.087.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**365.321.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**100 persen**	**196.050.000**	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	1.760.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		2.400.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	177.561.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		128.450.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	186.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		65.200.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**400.750.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	**100 persen**	**267.251.000**	
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		69 Unit	200.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		223.351.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8 Unit	182.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		25.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		63 Unit	18.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		18.900.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan**	**75 persen**	**75 persen**	**386.432.000**							**75 persen**	**427.366.000**	
1.06.02.2.01	**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan**	**10persen**	**10 persen**	**182.140.000**			**06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalar percepatan penanggulangan kemiskinan**	**Kelompok Usaha Bersama (KUBE)**	**10persen**	**161.098.000**	
1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		340 Keluarga	182.140.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiata penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)		161.098.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif**	**75persen**	**75 persen**	**204.292.000**			**06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan**	**DINSOS P2KB**	**75persen**	**266.268.000**	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Orang	41.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	DINSOS P2KB		107.520.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Orang	130.872.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	DINSOS P2KB		158.748.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Lembaga	31.940.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	DINSOS P2KB		0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)**	**100 persen**	**100 persen**	**1.720.232.000**							**100 persen**	**1.475.572.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial**	**100 persen**	**100 Persen**	**1.161.926.000**			**06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**1.411.919.000**	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		80 Orang	456.696.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Pekalongan		214.572.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		80 Orang	643.860.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Pekalongan		1.197.347.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota		80 Orang	61.370.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Pekalongan		0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02	**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial**	**3.98Persen**	**3.82 Persen**	**558.306.000**			**06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**3.98Persen**	**63.653.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota		903 Orang	428.560.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Pekalongan		0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Orang	23.540.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Pekalongan		0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota		15 Orang	16.010.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Pekalongan		0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota		10 Orang	37.446.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Pekalongan		63.653.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		83 Orang	52.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Pekalongan		0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial**	**53,73 persen**	**53,73 persen**	**1.328.740.000**							**53,73 persen**	**982.056.000**	
1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase graduasi KPM PKH**	**10Persen**	**10 Persen**	**1.328.740.000**			**06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**10Persen**	**982.056.000**	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata		2000 Orang	564.920.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Pekalongan		646.650.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		950 Keluarga	763.820.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Pekalongan		335.406.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)**	**100 persen**	**100 persen**	**704.500.000**							**100 persen**	**487.399.000**	
1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial**	**100 persen**	**100 persen**	**704.500.000**			**06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**487.399.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota		2000 Orang	300.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Pekalongan		455.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota		2000 Orang	386.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Pekalongan		32.399.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota		2000 Orang	18.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Masyarakat Kota Pekalongan		0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan**	**100 persen**	**100 persen**	**191.020.000**							**100 persen**	**350.091.000**	
1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan**	**100 persen**	**100 persen**	**191.020.000**			**06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan**	**Taman Makam Pahlawan Kota Pekalongan**	**100 persen**	**350.091.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		1 Dokumen	128.110.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Taman Makam Pahlawan Kota Pekalongan		295.091.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota		1 Makam	62.910.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	02. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan	Taman Makam Pahlawan Kota Pekalongan		55.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.062.414.000**								**2.834.158.000**	
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				**4.062.414.000**								**2.834.158.000**	
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**247.600.000**							**100,00 persen**	**72.746.000**	
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)**	**100 persen**	**100 persen**	**247.600.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**72.746.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya		1 Dokumen	54.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Kota Pekalongan		72.746.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		27 Laporan	145.120.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DAK NON FISIK-BOKB-KI	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Kota Pekalongan		0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		8 Dokumen	48.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KI	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Kota Pekalongan		0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun**	**12 persen**	**12 persen**	**1.859.294.000**							**12 persen**	**2.601.871.000**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (IKK Output)**	**7.74perseribu**	**8.24 perseribu**	**969.070.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**7.74perseribu**	**1.845.020.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		2 Laporan	80.010.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KI	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		16 Laporan	196.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KI	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		1.735.020.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		48 Laporan	111.360.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KI	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		1 Dokumen	381.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DAK NON FISIK-BOKB-KB	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		110.000.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja		3 Organisasi	200.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KI	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia**	**20.8persen**	**20.6 persen**	**890.224.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**20.8persen**	**756.851.000**	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		12 Laporan	62.452.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KI	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		1026 Orang	427.747.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KI	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB		1 Unit	199.995.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DAK FISIK	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		470.376.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03.2.03.0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak		1 Laporan	200.030.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		286.475.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Unmeet need KB**	**13,00 persen**	**13,00 persen**	**1.955.520.000**							**13,00 persen**	**159.541.000**	
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**100 persen**	**100 persen**	**1.955.520.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**159.541.000**	
2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		5 Organisasi	468.720.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DAK NON FISIK-BOKB-KB	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		159.541.000	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		11 laporan	708.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KI	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan		10 laporan	778.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KI	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		0	DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Dinas Lingkungan Hidup				**32.393.284.000**								**32.385.800.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**32.393.284.000**								**32.385.800.000**	
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				**32.393.284.000**								**32.385.800.000**	
2.11.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**15.570.419.500**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**13.320.509.000**	
2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**17.120.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Lingkungan Hidup**	**100 Persen**	**23.051.000**	
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		2.750.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.640.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		1.650.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		18.651.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**10.170.149.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Lingkungan Hidup**	**100 Persen**	**10.280.620.000**	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		105 Orang/bulan	10.064.449.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		10.172.970.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	104.180.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		106.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.520.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		1.650.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**12.330.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Lingkungan Hidup**	**100 Persen**	**28.531.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	12.330.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		28.531.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**390.688.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Lingkungan Hidup**	**100 Persen**	**250.975.000**	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	9.026.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		5.700.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	60.964.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		57.900.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	730.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		8.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	141.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		82.300.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 Paket	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		24.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2.580.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		2.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		87 Laporan	140.688.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		70.075.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**564.433.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Lingkungan Hidup**	**100 Persen**	**554.735.000**	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	1.760.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		2.400.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	267.960.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		263.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	294.713.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		289.335.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4.415.699.500**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Lingkungan Hidup**	**100 Persen**	**2.182.597.000**	
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		19 Unit	173.149.500	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		162.982.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya		47 Unit	4.120.360.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		1.889.315.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	103.940.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		105.300.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		43 Unit	18.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Lingkungan Hidup		25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase limbah yang diolah**	**45.97 persen**	**45.97 persen**	**1.167.896.000**							**45.97 persen**	**3.595.020.000**	
2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaku usaha yang mengolah limbahnya**	**53.57persen**	**54.38 persen**	**805.556.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan**	**07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**53.57persen**	**952.518.000**	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		1 Dokumen	533.720.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		570.018.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 Dokumen	18.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		25.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan		200 Dokume	253.586.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		357.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.02	**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase upaya penanggulangan pencemaran air**	**76.47persen**	**76.47 persen**	**362.340.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan**	**07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**76.47persen**	**2.642.502.000**	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		2 Laporan	48.180.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		66.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		5 Titik	314.160.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		2.576.502.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase Ruang Terbuka Hijau**	**2,939 persen**	**2,939 persen**	**3.635.404.500**							**2,939 persen**	**4.191.994.000**	
2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Luas RTH Publik**	**110.355Ha**	**109.981 Ha**	**3.635.404.500**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan**	**07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**110.355Ha**	**4.191.994.000**	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		108,53 Ha	2.750.334.500	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		3.929.494.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota		34,1 Unit	885.070.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		262.500.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang diberikan**	**13,33 persen**	**13,33 persen**	**1.640.000**							**13,33 persen**	**2.273.000**	
2.11.05.2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	**Jumlah pelayanan rekomendasi persetujuan teknis dan perpanjangan persetujuan teknis penyimpanan sementara limbah B3**	**44persen**	**6 persen**	**1.640.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan**	**07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**7persen**	**2.273.000**	
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3		1 Laporan	1.640.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daera yang berkelanjutan	07. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Masyarakat Kota Pekalongan		2.273.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase usaha/kegiatan yang mendapat rekomendasi persetujuan teknis lingkungan dan persetujuan teknis PPLH**	**16,67 persen**	**16,67 persen**	**29.590.000**							**16,67 persen**	**61.518.000**	
2.11.06.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi terhadap ketaatan hukum lingkungan**	**60kegiatan**	**10 kegiatan**	**29.590.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**10kegiatan**	**61.518.000**	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan		1 Dokumen	11.230.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		23.368.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		67 Badan Usaha	18.360.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		38.150.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup**	**50,00 persen**	**50,00 persen**	**244.480.000**							**50,00 persen**	**322.836.000**	
2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah masyarakat/ komunitas peduli LH yang mendapat edukasi Lingkungan Hidup**	**5komunitas**	**5 komunitas**	**244.480.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**5komunitas**	**322.836.000**	
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1 Dokumen	38.330.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		90.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		700 Orang	105.050.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		232.836.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		5 Lembaga	101.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase perolehan penghargaan bidang LH**	**75,00 persen**	**75,00 persen**	**44.350.000**							**75,00 persen**	**86.368.000**	
2.11.09.2.01	**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat**	**18penghargaan**	**3 penghargaa**	**44.350.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**3pengharga an**	**86.368.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH		4 Entitas	44.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		86.368.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase pengaduan lingkungan hidup dari masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**10.630.000**							**100,00 persen**	**18.187.000**	
2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah kasus lingkungan yang ditangani**	**36kasus**	**6 kasus**	**10.630.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**6kasus**	**18.187.000**	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		18 Pengaduan	9.310.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		18.187.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota		1 Perkara	1.320.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase pengelolaan sampah**	**0,3 persen**	**0,3 persen**	**11.688.874.000**							**0,3 persen**	**10.787.095.000**	
2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**	**Persentase pengurangan sampah**	**18.19persen**	**17.94 persen**	**11.688.874.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktu yang merata dan berkualitas**	**08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerinta Provinsi Jawa Tengah**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**18.19persen**	**10.787.095.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat		35 Kelompok	497.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Masyarakat Kota Pekalongan		427.734.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada		1 Dokumen	2.606.445.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Masyarakat Kota Pekalongan		3.585.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		56324807 Ton	8.584.479.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Masyarakat Kota Pekalongan		6.774.361.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				**5.442.217.000**								**5.974.616.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.442.217.000**								**5.974.616.000**	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**5.442.217.000**								**5.974.616.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**4.715.027.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**5.152.947.000**	
2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**18.050.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Disdukcapil**	**100 Persen**	**39.219.000**	
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	2.523.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		10.750.000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.189.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		1.650.000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	14.338.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		26.819.000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.605.636.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Disdukcapil**	**100 Persen**	**3.439.120.000**	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		28 Orang/bulan	3.569.802.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		3.374.470.000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	34.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		63.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.634.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		1.650.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**8.880.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Disdukcapil**	**100 Persen**	**21.500.000**	
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		9.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		51 Orang	3.880.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		12.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**666.291.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Disdukcapil**	**100 Persen**	**1.254.736.000**	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	2.575.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		1.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	534.210.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		1.069.736.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	3.290.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		4.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	26.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		35.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 Paket	29.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2.240.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		4.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25 Laporan	68.576.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		100.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**264.903.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Disdukcapil**	**100 Persen**	**297.801.000**	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	2.190.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		3.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	136.505.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		110.100.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	126.208.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		184.701.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**151.267.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Disdukcapil**	**100 Persen**	**100.571.000**	
2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		14 Unit	94.257.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		56.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	19.350.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		23.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		28 Unit	37.660.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Disdukcapil		21.571.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rata-rata ketercapaian pelayanan pendaftaran penduduk**	**87,07 persen**	**87,07 persen**	**313.670.000**							**87,07 persen**	**351.135.000**	
2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah penerbitan dokumen pendaftaran penduduk**	**425259dokumen**	**415016 dokumen**	**313.670.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat**	**425259dokumen**	**351.135.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		46000 Dokumen	284.583.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		283.635.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1 Laporan	16.473.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		31.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		2 Laporan	12.614.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		36.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Rata-rata ketercapaian pelayanan pencatatan sipil**	**93,85 persen**	**93,85 persen**	**341.730.000**							**93,85 persen**	**291.975.000**	
2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah penerbitan dokumen pencatatan sipil**	**41886dokumen**	**6981 dokumen**	**341.730.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat**	**6981dokumen**	**291.975.000**	
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		9285 Dokumen	320.415.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		279.975.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan		1 Layanan	21.315.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		12.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (IKK Outcome)**	**12,00 OPD**	**12,00 OPD**	**71.790.000**							**12,00 OPD**	**178.559.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.04.2.03	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Penyajian data kependudukan (IKK Output)**	**2kali**	**2 kali**	**71.790.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat**	**2kali**	**178.559.000**	
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2 Laporan	22.220.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		76.000.000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		2 Laporan	18.540.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		80.559.000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan		1 Dokumen	31.030.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		22.000.000	DINAS KEPENDUDUKA N DAN PENCATATAN SIPIL
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak				**5.467.058.000**								**5.703.080.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.467.058.000**								**5.703.080.000**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				**514.261.000**								**350.791.000**	
2.08.02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender**	**9,24 persen**	**9,24 persen**	**150.940.000**							**9,24 persen**	**98.798.000**	
2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Sub Kegiatan yang responsif gender**	**16.67persen**	**16.67 persen**	**14.960.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhada tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anal yang memerlukan perlindungan khusus**	**OPD se Kota Pekalongan, Masyarakat/Pe giat Pengarusutam aan Gender (PUG)**	**16.67persen**	**47.785.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Dokumen	14.960.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	OPD se Kota Pekalongan, Masyarakat/Pegiat Pengarusutamaan Gender (PUG)		47.785.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga Kemasyarakatan yang mendapatkan sosialisasi/ advokasi Pemberdayaan Perempuan**	**40.00 persen**	**33.33 persen**	**15.590.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Forkom Puspa (Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)**	**40.00 persen**	**36.373.000**	
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	15.590.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga Kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Forkom Puspa (Forum Komunikasi Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak)		36.373.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan dharma wanita**	**100.00 persen**	**100.00 persen**	**120.390.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan**	**100.00 persen**	**14.640.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan		1 Lembaga	120.390.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	Dharma Wanita Persatuan Kota Pekalongan		14.640.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio kekerasan terhadap perempuan (IKK Outcome)**	**15.01 persen**	**15.01 persen**	**78.062.000**							**15.01 persen**	**64.476.000**	
2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian pencegahan kekerasan terhadap perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota**	**100 persen**	**100 persen**	**9.770.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**Masyarakat, Tim LPPAR, Tim PPKBM PUSPAGA ELPePar, Tim HIMPSI**	**100 persen**	**28.639.000**	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota		3 Dokumen	9.770.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	Masyarakat, Tim LPPAR, Tim PPKBM PUSPAGA ELPePar, Tim HIMPSI		28.639.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani (IKK Output)**	**100.00 persen**	**100.00 persen**	**68.292.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**Masyarakat/Korban Tindak Kekerasan**	**100.00 persen**	**35.837.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota		24 Layanan	68.292.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	Masyarakat/Korban Tindak Kekerasan		35.837.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Dekela (desa/kelurahan layak anak)**	**48,15 persen**	**48,15 persen**	**215.615.000**							**48,15 persen**	**137.872.000**	
2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase forum anak yang aktif**	**40.63persen**	**34.38 persen**	**215.615.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**Forum Anak Kota, Masyarakat (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat), Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Sederajat**	**40.63persen**	**137.872.000**	
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		300 Orang	98.225.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	Forum Anak Kota, Masyarakat (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat), Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Sederajat		40.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		5 Dokumen	96.770.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	Forum Anak Kota, Masyarakat (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat), Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Sederajat		55.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		2 Dokumen	20.620.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	Forum Anak Kota, Masyarakat (Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat), Sekolah, Guru dan Siswa Sekolah Menengah Tingkat Pertama/Sederajat		42.872.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**persentase pengaduan kasus anak yang terlayani**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**69.644.000**							**100,00 persen**	**49.645.000**	
2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota (IKK Outcome)**	**100.00 persen**	**100.00 Persen**	**9.780.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**Sekolah dan Siswa**	**100.00 persen**	**15.000.000**	
2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu		1 Kegiatan	9.780.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	Sekolah dan Siswa		15.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten / kota (IKK Outcome)**	**100 persen**	**100 persen**	**53.232.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**Anak Korban Kekerasan, Keluarga dan Masyarakat**	**100 persen**	**23.225.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan		24 Layanan	53.232.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	Anak Korban Kekerasan, Keluarga dan Masyarakat		23.225.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**100 persen 100 persen**	**100 persen**	**6.632.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus**	**PATBM Kelurahan, Dinas/Instansi /Lembaga terkait**	**100 persen 100 persen**	**11.420.000**	
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK		25 Orang	6.632.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	05. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus	PATBM Kelurahan, Dinas/Instansi /Lembaga terkait		11.420.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				**4.952.797.000**								**5.352.289.000**	
2.13.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**3.666.753.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**3.412.954.000**	
2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100.00 Persen**	**100.00 Persen**	**20.762.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak**	**100.00 Persen**	**19.686.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	7.204.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		4.186.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.558.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		1.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		14.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100.00 Persen**	**100.00 Persen**	**2.558.067.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak**	**100.00 Persen**	**2.823.407.000**	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		20 Orang/bulan	2.517.093.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		2.775.257.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	39.530.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		46.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.444.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		1.650.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100.00 Persen**	**100.00 Persen**	**3.650.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak**	**100.00 Persen**	**8.639.000**	
2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	3.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		8.639.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100.00 Persen**	**100.00 Persen**	**192.256.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak**	**100.00 Persen**	**198.220.000**	
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	1.710.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		750.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	44.952.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		26.720.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	2.050.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		750.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	38.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		22.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	4.380.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		5.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2.530.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		2.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150 Laporan	98.390.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		140.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100.00 Persen**	**100.00 Persen**	**270.268.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak**	**100.00 Persen**	**184.956.000**	
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	2.520.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		2.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	107.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		78.856.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	160.348.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		103.700.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100.00 Persen**	**100.00 Persen**	**621.750.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak**	**100.00 Persen**	**178.046.000**	
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		16 Unit	71.960.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		65.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	535.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		102.246.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		69 Unit	14.490.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Pringrejo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		10.800.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase ketercapaian Fasilitasi Kerjasama TNI dan kelurahan**	**83,33 persen**	**83,33 perse**	**557.400.000**							**83,33 persen**	**1.240.847.000**	
2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**Persentase Fasilitasi Kerja sama TNI dan Kelurahan**	**66.67perse n**	**11.11 perse**	**557.400.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**11.11persen**	**1.240.847.000**	
2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		4 Dokumen	557.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		1.240.847.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase kelurahan dengan kriteria "cepat berkembang"**	**88.89 persen**	**88.89 perse**	**32.528.000**							**88.89 persen**	**50.164.000**	
2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Persentase kinerja administrasi kelurahan**	**100.00 persen**	**100.00 persen**	**32.528.000**			**#N/A**	**#N/A**	**#N/A**	**Kelurahan**	**100.00 persen**	**50.164.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		2 Dokumen	32.528.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	#N/A	#N/A	#N/A	Kelurahan		50.164.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif dalam pemberdayaan masyarakat**	**97.75 persen**	**97.75 persen**	**696.116.000**							**97.75 persen**	**648.324.000**	
2.13.05.2.01	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan**	**100.00 persen**	**100.00 persen**	**696.116.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat**	**100.00 persen**	**648.324.000**	
2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		1 Dokumen	130.182.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat		165.475.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1 Lembaga	54.894.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat		158.375.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		1 Laporan	49.770.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat		86.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		1 Laporan	34.980.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat		68.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		1 Dokumen	426.290.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK), Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat		170.274.000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Dinas Perhubungan				**27.272.850.000**								**26.495.918.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**27.272.850.000**								**26.495.918.000**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				**27.272.850.000**								**26.495.918.000**	
2.15.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**21.525.040.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**19.330.918.000**	
2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**21.528.200**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Perhubungan**	**100 persen**	**21.500.000**	
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3.741.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		3.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.763.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		2.500.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	16.024.200	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		16.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**4.585.024.800**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Perhubungan**	**100 persen**	**4.927.000.000**	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang/bulan	4.496.695.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		4.839.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	86.695.800	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		86.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.634.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		2.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**20.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Perhubungan**	**100 persen**	**40.000.000**	
2.15.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**5.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Perhubungan**	**100 persen**	**160.000.000**	
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		160.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**556.620.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Perhubungan**	**100 persen**	**685.000.000**	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	3.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	51.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		75.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	11.870.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		7.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	298.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		325.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	111.840.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		170.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2.220.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		2.500.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	77.940.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**65.700.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Perhubungan**	**0persen**	**165.887.000**	
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 Unit	65.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		165.887.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**15.829.749.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Perhubungan**	**100 persen**	**12.641.531.000**	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	1.320.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		2.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	15.481.570.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		12.318.531.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	346.859.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		321.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**441.418.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Perhubungan**	**100 persen**	**690.000.000**	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		34 Unit	336.348.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	62.050.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		350.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		61 Unit	43.020.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Perhubungan		40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase ketersediaan fasilitas LLAJ**	**97,00 persen**	**97,00 persen**	**5.747.810.000**							**97,00 persen**	**7.165.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.02.2.01	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ**	**100 persen**	**100 persen**	**2.856.700.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**	**Pengguna Jalan**	**100 persen**	**2.965.000.000**	
2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		1 Dokumen	25.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pengguna Jalan		65.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		38 Dokumen	2.831.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pengguna Jalan		2.900.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah penyediaan perlengkapan jalan**	**4jenis**	**4 jenis**	**1.868.270.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**	**Pengguna Jalan**	**4jenis**	**2.804.000.000**	
2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun		99 Unit	649.470.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pengguna Jalan		500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Unit	215.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pengguna Jalan		790.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		15 Unit	803.680.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Pengguna Jalan		1.214.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara		12 Unit	200.020.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Pengguna Jalan		300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Jumlah pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**1kali**	**1 kali**	**21.900.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**	**Pengguna Angkutan**	**1kali**	**100.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara		2 Unit	21.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Pengguna Angkutan		100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah pembinaan dan pengawasan Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaran dan Pembangunan Fasilitas Parkir dilaksanakan**	**1080kali**	**180 kali**	**237.880.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**	**Pengguna Jalan**	**180kali**	**400.000.000**	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		4 Laporan	237.880.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Pengguna Jalan		400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala (IKK Output)**	**65.06persen**	**65.12 persen**	**177.180.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**	**Pengguna Jalan**	**65.06persen**	**299.000.000**	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia		2980 Unit	15.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pengguna Jalan		25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		2787 Dokumen	72.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pengguna Jalan		170.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara		9 Unit	89.380.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Pengguna Jalan		104.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan**	**92persen**	**92 persen**	**535.870.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**	**Pengguna Jalan**	**92persen**	**502.000.000**	
2.15.02.2.06.0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		3 Dokumen	25.020.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Pengguna Jalan		32.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		3 Laporan	16.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Pengguna Jalan		30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi		12 Laporan	494.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Pengguna Jalan		440.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07	**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas (andalalin)**	**83persen**	**83 persen**	**10.000.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**	**Pengguna Jalan**	**83persen**	**15.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		4 Laporan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Pengguna Jalan		15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan**	**12kegiatan**	**2 kegiatan**	**20.510.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerinta Provinsi Jawa Tengah**	**Pengguna Jalan**	**2kegiatan**	**30.000.000**	
2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota		1 Laporan	13.510.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Pengguna Jalan		20.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		1 Laporan	7.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Pengguna Jalan		10.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Jenis Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang antar kota dalam satu daerah Kab/Kota yang difasilitasi**	**3jenis**	**3 jenis**	**19.500.000**			**03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerinta Provinsi Jawa Tengah**	**Pengguna Jalan**	**3jenis**	**50.000.000**	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1 Laporan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Pengguna Jalan		25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia		1 Unit	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	03. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	08. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regiona yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tenga	Pengguna Jalan		25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Dinas Komunikasi dan Informatika				**12.758.794.000**								**67.000.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**12.758.794.000**								**67.000.000**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**12.566.784.000**								**67.000.000**	
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**5.705.790.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**67.000.000**	
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**21.257.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**100 persen**	**0**	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	7.494.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.763.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**4.345.643.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**100 persen**	**0**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		34 Orang/bulan	4.300.101.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	43.870.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.672.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**72.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**100 persen**	**67.000.000**	
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		100 Orang	67.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		67.000.000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**291.496.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**100 persen**	**0**	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	2.990.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	71.460.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	4.686.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	81.160.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	29.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	11.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		80 Laporan	90.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**632.380.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**100 persen**	**0**	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	501.220.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	128.760.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**343.014.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**	**100 persen**	**0**	
2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		24 Unit	200.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	54.614.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		50 Unit	87.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Komunikasi dan Informatika		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase penyelesaian permohonan informasi publik**	**100 persen**	**100 persen**	**4.542.566.000**							**100 persen**	**0**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan Daerah**	**92,50persen**	**90 persen**	**4.542.566.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan ASN**	**92persen**	**0**	
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media		12 Laporan	836.152.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan ASN		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo		5 Komunitas	43.660.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan ASN		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan		50 Permohonan	151.980.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan ASN		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik		100 Persentase	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan ASN		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah		12 Rekomendas	433.710.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan ASN		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis		2 Media	2.927.568.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan ASN		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik		12500 Konte	129.496.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan ASN		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Indeks Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi**	**3,20 indeks**	**3,20 indeks**	**2.318.428.000**							**3,20 indeks**	**0**	
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase unit kerja yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo (IKK Output)**	**66.06persen**	**64.24 persen**	**20.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**ASN dan Masyarakat**	**66.06persen**	**0**	
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa		12 Dokumen	20.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN dan Masyarakat		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (IKK Output)**	**51,40persen**	**9.35 persen**	**2.298.428.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**ASN dan Masyarakat**	**9.35persen**	**0**	
2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional		2 Aplikasi	79.420.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN dan Masyarakat		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo		2 Dokumen	16.430.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN dan Masyarakat		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda		3 Laporan	107.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN dan Masyarakat		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan		2 Dokumen	77.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN dan Masyarakat		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah		3 Aplikasi	375.448.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN dan Masyarakat		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		181 Perangkat Daerah	1.404.350.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN dan Masyarakat		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional		5 Layanan	49.470.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN dan Masyarakat		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE		10 Dokumen	167.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN dan Masyarakat		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan		3 Aplikasi	19.710.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN dan Masyarakat		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				**86.960.000**								**0**	
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**86.960.000**							**100,00 persen**	**0**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketercapaian kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**100 persen**	**100 persen**	**86.960.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**100 persen**	**0**	
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata		15 Dokumen	50.910.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik		10 Dokumen	36.050.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				**105.050.000**								**0**	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan**	**3,74 persen**	**3,74 persen**	**105.050.000**							**3,74 persen**	**0**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Sistem Elektronik yang telah diamankan dengan sertifikat elektronik**	**56.07persen**	**9.35 persen**	**78.420.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**9.35persen**	**0**	
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan		2 Dokumen	7.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		4 Laporan	51.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi		30 Perangka Daerah	19.220.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02.2.02	**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kelancaran pengiriman dan penerimaan naskah dinas melalui jaring komunikasi sandi**	**100 persen**	**100 persen**	**26.630.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**100 persen**	**0**	
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi		30 Perangka Daerah	26.630.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		0	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				**5.319.645.000**								**6.963.162.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**5.319.645.000**								**6.963.162.000**	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				**5.319.645.000**								**6.963.162.000**	
2.18.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**3.763.374.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**5.218.727.000**	
2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**19.639.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPMPTSP**	**100 persen**	**23.950.000**	
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	5.097.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		2.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	2.542.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		3.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		18.450.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**2.676.895.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPMPTSP**	**100 persen**	**3.843.656.000**	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		23 Orang/bulan	2.639.417.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		3.793.556.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	36.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		48.600.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.178.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		1.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**3.650.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPMPTSP**	**100 persen**	**8.639.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	3.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		8.639.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**231.240.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPMPTSP**	**100 persen**	**461.224.000**	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	1.830.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		6.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	59.420.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		126.224.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	2.560.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		5.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	45.150.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 Paket	40.150.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	1.830.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		4.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	80.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**696.390.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPMPTSP**	**100 persen**	**659.829.000**	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	4.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		12.800.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	435.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		450.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	257.040.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		197.029.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**135.560.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPMPTSP**	**100 persen**	**221.429.000**	
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		8 Unit	89.060.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	31.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		26 Unit	14.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPMPTSP		21.429.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Penambahan Peraturan Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**1,00 dokumen**	**1,00 dokumen**	**51.180.000**							**1,00 dokumen**	**95.479.000**	
2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Peraturan penanaman modal yang disusun**	**6dokumen**	**1 dokumen**	**24.350.000**			**05. Melanjutkan Hilirisas dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumbe Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktu yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonom kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**penerima manfaat kegiatan**	**1dokumen**	**55.479.000**	
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		1 Dokumen	24.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	penerima manfaat kegiatan		55.479.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen potensi penanaman modal yang disusun**	**5dokumen**	**1 dokumen**	**26.830.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**penerima manfaat kegiatan**	**1dokumen**	**40.000.000**	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		1 Dokumen	26.830.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	penerima manfaat kegiatan		40.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**28.930.000**							**100,00 persen**	**81.839.000**	
2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal**	**11Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**28.930.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Masyarakat**	**2Kegiatan**	**81.839.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota		1 Dokumen	28.930.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat		81.839.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal**	**3025 dokumen**	**3025 dokumen**	**739.790.000**							**3025 dokumen**	**961.021.000**	
2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah laporan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan yang disusun**	**72bulan**	**12 bulan**	**739.790.000**			**05. Melanjutkan Hilirisas dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumbe Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktu yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonom kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Masyarakat di Kota Pekalongan**	**12bulan**	**961.021.000**	
2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		30 Dokumen	9.860.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat di Kota Pekalongan		20.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		3025 Pelaku Usaha	441.280.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat di Kota Pekalongan		558.820.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		110 Pelaku Usaha	62.460.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat di Kota Pekalongan		105.001.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha		60 Kegiatan Usaha	226.190.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat di Kota Pekalongan		277.200.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Nilai Investasi Baru pertahun**	**7,09 Miliar Rupiah**	**7,09 Miliar Rupiah**	**638.003.000**							**7,09 Miliar Rupiah**	**486.611.000**	
2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perusahaan yang dikunjungi dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal**	**848Perusahaan**	**200 Perusahaan**	**638.003.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Masyarakat**	**177Perusahaan**	**486.611.000**	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		2 Kegiatan Usaha.	107.446.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DAK NON FISIK	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat		117.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		290 Pelaku Usaha	348.703.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DAK NON FISIK	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat		267.231.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha		200 Kegiatan Usaha	181.854.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DANA TRANSFER KHUSUS-DAK NON FISIK	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat		102.380.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**98.368.000**							**100,00 persen**	**119.485.000**	
2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang di Olah, Kaji dan Dimanfaatkan**	**34aplikasi**	**12 Bulan**	**98.368.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumbe Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktu yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonom kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**DPMPTSP Kota Pekalongan**	**6aplikasi**	**119.485.000**	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		12 Dokumen	98.368.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	DPMPTSP Kota Pekalongan		119.485.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				**4.926.753.000**								**4.258.396.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**4.926.753.000**								**4.258.396.000**	
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				**741.097.000**								**522.605.000**	
2.23.02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)**	**25 indeks**	**25 indeks**	**741.097.000**							**25 indeks**	**522.605.000**	
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan (IKK Output)**	**3.33persen**	**2.67 persen**	**468.012.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualita layanan pendidikan baik formal, non formal, maupun lembaga pendidika keagamaan**	**Dinarpus**	**3.33persen**	**279.713.800**	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		3 Perpustakaa	85.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Dinarpus		34.626.200	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi		1 Layanan	151.181.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Dinarpus		20.802.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		1 Orang	43.785.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Dinarpus		55.126.200	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan		100 Eksemplar	74.410.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Dinarpus		65.627.700	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK		1 Perpustakaa	112.986.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Dinarpus		103.531.200	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Kenaikan Nilai Budaya Baca**	**34.45persen**	**34.11 persen**	**273.085.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**34.45persen**	**242.891.200**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan		1 Perpustakaa	188.380.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		90.369.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		1 Perpustakaa	35.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		67.869.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota		1 Orang	23.355.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		43.684.200	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat		1 Lokus	25.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	03. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untu peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan	Masyarakat Kota Pekalongan		40.969.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				**4.185.656.000**								**3.735.791.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.24.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**3.708.459.600**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**3.221.618.000**	
2.24.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**31.260.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**100 persen**	**13.350.000**	
2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		5.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		1.350.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	19.960.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		7.000.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**2.534.909.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**100 persen**	**2.410.283.000**	
2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/bulan	2.490.859.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		2.361.483.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	42.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		47.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		1.300.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**5.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**100 persen**	**9.500.000**	
2.24.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		9.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**199.986.600**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**100 persen**	**226.178.100**	
2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	3.389.500	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		4.686.300	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	76.877.600	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		109.657.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.24.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	1.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		1.686.300	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	42.828.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		60.500.100	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	6.691.500	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		5.931.500	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		2.186.300	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		35 Laporan	65.700.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		41.530.100	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**571.990.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**100 persen**	**388.493.900**	
2.24.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		1.800.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	414.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		302.636.705	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	157.090.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		84.057.195	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**365.314.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**	**100 persen**	**173.813.000**	
2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		14 Unit	100.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		78.478.800	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	236.734.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		67.834.200	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		61 Unit	28.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		27.500.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Persentase nilai pengawasan Kearsipan OPD dengan kategori baik**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**328.042.600**							**100,00 persen**	**350.333.000**	
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah Perangkat Daerah yang di Tata Arsip Dinamisnya**	**32.26persen**	**32.26 persen**	**253.850.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**32.26persen**	**261.221.000**	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan		1 Berkas	169.070.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		178.998.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Laporan	84.780.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		82.223.000	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Arsip Statis OPD yang diserahkan ke Depo Arsip**	**20persen**	**18 persen**	**55.242.600**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**20persen**	**42.630.640**	
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		25 Arsip	55.242.600	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		42.630.640	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Peningkatan Pemahaman Pengelola Arsip tentang Kearsipan**	**90persen**	**80 persen**	**18.950.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**90persen**	**46.481.360**	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	18.950.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		46.481.360	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat (IKK Outcome)**	**100 persen**	**100 persen**	**149.153.800**							**100 persen**	**163.840.000**	
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**	**Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK (IKK Output)**	**100 persen**	**100 persen**	**89.530.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**100 persen**	**97.483.950**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan		2500 Berkas	10.040.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		19.126.900	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		600 Arsip	79.490.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		78.357.050	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03.2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Persentase Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota**	**100 persen**	**100 persen**	**59.623.800**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**100 persen**	**66.356.050**	
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		1 Arsip	59.623.800	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		66.356.050	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	Dinas Kelautan dan Perikanan				**8.151.380.000**								**8.896.460.000**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**8.151.380.000**								**8.896.460.000**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**				**8.151.380.000**								**8.896.460.000**	
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**5.320.066.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**5.010.107.000**	
3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**24.500.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DKP Kota Pekalongan**	**100 persen**	**22.500.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		2.750.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		1.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	13.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		18.250.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**3.645.820.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DKP Kota Pekalongan**	**100 persen**	**4.248.149.000**	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 Orang/bulan	3.588.710.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		4.186.649.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	55.510.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		60.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		1.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.25.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**5.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DKP Kota Pekalongan**	**100 persen**	**9.500.000**	
3.25.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		9.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**244.280.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DKP Kota Pekalongan**	**100 persen**	**247.250.000**	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	7.670.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		7.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	71.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		41.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	4.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		4.250.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	42.760.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		69.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	6.570.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		7.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	1.830.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		2.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		70 Laporan	109.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		115.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**546.168.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DKP Kota Pekalongan**	**100 persen**	**263.647.000**	
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	1.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		1.800.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 Laporan	181.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		152.047.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Laporan	363.193.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		109.800.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**854.298.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DKP Kota Pekalongan**	**100 persen**	**219.061.000**	
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		25 Unit	126.358.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		120.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	698.620.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		76.561.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		25 Unit	29.320.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DKP Kota Pekalongan		22.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap bersumber dari TPI**	**1,00 persen**	**1,00 persen**	**2.227.388.000**							**1,00 persen**	**2.479.286.000**	
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Sarpras Perikanan Tangkap yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**5persen**	**5 persen**	**117.454.000**			**05. Melanjutkan Hilirisas dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumbe Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktu yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonom kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**5persen**	**30.550.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		2 Dokumen	117.454.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat Kota Pekalongan		30.550.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Nelayan Kecil yang dibina**	**10persen**	**10 persen**	**67.740.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Nelayan Kecil Kota Pekalongan**	**10persen**	**80.850.000**	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya		25 Orang	32.190.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Nelayan Kecil Kota Pekalongan		35.850.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya		19 Kelompok	35.550.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Nelayan Kecil Kota Pekalongan		45.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.25.03.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Bersumber dari TPI**	**6,15persen**	**1 persen**	**2.042.194.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**1persen**	**2.367.886.000**	
3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		353 Layanan	2.042.194.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat Kota Pekalongan		2.367.886.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya**	**3,00 persen**	**3,00 persen**	**181.988.000**							**3,00 persen**	**338.508.000**	
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Persentase ketercapaian aspek-aspek pengelolaan pembudidayaan ikan**	**100 persen**	**100 persen**	**181.988.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Pembudidaya Kota Pekalongan; DKP**	**100 persen**	**338.508.000**	
3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	8.470.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pembudidaya Kota Pekalongan; DKP		15.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2 Unit	12.410.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pembudidaya Kota Pekalongan; DKP		114.408.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan		1 Dokumen	8.970.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pembudidaya Kota Pekalongan; DKP		25.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Unit	126.588.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pembudidaya Kota Pekalongan; DKP		50.000.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat		25 Unit	25.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pembudidaya Kota Pekalongan; DKP		134.100.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Pelaku diversifikasi produk perikanan yang lulus inkubasi (tenant)**	**2,00 pelaku usaha**	**2,00 pelaku usaha**	**421.938.000**							**2,00 pelaku usaha**	**1.068.559.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.25.06.2.02	**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Persentase Fasilitasi Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**16.67persen**	**16.67 persen**	**36.740.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Poklahsar; Pelaku Usaha Perikanan; Masyarakat Kota Pekalongan**	**16.67persen**	**43.653.000**	
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko		345 Unit Usaha	36.740.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Poklahsar; Pelaku Usaha Perikanan; Masyarakat Kota Pekalongan		43.653.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**70persen**	**70 persen**	**385.198.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Pelaku Usaha Perikanan; Poklahsar; Masyarakat Kota Pekalongan**	**70persen**	**1.024.906.000**	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		2 Pelaku Usaha	385.198.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pelaku Usaha Perikanan; Poklahsar; Masyarakat Kota Pekalongan		1.024.906.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga				**20.861.161.000**								**14.878.147.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**9.650.050.000**								**6.698.634.000**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				**6.559.630.000**								**3.158.131.000**	
2.19.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina**	**94,81 persen**	**94,81 persen**	**1.081.970.000**							**94,81 persen**	**1.047.363.000**	
2.19.02.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	**Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri (IKK Outcome)**	**0.99Persen**	**0.88 Persen**	**366.970.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemuda Kota Pekalongan**	**0.99Persen**	**950.700.000**	
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda		30 Orang	10.950.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemuda Kota Pekalongan		500.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		3 Kegiatan	356.020.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemuda Kota Pekalongan		450.700.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.02.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (IKK Outcome)**	**0.621Persen**	**0.563 Persen**	**715.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemuda Kota Pekalongan**	**0.621Persen**	**96.663.000**	
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya		1 Organisasi	715.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemuda Kota Pekalongan		96.663.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Ketersediaan Sarpras Olahraga sesuai Jenis Cabor**	**40,00 persen**	**40,00 persen**	**5.477.660.000**							**40,00 persen**	**2.110.768.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase ketersediaan sarpras olahraga pada jenjang pendidikan**	**80.95Persen**	**76.19 Persen**	**893.370.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Altet Kota Pekalongan**	**80.95Persen**	**672.971.000**	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia		3 Unit	893.370.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER KHUSUS-DAK NON FISIK	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Altet Kota Pekalongan		672.971.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan prestasi olahraga tingkat kota**	**47.62Persen**	**42.86 Persen**	**1.453.700.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Altet Kota Pekalongan**	**47.62Persen**	**935.000.000**	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		10 Kegiatan	1.110.240.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Altet Kota Pekalongan		367.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota		1 Kegiatan	56.420.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Altet Kota Pekalongan		367.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota		70 Orang	287.040.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Altet Kota Pekalongan		200.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	**Peningkatan prestasi olahraga tingkat provinsi**	**205orang**	**41 orang**	**2.956.450.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Altet Kota Pekalongan**	**43orang**	**399.890.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi		150 Orang	186.460.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Altet Kota Pekalongan		215.800.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan		150 Orang	2.769.990.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Altet Kota Pekalongan		184.090.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**Peningkatan event olahraga tk Provinsi dan Nasional**	**24Event**	**4 Event**	**174.140.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Altet Kota Pekalongan**	**4Event**	**102.907.000**	
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi		3 Laporan	174.140.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Altet Kota Pekalongan		102.907.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**				**3.090.420.000**								**3.540.503.000**	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan**	**100 persen**	**100 persen**	**1.259.890.000**							**100 persen**	**1.748.642.000**	
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Event kesenian dan kebudayaan yang dikembangkan**	**32Event**	**5 Event**	**867.700.000**			**08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal**	**Kota Pekalongan**	**6Event**	**998.642.000**	
2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan		1 Objek	867.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	Kota Pekalongan		998.642.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Event kesenian dan kebudayaan yang dilestarikan**	**52Event**	**8 Event**	**392.190.000**			**08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktu yang merata dan berkualitas**	**10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoma pada budaya lokal**	**Kota Pekalongan**	**10Event**	**750.000.000**	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan		3 Objek	392.190.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	Kota Pekalongan		750.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**155.480.000**							**100,00 persen**	**495.593.000**	
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi**	**135komunitas**	**26 komunitas**	**155.480.000**			**08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktu yang merata dan berkualitas**	**10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoma pada budaya lokal**	**Kota Pekalongan**	**26komunitas**	**495.593.000**	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1 Lembaga	155.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	Kota Pekalongan		495.593.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**31.250.000**							**100,00 persen**	**68.199.000**	
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan Akses Masyarakat dalam Perolehan Data Sejarah dan Tradisi**	**100 persen**	**100 Persen**	**31.250.000**			**08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktu yang merata dan berkualitas**	**10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoma pada budaya lokal**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**68.199.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat		1 Dokumen	31.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	Kota Pekalongan		68.199.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Tingkat pelestarian cagar budaya (IKK Outcome)**	**95,74 persen**	**95,74 persen**	**20.000.000**							**95,74 persen**	**19.551.000**	
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**3.19Persen**	**2.84 Persen**	**20.000.000**			**08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal**	**Kota Pekalongan**	**3.19Persen**	**19.551.000**	
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan		3 Objek	20.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	Kota Pekalongan		19.551.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase pengunjung museum batik**	**8,29 persen**	**8,29 persen**	**1.623.800.000**							**8,29 persen**	**1.208.518.000**	
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Jumlah pengunjung museum batik**	**139000Orang**	**29000 Orang**	**1.623.800.000**			**08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal**	**Kota Pekalongan**	**30000Orang**	**1.208.518.000**	
2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu		1310 Unit	240.457.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DANA TRANSFER KHUSUS-DAK NON FISIK	08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	Kota Pekalongan		210.684.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum		4 Unit	1.270.293.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER KHUSUS-DAK NON FISIK	08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	Kota Pekalongan		876.623.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara		9 Unit	113.050.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER KHUSUS-DAK NON FISIK	08. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal	Kota Pekalongan		121.211.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**11.211.111.000**								**8.179.513.000**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				**11.211.111.000**								**8.179.513.000**	
3.26.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**6.362.312.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**6.113.761.000**	
3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**29.788.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**	**100 Persen**	**22.850.000**	
3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	8.538.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		2.750.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	2.501.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		1.650.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.26.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	18.749.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		18.450.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4.243.188.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**	**100 Persen**	**4.930.177.000**	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		30 Orang/bulan	4.182.818.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		4.848.077.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	57.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		80.450.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	2.470.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		1.650.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**915.726.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**	**100 Persen**	**259.500.000**	
3.26.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	3.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		9.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.26.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		100 Orang	912.076.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DANA TRANSFER KHUSUS-DAK NON FISIK	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		250.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**244.330.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**	**100 Persen**	**296.666.000**	
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	5.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		7.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	54.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		40.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	5.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		10.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	60.370.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		58.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 Paket	14.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	1.830.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		2.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		230 Laporan	102.370.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		158.166.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**632.600.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**	**100 Persen**	**447.400.000**	
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		2.400.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	374.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		268.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	256.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		177.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**296.680.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga**	**100 Persen**	**157.168.000**	
3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		19 Unit	84.730.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		74.840.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	182.350.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		62.328.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	29.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (IKK Outcome)**	**12,00 persen**	**12,00 persen**	**3.292.957.000**							**12,00 persen**	**508.450.000**	
3.26.02.2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase destinasi wisata yang berkembang**	**100 persen**	**100 Persen**	**3.285.657.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**488.450.000**	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara		2 Unit	620.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kota Pekalongan		488.450.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Laporan	50.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kota Pekalongan		0	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		1 Lokasi	2.615.657.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kota Pekalongan		0	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.02.2.04	**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Usaha Pariwisata yang mendapat rekomendasi**	**100 persen**	**100 Persen**	**7.300.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**20.000.000**	
3.26.02.2.04.0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota		1 Dokumen	7.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kota Pekalongan		20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan domestik per kebangsaan (IKK Outcome)**	**41,98 persen**	**41,98 persen**	**678.342.000**							**41,98 persen**	**1.051.705.000**	
3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota**	**25Persen**	**25 Persen**	**678.342.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Kota Pekalongan**	**25Persen**	**1.051.705.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri		2 Dokumen	300.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikar daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kota Pekalongan		279.205.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		1 Dokumen	203.342.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikar daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kota Pekalongan		495.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		2 Kegiatan	50.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikar daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kota Pekalongan		224.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		2 Promosi	125.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikar daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kota Pekalongan		53.500.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk berekspresi, berpromosi dan berinteraksi**	**51,28 persen**	**51,28 persen**	**165.000.000**							**51,28 persen**	**272.798.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.26.04.2.01	**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyelenggaraan EKRAF EXPO**	**6event**	**1 event**	**150.000.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**SDM Ekonomi Kreatif**	**1event**	**242.798.000**	
3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia		1 Unit	150.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	SDM Ekonomi Kreatif		242.798.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Persentase ketercapaian pengembangan ekosistem ekonomi kreatif**	**100 persen**	**100 persen**	**15.000.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**SDM Ekonomi Kreatif**	**100 persen**	**30.000.000**	
3.26.04.2.02.0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif		15 Produk	15.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	SDM Ekonomi Kreatif		30.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar**	**80,00 persen**	**80,00 persen**	**712.500.000**							**80,00 persen**	**232.799.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Peningkatan kapasitas SDM EKRAF tingkat dasar**	**14.29Persen**	**15.38 Persen**	**697.500.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**SDM Ekonomi Kreatif**	**14.29Persen**	**202.799.000**	
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif		1 Laporan	373.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	SDM Ekonomi Kreatif		100.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif		30 Orang	15.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	SDM Ekonomi Kreatif		32.799.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata		100 Orang	273.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	SDM Ekonomi Kreatif		20.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata		25 Orang	36.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikar daya dukung dan daya tampung lingkungan	SDM Ekonomi Kreatif		50.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.02	**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Persentase Ketercapaian Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**100 persen**	**100 persen**	**15.000.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**SDM Ekonomi Kreatif**	**100 persen**	**30.000.000**	
3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif		60 Orang	15.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Wetan	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikar daya dukung dan daya tampung lingkungan	SDM Ekonomi Kreatif		30.000.000	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	Dinas Pertanian dan Pangan				**8.037.309.000**								**7.681.708.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**359.770.000**								**263.178.000**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				**359.770.000**								**263.178.000**	
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase cadangan pangan daerah**	**4,70 persen**	**4,70 persen**	**296.439.000**							**4,70 persen**	**202.252.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Persentase penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya yang dilaksanakan**	**100 persen**	**100 persen**	**129.157.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**69.400.000**	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia		1 Laporan	106.747.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		32.600.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan		12 Dokumen	10.140.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		16.800.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)		1 Dokumen	12.270.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		20.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah cadangan pangan daerah**	**5625Kg**	**4500 Kg**	**114.155.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**5625Kg**	**132.322.000**	
2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal		1 Dokumen	8.155.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota		4,5 Ton	106.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		107.322.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Jumlah pelaksanaan pendampingan kelompok pemberdayaan pekarangan**	**20kegiatan**	**3 kegiatan**	**53.127.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**3kegiatan**	**530.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		1 Laporan	53.127.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		530.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**35.881.000**							**100,00 persen**	**18.187.000**	
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Jumlah kecamatan tahan pangan di Kota Pekalongan**	**4kecamatan**	**4 kecamatan**	**35.881.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**4kecamatan**	**18.187.000**	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan		1 Dokumen	35.881.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat Kota Pekalongan		18.187.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan**	**86.4 persen**	**86.4 persen**	**27.450.000**							**86.4 persen**	**42.739.000**	
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah pangan segar aman yang ditemukan dari pengawasan keamanan pangan**	**174sample**	**26 sampel**	**27.450.000**			**04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, sert Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**01. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya**	**Masyarakat kota Pekalongan**	**26sample**	**42.739.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota		1 Dokumen	27.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	04. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Tekonologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	01. Penguatan sister kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya	Masyarakat kota Pekalongan		42.739.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**7.677.539.000**								**7.418.530.000**	
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				**7.677.539.000**								**7.418.530.000**	
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**5.860.462.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**6.800.586.000**	
3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**20.433.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinperpa**	**100 persen**	**23.850.000**	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3.915.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		4.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	3.690.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		1.650.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	12.828.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		17.700.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**5.059.045.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinperpa**	**100 persen**	**6.286.975.000**	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		40 Orang/bulan	5.006.285.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		6.204.154.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	51.050.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		81.171.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.710.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		1.650.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**5.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinperpa**	**100 persen**	**9.500.000**	
3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		9.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**246.503.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinperpa**	**100 persen**	**148.942.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	1.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		1.250.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	50.766.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		36.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	2.760.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		2.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	34.028.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		40.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 Paket	12.926.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		10.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	1.720.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		2.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		159 Laporan	143.053.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		56.192.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**332.643.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinperpa**	**100 persen**	**274.619.000**	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	1.640.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		2.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	125.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		120.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	206.003.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		152.619.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**196.838.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinperpa**	**100 persen**	**56.700.000**	
3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		28 Unit	59.290.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		38.200.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	118.467.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		8.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	19.081.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperpa		10.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Nilai produksi peternakan pertahun Nilai produksi pertanian pertahun**	**203,65Miliar Rupiah 55,84Miliar Rupiah**	**199,66 Miliar Rupiah 55,78 Miliar Rupiah**	**1.421.483.000**							**203,65Miliar Rupiah 55,84Miliar Rupiah**	**242.404.000**	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian**	**100 persen**	**100 persen**	**1.021.860.000**			**05. Melanjutkan Hilirisas dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumbe Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktu yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonom kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Dinperpa**	**100 persen**	**109.880.000**	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi		14 Laporan	910.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DAK NON FISIK	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Dinperpa		0	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		12 Laporan	111.860.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Dinperpa		109.880.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDG hewan, tumbuhan dan mikroorganisme wewenang kabupaten/kota**	**100 persen**	**100 persen**	**53.573.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Dinperpa**	**100 persen**	**77.867.000**	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		1 Dokumen	13.470.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Dinperpa		25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian		3 Varietas Unggul Baru (VUB)	40.103.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Dinperpa		52.867.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.03	**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan peredaran benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**29kali**	**5 kali**	**58.550.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**5kali**	**37.657.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil		6 Laporan	23.550.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat Kota Pekalongan		17.157.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar		6 Laporan	35.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat Kota Pekalongan		20.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.02.2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kenaikan pelayanan ULIB**	**34,01persen**	**5 persen**	**287.500.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**5persen**	**17.000.000**	
3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar		200 Laporan	287.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat Kota Pekalongan		17.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana pertanian**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**16.466.000**							**100,00 persen**	**20.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Persentase prasarana yang digunakan (IKK Output)**	**100 persen**	**100 persen**	**16.466.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Kelompok Tani**	**100 persen**	**20.000.000**	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi		1 Unit	16.466.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Kelompok Tani		20.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**5,00 persen**	**5,00 persen**	**305.194.000**							**5,00 persen**	**230.515.000**	
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Kejadian penyakit hewan menular (PHM) yang tertangani**	**800kasus**	**800 kasus**	**63.105.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**800kasus**	**56.000.000**	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		12 Laporan	63.105.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat Kota Pekalongan		56.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.04.2.02	**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pengawasan peredaran penjualan ternak**	**100 persen**	**100 persen**	**10.984.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**15.000.000**	
3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM		6 laporan	10.984.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat Kota Pekalongan		15.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah hewan yang tertangani di PUSKESWAN**	**3.000ekor**	**500 ekor**	**20.620.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**500ekor**	**35.000.000**	
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		12 Laporan	20.620.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat Kota Pekalongan		35.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner pada pelaku usaha**	**100 persen**	**100 persen**	**210.485.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**124.515.000**	
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		1 Laporan	29.575.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat Kota Pekalongan		37.500.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik		12 Unit Usah	180.910.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat Kota Pekalongan		87.015.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/ kota**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**13.300.000**							**100,00 persen**	**25.000.000**	
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian/peternakan**	**20kali**	**4 kali**	**13.300.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**4kali**	**25.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		1 Ha	13.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat Kota Pekalongan		25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**persentase usaha pertanian/peternakan yang memiliki ijin**	**100 Persen**	**100 Persen**	**24.927.000**							**100 Persen**	**31.826.000**	
3.27.06.2.02	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**Persentase penurunan jumlah usaha pemotongan hewan yang tidak berijin**	**26,49persen**	**5 persen**	**24.927.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**5persen**	**31.826.000**	
3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi		1 Laporan	24.927.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat Kota Pekalongan		31.826.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase kenaikan kelas kelompok tani per tahun**	**5,00 persen**	**5,00 persen**	**35.707.000**							**5,00 persen**	**68.199.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan kelembagaan petani**	**100 persen**	**100 persen**	**35.707.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**68.199.000**	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1 Unit	12.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat Kota Pekalongan		25.000.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		1 Unit	22.857.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat Kota Pekalongan		43.199.000	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				**20.301.719.000**								**18.938.375.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**385.300.000**								**2.209.866.000**	
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**				**385.300.000**								**2.209.866.000**	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase koperasi yang berkualitas (IKK Outcome)**	**32,36 persen**	**32,36 persen**	**47.180.000**							**32,36 persen**	**123.668.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kewenangan kabupaten / kota**	**65.29persen**	**64.46 persen**	**47.180.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**KSP/USP/KSPPS**	**65.29persen**	**123.668.000**	
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan		100 Unit Usaha	47.180.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	KSP/USP/KSPPS		123.668.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota**	**10,48 persen**	**10,48 persen**	**14.600.000**							**10,48 persen**	**667.649.000**	
2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota**	**1.39persen**	**0,9863 persen**	**14.600.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Koperasi dan UMKM**	**1.39persen**	**667.649.000**	
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian		30 Orang	14.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Koperasi dan UMKM		667.649.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Meningkatnya usaha Mikro yang menjadi wira usaha (IKK Outcome)**	**12,27 persen**	**12,27 persen**	**323.520.000**							**12,27 persen**	**1.418.549.000**	
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Meningkatnya UMKM yang mendapatkan pendampingan pengembangan usaha**	**7.26UMKM**	**6.06 UMKM**	**323.520.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**UMKM**	**7.26UMKM**	**1.418.549.000**	
2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi		47 Unit Usah	323.520.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	UMKM		1.418.549.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**19.916.419.000**								**16.728.509.000**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				**19.916.419.000**								**16.728.509.000**	
3.30.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**9.777.328.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**9.259.026.000**	
3.30.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**18.084.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**-**	**100 persen**	**22.850.000**	
3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3.132.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	-		2.750.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	2.952.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	-		1.650.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	-		18.450.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**6.996.168.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dindagkop UKM**	**100 persen**	**8.031.431.000**	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		62 Orang/bulan	6.926.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dindagkop UKM		7.956.581.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	67.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dindagkop UKM		73.200.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.718.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dindagkop UKM		1.650.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**9.500.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dindagkop UKM**	**100 persen**	**14.500.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	9.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dindagkop UKM		14.500.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**633.441.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dindagkop UKM**	**100 persen**	**317.450.000**	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dindagkop UKM		2.500.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	196.011.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dindagkop UKM		47.500.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dindagkop UKM		2.500.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	85.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dindagkop UKM		64.950.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 Paket	67.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dindagkop UKM		60.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2.580.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dindagkop UKM		2.500.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200 Laporan	272.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dindagkop UKM		137.500.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**1.498.735.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dindagkop UKM**	**100 persen**	**518.053.000**	
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	2.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dindagkop UKM		2.400.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	979.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dindagkop UKM		415.240.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	516.935.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dindagkop UKM		100.413.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**621.400.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dindagkop UKM**	**100 persen**	**354.742.000**	
3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		44 Unit	465.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dindagkop UKM		304.742.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	130.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dindagkop UKM		30.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		50 Unit	26.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dindagkop UKM		20.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko (IKK Outcome)**	**76,93 persen**	**76,93 persen**	**6.330.000**							**76,93 persen**	**2.728.000**	
3.30.02.2.01	**Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Persentase izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan**	**100 persen**	**100 persen**	**4.530.000**			**05. Melanjutkan Hilirisas dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumbe Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktu yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonom kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko dan Swalayan, serta Toko dan Swalayan Berjejaring**	**100 persen**	**1.728.000**	
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		6 Dokumen	4.530.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko dan Swalayan, serta Toko dan Swalayan Berjejaring		1.728.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30.02.2.02	**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Persentase Tanda Daftar Gudang yang diterbitkan**	**100 persen**	**100 persen**	**1.800.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Pemilik Gudang**	**100 persen**	**1.000.000**	
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		1 Dokumen	1.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pemilik Gudang		1.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**8.682.729.000**							**100,00 persen**	**6.050.840.000**	
3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Penyediaan Pelayanan Pasar Rakyat secara Profesional**	**18.75persen**	**18.75 persen**	**8.633.379.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Masyarakat, Pedagang dan UMKM**	**18.75persen**	**5.928.840.000**	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		1 Unit	1.500.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat, Pedagang dan UMKM		0	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		12 Unit	7.133.379.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikar daya dukung dan daya tampung lingkungan	Masyarakat, Pedagang dan UMKM		5.928.840.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Persentase ketercapaian Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan khususnya PK5**	**68.97Persen**	**57.47 Persen**	**49.350.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Petugas Pasar (Pegawai Kebersihan, Keamanan, Penjaga Malam, Pengampu Pasar dan Juru Pungut Retribusi)**	**68.97Persen**	**122.000.000**	
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		2 Dokumen	49.350.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikar daya dukung dan daya tampung lingkungan	Petugas Pasar (Pegawai Kebersihan, Keamanan, Penjaga Malam, Pengampu Pasar dan Juru Pungut Retribusi)		122.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**102.960.000**							**100,00 persen**	**482.398.000**	
3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**persentase objek sasaran pengendalian harga dan stok kebutuhan pokok**	**100 persen**	**90.91 persen**	**96.740.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Pedagang, Agen, Distributor, Toko dan Swalayan, serta Toko dan Swalayan Berjejaring**	**100 persen**	**477.398.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		18 Laporan	96.740.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pedagang, Agen, Distributor, Toko dan Swalayan, serta Toko dan Swalayan Berjejaring		130.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.04.2.03	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kinerja realisasi pupuk (IKK Outcome)**	**100 persen**	**100 persen**	**6.220.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Distributor dan Kios Tani Penyalur Pupuk Bersubsidi**	**100 persen**	**5.000.000**	
3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		3 Laporan	6.220.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Distributor dan Kios Tani Penyalur Pupuk Bersubsidi		5.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase peningkatan volume ekspor**	**7,99 persen**	**7,99 persen**	**98.970.000**							**7,99 persen**	**117.849.000**	
3.30.05.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Peningkatan jumlah pelaku usaha yang menjadi ekportir**	**27pelaku usaha**	**1 pelaku usaha**	**98.970.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**UMKM dan Eksportir**	**27pelaku usaha**	**117.849.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi		30 Produk	98.970.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikar daya dukung dan daya tampung lingkungan	UMKM dan Eksportir		117.849.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (IKK Outcome)**	**81,99 persen**	**81,99 perse**	**279.022.000**							**81,99 persen**	**354.637.000**	
3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (IKK Output)**	**83.99perse n**	**81.99 perse**	**279.022.000**			**05. Melanjutkan Hilirisas dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumbe Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktu yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonom kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Pedagang dan Pelaku Usaha pemilik Alat Ukur dan Perlengkapan nya**	**83.99persen**	**354.637.000**	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		5164 Unit	254.112.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikar daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pedagang dan Pelaku Usaha pemilik Alat Ukur dan Perlengkapann ya		309.637.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		100 Orang	24.910.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikar daya dukung dan daya tampung lingkungan	Pedagang dan Pelaku Usaha pemilik Alat Ukur dan Perlengkapann ya		45.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30.07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran (IKK Output)**	**6,42 persen**	**6,42 persen**	**969.080.000**							**6,42 persen**	**461.031.000**	
3.30.07.2.01	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**peningkatan usaha mikro yang difasilitasi pemasaran produknya**	**100 persen**	**100 persen**	**969.080.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**UMKM**	**100 persen**	**461.031.000**	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		150 UMKM	872.330.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	UMKM		370.000.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi		30 UMKM	96.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	UMKM		91.031.000	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				**11.554.775.000**								**12.129.292.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**11.123.805.000**								**11.306.585.000**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				**11.123.805.000**								**11.306.585.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**7.041.544.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**7.819.323.000**	
2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**25.287.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinperinaker**	**100 persen**	**26.450.000**	
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	6.249.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		6.249.000	DINAS PERINDUSTRIA N DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	2.132.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		2.132.000	DINAS PERINDUSTRIA N DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	16.906.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		18.069.000	DINAS PERINDUSTRIA N DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**6.028.036.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinperinaker**	**100 persen**	**6.564.000.000**	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		47 Orang/bulan	5.968.560.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		6.500.000.000	DINAS PERINDUSTRIA N DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	57.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		62.000.000	DINAS PERINDUSTRIA N DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.976.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		2.000.000	DINAS PERINDUSTRIA N DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**3.650.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinperinaker**	**100 persen**	**9.500.000**	
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	3.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		9.500.000	DINAS PERINDUSTRIA N DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**259.938.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinperinaker**	**100 persen**	**343.589.000**	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4.380.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		6.000.000	DINAS PERINDUSTRIA N DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	90.027.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		120.873.000	DINAS PERINDUSTRIA N DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	3.750.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	74.716.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		74.716.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	7.825.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		7.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	3.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		5.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Laporan	75.590.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		125.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**540.679.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinperinaker**	**100 persen**	**559.000.000**	
2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	3.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		4.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	260.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		255.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	277.179.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		300.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**183.954.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Dinperinaker**	**100 persen**	**316.784.000**	
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		23 Unit	108.774.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		106.784.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	49.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		180.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		54 Unit	25.780.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Dinperinaker		30.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (IKK Outcome)**	**1,15 persen**	**1,15 persen**	**3.355.717.000**							**1,15 persen**	**2.076.136.000**	
2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan**	**100 persen**	**100 persen**	**3.213.567.000**			**06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**04. Peningkatan lin and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerj berdaya saing**	**Pencari Kerja Kota Pekalongan**	**100 persen**	**1.838.838.000**	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		1621 Orang	2.832.939.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU, DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Pencari Kerja Kota Pekalongan		1.351.328.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n		1 Lembaga	238.738.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Pencari Kerja Kota Pekalongan		252.049.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja		141 Unit	141.890.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Pencari Kerja Kota Pekalongan		235.461.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.02	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**100 persen**	**90 persen**	**19.830.000**			**06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing**	**LPKS Kota Pekalongan**	**100 persen**	**75.259.000**	
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		20 Lembaga	19.830.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	LPKS Kota Pekalongan		75.259.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan**	**6tenant**	**6 tenant**	**68.656.000**			**06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing**	**Tenant Kota Pekalongan**	**6tenant**	**87.039.000**	
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas		30 Perusahaan	68.656.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Tenant Kota Pekalongan		87.039.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.03.2.05	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan**	**53.33persen**	**46.67 persen**	**53.664.000**			**06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing**	**Alumni siswa pelatihan dan Peminat magang Jepang Kota Pekalongan**	**53.33persen**	**75.000.000**	
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		2 Dokumen	53.664.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Alumni siswa pelatihan dan Peminat magang Jepang Kota Pekalongan		75.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/kota (IKK Outcome)**	**27,93 persen**	**27,93 persen**	**350.444.000**							**27,93 persen**	**926.684.000**	
2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan**	**14.08persen**	**12.97 persen**	**158.114.000**			**06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerj berdaya saing**	**1.Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB Kota Pekalongan**	**14.08persen**	**265.625.000**	
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi		40 Orang	7.524.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	1.Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB Kota Pekalongan		20.625.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		140 Orang	25.760.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	1.Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB Kota Pekalongan		50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD		20 Orang	14.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	1.Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB Kota Pekalongan		25.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		61 Orang	110.230.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	1.Perusahaan dan Pencaker, 2. Siswa SMK, 3. Disabilitas, 4. lokasi Padat Karya, Peserta Trasmigrasi, Perjanjian Kerja Transmigrasi, WUB Kota Pekalongan		170.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun**	**72buku**	**12 buku**	**150.530.000**			**06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing**	**1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leaflet, 3. Perusahaan Kota Pekalongan**	**12buku**	**293.314.000**	
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		1 Dokumen	62.970.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leaflet, 3. Perusahaan Kota Pekalongan		65.746.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		700 Orang	17.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leaflet, 3. Perusahaan Kota Pekalongan		121.550.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		100 Orang	70.360.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	1. Operator Informasi pasar kerja online dan Laporan Pencaker, 2. Layanan dan Leaflet, 3. Perusahaan Kota Pekalongan		106.018.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.04.2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah CPMI yang terlayani secara legal**	**249orang**	**49 orang**	**41.800.000**			**06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**04. Peningkatan lin and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerj berdaya saing**	**CPMI Kota Pekalongan**	**54orang**	**367.745.000**	
2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		20 Orang	20.540.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	CPMI Kota Pekalongan		335.724.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani		102 Orang	21.260.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	CPMI Kota Pekalongan		32.021.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (IKK Outcome)**	**52,00 persen**	**52,00 perse**	**376.100.000**							**52,00 persen**	**484.442.000**	
2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan**	**42.28 persen**	**41.22 perse**	**82.550.000**			**06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**04. Peningkatan lin and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerj berdaya saing**	**Perusahaan di Kota Pekalongan**	**42.28 persen**	**116.394.000**	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		12 Perusahaan	17.090.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perusahaan di Kota Pekalongan		25.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		8 Perusahaa	13.140.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perusahaan di Kota Pekalongan		18.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		11 Laporan	52.320.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perusahaan di Kota Pekalongan		73.394.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.07.05.2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan**	**80.06persen**	**77.11 persen**	**293.550.000**			**06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan**	**02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata**	**04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerj berdaya saing**	**Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan**	**80.06persen**	**368.048.000**	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		25 Perkara	8.420.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan		15.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan		8 Perkara	5.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan		12.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		30 Asosiasi dan Serikat Pekerja	12.240.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan		22.048.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1 Lembaga	70.810.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan		99.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		40 Orang	196.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	06. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	02. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata	04. Peningkatan link and match ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing	Perusahaan di Kota Pekalongan, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Pekalongan		220.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**				**430.970.000**								**822.707.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				**430.970.000**								**822.707.000**	
3.31.02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP (IKK Outcome)**	**75,34 persen**	**75,34 persen**	**389.560.000**							**75,34 persen**	**683.127.000**	
3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan**	**4.5persen**	**4.0 persen**	**389.560.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan**	**4.5persen**	**683.127.000**	
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		1 Dokumen	31.730.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan		41.600.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1 Dokumen	42.830.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan		45.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1 Dokumen	114.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikar daya dukung dan daya tampung lingkungan	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan		436.527.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1 Dokumen	88.850.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikar daya dukung dan daya tampung lingkungan	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan		110.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		1 Dokumen	111.850.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikar daya dukung dan daya tampung lingkungan	IKM di Kota Pekalongan, DINPERINAKER, Pemerintah Kota Pekalongan		50.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait (IKK Outcome)**	**25,00 persen**	**25,00 persen**	**7.470.000**							**25,00 persen**	**13.640.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.31.03.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota**	**33persen**	**30 persen**	**7.470.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**IKM Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan**	**33persen**	**13.640.000**	
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		1 Dokumen	7.470.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	IKM Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan		13.640.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.31.04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**33.940.000**							**100,00 persen**	**125.940.000**	
3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan**	**35persen**	**33 persen**	**33.940.000**			**05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri**	**01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas**	**09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan**	**Industri, Sentra IKM, IKM Kota Pekalongan**	**35persen**	**125.940.000**	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1 Dokumen	30.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan	Industri, Sentra IKM, IKM Kota Pekalongan		120.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		1 Dokumen	3.140.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	05. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	01. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	09. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajua pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan dan jasa dengan tetap memperhatikar daya dukung dan daya tampung lingkungan	Industri, Sentra IKM, IKM Kota Pekalongan		5.940.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	Sekretariat Daerah				**15.977.091.000**								**14.698.272.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**15.977.091.000**								**14.698.272.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**15.977.091.000**								**14.698.272.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**15.977.091.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**14.698.272.000**	
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**15.977.091.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Sekretariat Daerah**	**100 persen**	**14.698.272.000**	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		119 Orang/bulan	15.977.091.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		14.698.272.000	SEKRETARIAT DAERAH
	Bagian Pemerintahan				**1.518.990.000**								**858.996.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**1.518.990.000**								**858.996.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**1.518.990.000**								**858.996.000**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Penyusunan dokumen LPPD dan LKPJ tepat waktu**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.518.990.000**							**100,00 persen**	**858.996.000**	
4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Persentase capaian kinerja penataan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi kewilayahan dan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**426.280.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**100 persen**	**788.996.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		1 Dokumen	77.910.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		349.417.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		3 Dokumen	213.730.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		247.509.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		3 Dokumen	134.640.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		192.070.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	**Persentase efektivitas kerja sama daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**1.092.710.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**100 persen**	**70.000.000**	
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		20 Dokumen	1.092.710.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		70.000.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
	Bagian Hukum				**508.356.000**								**1.010.824.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**508.356.000**								**1.010.824.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**508.356.000**								**1.010.824.000**	
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**508.356.000**							**100,00 persen**	**1.010.824.000**	
4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**Persentase Capaian Kinerja Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum**	**100 persen**	**100 persen**	**508.356.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Bagian Hukum, Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**1.010.824.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		9 Dokumen	95.630.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bagian Hukum, Masyarakat Kota Pekalongan		108.000.000	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		19 Kasus	320.370.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bagian Hukum, Masyarakat Kota Pekalongan		818.824.000	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		1200 Dokumen	92.356.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bagian Hukum, Masyarakat Kota Pekalongan		84.000.000	BAGIAN HUKUM
	Bagian Organisasi				**281.430.000**								**447.662.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**281.430.000**								**447.662.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**281.430.000**								**447.662.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketercapaian tata laksana, penataan kelembagaan serta kinerja dan reformasi birokrasi**	**100 persen**	**100 persen**	**281.430.000**							**100 persen**	**447.662.000**	
4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**	**Indeks Kelembagaan Kota**	**81indeks**	**80 indeks**	**281.430.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Seluruh OPD Kota Pekalongan**	**81indeks**	**447.662.000**	
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		2 Dokumen	64.323.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Seluruh OPD Kota Pekalongan		110.662.000	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana		2 Laporan	126.607.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Seluruh OPD Kota Pekalongan		157.000.000	BAGIAN ORGANISASI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi		36 Dokumen	90.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Seluruh OPD Kota Pekalongan		180.000.000	BAGIAN ORGANISASI
	Bagian Perekonomian Dan SDA				**294.780.000**								**891.031.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**294.780.000**								**891.031.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**294.780.000**								**891.031.000**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase Kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, BUMD, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan**	**100 Persen**	**100 Persen**	**294.780.000**							**100 Persen**	**891.031.000**	
4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	**Persentase Capaian Kinerja Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil**	**100 persen**	**100 Persen**	**209.780.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**BUMD, BLUD, Penyedia Gas, Agen Gas, Penyedia Pupuk, Tim TPID, Masyarakat Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan serta Bagian Perekonomian dan SDA Kota Pekalongan Kota Pekalongan**	**100 persen**	**237.665.000**	
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		2 Dokumen	41.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BUMD, BLUD, Penyedia Gas, Agen Gas, Penyedia Pupuk, Tim TPID, Masyarakat Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan serta Bagian Perekonomian dan SDA Kota Pekalongan Kota Pekalongan		76.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		4 Laporan	90.130.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BUMD, BLUD, Penyedia Gas, Agen Gas, Penyedia Pupuk, Tim TPID, Masyarakat Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan serta Bagian Perekonomian dan SDA Kota Pekalongan Kota Pekalongan		63.000.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		1 Dokumen	78.150.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BUMD, BLUD, Penyedia Gas, Agen Gas, Penyedia Pupuk, Tim TPID, Masyarakat Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan serta Bagian Perekonomian dan SDA Kota Pekalongan Kota Pekalongan		98.665.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	**Jumlah Bulan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bersumber dari DBHCHT**	**12bulan**	**12 bulan**	**85.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**OPD Penerima DBHCHT, Bagian Perekonomian dan SDA Kota Pekalongan**	**12bulan**	**653.366.000**	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja		2 Dokumen	85.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	OPD Penerima DBHCHT, Bagian Perekonomian dan SDA Kota Pekalongan		653.366.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA
	Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Administrasi Pembangunan				**523.610.000**								**622.867.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**523.610.000**								**622.867.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**523.610.000**								**622.867.000**	
4.01.03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (IKK Outcome)**	**6,00 persen**	**6,00 persen**	**523.610.000**							**6,00 persen**	**622.867.000**	
4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	**Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD**	**100 persen**	**100 persen**	**60.738.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**100 persen**	**110.029.000**	
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		2 Laporan	28.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		42.681.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		2 Laporan	32.288.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		67.348.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persentase kegiatan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan**	**100 persen**	**100 persen**	**462.872.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**100 persen**	**512.838.000**	
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		4 Dokumen	190.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		224.984.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		4 Dokumen	272.872.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		287.854.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	Bagian Kesejahteraan Rakyat				**16.881.040.000**								**16.039.090.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**16.881.040.000**								**16.039.090.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**16.881.040.000**								**16.039.090.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase capaian fasilitasi pemberdayaan masyarakat**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**16.881.040.000**							**100,00 persen**	**16.039.090.000**	
4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Persentase capaian kinerja bina mental spiritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat**	**100 persen**	**100 persen**	**16.881.040.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**16.039.090.000**	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		106 Dokume	15.665.203.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		14.436.520.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		22 Dokumen	520.422.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		660.000.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas		79 Dokumen	695.415.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		942.570.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	Bagian Umum				**18.191.809.000**								**15.549.424.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**18.191.809.000**								**15.549.424.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**18.191.809.000**								**15.549.424.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi keuangan, operasional dan kerumahtanggan Sekretariat Daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**18.191.809.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**15.549.424.000**	
4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**61.851.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Sekretariat Daerah**	**100 persen**	**75.250.000**	
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	7.842.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		3.500.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	2.009.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		12.000.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	52.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		59.750.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**199.712.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Sekretariat Daerah**	**100 persen**	**231.100.000**	
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	197.850.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		211.600.000	BAGIAN UMUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.862.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		19.500.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**338.667.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Sekretariat Daerah**	**100 persen**	**87.250.000**	
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	338.667.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		87.250.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**8.487.129.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Sekretariat Daerah**	**100 persen**	**6.385.376.000**	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	70.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		80.000.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	1.057.939.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		1.020.725.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	202.669.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		170.000.000	BAGIAN UMUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	1.420.987.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		1.591.721.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 Paket	66.831.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		257.500.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	83.445.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		77.500.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		4 Laporan	1.085.258.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		1.085.258.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		3000 Lapora	4.500.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		2.102.672.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**2.753.905.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Sekretariat Daerah**	**100 persen**	**2.376.180.000**	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	27.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		26.600.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	1.173.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		969.000.000	BAGIAN UMUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.553.305.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		1.380.580.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**4.018.296.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Sekretariat Daerah**	**100 persen**	**4.866.312.000**	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		70 Unit	1.665.124.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		1.456.080.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 Unit	1.952.472.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		3.009.732.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		190 Unit	400.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat Daerah		400.500.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan dan operasional kepala daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**892.249.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100 persen**	**717.956.000**	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		2 Orang/Bulan	852.249.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		687.956.000	BAGIAN UMUM

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		4 Orang	40.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		30.000.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	**Persentase ketercapaian fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**1.440.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100 persen**	**810.000.000**	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan		12 Paket	840.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		480.000.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan		12 Paket	600.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		330.000.000	BAGIAN UMUM
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				**1.181.988.000**								**1.244.310.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**1.181.988.000**								**1.244.310.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**				**1.181.988.000**								**1.244.310.000**	
4.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase pelayanan keprotokoleran**	**100 persen**	**100 persen**	**1.181.988.000**							**100 persen**	**1.244.310.000**	
4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	**Persentase ketercapaian kinerja fasilitasi keprotokolan, komunikasi tugas pimpinan dan pendokumentasian tugas pimpinan**	**100 persen**	**100 persen**	**1.181.988.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**100 persen**	**1.244.310.000**	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan		12 Laporan	244.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		283.728.000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		201 Laporan	639.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		610.582.000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan		12 Laporan	297.788.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		350.000.000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	Sekretariat DPRD				**61.718.912.000**								**48.388.190.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**				**61.718.912.000**								**48.388.190.000**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**				**61.718.912.000**								**48.388.190.000**	
4.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Persentase ketersediaan layanan administrasi, keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**34.511.800.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**28.908.364.000**	
4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**20.064.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Sekretariat DPRD**	**100 Persen**	**16.500.000**	
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3.306.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		7.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.558.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		1.500.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	15.200.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		8.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.227.585.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Sekretariat DPRD**	**100 Persen**	**3.328.071.000**	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25 Orang/bulan	3.163.841.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		3.256.171.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	62.300.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		70.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.444.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		1.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**5.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Sekretariat DPRD**	**100 Persen**	**9.500.000**	
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		9.500.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.689.605.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Sekretariat DPRD**	**100 Persen**	**2.710.411.000**	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	19.131.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	516.517.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		255.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	6.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		25.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	714.772.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		627.911.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 Paket	32.235.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		142.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	25.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		35.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	379.250.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		300.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		450 Laporan	1.995.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		1.300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.244.025.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Sekretariat DPRD**	**100 Persen**	**940.937.000**	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	1.800.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		1.800.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	276.252.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		200.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	965.973.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		739.137.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**893.823.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Sekretariat DPRD**	**100 Persen**	**1.431.640.000**	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		23 Unit	550.723.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		911.640.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	250.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		143 Unit	93.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		120.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Persentase ketercapaian layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD**	**100 Persen**	**100 Persen**	**24.595.218.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPRD**	**100 Persen**	**19.471.305.000**	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		35 Orang/Bulan	23.704.121.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPRD		18.541.305.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan		140 Paket	335.725.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPRD		400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD		35 Orang	555.372.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPRD		530.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	**Persentase ketercapaian layanan administrasi DPRD**	**100 Persen**	**100 Persen**	**836.480.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPRD**	**100 Persen**	**1.000.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		12 Laporan	386.480.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPRD		400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan		12 Paket	450.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPRD		600.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Perda yang ditetapkan**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**27.207.112.000**							**100,00 persen**	**19.479.826.000**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Persentase ketercapaian pembentukan peraturan daerah dan Peraturan DPRD**	**100 persen**	**100 Persen**	**4.692.620.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPRD**	**100 persen**	**8.300.000.000**	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		12 Dokumen	2.772.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPRD		3.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan		6 Dokumen	1.920.370.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPRD		5.300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**30dokumen**	**100 persen**	**302.850.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Sekretariat DPRD**	**5dokumen**	**409.197.000**	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		2 Dokumen	149.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		150.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		2 Dokumen	149.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		150.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		1 Dokumen	4.450.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Sekretariat DPRD		109.197.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase ketercapaian Peningkatan kapasitas DPRD**	**100 persen**	**100 Persen**	**2.324.597.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPRD**	**100 persen**	**3.150.000.000**	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		4 Dokumen	1.442.100.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPRD		2.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		20 Dokumen	217.340.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPRD		300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD		1 Dokumen	64.600.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPRD		50.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD		48 Dokumen	600.557.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPRD		800.000.000	SEKRETARIAT DPRD

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase ketercapaian Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**100 persen**	**100 Persen**	**1.165.715.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPRD**	**100 persen**	**1.700.000.000**	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD		12 Laporan	259.665.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPRD		300.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		3 Dokumen	906.050.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPRD		1.400.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase ketercapaian Fasilitasi Tugas DPRD**	**100 persen**	**100 Persen**	**18.721.330.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**DPRD**	**100 persen**	**5.920.629.000**	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD		1 Dokumen	18.721.330.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	DPRD		5.920.629.000	SEKRETARIAT DPRD
	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah				**6.876.290.000**								**9.392.179.000**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**6.876.290.000**								**9.392.179.000**	
5.01	**PERENCANAAN**				**6.357.854.000**								**8.139.035.000**	
5.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**5.418.748.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**6.725.961.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**19.916.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Bappeda Kota Pekalongan**	**100 persen**	**320.211.000**	
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	6.972.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		2.716.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.394.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		1.630.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	11.550.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		315.865.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**4.811.585.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Bappeda Kota Pekalongan**	**100 persen**	**5.827.228.000**	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		33 Orang/bulan	4.774.293.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		5.784.450.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	36.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		41.321.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.292.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		1.457.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**5.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Bappeda Kota Pekalongan**	**100 persen**	**8.639.000**	
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		8.639.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**287.256.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Bappeda Kota Pekalongan**	**100 persen**	**332.253.000**	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	2.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		1.359.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	36.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		59.254.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	2.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		2.717.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	48.536.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		48.920.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	10.990.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		13.589.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2.340.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		2.582.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200 Laporan	184.370.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		203.832.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**168.421.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Bappeda Kota Pekalongan**	**100 persen**	**157.932.000**	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	990.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		1.363.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	75.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		67.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	92.431.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		89.569.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**126.570.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Bappeda Kota Pekalongan**	**100 persen**	**79.698.000**	
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		16 Unit	107.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		59.238.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		49 Unit	19.570.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Bappeda Kota Pekalongan		20.460.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan tepat waktu**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**437.964.000**							**100,00 persen**	**620.952.000**	
5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Persentase penyusunan perencanaan dan pendanaan**	**100 persen**	**100 persen**	**377.759.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**498.531.000**	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		5 Dokumen	377.759.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		498.531.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase pelaksanaan analisis data melalui forum satu data**	**100 persen**	**100 persen**	**15.050.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**109.690.000**	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		1 Dokumen	15.050.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kota Pekalongan		109.690.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**45.155.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**12.731.000**	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		9 Laporan	45.155.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kota Pekalongan		12.731.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang Pemsosbud**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**501.142.000**							**100,00 persen**	**792.122.000**	
5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persentase kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dilaksanakan**	**100 persen**	**100 persen**	**151.660.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**216.705.000**	
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		1 Laporan	14.965.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kota Pekalongan		8.727.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		1 Laporan	33.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kota Pekalongan		76.798.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan	14.965.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kota Pekalongan		26.181.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		1 Laporan	88.230.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kota Pekalongan		104.999.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Persentase kegiatan Fasilitasi dan Monev Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dilaksanakan**	**100 persen**	**100 persen**	**135.030.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**166.220.000**	
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		2 Laporan	135.030.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kota Pekalongan		166.220.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Persentase pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**100 persen**	**100 persen**	**214.452.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kota Pekalongan**	**100 persen**	**409.197.000**	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		2 Laporan	154.210.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kota Pekalongan		200.052.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan		1 Laporan	60.242.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kota Pekalongan		209.145.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				**518.436.000**								**1.253.144.000**	
5.05.02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase Litbang yang sesuai dengan Arah Kebijakan RPJMD**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**518.436.000**							**100,00 persen**	**1.253.144.000**	
5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Capaian pelaksanaan Riset Unggulan Daerah serta pengelolaan Jurnal dan website kelitbangan**	**100 persen**	**100 persen**	**234.598.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**100 persen**	**257.175.000**	
5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		5 Laporan	171.760.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		178.228.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		1 Laporan	62.838.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		78.947.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial**	**100 persen**	**100 persen**	**111.321.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**100 persen**	**301.622.000**	
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		1 Dokumen	111.321.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		301.622.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Persentase pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi (SiDA)**	**100 persen**	**100 persen**	**172.517.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**100 persen**	**694.347.000**	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		1 Dokumen	164.117.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		694.347.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		1 Laporan	8.400.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah				**24.012.710.000**								**23.815.608.000**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**24.012.710.000**								**23.815.608.000**	
5.02	**KEUANGAN**				**24.012.710.000**								**23.815.608.000**	
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**17.219.881.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**14.927.384.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**20.637.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**BPKAD Kota Pekalongan**	**100 persen**	**18.150.000**	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	8.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		4.700.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	2.337.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		2.250.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	10.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		11.200.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**13.146.766.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**BPKAD Kota Pekalongan**	**100 persen**	**13.167.565.000**	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		57 Orang/bulan	13.028.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		13.030.315.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	115.800.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		135.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	2.166.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		2.250.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**5.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**BPKAD Kota Pekalongan**	**100 persen**	**9.500.000**	
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		9.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**531.480.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**BPKAD Kota Pekalongan**	**100 persen**	**754.935.000**	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	5.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		7.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	160.590.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		241.935.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	10.950.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		18.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	80.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		110.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	36.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		50.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	1.775.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		2.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200 Laporan	235.885.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		325.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**675.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**-**	**0Persen**	**0**	
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 Unit	675.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	-		0	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**763.064.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**BPKAD Kota Pekalongan**	**100 persen**	**725.464.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	2.190.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		3.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	514.816.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		506.400.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	246.058.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		216.064.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**2.077.934.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**BPKAD Kota Pekalongan**	**100 persen**	**251.770.000**	
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		50 Unit	151.214.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		136.770.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1.891.680.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		75.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		70 Unit	35.040.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		40.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (IKK Outcome)**	**7,5 persen**	**7,5 persen**	**4.000.978.000**							**7,5 persen**	**6.095.342.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Persentase ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu**	**100 persen**	**100 persen**	**766.836.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**BPKAD Kota Pekalongan**	**100 persen**	**934.119.000**	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		2 Dokumen	15.451.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		35.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		2 Dokumen	15.451.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		35.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		2 Dokumen	21.424.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		62.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2 Dokumen	574.328.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		631.182.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		2 Dokumen	75.548.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		144.937.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		2 Dokumen	64.634.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		26.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD dan Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D**	**100 persen**	**100 persen**	**337.692.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**BPKAD Kota Pekalongan**	**100 persen**	**262.900.000**	
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		8500 Dokumen	228.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		87.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		24 Dokumen	12.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		23.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank		2 Dokumen	13.690.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		25.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		2 Laporan	45.852.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		70.900.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		1 Dokumen	13.690.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		25.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota		150 Orang	23.360.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		32.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Persentase Ketersediaan Perda dan Perwal Pertanggungjawaban APBD yang tepat waktu**	**100 persen**	**100 persen**	**396.450.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**BPKAD Kota Pekalongan**	**100 persen**	**398.323.000**	
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban		4 Dokumen	43.070.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		59.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		1 Laporan	5.840.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		8.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		7 Laporan	101.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		95.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		2 Dokumen	80.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		90.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		2 Dokumen	7.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		10.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		1 Dokumen	14.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		20.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		120 Orang	144.140.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		116.323.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos**	**100 persen**	**100 persen**	**2.500.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**4.500.000.000**	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		12 Laporan	2.500.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		4.500.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Indeks Pengelolaan Aset Baik (Persentase ketersediaan daftar asset tetap, manual, Penyusunan daftar aset tetap dan proses inventarisasi aset tahunan) (IKK Outcome)**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**934.850.000**							**100,00 persen**	**1.212.565.000**	
5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap dan Persediaan**	**100 persen**	**100 persen**	**934.850.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**BPKAD Kota Pekalongan**	**100 persen**	**1.212.565.000**	
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun		2 Dokumen	56.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		55.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah		4 Dokumen	13.690.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		30.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah		12 Laporan	113.150.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		165.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah		2 Laporan	63.950.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		65.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		2 Dokumen	258.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		325.480.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		81 Laporan	428.960.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		572.085.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (IKK Outcome)**	**5,00 persen**	**5,00 persen**	**1.857.001.000**							**5,00 persen**	**1.580.317.000**	
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**Persentase peningkatan potensi pendapatan pajak Persentase realisasi pendapatan pajak dan retribusi yang dikelola BKD**	**5.0persen 100 persen**	**4.9 persen 100 persen**	**1.857.001.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**BPKAD Kota Pekalongan**	**5.0persen 100 persen**	**1.580.317.000**	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		12 Laporan	127.390.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		163.040.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah		12 Laporan	277.380.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		30.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		12 Laporan	33.510.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		59.837.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya		3000 Obyek Pajak	125.560.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		176.550.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah		115000 Dokumen	206.960.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		300.000.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah		14400 Layanan	334.595.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		396.077.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi		2500 Dokumen	25.550.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		67.632.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah		3500 Dokumen	615.928.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		227.681.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah		160 Dokume	82.678.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		159.500.000	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		2 Laporan	27.450.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BPKAD Kota Pekalongan		0	BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				**7.065.317.000**								**10.151.857.000**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**				**7.065.317.000**								**10.151.857.000**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**				**5.530.451.000**								**6.578.115.000**	
5.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**4.343.251.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**5.082.896.000**	
5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian perencanaan,penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**23.594.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**BKPSDM**	**100 persen**	**12.850.000**	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3.132.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		2.750.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	2.952.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		1.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	17.510.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		8.450.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**3.556.643.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**BKPSDM**	**100 persen**	**4.430.374.000**	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26 Orang/bulan	3.518.675.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		4.373.724.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	36.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		55.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.368.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		1.650.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**5.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**BKPSDM**	**100 persen**	**9.500.000**	
5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		9.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**202.840.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**BKPSDM**	**100 persen**	**189.500.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	2.190.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		2.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	29.160.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		22.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	2.430.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		1.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	38.990.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		52.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 Paket	7.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		10.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	1.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		2.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		125 Laporan	120.870.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		100.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**404.914.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**BKPSDM**	**100 persen**	**264.784.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	1.760.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		2.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	200.004.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		140.784.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	203.150.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		122.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**150.260.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**BKPSDM**	**100 persen**	**175.888.000**	
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		13 Unit	47.280.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		35.877.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	93.850.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		128.011.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 Unit	9.130.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	BKPSDM		12.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Persentase Keterpenuhan Formasi ASN**	**80,00 persen**	**80,00 persen**	**1.187.200.000**							**80,00 persen**	**1.495.219.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Persentase ketersediaan data PNS**	**100 persen**	**100 persen**	**435.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**100 persen**	**771.518.000**	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		1 Dokumen	300.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		656.068.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		12 Dokumen	135.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		115.450.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	**Persentase Ketersediaan Data Mutasi dan Promosi ASN**	**100persen**	**100 persen**	**391.210.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**100persen**	**102.754.000**	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		6 Dokumen	32.610.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		19.600.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN		2 Dokumen	358.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		83.154.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Persentase PNS berkembang kompetensinya (Diklat teknis dan Latpim)**	**42persen**	**42 persen**	**189.990.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**42persen**	**479.728.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center		1 Dokumen	98.970.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		338.048.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan		6 Orang	58.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		86.680.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional		1 Dokumen	18.250.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		36.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN		1 Dokumen	13.870.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		19.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Tingkat Disiplin ASN**	**100 persen**	**100 persen**	**171.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**100 persen**	**141.219.000**	
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan		130 orang Orang	43.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		33.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan		1 Orang	91.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		102.219.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		5 Laporan	36.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		6.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				**1.534.866.000**								**3.573.742.000**	
5.04.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase PNS berkembang kompetensinya**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.534.866.000**							**100,00 persen**	**3.573.742.000**	
5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Persentase Penyelenggaran, Pembinaan, pengoordinasian., fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum**	**100 persen**	**100 persen**	**1.138.366.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**100 persen**	**1.018.924.000**	
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		125 Orang	760.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		930.424.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		3 Dokumen	378.366.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		88.500.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Cakupan penyelenggaraan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**250orang**	**250 orang**	**396.500.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah Kota Pekalongan**	**250orang**	**2.554.818.000**	
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota		10 Orang	36.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		1 Laporan	360.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah Kota Pekalongan		2.554.818.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Inspektorat Daerah				**16.176.644.000**								**11.564.199.000**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**16.176.644.000**								**11.564.199.000**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**				**16.176.644.000**								**11.564.199.000**	
6.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**15.358.669.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**11.095.448.000**	
6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**20.465.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Inspektorat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**12.730.000**	
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	7.030.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		1.930.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.435.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		1.300.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		9.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**6.220.144.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Inspektorat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**5.074.828.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		38 Orang/bulan	6.176.644.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		5.040.328.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	42.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		33.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		1.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**511.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Inspektorat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**8.639.000**	
6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		1.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		26 Dokumen	6.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		1.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		38 Orang	500.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		6.639.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**805.883.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Inspektorat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**204.416.000**	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	5.749.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		2.500.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	504.987.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		7.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	49.967.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		40.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		6.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2.680.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		2.700.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90 Laporan	225.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		106.216.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**7.498.657.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Inspektorat Daeah Kota Pekalongan**	**100 persen**	**5.600.000.000**	
6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		1 Unit	479.567.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Daeah Kota Pekalongan		600.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	7.019.090.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Daeah Kota Pekalongan		5.000.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**123.182.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Inspektorat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**61.835.000**	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	3.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		5.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	75.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		34.835.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	44.682.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Kota Pekalongan		22.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**179.338.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Inspektorat Daeah Kota Pekalongan**	**100 persen**	**133.000.000**	
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15 Unit	130.838.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Daeah Kota Pekalongan		70.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	15.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Daeah Kota Pekalongan		33.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		70 Unit	33.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Inspektorat Daeah Kota Pekalongan		30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan**	**85,00 persen**	**85,00 persen**	**437.038.000**							**85,00 persen**	**124.123.000**	
6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Persentase Laporan Hasil Pengawasan Internal yang Terbit Tepat Waktu**	**100 persen**	**100 persen**	**377.038.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**OPD Kota Pekalongan**	**100 persen**	**107.755.000**	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		37 Laporan	43.780.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	OPD Kota Pekalongan		12.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		150 Laporan	43.876.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	OPD Kota Pekalongan		12.000.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		107 Laporan	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	OPD Kota Pekalongan		12.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		46 Laporan	19.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	OPD Kota Pekalongan		11.755.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		4 Kesepakatan	22.870.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	OPD Kota Pekalongan		9.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		7 Dokumen	196.762.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	OPD Kota Pekalongan		51.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Persentase ketercapaian Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu yang Terbit Tepat Waktu**	**100 persen**	**100 persen**	**60.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**OPD Kota Pekalongan**	**100 persen**	**16.368.000**	
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		3 Laporan	10.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	OPD Kota Pekalongan		8.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		18 Laporan	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	OPD Kota Pekalongan		8.368.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Level Kapabilitas APIP**	**3,00 nilai**	**3,00 nilai**	**380.937.000**							**3,00 nilai**	**344.628.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang Disusun**	**100 persen**	**100 persen**	**30.937.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**OPD Kota Pekalongan**	**100 persen**	**35.010.000**	
6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		5 Rekomendas	27.937.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	OPD Kota Pekalongan		32.010.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		2 Rekomendas	3.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	OPD Kota Pekalongan		3.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	**Persentase pendampingan dan asistensi yang dilakukan**	**98persen**	**97 persen**	**350.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**OPD Kota Pekalongan**	**98persen**	**309.618.000**	
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		30 perangka daerah	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	OPD Kota Pekalongan		30.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		21 perangka daerah	50.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	OPD Kota Pekalongan		15.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		19 Kegiatan	100.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	OPD Kota Pekalongan		139.618.000	INSPEKTORAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		3 perangkat daerah	150.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	OPD Kota Pekalongan		125.000.000	INSPEKTORAT DAERAH
	Kecamatan Pekalongan Utara				**9.786.690.000**								**9.733.312.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**9.786.690.000**								**9.733.312.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**9.786.690.000**								**9.733.312.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**9.368.020.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**9.343.861.000**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**114.586.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan**	**100 persen**	**124.000.000**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	4.089.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		5.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.927.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	108.570.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		116.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**7.773.745.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**ASN Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan**	**100 persen**	**7.810.263.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		71 Orang/bulan	7.576.059.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan		7.609.263.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	195.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan		198.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.786.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan		3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**7.300.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan**	**100 persen**	**16.500.000**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	7.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		16.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**303.952.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan**	**100 persen**	**441.140.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	6.280.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		8.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	99.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		152.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	3.140.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		12.750.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	139.362.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		195.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 Paket	30.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		40.250.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		20.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	13.870.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		12.540.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**892.017.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan**	**100 persen**	**712.480.000**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	7.670.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	140.184.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		125.884.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	744.163.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		576.096.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**276.420.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan**	**100 persen**	**239.478.000**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		37 Unit	165.570.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		115.978.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		11 Unit	78.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		78.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		90 Unit	32.850.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		45.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**13.590.000**							**100,00 persen**	**61.377.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**9.130.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan**	**100 persen**	**10.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4 Laporan	9.130.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan		10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100 persen**	**100 persen**	**4.460.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan**	**100 persen**	**51.377.000**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		4 Laporan	4.460.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan		51.377.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**98.570.000**							**100 persen**	**62.841.000**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan**	**100 persen**	**100 persen**	**41.220.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kelurahan, LKK, dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara**	**100 persen**	**19.600.000**	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		4 Lembaga Kemasyarakatan	41.220.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kelurahan, LKK, dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara		19.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**57.350.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**43.241.000**	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1823 Keluarga	57.350.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		43.241.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara**	**100 persen**	**100 persen**	**301.540.000**							**100 persen**	**258.977.000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100 persen**	**100 persen**	**301.540.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kota Pekalongan**	**100 persen**	**258.977.000**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		11 Laporan	301.540.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kota Pekalongan		258.977.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**4.970.000**							**100,00 persen**	**6.256.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**4.970.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan**	**100 persen**	**6.256.000**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen	4.970.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan		6.256.000	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
	Kelurahan Kandang Panjang				**453.846.000**								**406.130.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**453.846.000**								**406.130.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**453.846.000**								**406.130.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**453.846.000**							**100 persen**	**406.130.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**453.846.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan**	**100 persen**	**406.130.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		12.500.000	KELURAHAN KANDANG PANJANG
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 Unit	131.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		70.000.000	KELURAHAN KANDANG PANJANG
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	309.464.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Kandang Panjang	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		323.630.000	KELURAHAN KANDANG PANJANG
	Kelurahan Panjang Wetan				**570.542.000**								**427.857.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**570.542.000**								**427.857.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**570.542.000**								**427.857.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**570.542.000**							**100 persen**	**427.857.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**570.542.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**LKK dan Masyarakat**	**100 persen**	**427.857.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	LKK dan Masyarakat		12.500.000	KELURAHAN PANJANG WETAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		5 Unit	224.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	LKK dan Masyarakat		70.000.000	KELURAHAN PANJANG WETAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		10 Pokmas / Ormas	333.798.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Wetan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	LKK dan Masyarakat		345.357.000	KELURAHAN PANJANG WETAN
	Kelurahan Degayu				**380.630.000**								**339.467.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**380.630.000**								**339.467.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**380.630.000**								**339.467.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**380.630.000**							**100 persen**	**339.467.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**380.630.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan LKK**	**100 persen**	**339.467.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Krapyak	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN DEGAYU
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2 Unit	124.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		68.867.000	KELURAHAN DEGAYU
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		10 Pokmas / Ormas	243.886.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Degayu	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		258.100.000	KELURAHAN DEGAYU
	Kelurahan Bandengan				**347.722.000**								**112.500.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**347.722.000**								**112.500.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**347.722.000**								**112.500.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**347.722.000**							**100 persen**	**112.500.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**347.722.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan LKK**	**100 persen**	**112.500.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Bandengan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN BANDENGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	124.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Bandengan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		70.000.000	KELURAHAN BANDENGAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	210.978.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Bandengan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		30.000.000	KELURAHAN BANDENGAN
	Kelurahan Krapyak				**722.226.000**								**545.493.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**722.226.000**								**545.493.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**722.226.000**								**545.493.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**722.226.000**							**100 persen**	**545.493.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**722.226.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan LKK**	**100 persen**	**545.493.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Krapyak	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN KRAPYAK
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		9 Unit	234.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Krapyak	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		70.000.000	KELURAHAN KRAPYAK
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		10 Pokmas / Ormas	475.482.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Krapyak	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		462.993.000	KELURAHAN KRAPYAK
	Kelurahan Padukuhan Kraton				**477.481.000**								**448.520.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**477.481.000**								**448.520.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**477.481.000**								**448.520.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**477.481.000**							**100 persen**	**448.520.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**477.481.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan LKK**	**100 persen**	**448.520.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		5 Unit	127.366.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		70.000.000	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	337.615.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Padukuhan Kraton	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		366.020.000	KELURAHAN PADUKUHAN KRATON
	Kelurahan Panjang Baru				**427.336.000**								**386.492.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**427.336.000**								**386.492.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**427.336.000**								**386.492.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**427.336.000**							**100 persen**	**386.492.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**427.336.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan LKK**	**100 persen**	**386.492.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN PANJANG BARU
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		5 Unit	124.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara, Panjang Baru	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		70.000.000	KELURAHAN PANJANG BARU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	290.592.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Utara Panjang Baru	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		303.992.000	KELURAHAN PANJANG BARU
	Kecamatan Pekalongan Selatan				**10.088.404.000**								**8.722.301.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**10.088.404.000**								**8.722.301.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**10.088.404.000**								**8.722.301.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**9.693.612.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**8.396.613.000**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**103.442.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 Persen**	**102.757.000**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	3.828.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		5.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.804.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	97.810.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		94.757.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**7.197.272.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 Persen**	**7.029.493.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		64 Orang/bulan	7.023.100.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		6.851.893.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	172.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		174.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.672.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**5.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 Persen**	**18.505.000**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		18.505.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**288.488.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 Persen**	**346.116.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	5.700.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		7.800.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	114.370.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		136.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	3.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		9.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	114.288.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		127.816.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	26.650.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		35.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	11.580.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		17.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		5 Laporan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**863.914.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 Persen**	**711.837.000**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	6.400.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		9.300.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	98.720.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		86.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	758.794.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		616.537.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.235.496.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 Persen**	**187.905.000**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		38 Unit	144.496.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		85.905.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		9 Unit	1.062.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		62.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		89 Unit	29.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		40.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Selatan**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**12.580.000**							**100,00 persen**	**22.321.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Selatan**	**100 persen**	**100 Persen**	**8.600.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**12.500.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4 Laporan	8.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Selatan		12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100 persen**	**100 persen**	**3.980.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**9.821.000**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		3 Laporan	3.980.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kelurahan di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan		9.821.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Selatan**	**100 persen**	**100 persen**	**98.040.000**							**100 persen**	**60.112.000**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan**	**100 persen**	**100 Persen**	**40.690.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kelurahan, LKK dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan**	**100 persen**	**25.000.000**	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		4 Lembaga Kemasyarakatan	40.690.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kelurahan, LKK dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan		25.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**57.350.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan PAUD di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan**	**100 persen**	**35.112.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		117 Keluarga	57.350.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan PAUD di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan		35.112.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat kinerja Trantibum Wilayah Selatan**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**279.102.000**							**100,00 persen**	**231.979.000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Selatan**	**100 persen**	**100 Persen**	**279.102.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan LKK di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan**	**100 persen**	**231.979.000**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		9 Laporan	279.102.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan		231.979.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Selatan**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**5.070.000**							**100,00 persen**	**11.276.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**5.070.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Pemerintah dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan**	**100 persen**	**11.276.000**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen	5.070.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Pemerintah dan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan		11.276.000	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
	Kelurahan Jenggot				**418.057.000**								**387.312.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**418.057.000**								**387.312.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**418.057.000**								**387.312.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**418.057.000**							**100 persen**	**387.312.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**418.057.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan LKK**	**100 persen**	**387.312.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN JENGGOT
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		6 Unit	124.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		88.867.000	KELURAHAN JENGGOT
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	281.313.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Jenggot	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		285.945.000	KELURAHAN JENGGOT
	Kelurahan Buaran Kradenan				**565.157.000**								**385.771.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**565.157.000**								**385.771.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**565.157.000**								**385.771.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**565.157.000**							**100 persen**	**385.771.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**565.157.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan LKK**	**100 persen**	**385.771.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN BUARAN KRADENAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		5 Unit	275.144.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		88.867.000	KELURAHAN BUARAN KRADENAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		10 Pokmas / Ormas	277.513.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Buaran Kradenan	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		284.404.000	KELURAHAN BUARAN KRADENAN
	Kelurahan Kuripan Kertoharjo				**347.693.000**								**321.037.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**347.693.000**								**321.037.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**347.693.000**								**321.037.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**347.693.000**							**100 persen**	**321.037.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**347.693.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan LKK**	**100 persen**	**321.037.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 Unit	124.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		88.867.000	KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	210.949.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Kertoharjo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		219.670.000	KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO
	Kelurahan Kuripan Yosorejo				**407.772.000**								**112.500.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**407.772.000**								**112.500.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**407.772.000**								**112.500.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**407.772.000**							**100 persen**	**112.500.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**407.772.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**MASYARAKAT , LKK**	**100 persen**	**112.500.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	MASYARAKAT, LKK		12.500.000	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 Unit	135.004.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	MASYARAKAT, LKK		70.000.000	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	260.268.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Kuripan Yosorejo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	MASYARAKAT, LKK		30.000.000	KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO
	Kelurahan Soko Duwet				**381.336.000**								**350.554.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**381.336.000**								**350.554.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**381.336.000**								**350.554.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**381.336.000**							**100 persen**	**350.554.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**381.336.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan LKK**	**100 persen**	**350.554.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN SOKO DUWET
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		6 Unit	131.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		96.505.000	KELURAHAN SOKO DUWET

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	236.954.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Sokoduwet	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		241.549.000	KELURAHAN SOKO DUWET
	Kelurahan Banyurip				**426.111.000**								**393.978.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**426.111.000**								**393.978.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**426.111.000**								**393.978.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**426.111.000**							**100 persen**	**393.978.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**426.111.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan LKK**	**100 persen**	**393.978.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN BANYURIP
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		6 Unit	131.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		100.005.000	KELURAHAN BANYURIP
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		10 Pokmas / Ormas	281.729.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Selatan, Banyurip	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		281.473.000	KELURAHAN BANYURIP
	Kecamatan Pekalongan Barat				**10.057.096.000**								**9.690.101.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**10.057.096.000**								**9.690.101.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**10.057.096.000**								**9.690.101.000**	
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**9.749.214.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**9.380.355.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**114.586.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kec. Pekalongan Barat**	**100 Persen**	**130.500.000**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	4.089.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		13.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.927.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	108.570.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		114.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**8.044.497.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kec. Pekalongan Barat**	**100 Persen**	**7.777.528.000**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		65 Orang/bulan	7.846.811.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		7.579.528.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	195.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		195.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.786.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**7.300.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kec. Pekalongan Barat**	**100 Persen**	**18.533.000**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	7.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		18.533.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**286.409.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kec. Pekalongan Barat**	**100 Persen**	**432.426.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	6.280.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		8.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	74.530.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		149.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	7.670.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	141.759.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		191.326.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 Paket	30.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		40.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	12.000.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		20.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		9 Laporan	13.870.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.032.809.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kec. Pekalongan Barat**	**100 Persen**	**805.276.000**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	7.670.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	117.900.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		105.250.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	907.239.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		689.526.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**	**263.613.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kec. Pekalongan Barat**	**100 Persen**	**216.092.000**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		33 Unit	143.163.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		104.592.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		15 Unit	87.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		66.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		126 Unit	32.850.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kec. Pekalongan Barat		45.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Barat**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**13.590.000**							**100,00 persen**	**41.029.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase ketercapaian koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan**	**100 persen**	**100 Persen**	**9.130.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat**	**100 persen**	**15.000.000**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4 Laporan	9.130.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat		15.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100 persen**	**100 persen**	**4.460.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat**	**100 persen**	**26.029.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		4 Laporan	4.460.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat		26.029.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Barat**	**100 persen**	**100 persen**	**96.700.000**							**100 persen**	**66.927.000**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat kecamatan yang dilaksanakan**	**100 persen**	**100 Persen**	**41.220.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat**	**100 persen**	**47.600.000**	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		4 Lembaga Kemasyarak tan	41.220.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat		47.600.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**55.480.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat**	**100 persen**	**19.327.000**	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		1166 Keluarga	55.480.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat		19.327.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat Kinerja Trantibum di wilayah Barat**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**192.622.000**							**100,00 persen**	**191.787.000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase tercapainya koordinasi upaya penyelenggaraan Trantibum**	**100 persen**	**100 Persen**	**192.622.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat**	**100 persen**	**191.787.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		11 Laporan	192.622.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat		191.787.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Barat**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4.970.000**							**100 Persen**	**10.003.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	**100 persen**	**100 Persen**	**4.970.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat**	**100 persen**	**10.003.000**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen	4.970.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kecamatan Pekalongan Barat		10.003.000	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT
	Kelurahan Medono				**527.465.000**								**421.660.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**527.465.000**								**421.660.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**527.465.000**								**421.660.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**527.465.000**							**100 persen**	**421.660.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 Persen**	**527.465.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan LKK**	**100 persen**	**421.660.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Medono	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN MEDONO
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		19 Unit	192.632.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Medono	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		106.505.000	KELURAHAN MEDONO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		8 Pokmas / Ormas	322.333.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Medono	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		302.655.000	KELURAHAN MEDONO
	Kelurahan Podosugih				**530.247.000**								**339.490.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**530.247.000**								**339.490.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**530.247.000**								**339.490.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**530.247.000**							**100 persen**	**339.490.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 Persen**	**530.247.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan LKK**	**100 persen**	**339.490.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN PODOSUGIH
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		5 Unit	242.382.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		99.305.000	KELURAHAN PODOSUGIH
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		8 Pokmas / Ormas	275.365.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Podosugih	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		227.685.000	KELURAHAN PODOSUGIH
	Kelurahan Tirto				**473.876.000**								**365.290.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**473.876.000**								**365.290.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**473.876.000**								**365.290.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**473.876.000**							**100 persen**	**365.290.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 Persen**	**473.876.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan LKK**	**100 persen**	**365.290.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Tirto	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN TIRTO
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		18 Unit	201.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Tirto	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		106.505.000	KELURAHAN TIRTO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	259.494.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Tirto	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK		246.285.000	KELURAHAN TIRTO
	Kelurahan Sapuro Kebulen				**513.869.000**								**416.017.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**513.869.000**								**416.017.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**513.869.000**								**416.017.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**513.869.000**							**100 persen**	**416.017.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 Persen**	**513.869.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan**	**100 persen**	**416.017.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Sapuro Kebulen	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		12.500.000	KELURAHAN SAPURO KEBULEN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		2 Unit	182.994.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Sapuro Kebulen	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		98.697.000	KELURAHAN SAPURO KEBULEN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	318.375.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Sapuro Kebulen	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		304.820.000	KELURAHAN SAPURO KEBULEN
	Kelurahan Bendan Kergon				**550.844.000**								**490.677.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**550.844.000**								**490.677.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**550.844.000**								**490.677.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Kinerja pemberdayaan masyarakat kecamatan/kelurahan di Wilayah Barat**	**100 persen**	**100 persen**	**550.844.000**							**100 persen**	**490.677.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 Persen**	**550.844.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan**	**100 persen**	**490.677.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		12.500.000	KELURAHAN BENDAN KERGON
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		7 Unit	139.744.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		98.697.000	KELURAHAN BENDAN KERGON
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	398.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Bendan Kergon	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		379.480.000	KELURAHAN BENDAN KERGON
	Kelurahan Pasirkratonkramat				**644.161.000**								**514.340.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**644.161.000**								**514.340.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**644.161.000**								**514.340.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**644.161.000**							**100 persen**	**514.340.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 Persen**	**644.161.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**masyarakat dan LKK**	**100 persen**	**514.340.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Pasirkratonkramat	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	masyarakat dan LKK		12.500.000	KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		19 Unit	253.754.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Pasirkratonkramat	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	masyarakat dan LKK		106.000.000	KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		8 Pokmas / Ormas	377.907.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Pasirkratonkramat	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	masyarakat dan LKK		395.840.000	KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT
	Kelurahan Pringrejo				**564.450.000**								**486.914.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**564.450.000**								**486.914.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**564.450.000**								**486.914.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**564.450.000**							**100 persen**	**486.914.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 Persen**	**564.450.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan**	**100 persen**	**486.914.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Pringrejo	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		12.500.000	KELURAHAN PRINGREJO
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		66 Unit	152.994.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Pringrejo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		109.711.000	KELURAHAN PRINGREJO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	398.956.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Barat Pringrejo	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat dan LKK Kota Pekalongan		364.703.000	KELURAHAN PRINGREJO
	Kecamatan Pekalongan Timur				**13.401.318.000**								**10.176.033.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**13.401.318.000**								**10.176.033.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**13.401.318.000**								**10.176.033.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**13.143.988.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**9.856.722.000**	
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**114.586.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Timur**	**100 persen**	**112.669.000**	
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	4.089.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		10.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.927.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		7.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	108.570.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		95.669.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**8.358.198.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Timur**	**100 persen**	**8.205.944.000**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		66 Orang/bulan	8.135.982.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		8.168.944.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	220.430.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		34.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.786.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		3.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**7.300.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Timur**	**100 persen**	**18.505.000**	
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		2 Paket	7.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		18.505.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**326.708.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Timur**	**100 persen**	**398.464.000**	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	8.600.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	110.960.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		131.964.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	3.140.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	144.768.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		185.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		13 Paket	30.300.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		32.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	15.070.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		16.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		7 Laporan	13.870.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		12.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase ketercapaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**2.500.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**masyarakat**	**100 persen**	**0**	
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	2.500.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	masyarakat		0	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**1.372.464.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Timur**	**100 persen**	**904.955.000**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	7.670.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		10.500.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	198.780.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		94.408.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	1.166.014.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		800.047.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**464.732.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Pekalongan Timur**	**100 persen**	**216.185.000**	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		41 Unit	162.532.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		141.185.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		10 Unit	269.350.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		45.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		120 Unit	32.850.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Pekalongan Timur		30.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur**	**100 persen**	**100 persen**	**13.590.000**							**100 persen**	**48.099.000**	
7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan** **Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**9.130.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Timur dan Masyarakat**	**100 persen**	**17.000.000**	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		4 Laporan	9.130.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Timur dan Masyarakat		17.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100 persen**	**100 persen**	**4.460.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Kecamatan Timur dan masyarakat**	**100 persen**	**31.099.000**	
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		4 Laporan	4.460.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Kecamatan Timur dan masyarakat		31.099.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Timur**	**100 persen**	**100 persen**	**98.570.000**							**100 persen**	**60.293.000**	
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**41.220.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat**	**100 persen**	**28.293.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		4 Lembaga Kemasyarakatan	41.220.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		28.293.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan**	**100 persen**	**100 persen**	**57.350.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat**	**100 persen**	**32.000.000**	
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		710 Keluarga	57.350.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		32.000.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur Tingkat kinerja Trantibum di Wilayah Timur**	**100,00 persen**	**100,00 persen 100 persen**	**140.200.000**							**100,00 persen**	**204.554.000**	
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase ketercapaian kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum**	**100 persen**	**100 persen**	**140.200.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat**	**100 persen**	**204.554.000**	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		11 Laporan	140.200.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		204.554.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Timur**	**undefined undefined**	**undefined undefined**	**4.970.000**							**undefined undefined**	**6.365.000**	
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase ketercapaian Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**4.970.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat**	**100 persen**	**6.365.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen	4.970.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		6.365.000	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR
	Kelurahan Kauman				**541.422.000**								**505.522.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**541.422.000**								**505.522.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**541.422.000**								**505.522.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**541.422.000**							**100 persen**	**505.522.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**541.422.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**RT,RW, LPM, BKM, Karang Taruna, Posyandu, PKK, FKSS Poktan, Tagana**	**100 persen**	**505.522.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Kauman	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	RT,RW, LPM, BKM, Karang Taruna, Posyandu, PKK, FKSS Poktan, Tagana		12.500.000	KELURAHAN KAUMAN
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	124.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Kauman	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	RT,RW, LPM, BKM, Karang Taruna, Posyandu, PKK, FKSS Poktan, Tagana		92.227.000	KELURAHAN KAUMAN
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	404.678.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Kauman	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	RT,RW, LPM, BKM, Karang Taruna, Posyandu, PKK, FKSS Poktan, Tagana		400.795.000	KELURAHAN KAUMAN
	Kelurahan Poncol				**459.198.000**								**438.940.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**459.198.000**								**438.940.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**459.198.000**								**438.940.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**459.198.000**							**100 persen**	**438.940.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**459.198.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kelurahan Poncol**	**100 persen**	**438.940.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kelurahan Poncol		12.500.000	KELURAHAN PONCOL
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	131.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kelurahan Poncol		50.638.000	KELURAHAN PONCOL
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	314.816.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Poncol	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kelurahan Poncol		375.802.000	KELURAHAN PONCOL
	Kelurahan Klego				**411.835.000**								**373.924.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**411.835.000**								**373.924.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**411.835.000**								**373.924.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**411.835.000**							**100 persen**	**373.924.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**411.835.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kelurahan Klego**	**100 persen**	**373.924.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kelurahan Klego		12.500.000	KELURAHAN KLEGO
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		4 Unit	124.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kelurahan Klego		82.000.000	KELURAHAN KLEGO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	275.091.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur, Klego	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kelurahan Klego		279.424.000	KELURAHAN KLEGO
	Kelurahan Gamer				**354.222.000**								**115.000.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**354.222.000**								**115.000.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**354.222.000**								**115.000.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**354.222.000**							**100 persen**	**115.000.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**354.222.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kelurahan Gamer**	**100 persen**	**115.000.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Gamer	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kelurahan Gamer		15.000.000	KELURAHAN GAMER
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		5 Unit	124.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Gamer	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kelurahan Gamer		70.000.000	KELURAHAN GAMER
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	217.478.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Gamer	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kelurahan Gamer		30.000.000	KELURAHAN GAMER
	Kelurahan Noyontaansari				**455.287.000**								**404.312.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**455.287.000**								**404.312.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**455.287.000**								**404.312.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**455.287.000**							**100 persen**	**404.312.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**455.287.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat**	**100 persen**	**404.312.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Noyontaansari	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		12.500.000	KELURAHAN NOYONTAANSARI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		6 Unit	149.244.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Noyontaansari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENYETARAA PENGHASILAN TETAP KEPAL DESA DAN PERANGKAT DESA	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		97.525.000	KELURAHAN NOYONTAANSA RI
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		8 Pokmas / Ormas	293.543.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Noyontaansari	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat		294.287.000	KELURAHAN NOYONTAANSA RI
	Kelurahan Setono				**465.379.000**								**445.397.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**465.379.000**								**445.397.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**465.379.000**								**445.397.000**	
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**465.379.000**							**100 persen**	**445.397.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**465.379.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat Kelurahan Setono**	**100 persen**	**445.397.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	12.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kelurahan Setono		12.500.000	KELURAHAN SETONO
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		4 Unit	131.882.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Setono	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kelurahan Setono		77.638.000	KELURAHAN SETONO
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		9 Pokmas / Ormas	320.997.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Setono	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat Kelurahan Setono		355.259.000	KELURAHAN SETONO
	Kelurahan Kalibaros				**398.347.000**								**559.091.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**				**398.347.000**								**559.091.000**	
7.01	**KECAMATAN**				**398.347.000**								**559.091.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**398.347.000**							**100 persen**	**559.091.000**	
7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan**	**100 persen**	**100 persen**	**398.347.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**Masyarakat, RT, RW, LPM, BKM, Karang Taruna, Posyandu,, Posbindu, PKK, FKSS, Kelompok Tani, Tagana**	**100 persen**	**559.091.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarak tan	12.500.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Kali Baros	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat, RT, RW, LPM, BKM, Karang Taruna, Posyandu,, Posbindu, PKK, FKSS, Kelompok Tani, Tagana		15.000.000	KELURAHAN KALIBAROS
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3 Unit	138.366.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Kali Baros	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat, RT, RW, LPM, BKM, Karang Taruna, Posyandu,, Posbindu, PKK, FKSS, Kelompok Tani, Tagana		270.000.000	KELURAHAN KALIBAROS
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		10 Pokmas / Ormas	247.481.000	Kota Pekalongan, Pekalongan Timur Kali Baros	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	Masyarakat, RT, RW, LPM, BKM, Karang Taruna, Posyandu,, Posbindu, PKK, FKSS, Kelompok Tani, Tagana		274.091.000	KELURAHAN KALIBAROS
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				**7.002.296.000**								**4.159.757.500**	
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**				**7.002.296.000**								**4.159.757.500**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				**7.002.296.000**								**4.159.757.500**	
8.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**3.395.796.000**							**100,00 persen 100,00 persen 100,00 persen**	**1.985.190.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**19.772.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan**	**100 persen**	**10.912.000**	
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3 Dokumen	6.624.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		2.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2 Dokumen	1.148.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		1.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		15 Laporan	12.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		6.912.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**2.759.774.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan**	**100 persen**	**1.748.274.000**	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		14 Orang/bulan	2.722.835.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		1.713.774.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	35.875.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		33.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	1.064.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		1.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**5.000.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan**	**100 persen**	**9.500.000**	
8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	5.000.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		9.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**139.590.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan**	**100 persen**	**94.413.000**	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	3.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		3.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	48.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		30.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4 Paket	1.650.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		4.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		4 Paket	18.500.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		19.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2 Paket	6.060.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		8.300.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	1.890.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		2.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40 Laporan	59.340.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		27.113.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**267.360.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan**	**100 persen**	**61.561.000**	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		4 Laporan	730.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		1.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	57.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		29.600.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	208.730.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		30.961.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 persen**	**100 persen**	**204.300.000**			**07. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Narkoba, Judi, dan Penyeludupan**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment**	**ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan**	**100 persen**	**60.530.000**	
8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		10 Unit	58.410.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		44.530.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	138.140.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		8.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		17 Unit	7.750.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	07. Memperkuat Reformas Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi reward and punishment	ASN Badan Kesbangpol Kota Pekalongan		8.000.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**1.946.743.000**							**100,00 persen**	**874.967.500**	
8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Persentase pembinaan karakter, penguatan wawasan kebangsaan, pelaksanaan upacara bendera dan korp musik**	**100 persen**	**100 persen**	**1.946.743.000**			**01. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah**	**Masyarakat etnis/suku/agama/ormas/generasi muda**	**100 persen**	**874.967.500**	
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		268 Orang	19.560.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	01. Memperkokoh Ideolog Pancasila, Demokrasi, dar Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Masyarakat etnis/suku/agama/ormas/generasi muda		26.792.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		1000 Orang	235.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	01. Memperkokoh Ideolog Pancasila, Demokrasi, dar Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Masyarakat etnis/suku/aga ma/ormas/gene rasi muda		142.056.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		566 Keluarga	1.155.340.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	01. Memperkokoh Ideolog Pancasila, Demokrasi, dar Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Masyarakat etnis/suku/aga ma/ormas/gene rasi muda		114.619.500	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka		1 Dokumen	535.943.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	01. Memperkokoh Ideolog Pancasila, Demokrasi, dar Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Masyarakat etnis/suku/aga ma/ormas/gene rasi muda		591.500.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Jumlah parpol dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan politik**	**16,00 lembaga**	**16,00 lembaga**	**1.052.090.000**							**16,00 lembaga**	**859.496.000**	
8.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	**Persentase pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik**	**100 persen**	**100 persen**	**1.052.090.000**			**01. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah**	**Partai Politik dan Lembaga Pendidikan**	**100 persen**	**859.496.000**	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		600 Orang	827.980.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	01. Memperkokoh Ideolog Pancasila, Demokrasi, dar Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Partai Politik dan Lembaga Pendidikan		774.700.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		500 Orang	224.110.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	01. Memperkokoh Ideolog Pancasila, Demokrasi, dar Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Partai Politik dan Lembaga Pendidikan		84.796.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase ormas yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**220.900.000**							**100,00 persen**	**136.399.000**	
8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**jumlah pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat**	**7kali**	**7 kali**	**220.900.000**			**02. Memantapkan Sisten Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah**	**Organisasi Kemasyarakat an**	**7kali**	**136.399.000**	
8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		300 Orang	220.900.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonom Digital, Ekonomi Hijau, da Ekonomi Biru	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Organisasi Kemasyarakata n		136.399.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase etnis/suku/agama/ormas dan LSM yang memahami tentang ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**97.837.000**							**100,00 persen**	**212.054.000**	
8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**jumlah pembinaan bidang Ketahanan Ekonomi dan sosial budaya**	**6kali**	**1 kali**	**97.837.000**			**02. Memantapkan Sisten Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah**	**Masyarakat etnis/suku/aga ma/ormas/gen erasi muda**	**1kali**	**212.054.000**	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				Target	Pagu Indikatif (Rp)	
								Nasional	Provinsi	Kota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		150 Orang	97.837.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonom Digital, Ekonomi Hijau, da Ekonomi Biru	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Masyarakat etnis/suku/aga ma/ormas/gene rasi muda		212.054.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial**	**100,00 persen**	**100,00 persen**	**288.930.000**							**100,00 persen**	**91.651.000**	
8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah laporan rencana penanganan konflik sosial yang disusun**	**6 laporan**	**1 laporan**	**288.930.000**			**02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**	**04. Peningkatan tat kelola pemerintaha yang lebih adaptif dan kolaboratif**	**11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah**	**Masyarakat etnis/suku/aga ma/ormas/gen erasi muda**	**1laporan**	**91.651.000**	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		200 Orang	288.930.000	Kota Pekalongan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DTU-DAU	02. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonom Digital, Ekonomi Hijau, da Ekonomi Biru	04. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif da kolaboratif	11. Optimalisasi peran serta stakeholder dalam mewujudkan kondusivitas wilayah	Masyarakat etnis/suku/aga ma/ormas/gene rasi muda		91.651.000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
					1.013.929.6.000								**1.029.003.771.250**	

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

5.2 Kerangka Pendanaan Tahun 2025

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan dan pagu indikatif belanja daerah untuk tahun 2025 disajikan dalam Tabel V-3 berikut.

Tabel V-3 Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Kota Pekalongan Tahun 2025

URAIAN	PROYEKSI 2025
PENDAPATAN	**1.005.379.456.000**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**297.670.934.000**
Pajak Daerah	141.900.000.000
Retribusi Daerah	145.000.000.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.226.934.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	3.544.000.000
PENDAPATAN TRANSFER	**707.708.522.000**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**643.362.091.000**
Bagi Hasil Pajak	25.901.831.000
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.364.502.000
Dana Alokasi Umum	478.357.629.000
Dana Alokasi Khusus	147.117.690.000
Dana Insentif Daerah	4.000.000.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**50.966.870.000**
Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi	50.966.870.000
Bantuan Keuangan Provinsi	0
Bantuan Keuangan Umum Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
Pendapatan Hibah	0
BELANJA DAERAH	**1.013.929.456.000**
BELANJA OPERASI	
Belanja Pegawai	
Belanja Barang dan Jasa	
Belanja Hibah	
Belanja Bantuan Sosial	
BELANJA MODAL	
BELANJA TIDAK TERDUGA	
Belanja Tidak Terduga	
PEMBIAYAAN DAERAH	**8.550.000.000**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**15.000.000.000**
Penggunaan SiLPA	15.000.000.000
Pencairan Dana Cadangan	0
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**6.450.000.000**
Pembentukan Dana Cadangan	4.000.000.000
Penyertaan Modal Daerah	2.450.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2024

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2025, maka ditetapkan target pada indikator kinerja utama daerah tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel VI-1 Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET 2025
1	Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,40
2	Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	92,08
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,30
4	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9,31
5	Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	3,00
6	Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,75
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	65,31
8	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00
9	Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	74,49
11	Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	98,44
12	Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	790,00
13	Indeks Kualitas Air	indeks	59,42
14	Indeks Kualitas Lahan	indeks	37,65
15	Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7,00
16	Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00
17	Persentase pelayanan sampah	persen	72,12
18	Tingkat pelayanan jalan (*Level Of Service*)	kategori	B
19	Persentase keterhubungan jalan	persen	100,00
20	Pertumbuhan ekonomi	persen	4,55
21	Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	122,00
22	Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00

NO	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA)	SATUAN	TARGET 2025
23	Indeks SPBE	indeks	3,34
24	IKM Kota	persen	90,70
25	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	97,20
26	Indeks Merit System	indeks	340,00
27	Nilai SAKIP Kota	skor	75,57
28	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	kategori	WTP
29	Maturitas SPIP	nilai	3,80
30	Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	7,00

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 (diolah), 2024

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Untuk indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disajikan dalam Tabel VI-2 merupakan indikator program prioritas pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD Kota Pekalongan.

Tabel VI-2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**				
	- Usia Harapan Hidup	Tahun	74,62	Tujuan Kota	Kota
	- Angka Kemiskinan	persen	6,70 - 6,23	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Pembangunan Manusia	indeks	77,39	Tujuan Kota	Kota
	- Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,05 – 4,47	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase kelurahan dengan kawasan kumuh kurang dari 10 persen	persen	88,89	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Luas genangan Banjir dan Rob	persen	17,02	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	persen	90,71	Tujuan Kota	Kota
	- PDRB Perkapita	Rp. Juta/jiwa/ tahun	46,43	Tujuan Kota	Kota
	- Jumlah konflik sosial	kasus	0,00	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Keluarga Sehat	indeks	0,40	IKU Kota	Kota
	- Angka Kematian Ibu	per 100.000 KH	92,08	IKU Kota	Kota
	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7,30	IKU Kota	Kota
	Angka Kematian Balita (AKABA)	per 1.000 KH	9,31	IKU Kota	Kota
	- Persentase Penurunan Warga Miskin (DTKS)	persen	3,00	IKU Kota	Kota
	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	indeks	65,31	IKU Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	74,49	IKU Kota	Kota
	- Persentase perumahan dan permukiman yang tidak kumuh	persen	98,44	IKU Kota	Kota
	- Luas Genangan Banjir dan Rob	hektar	790,00	IKU Kota	Kota
	- Persentase penduduk yang mendapatkan akses Layanan Air Minum	persen	100,00	IKU Kota	Kota
	- Persentase pelayanan sampah	persen	72,12	IKU Kota	Kota
	- Pertumbuhan ekonomi	persen	5,44 - 6,0	IKU Kota	Kota
	- Persentase pengelolaan potensi konflik sosial	persen	100,00	IKU Kota	Kota
B.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**				
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PENDIDIKAN				
	- Persentase capaian SPM pendidikan serta ketercukupan pendidik dan tenaga kependidikan	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	- Persentase sekolah yang menjalankan kurikulum muatan lokal	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pendidikan
	URUSAN KESEHATAN				
	- Persentase capaian SPM Kesehatan	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kesehatan
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	- Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (IKK *Outcome*)	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- Persentase Luas Kawasan Kota Rawan Banjir dan Rob yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir	persen	82,98	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- persentase layanan air minum terhadap jumlah penduduk	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan	persen	1,60	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- Persentase Kesesuaian Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	regulasi	96,243	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	- Pengembangan Sarana Persampahan	persen	80,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan PU-PR
	URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
- Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	persen	99,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS				
- Persentase Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sesuai Dengan SPM	persen	90,00	IKU Renstra	Satpol PP
- Persentase korban bencana yang ditangani	persen	100,00	IKU Renstra	BPBD
- Persentase penanganan bencana kebakaran	persen	100,00	IKU Renstra	Satpol PP
URUSAN SOSIAL				
- Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	5,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Sosial
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
URUSAN TENAGA KERJA				
- Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	52,33	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Tenaga Kerja
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
- Indeks sumbangan pendapatan perempuan dalam IDG	Indeks	65,31	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Skor Kota Layak Anak	Skor	769,90	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN PANGAN				
- Persentase penanganan daerah rawan pangan	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pangan
URUSAN PERTANAHAN				
- Persentase peta bidang tanah untuk pembangunan fasilitas umum yang sudah teregister	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanahan
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
- Persentase tingkat pencemaran air	Persen	51.43	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Persentase Kenaikan Luasan RTH	Persen	0,50	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Persentase peningkatan pengelolaan sampah	Persen	70,29	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
- Tertib Hukum Lingkungan	Persen	45,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
- Tingkat cakupan layanan administrasi kependudukan	persen	90,46	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Adminduk dan Capil
URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
- Persentase swadaya masyarakat dalam pembangunan berbasis masyarakat	Persen	9,49	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
- Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	67,60	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN PERHUBUNGAN				
- Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	persen	28,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perhubungan
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
- Indeks domain tata kelola SPBE	Indeks	3,40	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
- Kinerja Unit Pelayanan Informasi Publik	Mutu pelayanan	Sangat Baik (Nilai 88,31 - 100)	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kominfo
URUSAN KOPERASI DAN UKM				
- Nilai modal usaha UMKM dari koperasi	Triliun Rupiah	8,72	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Koperasi UKM

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
URUSAN PENANAMAN MODAL				
- Nilai Investasi sampai dengan tahun rencana	Miliar Rupiah	212,54	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Penanaman Modal
URUSAN KEBUDAYAAN				
- Persentase peningkatan kelompok budaya	Persen	1,48	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kebudayaan
URUSAN PERPUSTAKAAN				
- Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (IKK *Outcome*)	indeks	20,52	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perpustakaan
URUSAN KEARSIPAN				
- Indeks Pengawasan Kearsipan Tingkat Kota (ANRI)	indeks	92,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kearsipan
URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
- Tingkat partisipasi pemuda dalam pembangunan	Persen	1.39	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
- Prestasi olahraga tingkat provinsi	Cabor	15	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
URUSAN STATISTIK				
- Persentase ketersediaan data statistik sektoral	persen	98,50	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Statistik
URUSAN PERSANDIAN				
- Indeks tata kelola KAMI	Tingkat	II	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Persandian
URUSAN PILIHAN				
URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN				
- Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya dan Tangkap) Kab/Kota	ton	15.446,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Kelautan dan Perikanan
URUSAN PARIWISATA				
- Tingkat Kunjungan Wisata	Orang	1.200.000	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pariwisata

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
URUSAN PERTANIAN				
- Nilai produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Miliar Rupiah	255,45	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Pertanian
URUSAN PERINDUSTRIAN				
- Pertumbuhan Industri	persen	2,30	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perindustrian
URUSAN PERDAGANGAN				
- Nilai ekspor perdagangan	Juta USD	27,24	IKU Renstra	OPD Pengampu Urusan Perdagangan
UNSUR PENDUKUNG URUSN PEMERINTAHAN				
SEKRETARIAT DAERAH				
- Persentase capaian kinerja pembangunan	persen	96,70	IKU Renstra	Setda
SEKRETARIAT DPRD				
- Persentase pelayanan agenda kerja DPRD	persen	100,00	IKU Renstra	Set DPRD
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
PERENCANAAN				
- Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Perencanaan
KEUANGAN				
- Penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
- Rasio PAD	persen	2,05	IKU Renstra	OPD Pengampu Keuangan
KEPEGAWAIAN				
- Persentase laporan SKP ASN tepat waktu	Persen	90,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Kepegawaian
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
- Persentase jumlah ASN yang meningkat kompetensinya	persen	40,00	IKU Renstra	OPD Pendidikan dan Pelatihan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
- Persentase laporan hasil litbang	persen	100,00	IKU Renstra	OPD Pengampu Litbang
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
INSPEKTORAT DAERAH				

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN		SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
	- Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	persen	87,10	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
	- Jumlah OPD yang memenuhi standar pengusulan predikat WBK/WBBM	OPD	15,00	IKU Renstra	Inspektorat Daerah
	UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN				
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, Trantibum dan Pemerintahan Umum	Persen	100,00	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Utara
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Selatan
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec. Pekalongan Barat
	- Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	persen	100,00	IKU Renstra	Kec.Pekalongan Timur
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	- Persentase etnis/suku /agama/ormas dan LSM yang memahami nilai-nilai kehidupan berbangsa	persen	100,00	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
	- Persentase Partai Politik dan Lembaga Pendidikan yang Memahami Tata Kehidupan Politik	persen	100,00	IKU Renstra	Badan Kesbangpol
C.	**ASPEK DAYA SAING**				
	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	50,89	Tujuan Kota	Kota
	- Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	persen	100,00	Tujuan Kota	Kota
	- Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	74,69	Tujuan Kota	Kota
	- Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	9,75	IKU Kota	Kota

ASPEK/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2025	KETERANGAN	PENANGGUNG JAWAB
- Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan	persen	100,00	IKU Kota	Kota
- Kategori Kota Layak Anak	Kategori	Nindya	IKU Kota	Kota
- Indeks Kualitas Air	indeks	59,42	IKU Kota	Kota
- Indeks Kualitas Lahan	indeks	37,65	IKU Kota	Kota
- Regulasi bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang yang ditetapkan	regulasi	7,00	IKU Kota	Kota
- Tingkat pelayanan jalan (Level Of Service)	kategori	B	IKU Kota	Kota
- Persentase keterhubungan jalan	persen	100,00	IKU Kota	Kota
- Persentase Penyelenggaraan Event Budaya	persen	122,00	IKU Kota	Kota
- Indeks SPBE	indeks	3,34	IKU Kota	Kota
- IKM Kota	persen	90,70	IKU Kota	Kota
- Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tingkat Kota	skor	97,20	IKU Kota	Kota
- Indeks Merit System	indeks	340,00	IKU Kota	Kota
- Nilai SAKIP Kota	skor	75,57	IKU Kota	Kota
- Opini BPK Atas Laporan Keuangan (IKK *Outcome*)	kategori	WTP	IKU Kota	Kota
- Maturitas SPIP	nilai	3,80	IKU Kota	Kota
- Jumlah OPD yang menyandang predikat WBK/WBBM	OPD	7,00	IKU Kota	Kota

Sumber: RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, 2024

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2025 merupakan rencana kerja tahun keempat atas RPJMD Tahun 2021-2026, disusun dengan memperhatikan RKP Tahun 2025, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang relevan. Tema pembangunan Kota Pekalongan tahun 2025 ditujukan untuk "***Optimalisasi Peningkatan Kesejahteraan dan Kemandirian Dengan Dipayungi Nilai-Nilai Religiusitas***", dan akan dicapai melalui 12 (dua belas) prioritas pembangunan dengan pendekatan mengikuti prinsip *money follows program* dengan orientasi pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS), yaitu:

1. Penguatan sistem kesehatan menjadi responsive dan tangguh, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
2. Sinkronisasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan di dalam percepatan penanggulangan kemiskinan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran dan percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan, baik formal, non formal, maupun lembaga pendidikan keagamaan.
4. Peningkatan *link and match* ketenagakerjaan untuk penyiapan kualitas tenaga kerja berdaya saing.
5. Peningkatan pencegahan, penanganan, rehabilitasi terhadap tindak kekerasan pada perempuan dan anak serta anak yang memerlukan perlindungan khusus.
6. Pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
7. Pembangunan kelembagaan pengelolaan penanganan banjir/rob, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
8. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan air bersih, persampahan dan transportasi perkotaan, dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat regional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan, pelestarian, pemajuan pariwisata, ekonomi kreatif, perdagangan, dan jasa dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
10. Peningkatan SDM budaya yang berwawasan global dengan berpedoman pada budaya lokal.
11. Optimalisasi peran serta *stakeholder* dalam mewujudkan kondusivitas wilayah.
12. Peningkatan kesejahteraan ASN yang dibarengi dengan penguatan implementasi *reward and punishment*.

Melalui 12 (dua belas) prioritas pembangunan tersebut, target-target pembangunan diharapkan dapat tercapai secara maksimal, ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di angka 5,44 - 6,0 persen, menurunnya tingkat kemiskinan di angka 6,75 - 6,50 persen, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 77,39, menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di angka 4,50 - 5,00 persen, dan diikuti pencapaian target-target pada indikator kinerja daerah.

Dengan capaian pembangunan Kota Pekalongan yang maksimal, turut berkontribusi pada keberhasilan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

.

Ditetapkan di Pekalongan
Pekalongan, 9 Juli 2024
WALI KOTA PEKALONGAN
TTD
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan, 2024.

Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2023, 2024.

www.bps.go.id, 2024.

https://idsdjateng.id, 2024.

https://indeks-inovasi.brin.go.id, 2024.

United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

City Of Crafts
and Folk Art
Kota Pekalongan
Designed UNESCO
Creative City In 2014

Pekalongan
World's City of Batik

bappeda.pekalongankota.go.id @bappeda.kotapekalongan @BappedaKotaPKL